Pemerintah Daerah
Kabupaten Mamuju Tengah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025-2029

Mamuju Tengah Daerah Agropolitan, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan





Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah

SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 2025-2029.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode tahun 2025-2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rencana 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
   a. visi dan misi Bupati dan wakil bupati terpilih; dan
   b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah.

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

a. pendahuluan;

b. gambaran umum daerah;

c. visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah;

d. program perangkat daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan

e. penutup.

(2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan pubik.

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD; dan

b. pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kebijakan perencanaan RPJMD;

b. pelaksanaan RPJMD; dan

c. hasil RPJMD.

(4) Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

(5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

(7) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan. Pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangungan Bupati dan wakil bupati wajib Menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.

(2) Penyusunan RKPD 2026 dan 2030 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada RPJMD 2025-2029.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBD tahun pertama periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati terpilih berikutnya.

(4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2026-2029.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 4 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 4 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pembangunan, pelayanan publik, serta tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Visi pembangunan daerah yang ditetapkan adalah:

“Mamuju Tengah Daerah Agropolitan, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi dan kebijakan pembangunan yang menekankan penguatan sektor unggulan berbasis agropolitan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur yang mendukung keterhubungan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta memperhatikan kaidah tata pemerintahan yang baik. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah, serta ketentuan lainnya yang relevan.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 dapat menjadi acuan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil serta manfaat bagi masyarakat.

Mamuju Tengah, 2025

Bupati Mamuju Tengah

ARSAL ARAS

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....
DAFTAR ISI.....
DAFTAR TABEL.....
DAFTAR GAMBAR.....
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH 9
A. Gambaran Umum Kondisi Daerah..... 9
2.1. Aspek Geografi dan Demografi..... 9
2.1.1. Geografi 9
2.1.2. Demografi..... 58
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... 63
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi 63
2.2.2. Kesehatan untuk Semua..... 82
2.2.3. Pendidikan Berkualiatas yang Merata 86
2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif 93
2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 94
2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif 95
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 98
2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia 98
2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi..... 100
2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru 104
2.3.4. Transformasi Digital 105
2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 106
2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro..... 109
2.4 Aspek Pelayanan Umum..... 112
2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif 112
2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial 116
2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan ... 117
2.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintahan 119
B. Gambaran Keuangan Daerah..... 193
2.5 Kinerja Keuangan Masa Lalu 193
2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD 193
2.5.2 Neraca Daerah..... 202
2.5.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 207

2.6 Kerangka Pendanaan 211
2.6.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah 212
C. Permasalahan dan Isu Strategis 215
2.7 Permasalahan 215
1. Masih Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan 215
2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia 215
3. Masih rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat 216
4. Masih rendahnya Daya Saing Daerah 216
5. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal 217
6. Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Wilayah Yang Belum Optimal 218
7. Degradasi lingkungan dan sumber daya alam 218
8. Masih rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik 219
9. Ancaman disharmonisasi dibalik heterogenitas sosial-budaya di Mamuju Tengah 220
10. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah 221
2.8 Isu Strategis 222
2.8.3 Isu Regional 225
2.8.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah Mamuju Tengah 228
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 231
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran 231
3.1.1 Visi 231
3.1.2 Misi 231
3.1.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 233
3.1.4 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 235
3.1.5 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 236
3.1.6 Tujuan dan Sasaran 238
3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah 243
3.2.1 Strategi 243
3.2.2 Arah Kebijakan 269
3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah 302
3.2.4 Lokus Pembangunan Daerah 402

BAB IV **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH** 432
4.1.Program Perangkat Daerah 432
4.2.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 502
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 502
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) 504
4.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) 544
4.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 547
BAB V PENUTUP 550
5.1. Kesimpulan Substansial 550
5.2. Kaidah Pelaksanaan 550
5.3. Pengendalian dan Evaluasi 551

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 2 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 11

Tabel 2. 4 Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah..... 13

Tabel 2. 5 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 14

Tabel 2. 6 Jumlah Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 ... 16

Tabel 2. 7 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 17

Tabel 2. 8 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 17

Tabel 2. 9 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah (Kg), 2020-2024 17

Tabel 2. 10 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah (m^2) tahun 2020-2024..... 18

Tabel 2. 11 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten MamujU Tengah (Kuintal), 2020-2024..... 18

Tabel 2. 12 Luas Area Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah (ribu Ha) Tahun 2020-2024 19

Tabel 2. 13 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah (ribu Ton) Tahun 2020-2024 19

Tabel 2. 14 Populasi Ternak di Kabupaten Mamuju Tengah (Ekor) Tahun 2020-2024..... 19

Tabel 2. 15 Populasi Unggas di Kabupaten Mamuju Tengah (Ekor) Tahun 2020-2024..... 20

Tabel 2. 16 Produksi Perikanan Tangkap di Laut Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 21

Tabel 2. 17 Luas Lahan Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Lahan Pemeliharaan (Ha) 22

Tabel 2. 18 Daya Dukung Penyediaan Pangan Aktual Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 22

Tabel 2. 19 Wilayah Status Daya Dukung Pangan Aktual Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 23

Tabel 2. 20 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan Tahun 2030 berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 24

Tabel 2. 21 Proyeksi Status Wilayah Daya Dukung Pangan Tahun 2030 Berdasarkan Kecamatan pada di Kabupaten Mamuju Tengah 25

Tabel 2. 22 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsusmsi Air Minum Layak..... 27

Tabel 2. 23 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (persen) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 27

Tabel 2. 24 Konsumsi Listrik Per kWh di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 28

Tabel 2. 25 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 29

Tabel 2. 26 Rumah Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 30

Tabel 2. 27 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 31

Tabel 2. 28 Timbulan Sampah yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 32

Tabel 2. 29 Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 (Gg CO_2eq) 33

Tabel 2. 30 Wilayah Kecamatan dengan Risiko Banjir di Kabupaten Mamuju Tengah..... 36

Tabel 2. 31 Tingkat Risiko Tanah Bencana Longsor Tertinggi di Kabupaten Mamuju Tengah..... 37

Tabel 2. 32 Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Mamuju Tengah 39

Tabel 2. 33 Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Mamuju Tengah 41

Tabel 2. 34 Tingkat Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Mamuju Tengah 43

Tabel 2. 35 Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Mamuju Tengah. 45

Tabel 2. 36 Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi di Kabupaten Mamuju Tengah 47

Tabel 2. 37 Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mamuju Tengah 51

Tabel 2. 38 Potensi Luas Multibahaya per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 53

Tabel 2. 39 Potensi Penduduk Terpapar Kerentanan Multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah 54

Tabel 2. 40 Potensi Luas Risiko Multibahaya Kabupaten Mamuju Tengah 55

Tabel 2. 41 Luasan Status Daya Dukung Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 57

Tabel 2. 42 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 2030 berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah 57

Tabel 2. 43 Proyeksi Status Daya Dukung Air Tahun 2030 Menurut Kecamatan pada Kabupaten Mamuju Tengah 58

Tabel 2. 44 Rasio Penduduk Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 60

Tabel 2. 45 Tabel Rasio Jenis Kelamin penduduk Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020 - 2024 60

Tabel 2. 46 Tabel Rasio ketergantungan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 - 2024 61

Tabel 2. 47 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030 62

Tabel 2. 48 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (persen), Tahun 2020-2024 64

Tabel 2. 49 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju Tengah Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan, Status Bekerja, Menggunakan Air Layak dan Jamban, Tahun 2018-2024 66

Tabel 2. 50 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (ribu rupiah) Tahun 2020-2024 70

Tabel 2. 51 Indeks Keluarga Sehat Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 84

Tabel 2. 52 Prevalensi Stunting Berdasarkan SKI Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 84

Tabel 2. 53 Prevalensi Stunting Berdasarkan (e-PPGBM) Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 85

Tabel 2. 54 Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 85

Tabel 2. 55 Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 86

Tabel 2. 56 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 93

Tabel 2. 57 Potensi Konflik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 94

Tabel 2. 58 Nilai Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 95

Tabel 2. 59 Indeks Infrastruktur Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 108

Tabel 2. 60 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 109

Tabel 2. 61 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 110

Tabel 2. 62 Capaian Indeks SPBE, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 112

Tabel 2. 63 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 114

Tabel 2. 64 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 118

Tabel 2. 65 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 122

Tabel 2. 66 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 122

Tabel 2. 67 Jumlah Murid, Guru, Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 123

Tabel 2. 68 Angka Stunting Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 123

Tabel 2. 69 Angka Gizi Buruk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 124

Tabel 2. 70 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 125

Tabel 2. 71 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 125

Tabel 2. 72 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 126

Tabel 2. 73 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 126

Tabel 2. 74 Penemuan Kasus Penyakit di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 127

Tabel 2. 75 Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, K4, Kurang Energi Kronis, Serta Mendapatkan Tablet Zat Besi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 127

Tabel 2. 76 Persentase Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahuun 2020-2024..... 128

Tabel 2. 77 Kondisi Panjang Jalan di Kabupatyen Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 129

Tabel 2. 78 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 130

Tabel 2. 79 Kondisi Jembatan (Unit) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 130

Tabel 2. 80 Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten di Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 131

Tabel 2. 81 Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 133

Tabel 2. 82 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 133

Tabel 2. 83 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan 134

Tabel 2. 84 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 135

Tabel 2. 85 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 135

Tabel 2. 86 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 136

Tabel 2. 87 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 137

Tabel 2. 88 Persentase Pelanggaran yang Ditangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 137

Tabel 2. 89 Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 138

Tabel 2. 90 Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 139

Tabel 2. 91 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketenteraman Umum Tahun 2020-2024 140

Tabel 2. 92 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 140

Tabel 2. 93 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 141

Tabel 2. 94 Tingkat Pengangguran Terbuka, Partisipasi Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023 .. 141

Tabel 2. 95 Status Pekerjaan Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2024 143

Tabel 2. 96 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023 143

Tabel 2. 97 Data Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 144

Tabel 2. 98 Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 144

Tabel 2. 99 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 145

Tabel 2. 100 Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 145

Tabel 2. 101 Persentase Desa Layak Anak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 146

Tabel 2. 102 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 147

Tabel 2. 103 Aduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 148

Tabel 2. 104 Timbulan Sampah yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 148

Tabel 2. 105 Pelayanan Persampahan yang Ditangani Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 149

Tabel 2. 106 Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Peraturan 150

Tabel 2. 107 Ketersediaan Ruang Trebuka Hijau di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 151

Tabel 2. 108 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Mamuju Tengah 151

Tabel 2. 109 Produksi Komoditas Pangan Nabati(Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 153

Tabel 2. 110 Produksi Komoditas Pangan Hewani (Ton) di Kabupaten 153

Tabel 2. 111 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten 154

Tabel 2. 112 Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023 154

Tabel 2. 113 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten..... 155

Tabel 2. 114 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 156

Tabel 2. 115 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2024..... 156

Tabel 2. 116 Persentase Penetapan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai 157

Tabel 2. 117 Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes Tepat Waktu di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 158

Tabel 2. 118Persentase BUMdes yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 159

Tabel 2. 119 Total Fertility Rate di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 159

Tabel 2. 120 Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 160

Tabel 2. 121Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 160

Tabel 2. 122Cakupan Anggota Bina Keluarga yang Ber-KB di Kabupaten.... 161

Tabel 2. 123 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahterah di Setiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 161

Tabel 2. 124 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 162

Tabel 2. 125 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 163

Tabel 2. 126 Persentase Ruas Jalan yang Didukung Jalan Memadai di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 164

Tabel 2. 127 Potensi Titik Parkir Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 165

Tabel 2. 128 Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 165

Tabel 2. 129 Indeks Sistem Informasi Berbasis Elektronik di 166

Tabel 2. 130 Persentase PPID Yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 167

Tabel 2. 131 Ketersediaan Jaringan Internet di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 167

Tabel 2. 132 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 168

Tabel 2. 133 Jumlah UMKM Aktifdi Kabupaten Mamuju Tengah, ... 168

Tabel 2. 134 Laju Investas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 169

Tabel 2. 135 Persentase Informasi yang Terintegrasi di 170

Tabel 2. 136 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 171

Tabel 2. 137 Jumlah Metada Statisk yang dibuat di 171

Tabel 2. 138 Jumlah Buku Statistik Sektoral yang Diterbitkan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 172

Tabel 2. 139 Jumlah Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 172

Tabel 2. 140 Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 172

Tabel 2. 141 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 173

Tabel 2. 142 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 174

Tabel 2. 143 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan di 174

Tabel 2. 144 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 175

Tabel 2. 145 Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif di 176

Tabel 2. 146 Persentase Pelatih Olahraga yang Bersertifikat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 176

Tabel 2. 147 Prestasi Cabang Olahraga di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023 177

Tabel 2. 148 Prestasi Atlet Berprestasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024 177

Tabel 2. 149 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 178

Tabel 2. 150 Jumlah Objek Wisata Unggulandi Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 -2024 178

Tabel 2. 151 Rata-Rata Lama Tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 179

Tabel 2. 152 Desa Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 181

Tabel 2. 153 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Pertanian di..... 181

Tabel 2. 154 Jumlah Produksi Komoditas Sayuran (Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 182

Tabel 2. 155 Jumlah Produksi Komoditas Buah-Buahan (Kwintal) di 183

Tabel 2. 156 Jumlah Produksi Komoditas Biofarmaka (Kg) di..... 184

Tabel 2. 157 Luas Lahan Sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)..... 184

Tabel 2. 158 Produksi Ternak Ruminansia Dan Unggas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 185

Tabel 2. 159 Luas Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Produktifitas Perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 186

Tabel 2. 160 Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024..... 187

Tabel 2. 161 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024..... 187

Tabel 2. 162 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 188

Tabel 2. 163 Jumlah Kapal dan Perahuvdi Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024..... 188

Tabel 2. 164 Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024..... 189

Tabel 2. 165 Cakupan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 190

Tabel 2. 166 Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024..... 190

Tabel 2. 167 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024..... 191

Tabel 2. 168 Kondisi Industri Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024 192

Tabel 2. 169 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020-2024 194

Tabel 2. 170 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Beserta Komponen-komponennya Tahun 2020-2024 199

Tabel 2. 171 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023 201

Tabel 2. 172 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 203

Tabel 2. 173 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019-2023 206

Tabel 2. 174 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun Anggaran 2020-2024 209

Tabel 2. 175 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun Anggaran 2019-2023 210

Tabel 2. 176 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun Anggaran 2020-2024 211

Tabel 2. 177 Proyeksi APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025-2029 213

Tabel 3. 1 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 233

Tabel 3. 2 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 denga Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 234

Tabel 3. 3 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 235

Tabel 3. 4 Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 235

Tabel 3. 5 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 236

Tabel 3. 6 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 236

Tabel 3. 7 Keselarasan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 237

Tabel 3. 8 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 239

Tabel 3. 9 Penahapan Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030 244

Tabel 3. 10 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 269

Tabel 3. 11 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Pencapaian Sasaran Pada Setiap Misi 271

Tabel 3. 12 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 302

Tabel 3. 13 Sasaran Strategis Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) 337

Tabel 3. 14 Sasaran Strategis Tema Prioritas Daerah 391

Tabel 3. 15 Program Indikatif Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi yang Terkait Tema Prioritas Daerah 399

Tabel 3. 16 Lokus Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030 402

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030 433

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030 502

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 504

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030 518

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030 533

Tabel 4. 6 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 544

Tabel 4. 7 Indikator TPB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030 548

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah 11
Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah 12
Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Mamuju Tengah..... 14
Gambar 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 26
Gambar 2. 5 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 34
Gambar 2. 6 Peta Risiko Banjir Kabupaten Mamuju Tengah 35
Gambar 2. 7 Luas Risiko Banjir di Kabupaten Mamuju Tengah 36
Gambar 2. 8 Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Mamuju Tengah 37
Gambar 2. 9 Luas Risiko Tanah Longsor (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah 38
Gambar 2. 10 Peta Risiko Cuaca Ektrem Kabupaten Mamuju Tengah..... 39
Gambar 2. 11 Luas Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Mamuju Tengah..... 40
Gambar 2. 12 Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Mamuju Tengah..... 41
Gambar 2. 13 Luas Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Mamuju Tengah 42
Gambar 2. 14 Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Mamuju Tengah..... 43
Gambar 2. 15 Luas Risiko Gempabumi (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah .. 43
Gambar 2. 16 Peta Risiko Tsunami di Babupaten Mamuju Tengah 44
Gambar 2. 17 Luas Risiko Tsunami (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah..... 45
Gambar 2. 18 Peta Risiko Likuefaksi di Kabupaten Mamuju Tengah 47
Gambar 2. 19 Luas Risiko Likuefaksi (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah 48
Gambar 2. 20 Peta Risiko Kekeringan Di Kabupaten Mamuju Tengah 49
Gambar 2. 21 Luas Risiko Kekeringan (Ha) Kabupaten Mamuju Tengah 50
Gambar 2. 22 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mamuju Tengah..... 51
Gambar 2. 23 Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Kabupaten Mamuju Tengah..... 52

Gambar 2. 24 Luas Risiko Bencana Multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah. 53

Gambar 2. 25 Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Mamuju Tengah 54

Gambar 2. 26 Luas Risiko Multibahaya (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah .. 56

Gambar 2. 27 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020-2024 59

Gambar 2. 28 Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024 59

Gambar 2. 29 Proyeksi Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2030 .. 61

Gambar 2. 30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah (persen) Tahun 2020-2024 63

Gambar 2. 31 persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 67

Gambar 2. 32 PDRB Per Kapita Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional (ribu rupiah) Tahun 2020-2024 69

Gambar 2. 33 Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 71

Gambar 2. 34 Gini Ratio Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 75

Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 79

Gambar 2. 36 Perbandingan IPM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 79

Gambar 2. 37 Usia Harapan Hidup Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 83

Gambar 2. 38 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 87

Gambar 2. 39 Harapan Lama Sekolah (HLS) Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 88

Gambar 2. 40 Angka Literasi Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2021-2023 88

Gambar 2. 41 Angka Literasi Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2024 88

Gambar 2. 42 Angka Numerasi Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2021-2023 90

Gambar 2. 43 Angka Numerasi Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2024 91

Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 91

Gambar 2. 45 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 93

Gambar 2. 46 Nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024..... 96

Gambar 2. 47 Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024..... 96

Gambar 2. 48 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024 97

Gambar 2. 49 Indeks Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 98

Gambar 2. 50 Angka Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 99

Gambar 2. 51 Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB ADHB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 102

Gambar 2. 52 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 103

Gambar 2. 53 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Nasional Tahun 2018-2022..... 104

Gambar 2. 54 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018-2022..... 104

Gambar 2. 55 Tingkat Inflasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024 111

Gambar 2. 56 Perbandingan capaian Indeks SPBE antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 113

Gambar 2. 57 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 . 114

Gambar 2. 58 Nilai SPI Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023 115

Gambar 2. 59 Persentase Capaian Aksi HAM Mamuju Tengah Tahun 2022-2024..... 116

Gambar 2. 60 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 120

Gambar 2. 61 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020-2024 120

Gambar 2. 62 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 121

Gambar 2. 63 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023 (persen) 195

Gambar 2. 64 Postur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 196

Gambar 2. 65 Perkembangan Postur Dana Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023 197

Gambar 2. 66 Perkembangan Postur LLPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023 (MILYAR RUPIAH) 197

Gambar 2. 67 Struktur Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 (Persen) 200

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen daerah untuk 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi-misi kepala daerahterpilih yang disampaikan pada masa kampanye. Melalui RPJMD, visi-misi kepala daerah terpilih yang merupakan komitmen politik diterjemahkan secara teknokratis dalam kinerja yang terukur serta disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Penyusunan RPJMD merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan, sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam dokumen RPJMD, pemerintah daerah wajib merespon kebijkan nasional yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 02 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mengharuskan urusan wajib terkait pelayanan dasar dalam pemerintahan daerah diselenggarakan dengan mengacu pada SPM. Dan Peraturan Menteri Dalam Negerri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang mengharuskan integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam perencanaan daerah.

Proses penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah mengacu pada proses dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan peraturan tersebut secara garis besar dalam tahapan penyusunan RPJMD meliputi penyusunan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD, Orientasi mengenai RPJMD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD, Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD, dan penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045. Agar terbangun konsistensi antara RPJMD dengan

RPJPD, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah mengacu kepada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan pada RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045.

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun disusun sebagai penjabaran Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan 2025-2030. Kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 adalah Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si sebagai Bupati dan Dr. H. Askary Anwar, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Bupati.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peratiran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);

21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tenatang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembanghunan Jangka Menengah Daerah;
26. Peraturan Menteri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
32. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;
35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangak Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045;
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037.
38. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut:

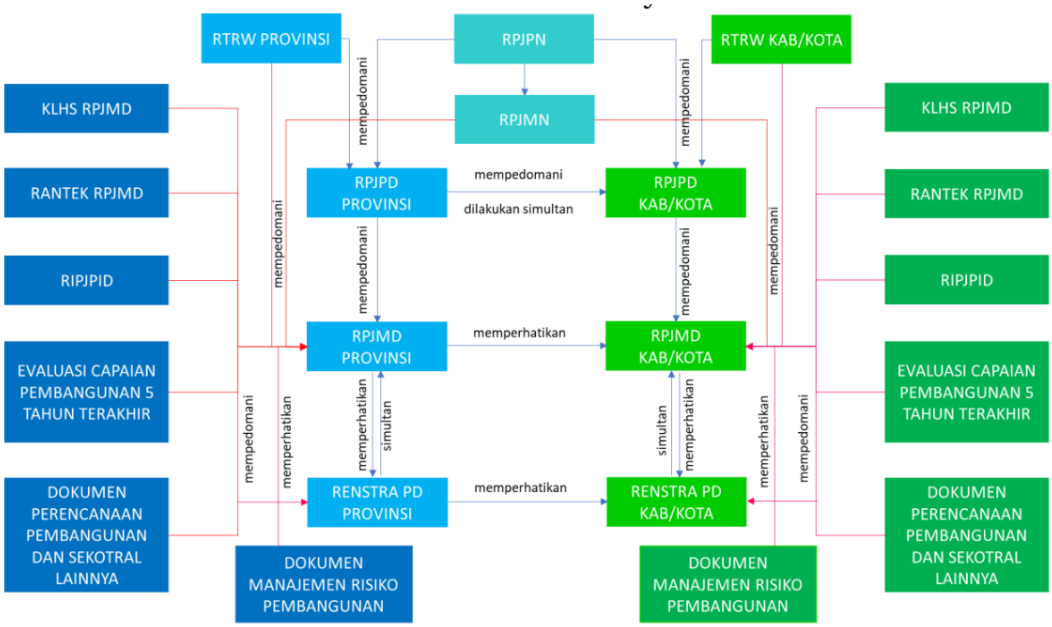
1. RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJM Nasional 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Dokumen-dokumen ini berisikan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang dan menengah untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 mengacu pada RPJPN dan RPJMN.
2. RPJPD dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat merupakan acuan bagi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah baik untuk arahan pembangunan jangka panjang maupun menengah.
3. RTRW Provinsi Sulawesi Barat dan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah merupakan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah khususnya dalam perspektif perencanaan dan pemanfaatan ruang.
4. RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029 merupakan pedoman bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah, yakni dokumen Renstra Perangkat Daerah, RKPD Kabupaten Mamuju Tengah dan

Renja Perangkat Daerah serta menjadi tolok ukur perkembangan kinerja pelaksanaan pemerintah daerah selanjutnya.

Selain hubungannya dengan beberapa dokumen perencanaan tersebut, RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah juga perli memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain:

1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029;
2. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM);
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);
4. Rencana Induk Peta Jalan Pengembangan Inovasi Daerah (RIPJPID)

Gambar 1. 1 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

1.4. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2030, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat

sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 sehingga terbangun konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan pencapaian kinerja pembangunan daerah dapat lebih efektif.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan arahan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029, RPJMD Kabupaten mamuju Tengah disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN; memuat latar belakang penyusunan RPJMD, dasarhukum yang relevan dan signifikan, hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, menguraikan maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD, dan menjelaksan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH; menjelaskan dan menyajikan data-data dan informasi dengan empat pendekatan aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Memuat gambaran keuangan daerahndan permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH; bab ini menguraikan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; memuat rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu

pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah 2030-2034. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP; berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan perencanaan periode selanjutnya.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024) dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.

Penyajian hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir diutamakan berkaitan dengan capaian IKD sehingga tidak perlu menyajikan capaian program dan realisasi anggarannya.

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Geografi

1) *Posisi dan Peran Strategis Daerah*

Menjelaskan letak geografis dan batas wilayah serta fungsi atau kontribusi daerah terhadap wilayah sekitar atau wilayah yang lebih luas. Kontribusi dapat berupa ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, dan lainnya sesuai dengan karakteristik daerah.

a) Batas Administrasi dan Letak Geografis

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu dari 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tanggal 11 Januari Tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.014,37 km^2. Berdasarkan dokumen revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2022, terdapat perubahan luas kabupaten mamuju tengah. Terdapat perubahan beberapa segmen batas administrasi antar kabupaten/provinsi dimana saat ini terdapat 2 batas administrasi definitif. Berdasarkan data batas administrasi termutakhir dengan mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Berita Acara Kesepakatan antar Kabupaten, luas Kabupaten Mamuju Tengah berubah menjadi 276.161,62 Ha (2.761,62 Km^2) atau 16,45% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat (16.787,18 km^2). Secara Astronomis Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada 1˚43’42,90” – 2˚18’30,08” Lintang Selatan dan 119˚7’41,60” – 119˚52’12,97” Bujur Timur. Dan secara Geografis terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, dengan batas-batas dan status administrasi sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara, yang mana batas ini masih bersifat indikatif. Batas kedua kabupaten disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan No.27/BAD II/VI/2021 tanggal 4 Juni 2021 yang ditandatangani oleh kedua kabupaten.

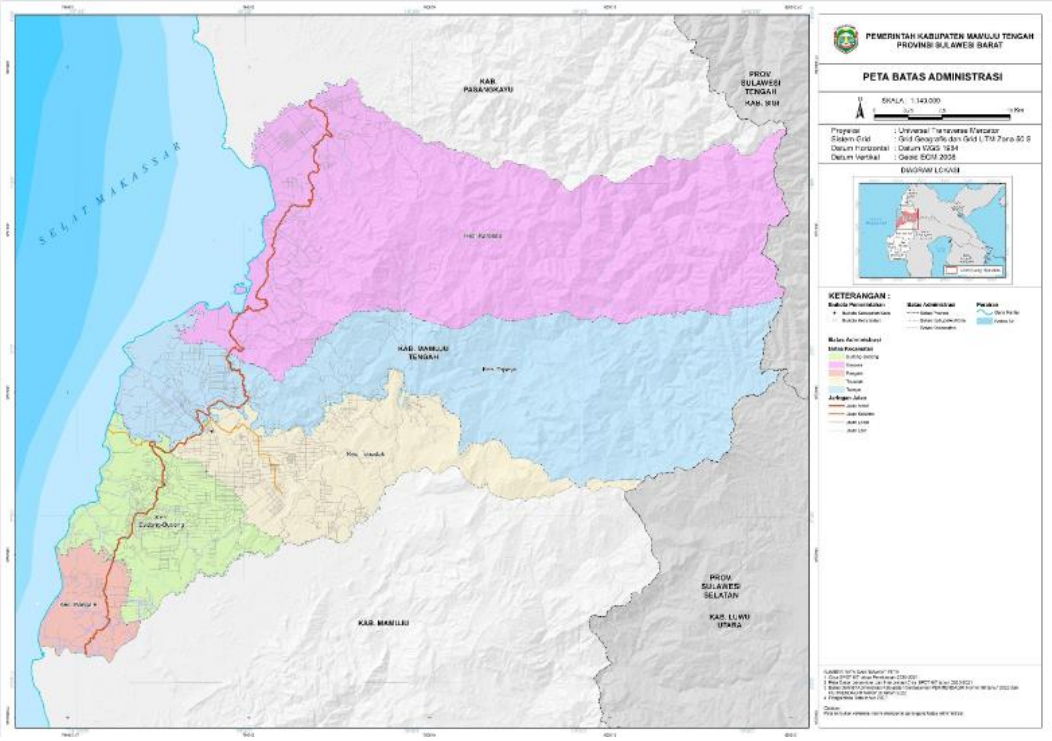
b. Sebelah timur berbatasan dengan :
   - Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, dan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 60 Tahun 2022 yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 25-27 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh kedua kabupaten.
   - Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang mana batas ini masih bersifat indikatif. Batas kedua kabupaten disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan No. 93/BADIII/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 yang ditandatangani oleh kedua kabupaten.

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sampaga dan Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju, yang mana telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2022 yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 14-16 Juni 2017 yang ditandatangani oleh kedua kabupaten.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar (UU 23 2014 pasal 14 ayat 6 tentang batas wilayah pesisir - penataan kembali batas dan luas wilayah kabupaten, Kecamatan, desa).

Letak Kabupaten Mamuju Tengah berada pada jalur yang sangat strategis karena berada pada posisi jalur perdagangan trans Sulawesi, berada di antara provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di jalur darat. Jalur laut Kabupaten Mamuju Tengah berbatasan dan berdekatan dengan Provinsi Kalimantan Timur (Rencana IKN) sehingga kedepannya Kabupaten Mamuju Tengah dapat menjadi Jalur perdagangan atau transportasi dari daerah lain di Sulawesi ke IKN. Hal ini menjadi sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, hasil pertanian, perkebunan dan peternakan Mamuju Tengah dapat menyokong kebutuhan di IKN.

Gambar 2. 1 Peta Batas Administrasi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah 2022-2037

Kabupaten Mamuju Tengah, secara administrasi pemerintahan terdiri atas 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Karossa, 54 Desa dan 4 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Topoyo, yaitu sebanyak 15 desa. Sedangkan, jumlah desa terkecil yaitu Kecamatan Tobadak yang terdiri atas 8 desa. Secara geografis, Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari 4 kecamatan tepi pantai dan 1 kecamatan bukan pantai. Dengan perincian 16 desa pantai dan 38 desa bukan pantai. Luas wilayah menurut kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

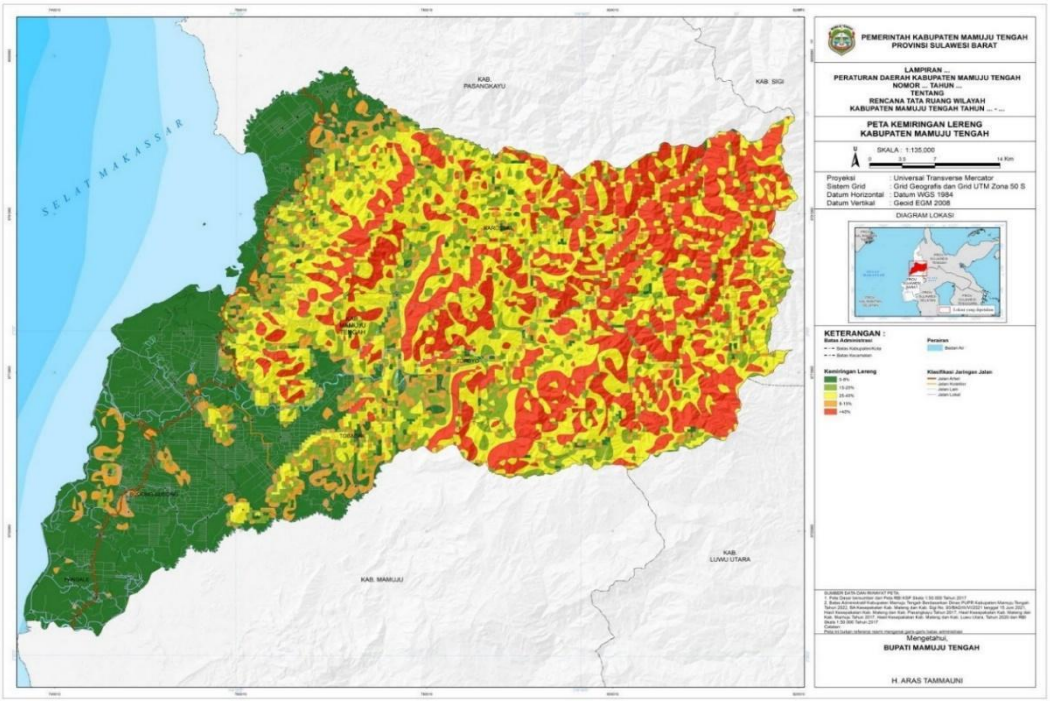
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pangale	9.563,64	3,46
2	Budong-Budong	25.607,97	9,27
3	Tobadak	37.721,26	13,66
4	Topoyo	86.761,85	31,42
5	Karossa	116.506,90	42,19
Mamuju Tengah		**276.161,62**	**100,00**

Sumber: RTRW Mamuju Tengah Tahun 2022-2037

b) Kondisi Topografi dan Kemiringan

Kabupaten Mamuju Tengah terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan Klasifikasi kemiringan lereng yang menunjukkan kondisi fisik lahan dibagi dengan berdasarkan pada SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 Tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung. Secara keseluruhan persebaran kelas lereng Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 2. 2 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: RTRW Kabupaten Mamuju Tengah 2022-2037

Berdasarkan peta kemiringan lereng, bagian wilayah yang termasuk datar adalah bagian sebelah barat yang berbatasan dengan Selat Makassar. Sebaliknya, semakin ke Timur secara gradual juga tingkat kemiringan ini semakin tinggi dengan kondisi lahan yang bergelombang dan berbukit. Kemiringan lereng 0-8% yang berada di bagiain Barat meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Adapun kelerengan >40% berada di bagian Timur meliputi sebagian wilayah di Kecamatan Karossa, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Topoyo. Umumnya wilayah dengan kelerengan >40% adalah wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Secara jelas, kemiringan lereng dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 2 Kemiringan Lereng Kabupaten Mamuju Tengah

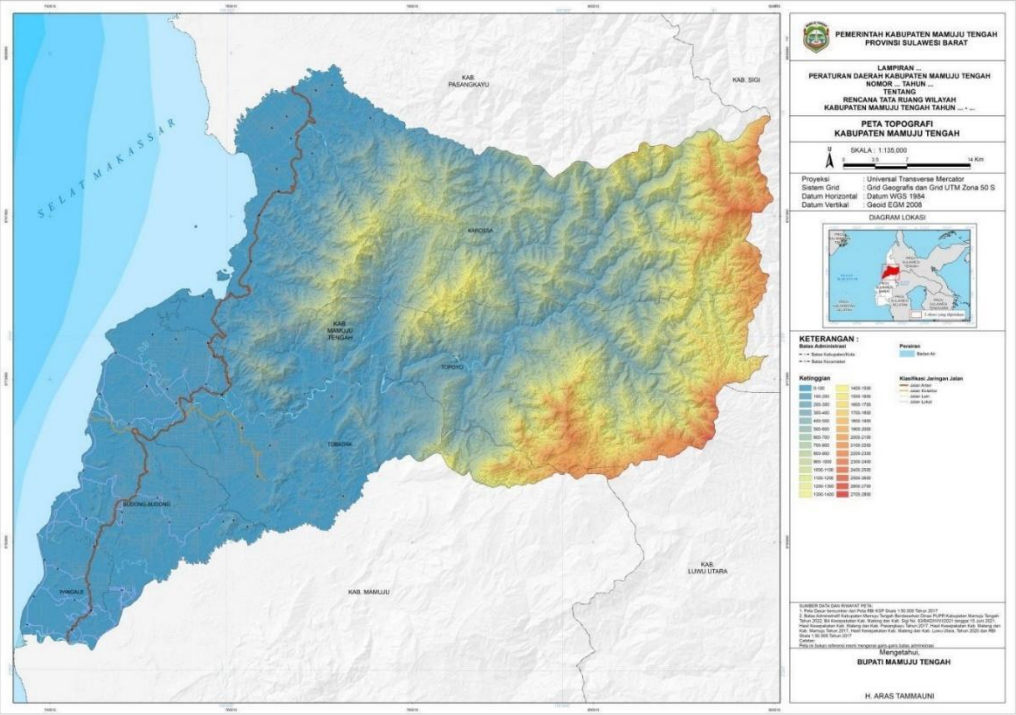
No	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	> 45%	
		Datar	Landai	Agak Curam	Curam	Sangat Curam	
1	Pangale	9.419,72	143,92	-	-	-	9.563,64
2	Budong-Budong	21.686,62	2.798,04	700,33	422,98	-	25.607,97
3	Tobadak	15.289,10	5.840,94	6.580,47	7.140,61	2.870,13	37.721,26
4	Topoyo	15.543,77	3.771,86	9.785,28	30.844,27	26.816,68	86.761,85
5	Karossa	16.131,42	7.280,46	14.400,36	41.257,00	37.437,66	116.506,9
Total		**78.070,63**	**19.835,22**	**31.466,44**	**79.664,86**	**67.124,47**	**276.161,6**

Sumber: RTRW Mamuju Tengah Tahun 2022-2037

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa keadaan lereng di Kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar berada pada kemiringan 25-45% (curam) sebesar 79.664,86 Ha. sedangkan wilayah dengan kemiringan lereng antara 8-15% (landai) memiliki luas paling kecil yaitu sebesar 19.835,22 Ha. Kemiringan lereng berdasarkan kecamatan yaitu di Kecamatan Pangale memiliki kemiringan lereng antara 0-15% yang terbagi atas dua kelas yaitu datar dan landai dan didominasi oleh datar (0-8%) seluas 9.419,72 Ha, diikuti landai (8-15%) seluas 143,92 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Budong- Budong didominasi oleh datar (0-8%) seluas 21.686,62 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu curam (25-45%) seluas 422,98 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Tobadak didominasi oleh datar (0-8%) seluas 15.289,10 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu sangat curam (>45%) seluas 2.870,13 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Topoyo didominasi oleh curam (25-45%) seluas 30.844,27 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu landai (8-15%) seluas 3.771,86 Ha. Kemiringan lereng di Kecamatan Karossa didominasi oleh curam (25-45%) seluas 41.257,00 Ha dan kemiringan lereng dengan luas paling kecil yaitu landai (8-15%) seluas 7.280,46 Ha.

Kemiringan lereng merupakan salah satu faktor dalam menentukan kesesuaian atau daya dukung lahan. Apabila kelerengan mencapai batas yang ekstrim (>45%), dapat menjadi faktor limitasi pengembangan, dan diperlukan rekayasa teknologi untuk mengatasinya.

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: RTRW Mamuju Tengah Tahun 2022-2037

Ketinggian wilayah Kabupaten Mamuju Tengah bervariasi dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian antara 0-2.800 meter di atas permukaan laut (dpl). Di wilayah bagian barat merupakan kawasan pesisir pantai dengan topografi dataran rendah dan ketinggian <500 meter di atas permukaan laut (dpl).

Wilayah topografi datar umumnya terdapat di bagian Barat meliputi sebagian wilayah di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoyo, dan Kecamatan Tobadak serta seluruh bagian wilayah di dua kecamatan yaitu di Kecamatan Budong-Budong dan Kecamatan Pangale.

Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah Tiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)					Total
	Pangale	Budong-budong	Tobadak	Topoyo	Karossa	
0-100	9.563,6	25.164,54	21.919,5	18.678,5	21.352,69	96.678,95
100-200		383,65	5.067,21	4.543,59	7.003,87	16.998,32
200-300		59,78	2.781,76	5.092,58	6.194,28	14.128,40
300-400			1.540,99	5.239,38	7.492,84	14.273,21
400-500			570,24	4.781,86	8.709,55	14.061,64
500-600			457,96	4.284,18	8.677,61	13.419,75

Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)					Total
	Pangale	Budong-budong	Tobadak	Topoyo	Karossa	
600-700			478,66	4.101,45	8.457,51	13.037,62
700-800			568,36	3.745,87	7.956,45	12.270,68
800-900			428,03	3.367,17	7.379,37	11.174,57
900-1.000			374,93	3.088,25	6.137,58	9.600,76
1.000-1.100			325,01	3.187,07	4.659,99	8.172,07
1.100-1.200			203,11	3.077,18	3.741,57	7.021,86
1.200-1.300			258,24	2.691,68	2.964,52	5.914,44
1.300-1.400			315,29	2.750,71	2.299,90	5.365,90
1.400-1.500			320,40	2.889,45	1.883,70	5.093,55
1.500-1.600			339,72	3.125,19	1.772,53	5.237,44
1.600-1.700			414,02	2.680,15	1.823,08	4.917,25
1.700-1.800			476,86	2.265,77	1.801,48	4.544,11
1.800-1.900			228,80	2.090,80	1.730,25	4.049,85
1.900-2.000			180,65	2.075,07	1.572,95	3.828,67
2.000-2.100			268,62	1.541,60	1.345,75	3.155,97
2.100-2.200			164,60	817,36	886,18	1.868,13
2.200-2.300			38,26	301,98	435,50	775,73
2.300-2.400				170,93	191,92	362,85
2.400-2.500				97,30	35,82	133,12
2.500-2.600				50,22		50,22
2.600-2.700				21,11		21,11

Ketinggian	Luas Wilayah (Ha)					Total
	Pangale	Budong-budong	Tobadak	Topoyo	Karossa	
2.700-2.800				5,43		5,43
Total	**9.563,6**	**25.607,9**	**37.721,3**	**86.761,8**	**116.506,9**	**276.161,6**

Sumber: RTRW Mamuju Tengah Tahun 2022-2037

2) Potensi Sumber Daya Alam

Menjelaskan potensi sumber daya alam yang merupakan keunggulan komparatif daerah sehingga dapat dijadikan potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan dalam memajukan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

a) Potensi Sumber Daya Alam

Sektor tanaman pangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang termasuk kedalam sektor yang sangat potensial dalam memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Adapun komoditas pada tanaman pangan di Kabupaten Mamuju Tengah diantaranya adalah padi, jagung, dan kedelai.

Tabel 2. 4 Jumlah Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No.	Jenis Tanaman		2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	Produksi (Ton)	30.849,32	23.753,20	23.726,50	18.710,00	15.823,80
		Luas Panen (Ha)	5.907,00	5.010,00	4.909,00	3.818,00	3.249,00
2	Jagung	Produksi (Ton)	55.926,60	25.057,30	15.933,60	14.655,83	14.399,80
		Luas Panen (Ha)	11.061,00	5.066,00	3.162,00	3.054,90	3.026,00
3	Kedelai	Produksi (Ton)	141,60	4,50	0,94	17,60	n.a
		Luas Panen (Ha)	177,00	6,00	1,20	22,00	n.a

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Mamuju Tengah, 2025

b) Potensi Sektor Holtikultura

Holtikultura merupakan salah satu sub sektor pertanian yang memiliki kontribusi penting dalam pertanian di Indonesia. Dalam rangka pembangunan pertanian, pemerintah terus melakukan pengembangan di subsektor holtikultura. Pengembangan holtikultura juga merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan diversifikasi produk pertanian sehingga dapat menambah pangsa pasar dan daya saing. Sektor holtikultura di Kabupaten Mamuju Tengah sendiri mencakup Tanaman Sayuran, Tanaman Biofarmaka dan Buah-buahan. Penjabaran

lebih rinci terkait jumlah produksi di tiap Kecamatannya ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No.	Jenis Tanaman	Produksi (Kuintal)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sayuran						
1	Bawang Merah	184	-	10	-	-
2	Bawang Daun	273	569	232	274	140
3	Bawang putih	-	-	-	-	-
4	Bayam	1.077	1.206	722	785	814
5	Cabai Keriting	-	2.032	1.728	1.215	1.255
6	Cabai rawit	2.044	2.401	1.408	1.724	1.120
7	Kacang Panjang	2.157	2.694	1.302	1.610	1.016
8	Kangkung	1.349	1.751	1.169	1.267	1.009
9	Ketimun	2.066	2.635	1.498	1.611	1.009
10	Petai	622	886	558	594	427
11	Terung	1.845	2.319	1.232	1.505	1.234
12	Tomat	1.468	2.140	996	925	228
Buah-buahan						
1	Semangka	2.120	1.461	780	1.612	2.125

Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 6 Luas Panen Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sayuran						
1	Bawang Merah	7		1		-
2	Bawang Daun	27	53	23	25	21
3	Bawang putih					-
4	Bayam	53	65	43	47	58
5	Cabai Keriting		61	55	44	49
6	Cabai rawit	58	76	53	62	52
7	Kacang Panjang	62	80	51	62	60
8	Kangkung	68	93	68	73	74
9	Ketimun	46	59	41	45	41
10	Petai	49	68	55	58	54
11	Terung	46	58	34	44	50
12	Tomat	40	57	34	29	9
Buah-buahan						
1	Semangka	26	34	13	22	28

Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 7 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah (Kg), 2020-2024

No.	Jenis Tanaman	Produksi (kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jahe		9.135	12.755	21.108	36.23
2	Kencur		7.304	8.341	15.857	29.039
3	Kunyit		9.184	11.124	20.879	34.454
4	Laos		8.616	13.314	16.691	34.369

Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 8 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah (m^2) tahun 2020-2024

No.	Jenis Tanaman	Luas Panen (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jahe		2.793	2.475	4.785	7.945
2	Kencur		1.590	1.443	4.097	6.064
3	Kunyit		2.385	1.909	3.895	6.360
4	Laos		1.625	1.415	2.065	3.940

Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 9 Produksi Buah-Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten MamujU Tengah (Kuintal), 2020-2024

No.	Jenis Tanaman	Produksi (Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Alpukat	447	1.192	909	1.150	612
2	Belimbing	65	113	73	77	57
3	Duku/Langsat	21.390	18.692	622	17.420	1.585
4	Durian	45.245	84.837	126.183	184.053	113.954
5	Jambu Air	510	683	951	1.817	929
6	Jambu Biji	298	574	1.153	683	479
7	Jeruk Besar	610	622	288	248	268
8	Jeruk Siam	82.381	154.949	158.804	115.535	57.295
9	Mangga	2.016	11.955	1.274	10.227	4.337
10	Manggis	162	322	74	216	125
11	Nangka	21.823	18.790	20.812	13.382	9.859
12	Nenas	771	1.225	1.432	862	720
13	Pepaya	1.009	1.733	2.441	1.853	1.087
14	Pisang	361.897	431.355	948.369	838.276	609.708
15	Rambutan	31.526	28.706	34.635	37.571	17.823
16	Salak	199	205	198	259	308
17	Sawo	562	648	470	167	116.12
18	Sirsak	189	503	230	74	625
19	Sukun	195	339	386	209	78’56
20	Buah Naga		5.514	2.133	835	116,12
21	Lengkeng		529	58	210	78,56

Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, 2025

c) Potensi Sektor Perkebunan

Sektor perkebunan merupakan salah satu andalan bagi pendapatan nasional dan devisa negara Indonesia, sehingga diharapkan dapat memperkokoh pembangunan perkebunan secara menyeluruh di tiap daerah. Di Kabupaten Mamuju Tengah sendiri, perkebunan yang diusahakan oleh masyarakat diantaranya terdapat 3 jenis yang dominan diantaranya yaitu Perkebunan Kelapa Sawit, Kelapa, dan Kakao.

Tabel 2. 10 Luas Area Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah (ribu Ha) Tahun 2020-2024

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ribu Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa sawit	34,1	36,2	36,2	36,2	36,2
2	Kelapa	1,5	1,4	1,5	1,5	1,5
3	Kakao	14,9	14,9	14,9	14,8	14,8

Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, 2025

Tabel 2. 11 Produksi Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Mamuju Tengah (ribu Ton) Tahun 2020-2024

No.	Jenis Tanaman	Luas Areal (Ribu Ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Minyak kelapa sawit	42,0	97,0	97,2	7,1	72,1
2	Kelapa	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0
3	Kakao	6,7	8,9	8,5	8,4	8,4

Sumber: Mamuju Tengah Dalam Angka, 2025

d) Potensi Sektor Peternakan

Sektor peternakan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan daerah, karena permintaan protein hewani akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan bergizi tinggi sebagai pengaruh dari naiknya tingkat pendidikan rata-rata penduduk.

Tabel 2. 12 Populasi Ternak di Kabupaten Mamuju Tengah (Ekor) Tahun 2020-2024

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Sapi Potong**	15.373	15.557	15.557	15.991	8.715
2	**Kerbau**	171	183	179	132	65
3	**Kuda**	106	107	107	110	6
4	**Kambing**	9.158	9.245	9.245	9.502	2.376
5	**Babi**	28.433	28.791	28.791	29.593	7.005

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Tabel 2. 13 Populasi Unggas di Kabupaten Mamuju Tengah (Ekor) Tahun 2020-2024

No.	Jenis Ternak	Jumlah Ternak (Ekor)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	**Ayam**	1.195.228	1.195.228	1.209.930	1.333.579	111.021
2	**Itik**	40.431	40.802	40.802	38.715	4.187

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

e) Potensi Sektor Perikanan

Pembangunan sektor perikanan merupakan suatu proses atau upaya manusia dalam memanfaatkan segala bentuk sumber daya hayati perikanan dan sumber daya perairan melaluI kegiatan berupa penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan seiring dengan penerapan dan pengembangan IPTEK, pengembangan produk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, penambahan jumlah peluang kerja dan usaha, serta meningkatnya devisa negara yang disertai dengan upaya dalam memelihara dan melestarikan sumber daya hayati dan lingkungan. Secara geografis, Kabupaten Mamuju Tengah berbatasan langsung dengan Selat Makassar di sebelah barat. Kondisi ini memberi peluang yang cukup potensial untuk pengembangan sub sektor perikanan selain sektor transportasi. Pengembangan perikanan di Mamuju Tengah terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi kawasan peruntukan perikanan tangkap, kawasan peruntukan perikanan budidaya, kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan. Kawasan peruntukan perikanan berfungsi untuk menghasilkan produk perikanan dan membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Rencana pengembangan kawasan perikanan di Kabupaten Mamuju Tengah, meliputi:

- *Perikanan Tangkap*

  Kawasan peruntukan perikanan tangkap merupakan kawasan yang dimanfaatkan untuk usaha penangkapan ikan atau organisme air lainnya yang berada di wilayah pesisir. Kriteria kawasan peruntukan perikanan tangkap adalah ruang laut atau perairan yang berjarak 0 sampai 4 mil dari garis pantai. Kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Mamuju Tengah diatur lebih lanjut dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Barat. Dimana berdasarkan data RZWP3K, kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Mamuju Tengah ditetapkan pada wilayah perairan Kecamatan Budong-Budong, Karossa, Pangale dan Topoyo. Berikut Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 2. 14 Produksi Perikanan Tangkap di Laut Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Komoditas	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ribu rupiah)
1	2020	Cakalang	117	2.781.841
		Tongkol	145	2.897.400
		Tuna	396	11.447.064
		Lainnya	661	15.231.917
	Jumlah		**1.319**	**32.358.222**
2	2021	Cakalang	87	1.310.610
		Tongkol	146	2.477.064
		Tuna	286	7.513.294
		Lainnya	791	15.181.933
	Jumlah		**1.310**	**26.482.901**
3	2022	Cakalang	100	1.531.881
		Tongkol	98	1.959.960
		Tuna	390	8.630.783
		Lainnya	801	11.914.252
	Jumlah		**1.389**	**24.036.876**
4	2023	Cakalang	116,13	2.903.325
		Tongkol	97,78	1.941.518
		Tuna	207,01	6.099.803
		Lainnya		
	Jumlah		**420,92**	**10.944.646**
5	2024	Cakalang	132,68	2.255.645
		Tongkol	132,51	2.252.602
		Tuna	111,23	2.780.875
		Lainnya	642,57	14.408.284
	Jumlah			**21.697.406**

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

- *Perikanan Budidaya*

Kawasan perikanan budidaya merupakan kawasan yang direncanakan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang mendukung potensi perikanan. Rencana kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Mamuju Tengah terdiri dari perikanan budidaya perairan meliputi pengembangan budidaya ikan serta perikanan darat. Pembangunan sektor perikanan merupakan suatu proses atau upaya manusia dalam memanfaatkan segala bentuk sumber daya hayati perikanan dan sumber daya perairan melaluI kegiatan berupa penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan seiring dengan penerapan dan pengembangan IPTEK, pengembangan produk, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, penambahan jumlah peluang kerja dan usaha, serta meningkatnya devisa negara yang disertai dengan upaya dalam memelihara dan melestarikan sumber daya hayati dan lingkungan.

Tabel 2. 15 Luas Lahan Budidaya Perikanan Menurut Kecamatan dan Jenis Lahan Pemeliharaan (Ha)

Kecamatan	Sawah		Kolam		Cekdam	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Pangale			36,10	28,00		28,00
Budong-budong			12,30	48,00		48,00
Tobadak			41,40	19,00		19,00
Topoyo		4,00	65,10	26,00		26,00
Karossa			28,40	16,00		16,00
Mamuju Tengah			**183,30**	**137,00**		**137,00**

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjuatan. Penjelasan ini dapat disimpulkan dari Laporan KLHS RPJMD 2025-2029.

a) Ambang Batas dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyediaan Pangan

Daya dukung penyediaan pangan mengacu pada kapasitas suatu wilayah, seperti Kabupaten Mamuju Tengah, untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya secara berkelanjutan. Faktor-faktor kunci yang mempengaruhi daya dukung ini melibatkan berbagai aspek, termasuk produksi pertanian, keberlanjutan ekologi, ketersediaan lahan pertanian, dan kebijakan pangan. Adanya ketersediaan pangan yang memadai memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan pangan dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan kelaparan.

Tabel 2. 16 Daya Dukung Penyediaan Pangan Aktual Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Model Densitas Populasi Sistem Grid		Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan Pangan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Status
		Luas (Ha)	Penduduk (Jiwa)				
1	Budong-Budong	25.583,78	28.740	2.243.315.870,95	22.029.210.000,00	-19.785.894.129,05	Terlampaui
2	Karossa	116.398,62	28.176	10.102.864.248,91	21.596.904.000,00	-11.494.039.751,09	Terlampaui
3	Pangale	9.556,89	14.282	963.113.486,07	10.947.153.000,00	-9.984.039.513,93	Terlampaui
4	Tobadak	37.703,67	28.419	3.536.528.863,94	21.783.163.500,00	-18.246.634.636,05	Terlampaui

5	Topoyo	86.677,50	34.702	8.215.894.794,13	26.599.083.000,00	-18.383.188.205,87	Terlampaui
Grand Total		**275.920,47**	**134.319**	**25.061.717.264,01**	**102.955.513.500,00**	**-77.893.796.235,98**	**Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Pada Tabel diatas, menggambarkan daya dukung lingkungan hidup penyediaan pangan Kabupaten Mamuju Tengah dalam kondisi telah terlampaui. Kondisi daya dukung pangan terlampaui juga terjadi pada lima kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Tentunya hal ini perlu diperhatikan untuk membuat suatu lumbung-lumbang pangan. Kondisi daya dukung lingkungan hidup penyediaan pangan Kabupaten Mamuju Tengah secara spasial berdasarkan kecamatan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 17 Wilayah Status Daya Dukung Pangan Aktual Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan (Ha)		Total
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Budong-Budong	14.475,02	11.108,75	25.583,78
Karossa	100.508,33	15.890,29	116.398,62
Pangale	3.766,41	5.790,48	9.556,89
Tobadak	22.568,62	15.135,06	37.703,67
Topoyo	75.584,53	11.092,97	86.677,50
Total	**216.902,92**	**59.017,55**	**275.920,47**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Pada tabel diatas menggambarkan kondisi daya dukung lingkungan hidup penyediaan pangan Kabupaten Mamuju Tengah yang terlampaui, dan belum terlampaui secara spasial. Sekitar 20 persen dari Kabupaten Mamuju Tengah telah terlampaui daya dukung pangannya. Kecamatan Pangale Memiliki wilayah yang sebagian besar telah terlampaui daya dukung pangannya. Proyeksi kondisi daya dukung lingkungan hidup penyediaan pangan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2030 mendatang berdasarkan Kecamatan disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 2. 18 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Pangan Tahun 2030 berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

No	Kecamatan	Model Densitas Populasi Sistem Grid		Ketersediaan Pangan (Kkal/Tahun)	Kebutuhan Pangan (Kkal/Tahun)	Selisih (Kkal/Tahun)	Status
		Luas (Ha)	Penduduk (Jiwa)				
1	Budong-Budong	25.583,78	34.954	2.243.315.870,95	26.792.241.000,00	-24.548.925.129,05	Terlampaui
2	Karossa	116.398,62	34.315	10.102.864.248,91	26.302.447.500,00	-16.199.583.251,08	Terlampaui
3	Pangale	9.556,89	16.939	963.113.486,07	12.983.743.500,00	-12.020.630.013,93	Terlampaui
4	Tobadak	37.703,67	29.715	3.536.528.863,94	22.776.547.500,00	-19.240.018.636,05	Terlampaui
5	Topoyo	86.677,50	45.231	8.215.894.794,13	34.669.561.500,00	-26.453.666.705,87	Terlampaui
Grand Total		**275.920,47**	**161.154**	**25.061.717.264,01**	**123.524.541.000,00**	**-98.462.823.735,98**	**Terlampaui**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Pada Tabel diatas menggambarkan proyeksi daya dukung lingkungan hidup penyediaan pangan Kabupaten Mamuju Tengah semakin meningkatnya yang terlampaui. Peningkatan tersebutkan diakibatkan peningkatan jumlah penduduk sebesar 124 ribu jiwa pada tahun 2030 yang diikuti dengan peningkatan kebutuhan pangan sebesar 95 milyar kkal/tahun. Apabila dilihat secara spasial, peningkatan daya dukung pangan yang terlampaui sekitar 10 ribu hektar. Peningkatan luasan wilayah yang terlampaui sebagian terjadi di Kecamatan Topoyo karena memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan kecamatan yang lain. Proyeksi kondisi daya dukung lingkungan hidup penyediaan pangan Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2030 mendatang berdasarkan Kecamatan secara spasial disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 19 Proyeksi Status Wilayah Daya Dukung Pangan Tahun 2030 Berdasarkan Kecamatan pada di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan	Status Daya Dukung Pangan (Ha)		Total
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Budong-Budong	14.279,51	11.304,27	25.583,78
Karossa	99.806,92	16.591,70	116.398,62
Pangale	3.689,84	5.867,05	9.556,89
Tobadak	22.465,12	15.238,56	37.703,67
Topoyo	66.632,82	20.044,68	86.677,50
Total	**206.874,21**	**69.046,26**	**275.920,47**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

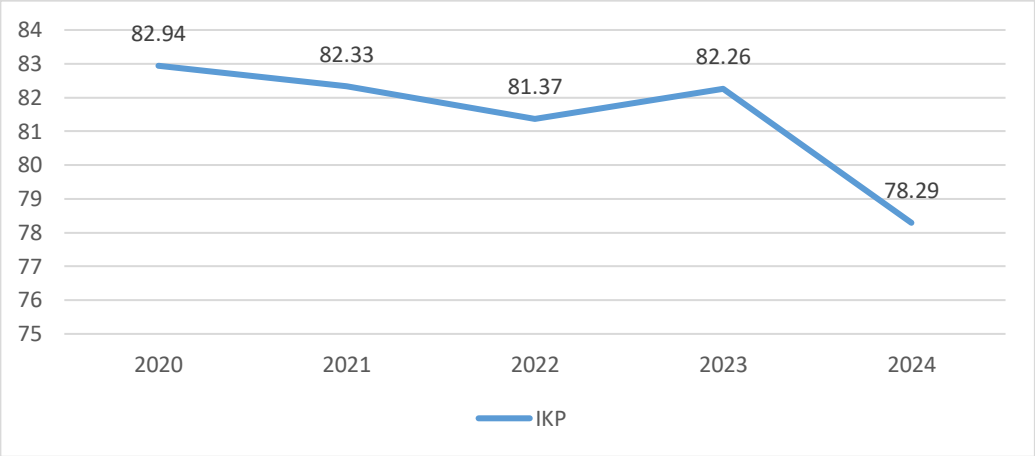
4) *Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan*

Menjelaskan kondisi energi, air dan pangan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan dan krusial serta untuk menjamin keberlanjutan hidup manusia dan pembangunan berkelanjutan. Penjelasan ini perlu dilengkapi dengan indikator seperti **Indeks Ketahanan Pangan, Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan, Konsumsi Listrik Per Kapita, Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum**, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

a) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah, baik desa, kabupaten, kota atau provinsi. IKP disusun berdasarkan beberapa indikator yang mencerminkan tiga aspek utama ketahanan pangan yaitu pertama, ketersediaan pangan yang cukupm baik secara kuantitas maupun kualitasm untuk memenugi kebutuhan penduduk. Kedua, keterjangkauan pangan mencakup kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan baik secara fisik maupun ekonomi, dan ketiga pemanfaatan pangan mencakup kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan pangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Gambar 2. 4 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Dalam kurun waktu 2020-2022 nilai IKP Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan dari 82,94 menjadi 81,37 indeks. Penurunan ini disebabkan berbagai faktor, dampak pandemi Covid19 terhadap distribusi dan ketersediaan pangan, penurunan daya beli masyarakat serta potensi gangguan produksi pertanian lokal. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali ke angka 82,26 indeks. Hal ini sebagai dampak dari usaha pemerintah dalam program pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan termasuk upaya dalam peningkatan produksi pangan lokal dan stabilitas harga. Akan tetapi di tahun 2024 terjadi penurunan signifikan menjadi 78,29 indeks. Ini merupakan penurunan paling signifikan dalam lima tahun terakhir dan menjadi sinyal perlunya intervensi serius. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perubahan iklim terhadap produksi pangan, ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, gangguan distribusi dan kenaikan harga pangan serta ketimpangan akses terhadap pangan yang merata di seluruh wilayah.

b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan, atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU), adalah persentase penduduk di suatu wilayah yang mengonsumsi makanan dengan jumlah energi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup sehat, aktif, dan produktif. Dengan kata lain, PoU mengukur proporsi orang yang mengalami kekurangan gizi dalam hal asupan energi.

c) Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Layak

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Layak adalah ukuran yang menggambarkan persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum yang memenuhi standar kelayakan untuk kebutuhan sehari-hari, baik untuk diminum maupun memasak.

Tabel 2. 20 Akses Rumah Tangga Terhadap Konsusmsi Air Minum Layak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Akses Rumah Tangga Terhadap Konsusmsi Air Minum Layak	72,64	77,42	78,23	77,88	81,48

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2024

Secara keseluruhan, terjadi peningkatan akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum layak dari 72,64 persen pada 2020 menjadi 77,88 persen pada 2023. Peningkatan terbesar terjadi pada 2020–2021 (+4,78 poin persentase), yang disebabkan oleh program penyediaan sarana air bersih atau perbaikan jaringan distribusi. Setelah peningkatan cukup signifikan di 2020–2022, tahun 2023 mengalami sedikit penurunan (-0,35 poin persentase dari 2022). Hal ini bisa dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem, kerusakan infrastruktur air, atau perubahan metode pendataan.

Jika target RPJMD atau SDGs adalah 100% pada 2030, maka capaian 2023 masih memerlukan peningkatan sekitar 22,12 poin persentase dalam waktu 7 tahun. Artinya, dibutuhkan rata-rata peningkatan sekitar 3,16 poin persentase per tahun untuk mencapai target.

d) Konsumsi Listrik

Sumber penerangan utama rumah tangga adalah jenis sumber energi yang digunakan oleh rumah tangga untuk penerangan, diukur dalam persentase jumlah rumah tangga. Kategori yang digunakan Listrik PLN**,** Penerangan utama berasal dari jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara. Listrik Non PLN , Listrik yang bersumber dari selain PLN, misalnya generator/diesel, panel surya, atau listrik swasta/mandiri. Bukan Listrik, Sumber penerangan non-listrik seperti lampu minyak tanah, lampu gas, atau lilin.

Tabel 2. 21 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan (persen) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Tahun	Sumber Penerangan			
	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Jumlah
2020	86,19	12,79	1,01	100
2021	93,53	5,28	1,18	100
2022	95,38	4,19	0,43	100
2023	96,29	2,88	0,83	100
2024	98,10	1,39	0,51	100

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Data menunjukkan bahwa pada periode 2020–2024, akses rumah tangga Kabupaten Mamuju Tengah terhadap listrik PLN mengalami peningkatan signifikan dari 86,19 persen menjadi 98,10 persen, disertai penurunan tajam pengguna listrik non-PLN dari 12,79persen menjadi 1,39 persen dan berkurangnya rumah tangga yang masih menggunakan sumber penerangan bukan listrik dari 1,01 persen menjadi 0,51 persen. Tren ini mencerminkan keberhasilan program perluasan jaringan listrik dan elektrifikasi desa yang mendorong peralihan dari sumber penerangan mandiri maupun non-listrik menuju sambungan PLN, meskipun masih ada sebagian kecil rumah tangga yang belum menikmati listrik PLN dan memerlukan intervensi untuk mencapai target elektrifikasi penuh.

Peralihan sumber penerangan ini didukung data konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Mamuju Tengah. Data menunjukkan bahwa periode 2020–2023, produksi listrik yang didistribusikan di Sulawesi Barat meningkat dari 423,96 juta kWh menjadi 518,33 juta kWh, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk Mamuju Tengah dari 135.280 jiwa menjadi 142.455 jiwa. Kenaikan kapasitas distribusi listrik ini diikuti peningkatan konsumsi listrik per kapita di Mamuju Tengah dari 3.133,94 kWh pada 2020 menjadi 3.638,55 kWh pada 2023, yang mencerminkan bertambahnya akses dan pemanfaatan energi listrik, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan ekonomi, serta indikasi membaiknya tingkat kesejahteraan dan aktivitas produktif masyarakat.

Tabel 2. 22 Konsumsi Listrik Per kWh di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi Listrikyang didistribusikan di Sulawesi Barat (kWh)	423.960.000	439.490.000	470.210.000	518.330.000*	n.a
Jumlah Penduduk Mamuju Tengah	135280	137380	140030	142455	143270
Konsumsi Listrik per Kapita Mamuju Tengah	3.133,94	3.199,08	3.357,92	3.638,55	n.a

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah, 2025

5) *Lingkungan Hidup Berkualitas*

Menjelaskan kondisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penjelasan ini dilengkapi dengan indikator seperti **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Rumah Tangga dengan Akses**

Sanitasi Layak, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal dari suatu kondisi lapangan pada lingkup dan periode tertentu. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri atas Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan lahan.

IKLH merupakan modifikasi dari studi Indeks Lingkungan yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan sebagai indikator perhitungannya. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah yang akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian program-program pemerintah di bidang perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualifikasi dan rentang nilai IKLH menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: Unggul (x > 90), Sangat Baik (82 < s.d < 90); Baik (74 < s.d. <82); Cukup (66 < s.d. < 74); Kurang (58 < x < 66); Sangat Kurang (50 < x< 58); Wasapada (x < 50).

Tabel 2. 23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	N/A	67,50	63,30	54,44	50,00
Indeks Kualitas Udara	N/A	89,13	91,73	92,08	92,29
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	81,05	81,05	78,56	78,27
IKLH	N/A	79,23	78,71	74,97	73,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah, 2025

Secara umum capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2024 sebesar 73,32 dengan kategori baik. Akan tetapi jika dilihat dalam kurun waktu empat tahun terakhir komponen IKLH mengalami penurunan pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Data terakhir menunjukan Indeks Kualitas Air berada pada kategori kurang dengan nilai sebesar 50,00 poin

menurun 17,50 persen dari Tahun 2021 sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 78,27 poin menurun 0,29 persen dari tahun sebelumnya.

Permasalahan ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah terutama pada indeks kualitas air, sebagaimana air merupakan sumber utama kehidupan. Jika kualitas sumber air tidak baik maka dapat mengganggu aktivitas kehidupan terutama pada menurunya angka kesehatan masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi dengan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan harus selaras. Adanya Peningkatan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan pembangunan lingkungan bukan malah sebaliknya. Pengawasan terhadap pengendalian lingkungan juga harus dilakukan, terutama pada pembukaan dan peralihan lahan untuk kawasan perkebunan dan permukiman, serta pengolahan hasil limbah perusahaan sawit yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga mencemari air.

b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga di kali 100 persen.

Tabel 2. 24 Rumah Tangga Bersanitasi Layak di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
RT Bersanitasi	22.283	23.729	24.603	24.726	22.265
Jumlah Rumah Tangga	28.623	28.623	28.834	28.834	28.834
Persentase	77,85	82,90	85,33	86,39	77,22

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Capaian Rumah Tangga bersanitasi layak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 rumah tangga yang bersanitasi layak meningkat sebesar 8,54 persen. Dimana pada tahun 2023 jumlah rumah tangga bersanitasi layak telah mencapai angka 86,39 persen dan diharapkan dapat terus meningkat mencapai angka 100 persen. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,17 persen yakni dari 86,39 persen menjadi 77,22 persen. Sebagaimana diketahui bahwa sanitasi termasuk dalam urusan pelayanan minimal sehingga wajib untuk dipenuhi. Pengelolaan sanitasi sangat berdampak pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jika kondisi sanitasi masyarakat buruk maka akan berdampak pada pencemaran

lingkungan sehingga akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan produktivitas masyarakat sekitar.

c) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termaksud air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air yang tidak terlindungi. Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas di bagi total penduduk.

Tabel 2. 25 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
RT Pengguna Air Bersih	20.343	24.285	25.713	27.176	24.129
Jumlah Rumah Tangga	28.623	28.623	28.834	28.834	28.834
Persentase	71	85	89	94	84

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2024

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari menunjukan progres yang baik setiap tahunnya. Dimana dalam lima tahun terakhir persentase pengguna air bersih terus meningkat. Jika membandingkan data antara tahun 2020 dimana capaian Rumah Tangga yang menggunakan Air bersih masih 71 persen kemudian pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 94 persen namun turun sebesar 10 persen pada tahun 2024.

d) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefenisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta Kawasan umum lainnya.

Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Pengelolaan sampah harusnya dipisahkan menjadi 2 bagian yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk organik atau kompos, sedangkan

sampah non organik dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah menarik seperti pengganti plastik. Sisa pemilahan dari sumber sampah dapat diangkut dan dikelola di TPA.

Tabel 2. 26 Timbulan Sampah yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Sampah Terkelola TPA (Ton)	1.896	803	4.121,00	5.110,00	630
Total Timbulan Sampah (Ton)	18.962	22.864	20.057	20.444	20.444
Persentase	10	3,51	20,55	25	3,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah, 2024

Bertambahnya penduduk dan aktivitas perekonomian setiap tahunnya memberikan pengaruh yang besar dalam pertambahan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2024 total timbulan sampah sebesar 20.444 ton dengan jumlah sampah yang berhasil dikelola sebesar 3,08 persen. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana capaian pengelolaan sampah sebesar 25 persen.

6) *Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim*

Menjelaskan tentang kemampuan masyarakat, infrastruktur dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Penjelasan sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti **Penurunan Intensistas Emisi GRK, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah**, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

a) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Than 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian target Kontribusi yang Ditetapkan Secara nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dai bussines as usual pad atahun 2030. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk menyusun inventarisasi GRK, termasuk Kabupaten Mamuju Tengah. Besaran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kabupaten Tengah Mamuju tahun 2020 -2024 mengalami fluktuatif, dimana emisi terendah dihasilkan pada tahun 2020 sebesar 633,57 dan emisi tertinggi pada tahun 2023 sebesar 670,27. Pada tahun 2020 terjadi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang disebabkan adanya pandemic COVID sehingga ada kebijakan untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Emisi

gas Rumah Kaca (GRK) kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 mencapai 668,68, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Mamuju tengah mengalami pertumbuhan sebesar 35,11 persen atau terjadi pertumbuhan 7,022 persen per tahun. Tren kenaikan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan emisi di sektor pertanian dan kehutanan.

Tabel 2. 27 Emisi dan Serapan Gas Rumah Kaca Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 (Gg CO_2eq)

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Energi	0	0	0	0	0
IPPU	0	0	0	0	0
Pertanian	540,53	638,53	663,28	663,95	662,35
Kehutanan	93,03	6,32	6,32	6,32	6,32
Limbah	0	0	0	0	0
Total	633,57	644,85	669,60	670,27	668,68

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Mamuju Tengah, 2025

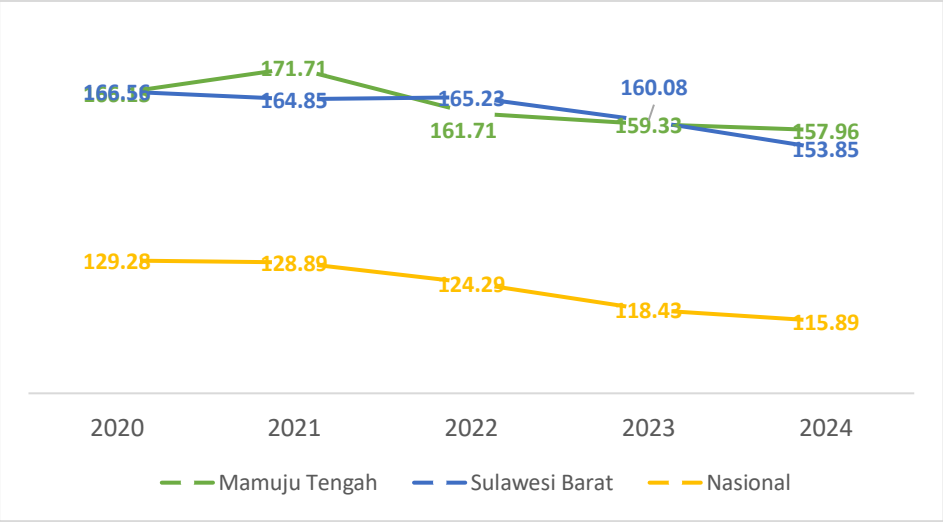
b) Indeks Risiko Bencana

Komponen yang mempengaruhi risiko bencana dalam hal ini adalah komponen bahaya, komponen kerentanan, dan komponen kapasitas. Komponen tersebut di kaji lebih mendalam untuk mendapatkan tingkat untuk komponen bahaya, kerentenan dan kapasitas sehingga didapatkan tingkat risiko setiap bencana di Kabupaten Mamuju Tengah. Komponen-komponen tersebut akan dihitung berdasarkan pada indeks dengan cara menggunakan parameter-parameter dasar penghitungnya.

Berdasarkan data dari DIBI BNPB dan BPBD wilayah kabupaten Mamuju Tengah telah mengalami berbagai kejadian bencana jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan. Gempa bumi juga menjadi ancaman serius di wilayah ini.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana (IRBI) 2020-2024 kabupaten Mamuju Tengah memiliki indeks risiko Tinggi meskipun demikian tren lima tahun terakhir terjadi penurunan.

Gambar 2. 5 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Inarisk BNPB, 2025

Peta risiko bencana merupakan salah satu hasil pengkajian risiko bencana Kabupaten Mamuju Tengah yang memberikan gambaran tingkatan risiko yang ditimbulkan oleh bencana di seluruh wilayah bagian Kabupaten Mamuju Tengah. Pemetaan risiko tersebut memuat seluruh bencana berpotensi di Kabupaten Mamuju Tengah. Karena penyusunan peta risiko bencana diperoleh dari penggabungan hasil pemetaan bahaya, kerentanan, dan kapasitas, maka pemetaan risiko bencana baru dapat dihasilkan setelah dihasilkan ketiga pemetaan tersebut. Peta risiko bencana menampilkan tingkat risiko setiap daerah terhadap bencana yang dikelompokkan dalam kelas rendah, sedang, dan tinggi. Gambaran tingkat risiko tersebut berbeda untuk setiap bencana yang mengancam di Kabupaten Mamuju Tengah. Sementara itu, hasil overlay dari seluruh peta risiko bencana didapatkan peta multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah.

Penyusunan peta didasarkan pada prasyarat utama yang diatur oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Prasyarat tersebut adalah sebagai berikut.

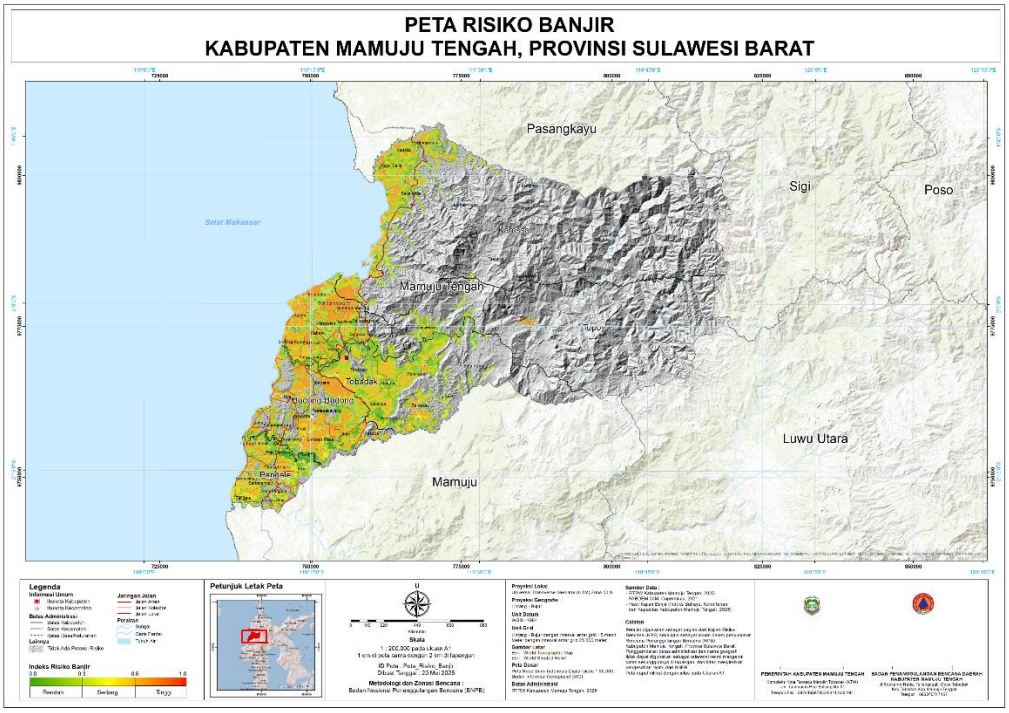
1. Memenuhi aturan tingkat kedetailan analisis (kedalaman analisis di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten,
2. Skala peta minimal adalah 1:50.000,
3. Mampu menghitung jumlah jiwa terpapar bencana (dalam jiwa),
4. Mampu menghitung nilai kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan (dalam rupiah),
5. Menggunakan 3 kelas interval tingkat risiko, yaitu tingkat risiko tinggi, sedang dan rendah,
6. Menggunakan GIS dengan Analisis Grid (30m x 30m) dalam pemetaan risiko bencana.

Visualisasi hasil setiap peta diperhalus sehingga hasil tingkat risiko bencana terlihat lebih jelas. Gambaran peta risiko bencana tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah.

- Risiko Bencana Banjir

  Banjir merupakan kondisi meningkatnya volume air sehingga mengakibatkan suatu daerah daratan menjadi tergenang/terendam (BNPB). Untuk menentukan wilayah potensi rawan tergenang banjir digunakan metode GFI (*Geomorphic Flood Index*). Daerah rawan banjir dideteksi dengan memperhatikan kondisi geomorfologinya. Dalam kata lain, metode ini dapat menentukan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam periode waktu yang lama. Berdasarkan Modul Teknis Penyusunan KRB Banjir, BNPB 2019, ukuran bahaya (*hazard*) dari banjir adalah ketinggian genangan. Peta bahaya Banjir dapat dihasilkan dari peta (potensi) genangan banjir. Sebagian besar peta genangan Banjir dikembangkan oleh pemodelan komputer, yang melibatkan analisis hidrologi untuk memperkirakan debit aliran puncak untuk periode ulang yang ditetapkan, simulasi hidraulik untuk memperkirakan ketinggian permukaan air, dan analisis medan untuk memperkirakan area genangan (Alfieri et al, 2014).

Gambar 2. 6 Peta Risiko Banjir Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

Bencana banjir terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah dengan kelas bahaya **Tinggi**, kelas kerentanan **Sedang** dan kelas kapasitas **Sedang**. Adapun tingkat risiko bencana banjir tiap

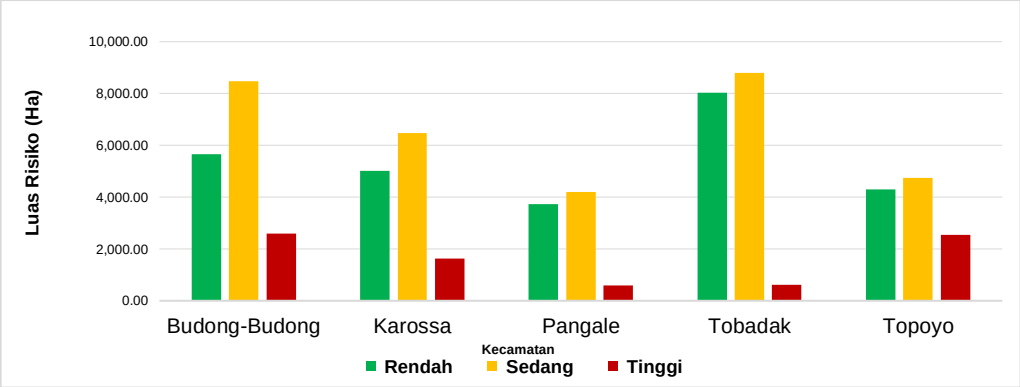
Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah secara lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2. 28 Wilayah Kecamatan dengan Risiko Banjir di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Banjir (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	5.663,16	8.482,86	2.585,88	16.731,90	Tinggi
02	Karossa	5.014,74	6.482.85	1.627,81	13.125,41	Sedang
03	Pangale	3.736,09	4.198.17	603,16	8.537,42	Sedang
04	Tobadak	8.025,39	8.786.16	616,59	17.428,14	Sedang
05	Topoyo	4.290,80	4.737.98	2.554,96	11.583,74	Tinggi
Kabupaten Mamuju Tengah		**26.730,18**	**2.688,03**	**7.988,40**	**67.406,60**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 7 Luas Risiko Banjir di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

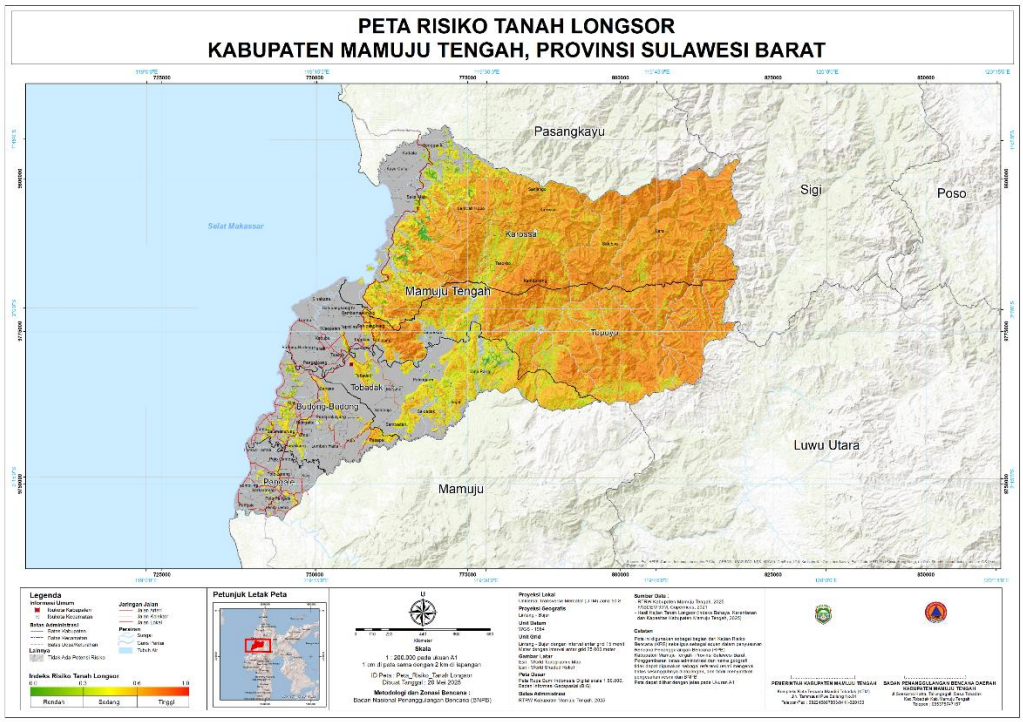
Berdasarkan data di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana banjir umumnya didominasi kelas Sedang dan Tinggi. Secara lebih rinci kecamatan dengan kelas risiko Tinggi terdapat di 6 Desa (2 Kecamatan), sedangkan kelas Sedang terdapat di 32 Desa (4 Kecamatan) dan kelas Rendah terdapat di 16 Desa. Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat 38 Desa yang berisiko terpapar banjir dengan total luas risiko bencana banjir sebesar **67.406,60 Ha**. Dengan demikian, kelas risiko bencana banjir secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas **Tinggi**.

- Risiko Bencana Tanah Longsor
  Tanah longsor merupakan kejadian yang diakibatkan oleh lebih besarnya gaya pendorong yaitu sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah/batuan dibandingkan gaya penahan dari batuan dan

kepadatan tanah (Dinas PU, 2012). Peta zona gerakan tanah dari PVMBG disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah potensi longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai.

Bencana tanah longsor memapar seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kelas risiko tanah longsor Kabupaten Mamuju Tengah ditentukan berdasarkan kelas bahaya **Tinggi**, kelas kerentanan **Tinggi** dan kelas kapasitas **Sedang**. Adapun secara keseluruhan kelas risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Mamuju Tengah adalah **Tinggi**

Gambar 2. 8 Peta Risiko Tanah Longsor Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan peta risiko tanah longsor Kabupaten Mamuju Tengah, area dibagi dalam tiga kategori warna: Merah menandakan risiko tinggi, Oranye menandakan risiko sedang dan Kuning menandakan risiko rendah.

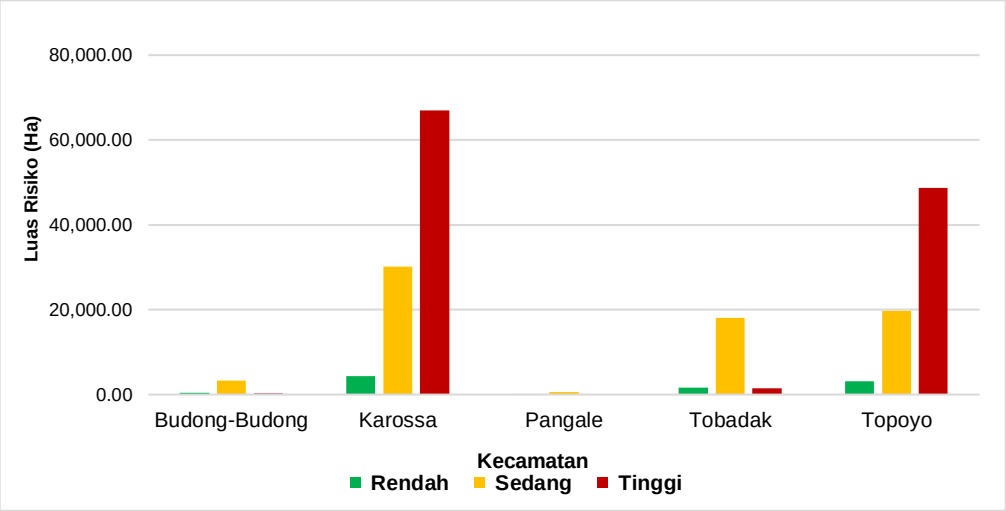
Tabel 2. 29 Tingkat Risiko Tanah Bencana Longsor Tertinggi di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Tanah Longsor (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	448,56	3.346,65	317,43	4.112,64	Sedang
02	Karossa	4.409,87	30.220,59	66.908,80	101.539,26	Tinggi

Kecamatan		Potensi Risiko Tanah Longsor (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
03	Pangale	19,53	564,30	-	583,83	Sedang
04	Tobadak	1.591,83	18.051,84	1.436,85	21.08,52	Sedang
05	Topoyo	3.122,82	19.807,20	48.753,09	71.683,11	Tinggi
Kabupaten Mamuju Tengah		**9.592,61**	**71.990,58**	**17.416,17**	**198.999,36**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 9 Luas Risiko Tanah Longsor (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana tanah longsor umumnya didominasi kelas Sedang dan Tinggi. Secara lebih rinci, kecamatan dengan kelas risiko Tinggi terdapat di 9 Desa (2 Kecamatan), kelas Sedang terdapat di 32 Desa (3 Kecamatan) dan kelas Rendah terdapat di 13 Desa. Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat 41 Desa yang memiliki daerah yang berisiko terpapar bencana tanah longsor dengan total luas risiko bencana tanah longsor sebesar **199.271,65 Ha**. Dengan demikian, kelas risiko bencana tanah longsor secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas **Tinggi**.

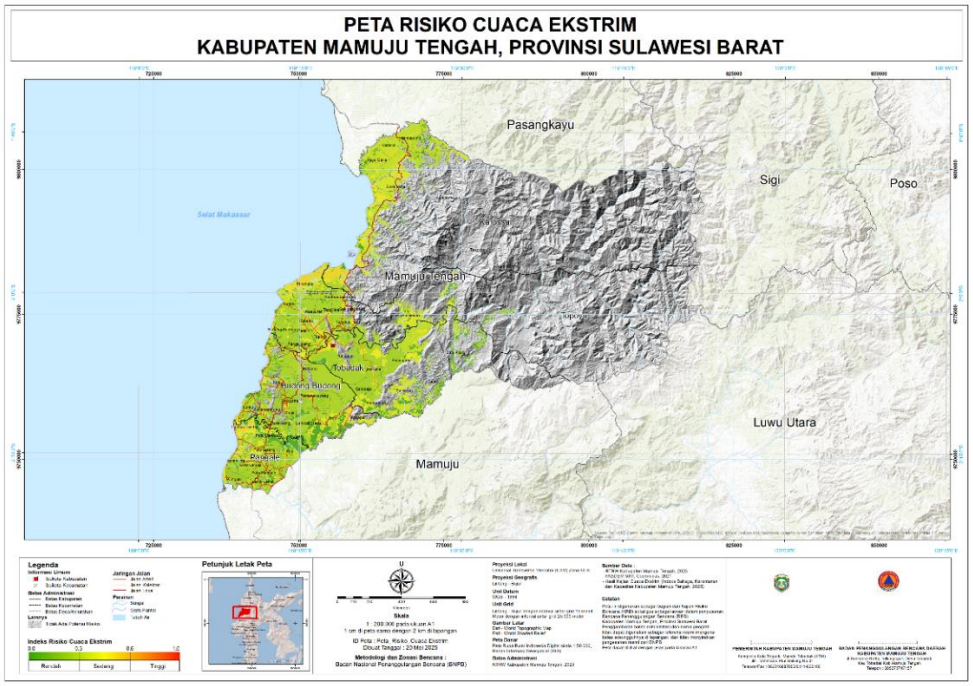
- Risiko Bencana Cuaca Ekstrem

  Cuaca Ekstrim merupakan fenomena cuaca yang dapat menimbulkan bencana, korban jiwa, dan menghancurkan tatanan kehidupan sosial. Contoh cuaca ekstrim antara lain hujan lebat, hujan es, angin kencang, dan badai taifun. Pada kajian ini

pembahasan cuaca ekstrim lebih dititikberatkan kepada angin kencang.

Angin kencang merupakan angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit) (BNPB). Terjadinya angin kencang diawali dengan terbentuknya siklon yang dapat terjadi ketika wilayah bertekanan udara rendah dikelilingi oleh wilayah bertekanan udara tinggi. Pada umumnya kasus Angin Kencang di Indonesia ditandai dengan terbentuknya awan kumulonimbus yang menjulang ke atas. Selanjutnya terjadi hujan lebat dengan hembusan angin kuat dalam waktu relatif singkat. Kejadian tersebut dapat memicu terjadinya angin kencang.

Gambar 2. 10 Peta Risiko Cuaca Ektrem Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

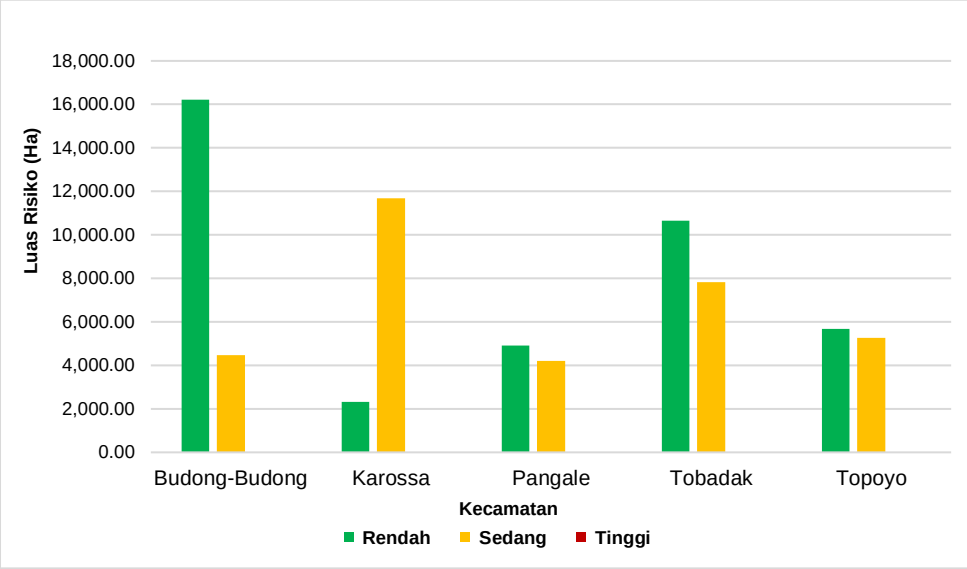
Bencana cuaca ekstrim atau yang dalam kajian ini ialah angin puting beliung berisiko terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kelas risiko cuaca ekstrim Kabupaten Mamuju Tengah ditentukan berdasarkan kelas bahaya **Tinggi**, kelas kerentanan **Sedang,** dan kelas kapasitas **Sedang**. Adapun tingkat risiko secara lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. 30 Tingkat Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Cuaca Ekstrim (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	16.223,12	4.462,70	-	20.685,82	Sedang
02	Karossa	2.323,02	11.668,64	-	13.991,66	Sedang
03	Pangale	4.906,42	4.204,58	-	9.111,00	Sedang
04	Tobadak	10.661,85	7.829,46	-	18.491,31	Sedang
05	Topoyo	5.670,55	5.250,31	-	10.920,86	Sedang
Kabupaten Mamuju Tengah		**39.784,95**	**33.415,70**	**-**	**73.200,65**	**Sedang**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 11 Luas Risiko Cuaca Ekstrem di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana cuaca ekstrim umumnya didominasi kelas Rendah dan Sedang. Secara lebih rinci tidak ditemukan adanya Desa dengan kelas risiko Tinggi, sedangkan kelas Sedang terdapat di 23 Desa (5 Kecamatan) dan kelas Rendah terdapat di 31 Desa. Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, seluruhnya berisiko terpapar bencana cuaca ekstrim dengan total luas risiko bencana cuaca ekstrim sebesar **73.200,65 Ha**. Dengan demikian, kelas risiko cuaca ekstrim secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas **Sedang**

- Risiko Bencana Gelombang Ekstrem

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. **Abrasi** biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut.

Gambar 2. 12 Peta Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi (GEA) memapar 4 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kelas risiko gelombang ekstrim dan abrasi Kabupaten Mamuju Tengah ditentukan berdasarkan kelas bahaya **Tinggi**, kelas kerentanan **Tinggi** dan kelas kapasitas **Sedang.** Adapun tingkat risiko secara lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

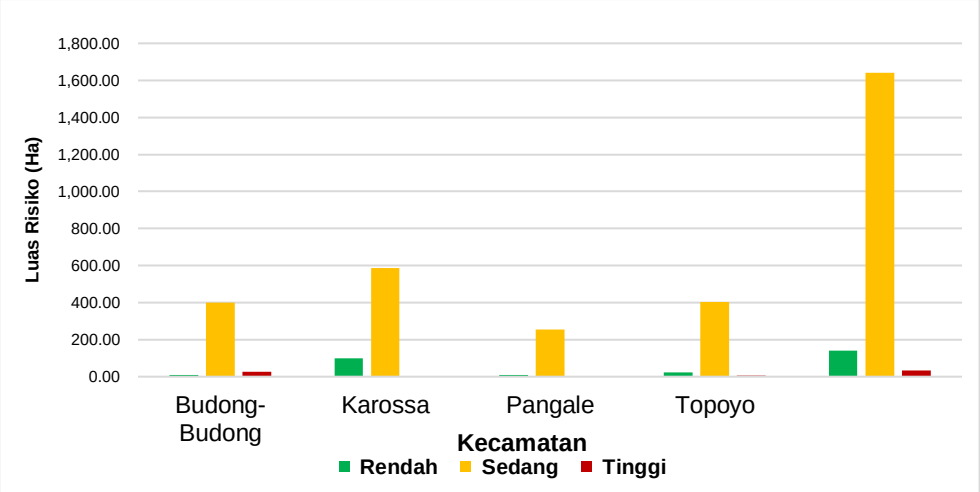
Tabel 2. 31 Tingkat Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	10,89	399,78	27,27	437,94	Sedang

02	Karossa	98,73	586,80	-	685,53	Sedang
03	Pangale	7,83	253,17	-	261,00	Sedang
04	Topoyo	23,49	402,57	6,66	432,72	Sedang
Kabupaten Mamuju Tengah		**140.94**	**1.642,32**	**33,93**	**1.817,19**	**Sedang**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 13 Luas Risiko Bencana Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi umumnya didominasi kelas Sedang. Secara lebih rinci tidak ditemukan adanya Desa dengan kelas risiko Tinggi, sedangkan kelas Sedang terdapat di 15 Desa (4 Kecamatan) dan tidak ditemukan adanya Desa dengan kelas risiko Rendah. Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat 15 Desa yang memiliki daerah yang berisiko terpapar bencana gelombang ekstrim dan abrasi dengan total luas risiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi sebesar **1.817,19 Ha**. Dengan demikian, kelas risiko gelombang ekstrim dan abrasi secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas **Sedang**.

- Risiko Bencana Gempa Bumi

  Gempabumi adalah getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunungapi, atau runtuhan batuan (BNPB). Metode kajian untuk Gempabumi pada dokumen ini menggunakan data guncangan di batuan dasar yang dikonversi menjadi data guncangan di permukaan. Konversi ini dilakukan karena gempa dengan magnitudo yang tinggi di lokasi yang dalam belum tentu menghasilkan guncangan permukaan yang lebih

besar dibandingkan gempa dengan magnitudo yang lebih rendah di lokasi yang lebih dangkal.

Gambar 2. 14 Peta Risiko Gempa Bumi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

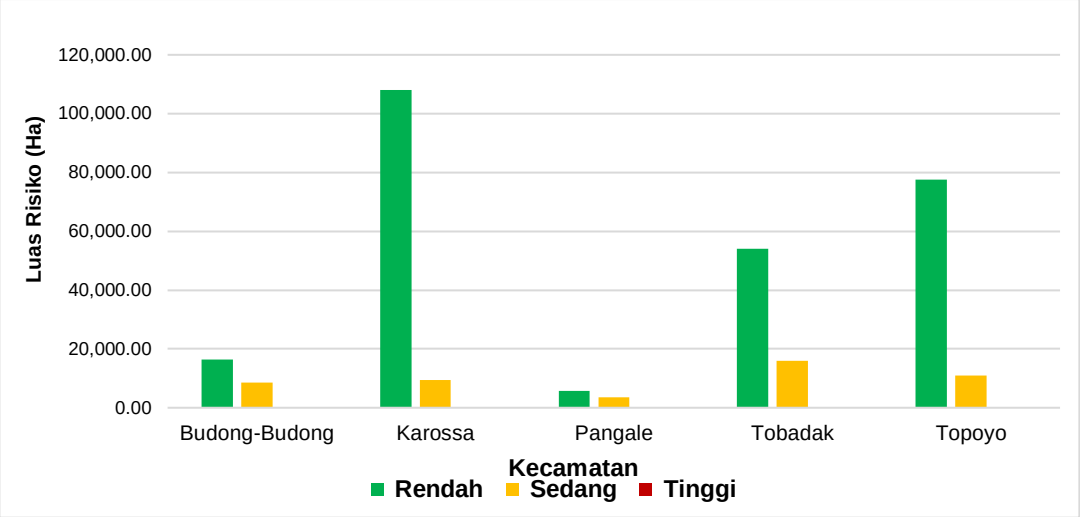
Bencana gempabumi berisiko terjadi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Kelas risiko gempabumi Kabupaten Mamuju Tengah ditentukan berdasarkan kelas bahaya **Sedang**, kelas kerentanan **Rendah** dan kelas kapasitas **Sedang**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 32 Tingkat Risiko Bencana Gempabumi di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Gempabumi (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	16.450,87	8.516,13	-	24.967,00	Sedang
02	Karossa	108.053,87	9.484,13	-	117.538,00	Sedang
03	Pangale	5.616,29	3.494,71	-	9.111,00	Sedang
04	Tobadak	54.131,98	15.859,02	-	69.991,00	Sedang
05	Topoyo	77.580,15	10.899,85	-	88.480,00	Sedang
Kabupaten Mamuju Tengah		**261.833,16**	**48.253,84**	**-**	**310.087,00**	**Sedang**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 15 Luas Risiko Gempabumi (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah



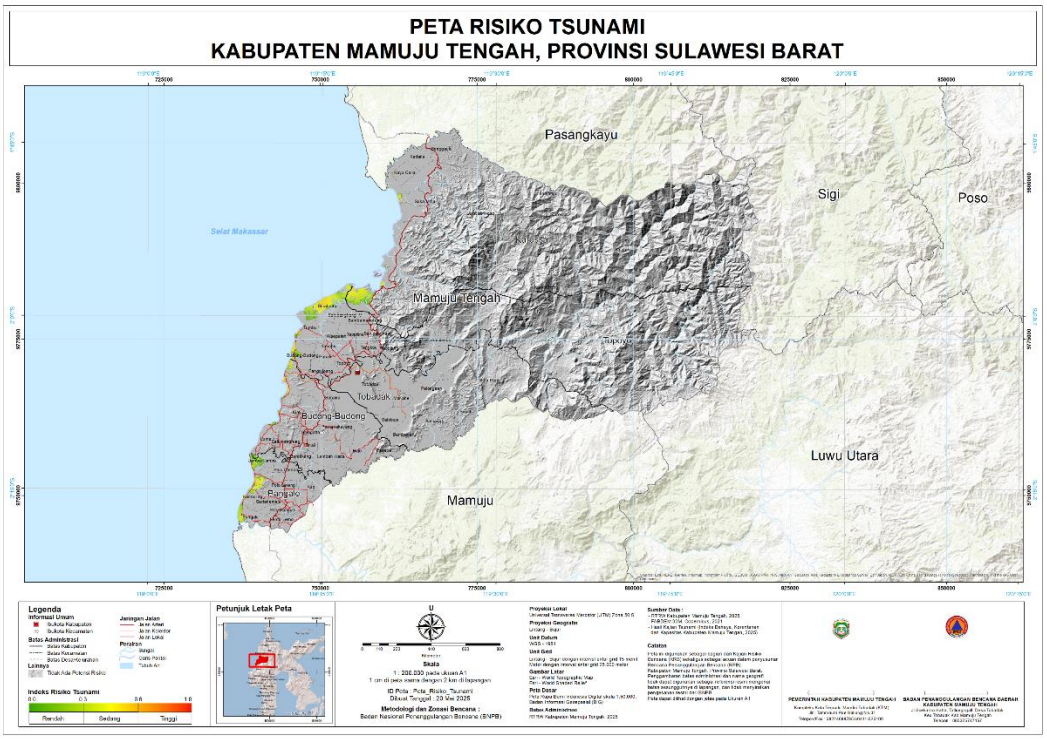
Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana gempabumi umumnya didominasi kelas Sedang. Secara lebih rinci tidak ditemukan adanya Desa/Kelurahan dengan kelas risiko Tinggi, sedangkan kelas Sedang terdapat di 25 Desa/Kelurahan (5 Kecamatan) dan kelas Rendah terdapat di 29 Desa/Kelurahan. Dari jumlah total 54 Desa/Kelurahan di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, seluruhnya berisiko terpapar bencana gempabumi dengan total luas risiko bencana gempabumi sebesar **310.087,00 Ha**. Dengan demikian, kelas risiko gempabumi secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas **Sedang**.

- Risiko Bencana Tsunami

Tsunami merupakan gelombang besar yang berasal dari laut menuju pantai. Bencana tsunami pada umumnya diakibatkan oleh letusan gunung yang berada di bawah laut, gempabumi dengan hiposentrum di dalam laut serta terjadinya tabrakan lempeng di laut. Dampak dari tsunami dapat menimbulkan kerugian yang besarkhususnya di wilayah pesisir.

Gambar 2. 16 Peta Risiko Tsunami di Babupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

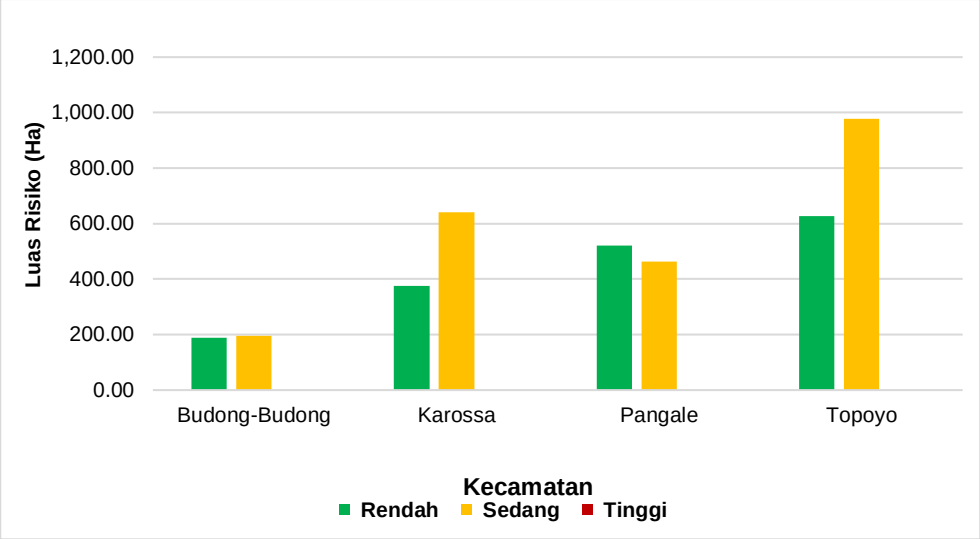
Bencana tsunami berpotensi terjadi di seluruh Kecamatan yang berada di pesisir di Kabupaten Mamuju Tengah. Kelas risiko tsunami Kabupaten Mamuju Tengah ditentukan berdasarkan kelas bahaya **Sedang**, kelas kerentanan **Sedang** dan kelas kapasitas **Rendah**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 33 Tingkat Risiko Bencana Tsunami di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Tsunami (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	189,27	196,11	-	387,54	Sedang
02	Karossa	376,47	640,08	-	1.016,55	Sedang
03	Pangale	522,00	463,77	-	985,77	Sedang
04	Topoyo	626,76	977,22	-	1.603,98	Sedang
Kabupaten Mamuju Tengah		**1.714,50**	**2.277,18**	**-**	**3.993,84**	**Sedang**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 17 Luas Risiko Tsunami (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah



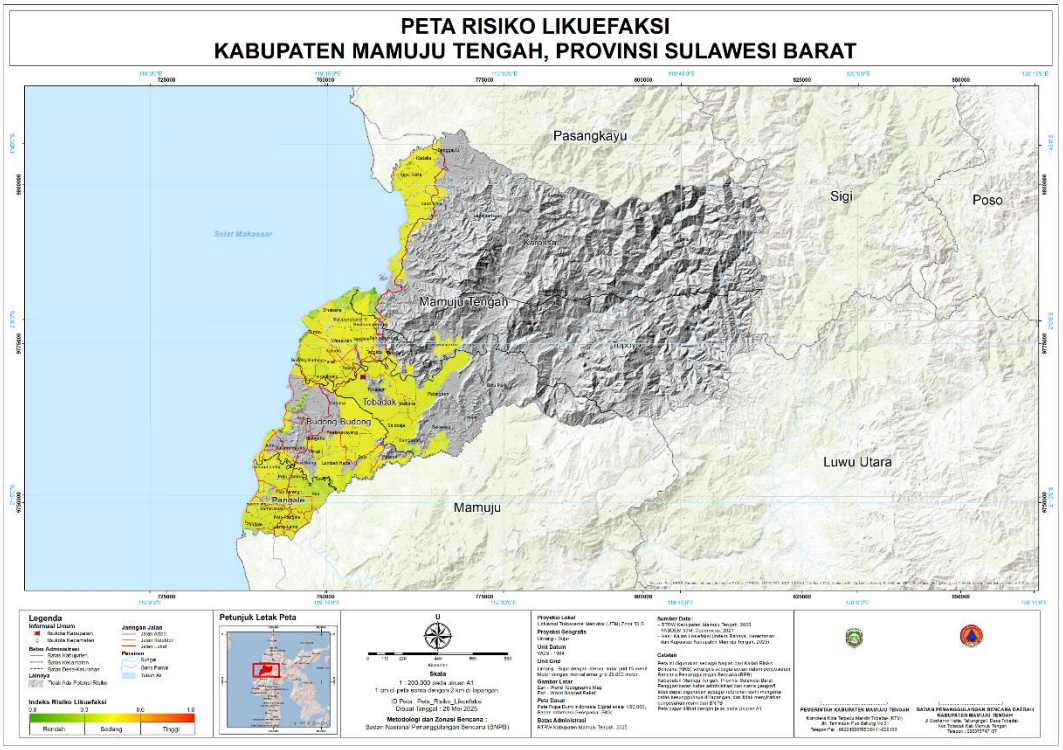
Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana tsunami umumnya didominasi kelas Rendah dan Sedang. Secara lebih rinci tidak ditemukan adanya Desa dengan kelas risiko Tinggi, sedangkan kelas Sedang terdapat di 9 Desa (4 Kecamatan) dan kelas Rendah terdapat di 6 Desa. Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat 15 Desa yang memiliki daerah yang berisiko terpapar bencana tsunami dengan total luas risiko bencana tsunami sebesar **3.993,84 Ha**. Dengan demikian, kelas risiko tsunami secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas **Sedang.**

- Risiko Bencana Likuefaksi

  Likuefaksi atau pencairan tanah adalah hilangnya kekuatan dan kekakuan tanah jenuh air akibat adanya perubahan tegangan pada tanah. Akibat dari hilangnya kekuatan tanah ini dapat berupa longsor, perubahan tekstur tanah menjadi lumpur, atau penurunan atau pergerakan tanah secara tiba-tiba menyebabkan daya dukung pondasi menurun dan terjadi kerusakan bangunan/ infrastruktur yang lebih besar.

Gambar 2. 18 Peta Risiko Likuefaksi di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

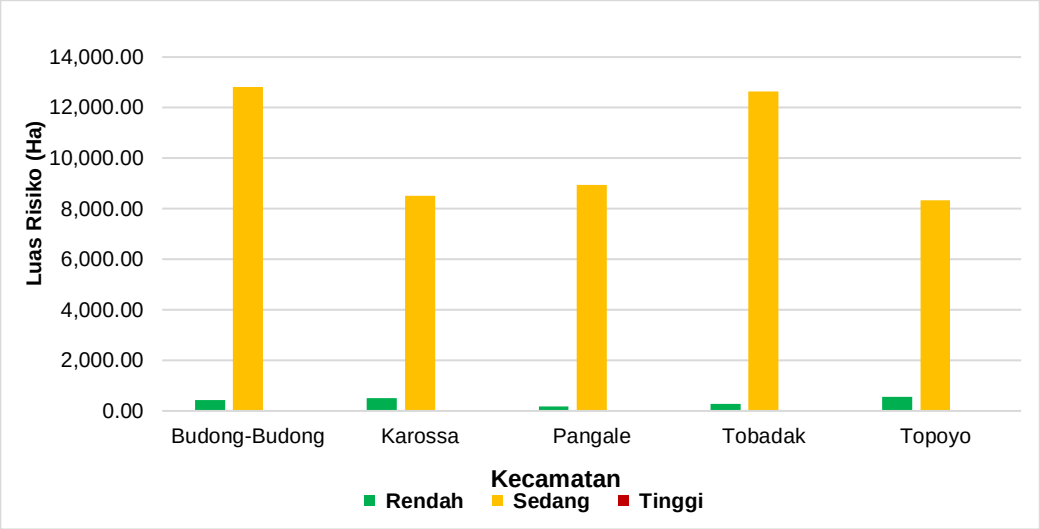
Bencana likuefaksi terjadi di 18 Desa di Kabupaten Mamuju Tengah dengan kelas bahaya **Sedang**, kelas kerentanan **Sedang** dan kelas kapasitas **Sedang**. Adapun tingkat risiko bencana likuefaksi tiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah secara lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2. 34 Tingkat Risiko Bencana Likuefaksi di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Likuefaksi (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	428,76	12.806,28	-	13.235,04	Sedang
02	Karossa	506,62	8.513,39	-	9.020,01	Sedang
03	Pangale	180,04	8.930,89	0,07	9.111,00	Sedang
04	Tobadak	268,20	12.628,26	-	12.896,46	Sedang
05	Topoyo	555,69	8.340,44	-	8.896,13	Sedang
Kabupaten Mamuju Tengah		**1.939,31**	**51,219.26**	**0.07**	**53.158,65**	**Sedang**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 19 Luas Risiko Likuefaksi (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana likuefaksi umumnya didominasi kelas Sedang. Secara lebih rinci tidak ditemukan adanya Desa dengan kelas risiko Tinggi dan Rendah, sedangkan kelas Sedang terdapat di 52 Desa (5 Kecamatan). Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat 52 Desa/Kelurahan yang memiliki daerah yang berisiko terpapar bencana likuefaksi dengan total luas risiko bencana likuefaksi sebesar **53.158,65 Ha**. Dengan demikian, kelas risiko likuefaksi secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas **Sedang**.

- Risiko Bencana Kekeringan

  Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam dokumen ini adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun metode analisis indeks kekeringan yang dilakukan adalah *Standardized Precipitation Evapotranspiration Index* (SPEI) yang dikembangkan oleh Vicente-Serrano et.al pada tahun 2010.

Gambar 2. 20 Peta Risiko Kekeringan Di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

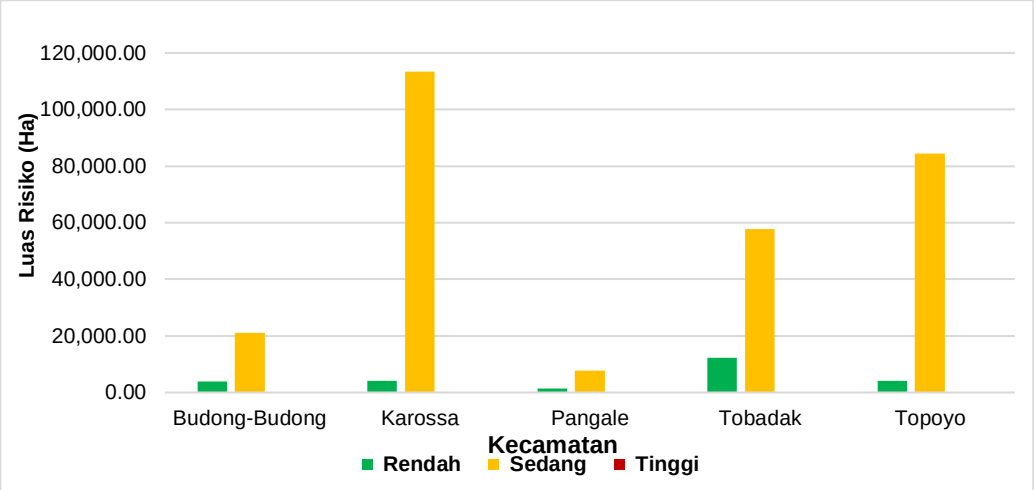
Bencana kekeringan berpotensi terjadi di seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah. Kelas risiko kekeringan Kabupaten Mamuju Tengah ditentukan berdasarkan kelas bahaya **Sedang**, kelas kerentanan **Rendah** dan kelas kapasitas **Rendah**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 21 Tingkat Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Kekeringan (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	3.904,12	21.062,88	-	24.967,00	Sedang
02	Karossa	4.022,56	113.515,44	-	117.538,00	Sedang
03	Pangale	1.409,52	7.701,48	-	9.111,00	Sedang
04	Tobadak	12.221,09	57.769,91	-	69.991,00	Sedang
05	Topoyo	4.134,24	84.345,76	-	88.480,00	Sedang
Kabupaten Mamuju Tengah		**25.691,53**	**284.395,47**	**-**	**310.087,00**	**Sedang**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 21 Luas Risiko Kekeringan (Ha) Kabupaten Mamuju Tengah



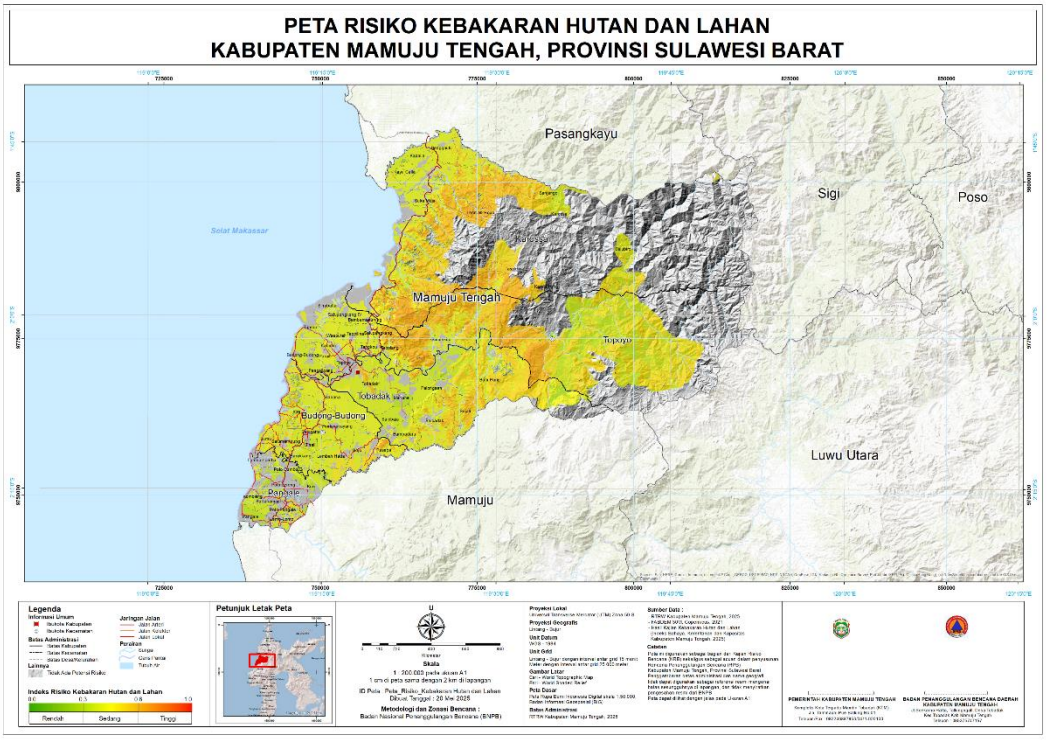
Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana kekeringan umumnya didominasi kelas Sedang. Secara lebih rinci tidak ditemukan adanya Desa dengan kelas risiko Tinggi dan Rendah, sedangkan kelas Sedang terdapat di 54 Desa (5 Kecamatan). Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, seluruhnya berisiko terpapar bencana kekeringan dengan total luas risiko bencana kekeringan sebesar **310.087,00 Ha**. Dengan demikian, risiko kekeringan secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk kelas **Sedang.**

- Risiko Bencana Kebakaran Hutan

  Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.12/Menhut/-II/2009 tentang Pengendalian Hutan). Sebaran spasial luasan wilayah terpapar Kebakaran Hutan dan Lahan dipengaruhi oleh jenis tutupan lahan, jenis tanah dan titik api (hot spot). Kebakaran hutan dan lahan biasanya terjadi pada wilayah yang vegetasinya rawan untuk terbakar misalnya pada wilayah gambut, semak belukar, kawasan perkebunan rakyat dan padang alang-alang. Faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, pembukaan lahan oleh manusia, dan puntung rokok para petani atau pencari kayu di kawasan hutan.

Gambar 2. 22 Peta Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

Bencana kebakaran hutan dan lahan berpotensi terjadi di seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Mamuju Tengah. Kelas risiko kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Mamuju Tengah ditentukan berdasarkan kelas bahaya **Sedang**, kelas kerentanan **Tinggi** dan kelas kapasitas **Sedang**. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

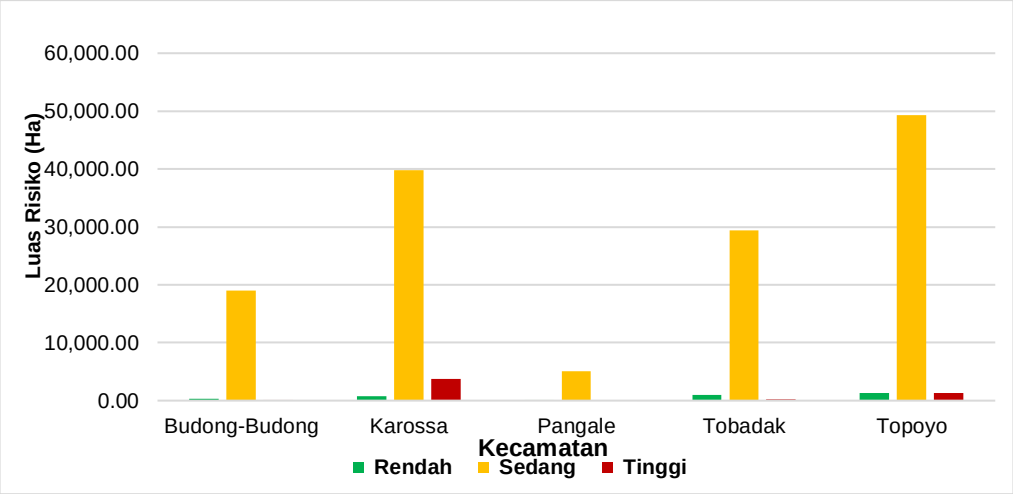
Tabel 2. 35 Tingkat Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	300,96	19.048,59	95,22	19.444,77	Sedang
02	Karossa	771,51	39.826,21	3.753,28	44.351,00	Sedang
03	Pangale	28,71	5.087,79	-	5.116,50	Sedang
04	Tobadak	933,93	29.415,51	161,91	30.511,35	Sedang
05	Topoyo	1.260,51	49.297,80	1.349,55	51.907,86	Sedang

Kecamatan	Potensi Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
	Rendah	Sedang	Tinggi		
Kabupaten Mamuju Tengah	3.295,62	142.675,90	5.359,96	151.331,48	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 23 Luas Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar bencana kebakaran hutan dan lahan umumnya didominasi kelas Sedang. Secara lebih rinci ditemukan adanya Desa dengan kelas risiko Tinggi di Kecamatan Karossa dan Topoyo, sedangkan kelas Sedang terdapat di 54 Desa (5 Kecamatan). Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, seluruhnya berisiko terpapar bencana kebakaran hutan dan lahan dengan total luas risiko bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar **151.331,48 Ha**. Dengan demikian, kelas risiko kebakaran hutan dan lahan secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas **Sedang**.

RISIKO MULTIBAHAYA

Hasil analisis luas multibahaya dilakukan dengan menggabungkan beberapa potensi bencana yang mengancam suatu wilayah. Penggabungan dilakukan dengan mempertimbangkan nilai maksimum dari setiap bencana yang terjadi sehingga gambaran bencana yang tampak pada analisis multibahaya adalah bencana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap suatu wilayah. Analisis multibahaya juga dilakukan perhitungan pada luas multibahaya, kerentanan, kapasitas dan risiko multibahaya. Hasil perhitungan nilai potensi luas bahaya tersaji pada tabel berikut.

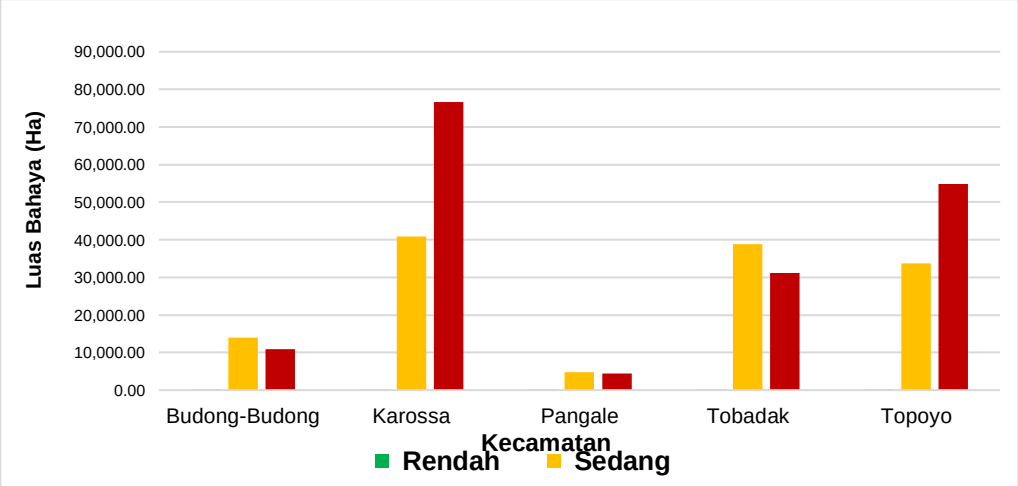
Tabel 2. 36 Potensi Luas Multibahaya per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Luas Multibahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	3,82	14.001,40	10.961,77	24.967,00	Tinggi
02	Karossa	43,41	40.875,73	76.618,86	117.538,00	Tinggi
03	Pangale	7,14	4.709,48	4.394,38	9.111,00	Tinggi
04	Tobadak	14,21	38.778,77	31.198,02	69.991,00	Sedang
05	Topoyo	17,88	33.654,88	54.807,24	88.480,00	Tinggi
Kabupaten Mamuju Tengah		**86,47**	**32.020,26**	**77.980,27**	**310.087,00**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

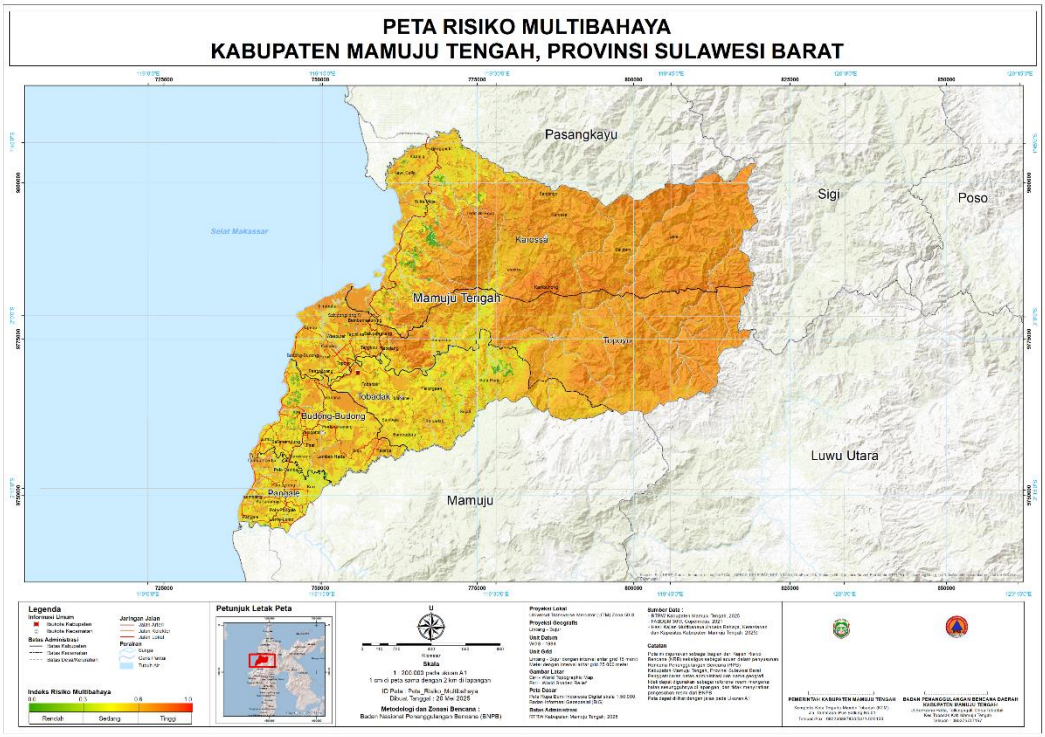
Rekapitulasi data yang ditunjukkan pada tabel di atas menunjukkan luasan multibahaya yang mungkin terjadi. Secara total luas multibahaya Kabupaten Mamuju Tengah 310.087,00 Ha dan termasuk kategori Tinggi. Untuk kelas multibahaya Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas kelas Rendah dengan total luas 86,47 Ha, kelas Sedang 132.020,26 Ha dan kelas Tinggi sebesar 177.980,27 Ha. Hasil menunjukkan Kecamatan Karossa memiliki total luasan tertinggi pada kelas Rendah, Sedang dan Tinggi dengan luas masing-masing mencapai 43,41 Ha, 40.875,73 Ha, dan 76.618,86 Ha, sehingga menjadi daerah dengan pengaruh bencana terbesar. Secara ringkas grafik perbandingan luas multibahaya dijelaskan pada Gambar berikut.

Gambar 2. 24 Luas Risiko Bencana Multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah.



Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 25 Peta Risiko Multi Bahaya di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Peta Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

KERENTANAN MULTIBAHAYA

Kajian kerentanan multibahaya dilakukan untuk mengetahui potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian di Kabupaten Mamuju Tengah. Kajian tersebut dikelompokkan berdasarkan kelas penduduk terpapar dan kelas kerugian, dan kelas kerusakan lingkungan. Rekapitulasi potensi penduduk terpapar dan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada beberapa tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 37 Potensi Penduduk Terpapar Kerentanan Multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Jumlah Penduduk Terpapar (Jiwa)	Kelompok Rentan (Jiwa)			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
01	Budong-Budong	30.632	5.244	13.628	53	Tinggi
02	Karossa	29.529	4.754	14.204	36	Tinggi
03	Pangale	15.328	2.787	9.140	50	Tinggi
04	Tobadak	29.884	4.856	13.455	49	Tinggi
05	Topoyo	37.901	6.457	14.861	112	Tinggi
Kabupaten Mamuju Tengah		**143.274**	**24.098**	**65.288**	**300**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Total penduduk terpapar diperoleh dari rekapitulasi hasil potensi penduduk terpapar dari Kecamatan yang memiliki potensi mengalami bencana multibahaya. Penduduk terpapar bencana multibahaya berdasarkan banyaknya aktivitas penduduk yang berada di area rentan terhadap bencana multibahaya. Kelas penduduk terpapar bencana di Kabupaten Mamuju Tengah ditentukan dengan melihat kelas penduduk terpapar maksimum dari seluruh Kecamatan terpapar bencana multibahaya. Penduduk terpapar bencana multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah diperoleh dari total jumlah penduduk terpapar, yaitu sejumlah 143.274 jiwa dan berada pada kelas Tinggi. Secara terperinci, potensi penduduk terpapar pada kelompok rentan terdiri dari kelompok umur rentan sejumlah 24.098 jiwa, penduduk miskin sejumlah 65.288 jiwa, dan penduduk disabilitas sejumlah 300 jiwa. Kecamatan yang memiliki potensi penduduk terpapar tertinggi bencana multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah adalah Kecamatan Topoyo, yaitu dengan jumlah potensi penduduk terpapar mencapai 37.901 jiwa, sedangkan daerah yang memiliki potensi penduduk terpapar terkecil adalah Kecamatan Pangale yaitu sebanyak 15.328 jiwa.

Berdasarkan kajian potensi kelompok rentan terhadap bencana multibahaya, Kecamatan Topoyo memiliki potensi penduduk terpapar dari kelompok rentan yang tertinggi khususnya dari kelompok umur rentan yakni sebesar 6.457 jiwa. Potensi penduduk miskin terpapar tertinggi juga di Kecamatan Topoyo sebesar 14.861 jiwa termasuk potensi kelompok rentan dari penduduk disabilitas tertinggi terdapat di Kecamatan Topoyo, yaitu 112 jiwa.

Risiko multibahaya dikaji melalui nilai bahaya, kerentanan, dan kapasitas sehingga diperoleh kelas risiko Desa dan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Secara keseluruhan, hasil kajian risiko menunjukkan bahwa kelas bahaya multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah adalah Tinggi dengan kelas kerentanan Tinggi dan kelas kapasitas adalah Sedang. Oleh karena itu, kelas risiko multibahaya di Kabupaten Mamuju Tengah secara keseluruhan adalah Tinggi.

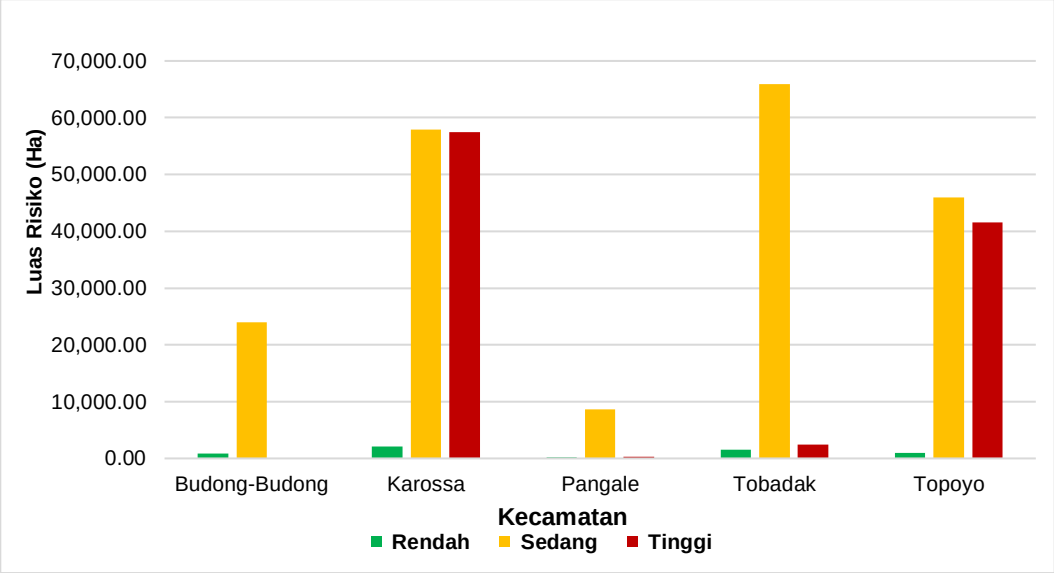
Tabel 2. 38 Potensi Luas Risiko Multibahaya Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan		Potensi Risiko Multibahaya (Ha)			Total Luas (Ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
01	Budong-Budong	825.36	16,930.78	7,210.86	24,967.00	Tinggi
02	Karossa	2,102.68	40,964.14	74,471.18	117,538.00	Tinggi
03	Pangale	179.58	8,427.09	504.32	9,111.00	Sedang
04	Tobadak	1,560.93	61,390.65	7,039.42	69,991.00	Sedang
05	Topoyo	1,009.33	32,254.48	55,216.20	88,480.00	Tinggi
Kabupaten Mamuju Tengah		**5,677.88**	**159,967.14**	**144,441.98**	**310,087.00**	**Tinggi**

Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan tabel dan gambar di atas, dapat diketahui daerah-daerah di Kabupaten Mamuju Tengah yang berisiko terpapar multibahaya umumnya didominasi kelas Tinggi. Secara lebih rinci, kecamatan dengan kelas risiko Tinggi terdapat di 15 Desa (3 Kecamatan), kelas Sedang terdapat di 39 Desa (3 Kecamatan). Dari jumlah total 54 Desa di 5 Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, seluruhnya memiliki daerah yang berisiko terpapar bencana multibahaya dengan total luas risiko bencana multibahaya sebesar 310.087,00 Ha. Dengan demikian, kelas risiko bencana multibahaya secara keseluruhan di Kabupaten Mamuju Tengah masuk pada kelas Tinggi

Gambar 2. 26 Luas Risiko Multibahaya (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber: Kajian Risiko Bencana Mamuju Tengah, 2025

c) Daya Dukung Air

Daya dukung air adalah kemampuan suatu lingkungan atau wilayah untuk menyediakan air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas, baik domestik maupun industri, tanpa merusak sumber daya air itu sendiri. Ini melibatkan perbandingan antara ketersediaan air dengan kebutuhan air. Jika kebutuhan air melebihi ketersediaan, maka wilayah tersebut dikatakan mengalami defisit daya dukung air. Faktor-faktor yang mempengaruhi daya dukung air yaitu ketersediaan air meliputi curah hujan, limpasan air permukaan, air tanah, dan sumber air lainnya; kebutuhan air; kualitas air; tata ruang wilayah; dan perubahan iklim. Menjaga daya dukung air sangat penting untuk kengsungan hidup manusia dan ekosistem, menjamin pembangunan berkelanjutan dan mencegah krisis air di masa depan.

Tabel 2. 39 Luasan Status Daya Dukung Air Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan	Status Daya Dukung Air (Ha)		Total
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Budong-Budong	11.350,99	14.232,79	25.583,78
Karossa	103.551,83	12.846,79	116.398,62
Pangale	4.413,35	5.143,54	9.556,89
Tobadak	27.231,56	10.472,12	37.703,67
Topoyo	78.160,92	8.516,58	86.677,50
Total	224.708,64	51.211,83	275.920,47

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029

Sekitar 18 persen dari Kabupaten Mamuju Tengah telah terlampaui daya dukung airnya yaitu sebagian besar dari wilayah Kecamatan Budong-Budong dan Pangale. Jika dibandingkan dengan tiga kecamatan lainnya, daya tampung air di wilayah Budong-Budong dan Pangale relatif kecil dikarenakan memiliki jumlah penduduk yang cukup padat.

Proyeksi daya dukung air tahun 2030 disasarkan pada perkiraan peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2030. Peningkatan pendidik tersebut akan meningkaykan kebutuhan air sebear 2.000.000 m^3 jika tidak memperhatikan perubahan ketersediaan air di masa mendatang.

Tabel 2. 40 Proyeksi Daya Dukung Penyediaan Air Tahun 2030 berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah

NO	Kecamatan	Model Jumlah Populasi Sistem Grid		Ketersediaan Air (m^3/tahun)	Kebutuhan Air Domestik (m^3/tahun)	Kebutuhan Air Lahan (m^3/tahun)	Kebutuhan (m^3/tahun)	Selisih	STatus
		Luas (Ha)	Penduduk (jiwa)						
1	Budong-Budong	25.583,78	37.085	222.514.874,04	3.204.144,00	232.523.667,33	235.727.811,33	-13.212.937,29	Terlampaui
2	Karossa	116.398,62	36.137	1.046.806.621,06	3.122.236,80	241.895.313,02	245.017.549,82	801.789.071,23	Belum Terlampaui
3	Pangale	9.556,89	17.616	92.339.756,61	1.522.022,40	132.960.260,17	134.482.282,57	-42.142.525,96	Terlampaui
4	Tobadak	37.703,67	32.004	352.531.937,79	2.765.145,60	217.131.320,78	219.896.466,38	132.635.471,41	Belum Terlampaui
5	Topoyo	86.677,50	43.914	844.544.820,21	3.794.169,60	200.724.552,27	204.518.721,87	640.026.098,35	Belum Terlampaui
	Grand Total	275.920,47	166.756	2.558.738.009,70	14.407.718,40	1.025.235.113,57	1.039.642.831,97	1.519.095.177,74	Belum Terlampaui

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029

Proyeksi daya dukung air tahun 2030 juga mempengaruhi perbahan wilayah belum terlampaui dan telah terlampaui. Perubahan secara wilayah hanya sekitar 0,7 persen dari luas total Kabupaten Mamuju Tengah. Proyeksi kondisi daya dukung air Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2030 mendatang berdasarkan kecamatan secara spasial disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 41 Proyeksi Status Daya Dukung Air Tahun 2030 Menurut Kecamatan pada Kabupaten Mamuju Tengah

Kecamatan	Status Daya Dukung Air (Ha)		Total
	Belum Terlampaui	Terlampaui	
Budong-Budong	11.311,88	14.271,90	25.583,78
Karossa	103.411,55	12.987,07	116.398,62
Pangale	4.398,04	5.158,86	9.556,89
Tobadak	27.210,86	10.492,82	37.703,67
Topoyo	76.370,57	10.306,93	86.677,50
Total	222.702,90	53.217,57	275.920,47

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029

2.1.2. Demografi

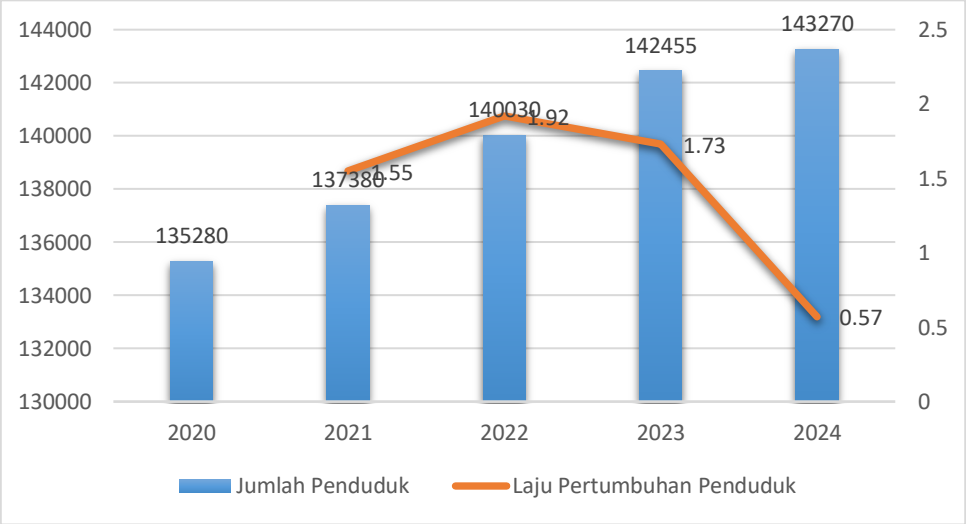
Menjelaskan karakteristik demografi berdasarkan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, keberadaan masyarakat adat, dan karakteristik lainnya sesuai konteks daerah. Penjelasan konteks demografi ini sekurang-kurangnya didukung dengan indikator seperti **Laju Pertumbuhan Penduduk, jumlah penduduk per kecamatan, Rasio Penduduk (rasio jenis kelamin), Kepadatan Penduduk, dan indikator lainnya. Selain itu perlu dilengkapi denga proyeksi dan analisis penduduk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tersaji dalam proyeksi penduduk di RPJPD 2025-2045**.

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar dan penting dalam perencanaan wilayah dan kota. Dinamika penduduk yang tinggal dan beraktivitas di dalamnya menjadikan kota/ wilayah berkembang. Dinamika tersebut mencakup peristiwa-peristiwa demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan migrasi yang dapat mempengaruhi jumlah, komposisi, distribusi dan kepadatan penduduk di suatu kota/ wilayah, yang pada akhirnya berdampak pada munculnya isu-isu kependudukan, seperti urbanisasi, bonus demografi, population ageing dan lainnya. Oleh karenanya, aspek kependudukan harus menjadi dasar atau landasan bagi perencana untuk merumuskan perencanaan pembangunan di wilayahnya.

1) *Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk*
   Data penduduk kabupaten mamuju tengah pada tahun 2024 beradasarkan survey statistik data konsolidasi bersih Semester I Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 143,270 jiwa penduduk dengan

laju pertumbuhan penduduk sejak tahun 2020 sebesar 1,15 persen setiap tahunnya. Jumlah tersebut terdiri atas 73.609 jiwa laki-laki dan 69.665 jiwa perempuan. Jumlah penduduk akan terus meningkat seiring dengan mobilisasi penduduk dan bertambahnya angka kelahiran. Data perkembangan jumlah penduduk selama lima tahun di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.

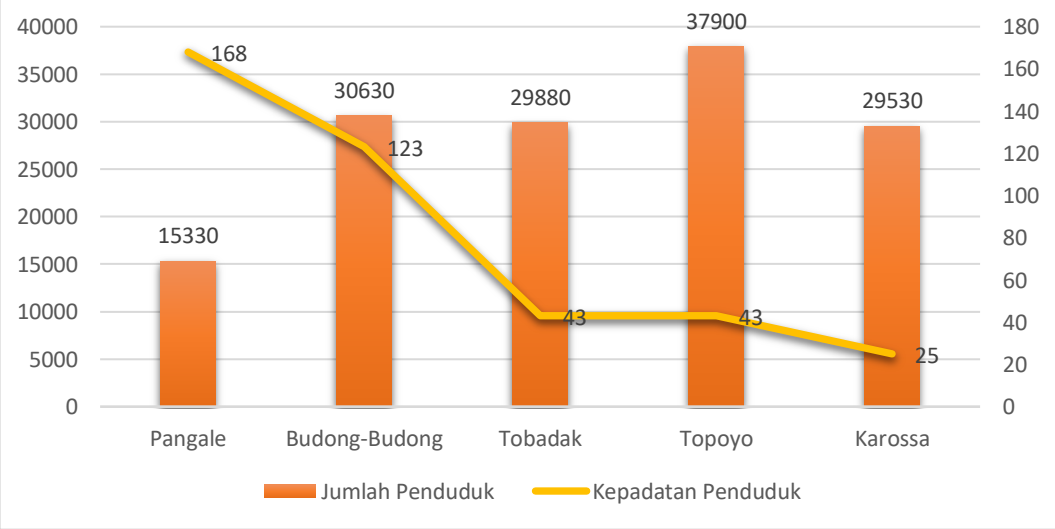
Gambar 2. 27 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

Distribusi penduduk tertinggi di Kabupaten Mamuju Tengah berada di Kecamatan Topoyo dengan jumlah penduduk yang tercatatkan sebesar 37,9 ribu jiwa atau 26,45 persen dari total penduduk Mamuju Tengah. Sementara itu distribusi penduduk terkecil berada di Kecamatan Pangale dengan jumlah penduduk sebesar 15,33 ribu jiwa atau 10,70 persen dari total penduduk Mamuju Tengah.

Gambar 2. 28 Tingkat Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

Dari data tingkat kepadatan penduduk diatas dapat dilihat bahwa Kecamatan Pangale memiliki jumlah penduduk yang paling sedikit tetapi dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling besar. Hal ini disebabkan luas wilayah yang kecil dibandingkan dengan banyaknya pemukiman penduduk. Kecamatan Karossa memiliki kepadatan penduduk yang paling rendah, menunjukkan wilayah yang luas dengan penduduk uang lebih tersebar. Kecamatan Topoyo dan Tobadak memiliki jumlah penduduk cukup besar tetapi dengan kepadatan rendah, menunjukkan area yang lebih luas dan masih berkembang. Kecamatan Budong-Budong berada di tengah-tengah dalam hal kepadatan, menunjukkan distribusi penduduk yang relatif merata.

2) *Rasio Penduduk*

Rasio Penduduk merupakan Perbandingan antara jumlah dua kelompok populasi atau antara satu kelompok populasi dengan populasi total. Rasio ini digunakan untuk menggambarkan Tingkat keseimbangan dalam suatu populasi.

Tabel 2. 42 Rasio Penduduk Di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No	Wilayah	Tahun	Jumlah	Rasio Penduduk
1	Kab. Mamuju Tengah	2020	135.280	**44,88**
2		2021	138.685	**46,01**
3		2022	140.030	**46,45**
4		2023	142.455	**47,26**
5		2024	143.274	**47,53**

Sumber : *BPS Kab. Mamuju Tengah dalam angka 2025*

Dari Data Rasio penduduk di atas dapat di lihat bahwa di Kabupaten Mamuju Tengah, kepadatan penduduk terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Kepadatan penduduk pada tahun 2020 mencapai angka 44 jiwa/km2 dan mengalami peningkatan hingga tahun 2024 mencapai angka 47,53 jiwa/km2.

3) *Rasio Jenis Kelamin*

Rasio Jenis Kelamin merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk Perempuan. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk Perempuan.

Tabel 2. 43 Tabel Rasio Jenis Kelamin penduduk Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020 - 2024

Wilayah	Tahun	Rasio Jenis Kelamin
Kab. Mamuju Tengah	2020	106,9
	2021	106,85
	2022	106,77
	2023	106,07
	2024	105,7

Sumber : *BPS Kab. Mamuju Tengah dalam angka 2025*

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa, rasio jenis kelamin penduduk di kabupaten mamuju Tengah pada tahun 2024 mencapai angka 105, 7.

4) *Rasio Ketergantungan*

Rasio Ketergantungan (Dependensi) merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Rasio ini memberikan indikasi tentang beban yang ditanggung oleh penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum atau tidak lagi produktif. Rasio ketergantungan mengukur proporsi penduduk yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan yang cukup untuk mendukung diri sendiri, dibandingkan dengan penduduk yang bekerja atau memiliki pekerjaan.

Tabel 2. 44 Tabel Rasio ketergantungan di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020 - 2024

Wilayah	Tahun	Rasio Ketergantungan
Kab. Mamuju Tengah	2020	48,83
	2021	48,56
	2022	48,48
	2023	48,56
	2024	48,75

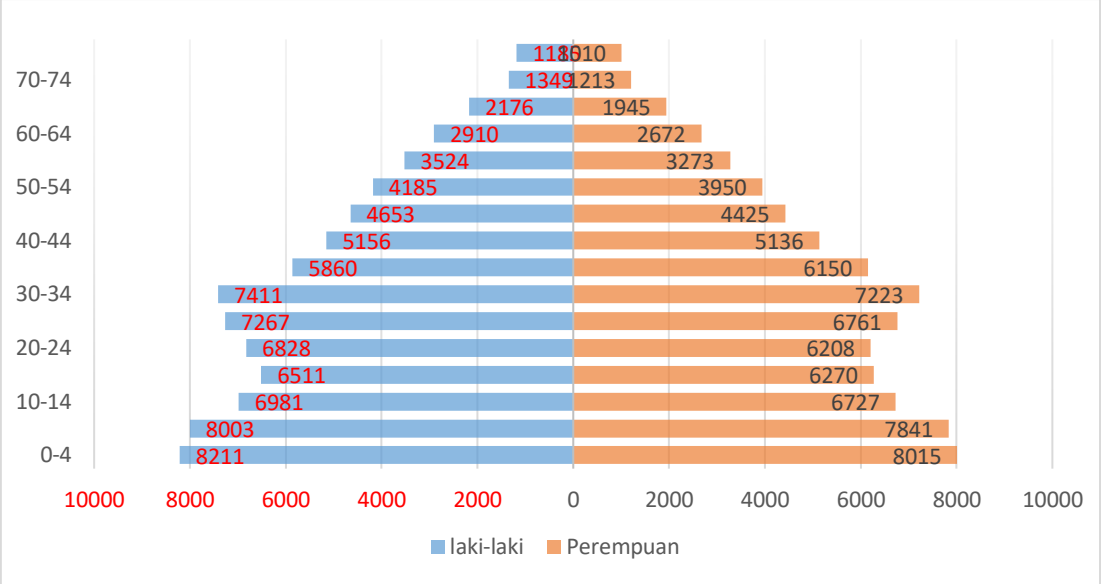
Sumber : *BPS Kab. Mamuju Tengah dalam angka 2025*

Dari data diatas tercatat bahwa persentase rasio ketergantungan di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami penurunan dari tahun 2020 mencapai angka 48% turun menjadi 46% pada tahun 2024.

5) *Proyeksi Penduduk dan rasio ketergantungannya*

Analisis bonus demografi dihitung dengan membandingkan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar disbanding usia non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk.

Gambar 2. 29 Proyeksi Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2030



Sumber: BPS Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2030 proporsi penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah diproyeksikan mencapai 161.029 jiwa. Penduduk Mamuju Tengah masih mengalami bonus demografi ditandai dengan usia penduduk muda dan produktif yang lebih banyak jika dibandingkan dengan usia non produktif. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) diproyeksikan sebesar 106.373 jiwa atau 66,06 persen dari total penduduk, sedangkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan >65 tahun diproyeksi sebesar 54.656 jiwa atau 33,94 persen dari total penduduk. Sehingga untuk rasio ketergantungan antara penduduk usia non produktif terhadap penduduk usia produktif adalah sebesar 51,38.

Tabel 2. 45 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2025 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2026	2027	2028	2029	2030
0-14 Tahun	20822	21185	21555	21920	22267	22583
15-64 Tahun	48217	49013	49784	50550	51309	52068
>65 Tahun	2867	3105	3350	3609	3882	4168
Rasio Ketergantungan	49,13	49,56	50,03	50,50	50,96	51,38

Sumber: BPS Mamuju Tengah, data diolah

Angka ketergantungan di Kabupaten Mamuju Tengah diproyeksikan meningkat dalam lima tahun yang akan datang. Hal ini disebabkan jumlah penduduk usia non produktif semakin meningkat. Membaiknya indeks kesehatan menandakan harapan hidup dan kesehatan usia lanjut semakin membaik. Disisi lain, dalam ketenagakerjaan di Indonesia usia diatas 65 tahun dianggap bukan lagi sebagai tenaga kerja dan tidak dianggap sebagai usia produktif. Sehingga bertambannya jumlah penduduk usia non produktif

ini akan meningkatkan Rasio Ketergantungan terhadap penduduk usia produktif.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi dilengkapi dengan indikator seperti **Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, TPT, Gini Ratio, IMM/IPM dan indikator lainnya**. Dalam menarasikan agar dikorelasikan satu indikator dengan indikator lainnya sehingga dapat dipahami secara utuh dan lebih bermakna.

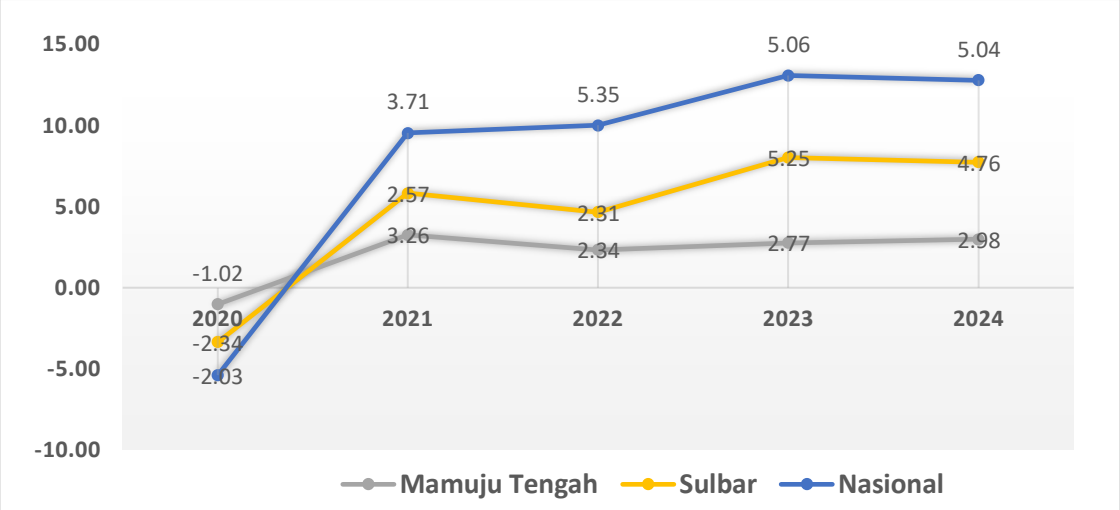
1) *Laju Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator fundamental yang menggambarkan ekspansi kapasitas produktif suatu wilayah, diukur melalui peningkatan output barang dan jasa dalam periode tertentu, umumnya dinyatakan dalam persentase perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil. Secara konseptual, pertumbuhan ekonomi mencerminkan transformasi kuantitatif dalam aktivitas ekonomi yang menghasilkan peningkatan nilai tambah agregat, mencakup seluruh sektor produksi dari primer hingga tersier.

Dalam perspektif makroekonomi regional, pertumbuhan ekonomi merepresentasikan akumulasi kapital, peningkatan produktivitas faktor produksi, adopsi teknologi, dan efisiensi alokasi sumber daya yang termanifestasi dalam ekspansi output. Indikator ini menjadi instrumen evaluatif utama bagi pembuat kebijakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, meski tidak secara langsung menggambarkan distribusi kesejahteraan atau kualitas pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota merefleksikan dinamika dan resiliensi struktur ekonomi lokal terhadap berbagai fenomena, baik eksternal seperti fluktuasi harga komoditas global dan pandemi, maupun internal seperti kebijakan fiskal daerah dan kapasitas institusional. Nilai positif mengindikasikan ekspansi aktivitas ekonomi, sementara nilai negatif menunjukkan kontraksi yang sering diasosiasikan dengan resesi atau krisis. Analisis komparatif antarwilayah memungkinkan identifikasi kesenjangan pembangunan dan faktor determinan yang mendasarinya, menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang tepat sasaran untuk akselerasi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2. 30 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah (persen) Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Kabupaten Mamuju Tengah memperlihatkan trajektori pertumbuhan ekonomi yang moderat dengan pola *recovery-stabilization* selama periode 2020-2024. Diawali dengan kontraksi -1,02% pada 2020 akibat guncangan eksternal pandemi COVID-19, kabupaten ini mengalami rebound signifikan sebesar 3,26% pada 2021 melalui implementasi kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang disinergikan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Sebagai daerah agropolitan dengan dominasi subsektor pertanian (terutama sawit, kakao, dan padi), pemulihan harga komoditas dan ketersediaan pasar domestik mendorong peningkatan nilai tambah sektor ini. Aktivitas pertanian rakyat relatif tidak terlalu terdampak oleh pembatasan sosial, sehingga menjadi tulang punggung pemulihan awal. Pembangunan konektivitas wilayah, jalan produksi, dan sarana pelayanan publik di kawasan transmigrasi Tobadak, Topoyo, dan Karossa memicu aktivitas sektor konstruksi dan jasa nonperdagangan. Hal ini berperan penting dalam menstimulasi pergerakan ekonomi lokal setelah kontraksi tahun 2020. Reorientasi APBD untuk mendukung penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi memberi dorongan pada sektor jasa pemerintahan dan perdagangan lokal. Realisasi belanja modal meningkat di tahun 2021–2022 untuk proyek infrastruktur dasar.

Perlambatan moderat menjadi 2,34% pada 2022 mengindikasikan fenomena *base effect* pasca-pemulihan drastis tahun sebelumnya, diikuti momentum akselerasi gradual ke 2,77% (2023) dan 2,98% (2024) yang mencerminkan konsolidasi struktural ekonomi regional.

Tabel 2. 46 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Barat (persen), Tahun 2020-2024

Kabupaten	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	(1,38)	2,13	2,38	5,29	5,30
Polewali Mandar	(1,57)	1,87	3,58	4,56	5,94
Mamasa	(1,27)	2,00	1,79	3,36	3,26
Mamuju	(2,26)	2,35	3,28	4,47	6,47

Kabupaten	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pasangkayu	(2,73)	3,78	(0,02)	6,78	0,68
Mamuju Tengah	(1,02)	3,26	2,34	2,77	2,98
Provinsi Sulawesi Barat	(2,34)	2,57	2,26	5,23	4,76

Dalam konteks perbandingan interkabupaten, kinerja ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dengan kabupaten tetangganya. Kabupaten Mamuju mencatatkan pertumbuhan lebih dinamis dengan lonjakan hingga 4,47% pada 2023 dan 6,47% pada 2024, mengindikasikan keunggulan struktural ekonomi sebagai pusat pemerintahan provinsi. Kabupaten Pasangkayu memperlihatkan volatilitas tertinggi dengan kontraksi -0,02% pada 2022 diikuti lonjakan drastis menjadi 6,78% pada 2023 yang mencerminkan ketergantungan pada sektor rentan fluktuasi. Sementara Majene dan Polewali Mandar menunjukkan tren akselerasi konsisten dengan puncak pertumbuhan 5,30% dan 5,94% pada 2024, didukung oleh diversifikasi ekonomi yang lebih matang dan konektivitas yang lebih baik dengan pusat ekonomi regional.

Determinan kausal kesenjangan pertumbuhan meliputi ketergantungan tinggi Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah pada sektor primer yang rentan terhadap volatilitas harga komoditas, belum optimalnya infrastruktur ekonomi dan konektivitas logistik, serta transformasi struktural ekonomi yang berjalan lambat dari aktivitas subsisten menuju industrialisasi dan jasa bernilai tambah tinggi. Dibandingkan dengan Kabupaten Mamuju yang memperoleh keuntungan dari aglomerasi ekonomi sebagai pusat administratif dan Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki basis manufaktur lebih kuat, Kabupaten Mamuju Tengah masih perlu memperkuat kapabilitas produktifnya. Meski demikian, kecenderungan pertumbuhan positif dan eskalasi inkremental sepanjang 2021-2024 menandakan adanya fundamental ekonomi yang resilient dengan potensi ekspansi yang dapat diakselerasi melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi investasi pada sektor-sektor strategis unggulan daerah.

2) *Tingkat Kemiskinan*

Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan dinamika pembangunan yang unik sebagai daerah hasil pemekaran di Provinsi Sulawesi Barat. Selama periode 2020-2024, terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, meskipun masih diiringi tantangan yang substansial. Indikator ekonomi makro menunjukkan pertumbuhan moderat dengan PDRB yang mengalami peningkatan rata-rata sebesar 5,2% per tahun, didominasi oleh kontribusi sektor pertanian yang mencapai 41,3% dari total perekonomian daerah. Namun, ketergantungan pada sektor pertanian yang rentan terhadap fluktuasi cuaca dan harga komoditas menciptakan kerentanan struktural dalam perekonomian daerah.

Garis kemiskinan menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 27,19% dari Rp255.440 pada 2020 menjadi Rp324.888 pada 2024. Peningkatan tahunan rata-rata sebesar 6,2% ini melampaui tingkat inflasi normal, mengindikasikan tekanan ekonomi yang lebih besar pada standar hidup minimum. Kenaikan tertinggi terjadi antara 2022-2023 dengan pertumbuhan 6,62% (dari Rp290.030 menjadi Rp309.227), yang menandakan adanya guncangan ekonomi yang lebih kuat pada periode tersebut

Tabel 2. 33 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman (P1), Indeks Keparahan (P2), dan Garis Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020-2024

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin %		Indeks Kedalaman (P1)	Indeks Keparahan (P2)
		Jumlah (Ribu)	Presentase		
2020	255.440	9,25	6,79	0,88	0,18
2021	265.413	9,74	7,13	1,15	0,27
2022	290.030	9,98	7,17	1,15	0,24
2023	309.227	10,39	7,32	0,965	0,184
2024	324.888	11,16	7,72	0,92	0,19

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, berbagai versi

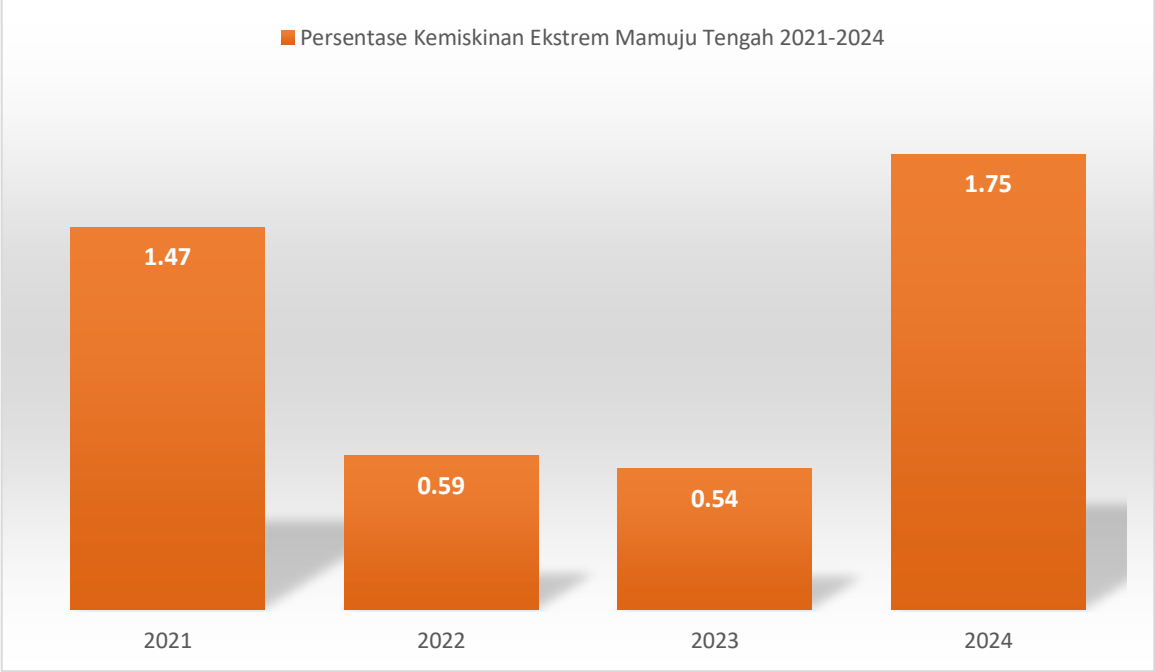
Dalam aspek sosial, tingkat kemiskinan Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 6,79% pada tahun 2020 menjadi 7,72% pada tahun 2024, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 11,16 ribu jiwa. Meskipun persentase ini tergolong moderat dan berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Barat (11,21%), peningkatan konsisten ini mengindikasikan tantangan struktural dalam upaya pengentasan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami fluktuasi dengan pola yang menarik dimana naik tajam dari 0,88 pada 2020 menjadi 1,15 pada 2021-2022, lalu turun menjadi 0,965 pada 2023, dan kemudian kembali naik ke 0,92 pada 2024. Pola ini menggambarkan dinamika kompleks dari kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) menunjukkan tren serupa dengan kenaikan tajam dari 0,18 (2020) menjadi 0,27 (2021), lalu menurun ke 0,24 (2022) dan 0,184 (2023), sebelum sedikit naik ke 0,19 (2024). Meskipun terjadi perbaikan sejak 2021, nilai P2 pada 2024 masih di atas level 2020, mengindikasikan ketimpangan distribusi pengeluaran di antara kelompok miskin yang belum kembali ke kondisi pra-pandemi.

Tabel 2. 47 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju Tengah Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan, Status Bekerja, Menggunakan Air Layak dan Jamban, Tahun 2018-2024

Tahun	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan,			Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas		Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja			Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut sektor bekerja			Persentase RT Miskin yg Menggunakan Air layak dan Jamban	
	< SD	Tamat SD/ SLTP	SLTA +	Angka Partisipasi Sekolah		Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di sektor formal	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja bukan di sektor pertanian	Air Layak	Jamban Sendiri/ Bersama
				7-12 tahun	13-15 tahun								
2018	33,43	59,10	7,48	93,60	88,92	41,81	37,88	20,32	41,81	14,57	43,63	29,59	65,47
2019	20,1	59,17	20,73	98,12	90,87	38,99	49,76	11,25	38,99	42,75	18,26	39,39	64,52
2020	32,15	53,43	14,41	100	100	48,78	35,62	15,60	48,78	37,18	14,04	69,53	64,95
2021	33,99	46,61	19,40	98,13	83,10	50,84	39,96	9,20	50,84	35,58	13,58	52,53	67,49
2022	18,88	50,74	30,38	89,72	94,23	49,84	35,98	14,18	49,84	24,67	25,49	89,51	63,15
2023	20,96	50,33	28,71	100	99,56	39,25	46,58	14,17	39,25	39	21,75	58,96	79,84
2024	14,57	51,68	33,75	99,33	96,48	39,49	39,52	20,99	39,49	33,73	26,78	85,41	91,78

Sumber: BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota, berbagai versi

Gambar 2. 31 persentase kemiskinan ekstrem Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024



Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2024 yakni 1,75 persen setelah sebelumnya mengalami penurunan pada tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2021 sampai 2023. Jumlah masyarakat miskin ekstrem pada tahun 2024 masih lebih besar dibanding tahun 2021.

Masalah ketepatan sasaran bantuan sosial menjadi tantangan serius dalam penanggulangan kemiskinan di Mamuju Tengah. Data dari BPS menunjukkan

bahwa terdapat permasalahan inclusion dan exclusion error dalam penyaluran bantuan. Pada tahun 2022, sebanyak 82,89% rumah tangga miskin di Mamuju Tengah tidak menerima bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), sementara hanya 17,11% rumah tangga miskin yang menerima bantuan tersebut. Hal ini mengindikasikan tingginya exclusion error, di mana banyak keluarga yang seharusnya mendapat bantuan justru tidak terjangkau program.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang menyerap tenaga kerja di Mamuju Tengah. Namun, produktivitas sektor ini relatif rendah dibandingkan sektor lain, sehingga pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian cenderung lebih rendah.

Selain itu infrastruktur dasar seperti akses terhadap air bersih dan sanitasi layak masih menjadi permasalahan. Data menunjukkan bahwa masih terdapat persentase rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap air bersih dan jamban yang layak, sehingga berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Pada sektor pendidikan, capaian dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan menunjukkan kemajuan, meskipun kesenjangan masih terlihat. Angka Partisipasi Sekolah untuk jenjang pendidikan dasar mencapai 93,46%, namun menurun signifikan pada jenjang pendidikan menengah. Tingginya persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD/SLTP (51,68%) mengindikasikan korelasi kuat antara tingkat pendidikan dan kemiskinan, sekaligus menunjukkan area prioritas untuk intervensi kebijakan.

Kondisi kesehatan masyarakat menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa indikator, seperti penurunan angka kematian ibu dan peningkatan cakupan imunisasi dasar. Namun, disparitas akses layanan kesehatan masih menjadi tantangan, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Infrastruktur kesehatan berupa pusat kesehatan masyarakat dan tenaga medis menunjukkan rasio yang masih di bawah standar nasional, dengan distribusi yang belum merata di seluruh wilayah kabupaten.

Tata kelola pemerintahan mengalami perbaikan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas, tercermin dari peningkatan opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah. Namun, efektivitas program-program pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan, masih menghadapi tantangan signifikan. Data menunjukkan adanya masalah serius dalam ketepatan sasaran program bantuan sosial, dengan hanya 17,11% rumah tangga miskin yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada tahun 2022, mengindikasikan kelemahan dalam sistem pendataan dan distribusi bantuan.

Dalam konteks penataan ruang dan pengelolaan lingkungan, terdapat peningkatan luas kawasan terbangun yang mencapai 6,8% dari total luas wilayah. Pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas pembangunan

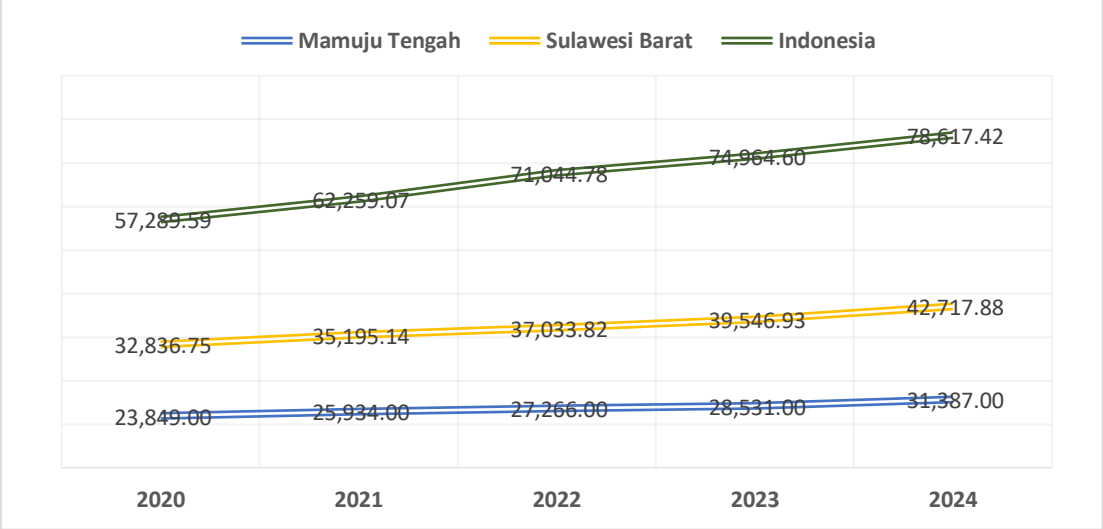
masih memerlukan penguatan, terutama terkait dengan konversi lahan yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem dan fungsi lingkungan, khususnya pada daerah-daerah dengan topografi yang rentan terhadap bencana alam.

Secara keseluruhan, kondisi umum Kabupaten Kabupaten Mamuju Tengah periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang moderat dalam berbagai aspek pembangunan, namun masih diiringi dengan tantangan struktural yang memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan akses terhadap layanan dasar, transformasi ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas institusional pemerintah daerah.

3) *PDRB Per Kapita*

Pendapatan perkapita merupakan indikator ekonomi makro yang menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu, biasanya satu tahun. Secara teknis, pendapatan perkapita dihitung dengan membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut. Indikator Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah wilayah Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan wialyah itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Gambar 2. 32 PDRB Per Kapita Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional (ribu rupiah) Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah), 2025

Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren positif dalam pendapatan perkapita selama periode 2020-2024. Pendapatan perkapita kabupaten ini mengalami peningkatan secara konsisten dari Rp23.849.000 pada tahun 2020 menjadi Rp31.387.000 pada tahun 2024, dengan pertumbuhan kumulatif sebesar 31,6% selama lima tahun tersebut. Pertumbuhan tahunan

pendapatan perkapita Mamuju Tengah rata-rata mencapai 7,1%, yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi secara umum.

Namun, pertumbuhan PDRB perkapita atas dasar harga konstan menunjukkan gambaran yang berbeda. Pada tahun 2020, PDRB perkapita konstan Mamuju Tengah mengalami kontraksi sebesar 3,20%, kemungkinan besar sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,41%, meskipun kemudian melambat menjadi 0,42% pada tahun 2022. Pada tahun 2023-2024, terjadi percepatan pertumbuhan menjadi 0,86% dan 1,09% secara berturut-turut, mengindikasikan pemulihan ekonomi yang semakin menguat meskipun masih relatif lambat.

Meskipun menunjukkan pertumbuhan positif, pendapatan perkapita Mamuju Tengah masih tertinggal jauh dari rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan nasional. Pada tahun 2024, pendapatan perkapita Mamuju Tengah hanya mencapai 73,5% dari rata-rata provinsi (Rp42.717.880) dan hanya 40,4% dari rata-rata nasional (Rp77.617.420). Kesenjangan ini cenderung semakin melebar selama periode lima tahun terakhir, mengindikasikan bahwa Mamuju Tengah belum mampu mengejar ketertinggalan ekonominya.

Pada tahun 2020, kesenjangan pendapatan perkapita antara Mamuju Tengah dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp8.987.750, namun pada tahun 2024 kesenjangan ini meningkat menjadi Rp11.330.880. Demikian pula dengan kesenjangan terhadap rata-rata nasional yang meningkat dari Rp33.440.590 pada tahun 2020 menjadi Rp46.230.420 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan yang semakin lebar.

Tabel 2. 48 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (ribu rupiah) Tahun 2020-2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Majene	20.227	20.402	20.595	21.384	22.211
Polewali Mandar	19.363	19.478	19.927	20.585	21.550
Mamasa	13.560	13.649	13.686	13.934	14.174
Mamuju	29.287	29.469	29.928	30.757	32.224
Pasangkayu	37.920	38.525	37.782	39.587	39.127
Mamuju Tengah	16.387	16.618	16.687	16.831	17.014

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Berdasarkan data PDRB perkapita atas dasar harga konstan, Kabupaten Mamuju Tengah berada pada posisi terendah di antara kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Barat. Pada tahun 2024, PDRB perkapita konstan Mamuju Tengah sebesar Rp17.014.000, jauh di bawah Kabupaten Pasangkayu (Rp39.127.000), Kabupaten Mamuju (Rp32.224.000), Kabupaten Polewali Mandar (Rp21.550.000), dan Kabupaten Majene (Rp22.211.000). Posisi ini

relatif tidak mengalami perubahan signifikan selama periode 2020-2024, menunjukkan bahwa Mamuju Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan daya saing ekonominya di tingkat provinsi.

Rendahnya pendapatan perkapita Mamuju Tengah kemungkinan besar terkait dengan struktur ekonomi kabupaten yang masih bertumpu pada sektor primer dengan nilai tambah relatif rendah. Dominasi sektor pertanian dengan produktivitas yang terbatas menjadi salah satu faktor penyebab pendapatan perkapita yang rendah. Diversifikasi ekonomi yang terbatas dan minimnya industrialisasi juga berkontribusi terhadap rendahnya pertumbuhan PDRB perkapita.

Tren pendapatan perkapita Mamuju Tengah mengimplikasikan perlunya strategi pembangunan yang lebih terarah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

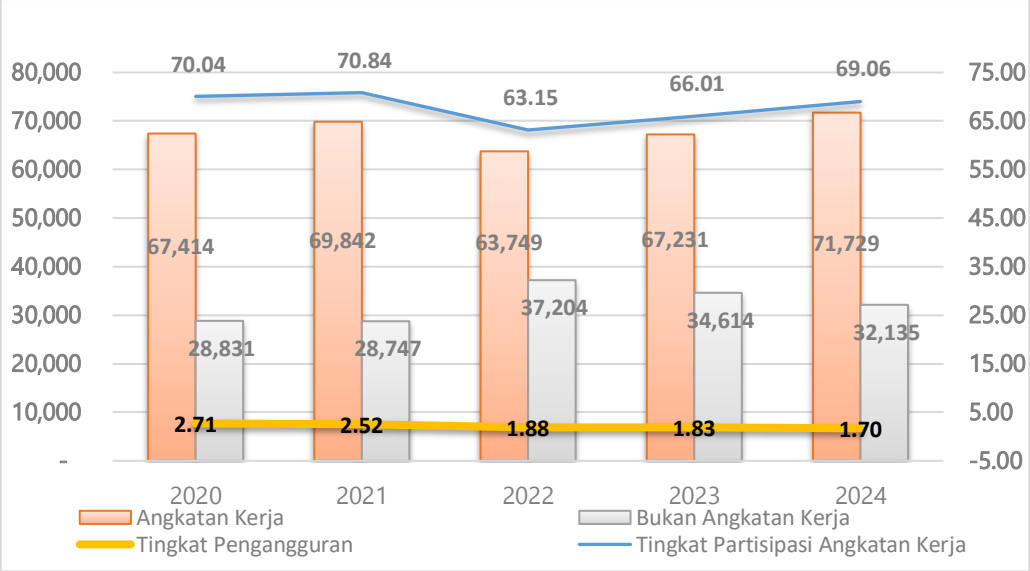
4) *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*

Struktur ketenagakerjaan dan tingkat pengangguran merupakan indikator fundamental yang mencerminkan kesehatan ekonomi dan efektivitas kebijakan pembangunan suatu daerah. Bagi Kabupaten Mamuju Tengah yang relatif baru terbentuk melalui pemekaran, dinamika ketenagakerjaan menjadi barometer penting dalam mengevaluasi arah pembangunan dan mengidentifikasi tantangan strategis yang dihadapi. Analisis komprehensif terhadap kondisi ketenagakerjaan periode 2020-2024 menjadi krusial mengingat rentang waktu tersebut mencakup masa pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19 yang mengakibatkan disrupsi signifikan terhadap pasar tenaga kerja secara global maupun lokal.

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki karakteristik unik sebagai daerah dengan basis ekonomi pertanian dan perkebunan, dengan topografi yang beragam dan infrastruktur yang masih dalam tahap pengembangan. Kondisi ini memberikan konteks spesifik terhadap struktur ketenagakerjaan yang terbentuk, pola pengangguran yang terjadi, serta tantangan yang dihadapi dalam menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks pembangunan daerah yang berkelanjutan, dinamika ketenagakerjaan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek pembangunan lainnya, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan transformasi struktur ekonomi. Pemahaman mendalam terhadap kondisi ketenagakerjaan menjadi prasyarat dalam merumuskan kebijakan dan program yang tepat sasaran, efektif, dan mampu menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Gambar 2. 33 Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah

Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengelolaan ketenagakerjaan selama periode 2020-2024, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang terus menurun dari 2,71% pada 2020 menjadi 1,70% pada 2024. Pencapaian ini menempatkan Mamuju Tengah pada posisi yang jauh lebih baik dibandingkan rata-rata nasional dan provinsi Sulawesi Barat. Analisis data ketenagakerjaan menunjukkan pertumbuhan angkatan kerja dengan CAGR sebesar 1,60%, melampaui laju pertumbuhan penduduk kabupaten (1,32%), mencerminkan optimalisasi bonus demografi yang efektif.

Dinamika tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Mamuju Tengah memperlihatkan pola fluktuatif dengan *tren U-shaped* selama lima tahun terakhir. TPAK mencapai 70,04% pada 2020, meningkat menjadi 70,84% pada 2021, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 63,15% pada 2022, sebelum kembali meningkat menjadi 66,01% (2023) dan 69,06% (2024). Pola ini mengindikasikan adanya *shock* struktural dalam pasar tenaga kerja pada tahun 2022, kemungkinan sebagai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor padat karya, restrukturisasi ekonomi lokal sebagai konsekuensi perubahan kebijakan nasional, serta pergeseran preferensi angkatan kerja.

Di balik rendahnya TPT, tantangan substantif masih dihadapi dalam aspek kualitas ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju Tengah. Komposisi pengangguran didominasi oleh pengangguran usia muda (15-24 tahun) yang mencapai 63,2% dari total pengangguran, dan fenomena pengangguran terdidik yang semakin meningkat dengan proporsi pengangguran berpendidikan menengah ke atas mencapai 47,8% pada 2024. Kedua hal ini mengindikasikan kesenjangan antara sistem pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Selain itu terlihat adanya kesenjangan yang konsisten antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam angkatan kerja. Pada tahun 2024, tercatat angkatan kerja laki-laki mencapai 39.078 orang sementara perempuan hanya 22.713 orang, mengonfirmasi ketimpangan gender dalam

partisipasi ekonomi yang telah diidentifikasi sebelumnya. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menunjukkan pola serupa dengan kesenjangan signifikan antara laki-laki (72,78%) dan perempuan (39,51%) pada tahun 2024.

Kesenjangan partisipasi gender dalam angkatan kerja Mamuju Tengah merupakan tantangan struktural yang perlu mendapat perhatian khusus. Data time-series 2017-2024 menunjukkan persistensi kesenjangan ini, meskipun terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio partisipasi perempuan terhadap laki-laki dalam angkatan kerja berkisar antara 0,54-0,59 selama periode tersebut, mengindikasikan hambatan sistemik yang membatasi akses perempuan ke pasar tenaga kerja formal.

Beberapa faktor mendasar yang berkontribusi terhadap ketimpangan ini meliputi: (1) beban ganda perempuan dalam ekonomi perawatan tidak berbayar dan ekonomi produktif, yang tercermin dari tingginya jumlah perempuan dalam kategori bukan angkatan kerja (33.851 perempuan dibandingkan 13.844 laki-laki pada 2024); (2) segregasi vertikal dan horizontal dalam pasar tenaga kerja yang membatasi akses perempuan terhadap sektor-sektor formal dengan produktivitas tinggi; (3) kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan; serta (4) norma sosial patriarki yang masih kuat di wilayah pedesaan Mamuju Tengah.

Tren jumlah pengangguran berdasarkan gender menunjukkan pola yang menarik. Pada tahun 2024, jumlah pengangguran laki-laki (670 orang) lebih tinggi dibandingkan perempuan (418 orang), namun hal ini perlu diinterpretasikan dalam konteks jumlah angkatan kerja yang sangat berbeda. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) perempuan (1,84%) sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki (1,71%), mengindikasikan kesulitan relatif yang lebih besar bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan setelah memasuki angkatan kerja.

Struktur ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah yang didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (71,93% dari PDRB pada 2023) memiliki dampak signifikan terhadap kualitas ketenagakerjaan. Dominasi sektor primer ini menyebabkan beberapa konsekuensi dalam pasar tenaga kerja: (1) prevalensi pekerjaan musiman dengan produktivitas dan pendapatan rendah; (2) keterbatasan penyerapan tenaga kerja terdidik; dan (3) tingginya *underemployment* atau setengah pengangguran.

Komposisi PDRB sektoral yang didominasi pertanian (lebih dari 70%) dengan kontribusi signifikan namun rendah terhadap pendapatan per kapita mengindikasikan produktivitas tenaga kerja yang rendah di sektor ini. Kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap PDRB hanya sekitar 0,84-0,92%, sementara sektor konstruksi berkontribusi sekitar 1,23-1,28%, menunjukkan keterbatasan diversifikasi ekonomi lokal.

Kontribusi sektor industri pengolahan yang relatif kecil namun menunjukkan tren peningkatan (dari 8,98% pada 2021 menjadi 9,22% pada 2023)

mengindikasikan adanya potensi diversifikasi ekonomi meskipun dengan laju yang masih lambat. Pengembangan sektor industri pengolahan, khususnya yang berbasis produk pertanian lokal, dapat menjadi katalisator dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan bernilai tambah tinggi.

Transformasi struktural ekonomi Mamuju Tengah masih pada tahap awal, ditandai dengan masih dominannya sektor pertanian dengan produktivitas rendah dan belum berkembangnya sektor sekunder yang mampu memberikan nilai tambah lebih tinggi. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi dan terbatasnya investasi di sektor manufaktur, terlihat dari rendahnya kontribusi sektor industri pengolahan (kurang dari 10%) terhadap PDRB.

Pendapatan per kapita ADHB Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan moderat dari Rp25.934 ribu pada 2021 menjadi Rp28.531 ribu pada 2023, dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 4,92%. Meskipun demikian, nilai ini masih berada di bawah rata-rata provinsi Sulawesi Barat. PDRB per kapita atas dasar harga konstan juga menunjukkan pertumbuhan terbatas dari Rp16.618 ribu (2021) menjadi Rp16.831 ribu (2023), dengan laju pertumbuhan tahunan rata-rata hanya 0,64%.

Keterbatasan pertumbuhan pendapatan per kapita ini mencerminkan tantangan produktivitas tenaga kerja yang dihadapi Mamuju Tengah. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas meliputi: (1) keterbatasan adopsi teknologi dan praktik pertanian modern di sektor dominan; (2) rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja; (3) keterbatasan infrastruktur penunjang ekonomi; dan (4) terbatasnya akses terhadap pembiayaan dan pasar bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

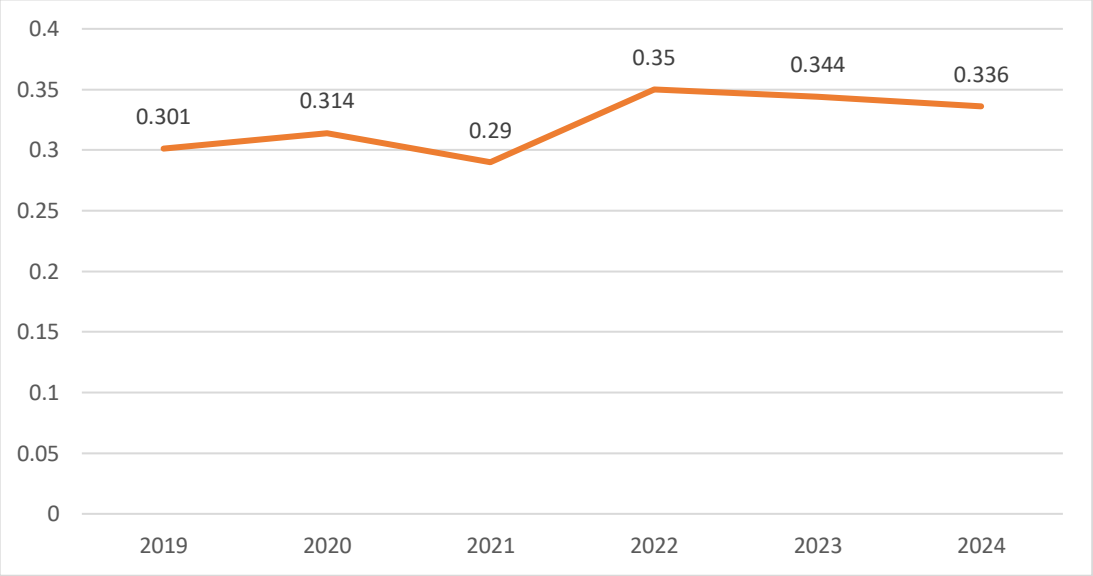
Berdasarkan analisis komprehensif ini, Kabupaten Mamuju Tengah perlu mengadopsi pendekatan *dual-track* dalam mengelola pasar tenaga kerja, dengan fokus pada peningkatan lapangan kerja produktif sekaligus penguatan kualitas angkatan kerja. Transformasi sektor pertanian dari subsisten menuju komersial dan berorientasi nilai tambah menjadi prasyarat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dengan penekanan pada pengembangan agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Akselerasi pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi juga diperlukan untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di sektor non-pertanian dengan produktivitas lebih tinggi. Dengan modal dasar berupa TPT rendah dan struktur demografi yang mendukung, penanganan tantangan struktural dalam kualitas ketenagakerjaan dan produktivitas secara terintegrasi akan mentransformasi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi Kabupaten Mamuju Tengah.

5) *Gini Ratio*

Gini Rasio merupakan alat ukur statistik yang dikembangkan oleh Corrado Gini pada tahun 1912 untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan

dalam populasi, dengan nilai berkisar antara 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan absolut). Indikator ini menjadi komponen penting dalam perencanaan pembangunan daerah karena memberikan gambaran tentang sejauh mana pertumbuhan ekonomi terdistribusi secara merata di masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, nilai Gini Rasio dibawah 0,3 menunjukkan ketimpangan rendah, 0,3-0,4 ketimpangan sedang, dan di atas 0,4 ketimpangan tinggi. Pengukuran ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan, sekaligus evaluasi keberhasilan program-program redistribusi pendapatan yang telah dijalankan. Dengan demikian, analisis Gini Rasio menjadi komponen fundamental dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk memastikan arah pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Gambar 2. 34 Gini Ratio Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (data 2024 masih data awal)

Berdasarkan data pada Gambar 2.4, Gini Rasio Kabupaten Mamuju Tengah dalam periode 2019-2023 menunjukkan pola fluktuatif yang menarik untuk dikaji. Pada tahun 2019, Gini Rasio berada pada posisi 0,301 yang berada pada ambang batas ketimpangan rendah-sedang, kemudian meningkat tipis menjadi 0,314 pada tahun 2020 yang bertepatan dengan awal masa pandemi COVID-19. Secara mengejutkan, tahun 2021 memperlihatkan penurunan signifikan menjadi 0,29, yang merupakan capaian terendah dalam periode lima tahun tersebut dan masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Namun, tahun 2022 ditandai dengan lonjakan tajam Gini Rasio menjadi 0,35, yang kemudian sedikit menurun menjadi 0,344 pada tahun 2023, kedua angka tersebut termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Fluktuasi ini memberikan gambaran tentang dinamika kompleks yang terjadi dalam struktur ekonomi dan sosial Mamuju Tengah sebagai daerah otonom baru yang masih dalam tahap pemantapan pembangunan. Kemampuan mencapai Gini Rasio 0,29 pada tahun 2021 di tengah masa pemulihan pandemi

memberikan pelajaran berharga bahwa ketimpangan di kabupaten ini dapat ditekan ke level yang cukup rendah dengan kombinasi kebijakan yang tepat.

Untuk memahami pola ketimpangan ekonomi di Mamuju Tengah secara komprehensif, perlu dilakukan kontekstualisasi dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah ini sebagai kabupaten yang dibentuk pada tahun 2013 hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju. Struktur ekonomi Mamuju Tengah masih bertumpu pada sektor primer, terutama pertanian dan perkebunan dengan komoditas unggulan kelapa sawit, kakao, dan padi, yang menyumbang porsi dominan dari total PDRB kabupaten. Ketergantungan pada sektor primer ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya pemerataan ekonomi, karena sektor ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, dan ketimpangan struktural terkait penguasaan lahan dan akses terhadap sumber daya produktif. Komposisi demografi Mamuju Tengah yang beragam, dengan perpaduan antara penduduk asli (suku Mandar, Bugis, Makassar) dan pendatang dari berbagai daerah, juga membentuk mozaik sosial-ekonomi yang kompleks dengan potensi kesenjangan antar kelompok masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Kondisi geografis kabupaten yang beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan, turut berkontribusi pada ketimpangan spasial dimana wilayah dengan infrastruktur lebih baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi lebih cepat dibandingkan wilayah terpencil dengan infrastruktur terbatas.

Peningkatan Gini Rasio pada tahun 2020 (0,314) dan sedikit penurunan pada 2023 (0,344) mencerminkan dampak pandemi COVID-19 dan proses pemulihan ekonomi yang tidak merata. Pada masa awal pandemi, pembatasan mobilitas, gangguan rantai pasok, dan penutupan sebagian aktivitas ekonomi berdampak lebih berat pada pekerja informal dan usaha mikro-kecil yang umumnya tidak memiliki perlindungan sosial memadai. Penurunan ketimpangan pada tahun 2021 (0,29) kemungkinan mencerminkan efektivitas program-program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi yang diluncurkan pemerintah pusat maupun daerah, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan berbagai program pendukung lainnya yang berhasil menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, lonjakan ketimpangan pada tahun 2022 (0,35) menandakan bahwa pemulihan ekonomi pasca-pandemi berlangsung tidak merata, dimana pelaku usaha dengan modal dan aset lebih besar cenderung dapat pulih lebih cepat dan memanfaatkan peluang-peluang ekonomi baru, sementara kelompok rentan masih berjuang untuk kembali ke kondisi pra-pandemi.

Struktur ekonomi Mamuju Tengah yang masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan memberikan tantangan struktural dalam upaya pemerataan pendapatan. Volatilitas harga komoditas pertanian dan perkebunan, ketimpangan dalam kepemilikan dan penguasaan lahan produktif, keterbatasan nilai tambah di sektor hulu, serta kesenjangan akses terhadap teknologi, permodalan, dan pasar menjadi faktor-faktor yang berkontribusi pada pola ketimpangan di kabupaten ini. Ketika harga

komoditas unggulan seperti kelapa sawit mengalami kenaikan, pemilik lahan luas dan pelaku usaha menengah-besar cenderung memperoleh manfaat yang lebih besar dibandingkan petani kecil atau buruh tani, yang pada gilirannya berpotensi memperlebar kesenjangan pendapatan. Dinamika ini mungkin turut menjelaskan fluktuasi Gini Rasio yang terjadi selama periode 2019-2023, mengingat terjadi volatilitas harga komoditas pertanian dan perkebunan pada tahun-tahun tersebut.

Faktor ketimpangan spasial juga berperan penting dalam membentuk dinamika Gini Rasio di Mamuju Tengah. Sebagai kabupaten yang relatif baru, pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan masih menjadi tantangan. Wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap infrastruktur dan pusat-pusat ekonomi cenderung mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan wilayah terpencil. Kesenjangan dalam akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi antar wilayah berpotensi menciptakan "kantong-kantong kemiskinan" yang persisten dan berkontribusi pada ketimpangan agregat di tingkat kabupaten. Meskipun data Gini Rasio yang tersaji dalam Gambar 2.4 merupakan angka agregat kabupaten, kemungkinan besar terdapat variasi ketimpangan yang cukup signifikan antar kecamatan atau desa, yang memerlukan strategi pembangunan wilayah yang lebih kontekstual dan berbasis kewilayahan.

Dinamika ketimpangan di Mamuju Tengah juga tidak terlepas dari perkembangan dan transformasi struktur ekonomi daerah. Sebagai kabupaten yang masih dalam tahap perkembangan, proses transisi dari ekonomi yang bertumpu pada sektor primer menuju ekonomi yang lebih beragam dengan kontribusi sektor sekunder dan tersier yang lebih signifikan menjadi tantangan tersendiri. Proses industrialisasi perdesaan dan pengembangan ekonomi digital yang mulai merambah ke daerah-daerah seperti Mamuju Tengah membuka peluang sekaligus tantangan baru. Di satu sisi, perkembangan sektor jasa dan ekonomi digital membuka akses terhadap pasar yang lebih luas dan alternatif mata pencaharian baru. Di sisi lain, kesenjangan digital (digital divide) antara kelompok yang memiliki akses dan kapasitas digital dengan yang tidak, berpotensi menciptakan bentuk ketimpangan baru jika tidak dikelola dengan baik. Transformasi ekonomi yang tidak diimbangi dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia lokal berisiko menciptakan pola "pertumbuhan tanpa pemerataan" (growth without equity) yang tercermin dari peningkatan Gini Rasio.

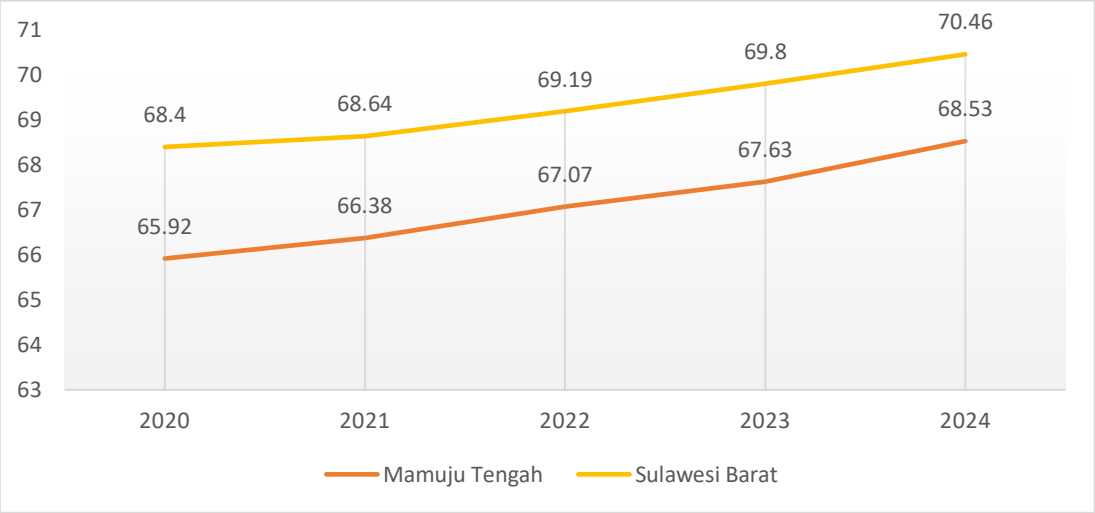
Dengan demikian, data Gini Rasio 2019-2023 bukan hanya memberikan gambaran tentang kondisi ketimpangan ekonomi di Mamuju Tengah, tetapi juga menjadi landasan penting bagi perumusan strategi dan kebijakan dalam RPJMD untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Transformasi struktural ekonomi daerah, penguatan perlindungan sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan pemerataan infrastruktur menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di Kabupaten Mamuju Tengah.

Pencapaian Gini Rasio 0,29 pada tahun 2021 membuktikan bahwa ketimpangan di Mamuju Tengah dapat ditekan ke level yang cukup rendah dengan kombinasi kebijakan yang tepat. Pengalaman ini memberikan optimisme sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan strategi pembangunan jangka menengah yang mampu mengembalikan dan mempertahankan tren penurunan ketimpangan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan pembangunan yang komprehensif, inklusif, dan berkeadilan, diharapkan dinamika Gini Rasio Mamuju Tengah ke depan akan menunjukkan tren penurunan yang konsisten, mencerminkan keberhasilan daerah ini dalam mewujudkan visi pembangunan yang tidak hanya bertumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkualitas dan berkeadilan. Komitmen untuk mengintegrasikan perspektif ketimpangan dalam seluruh aspek perencanaan pembangunan, serta koordinasi yang harmonis antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mewujudkan transformasi ekonomi Mamuju Tengah yang lebih inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

6) *Indeks Pembangunan Manusia/ Indeks Modal Manusia*

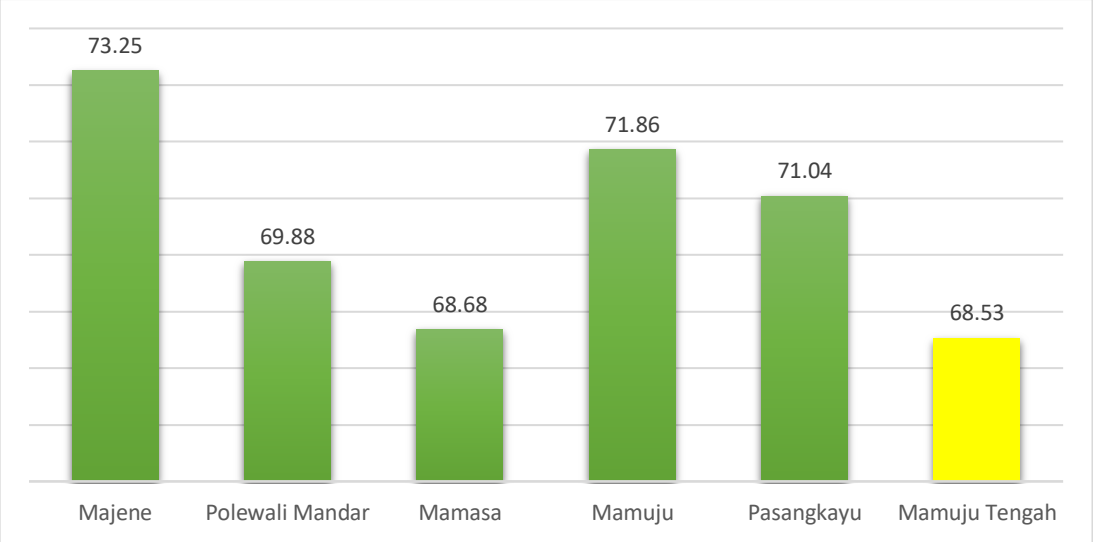
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan kualitas pembangunan suatu wilayah dari perspektif manusia sebagai subjek pembangunan. Berbeda dengan indikator ekonomi konvensional seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang hanya berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, IPM mengintegrasikan tiga dimensi fundamental pembangunan manusia yaitu kesehatan (diukur melalui Umur Harapan Hidup), pendidikan (diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), serta standar hidup layak (diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan). Integrasi ketiga dimensi ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah, menjadikannya indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gambar 2. 35 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Gambar 2. 36 Perbandingan IPM Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar, IPM Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Tercatat IPM Mamuju Tengah pada tahun 2020 sebesar 65,92, meningkat menjadi 66,38 pada 2021, 67,07 pada 2022, 67,63 pada 2023, dan mencapai 68,53 pada 2024. Capaian terakhir pada tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,33% dibandingkan tahun sebelumnya, yang merupakan pencapaian signifikan mengingat kompleksitas peningkatan IPM yang melibatkan berbagai dimensi pembangunan. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Barat, posisi IPM Mamuju Tengah masih berada di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 70,46 pada tahun 2024, serta di bawah kabupaten lain seperti Majene (73,25), Mamuju (71,86), dan Pasangkayu (71,04). Namun demikian, laju pertumbuhan IPM Mamuju

Tengah menunjukkan tren positif yang mengindikasikan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Analisis sektoral menunjukkan bahwa peningkatan IPM Mamuju Tengah pada tahun 2024 didorong oleh perbaikan pada seluruh komponennya. Dalam dimensi kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 69,76 tahun pada 2023 menjadi 70,05 tahun pada 2024, atau tumbuh sebesar 0,42%. Meskipun pertumbuhannya relatif kecil, peningkatan UHH ini mencerminkan perbaikan kualitas kesehatan dan lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti akses terhadap layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, kecukupan gizi, dan kualitas lingkungan. UHH 70,05 tahun menandakan bahwa rata-rata penduduk Mamuju Tengah yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk hidup hingga usia tersebut, menggambarkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dimensi pendidikan Mamuju Tengah juga menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat dari 12,66 tahun pada 2023 menjadi 13,68 tahun pada 2024, menandakan bahwa anak-anak usia sekolah di Mamuju Tengah kini memiliki peluang untuk menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi (setara semester awal perguruan tinggi). Peningkatan HLS ini mencerminkan keberhasilan upaya perluasan akses pendidikan dan perbaikan infrastruktur pendidikan di kabupaten tersebut. Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga mengalami peningkatan dari 7,73 tahun pada 2023 menjadi 7,94 tahun pada 2024, atau setara dengan jenjang SMP kelas 2. Meskipun masih tergolong rendah dibandingkan dengan standar pendidikan 12 tahun, tren peningkatan RLS menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap dalam tingkat pendidikan masyarakat Mamuju Tengah. Kesenjangan antara HLS dan RLS mengindikasikan adanya potensi peningkatan kualitas pendidikan di masa depan, seiring dengan semakin banyaknya generasi muda yang menempuh pendidikan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya.

Komponen standar hidup layak yang diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan juga mencatat kenaikan signifikan dari 8.821 ribu rupiah pada 2023 menjadi 9.250 ribu rupiah pada 2024, atau tumbuh sebesar 4,86%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan daya beli masyarakat Mamuju Tengah, yang mencerminkan kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa indikator pengeluaran per kapita ini juga perlu dilihat dalam konteks kecukupan dan kualitas pengeluaran, khususnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan vs non-pangan, yang mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sebenarnya.

Jika dilihat dari perkembangan historisnya, IPM Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan yang stabil meskipun dengan laju yang bervariasi. Peningkatan IPM yang relatif moderat pada periode 2020-2021 (dari 65,92 menjadi 66,38 atau naik 0,7%) kemungkinan dipengaruhi oleh

dampak pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi dan sosial. Namun pada periode berikutnya, laju peningkatan IPM mulai mengalami akselerasi, khususnya pada periode 2023-2024 yang mencatat pertumbuhan 1,33%. Akselerasi ini menunjukkan keberhasilan program pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.

Jika dianalisis dalam konteks spasial, posisi IPM Mamuju Tengah yang masih berada di bawah rata-rata provinsi mencerminkan tantangan pembangunan yang dihadapi wilayah ini sebagai kabupaten yang relatif baru hasil pemekaran. Kesenjangan pembangunan antar-wilayah dalam provinsi yang sama merupakan fenomena umum, terutama untuk daerah-daerah pemekaran yang masih dalam proses konsolidasi dan pengembangan infrastruktur dasar. Namun demikian, tren pertumbuhan IPM yang positif dan konsisten memberikan optimisme bahwa kesenjangan tersebut dapat dipersempit seiring dengan waktu, dengan catatan bahwa pemerintah daerah terus memprioritaskan investasi pada sektor-sektor yang berkontribusi langsung pada peningkatan IPM, yakni kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dari segi demografis, karakteristik Mamuju Tengah sebagai daerah dengan komposisi penduduk yang beragam, meliputi penduduk asli dan pendatang, memberikan tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan manusia. Di satu sisi, keberagaman ini dapat menciptakan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks dengan potensi kesenjangan antar kelompok masyarakat. Di sisi lain, perpaduan berbagai latar belakang budaya dan keahlian dapat menjadi modal sosial yang berharga untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah. Agar potensi ini dapat dioptimalkan, diperlukan pendekatan pembangunan inklusif yang memastikan seluruh kelompok masyarakat memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

Struktur ekonomi Mamuju Tengah yang masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian dan perkebunan, juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi dinamika IPM. Ketergantungan pada sektor primer dengan nilai tambah yang relatif rendah membatasi potensi peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya berimplikasi pada dimensi standar hidup layak dalam IPM. Diversifikasi ekonomi menuju sektor-sektor dengan nilai tambah lebih tinggi seperti pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dan jasa menjadi penting untuk mendorong peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Selain itu, peningkatan produktivitas sektor pertanian melalui adopsi teknologi dan praktik pertanian berkelanjutan juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani yang merupakan mayoritas penduduk Mamuju Tengah.

Dari perspektif pembangunan wilayah, karakteristik geografis Mamuju Tengah yang beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan, menghadirkan tantangan dalam pemerataan akses terhadap layanan dasar. Ketimpangan spasial dalam akses terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan,

dan infrastruktur ekonomi berpotensi menciptakan disparitas IPM antar-wilayah dalam kabupaten yang sama. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah menjadi penting untuk memastikan pembangunan manusia yang lebih merata. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar ibukota kabupaten dan penguatan konektivitas antar-wilayah dapat menjadi strategi untuk mengurangi ketimpangan spasial dan meningkatkan IPM secara agregat.

Jika dikaji dari aspek kelembagaan, peningkatan konsisten IPM Mamuju Tengah mencerminkan adanya kapasitas kelembagaan yang memadai dalam mengelola pembangunan. Koordinasi antar-sektor dan antar-tingkat pemerintahan, perencanaan berbasis bukti, serta monitoring dan evaluasi yang efektif merupakan prasyarat untuk keberhasilan program-program yang berkontribusi pada peningkatan IPM. Penguatan kapasitas kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan perlu terus diperkuat untuk mengakselerasi peningkatan IPM di masa depan.

Sebagai kesimpulan, dinamika IPM Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren positif yang mencerminkan keberhasilan upaya pembangunan manusia di wilayah tersebut. Peningkatan pada seluruh komponen IPM, meliputi Umur Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan pengeluaran per kapita, menggambarkan pendekatan pembangunan yang cukup komprehensif. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan struktural sebagai daerah pemekaran dengan ekonomi yang bertumpu pada sektor primer, tren pertumbuhan IPM yang konsisten memberikan landasan optimisme bahwa kualitas hidup masyarakat Mamuju Tengah akan terus membaik di masa depan. Capaian ini menjadi modal penting bagi perumusan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD periode mendatang, dengan fokus pada konsolidasi keberhasilan yang telah dicapai dan akselerasi pada bidang-bidang yang masih tertinggal.

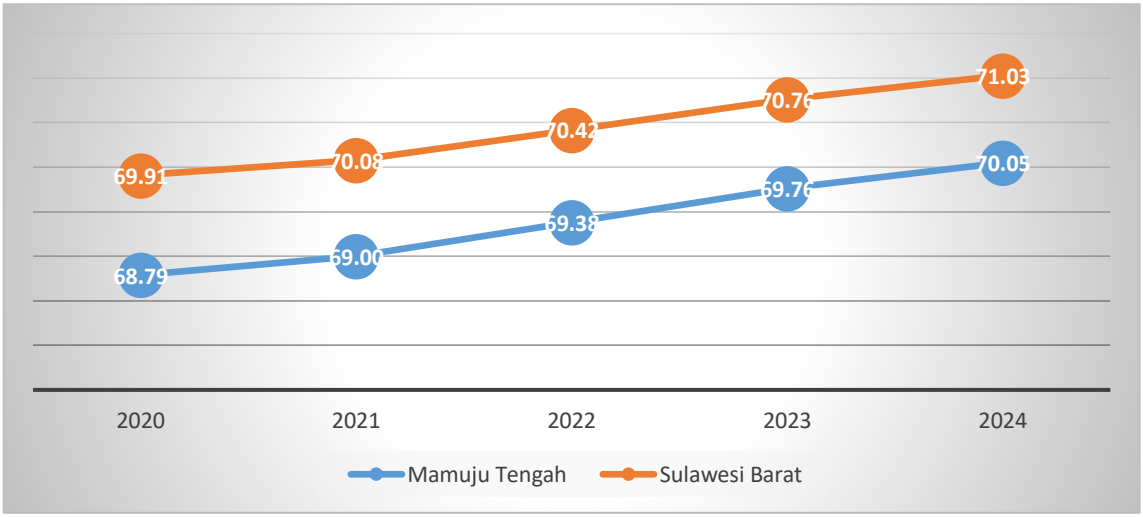
2.2.2. Kesehatan untuk Semua

Menjelaskan kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi selueruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti **Umur Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, Prevalensi Stunting**, dan indikator lainnya.

1) *Umur Harapan Hidup (UHH)*

   Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

Gambar 2. 37 Usia Harapan Hidup Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Capaian dimensi umur panjang dan hidup sehat Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 yaitu 70,05 tahun. Nilai ini meningkat sebesar 0,40 tahun jika dibandingkan dengan tahun 2022. UHH mencerminkan rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang sejak lahir. Artinya secara rata-rata bayi yang baru lahir pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan 70,05 tahun. Angka Harapan Hidup di Mamuju Tengah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukan adanya perbaikan derajat kesehatan penduduk di Mamuju Tengah.

2) *Indeks Keluarga Sehat*

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan. Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. Adapun aspek untuk mencapai keluarga sehat, antara lain kesehatan ibu dan anak, kondisi penyakit menular dan tidak menular, lingkungan rumah dan sekitarnya, kesehatan jiwa, serta gaya hidup. Kementerian Kesehatan telah menetapkan 12 indikator IKS yang terdiri dari (1) Keluarga mengikuti program KB, (2) Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, (3) Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, (4) Bayi mendapat ASI eksklusif, (5) Balita mendapatkan pemataуan pertumbuhan, (6) Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, (7) Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, (8) Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, (9) Anggota keluarga tidak ada yang merokok, (10) Keluarga sudah menjadi anggota JKN, (11) Keluarga mempunyai akses sarana air bersih , dan (12) Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. keluarga sehat ditentukan melalui proporsi keluarga sehat terhadap seluruh keluarga di wialayah tertentu dengan

kategori > 0,800 keluarga sehat, 0,500-0,800 keluarga pra sehat dan <0,500 keluarga tidak sehat.

Tabel 2. 49 Indeks Keluarga Sehat Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	0,11	0,16	0.217	0,21	
Provinsi	0,15	0,19	0,3	0,278	
Nasional	0,17	0,19	0,26	0.234	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa nilai IKS kabupaten mamuju tengah sebesar 0,217 atau kategori keluarga tidak sehat. Beberapa permasalahan di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2023 diantaranya masih rendahnya Keluarga mengikuti program KB, Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar, Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok dan Keluarga sudah menjadi anggota JKN.

3) *Prevalensi Stunting*

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Seorang anak dikatakan menderita stunting apabila panjang badan saat lahir dibawah empat puluh delapan sentimeter untuk bayi laki-laki dan kurang dari empat puluh tujuh sentimeter untuk bayi perempuan.

Tabel 2. 50 Prevalensi Stunting Berdasarkan SKI Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	n/a	26,3	28,06	27,9	31,5
Provinsi	n/a	33,8	35,0	30,3	35,4
Nasional	n/a	24,41	21,6	21,5	19,8

Sumber: SSGI 2020-2024, SKI 2024

Menurut Data Study Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Mamuju Tengah pada Maret 2023 meningkat menjadi 28,6 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,91 persen dari tahun 2021. Sementara itu jika melihat data dari E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) juga mencatatkan penderita stunting di Mamuju Tengah pada Januari 2023 meningkat menjadi 14,92 persen. Angka ini meningkat 0,47 persen sejak tahun 2019. Jika membandingkan capaian stunting Kabupaten

se-Sulbar angka stunting di Kabupaten Mamuju Tengah cukup rendah karena berada di urutan terbawah Kondisi ini menunjukkan bahwa intervensi sensitif dan spesifik dalam rangka penurunan stunting belum optimal.
Berdasarkan data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) yang menggambarkan data by name by adress balita di kabupaten mamuju tengah persentase balita pendek dan sangat pendek sebagai berikut.

Tabel 2. 51 Prevalensi Stunting Berdasarkan (e-PPGBM) Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Berdasarkan Data E-PPGBM	7,04	8,13	14,46	14,58	14,92	16,73

Sumber: Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, 2024

4) *Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberculosis (TB)*

Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkulosis (TB) mencakup dua aspek utama yaitu penemuan kasus (identifikasi dan diagnosis) dan pengobatan kasus (pemberian pengobatan yang tepat dan efektif).

Data penemuan kasus di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan fluktuasi capaian dari tahun 2020 hingga 2024, di mana jumlah temuan menurun dari 276 kasus pada 2020 menjadi 224 kasus pada 2021, kemungkinan dipengaruhi oleh keterbatasan deteksi saat pandemi. Mulai 2022 ditetapkan target penemuan kasus, namun capaian tahun tersebut (218 kasus, 84,86 persen) dan 2023 (296 kasus, 62,85 persen) belum memenuhi target, yang mengindikasikan bahwa kenaikan target tidak diimbangi peningkatan kemampuan deteksi. Tahun 2024 menjadi titik balik dengan capaian 383 kasus dari target 343 kasus (cakupan 111,66 persen), menunjukkan strategi pencarian kasus yang lebih efektif, intensifikasi surveilans, atau peningkatan kesadaran masyarakat, meskipun lonjakan ini juga perlu dicermati apakah mencerminkan keberhasilan deteksi atau peningkatan kasus aktual.

Tabel 2. 52 Cakupan Penemuan Kasus Tuberculosis Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Mamuju Tengah	2020	2021	2022	2023	2024
Target Penemuan Kasus			421	471	343
Capaian Temuan	276	224	218	296	383
Cakupan Penemuan Kasus			84,86	62,85	111,66

Sumber: Dinas Kesehatan Mamuju Tengah, 2025

Data pengobatan di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan jumlah pasien yang diobati dari 218 orang pada 2022 menjadi 303 orang pada 2023 dan 383 orang pada 2024. Keberhasilan pengobatan juga meningkat dari 185 kasus pada 2022 menjadi 267 pada 2023, namun meskipun jumlahnya terus naik hingga 302 kasus pada 2024, persentase keberhasilan justru mengalami fluktuasi. Persentase keberhasilan tercatat sebesar 84,86 persen pada 2022, naik menjadi 88,12 persen pada 2023, lalu menurun ke 78,85 persen pada 2024. Pola ini mengindikasikan bahwa meskipun cakupan pengobatan makin luas, tantangan dalam mempertahankan konsistensi kualitas dan efektivitas pengobatan masih ada, sehingga diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan terapi, khususnya pada lonjakan pasien di 2024.

Tabel 2. 53 Persentase Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Mamuju Tengah	2020	2021	2022	2023	2024
Pengobatan			218	303	383
Keberhasilan pengobatan			185	267	302
Persentase angka keberhasilan pengobatan			84,86	88,12	78,85

Sumber: Dinas Kesehatan Mamuju Tengah, 2025

2.2.3. Pendidikan Berkualiatas yang Merata

Menjelaskan kondisi pendidikan masyarakat yang berperan sentral dalam peningakatan kualiatas hidup manusia serta mewujudkan kehidupan masyarakat dan bangsa yang bermartabat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti **Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, dan Indikator lainnya.**

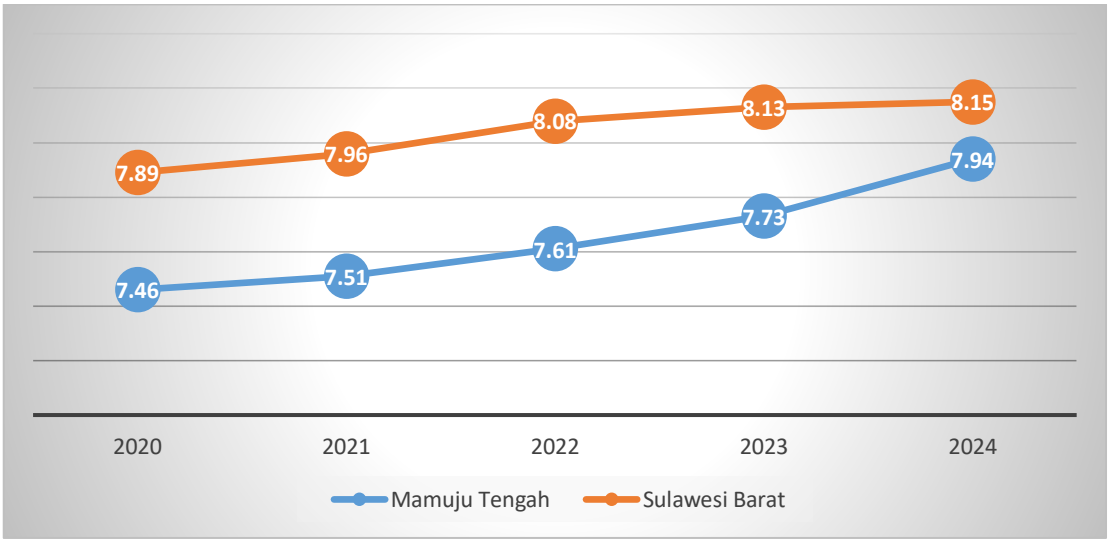
Pengetahuan diukur melalui dua indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata- rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

1) *Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*

Rata-rata Lama Sekolah Mamuju Tengah pada tahun 2023 telah mencapai 7,73 tahun dan meningkat pada tahun 2024 menjadi 7,94 tahun yang artinya secara rata-rata penduduk Mamuju Tengah yang berusia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 7,73 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Selama periode 2019-2024, RLS di Mamuju Tengah telah meningkat sebesar 0,49 tahun. Secara

umum Rata-rata Lama Sekolah tumbuh sebesar 1,35 persen atau naik secara rata-rata sebesar 0,10 tahun selama lima tahun.

Gambar 2. 38 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



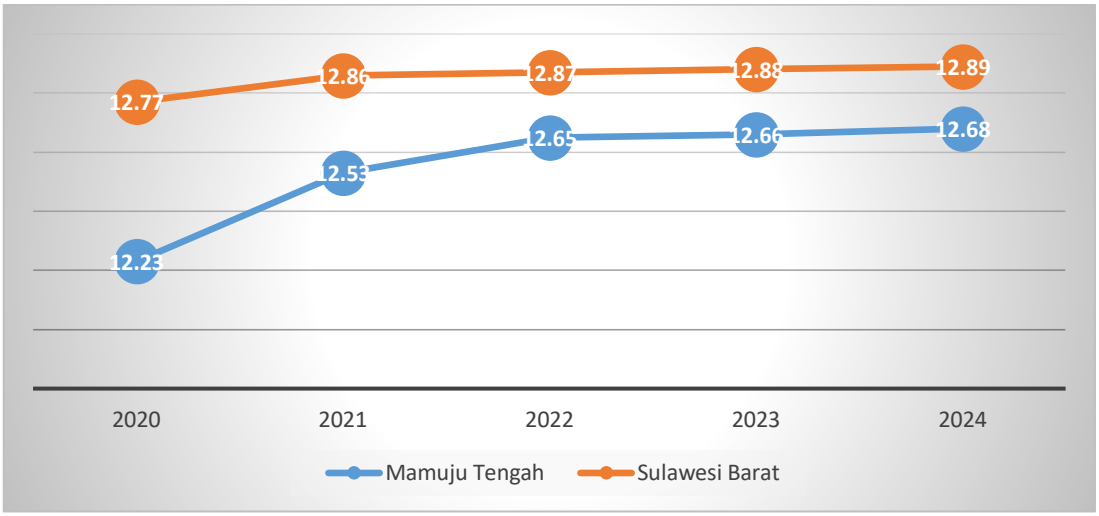
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Mamuju Tengah jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Sulawesi Barat. Tetapi jika dilihat tren peningkatannya RLS Mamuju Tengah lebih signifikan jika dibandingkan rata-rata provinsi. Sehingga diharapkan dalam lima tahun kedepan Rata-rata Lama Sekolah kanupaten Mamuju Tengah sudah berada diata rata-rata Provinsi Sulawesi Barat.

2) *Harapan Lama Sekolah*

Harapan Lama Sekolah Mamuju Tengah pada tahun 2024 telah mencapai 12,68 tahun yang berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,68 tahun atau setara dengan Diploma I. Selama periode 2019 hingga 2024 HLS di Mamuju Tengah meningkat sebesar 0,74 tahun. Selama periode 2018-2023, Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,57 persen atau naik secara rata-rata sebesar 0,19 tahun setiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang telah semakin membaik.

Gambar 2. 39 Harapan Lama Sekolah (HLS) Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



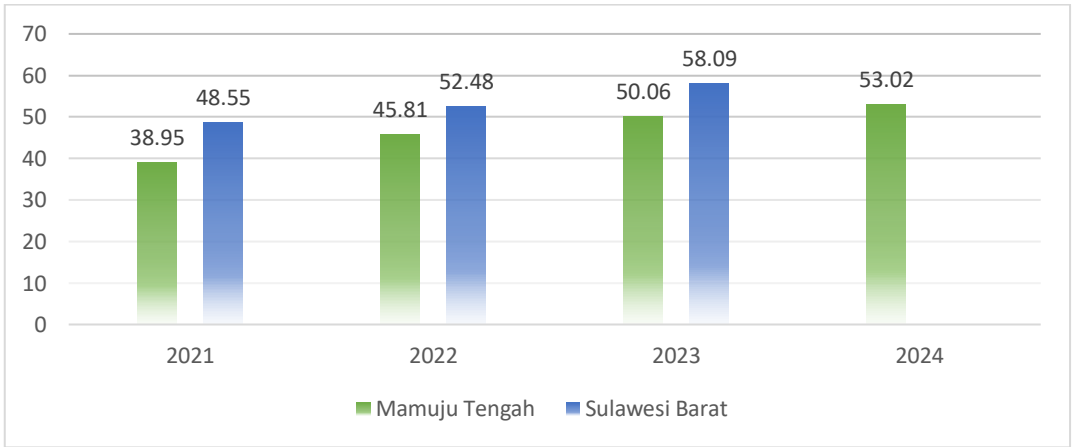
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Akan tetapi jika diamati dari gambar di atas, sejak tahun 2022-2024 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah walaupun mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan. Hal ini dapat dipengaruhi dari masih kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan dan faktor lainnya. Diharapkan kombinasi dari faktor ekonomi, sosial dan budaya, faktor pemerintah dan kebijakan serta faktor infrastruktur dan teknologi dapat meningkatkan harapan lama sekolah secara signifikan.

3) *Angka Literasi*

Kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

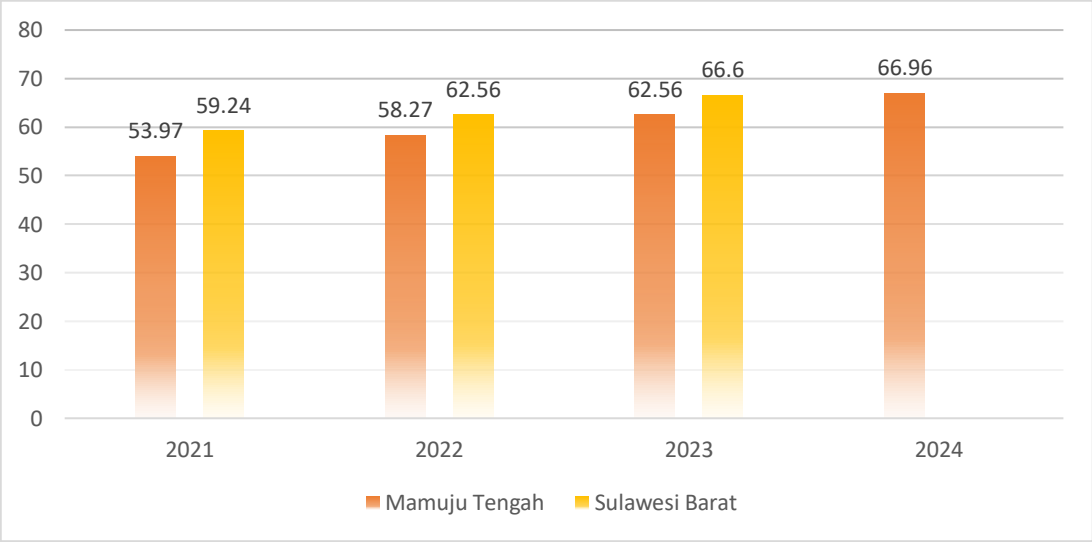
Gambar 2. 40 Angka Literasi Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2021-2023



Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Peningkatan angka litterasi sekolah dasar 38,95 pada tahun 2021 menjadi 50,06 pada tahun 2023 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor pendukung seperti kurikulum yang ditingkatkan, pelatihan guru, akses ke sumber daya dalam hal ini penyediaan buku dan bahan bacaan yang lebih banyak dan beragam di perpustakaan, partisipasi orangtua dalam mendukung kegiatan membaca di rumah dan inisiatif program literasi yang dijalankan oleh sekolah atau pemerintah. Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan, tetapi angka literasi sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Tengah masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sulawesi Barat.

Gambar 2. 41 Angka Literasi Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2024



Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

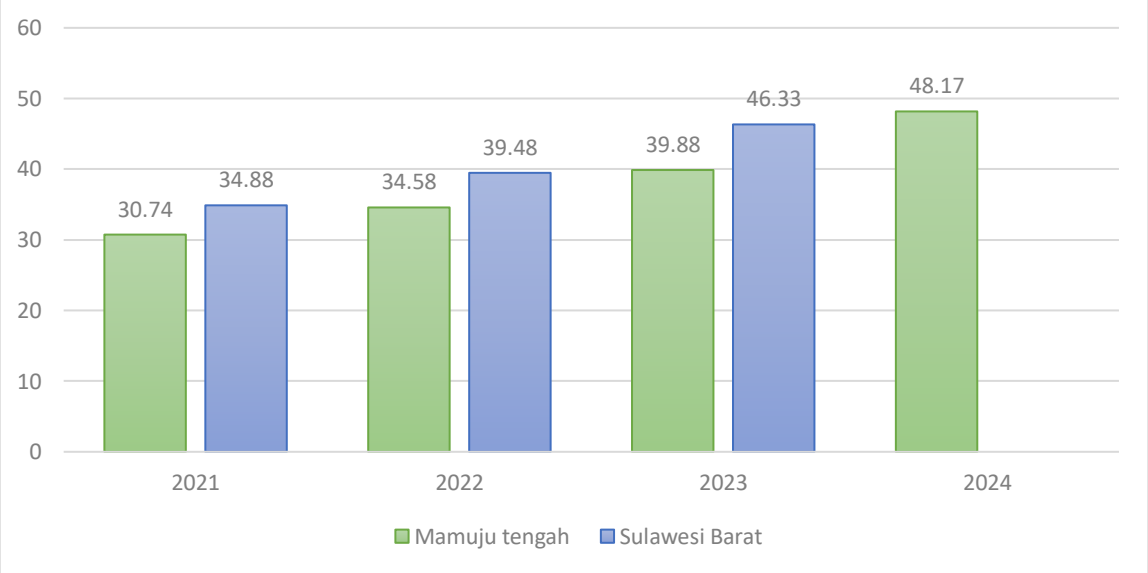
Peningkatan angka literasi sekolah menengah pertama di Mamuju Tengah menunjukkan adanya kemajuan dalam tingkat literasi siswa dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tren positif falam kemampuan membaca dan memahami teks di kalangan siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka literasi sekolah menengah pertama antara lain peningkatan akses pendidikan melalui program pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan seperti bukum pelatihan guru, dan kurikulum berbasis literasi, peningkatan infrastruktur sekolah termasuk perpustakaan dan fasilitas belajar. Penguatan mata pelajaran yang mendorong kebiasaan membaca dan pemahaman teks serta metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis diskusi untuk meningkatkan pemahaman siswa, penggunaan media digital dan platform edukasi untuk memperkaya bahan bacaan serta kampanye dan gerakan literasi.

4) *Angka Numerasi*

Kemampuan numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.

Adapun Angka Numerasi di Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama adalah sebagai berikut.

Gambar 2. 42 Angka Numerasi Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2021-2023

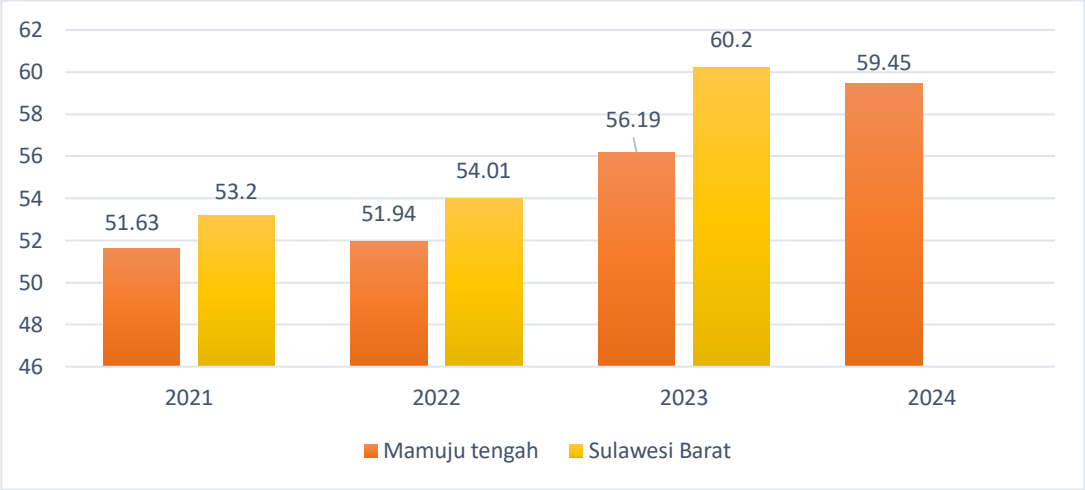


Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Angka Numerasi sekolah dasar di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 30,74 menjadi 39,88 pada tahun 2023, akan tetapi peningngkatan ini masih dibawah rata-rata capaian provinsi. Angka Numerasi Sekolah Dasara Mamuju Tengah masih dalam kategori Rendah.

Indikator kemampuan numerasi siswa sekolah dasar adalah mampu menggunakan berbagai jenis angka dan simbol dalam matematika dasar, mampu menganalisis informasi dalam bentuk grafik, tabel, peta, diagra, dan lain sebagainya, mampu menafsirkan hasil analisis yang telah dilakukan, mampu merancang strategi penyelesaian masalah secara runtut, mampu menggunakan konsep-konsep matematika, fakta, prosedur dan penalaran. Serta mampu menyelesaikan soal dengan tepat.

Gambar 2. 43 Angka Numerasi Kabupaten Mamuju Tengah Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021-2024



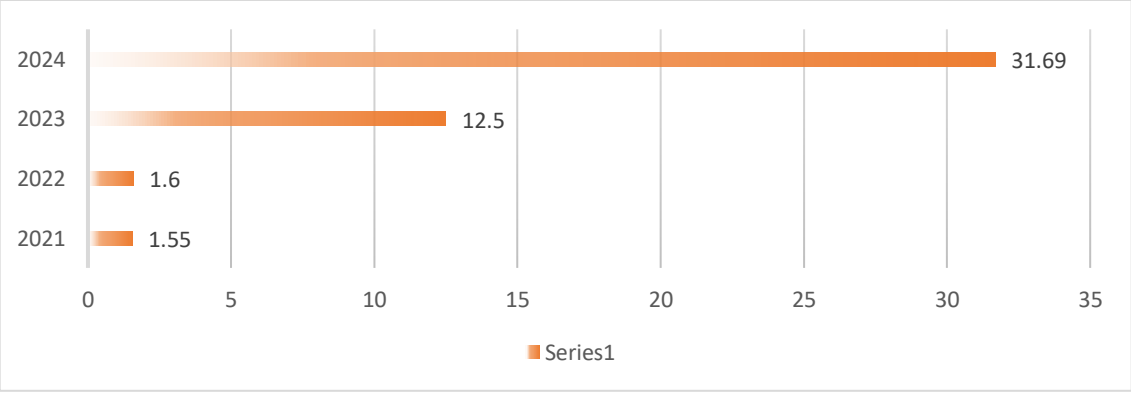
Sumber: Rapor Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Salah satu kompetensi numerasi yang diukur pada tingkat sekolah menengah pertama adalah kemapuan memahami bilangan cacah hingga enam angka. Angka Numerasai sekolah menengah pertama di Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 51,63 persen menjadi 56,19 persen di tahu 2024. Artinya, pada tahun 2024 ada 56,19 persen murid yang memiliki kompetensei numerasi di atas minimum. Angka numerasi Mamuju Tengah masih lebih rendah jika dibandingakan dengan rata-rata Angka Numerasi Provinsi Sulawesi Barat. Namun demikian angka numerasi di Provinsi Sulawesi Barat dan Mamuju Tengah masih dalam kategori Sedang.

5) *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat*

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya **literasi masyarakat.**

Gambar 2. 44 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Mamuju Tengah Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mamuju Tengah, 2024

Berdasarkan hasil pengolahan data *Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)*, capaian Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan sepanjang periode 2021–2024. Nilai IPLM tercatat sebesar 1,55 pada tahun 2021, naik sedikit menjadi 1,60 pada tahun 2022, kemudian meningkat tajam menjadi 12,50 pada tahun 2023, dan melonjak lebih jauh hingga mencapai 31,69 pada tahun 2024 (Perpustakaan Nasional RI, *Laporan Akhir Kajian IPLM Tahun 2024*).

Kecenderungan ini menggambarkan adanya transformasi pembangunan literasi masyarakat yang cukup progresif, terutama dalam dua tahun terakhir. Setelah periode awal (2021–2022) yang masih ditandai oleh rendahnya capaian literasi dan terbatasnya infrastruktur layanan baca, percepatan signifikan terjadi sejak 2023. Hal ini diduga kuat dipengaruhi oleh peningkatan program literasi berbasis masyarakat, penguatan peran perpustakaan daerah dan desa, digitalisasi layanan informasi, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan.

Nilai 31,69 pada tahun 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah telah mulai beranjak dari kategori rendah menuju tahap berkembang dalam pembangunan literasi masyarakat, meskipun masih perlu upaya lanjutan untuk mencapai kategori tinggi. Capaian ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan awal dalam membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*, yang menempatkan peningkatan literasi masyarakat sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kenaikan tajam nilai IPLM Kabupaten Mamuju Tengah dari 1,55 (2021) menjadi 31,69 (2024) mengindikasikan keberhasilan intervensi program literasi yang mulai efektif pada dua tahun terakhir. Namun demikian, peningkatan yang cepat ini perlu diimbangi dengan upaya menjaga keberlanjutan dan pemerataan capaian literasi antarwilayah desa, termasuk penguatan kelembagaan perpustakaan, dukungan pendanaan, serta penyediaan infrastruktur literasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat digital.

Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah perlu menempatkan literasi sebagai agenda strategis lintas sektor — bukan hanya urusan pendidikan dan perpustakaan, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat menuju Kabupaten Mamuju Tengah yang berdaya saing dan berpengetahuan.

6) *Indeks Literasi Digital*

Indeks Literasi Digital adalah ukuran kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Indeks ini diukur menggunakan empat pilar, yaitu Kecakapan Digital, Etika Digital, Keamanan Digital,dan Budaya Digital. Literasi digital penting untuk mendorong masyarakat terhidar dari penipuan berbau teknologi dan bisa lebih siap menghadapi era yang serba digital.

Pada tahun 2023, indeks literasi digital Indonesia berada di level 3,65 dari skalai 1-5 poin, yang termasuk kategori “tinggi. Angka ini terus meningkat dari tahun 2021.

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti **Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja** dan Indikator lainnya.

1) *Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja*

Sistem jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sementara itu jenis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi empat macam yakni Pekerja Penerima Upah (PU), Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tabel 2. 54 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja/Buruh Jamsostek	N/A	779	780	1.806	19.018
Total Pekerja/Buruh	N/A	11.035	11.335	11.335	70.123
Persentase	N/A	17%	19%	21%	27,12%

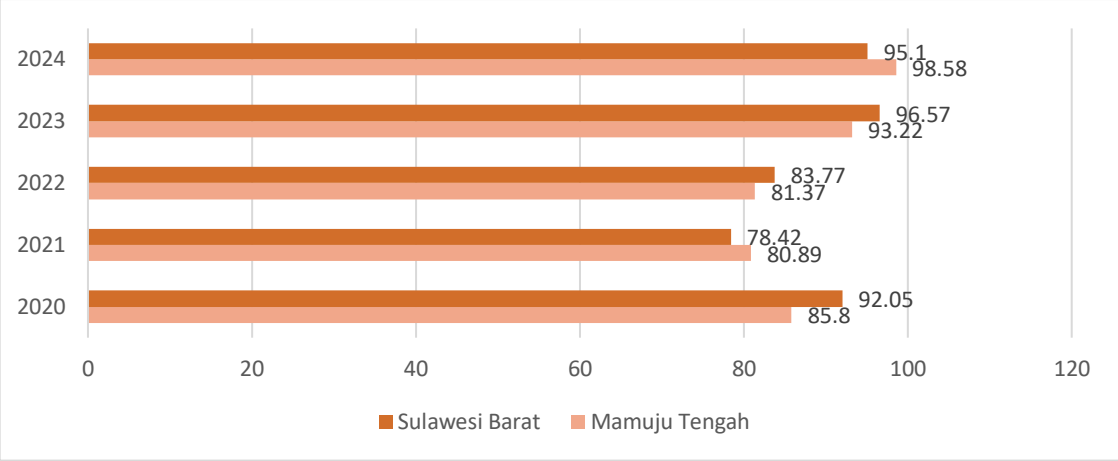
Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Mamuju Tengah, 2024

Data yang tercatatkan selama tiga tahun terakhir jumlah kepemilikan BPJS ketenagakerjaan meningkat dengan rata-rata peningkatan 1,6 persen. Pada tahun 2024 capaian sebesar 27,12 persen meningkat 6,12 persen dari tahun sebelumnya dan diharapkan akan terus meningkat mencapai 100 persen.

2) *Jaminan Sosial Kesehatan*

Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan merujuk pada jumlah individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap manfaat perlindungan kesehatan yang disediakan oleh program jaminan sosial kesehatan. Cakupan ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah peserta program, jenis layanan kesehatan yang tersedia, besaran kontribusi atau premi yang harus dibayarkan, serta manfaat kesehatan yang diterima oleh para peserta.

Gambar 2. 45 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: https://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan meraih *Universal Health Coverage* (UHC) pada tahun 2024. cakupan kesehatan semesta atau Universal health Coverage (UHC) menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan **indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan, dan indikator lainnya.**

1) Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kerukunan antarumat beragama di suatu wilayah, biasanya dalam konteks Indonesia. Indeks ini mengukur sejauh mana masyarakat dari berbagai agama dapat hidup berdampingan secara harmonis, dengan mempertimbangkan beberapa dimensi seperti toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Indeks Kerukunan Beragama belum tersedia di tingkat Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk memproksi indeks kerukunan umat beragama ini disajikan data potensi konflik di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 55 Potensi Konflik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024

No.	Latar Belakang	Jumlah Potensi/Kejadian			
		2021	2022	2023	2024
1.	Agama	11	15	0	0
2.	Agraria	8	11	21	27
3.	Etnik/Kampung	1	5	0	0
4.	Ekonomi	6	4	0	0
5.	Politik	27	31	0	4
6.	Sosial	40	58	0	0
	Total	93	124	21	31

Sumber: Badan Kesbangpol Mamuju Tengah, 2025

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Menjelaskan kondisi tentang peningkatan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan.penjelasan ini sekurang-kurangnya didukung dengan indikator seperti **Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, dan indikator lainnya.**

1) *Indeks Perlindungan Anak*

Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang digagas oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima (5) klaster mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Proyeksi nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) harus disiapkan oleh Kabupaten/ kota berdasarkan klaster yang diintervensi. Indikator IPA yang sudah ditentukan juga dimuat dalam pengisian KLA yang ada di sistem penilaian KLA. Berikut nilai KLA Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 56 Nilai Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Kabupaten Layak Anak	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai	N/A	N/A	616,07	595,1	670,94

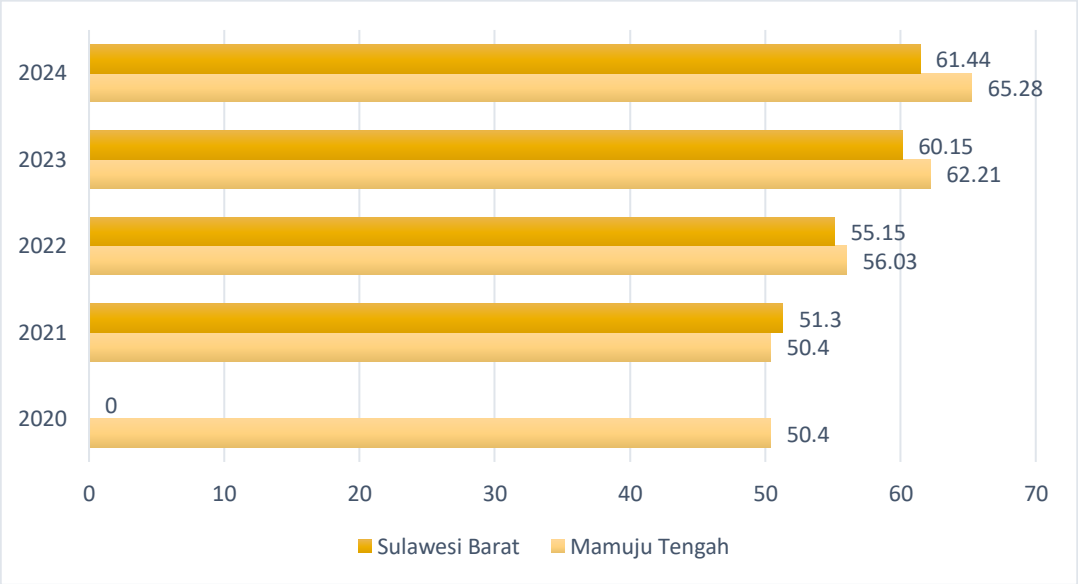
Sumber: Dinas PPPAPPKB Mamuju Tengah, 2024

Kabupaten Mamuju Tengah baru memulai perhitungan KLA pada tahun 2022, dengan memperhitungkan 24 indikator yang ada. Nilai ini juga dapat mewakili nilai dari Indeks Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, karena indikator yang dimuat dalam IPA juga dimuat dalam KLA.

2) *Indeks Pembangunan Keluarga*

Melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengukur pembangunan keluarga Indonesia yaitu Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA). iBANGGA merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan.

Gambar 2. 46 Nilai Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



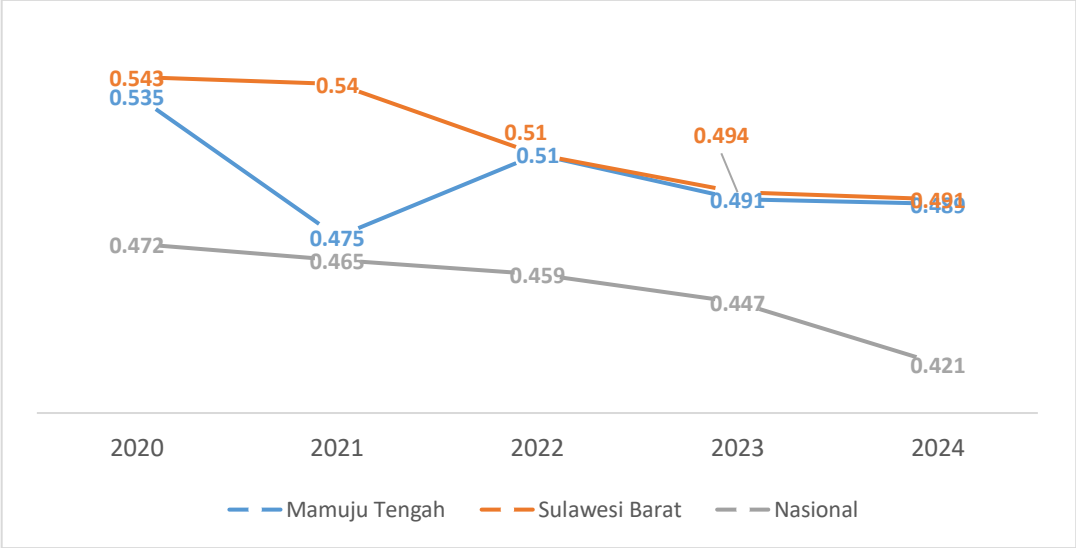
Sumber: https://siperindu.online/dashboard/ dan Ibangga BKKBN

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwan capaian iBANGGA kabupaten Mamuju tengah terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2024 capaian sebesar 65,28 poin dengan kriteria lebih besar atau samadengan 61,0 kategori normal.

3) *Indeks Ketimpangan Gender*

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja.

Gambar 2. 47 Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024

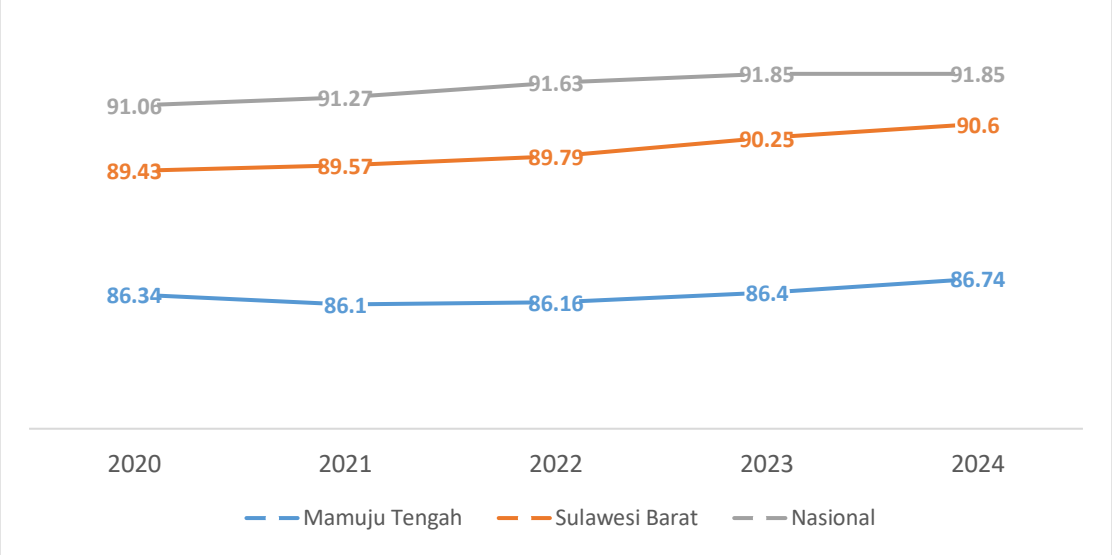


Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Semakin kecil nilai Indeks Ketimpangan Gender, semakin rendah ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan tabel

di atas menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Mamuju Tengah dalam empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari kondisi nilai indeks yang semakin kecil.

Gambar 2. 48 Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu cara untuk menghitung bagaimana capaian kualitas hidup antargender. IPG merupakan indikator penting untuk mengukur ketidaksetaraan gender dalam pembangunan manusia. Dari Gambar 2.24 dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Gender pada Kabupaten Mamuju Tengah khususnya di Tahun 2024 masih di bawah capaian Provinsi dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih adanya ketimpangan atau ketidaksetaraan antargender yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah. Perbedaan antara wanita dan pria dalam mendapatkan manfaat dari pembangunan, terutama terkait dengan kebutuhan dasar manusia seperti pendidikan, pekerjaan, dan akses ke layanan kesehatan. Meskipun telah ada kemajuan dalam usaha untuk mencapai kesetaraan gender di Kabupaten Mamuju Tengah, kenyataannya masih banyak bentuk diskriminasi yang terjadi. Untuk mendorong pembangunan ekonomi di suatu daerah dibutuhkan kesetaraan gender yang efektif di mana perempuan memiliki akses.

4) *Indeks Pembangunan Pemuda*

Pembangunan pemuda idealnya diarahkan untuk menciptakan pemuda yang berkualitas, yaitu pemuda memiliki kapasitas (terdidik), sehat fisik dan mental, mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi aktif sebagai subjek pembangunan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda dihitung dari lima dimensi dengan 15 indikator komposit. Adapun dimensinya yakni Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan serta Gender dan Diskriminasi. Adapun Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Mamuju Tengah adalah belum tersedia. Berdasarkan

data dukung dengan adanya peningkatan pada domain pendidikan, di mana angka rata-rata lama sekolah terus bertambah setiap tahunnya. Dapat dilihat juga APK sekolah menengah terus mengalami peningkatan. Pada domain Angka pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah relatif rendah, angka tersebut merupakan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Hal ini dapat menunjang kualitas pembangunan pemuda yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

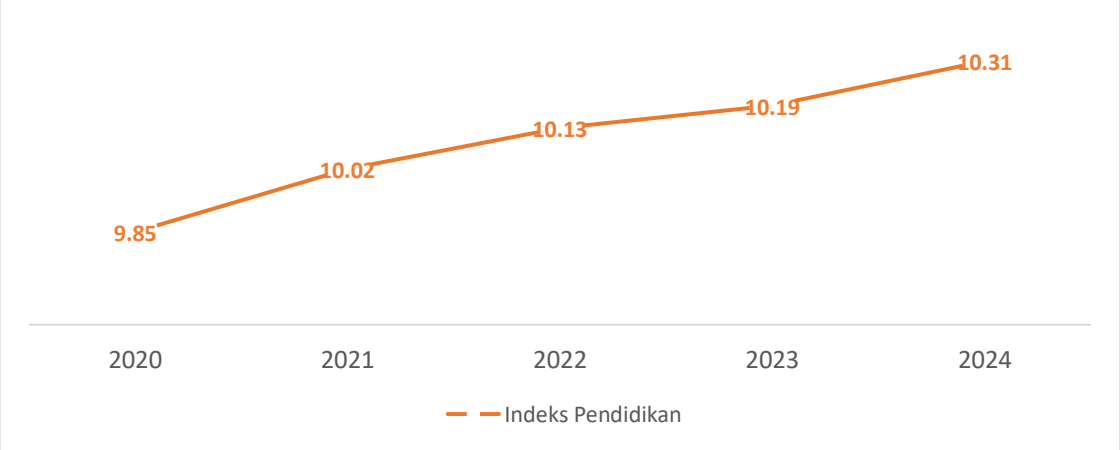
Daya saing daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor input, output dan outcome yang ada di suatu daerah, dengan faktor input sebagai faktor utama pembentuk daya saing daerah yaitu kemampuan daerah, yang selanjutnya akan menentukan kinerja output yang merupakan inti dari kinerja perekonomian. Inti dari kinerja perekonomian adalah upaya meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian yaitu meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang berada di dalam wiilayah tersebut. Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu komponen penting di dalam penguatan ekonomi domestik. Peningkatan perekonomian domestik, baik oleh daerah dan nasional akan menjadi modal utama untuk menjaga momentum pembangunan dan melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi untuk menuju ke arah transformasi ekonomi menjadi negara maju dan berdaya saing. Oleh sebab itu, peran daerah untuk meningkatkan daya saing daerahnya akan sangat bergantung kepada kemampuan daerah untuk melakukan identifikasi faktor penentu daya saing dan strategi untuk meningkatkan daya saingnya.

2.3.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator komposit pembentuk indeks pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 49 Indeks Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah (data diolah), 2024

Kabupaten Mamuju Tengah mencatat peningkatan yang stabil pada indeks pendidikannya dari tahun 2013 hingga 2022, naik dari 8.71 menjadi 10.13. Meskipun indikator ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, perlu dicatat bahwa indeks pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional selama periode tersebut. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mencapai tingkat pendidikan yang sejajar atau melampaui rata-rata nasional.

Upaya peningkatan sektor pendidikan tampaknya telah dilakukan dengan serius, dan peningkatan tersebut mungkin mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif, seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, perluasan aksesibilitas pendidikan, dan implementasi program-program pendidikan lokal.

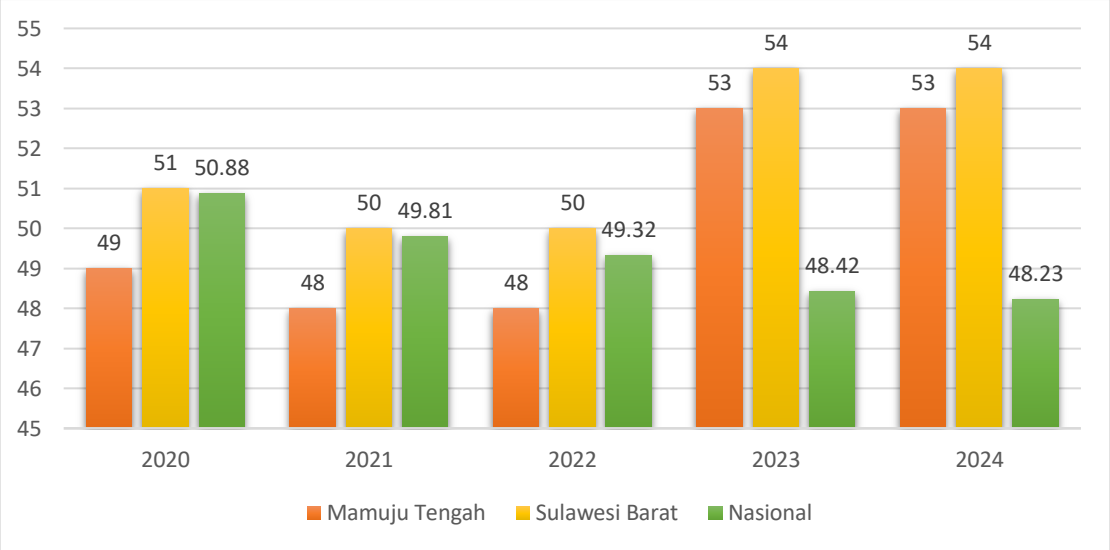
Kabupaten Mamuju Tengah perlu merancang langkah-langkah strategis dan inovatif agar capaian pendidikan setara atau bahkan melampaui rata-rata Provinsi dan Nasional. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diharapkan dapat menjadi katalisator utama untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan dan implementasinya menjadi imperatif, bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah.

2) *Angka Ketergantungan*

Rasio ketergantungan adalah istilah yang digunakan untuk mengambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan lanjut usia) dengan jumlah penduduk yang produktif (yaitu usia kerja) Dimana rasio ketergantungan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sistem perawatan Kesehatan, dan sistem pensiun suatu negara. Angka Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada table berikut.

Gambar 2. 50 Angka Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024 angka ketergantungan mencapai 53 yang artinya dari setiap 100 orang penduduk usia produktif terdapat 53 orang yang yang tergolong sebagai penduduk tidak produktif. Angka 53 menunjukkan bahwa beban ekonomi penduduk produktif masih dalam kategori moderat

2.3.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

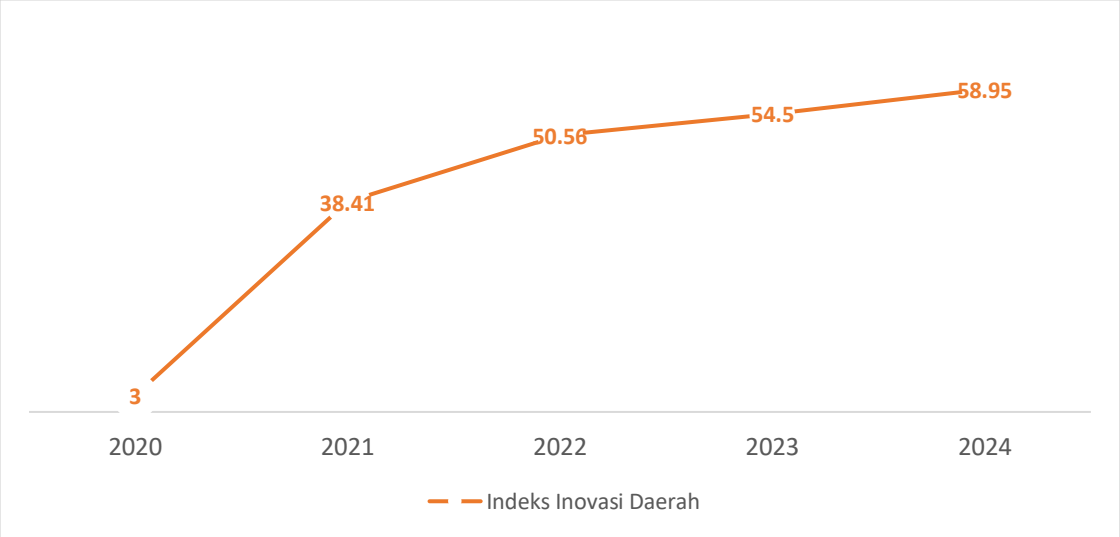
Pengaruh Positif Iptek di Bidang Ekonomi telah membawa perubahan besar dalam lanskap ekonomi global. Dari peningkatan produktivitas hingga perluasan pasar dan inovasi produk, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Revolusi digital ini tidak hanya meningkatkan efisiensi bisnis, tetapi juga menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara signifikan.

Perkembangan pesat teknologi, khususnya di era digital saat ini, telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap perekonomian. Kita akan melihat contoh-contoh nyata bagaimana teknologi telah merevolusi berbagai industri dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi global.

1) *Indeks Inovasi Daerah*

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan dalam rangka memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai; 2. Mendorong penerapan good governance; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan 4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Capaian indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 28 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber:

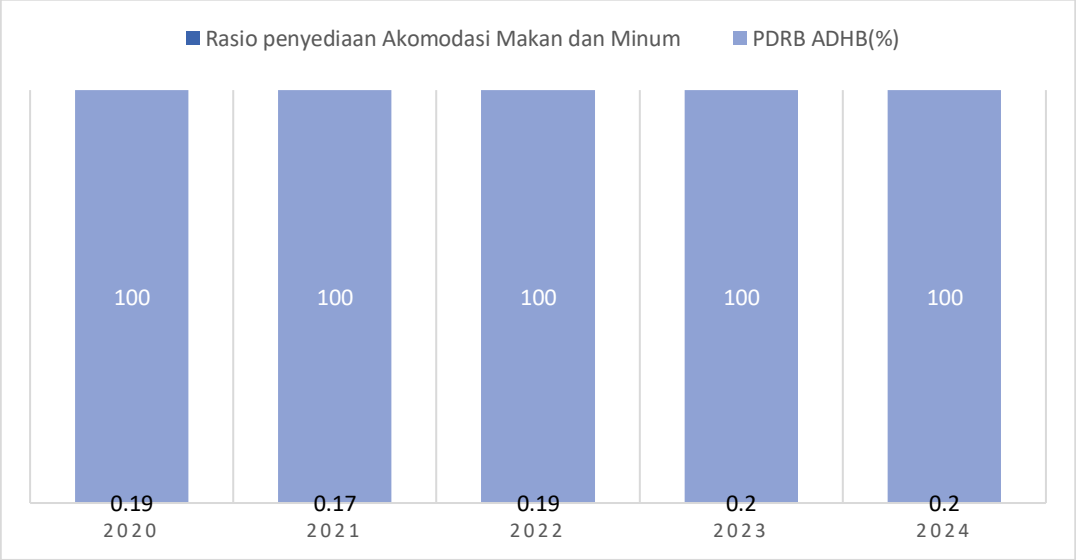
Indeks inovasi Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 masih pada ketegori kurang inovatif, namun terus meningkat sampai dengan tahun 2024 mencapai predikat inovatif. Indeks inovasi Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat dalam 4 tahun terakhir 2021-2024.

2) *Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum*

Perkembangan usaha penyediaan makanan dan minuman di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk berdampak pada peningkatan konsumsi makanan siap saji. Selain itu, berkembangnya aplikasi layanan pesan antar,

turut meningkatkan minat masyarakat mengkonsumsi makanan siap saji. Di era digitalisasi, para pelaku usaha Makanan dan Minuman memanfaatkan media sosial dan platform online untuk promosi, mengangkat ulasan positif pelanggan, serta memperbanyak visualisasi makanan agar menarik minat masyarakat.

Gambar 2. 51 Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB ADHB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

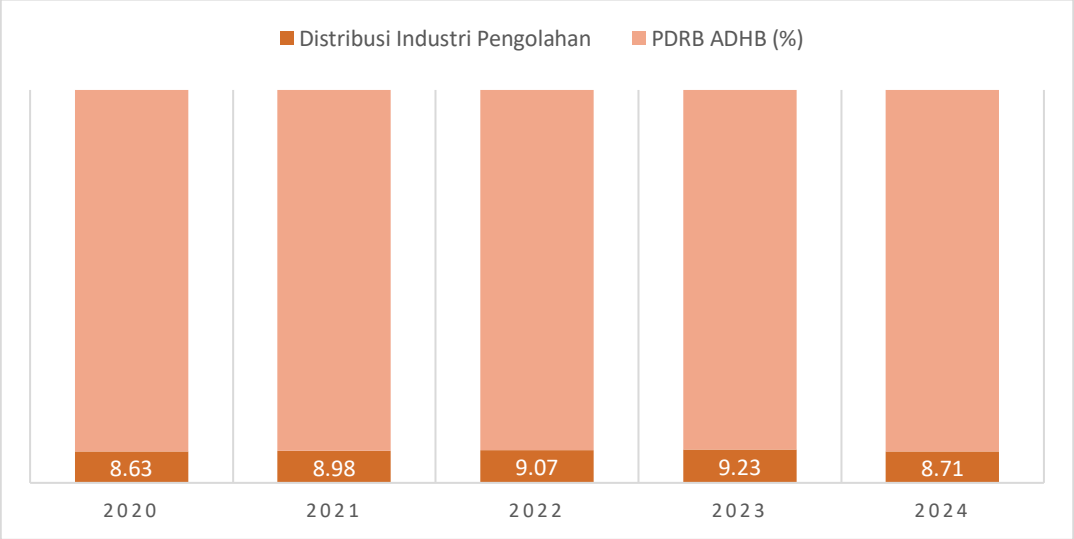
Perkembangan penyediaan akomodasi makan dan minum mengalami kenaikan yang sangat pesat. Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minun merupakan satu satunya lapangan usaha yang masuk pada 4 kriteria sekaligus yakni unggul, prospektif, pertumbuhannya cepat dan memiliki daya saing. Artinya lapangan usaha ini mampu memenuhi kebutuhan akan jasa akomodasi dan makan minum di Mamuju Tengah itu sendiri, serta mampu mengekspornya untuk kebutuhan wilayah lain disekitarnya. Terbukti dengan banyaknya konsumen ataupun wisatawan dari wilayah lain disekitar Mamuju Tengah yang datang memanfaatkan dan menikmati fasilitas akomodasi dan makan minum yang ada di KabupatenMamuju Tengah. Sehingga kedepannya lapangan usaha ini sangat prospektif untuk lebih dikembangkan lagi. Selain itu, lapangan usaha ini

memiliki pertumbuhan yang lebih cepat, serta berpotensi meningkatkan daya saing daerah secara ekonomi. Dengan demikian kategori lapangan usaha penyedia akomodasi makan minum sangat potensial untuk dikembangkan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah dimasa yang akan datang.

3) *Rasio PDRB Industri Pengolahan*

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya. Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama di mana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Gambar 2. 52 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

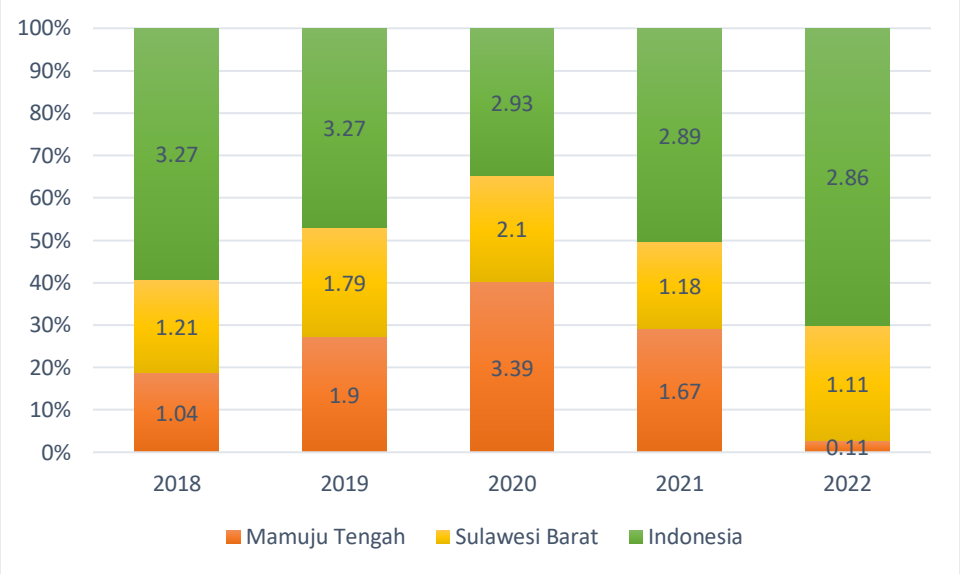


Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

4) *Rasio Kewirausahaan*

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dibandingkan dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Sampai saat ini, rasio kewirausahaan nasional tercatatkan meningkat dari 2,86 persen di tahun 2022 menjadi 3,47 persen di tahun 2023.

Gambar 2. 53 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023 (diolah)

2.3.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Indeks Ekonomi Hijau adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Kondisi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah saat ini masih fokus pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung ekstraktif dan berjangka pendek tanpa menafikan adanya perbaikan kualitas sumber daya dan lingkungan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Sementara itu sinyal indikator pertumbuhan ekonomi seperti PDRB dan tingkat inflasi tidak diiringi dengan infromasi tentang nilai susutnya sumber daya alam serta rusak dan tercemarnya lingkungan. Adapun capaian indikator Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Gambar 2. 54 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2018-2022

No	Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Lingkungan						
L1	Tutupan Lahan	79,41	79,41	62,08	81,05	81,05
L2	Energi Baru Terbaharukan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L3	Kualitas Air	N/A	66,67	-	67,5	63,33
L4	Kualitas Udara	90,83	88,48	-	89,13	91,73

L5	Penurunan Emisi	N/A	N/A	N/A	N/A	0,01
L6	Lahan Gambut Terdegragasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ekonomi						
E1	Intensitas Emisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E2	Intensitas Energi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E3	GNI Perkapita	22,7	23,5	23,8	25,9	27,2
E4	Produktivitas Pertanian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E5	Produktivitas Tenaga Kerja	45,6	50,3	49,0	52,3	61,0
Sosial						
S1	Rata-Rata Lama Sekolah	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69
S2	Angka Harapan Hidup	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85
S3	Tingkat Kemiskinan	7,14	6,87	6,79	7,13	7,17
S4	Tingkat Pengangguran	2,63	2,67	2,71	2,52	1,88

Sumber: Data diolah, Tim RPJPN Tahun 2013-2023

Secara umum capaian beberapa indikator dari indeks ekonomi hijau Kabupaten Mamuju Tengah telah menunjukan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan perkapita masyarakat meningkat dari 25,9 juta/pertahun menjadi 27,2 juta pertahun diiringi dengan indikator kesejahteraan masyarakat yang juga menunjukan perkembangan yang semakin baik seperti rata-rata lama sekolah yang meningkat menjadi 8,69 tahun, angka harapan hidup yang meningkat sebesar 71,89 tahun, dan tingkat pengangguran yang menurun menjadi 1,88 persen. Selain itu kualitas lingkungan hidup seperti indeks kualitas udara meningkat dari 89,13 menjadi 91,73, tutupan lahan meningkat menjadi 81,05 dan emisi gas rumah kaca meningkat menjadi 0,10 poin. Akan tetapi yang masih perlu menjadi perhatian adalah pada angka kemiskinan yang meningkat dan kualitas air yang terus menurun. Data sampai pada tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 7,23 persen dan kualitas air terus menurun dari 63,33 menjadi 54,44 sedangkan kemiskinan dan ketersediaan air bersih menjadi isu penting karena menjadi tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat.

Hal Ini tentu perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerahnya, dibutuhkan komitmen yang serius dengan semua stakholder, serta kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi sebagaimana diharapkan bahwa penerapan ekonomi hijau dapat menghasilkan peningkatan ekonomi seiring dengan peningkatan kesejahteraan manusia yang berkeadilan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

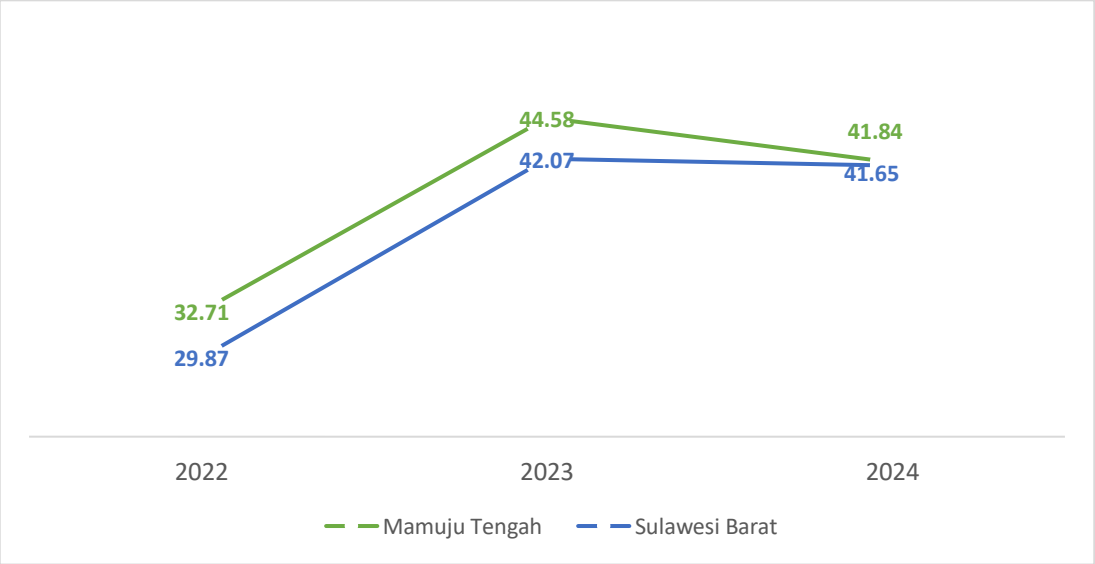
2.3.4. Transformasi Digital

Menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital meliputi pengembangan super platform,percepatan transformasi digital, dan [roduksi talenta digital.

1) *Indeks Masyarakat Digital*

Transformasi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi, bekerja, dan beraktivitas sehari-hari, sehingga menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang digital. Indeks Masyarakat Digital (IMDI) dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota, sekaligus menjadi acuan utama bagi penyusunan kebijakan dan program pengembangan masyarakat digital. IMDI memiliki peran penting dalam mendukung Visi Indonesia Digital 2045, yang menjadikan masyarakat digital sebagai pilar utama transformasi menuju Indonesia yang inklusif, inovatif dan berdaya saing global. Empat pilar utama IMDI yaitu infrastruktur dan ekosistem, pemberdayaan, keterampilan digital dan pekerjaan.

Gambar 2. 32 Indeks Masyarakat Digital Mamuju Tengah Tahun 2022-2024



Sumber: Kominfodigi Mamuju Tengah

Nilai Indeks Masyarakat Digital Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2024 adalah 41,84 dengan nilai pilar tertinggi adalah Pilar Keterampilan Digital sebesar 58,07 dan nilai terendah pada Pilar Pemberdayaan yaitu 25,31. Nilai indeks masyarakat digital Mamuju Tengah berada pada kategori Cukup.

2.3.5. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang merata merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi Indonesia saat ini. Agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi secara keseluruhan, perlu ada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang mencakup baik wilayah perkotaan maupun perdesaan. Dengan demikian, kedua wilayah ini dapat saling melengkapi dan memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Pengembangan wilayah metropolitan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang maju menjadi salah satu langkah strategis. Wilayah metropolitan diharapkan dapat berfungsi sebagai hub ekonomi nasional dan global, yang menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai superhub ekonomi diharapkan mampu menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ini. Selain menjadi pusat pemerintahan yang baru, IKN diharapkan menjadi kota yang inklusif dan berkelanjutan, memberikan kualitas hidup yang baik bagi penduduknya. Penting untuk diingat bahwa pengembangan wilayah perkotaan tidak boleh mengabaikan perdesaan. Pembangunan perdesaan yang mandiri dan berkelanjutan juga perlu diperkuat agar masyarakat di daerah ini tidak tertinggal. Dengan meningkatkan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, perdesaan dapat berkontribusi pada perekonomian secara keseluruhan. Pembangunan berbasis potensi lokal, seperti pertanian yang berkelanjutan atau pariwisata desa, juga dapat menjadi sumber pertumbuhan yang signifikan. Salah satu arah kebijakan yang perlu diterapkan adalah peningkatan keterkaitan infrastruktur transportasi dan konektivitas digital. Infrastruktur transportasi yang baik akan memfasilitasi mobilitas barang dan jasa antara kota metropolitan dan kabupaten di sekitarnya. Selain itu, konektivitas digital yang meningkat akan memperkuat integrasi antara daerah perkotaan dan perdesaan, mempermudah akses informasi, serta meningkatkan efisiensi operasional bisnis. Dengan membangun infrastruktur yang menghubungkan antarkota dalam metropolitan dan antarkota dengan kabupaten, Indonesia dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hubungan yang kuat antara kota dan desa tidak hanya akan meningkatkan produktivitas tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi. Integrasi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan perdesaan sangat penting bagi pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Dengan mengembangkan wilayah metropolitan sebagai hub ekonomi dan memperkuat pembangunan perdesaan yang mandiri, Indonesia dapat menciptakan perekonomian yang lebih merata dan berdaya saing. Keterkaitan infrastruktur dan konektivitas digital menjadi langkah krusial dalam mewujudkan visi ini, sehingga semua wilayah dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

1) *Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur*

   Indeks Infrastruktur Daerah adalalah salah satu komponen indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja kota / kabupaten berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar. Indeks pemerintah daerah merupakan Teknik dan praktek konstruksi untuk merencanakan, mengembangkan dan mempertahankan infrastruktur utama untuk kota / kabupaten tersebut dan masyarakatnya. Formulasi indikator pertumbuhan ekonomi penting untuk diperhatikan bahkan terus ditingkatkan karena menjadi indikator keberhasilan kinerja

pemerintah dan jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi rakyatnya.

Tabel 2. 57 Indeks Infrastruktur Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024

Indikator	CAPAIAN											
	2021			2022			2023			2024		
	Kinerja	Bobot	Indeks	Kinerja	Bobot	Indeks	Kinerja	Bobot	Indeks	Kinerja	Bobot	Indeks
Persentase Jalan Berkondisi Baik (jalan status kabupaten)	56,28	20%	11,26	52,95	20%	10,59	30,37	20%	6,07	29,99	20%	6,00
Persentase akses air minum	77,42	20%	15,48	78,23	20%	15,65	77,88	20%	15,58	81,48	20%	16,30
Persentase akses sanitasi layak	81,21	20%	16,24	83,63	20%	16,73	82,84	20%	16,57	82,89	20%	16,58
Persentase kawasan pemukiman layak	96,96	15%	14,54	98,99	15%	14,85	98,91	15%	14,84	98,91	15%	14,84
Persentase Penduduk yang Mengakses Internet (Persen)	51,23	15%	7,68	56,26	15%	8,44	55,57	15%	8,34	57,21	15%	8,58
Sarana prasarana jalan	5	10%	0,50	12	10%	1,20	13	10%	1,30	13	10%	1,30
Indeks daya saing Infrastruktur	368,1	100%	65,71	382,06	100%	67,45	358,57	1,00	62,69	363,48	1,00	63,59

Sumber: Dinas PU, Kominfo, Perumahan, Perhubungan. Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, **indeks daya saing infrastruktur** sempat meningkat dari 65,71 (2021) menjadi 67,45 (2022), namun menurun pada 2023 menjadi 62,69, sebelum kembali naik sedikit menjadi 63,59 pada 2024. Penyebab utama rendahnya Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Kab. Mamuju Tengah tahun 2024 yaitu pada indikator Sarana Prasarana Jalan yang hanya mencapai nilai 13. Sedangkan indikator kawasan permukiman layak merupakan indikator kinerja baik yaitu mencapai 98,91 pada tahun.

2) Indeks Desa Membangun

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa. Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu: 1) Desa Mandiri 2) Desa Maju 3) Desa Berkembang 4) Desa Tertinggal 5) Desa Sangat Tertinggal.

Tabel 2. 58 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Mandiri	1	1	1	3	5	6
Desa Maju	1	1	3	3	9	9
Desa Berkembang	25	27	32	36	32	35
Desa Tertinggal	25	25	18	12	7	4
Desa Sangat Tertinggal	2	0	0	0	1	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2025

Perkembangan status desa di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren positif dari tahun 2019 hingga 2024. Jumlah Desa Mandiri meningkat signifikan dari hanya 1 desa pada 2019 menjadi 6 desa pada 2024, begitu pula dengan Desa Maju yang tumbuh dari 1 menjadi 9 desa. Sementara itu, Desa Berkembang tetap mendominasi, meskipun jumlahnya fluktuatif, dari 25 desa pada 2019 menjadi 35 desa pada 2024. Sebaliknya, jumlah Desa Tertinggal mengalami penurunan tajam dari 25 desa pada 2019 menjadi hanya 4 desa pada 2024, dan Desa Sangat Tertinggal yang sempat muncul kembali pada 2023 kini kembali hilang di 2024. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam pembangunan dan kemandirian desa di Mamuju Tengah.

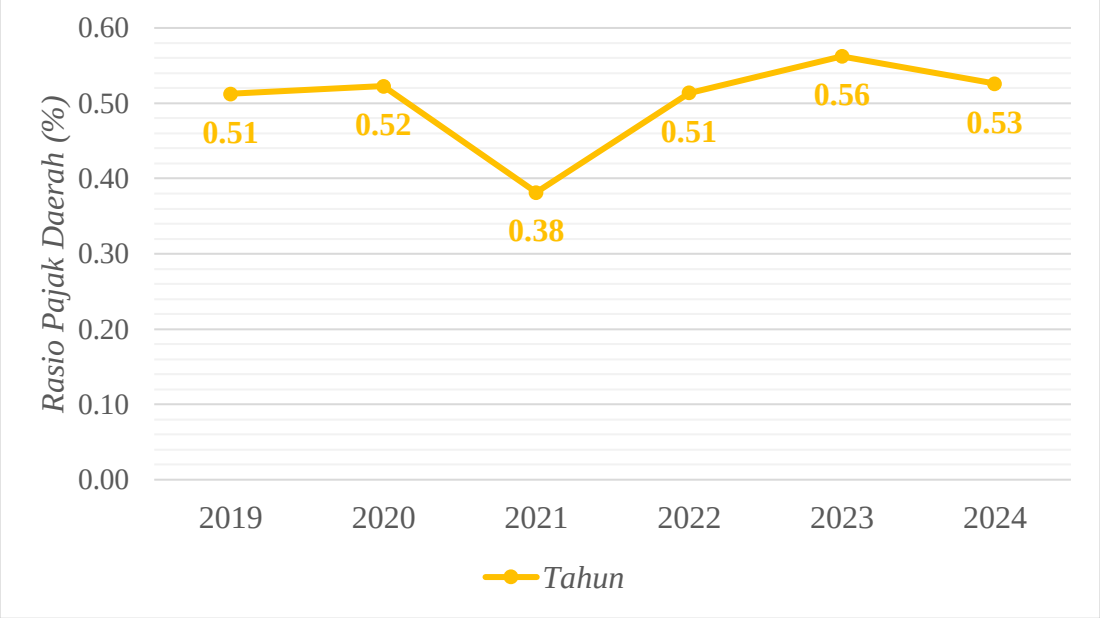
2.3.6. Stabilitas Ekonomi Makro

Menjelaskan kondisi tentang stabilitas ekonomi makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro pemerataan. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti **Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.**

1) *Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB*

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang mengukur kontribusi pajak daerah terhadap total output ekonomi suatu daerah. Rasio ini sering digunakan untuk menilai kemampuan fiskal daerah dalam mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi pemungutan pajak, dan potensi peningkatan pendapatan asli daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Tabel 2. 59 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Mamuju Tengah Tahun 2019-2024



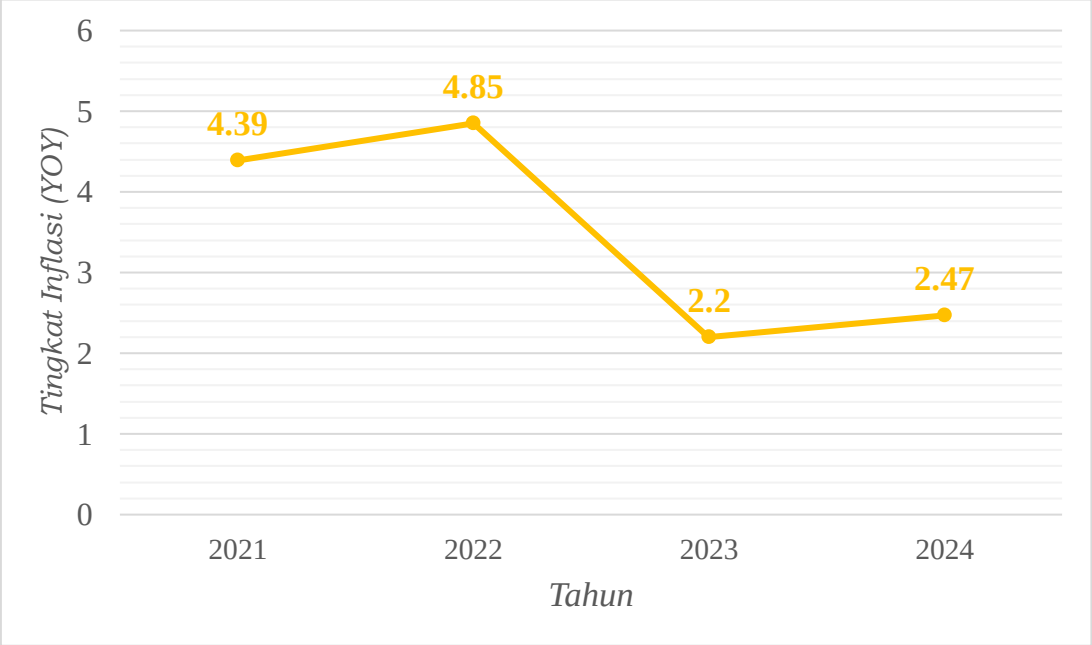
Sumber: BPS Mamuju Tengah dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (data diolah), 2025

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024 memperlihatkan terjadinya fluktuatif. Pada tahun 2020, rasio pajak daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami kenaikan menjadi 0,52% jika dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 0,51%. Namun terjadi penurunan tajam pada tahun 2021 ke 0,38%, hal ini diduga akibat dampak dari pandemi. Walaupun demikian, rasio pajak daerah Kabupaten Mamuju Tengah kembali mengalami kenaikan menjadi 0,51% di tahun 2022 dan mencapai puncaknya di 0,56% pada tahun 2023, lalu mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 0,53%.

2) *Tingkat Inflasi*

Tingkat inflasi merupakan indikator ekonomi yang menggambarkan persentase kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode 2021 hingga 2024. Inflasi mencerminkan daya beli masyarakat dan kestabilan ekonomi.

Gambar 2. 55 Tingkat Inflasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan grafik diatas, Tingkat inflasi di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi dan pengaruh faktor eksternal serta domestik. Pada tahun 2021, inflasi tercatat sebesar 4,39%, relatif tinggi yang kemungkinan dipengaruhi oleh pemulihan pasca pandemi dan gangguan distribusi barang. Angka inflasi meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 4,85%, yang mencerminkan tekanan harga akibat kenaikan bahan bakar minyak dan harga pangan nasional.

Namun, pada tahun 2023, inflasi berhasil ditekan hingga 2,20%, mencerminkan keberhasilan pengendalian harga serta membaiknya rantai pasok daerah. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024, dengan inflasi sedikit naik menjadi 2,47%, namun masih dalam kategori terkendali dan stabil, menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga serta distribusi barang dan jasa berlangsung relatif lancar.

Secara umum, inflasi Kabupaten Mamuju Tengah dalam empat tahun terakhir berada dalam kisaran yang sehat dan mencerminkan stabilitas ekonomi makro daerah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

Menjelaskan tentang kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel, didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti **Indeks Reformasi Hukum, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Indeks iIntegritas Nasional, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.**

1) Indeks Reformasi Hukum

Indeks reformasi hukum (IRH) adalah sistem penilaian untuk mengukur reformasi hukum di Indonesia. IRH dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan. IRH merupakan amanat dari peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Indeks Reformasi Hukum di Mamuju Tengah memperoleh nilai akhir 96,38 yang terdiri dari 81,90 nilai awal dan 14,48 untuk nilai apresiasi.

2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Indeks SPBE sendiri merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Dimana tingkat kematangan penerapan SPBE adalah (merupakan area (penerapan SPBE); aspek (merupakan area spesifik penerapan SPBE); indikator (merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE). Capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut;

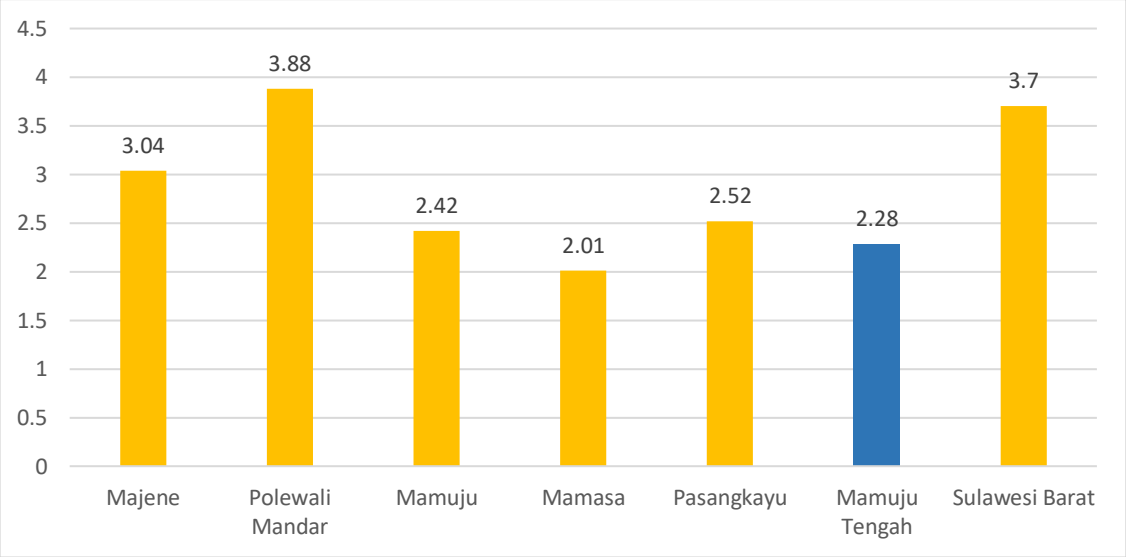
Tabel 2. 60 Capaian Indeks SPBE, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks SPBE	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	NA	NA	1,83	2,19	2,28
Sulawesi Barat	NA	2,03	2,28	2,89	3,70
Nasional	`2,26	2,24	2,34	2,79	3,12

Sumber: Keputusan Menteri PAN-RB Tahun 2020-2024

Indeks SPBE Kabupaten Mamuju Tengah mulai dihitung pada tahun 2022. Indeks SPBE Mamuju Tengah terus meningkat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir hanya saja masih dalam kategori Cukup. Tetapi jika dibandingkan dengan indeks SPBE Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, capaian Kabupaten Mamuju Tengah masih di bawah capaian provinsi dan nasional yang telah menperoleh kategori Baik.

Gambar 2. 56 Perbandingan capaian Indeks SPBE antar Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 663 Tahun 2024

3) Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang--undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Mamuju Tengah dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

Gambar 2. 57 Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Indeks Pelayanan Publik	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah		3,30 (B-)	3,48 (B-)	NA	NA
Sulawesi Barat	3,27 (B-)	3,43 (B-)	3,49 (B-)		
Nasional	3,84 (B)	3,79 (B)	3,88 (B)		

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2023

Secara mandiri, Kabupaten Mamuju Tengah menghitung tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Mamuju Tengah melalui Survei Kepuasan Masyarakat. Survei dilakukan kepada responden dengan layanan air bersih, perizinan pada dinas DPMPTSP, kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas, pengamanan dan layanan pemadam kebakaran oleh Satpol-PP dan Damkar, layanan kependudukan oleh dinas kependudukan dan pencataatan sipil, dan dinas sosial serta dinas lingkungan hidup untuk layanan persampahan. Adapun hasil survei sebagai berikut:

Tabel 2. 61 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No	Dinas	2020	2021	2022	2023	2024
1	DPMPTSP	74,75	75,82	76,49	75,66	76,25
		C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)
2	DISDUKCAPIL	75,25	75,77	74,68	75,31	74,5
		C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)
3	Dinas Sosial					
		C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)
4	Dinas Lingkungan Hidup	65,72	70,66	75,13	74,87	73,12
		C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)
5	Dinas Kesehatan (PKM)	75,37	74,96	74,8		
		C (Kura	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)

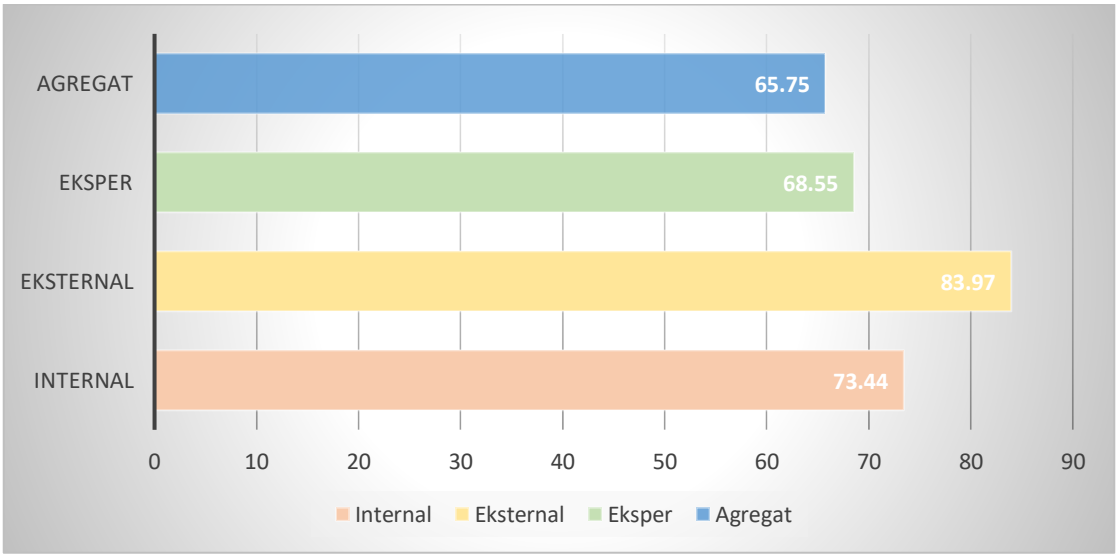
No	Dinas	2020	2021	2022	2023	2024
		ng Baik)				
6	Dinas Pendidikan	75,29		75,38	74,55	74,92
		C (Kurang Baik)		C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)
7	Satpol PP &Damkar				70,06	69,25
					C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)
8	RSUD		70,718	69,69	73,79	74
			C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)
9	UPTD Air Bersih	72,99	72,98	76,16	77,91	75,51
		C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	B (Baik)	C (Kurang Baik)
Mamuju Tengah		73,23	74,33	74,62	74,6	73,93
Mutu Pelayanan		C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)	C (Kurang Baik)

Sumber: Bapperida Mamuju Tengah, 2025

4) *Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)*

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur risiko korupsi di Indonesia. SPI bertujuan untuk memetakan dan memantau risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi. Nilai SPI menjadi rekomendasi perbaikan sistem pemerintahan dan layanan publik. Perkembangan nilai SPI Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 2. 58 Nilai SPI Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2023



Sumber: Laporan Survei Penilaian Integritas Tahun 2023

Perhitungan Indeks Integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian dari tiga sudutr pandang, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian eksper/ ahli. Penilaian internal dihitung berdasarkan penilaian pegawai pada masing-masing lokus survei terkait integritas unit kerja dan atau organisasi. Sedangkan perhitungan untuk penilaian eksternal berasal dari penilaian para pengguna layanan publik di lokus survei. Sementara, penilaian eksper;/ ahli yang dianggap memiliki pengetahuan komprehensif terkait masalah integritas dan korupsi pada K/L/PD tertentu. Perhitungan Indeks Integritas juga memasukkan faktor koreksisebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan Indeks Integritas.

Risiko korupsi pada integritas pelaksanaan tugas dapat dikatakan sangat tinggi, setidaknya pada satu aspek, seperti pada penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Hasil SPI menunjukkan bahwa indikator transparansi berada di bawah rata-rata nasional, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.

2.4.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Menjelaskan tentang kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Pembangunan demokrasi yang diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Penjelasan ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti Persentase Penegakan Perda, Persentase Capaian Aksi HAM, Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

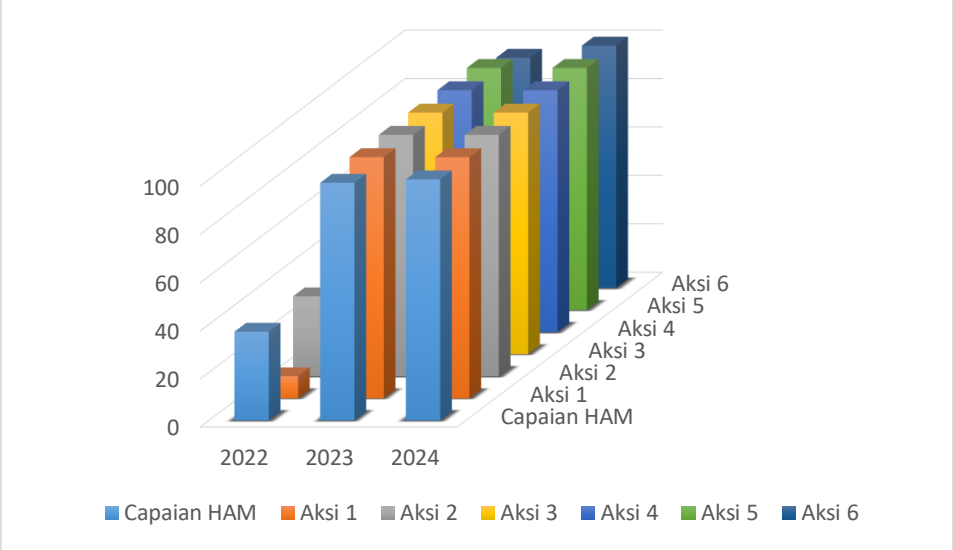
1) *Persentase Penegakan Perda*

Persentase penegakan perda adalah perbandingan jumlah pelanggaran perda yang ditindak dengan jumlah pelanggaran perda yang ada. Persentase penegakan perda di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 sebagai berikut

2) *Persentase Capaian Aksi HAM*

Capaian Aksi HAM merujuk pada hasil atau pencapaian yang diperoleh dari pelaksanaan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam suatu periode tertentu. Capaian ini biasanya terkait dengan kebijakan, program, atau langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah, organisasi, atau masyarakat dalam rangka meningkatkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Gambar 2. 59 Persentase Capaian Aksi HAM Mamuju Tengah Tahun 2022-2024



4

Sumber: Kementerian Hak Asasi Manusia RI, 2025

Capaian Hak Asasi Manusia (HAM) dinilai dari 6 (enam) rencana aksi yakni (1) Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah; (2) Optimalisasi layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum; (3) menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahunn 2020 Tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas; (4) menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; (5) Immplementasi pemberian bantguan sosial untuk kemandirian dan aksesibilitas penyandang disabilitas yang harmonis dengan peraturan lainnya; (6) membangun sarana dan prasaran transportasi aksesibel bagi penyandang disabilitas sesuai Permenhub 98 Tahun 2017 pasal 3 dan 4 dalam ruang lingkup kewenangan daerah.

3) Indeks Rasa Aman

4) Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Indeks ketenteraman dan ketertinanm (Indeks Trantibum) adalah sebuah ukuran atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan pemerintah dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di suatu wilayah. Indeks penyelenggaraan trantibum merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumkinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertibam umum, sub urusa kebakaran, dan sub urusan bencana.

2.4.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Menjelaskan tentang ketangguhan diplomasi dan pertahanan budaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antarnegara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di

kawasan. Penjelasn ini sekurang-kurangnya dilengkapi dengan indikator seperti Indeks Daya Saing Daerah dan Indikator lainnya sesuai konteks daerah.

1) *Indeks Daya Saing Daerah*

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapt merefleksikan tingkat produktivitas daerahnya. Kerangka pengukuran IDSD 2024 terdiri dari empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi yang kemudian dielaborasi kedalam 12 pilar daya saing yaitu institusi, infratruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produl, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar,dimensi bisnis, dan kapabilitas inovasi. Adapun Indeks Daya Saing Darah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 62 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

IDSD	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	0,56	n/a	2,39	2,49	3,18
Sulawesi Barat	n/a	n/a	3,10	3,36	3,24

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan namun masih tergolong sedang. Selain itu capaian ini masih jauh di bawah capaian indeks Daya Saing Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Mamuju Tengah masih perlu melakukan upaya peningkatan pada pilar infrastruktur dengan nilai 1,38 poin, pilar pasar produk dengan nilai 0,59 poin, Pilar Dinamisme Bisnis dengan nilai 2,19 poin, Pilar Kapabilitas Inovasi dengan nilai 0,4 poin. Pilar infrastruktur merupakan pendukung aktivitas ekonomi di suatu daerah. Infrastruktur menyediakan layanan dasar yang mendukung kegiatan operasional pelaku ekonomi. Infrastruktur yang memadai membuat aktivitas ekonomi menjadi efisien dan produktif sehingga menghasilkan output ekonomi yang berdaya bersaing. Namun permasalahan daerah yang dialami sekarang ini adalah kondisi infrastruktur jalan dan konektivitas jalan yang masih dalam kondisi yang kurang memadai. Panjang jalan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2023 mencapai 442,18 Km berkurang dari tahun sebelumnya dimana panjang jalan berdasarkan SK sebesar 465,879. Dari total panjang jalan kabupaten tersebut sebanyak 19,89 persen jalan dalam kondisi baik, 17,80 persen jalan dalam kondisi sedang, 56,28 persen jalan dalam kondisi rusak ringan dan sisanya 6,03 persen kondisi rusak berat.

Pilar pasar produk menggambarkan keterbukaan pasar produk melalui besarnya kesempatan yang sama bagi para produsen untuk memasarkan produknya secara *fair* dan kompetitif. Berbagai praktek monopoli dan oligarki

ekonomi serta adanya hambatan-hambatan bagi pelaku usaha untuk masuk ke pasar produk dan jasa tertentu menciptakan inefisiensi pasar. Keterbukaan pasar dilihat dari kemampuan usaha kecil dan menengah bersaing di antara kelompok usaha sedang dan besar. Namun kemampuan usaha kecil dan menengah masih belum bisa bersaing dengan Perusahaan besar dalam hal penggunaan teknologi dan inovasi. Sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah masih menggunakan cara konvensional dan tidak inovatif.

Dinamisme bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Secara administratif, pelayanan sangat mudah dan hambatan untuk memulai bisnis di Kabupaten Mamuju Tengah tergolong rendah, namun kejelasan hukum sebagai payung hukum tentang kemudahan berusaha belum tersedia sehingga hal ini mempengaruhi minat investor untuk memulai usahanya. Pada tahun terakhir, capaian investasi Kabupaten Mamuju Tengah juga mengalami penurunan dan jauh dari target yang telah ditentukan.

Pilar kapabilitas inovasi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Namun di Kabupaten Mamuju Tengah saat ini kualitas pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan, terutama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi masih memiliki skor yang rendah, belum didukunya Infrastruktur inovasi yang meliputi lembaga penelitian, pusat inovasi, inkubator bisnis, dan technopark, serta belum adanya Investasi pada pengembangan inovasi yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun lembaga internasional.

2.4.4. Kinerja setiap Urusan Pemerintahan

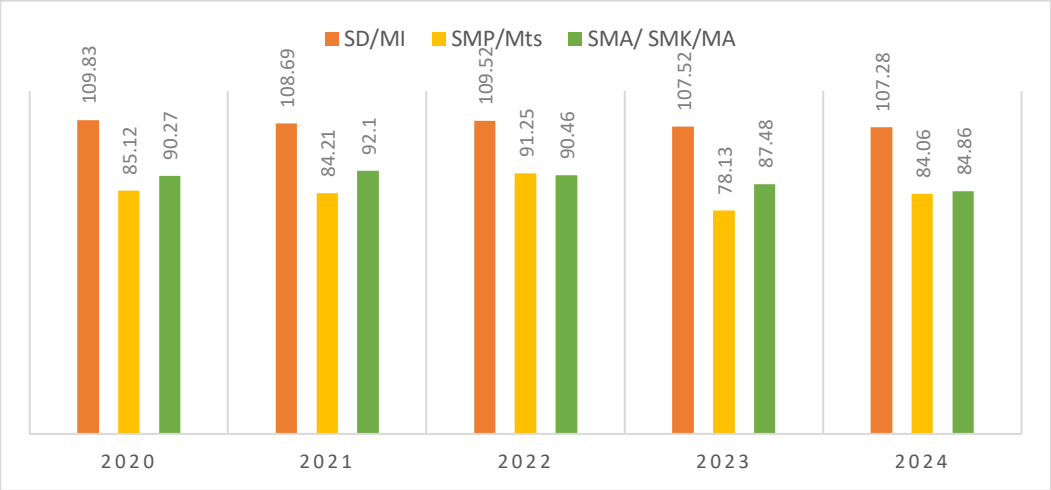
I. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100%. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah di tingkat pendidikan tertentu. Nilai APK dapat lebih dari 100% hal ini disebabkan terdapat siswa di luar usia kelompok usia sekolah, wilayah kota atau perbatasan.

Gambar 2. 60 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



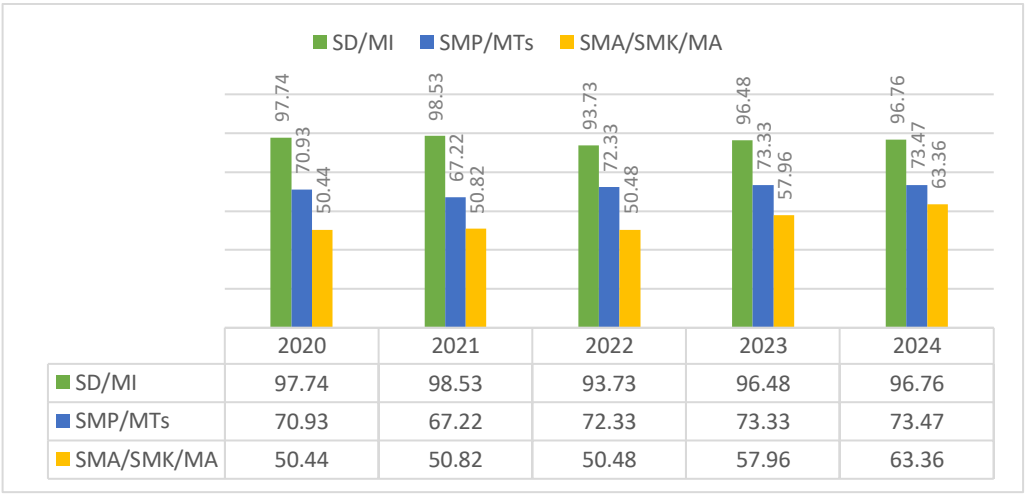
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Dalam lima tahun terakhir angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD/MI/sederajat menujukan rata-rata capaian di atas 100 persen sedangkan rata-rata capaian APK untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat sebesar 80 persen. Pada akhir tahun 2023 APK untuk jenjang SD/MI/sederajat di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 107,52 persen sedangkan untuk tingkat jenjang SMP/MTs/sederajat sebesar 78,13 persen.

b. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi APM maka menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tertentu.

Gambar 2. 61 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020-2024



	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI	97.74	98.53	93.73	96.48	96.76
SMP/MTs	70.93	67.22	72.33	73.33	73.47
SMA/SMK/MA	50.44	50.82	50.48	57.96	63.36

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

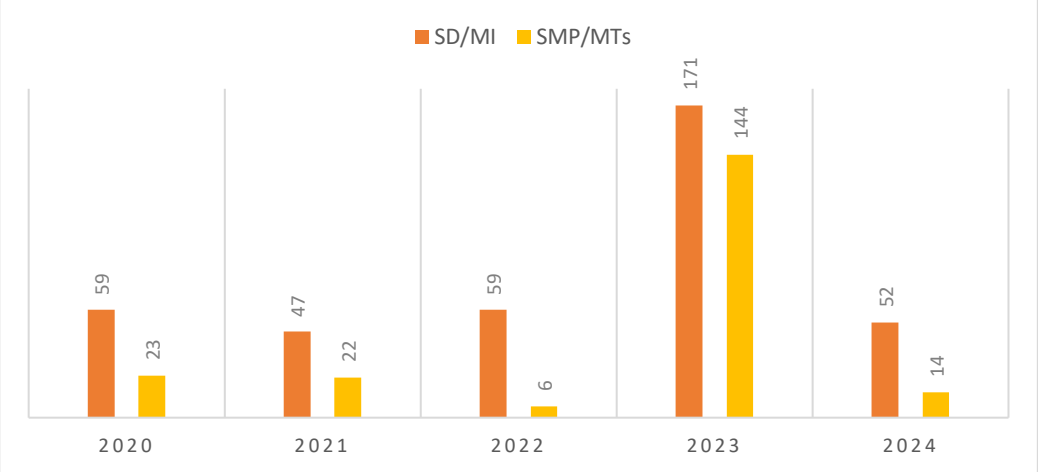
Pada tahun 2024 capaian angka partisipasi murni untuk tingkat SD/MI/sederajat bertambah 0,28 persen atau meningkat menjadi 96,76 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu angka partisipasi murni untuk jenjang SMP/MTs/Sederajat juga mengalami peningkatan dari 73,33 persen menjadi 73,47 persen atau bertambah 0,14 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal yang sama juga terjadi pada Tingkat SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 57,96 tahun 2023 persen menjadi 63,36 di tahun 2024 atau naik sebesar 5,4 persen.

c. Angka Putus Sekolah (APtS)

Angka Putus Sekolah (APtS) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Rumus AptS adalah jumlah siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran (keluar) pada jenjang tertentu dibagi jumlah siswa pada jenjang tertentu yang sesuai tahun t-1 dikali 100%.

Siswa putus sekolah yaitu siswa yang tidak melanjutkan pembelajaran tanpa membawa surat keterangan pindah atau ijazah. Kriteria: makin rendah APtS, berarti makin baik, idealnya 0% berarti tidak ada siswa yang putus sekolah. APtS digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang putus sekolah di suatu daerah sehingga dapat dilakukan penanggulangannya pada tahun-tahun mendatang.

Gambar 2. 62 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamuju Tengah, 2025

Angka Putus Sekolah di Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2024 menurun dari tahun sebelumnya. Pada Tingkat SD/MI angka putus sekolah dari 171 menjadi 52 atau turun sebesar 119 persen dan Tingkat SMP/MTs dari 144 menjadi 14 atau turun sebesar 130 persen. Tentunya hal tersebut merupakan nilai postif bagi capaian kinerja pemerintah daerah

d. Angka Lulusan (AL)

Angka Lulusan (AL) adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus pada jenjang tertentu dengan jumlah peserta ujian pada jenjang pendidikan tertentu yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi nilainya, berarti makin baik. Idealnya Angka Kelulusan adalah sama dengan 100 persen, yang berarti semua siswa peserta ujian lulus seluruhnya. Angka Kelulusan digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa yang lulus, dari jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2. 63 Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD/MI/Sederajat	100	100	99,5	100	100
2.	SMP/MTs/Sederajat	99,76	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mamuju Tengah, 2025

e. Angka Melanjutkan (AM)

Angka Melanjutkan (AM) adalah perbandingan antara jumlah siswa baru tingkat satu pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan jumlah lulusan pada jenjang yang lebih rendah dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi AM angkanya makin baik. Idealnya AM adalah sama dengan 100% yang berarti semua lulusan dapat ditampung di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bila angkanya lebih dari 100 persen hal itu disebabkan karena ada siswa baru yang berasal dari daerah lain. AM digunakan untuk mengetahui banyaknya lulusan yang dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau daya tampung dari sekolah yang lebih tinggi.

Tabel 2. 64 Angka Melanjutkan Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	SD/MI/Sederajat	100	100	97,5	98,7	
2.	SMP/MTs/Sederajat	85	94	96,5	97,4	

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2024

f. Jumlah Murid, Guru dan Sekolah

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, serta distribusi tenaga pendidik yang merata diseluruh wilayah.

Tabel 2. 65 Jumlah Murid, Guru, Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Siswa					
TK	-	2.673	2.477	2507	2.671
RA	-	335	520	541	567
SD	14.242	13.960	13.737	13.931	14.670
MI	-	1.295	1.510	1.503	1.504
SMP	5.049	4.803	4.363	4.389	4.530
MTs		1.531	1.847	1.719	1.730
Jumlah Guru					
TK	-	236	244	238	
RA	-	24	36	47	
SD	1.112	1.142	1.106	1.166	
MI	-	108	106	121	
SMP	588	619	590	569	
MTs	-	209	174	200	
Jumlah Sekolah					
TK	-	69	71	72	78
RA	-	7	9	10	10
SD	116	116	116	116	116
MI	-	11	11	11	11
SMP	36	37	37	37	37
MTs	-	20	20	23	23

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

2) Kesehatan

a. Prevalensi Stunting

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Seorang anak dikatakan menderita stunting apabila panjang badan saat lahir dibawah empat puluh delapan sentimeter untuk bayi laki-laki dan kurang dari empat puluh tujuh sentimeter untuk bayi perempuan.

Tabel 2. 66 Angka Stunting Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Berdasarkan Data SSGI	-	26,3	28,1	28,6	31,5
Berdasarkan Data E-PPGBM	8,13	14,46	14,58	14,92	16,73

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Menurut Data Study Status Gizi Indonesia (SSGI), angka stunting di Mamuju Tengah pada Maret 2023 meningkat menjadi 28,6 persen. Angka ini meningkat sebesar 0,91 persen dari tahun 2021. Sementara

itu jika melihat data dari E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) juga mencatatkan penderita stunting di Mamuju Tengah pada Januari 2024 meningkat menjadi 16,73 persen. Angka ini meningkat 0,47 persen sejak tahun 2019. Jika membandingkan capaian stunting Kabupaten se-Sulbar angka stunting di Kabupaten Mamuju Tengah cukup rendah karena berada di urutan terbawah Namun upaya penurunan angka stunting di Mamuju Tengah harus terus dilakukan dan diharapkan dapat terus menurun setiap tahunnya.

b. Angka Gizi Buruk

Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak dilihat dari berat badan menurut umur. Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangn gizi menahun. Gizi buruk pada balita dapat dilihat melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG). Setiap tahunnya dilakukan Kegiatan Pemantauan Status Gizi dengan mengambil sejumlah sampel balita di tiap-tiap wilayah Puskesmas untuk mengetahui proporsi status gizi mulai dari gizi lebih sampai gizi buruk sebagai salah satu upaya untuk memantau tumbuh kembang balita.

Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, thypus, dan lain-ain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program-program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

Tabel 2. 67 Angka Gizi Buruk di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Gizi Buruk	88	55	67	51	73

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

c. Angka Kematian Neonatal Bayi dan Balita

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah kematian yang terjadi pada bayi usia 0-12 bulan (termaksud neonatal) disuatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Penyebab terbesar kematian bayi karena BBLR, asfiksia dan penyebab lain (ispa, diare, dll).

Pada tahun 2024 angka kematian neonatal yang dilaporkan sebanyak 24 orang, Bayi sebanyak 4 orang, dan balita sebanyak 2 orang. Kematian pada usia bayi cukup mengalami penurunan yang signifikan sekitar 30,76 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi dan balita diantaranya penyakit BBLR, asfiksia, tetanus neonatorum, infeksi, kelainan kongenital, diare, demam berdarah, dan lainnya.

Tabel 2. 68 Angka Kematian Neonatal, Bayi dan Balita di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Neonatal	31	40	45	21	24
Bayi	5	6	4	13	4
Balita	5	1	5	7	2

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

d. Angka Kematian Ibu per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan dan atau penanganannya (tidak termaksud kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam massa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah sejak lima tahun terakhir angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2020 yaitu sebanyak 9 orang sedangkan pada tahun 2024 jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang. Rincian kematian ibu diantaranya disebabkan karena pendarahan, hipertensi, asma dan faktor lainnya. Angka kematian ibu di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 69 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu	9	3	7	5	5

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

e. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah tidak terlepas dari ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta tersedianya tenaga kesehatan yang tersebar merata di seluruh wilayah. Data dari Dinas Kesehatan menunjukan bahwa pada akhir tahun 2024 Fasilitas Kesehatan mencakup rumah sakit umum daerah sebanyak 1 unit, klinik sebanyak 4 unit, puskesmas sebanyak 11 unit, posyandu sebanyak 195 unit, dan pustu sebanyak 45 unit.

Tabel 2. 70 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Sakit	1	1	1	1	1
Puskesmas	11	11	11	11	11
Klinik	1	4	4	4	4
Posyandu	177	190	192	192	195
Pustu	45	25	45	45	45

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

f. Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Salah satu yang masih menjadi masalah utama di Mamuju Tengah adalah keterbatasan kuantitas SDM tenaga kesehatan. Pada tahun 2024 tenaga kesehatan yang tersedia mencakup Dokter Umum 30 orang, Dokter Spesialis 11 orang, Perawat 385 orang, Bidan 461 orang, Farmasi 50 orang dan Ahli Gizi 44 orang. Ketersediaan tenaga medis ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 71 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Dokter Spesialis	0	0	6	6	11
Dokter Umum	25	24	27	25	30
Dokter Gigi	16	16	16	14	17
Perawat	129	316	317	348	385
Bidan	184	453	504	430	461
Farmasi	22	48	60	43	50
Ahli Gizi	19	28	37	41	44
Total	395	885	967	907	998

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

g. Penemuan Kasus Penyakit

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah secara umum ada empat jenis penyakit yang dengan kasus tertinggi diantaranya Tuberkulosis, Demam Berdarah Dengeu, Hipertensi, dan Diabetes Melitus. Dimana pada tahun 2024 Angka tertinggi dicatatatkan pada jenis penyakit Hipertensi dengan jumlah kasus sebanyak 6.889, kemudian ikuti dengan Diabetes Melitus sebanyak 1.716, Turbekulosis sebanyak 383 kasus, dan Demam Berdarah Dengeu sebanyak 77 kasus. 3 Penyakit lainnya seperti kusta sebanyak 9 kasus, Malaria sebanyak 8 kasus dan HIV/AIDS sebanyak 11 kasus.

Tabel 2. 72 Penemuan Kasus Penyakit di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tuberkulosis	276	224	216	296	383
HIV/AIDS	4	7	8	9	11
Kusta	10	7	15	7	9
Malaria	-	4	3	3	8
Demam Berdarah Dengeu	23	64	61	199	77
Hipertensi	20.472	7430	7893	7231	6889
Diabetes Melitus	1.947	1158	840	1056	1716

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Jumlah Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapatkan Tablet Zat Besi

Dalam program kesehatan ibu dan anak, kunjungan antenatal ini diberi kode angka K (K1,K2,K3,K4) yang merupakan singkatan dari kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan 1-12 minggu, kunjungan kedua dilakukan 12-28 minggu, kunjungan ketiga dilakukan 28-36 minggu, dan kunjungan keempat adalah kontak ibu hamil yang keempat atau lebih dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan. Distribusi kontak K4 adalah minimal 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga.

Data menunjukkan bahwa cakupan indikator ini dari tahun ke tahun belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini disebabkan faktor ekonomi yang lemah. pengetahuan yang terbatas akan pentingnya mendapatkan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang lengkap hingga usia kehamilan 32 minggu serta keterbatasan akses untuk menjangkau fasilitas kesehatan yang ada.

Tabel 2. 73 Ibu Hamil yang Melakukan Kunjungan K1, K4, Kurang Energi Kronis, Serta Mendapatkan Tablet Zat Besi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ibu Hamil	3.166	3.234	3.274	3.324	3.525
Melakukan Kunjungan K1	3.125	3.092	2.993	2.744	2.386
Melakukan Kunjungan K4	2.558	2.132	2.250	2.475	2.213

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kurang Energi Kronis	505	541	554	536	406
Mendapatkan Zat Besi	3.125	3.092	2.993	2.744	2.292

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 Jumlah Ibu hamil meningkat 1,06 persen atau sebesar 3.525 ibu hamil. Jumlah yang melakukan kunjungan K1 sebanyak 2.386 dengan persentase 67,68 persen dari jumlah ibu hamil. Sementara itu jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K4 sisa 2.213 dengan persentase 62,78 persen. Angka ini berkurang 4,9 persen jika dibandingkan dengan jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan K1.

h. Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunizatitioni adalah kondisi tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0,11 bulan), ibu hamil, WUS, dan anak sekolah tingkat dasar. Imuniasasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 Dosis BCG, 3 Dosis DPT, 4 Dosis Polia, 4 Dosis Hepatitis B, 1 Dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 Dosis IT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 Dosis DT, 1 Dosis Campak dan 2 Dosis IT.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan menunjukan bahwa cakupan desa yang telah melaksanakan UCI berfluktuatif setiap tahunnya. Di tahun 2018 persentase Desa UCI telah mencapai 100 persen atau menunjukan bahwa 100 persen dari jumlah bayi yang ada di 56 desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Namun demikian di akhir tahun 2021 capaian Desa UCI menurun menjadi 80,36 persen. Hal ini disebabkan karena pengaruh pandemic Covid-19 yang membuat masyarakat enggan untuk membawa anaknya ke pusat kesehatan. Akan tetapi pada tahun 2022 persentase desa UCI sudah kembali meningkat menjadi 89,29 persen dan tetap stagnan sampai tahun 2023. Namun pada Tahun 2024 jumlah Desa UCI menurun secara signifikan yakni sebanyak 46 dengan persentase 81,60 persen.

Tabel 2. 74 Persentase Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahuun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa UCI	49	45	50	50	46
Jumlah Desa	56	56	56	56	54
Persentase	87,50	80,36	89,28	89,28	81,60

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Mamuju Tengah, 2025

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Kondisi Kemantapan Jalan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, status jalan dibagi ke dalam lima jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa.
Jalan Kabupaten didefenisikan sebagai jalan yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antardesa. Jalan Kabupaten juga bisa berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten, lalu penghubung antar-pusat kegiatan lokal. Kode jalan ini ditandai dengan K4. Pengelolaan dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun biasanya jalan kabupaten memiliki ukuran lebar yang lebih kecil dari jalan provinsi.

Untuk menghitung persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap, maka dapat dilakukan dengan menjumlahkan Panjang jalan dalam kondisi baik ditambah Panjang jalan dalam kondisi sedang dibagi total Panjang jalan kabupaten dikali seratus persen. Persentase Panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 75 Kondisi Panjang Jalan di Kabupatyen Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik (Km)	98,18	61,12	76,843	87,99	84,554
Sedang (Km)	112,62	53,55	169,833	78,75	23,995
Rusak Ringan (Km)	222,54	349,72	199,438	248,89	4,323
Rusak Berat (Km)	32,54	1,40	19,765	26,56	329,308
Jumlah (Km)	465,879	465,879	465,879	442,18	442,18
Kondisi Mantap Jalan (%)	45,25	56,28	52,95	37,66	24,55

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2023 terjadi revisi pada SK jalan yang menjadi kewenangan kabupaten sehingga berdasarkan updating data panjang jalan yang menjadi kewenangan kabupaten Mamuju Tengah dari 465,879 Km menjadi 442, 18. Km. Jika melihat dari kondisi panjang jalan dalam keadaan mantap mengalami penurunan menjadi 24,55 persen. Hal ini diakibatkan pada meningkatnya kondisi jalan dari yang rusak ringan smpai rusak berat sebesar 333,631 Km.Pada umumnya kerusakan jalan disebabkan karena penggunaan jalan yang melebihi muatan, tingginya

intensitas hujan, serta belum baiknya sistem drainase di bahu jalan yang menimbulkan genangan air sehingga menyebabkan kerusakan jalan.

b. Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan

Survey kondisi permukaan jalan baru dilakukan mulai pada tahun 2021. Secara umum jika melihat data sejak tiga tahun terakhir kondisi permukaan jalan di Kabupaten Mamuju Tengah menujukan adanya perbaikan pada infrastruktur jalan setiap tahunnya. Pada tahun 2024 dari total panjang jalan 442,18 km dengan kondisi aspal sebesar 79,077 Km, Beton sebesar 53,570 Km, Kerikil sebesar 294,751 Km, dan Kerikil sebesar 14,782 Km.

Tabel 2. 76 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Aspal (Km)	-	61,205	62,735	66,183	79,077
Beton (Km)	-	53,55	55,102	68,117	53,570
Kerikil (Km)	-	349,724	342,119	298,120	294,751
Tanah (Km)	-	1,4	6,013	9,760	14,782

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

c. Kondisi Jembatan

Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyebrangi jurang atau rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyebrangan pejalanan kaki, kendaraan atau kereta api diatas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan (traffic flows). Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan, karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut.

Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik dalam hal ini adalah jembatan yang menjadi kewenangan kabupaten dengan struktur atas dan sturuktur bawahnya dalam kondisi baik sehingga secara keseluruhan jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Untuk memperoleh persentase jembatan kabupaten kondisi baik dapat digunakan rumus yaitu jumlah jembatan dalam kondisi baik dibaik jumlah total jembatan yang ada di kabupaten dikalikan 100 persen.

Tabel 2. 77 Kondisi Jembatan (Unit) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Baik	80	2	2	3	3
Sedang	2	91	91	84	81
Rusak Ringan	21	52	52	76	73
Rusak Berat	66	2	2	1	7
Jumlah	169	147	147	164	164

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Untuk tahun 2019-2020 Dinas PUPR masih menggunakan metode DD2 dari tahun 2018 yakni pengukuran masih di bawah 6 meter sedangkan untuk tahun 2021-2022 pengukuran sudah disesuaikan dengan bentang minimum jembatan yakni 6 meter. Survey Kondisi jembatan mulai dianjurkan bersamaan dengan Survey Kondisi Jalan, yang juga bertepatan dengan update SK Jalan Kabupaten sehingga pada tahun 2023 menghasilkan 164 jembatan yang ada di Kab. Mamuju Tengah. Jika melihat data survey dari Dinas PUPR kondisi jembatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sebanyak 3 unit dalam kondisi baik, 161 dalam kondisi rusak sampai rusak ringan, dan 7 unit dalam kondisi rusak berat.

d. Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten

Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi, sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Daerah irigasi yang terletak utuh pada satu kabupaten berupa daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan irigasi yang seluruh bangunan dan saluran serta luasnya dalam satu wilayah kabupaten. Pemerintah kabupaten mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten.

Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan banguna sadap, dan bangunan pelengkapannya. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.

Tabel 2. 78 Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten di Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Irigasi Primer (m)	22.708	22.708	22.708	22.708	22.708
a. Kondisi Baik	19.147,54	19.807.8	19.807,8	19.807,8	19.807,8
b. Kondisi Sedang	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3
c. Kondisi Rusak Ringan	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3	3.301,3

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
d. Kondisi Rusak Berat	7.262,86	6.602,6	6.602,6	6.602,6	6.602,6
2. Irigasi Sekunder (m)	22.708	22.708	22.708	22.708	22.708
a. Kondisi Baik	10.899,84	11.354	11.345	11.345	11.345
b. Kondisi Sedang	2.270,8	2.270,8	2.270,8	2.270,8	2.270,8
c. Kondisi Rusak Ringan	2.724,96	2.724,96	2.724,96	2.724,96	2.724,96
d. Kondisi Rusak Berat	6.812,4	6.358,24	6.358,24	6.358,24	6.358,24
3. Irigasi Tersier (m)	2.518	2.518	2.518	2.518	2.518
a. Kondisi Baik	1.208,64	1.259	1.259	1.259	1.259
b. Kondisi Sedang	377,7	377,7	377,7	377,7	377,7
c. Kondisi Rusak Ringan	125,9	125,9	125,9	125,9	125,9
d. Kondisi Rusak Berat	805,76	755,4	755,4	755,4	755,4
Jumlah Bangunan Irigasi Luas Daerah	36	36	36	36	36
Irigasi Sesuai PERMEN (ha) Luas Daerah	9.032	9.032	9.032	9.032	9.032
Irigasi Sesuai Sawah/Fungsional	3.598	3.598	3.598	3.598	3.598

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

e. Rumah Tangga Bersanitasi

Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga di kali 100 persen.

Tabel 2. 79 Rumah Tangga Bersanitasi di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
RT Bersanitasi	22.283	23.729	24.603	24.726	22.265
Jumlah Rumah Tangga	28.623	28.623	28.834	28.834	28.834
Persentase	77,85	82,90	85,33	86,39	77,22

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Capaian Rumah Tangga bersanitasi layak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 rumah tangga yang bersanitasi layak meningkat sebesar 8,54 persen. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 9,17 persen. Hal ini tentunya sangat disayangkan karena sebagaimana diketahui bahwa sanitasi termasuk dalam urusan pelayanan minimal sehingga wajib untuk dipenuhi. Pengelolaan sanitasi sangat berdampak pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jika kondisi sanitasi masyarakat buruk maka akan berdampak pada pencemaran lingkungan sehingga akan menyebabkan menurunnya kesehatan dan produktivitas masyarakat sekitar.

f. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindungi meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindungi, sumur bor atau sumur pompa yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termaksud air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air yang tidak terlindungi. Proporsi penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang memiliki akses air minum berkualitas di bagi total penduduk.

Tabel 2. 80 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
RT Pengguna Air Bersih	20.343	24.285	25.713	27.176	24.129
Jumlah Rumah Tangga	28.623	28.623	28.834	28.834	28.834
Persentase	71	85	89	94	84

Sumber: Dinas PUPR Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari menunjukan progres yang baik selama empat tahun berturut-turut yakni dari 2020

sampai pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 10 persen yakni dari 94 persen menjadi 84 persen.

g. Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Perpipaan

Akses rumah tangga terhadap air minum perpipaan merujuk pada persentase rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses ke air minum yang layak dan aman melalui sistem perpipaan, seperti PDAM atau jaringan perpipaan lainnya. Air minum yang dimaksud harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas kesehatan setempat.

Tabel 2. 81 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Perpipaan

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pamsimas	1.105	1.638	2.650	3.010	3.715
UPTD Air Bersih	2.224	2.751	3.329	3.616	4.253
Total Perpipaan	3.329	4.389	5.979	6.626	7.968
Total Rumah Tangga	41,951	41.642	41.830	42.224	43.592
Persentase terlayani Perpipaan	**8%**	**11%**	**14%**	**16%**	**18%**

Sumber: Dinas PU, data diolah. 2025

Secara total, sambungan perpipaan meningkat dari 3.329 sambungan pada tahun 2020 menjadi 7.968 sambungan pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan air bersih perpipaan.

Namun, jika dibandingkan dengan jumlah **Total Rumah Tangga**, yang juga meningkat dari 41,951 KK (2020) menjadi 43.592 KK (2024), persentase rumah tangga yang terlayani perpipaan masih relatif rendah. Cakupan layanan perpipaan hanya meningkat dari 8% pada 2020 menjadi 18% pada 2024.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah sambungan perpipaan bertambah signifikan setiap tahun, pertumbuhan cakupan pelayanan masih belum sebanding dengan peningkatan kebutuhan, sehingga diperlukan percepatan pengembangan jaringan dan optimalisasi kapasitas pelayanan agar target pemenuhan akses air minum layak dapat tercapai.

4) Perumahan dan Permukiman

a. Rasio Rumah Layak Huni

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan

melibatkan secara langsung komponen masyarakat, pihak swasta dan stakeholder terkait lainnya. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Ada lima kriteria rumah layak huni yaitu Ketahanan dan Keselamatan Bangunan; Kecukupan Luas Ruang Penghuni; Akses Sanitasi Layak, Air Minum Layak dan Adanya Luas Pencahayan dan Pengawasan.

Tabel 2. 82 Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Layak Huni (Unit)	16.333	31.449	31.861	32.087	30.810
Penduduk (Jiwa)	135.280	137.380	140.028	142.455	143.274
Rasio	12,07	22,89	22,75	22,52	21,50

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas, capaian infrastruktur rumah layak hunisejak tahun 2019 sampai 2023mengalami peningkatan sebesar 5,72 persen. Sampai dengan tahun 2024 terdapat 30.810 rumah layak huni. Dengan kata lain sekitar 21,50 persen penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah telah memiliki rumah layak huni. Penurunan ini terjadi karena adanya pemutakhiran data jumlah rumah layak huni sementara di sisi lain terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah.

b. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan cakupan minimun luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria rumah layak huni meliputi: memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, pengawasan dan sanitasi, serta memenuhi kecukupan luas bangunan minimum 9 $m^{2.}$

Tabel 2. 83 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Layak Huni (Unit)	16.333	31.449	31.861	32.087	30.810
Jumlah Rumah	39.413	39.413	39.353	39.353	38.657
Persentase	41,44	79,79	80,96	81,54	79,70

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

Cakupan ketersediaan rumah layak huni menunjukan progres yang baik dari tahun 2020 sampai pada tahun 2023. Pada tahun 2023 cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 81,54 persen meningkat 0,58 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun pada Tahun 2024 data jumlah rumah layak huni berkurang secara signifikan diakibatkan oleh adanya pemutakhiran data. Cakupan rumah layak huni menjadi tantangan bagi pemerintah daerah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan keluarga setiap tahunnya. Selain itu ketersediaan lahan, dan penataan ruang juga harus menjadi perhatian pemerintah. Pengawasan terhadap pembangunan yang harus sejalan dengan pelestarian lingkungan untuk mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

c. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh

Definisi kawasan kumuh perkotaan adalah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah kota yang umumnya dihuni oleh masyarakat miskin dan pada umumnya terjadi di perkotaan. Beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah sebuah kawasan tergolong kumuh atau tidak adalah diantaranya dengan melihat: Tingkat kepadatan kawasan, Kepemilikan lahan dan bangunan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut.

Di kabupaten Mamuju Tengah di identifikasi Kawasan kumuh yang ada dan untuk lebih mengintensipkan dan memfokuskan penanganan telah dibuat SK Bupati Kawasan Kumuh. Sampai pada tahun 2020 persentase lingkungan permukiman kumuh konstan di capaian 1,09 persen sejak lima tahun terakhir.

Tabel 2. 84 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Luas Permukiman Kumuh (Ha)	142,66	142,66	142,66	142,66	142,66
Luas Wilayah (Ha)	13.056,01	13.056,01	13.056,01	13.056,01	13.056,01
Persentase	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

d. Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan

Rumah Tangga Kumuh Perkotaan adalah rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap sumber air minum layak, sanitasi layak, luas lantai > 7, 2 m2 per kapita, kondisi atap, lantai, dan dinding yang layak atau tinggal pada kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Capaian rumah tangga kumuh perkotaan terhadap jumlah rumah menunjukan progres yang baik dengan adanya penurunan setiap tahunnya. Di akhir tahun 2023 persentase jumlah rumah tangga kumuh perkotaan sebesar 16,17 persen atau turun 0,18 persen dari tahun sebelumnya. Begitupun pada Tahun 2024, data terkini masih menggunakan data tahun 2023

karena belum adanya Surat Keputusan tentang data Rumah Tangga Kumuh yang terbaru.

Tabel 2. 85 Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT Kumuh Perkotaan (Ha)	420	360	356	353	353
Jumlah Rumah (Unit)	2.170	2.175	2.178	2.183	2.183
Persentase	19,35	16,55	16,35	16,17	16,17

Sumber: Dinas PERKIMTAN Kab.Mamuju Tengah, 2025

5) Ketertiban dan Ketenteraman Umum

a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah. Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya. Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2. 86 Persentase Pelanggaran yang Ditangani di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Jumlah Pelanggaran yang Dilaporkan	0	1	3	1	2
Jumlah Pelanggaran yang Ditangani	0	1	3	1	2
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa cakupan penegakan perda di Kabupaten Mamuju Tengah setiap tahunnya telah mencapai angka 100 persen, yang artinya semua pelanggaran yang dilaporkan sudah ditangani sesuai dengan prosedur yang ada.

b. Ketersediaan Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP)

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat derah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Tabel 2. 87 Rasio Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	**Tahun**				
	2020	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Jumlah Anggota Satpol-PP	279	182	182	182	182
Jumlah Penduduk	135.280	137.280	140.030	142.455	143.279
Rasio	206	132	129	128	127

Sumber: Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju Tengah, 2025

Semakin tinggi jumlah anggota Satpol-PP maka Rasio Petugas Satpol PP juga semakin rendah. Hal ini menunjukan bahwa ketersediaan Satpol-PP semakin terpenuhi.Pada tabel diatas menunjukan rasio Satpol-PP yang cenderung menurun sejak empat tahun terakhir. Pada tahun 2024 rasio petugas Satpol-PP sebesar 127 yang artinya setiap 1 petugas Satpol-PP berbanding dengan 127 penduduk. Menurunnya rasio Satpol-PP disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk sedangkan jumlah

anggota Satpol-PP berada pada kondisi stagnan tidak mengalami penambahan personil sejak tiga tahun terakhir.

c. Penanganan Bencana Kebakaran

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 69 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri, bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada Kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Tabel 2. 88 Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kasus Kebakaran yang Tertangani dalam 15 Menit	10	19	16	11	11
Jumlah Kasus Kebakaran dalam Jangkauan WMK	14	22	28	15	11
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran	71,43	86,36	57	57	100

Sumber: Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dalam lima tahun terakhir cakupan penanganan bencana kebakaran menunjukan capaian yang berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2024 capaian penanganan korban kebakaran sebesar 57 persen yang artinya dari 15 kasus kebakaran hanya 11 kejadian kebakaran yang tertangani dalam 15 menit. Cakupan ini dipengaruhi oleh ketersediaan sapras, keterjangkauan lokasi kejadian, dan sumber daya penanganan kebakaran daerah.

d. Patroli Siaga Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota. Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: a) Tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan; b) Antar batas wilayah; dan c) Tempat keramaian/hiburan. Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Tabel 2. 89 Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketenteraman Umum Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Banyaknya Patroli (1 Tahun)	10	10	10	10	10
Jumlah Kecamatan	5	5	5	5	5

Sumber: Satpol-PP dan Pemadam Kebakaran Kab.Mamuju Tengah, 2025

6) Sosial

a. Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Cakupan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Perorangan dan Keluarga dalam Usaha Kesejahteraan Sosial adalah jumlah Pekerja Sosial, PSM, Tagana, Penyuluh Sosial, TKSK yang mendapatkan pemberdayaan melalui diklat, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka membantu menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dengan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien

Tabel 2. 90 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja Sosial	1	1	1	1	1
PSM	35	35	35	35	35
Tagana	34	34	34	34	35
Penyuluh	0	0	0	0	1
TKSK	5	5	5	5	5
Cakupan Pemberdayaan Sosial	75	75	75	75	80

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, 2025

b. PMKS yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui KUBE atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya

Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh warga atau keluarga/keluarga binaan sosial yang terdiri dari keluarga kurang mampu (prasejahtera) yang menerima pelayanan sosial melalui kegiatan Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Pada tahun 2024 jumlah PMKS yang menerima bantuan sebesar 100 persen artinya dari keseluruhan PMKS yang terdaftar telah menerima bantuan.

Tabel 2. 91 Cakupan Pemberdayaan PSKS Perorangan dan Keluarga Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PMKS yang Menerima Bantuan KK	3.072	4.579	5.871	3.743	5.202
Jumlah PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	3.072	4.579	5.871	3.743	5.202
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial Kab.Mamuju Tengah, 2025

II. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

6) Ketenagakerjaan

a. Tingkat Pengangguran Terbuka, Partisipasi Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah sebuah modal bagi pembangunan suatu bangsa. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2024 terdapat 67.231 angkatan kerja yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Sebanyak 69,06 persen di antaranya bekerja dan sisa sekitar 1,70 persen adalah pengangguran terbuka. Angka ini berhasil turun walaupun tidak terlalu signifikan sebesar 0,13 poin dari tahun sebelumnya. Data jumlah angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat partisipasi angkatan kerja selama lima tahun di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 92 Tingkat Pengangguran Terbuka, Partisipasi Angkatan Kerja dan Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
TPT	2,71	2,52	1,88	1,83	1,70
TPAK	70,04	70,84	63,15	66,01	69,06
AK	67.414	68.082	63.749	67.231	71.729

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

b. Status Pekerjaan Angkatan Kerja

Status pekerjaan dibedakan menjadi enam jenis yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Pada tahun 2024 dari keenam status pekerjaan tersebut jumlah status pekerjaan terbanyak ada pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap sebanyak 18.688 orang sedangkan status pekerjaan terkecil ada pada status berusaha dibantu buruh tetap sebanyak 747 orang. Data status pekerjaan angkatan kerja di Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 93 Status Pekerjaan Angkatan Kerja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Sendiri	11.324	12.462	15.422	13.814	14.209
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar	14.811	15.835	14.139	14.999	18.688
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	2.284	1.165	67	908	747
Buruh/Karyawan /Pegawai	17.737	18.645	14.062	14.900	13.711
Pekerja Bebas	3.483	5.875	8.196	8.790	11.366
Pekerja Keluarga/Tidak Dibayar	13.700	14.100	10.840	12.593	11.819
Jumlah	63.339	68.082	62.548	66.004	70.510

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

c. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan di Tempatkan

Berdasarkan data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja tahun 2019-2024 menunjukan besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan berfluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2022 persentase pekerja yang ditempatkan sudah mulai menunjukan angka yang baik dengan capaian 39 persen. Namun pada tahun 2023 angka ini kembali menurun sebesar 1 persen. Diakibatkan karena meningkatnya jumlah pencari kerja tapi yang berhasil mendapatkan pekerjaan hanya sebesar 37 persen dari total pendaftar kerja.

Tabel 2. 94 Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pencari Kerja yang Ditempatkan	34	9	280	468	
Pencari Kerja yang Terdaftar	85	251	712	1.250	
Persentase	40%	3,58%	39%	37%	

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Mamuju Tengah, 2025

d. Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Sistem jaminan sosial tenaga kerja yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program perlindungan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). Sementara itu jenis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi empat macam yakni Pekerja Penerima Upah (PU), Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Pekerja Jasa Konstruksi (Jakon), dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Tabel 2. 95 Data Kepesertaan BPJS Ketengakerjaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pekerja/Buruh Jamsostek	N/A	779	780	1,806	19.018
Total Pekerja/Buruh	N/A	11,035	11,335	11,335	70.123
Persentase	N/A	17%	19%	21%	27,12%

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data yang tercatatkan selama tiga tahun yakni dari tahun 2021-2023 jumlah kepemilikan BPJS ketenagakerjaan meningkat dengan rata-rata peningkatan 1,6 persen. Pada tahun 2023 capaian sebesar 21 persen meningkat 3 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya meningkat lebih besar yakni 6,12 persen pada tahun 2024.hal ini diharapkan akan terus meningkat mencapai 100 persen.

7) *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

a. Angkatan Kerja Perempuan

Salah satu ukuran kontribusi perempuan dalam perekonomian adalah partisipasi Angkatan kerja perempuan. Defenisi dari partisipasi Angkatan kerja perempuan adalah besarnya jumlah perempuan yang bekerja pada Angkatan kerja pada satu periode tertentu. Persentase partispasi angkatan kerja perempuan dihitung dari jumlah perempuan yang bekerja pada angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah perempuan pada angkatan kerja di kali 100 persen.

Tabel 2. 96 Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja Perempuan	21.932	21.660	17.521	17.728	22.733
Angkatan Kerja	67.414	68.082	63.749	62.370	50.209
Persentase	32,53	31,81	27,84	27,26	45,27

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dari data diatas menunjukan bahwa persentase partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan selama empat tahun yakni tahun

2020 sampai 2023 namun pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh jumlah total angkatan kerja berkurang signifikan sementara angkatan kerja perempuan semakin meningkat. Akhir tahun 2024 data angkatan kerja perempuan yang tercatatkan sebanyak 22.733 orang dengan persentase sebesar 45,27 persen dari total angkatan kerja. Angka ini meningkat 18,01 persen dari tahun sebelumnya.

b. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada Lembaga pemerintahan baik di yang bekerja di legislatif maupun yang bekerja di eksekutif. Data menunjukan bahwa pada tahun 2025 jumlah perempuan yang berpartisipasi di lembaga legislatif sebanyak 4 (empat) orang sedangkan jumlah perempuan yang bekerja di lembaga eksekutif sebanyak 1.643 orang, angka ini mengalami peningkatan sebesar 13,38 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 97 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bekerja di Legislatif	6	6	6	6	4
Bekerja di Eksekutif	960	956	1.132	1.449	1.643

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

c. Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perempuan dan anak korban kekerasan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara seksual, psikologis, dan/atau penelantaraan, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, dan perlakuan buruk lainnya yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

Tabel 2. 98 Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Di Lembaga Pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus KDRT	5	9	7	9	5
Kasus Kekerasan Anak	17	19	21	16	4

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data yang tercatatkan menunjukan pada tahun 2019-2023 terjadi fluktuatif pada kasus jumlah KDRT dan angka kekerasan anak. Kasus

tertinggi pada kasus kekerasan anak terjadi pada tahun 2022 sebanyak 21 kasus sedangkan pada kasus KDRT tertinggi pada tahun 2021 dan 2023 tercatatkan sebanyak 9 kasus. Namun pada Tahun 2024 kasus KDRT dan Kekerasan anak menurun drastis di Kabupaten Mamuju Tengah.

d. Persentase Kecamatan/Desa Layak Anak

Kecamatan dan desa/kelurahan layak anak dapat diartikan sebagai pembangunan di tingkatan kecamatan dan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha yang berada di kecamatan dan desa/kelurahan dalam rangka menghormati, menjamin dan memenuhi hak anak, melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi, dan mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan berkelanjutan yang telah terbentuk gugus tugas dan melakukan pengarusutamaan hak anak. Persentase Kecamatan dan desa/kelurahan layak anak dihitung dari jumlah kecamatan dan desa/kelurahan yang terbentuk Layak Anak dibanding jumlah Kecamatan dan desa/kelurahan x 100%

Tabel 2. 99 Persentase Desa Layak Anak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Layak Anak	2	2	2	12	12
Jumlah Desa	54	54	54	54	54
Persentase	3,7	3,7	3,7	22,2	22,2

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data yang ada menunjukan bahwa persentase Desa Layak Anak di Kabupaten Mamuju Tengah selama lima tahun terakhir telah mencapai 22,2 persen. Dimana artinya jumlah desa layak anak dari total 54 desa sudah berhasil dicapai oleh 12 desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah diantaranya: Desa Salugotta, Karossa, Suka Maju, Tabolang, Tobadak, Kire, Bambadaru, Palongaan, Tinali, Tangkao, Salupangkang, Waeputeh.

8) Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH merupakan modifikasi dari studi Indeks Lingkungan yang dikembangkan oleh Virginia Commonwealth University (VCU) dan BPS dengan menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara, dan tutupan lahan sebagai indikator perhitungannya. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat

nasional dan daerah yang akan dijadikan bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian program-program pemerintah di bidang perlindugan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Kualifikasi dan rentang nilai IKLH menurut Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu: Unggul (x > 90), Sangat Baik (82 < s.d < 90); Baik (74 < s.d. <82); Cukup (66 < s.d. < 74); Kurang (58 < x < 66); Sangat Kurang (50 < x< 58); Wasapada (x < 50).

Tabel 2. 100 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Air	N/A	67,50	63,30	54,44	50,00
Indeks Kualitas Udara	N/A	89,13	91,73	92,08	92,29
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	N/A	81,05	81,05	78,56	78,27
IKLH	N/A	79,23	78,71	74,97	73,32

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah, 2025

Secara umum capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2023 sebesar 74,97 dengan kategori baik. Akan tetapi jika dilihat dalam kurun waktu 4 tahun terakhir komponen IKLH mengalami penurunan pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Data terakhir menunjukan Indeks Kualitas Air berada pada kategori kurang dengan nilai sebesar 50,00 poin menurun 25,93 persen sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 78,27 poin menurun 0,37 persen dari tahun sebelumnya.

Permasalahan ini perlu menjadi perhatian utama pemerintah terutama pada indeks kualitas air, sebagaimana air merupakan sumber utama kehidupan. Jika kualitas sumber air tidak baik maka dapat mengganggu aktivitas kehidupan terutama pada menurunya angka kesehatan masyarakat setempat. Pembangunan ekonomi dengan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan harus selaras. Adanya Peningkatan ekonomi harus sejalan dengan peningkatan pembangunan lingkungan bukan malah sebaliknya. Pengawasan terhadap pengendalian lingkungan juga harus dilakukan, terutama pada pembukaan dan peralihan lahan untuk kawasan perkebunan dan permukiman, serta pengolahan hasil limbah perusahaan sawit yang tidak sesuai dengan peraturan sehingga mencemari air.

b. Aduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkanya mahkluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan atau

berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan hidup turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Perusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai proses deteriorisasi atau penurunan mutu lingkungan. Deteriorisasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, serta rusaknya ekosistem.

Tabel 2. 101 Aduan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus yang dilaporkan	1	0	3	0	1
Kasus yang ditindaklanjuti	1	0	3	0	1
Persentase	100	0	100	0	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah, 2025

Secara umum aduan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan terkait pencemaran air sungai akibat pengolahan limbah perusahaan sawit serta pencemaran suara dari aktivitas bongkar muatan tandan sawit yang menganggu masyarakat setempat.

c. Timbulan Sampah yang Tertangani

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefenisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Secara umum timbulan sampah dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta Kawasan umum lainnya.

Pengelolaan sampah dilakukan oleh penghasil sampah atau sumber sampah yaitu masyarakat melalui bank sampah dan TPS atau TPS 3R. Pengelolaan sampah harusnya dipisahkan menjadi 2 bagian yaitu sampah organik dan sampah non organik. Sampah organik dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi pupuk organik atau kompos, sedangkan sampah non organik dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi kerajinan, souvenir, maupun wadah menarik seperti pengganti plastik. Sisa pemilahan dari sumber sampah dapat diangkut dan dikelola di TPA.

Tabel 2. 102 Timbulan Sampah yang Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Jumlah Sampah Terkelola TPA (Ton)	1.896	803	4.121,00	5.110,00	630
Total Timbulan Sampah (Ton)	18.962	22.864	20.057	20.444	20.444
Persentase	10	3,51	20,55	25	3,08

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah, 2025

Bertambahnya penduduk dan aktivitas perekonomian setiap tahunnya memberikan pengaruh yang besar dalam pertambahan jumlah timbulan sampah setiap tahunnya. Dari tabel diatas dapat dilihat adanya peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2023 total timbulan sampah sebesar 20.444 ton dengan jumlah sampah yang berhasil dikelola sebesar 25 persen. Angka ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana capaian pengelolaan sampah sebesar 20,55 persen.

d. Pelayanan Persampahan yang Ditangani Pemerintah Daerah

Persentase cakupan pelayanan persampahan merupakan persentase daerah atau desa yang dijangkau pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah dan Swasta terhhadap jumlah keseluruhan desa dan keluruhan. Tujuan disusunya persentase penanganan sampah adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi tingkat layanan persampahan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik tentang pencapaian target program pemerintah di bidang pengelolaan persampahan.

Rumus untuk menghitung capaian area layanan sampah adalah jumlah desa yang terlayani oleh Pemerintah Daerah dibagi jumlah Jumlah Desa sekabupaten di kali 100 persen.

Tabel 2. 103 Pelayanan Persampahan yang Ditangani Pemerintah Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Desa yang Terlayani PEMDA	2	2	2	2	2
Desa	54	54	54	54	54
Persentase	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah, 2025

Dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah menunjukan selama bahwa kurun waktu lima tahun terakhir persentase cakupan layanan persampahan hanya sekitar 3,70 persen yang artinya dari 54 desa hanya 2 desa yang baru mampu di layani oleh Pemerintah

Kabupaten yaitu di Desa Tobadak dan Desa Topoyo. Keterbatasan Pelayanan ini diakibatkan karena masih kurangnya anggaran sehingga memengaruhi pada fasilitasi pelayanan persampahan. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah bisa melalukan inovasi dengan bekerjasama dengan pihak swasta dan bank melalui dana CSR yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah karena diharapkan pelayanan persampahan ini bisa meningkat setiap tahunnya dan mencakup semua desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah sehingga terwujud Kabupaten Mamuju Tengah yang bersih, sehat dan bebas dari sampah.

e. Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Peraturan Lingkungan Hidup

Pembinaan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana kepada penanggung jawab usaha dalam rangka memberikan desiminasi peraturan perundang-undangan, bimbingan teknis, penyuluhan atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan di Bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan akan memberikan pengaruh terhadap terjaganya kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya bermuara kepada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup.

Dari tabel dibawah ini menunjukan bahwa pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan peraturan lingkungan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 100 persen.

Tabel 2. 104 Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan Peraturan Lingkungan Hidup di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Usaha yang Diawasi Ketaatanya Terkait Izin Lingkungan	30	36	39	52	52
Jumlah Ketaatan Izin Lingkungan yang Diterbitkan	30	36	39	52	52

Persentase	100	100	100	100	100

` *Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah, 2025*

f. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Kawasan perkotaan pada saat ini masih menjadi masalah yang cukup sulit diatasi terutama dalam bidang pemanfaatan ruang terbuka hijau yang dimana meningkatnya akan permintaan lahan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pembangunan perkotaan dapat menyebabkan kualitas ruang terbuka hijau kota semakin menurun dan jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman. Pada realitas saat ini pemanfaatan ruang terbuka hijau belum tepat sasaran di suatu kota yang mengakibatkan penurunan kualitas kota antara lain tidak terawatnya pelestarian atau ruang pejalan kaki, perubahan fungsi tanaman hijau menjadi tempat penjualan pedagang kaki lima, yang mengganggu kenyamanan dan estetika penataan kota.

Berdasarkan amanat Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Proporsi minimal 30 persen terdiri dari 20 persen ruang terbuka hijau publik dan 10 persen untuk penggunaan ruang terbuka privat.

Tabel 2. 105 Ketersediaan Ruang Trebuka Hijau di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	-	0,00011	0,00011	0,0034	0,0037

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab.Mamuju Tengah, 2025

9) Pangan

a. Skor Pola Pangan Harapan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH bernilai 100 menunjukan nilai semua kebutuhan konsumsi tubuh, sehingga semakin tinggi skor PPH semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Secara umum, ada 9 kelompok pangan dalam PPH yaitu; padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak. Buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur, dan buah dan lain-lain. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018, ditetapkan bahwa jumlah kalori harian yang ideal dikonsumsi orang Indonesia sebesar 2.100 kkal.

Tabel 2. 106 Skor Pola Pangan Harapan di Kabupaten Mamuju Tengah 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Skor PPH (%)	88,5	76,3	85,2	82,5	86,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Kabupaten Mamuju Tengah dengan karateristik wilayah dataran rendah, sedang hingga dataran tinggi memiliki potensi dalam pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Data capaian skor PPH dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukan angka yang berfluktuatif setiap tahunnya. Skor PPH tertinggi ada pada tahun 2020 dengan nilai 88,5 persen sedangkan di tahun 2024 skor PPH sebesar 86,2 persen.

Skor PPH ketersediaan pangan untuk Kabupaten Mamuju Tengah belum dikatakan ideal, dikarenakan belum mencapai skor ideal, yaitu 100 persen. Jika nilai skor PPH semakin mendekati angka ideal, maka dapat dikatakan ketersediaan pangan yang ada dalam suatu wilayah semakin beragam. Berbagai macam masalah ketersediaan pangan yang dihadapi diantaranya perubahan alih fungsi lahan pertanian kepada kegiatan non pertanian, semakin langkahnya ketersediaan sumber daya air untuk pertanian, curah hujan yang tidak menentu, perubahan iklim yang ekstrem, serta kemampuan petani berlahan sempit dalam menerapkan teknologi tepat guna menyebabkan tingkat produktifitas usaha tani relative rendah.

b. Produksi Komoditas Pangan Nabati

Bahan pangan merupakan sumber makanan yang menjadi kebutuhan utama bagi kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Manusia membutuhkan bahan pangan sebagai sumber nutrisi yang akan membantu pertumbuhan dan memberikan energi untuk melakukan berbagai kegiatan sehari-hari.

Bahan pangan nabati merupakan salah satu jenis bahan pangan yang berasal dari tumbuhan. Bahan pangan ini meliputi berbagai macam jenis makanan yang berasal dari tanaman, seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Bahan pangan nabati memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan gizi manusia.

Pengelompokan komoditas pangan nabati terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bahan pangan yang berasal dari tanaman hortikultura dan bahan pangan yang berasal dari tanaman pangan. Tanaman hortikultura terdiri atas: sayur-sayuran dan buah-buahan. Sementara itu bahan pagan terdiri dari beras, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubi jalar

Tabel 2. 107 Produksi Komoditas Pangan Nabati(Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Beras	17.793,24	13.628,9	12.704,51	10.018,39	13.469
Jagung	55.926,60	25.057,30	15.933,60	14.655,83	14.399,8
Kedelai	141,60	4,50	0,94	17,60	-
Kacang Tanah	16,81	20,19	22,39	21,20	7,49
Ubi Kayu	1.428,50	1.411,00	1.274,10	574,10	837,50
Ubi Jalar	383,16	396,90	359	147,72	164,16
Sayur-Sayuran	2.402.30	1.971.10	1.152,90	1.318,20	829,90
Buah-Buahan	571.229	757.511	131.361,70	122.744,90	82.010

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

c. Produksi Komoditas Pangan Hewani

Bahan makanan hewani adalah sumber makanan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Bahan pangan hewani dikenal sebagai sumber protein dan lemak. Kandungan protein dalam bahan pangan hewani terbilang tinggi dan dapat berperan untuk membantu meningkatkan kesehatan dan kecerdasan. Protein dalam bahan pangan hewani memiliki kandungan asam amino esensial yang lebih lengkap dan seimbang jika dibandingkan dengan protein dalam bahan pangan nabati. Kandungan protein dalam bahan pangan hewani dapat lebih mudah untuk dicerna dan diserap oleh tubuh. Protein hewani ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki dan membangun jaringan pada tubuh manusia. Selain mengandung protein, bahan pangan hewani juga mengandung berbagai nutrisi lain, seperti vitamin B12, vitamin D, zat besi, dan asam lemak omega-3.

Tabel 2. 108 Produksi Komoditas Pangan Hewani (Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Daging Sapi dan Kerbau	-	-	18,65	44,70	2,04
Daging Ayam	-	-	2.631,59	4.059,70	30,84
Telur	-	-	-	174,80	1,48

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian produksi komoditas pangan hewani dikelompokkan menjadi dua yaitu produksi

daging dan telur. Jika melihat data dalam tiga tahun terkahir produksi daging dan telur mengalami peningkatan yang signifikan di dua tahun pertama. Pada tahun 2023 produksi daging sapi dan kerbau meningkat menjadi 44, 70 ton, daging ayam meningkat 4.059,70 ton dan telur sebesar 174,80 ton. Namun di tahun 2024 produksi daging sapi turun menjadi hanya 2,04 ton, ayam menjadi 30,84 ton dan telur menjadi 1,48 ton.

10) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kepemilikan Kartu Keluarga

Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga. Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga dihitung dengan rumus: jumlah kepemilikan kartu keluarga dibagi jumlah kepala keluarga di kalikan seratus. Persentase kepemilikan Kartu Keluarga di Mamuju Tengah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 109 Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan KK	41.951	41.642	41.663	42.224	43.592
Jumlah KK	41.951	41.642	41.663	42.224	43.592
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, 2025

Sejak lima tahun terakhir ketersediaan kepemilikan kartu keluarga yang diterbitkan di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukan bahwa program sosialisasi administrasi kependudukan, baik yang dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik maupun dalam berbagai event yang dilaksanakan berdampak efektif. Pengelolaan infrastruktur jaringan yang baik juga turut mendukung tercapainya indikator kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Capaian ini juga menunjukan bahwa masyarakat Mamuju Tengah semakin menyadari pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan salah satunya Kartu Keluarga yang senantiasa dibutuhkan untuk berbagai macam urusan.

b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Rumus perhitungan persentase kepemilikan e- KTP dihitung dengan cara membagi jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP dengan jumlah penduduk usia > 17 tahun atau telah menikah.

Tabel 2. 110 Persentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan KTP	92.815	87.914	90.568	89.205	95.865
Jumlah Penduduk usia >17 tahun	93.459	94.631	95.888	98.054	98,314
Persentase	99,31	92,90	94,45	90,98	97,50

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, 2024

Pada tahun 2023 persentase capaian kepemilikan KTP Elektronik di Kabupaten Mamuju Tengah yang tercatatkan sebesar 90,98 persen menurun sebesar 3,47 persen dari tahun sebelumnya. Berbagai faktor yang menyebabkan menurunnya persentase kepemilikan KTP adalah kurangnya kesadaran masyarakat, mobilisasi penduduk, serta keterbatasan akses masyarakat terutama yang berada di daerah perdesaaan. Oleh karena ituDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan inovasi pelayanan administrasi yang dinamai 'LASALMAN' (Layanan Semalam di Desa). Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada mayarakat apalagi yang berada di daerah terpencil sehingga tidak perlu melakukan perekaman dan pembuatan KTP di kabupaten.

c. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah bukti sah mengenai status peristiwa kelahiran seorang yang merupakan peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerbitan kutipan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan kutipan penerbitan akta kelahiran paling lambar 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan delam perda mengenai administrasi kependudukan.

Tabel 2. 111 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan Akta Kelahiran	47.449	67.137	71.801	76.627	81.470
Jumlah Kelahiran	138.130	138.372	138.970	141.260	144.810
Persentase	34,35	48,52	51,67	54,25	56,25

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, 2025

Persentase kepemilikan akta kelahiran dalam lima tahun terkahir terus meningkat setiap tahunnya. Pada awal tahun 2020 capaian kepemilikan

akta kelahiran di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 34,35 persen dan diakhir tahun 2024 meningkat menjadi 56,25 persen.

d. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pendataan penduduk dengan membangun database penduduk yang sistimatik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2023 menunjukan sudah adanya ketersediaan database kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah. Data Ketersediaan database kependudukan skala provinsi di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 112 Ketersediaan Database Kependudukan Skala Kabupaten di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan Database Kependudukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju Tengah, 2025

11) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Indeks Desa Membangun

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu isu strategis yang dihadapi oleh desa. Terhadap isu isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar,pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu: 1) Desa Mandiri 2) Desa Maju 3) Desa Berkembang 4) Desa Tertinggal 5) Desa Sangat Tertinggal.

Tabel 2. 113 Indeks Desa Membangun di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2024

Keterangan	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Desa Mandiri	1	1	1	3	5	6
Desa Maju	1	1	3	3	9	9
Desa Berkembang	25	27	32	36	32	35
Desa Tertinggal	25	25	18	12	7	4
Desa Sangat Tertinggal	2	0	0	0	1	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2025

Perkembangan status desa di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan tren positif dari tahun 2019 hingga 2024. Jumlah Desa Mandiri meningkat signifikan dari hanya 1 desa pada 2019 menjadi 6 desa pada 2024, begitu pula dengan Desa Maju yang tumbuh dari 1 menjadi 9 desa. Sementara itu, Desa Berkembang tetap mendominasi, meskipun jumlahnya fluktuatif, dari 25 desa pada 2019 menjadi 35 desa pada 2024. Sebaliknya, jumlah Desa Tertinggal mengalami penurunan tajam dari 25 desa pada 2019 menjadi hanya 4 desa pada 2024, dan Desa Sangat Tertinggal yang sempat muncul kembali pada 2023 kini kembali hilang di 2024. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya kemajuan nyata dalam pembangunan dan kemandirian desa di Mamuju Tengah.

b. Penetapan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKPDesa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu. RKPDesa yang disusun tepat waktu adalah apabila ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 30 September.

Tabel 2. 114 Persentase Penetapan RKPDes Tepat Waktu dan Sesuai Aturan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Jumlah Desa Menetapkan RKPDes Tepat Waktu	0	0	0	17	46
Jumlah Desa	54	54	54	54	54
Persentase	0	0	0	31,48	85,19

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2024

Pada tahun 2024 perkembangan desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu menunjukan progres yang baik dimana sudah mencapai 85,19 persen atau dengan kata lain sebanyak 46 desa sudah menetapkan RKPDes tepat waktu dari total 54 desa yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya 31,48 persen.

c. Penerapan SISKEUDES Tepat waktu

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

Tabel 2. 115 Persentase Desa yang Menerapkan Siskeudes Tepat Waktu di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Menetapkan SISKEUDES	54	54	54	54	54
Jumlah Desa	54	54	54	54	54
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2024

Penerapan SISKEUDES merupakan hal yang wajib bagi pemerintah desa dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi kualitas penatausahaan keuangan desa. Dilihat dari lima tahun terkahir capaian Desa yang menerapkan SISKEUDES sudah mencapai 100 persen.

d. BUMdes Aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Capaian persentase BUMdes yang aktif tercatat mencapai 100 persen dalam kurun lima tahun terakhir yaitu tahun 2020 sampai tahun 2024. Pemerintah Desa diharapkan dapat mendorong pengelolaan BUMDesa yang ada di desanya karena BUMDesa bukan hanya sekadar badan hukum, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam pengembangan dan penguatan pembangunan ekonomi di desa. Keberadaannya memberikan harapan bagi masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

Tabel 2. 116Persentase BUMdes yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah BUMDes Aktif	32	30	26	30	42
Jumlah BUMDes	49	52	52	54	54
Persentase	65	58	50	56	78

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Mamuju Tengah, 2025

12) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Total Fertility Rate

Total Fertility Rate Total Fertility Rate merupakan jumlah anak rata-rata yang akan dilahirkan seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya (antara umur 15-49). Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program keluarga berencana.

Jika melihat data capaian dalam lima tahun terakhir capaian Fertility Rate di Kabupaten Mamuju Tengah berada pada angka 2,66. Pada tahun 2023 TFR menurun dari 2,70 di tahun 2022 menjadi 2,68. TFR sebesar 2,68 berarti bahwa wanita (usia 15-49 tahun) secara rata-rata mempunyai 2 sampai 6 anak selama masa usia suburnya. Angka ini jika dibandingkan dengan standar indikator dinamis keseimbangan penduduk yaitu 2,1 (yang merupakan angka target) sampai 2,8 (atau angka nasional), maka TFR Kabupaten Mamuju Tengah telah berada di rentang cukup/sedang. Data total Fertility Rate dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 117 Total Fertility Rate di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Fertility Rate	2,67	2,69	2,70	2,68	2,59

Sumber: DinasP3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2024

b. Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi

Unmetneed merupakan jumlah pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi (tidak KB) yang terdiri dari pasangan usia subur Ingin Anak Tunda (IAT) dan Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL).

Berdasarkan data dibawah menunjukan bahwa persentase PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terlayani telah menurun setiap tahunnya. Angka tertinggi terdapat di tahun 2022 sebesar 21,4 persen Pasangan Usia Subur yang tidak terlayani. Angka ini meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan capaian tahun lalu sebesar 8,2 persen. Sementara itu di tahun 2023 persentase PUS yang tidak terlayani sudah menunjukan progres yang baik dengan adanya penurunan yang cukup signifikan menjadi 10,75 persen.

Tabel 2. 118 Persentase Pasangan Usia Subur yang ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PUS ingin ber-KB tidak terlayani	1.764	1.640	3.769	2.343	2.345
Jumlah PUS	19.302	19.715	17.617	21.805	22.997
Persentase	9,1	8,2	21,4	10,75	10,19

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

c. Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang

Alat Kontrasepsi Jangka Panjang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang yang meliputi IUD (intras uterine device), implant (susuk KB) dan kontap (kontrasepsi mantap). Rumus perhitungan penggunaan kontrasepsi jangka panjang adalah jumlah akaseptor KB yang menggunakan MKJP dibagi jumlah akaseptor KB. Data statistik keluarga berencana menunjukan bahwa pengunaan kontrasepsi jangka panjang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Walapun sempat menurun di tahun 2022 sebesar 16,7 persen akan tetapi di akhir tahun 2023 persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang mencapai 26,01 persen meningkat 9,31 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 2. 119Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase	19	24	16,7	26,01	64,25

Sumber: DinasP3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

d. Cakupan Anggota Bina Keluarga yang Ber-KB

Tri Bina merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh BKKN dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keluarga yang mengedepankan

peran serta kepedulian anggota keluarga guna mencapai kesejahteraan dalam keluarga.

Tri Bina memiliki tujuan khusus untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan orangtua maupun anggota keluarga lainnya dalam membina balita, remaja maupun lansis. Untuk balita berhubungan dengan pola asuh balita, perkembangan fisik, pemberian gizi seimbang balita, tumbuh kembang balita, kemampuan motorik dll. Sementara itu untuk remaja mengenai cara efektif berinteraksi dengan remaja, bimbingan kepada anak remaja, dan lain-lain.s Selain itu Tri Bina juga mengedepankan kesejahteraan lansia agar tetap memiliki produktifitas yang baik di lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut maka Tri Bina dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya adalah BKB (Bina Keluarga Balita), (Bina Keluarga Sejahtera), dan BKL (Bina Kelaurga Lansia).

Tabel 2. 120Cakupan Anggota Bina Keluarga yang Ber-KB di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Anggota Kelompok BKB	841	846	1.450	1.156	2.390
Jumlah Anggota Kelompok BKR	369	374	725	765	3.885
Jumlah Anggota Kelompok BKL	472	477	420	152	2.508

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data statistik diatas menunjukan adanya peningkatan pada cakupan bina keluarga setiap tahunnya. Sampai pada tahun 2023 jumlah anggota kelompok Bina Keluarga Balita sebesar 1.156 anggota, Bina Keluarga Remaja sebesar 765 anggota, dan Bina Keluarga Lansia sebesar 152 anggota.

e. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahterah (PPKS) di Setiap Kecamatan

Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) adalah wadah kegiatan terpadu yang berbasis institusi yang dibangun dan dikembangkan oleh keluarga Indonesia dengan kegiatan pelayanan keluarga melalui pemberian KIE, penyediaan data, konsultasi dan konseling, pembinaan serta rujukan. PPKS in juga digunakan sebagai wadah pusat pelayanan informasi dan konseling untuk penyiapan berkeluarga bagi remaja, konseling jaminan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi (KB-KR), pertumbuhan dan perkembangan anak, konseling peningkatan ketahanan keluarga, ketahanan ekonomi, kesejahteraan keluarga serta informasi kependudukan dan KB.

Tabel 2. 121 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahterah di Setiap Kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024

Jumlah PPKS	1	1	1	5	
Jumlah Kecamatan	5	5	5	5	
Persentase	20	20	20	100	

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa dari tahun 2019-2022 jumlah PPKS yang dibentuk baru 20% yang artinya baru satu kecamatan yakni kecamatan tobadak yang dibentuk PPKS. Namun di akhir tahun 2023 jumlah PPKS yang dibentuk telah mencapai 100 persen, yang artinya PPKS sudah dibentuk disemua kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

f. Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja

Badan Pusat Statistik (BPS) mengestimasikan, ada 64,16 juta pemuda di Indonesia pada 2023. Jumlah itu setara dengan 23,18% dari total penduduk di tanah air sepanjang tahun lalu. Disamping jumlah banyaknya tercatat angka kelahiran di usia remaja yang masih tinggi. Permasalahan lain yang cukup memprihatinkan pada remaja adalah pernikahan dini, perilaku seks pranikah dan penyalahgunaan Napza. Sekitar 2,52% pemuda di Indonesia melakukan perkawinan dibawah umur 16 tahun. Dari 100 pemuda perempuan sekitar 6 diantaranya pernah melahirkan ketika umurnya belum mencapai 20 tahun.

Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut, BKKBN menyediakan PIK R/M atau Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa. Program ini merupakan program Genre yang dikembangkan dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahanan tentang pendewasaan usia perkawinan sehingga mereka mampu melangsungkan jenjang pendidikan secara terencana, berkarir dalam pekerjaan secara terencana serta menikah dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Tabel 2. 122 Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PIK R/M	22	22	21	31	
Jumlah Kecamatan	5	5	5	5	
Persentase	4,4	4,4	4,2	6,2	

Sumber: Dinas P3A Dan P2KB Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana cakupan remaja PIK R/M meningkat dari tahun 2019 sebesar 4,2 menjadi 4,4 di tahun 2020 dan tetap stagnan di tahun 2021 kemudia kembali menurun menjadi 4,2 persen di akhir tahun 2022. Diakhir tahun 2023 jumlah PIK R/M kembali meningkat menjadi 6,2 persen atau meningkat sebesar 2,0 persen dari tahun sebelumnya. Total PIK R/M yang dibentuk sebanyak

31 unit yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Pusat informasi dan konseling remaja yang tersebar di seluruh kecamatan ini diharapkan bisa menjadi wadah bagi remaja untuk berkumpul, bercerita, berkreatifitas dan saling berbagi informasi.

13) Perhubungan

a. Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 20009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Angka kecelakaan lalu lintas adalah jumlah/banyaknya kejadian kecelakaan. Indikator untuk mengukur kualitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dapat dilihat dari banyaknya kejadian kecelakaan lalu lintas. Cara mengukur persentase penurunan angka kecelakaan didapatkan dari jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun (n) dibagi jumlah kecelakaan lalu lintas tahun sebelumnya (n-1) dikali 100.

Tabel 2. 123 Persentase Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas	50	38	94	112	116
Persentase Penurunan	52,38	24	147,36	19,1	19,4

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data angka kecelakaan lalu lintas dalam lima tahun terakhir menunjukan angka tertinggi kecelakaan terdapat di tahun 2024 di mana jumlah kecelakaan lalu lintas yang tercatatkan sebanyak 116 kasus. Angka ini meningkat sebesar 0,3 persen jika dibandingkan dengan data tahun sebelumnya di mana jumlah kecelakaan yang tercatatkan sebanyak 112 kasus. Berbagai faktor utama yang menyebabkan angka kecelakaan meningkat diantaranya: kelalaian manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan yang tidak memadai, serta faktor lingkungan dan cuaca. Kondisi cuaca buruk, seperti hujan deras, kabut tebal, atau jalan yang licin akibat hujan dapat mengurangi visibilitas pengemudi dan mengganggu kinerja kendaraan.

b. Persentase Ruas Jalan yang Didukung Jalan Memadai

Ruas jalan adalah bagian atau penggal jalan di antara dua simpul/ persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas atau pun tidak. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keamanan, keselamatan, ketertiban dan

kelancaran lalu lintas serta kemudahan pengguna jalan dalam berlalu lintas meliputi Rambu lalu Lintas, Marka Jalan, APILL, Alat Penerangan Jalan, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Alat Pengawasan dan Pengaman Jalan, Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
Dalam rangka mewujudkan keselamatan lalu lintas maka jalan wajib di lengkapi dengan perlengkapan jalan yang memadai. Adapun jenis perlengkapan jalan dimaksud dapat berupa rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, delineator, cermin tikungan, dan lain sebagainya sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tabel 2. 124 Persentase Ruas Jalan yang Didukung Jalan Memadai di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Ruas yang Dilengkapi Perlengkapan Memadai	3	3	4	5	5
Jumlah Ruas Jalan	74	74	74	93	93
Persentase	4,1	4,1	5,4	5,4	5,4

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa persentase ruas jalan yan didukung perlengkapan sampai pada tahun 2024 mencapai 5,4 persen yang artinya dari total 93 jumlah ruas jalan baru 5 jumlah ruas jalan yang dilengkapi perlengkapan memadai.

c. Potensi Titik Parkir Tertangani

Definisi parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya sebagaimana diatur dalam UU nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Perparkiran diselenggarakan guna mewujudkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas dalam upaya mewujudkan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu pengelolaan parkir yang baik menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang baik, di samping sebagai salah satu sumber PAD.
Ruang lingkup lokasi parkir tertangani dalam hal ini adalah Parkir Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir yang di kelola retribusinya oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah. Tempat parkir di tepi Jalan umum adalah lokasi tempat parkir di tepi jalan umum di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan yaitu di tepi jalan yang tidak ada rambu larangan parkir sedangkan tempat khusus parkir adalah tempat parkir kendaraan beserta

fasilitas penunjangnya yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau orang pribadi/badan yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir.

Tabel 2. 125 Potensi Titik Parkir Tertangani di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Titik Parkir Tertangani	10	13	20	23	23
Jumlah Potensi Titik Parkir	14	14	31	60	60
Persentase	71,4	93	64	38	38

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah menunjukan data potensi parkir diakhir tahun 2021 sudah mencapai 93 persen, yang artinya dari 14 potensi parkir sebanyak 13 titik pakir yang telah dimanfaatkan. Akan tetapi melihat data capaian dua tahun terkahir menunjukan adanya penurunan yang cukup signifikan pada pengelolaan parkir yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2023 persentase potensi titik parkir yang tertangani sebesar 38 persen sama dengan tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya potensi titik parkir sebanyak 60 titik akan tetapi yang baru tertangani baru 23 titik parkir.

d. Layanan Angkutan Darat

Pada tahun 2023 berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kabupaten Mamuju Tengah persentase layanan angkutan darat meningkat menjadi 84 persen% dimana jumlah angkutan darat yang tercatatkan sebanyak 18.123 dengan jumlah penumpang sebanyak 21.402 orang. Namun menurun drastis pada tahun 2024 yang hanya mencapai 10,2 persen.

Tabel 2. 126 Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angkutan darat	1.534	3.115	4.099	18.123	2.145
Jumah penumpang angkutan darat	10.975	15.262	20.598	21.402	20.852
Persentase	14	20	20	84	10,2

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Mamuju Tengah, 2025

14) Komunikasi dan Informatika

a. Indeks Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE. Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, meliputi tiga domain yaitu Kebijakan Internal SPBE, Tata Kelola SPBE, dan Layanan SPBE. Indeks SPBE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Permenpan RB Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada evaluasi SPBE menggunakan metode tingkat kematangan (maturity level) untuk menilai: 1) Domain Kebijakan Internal SPBE; 2) Domain Tata Kelola SPBE; 3) Domain Layanan SPBE. Nilai indeks memuaskan (4,2 sampai dengan 5), sangat baik (3,5 sampai dengan < 4,2), baik (2,6 sampai dengan < 3,5), cukup (1,8 sampai dengan < 2,6) dan kurang (< 1,8).

Tabel 2. 127 Indeks Sistem Informasi Berbasis Elektronik di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	0	0	1,83	2,19	2,28
Domain Kebijakan SPBE	0	0	2,90	2,90	2,90
Domain Tata Kelola	0	0	1,2	1,1	1,2
Domain Layanan SPBE	0	0	2,17	2,93	3,06
Domain Manajemen SPBE	0	0	1,00	1,27	1,27

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2018, evaluasi SPBE pertama kali dilakukan sejalan dengan upaya sistematis pelaksanaan SPBE berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 95/2018. Namun Kabupaten Mamuju Tengah baru memulai melakukan evaluasi SPBE tahun 2022 dimana capaiannya sebesar 1,83 dari skala 5 dan dikategorikan cukup. Pada tahun 2024 capaian Indeks SPBE kembali meningkat dengan nilai 2,28 dan masih dikategorikan cukup.

b. Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengeola Informasi dan Dokumentasi. Fungsi dari PPID adalah sebagai pengelola dan

penyimpanan dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi dengan melibatkan semua perangkat daerah. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 PPID tidak difungsikan karena keterbatasan anggaran akibat adanya refocusing dana untuk penanganan pandemic Covid-19. Namun di tahun 2022 PPID kembali diaktifkan dengan dikeluarkannya SK Bupati Mamuju Tengah tentang susunan keanggotaan PPID Mamuju Tengah. Namun persentase PPID yang aktif menurun menjadi 60 persen.

Tabel 2. 128 Persentase PPID Yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase PPID yang Aktif	0	0	100	100	60

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

c. Ketersediaan Jaringan Internet

Di Kabupaten Mamuju Tengah capaian persentase ketersediaan jaringan internet desa terus mengalami peningkatan sejak tahun 2019. Pada tahun 2024 capaian ketersediaan internet sudah mencapai angka 93 persen yang artinya 50 desa dari total 54 desa telah terfasilitasi jaringan internet. Peningkatan ini disebabkan adanya dukungan dari program BAKTI Kominfo dan Bantuan MARASA dari Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2. 129 Ketersediaan Jaringan Internet di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Pengguna Internet	19	23	23	23	50
Jumlah Desa	54	54	54	54	54
Persentase	35	44	44	44	93

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

15) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Koperasi yang Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi sehat adalah koperasi yang segala bentuk kegiatan dan aktivitasnya sehat secara organisasi, usaha, dan mental. Sedangkan yang dimaksud Koperasi Aktif adalah koperasi yang anggota berperan aktif untuk menyejahterakan ekonomi dan sosialnya serta pengurus melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban terhadap anggota secara berkala dan tahunan.

Tabel 2. 130 Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pangale	1	1	1	1	1
Budong-Budong	6	9	13	13	13
Tobadak	6	9	9	9	9
Topoyo	31	33	33	34	34
Karossa	6	19	21	22	22
Total	50	71	77	79	79

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah koperasi yang aktif dari 77 koperasi di tahun 2022 menjadi 79 koperasi di tahun 2023 atau bertambah sekitar 2 unit koperasi. Jika melihat data diatas persebaran koperasi paling banyak terdapat di Kecamatan Topoyo sebesar 34 unit dan yang terkecil berada di Kecamatan Pangale sebesar 1 unit koperasi.

b. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Aktif

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yaitu kriteria aset maksimal Rp. 50.000.000,- dan kriteria omzet maksimal Rp. 300.000.000,-. Usaha mikro yang berkembang adalah usaha mikro perorangan dan/atau badan usaha yang produktif dengan hasil produksinya yang berinovasi dan kreatif sehingga bisa meningkatkan nilai omzet usahanya. Rumus perhitungan persentase UMKM yang aktif adalah jumlah usaha mikro aktif dibagi jumlah UMKM.

Dari tabel di bawah ini dapat menunjukan bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan pada jumlah UMKM yang aktif diiringi dengan adanya peningkatan pada jumlah UMKM. Sampai pada tahun 2023 persentase capaian UMKM aktif berhasil mencapai angka 100 persen dari total 4.123 jumlah keseluruhan UMKM yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Diharapkan tahun berikutnya persentase UMKM aktif bisa mencapai 100 persen karena UMKM merupakan salah satu roda penggerak dalam peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan lapangan kerja dan sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut.

Tabel 2. 131 Jumlah UMKM Aktifdi Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah UMKM Aktif	820	1.100	1.200	4123	
Jumlah UMKM	1.000	1.203	1.248	4123	
Persentase	82	90	96	100	

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan.Mamuju Tengah, 2025

16) Penanaman Modal

a. Laju Investasi

Investasi atau penanaman modal adalah adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Investasi Daerah adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri aupun asing di suatu wilayah daerah spesifik. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja.

Tabel 2. 132 Laju Investas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Investasi	700.453. 385. 572	1.785.39 2. 396. 556	631.605. 879.206	588.443. 667.356	623.33 6.891.4 67
Persentase Laju Investasi	-31,78	154,89	-64,62	-6,83	5,93

Sumber: Dinas Penanaman Modal Kab.Mamuju Tengah, 2025

Laju investasi adalah pertumbuhan investasi atau penanaman modal di suatu daerah dilihat dari realisasi nilai investasi yang dicapai. Rumus untuk memperoleh angka laju investasi adalah Nilai investasi dikurangi nilai investasi tahun sebelumnya dibagi nilai investasi tahun sebelumnya kali 100%. Pada tahun 2022 nilai investasi di Kabupate Mamuju Tengah mengalami penurunan dari total Rp.1.785.392.396.556 di tahun 2021 menjadi Rp.631.605.879.206 di tahun 2022 sehingga persentase laju pertumbuhan investasi daerah pada tahun 2022 sebesar minus 64.62 persen. Pada tahun 2023 laju pertumbuhan investasi kembali menurun sebesar 6,83 persen dimana total investasi sebesar Rp. 588.433.667.356. selanjutnya pada Tahun 2024 laju pertumbuhan investasi meningkat sebesar 5,93 persen dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 623.336.891.467. Faktor utama penyebab penurunan nilai investasi di tahun-tahun sebelumnya adalah belum optimalnya pelaksanaan

kewajiban oleh pelaku usaha dalam menyampaikan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) serta sejak tahun 2022 terjadi perubahan cara hitung total laporan realisasi ini berdasarkan petunjuk dari Dinas Penanaman Modal Provinsi dimana yg menjadi hitungan adalah jumlah periode pelaporan dan bukan lagi total yg dihitung.

17) Persandian

Informasi yang Terintegrasi

Paradigma persandian telah berubah, tidak hanya kirim berita namun lebih strategis yakni dalam ketersediaan, kerahasiaan, keutuhan data pada era keterbukaan informasi saat ini, yaitu melalui tata kelola keamanan informasi. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, otentiksasi, nirsangkal, dan otorisasi terhadap sebuah informasi. Keamanan informasi mencakup keamanan fisik berupa keamanan infrastruktur dan keamanan logis berupa keamanan dalam bentuk digital. Saat ini penyelenggaraan persandian adalah untuk keamanan informasi dengan didukung sumber daya manusia (SDM) yang telah dilatih yaitu sandiman. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Tingkat kesiapan penilaian/pengelolaan resiko keamanan informasi adalah persentase sistem elektronik yang telah dilakukan pengujian kerentanan dan penilaian resiko dibagi jumlah sistem elektronik yang ada dikali seratus persen. Hal ini dilakukan dalam rangka pengembangan layanan keamanan informasi bagi perangkat daerah sehingga dapat terwujud layanan keamanan informasi yang berkualitas dan berkinerja tinggi kepada pengguna.

Tabel 2. 133 Persentase Informasi yang Terintegrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah SI Terintegrasi	0	0	0	0	0
Jumlah SI	0	0	0	0	0
Persentase	0	0	0	0	0

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

18) Statistik

a. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Statistik sektoral sendiri adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas

pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Tabel 2. 134 Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai EPSS	-	-	1,00	1,05	2,52

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Evaluasi penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Mamuju Tengah baru dimulai pada tahun 2023 untuk penilaian statitisk sektoral tahun 2022. Dimana capaiannya nilai EPSS sebesar 1 poin dan masuk dalam kategori kurang. Angka ini masih sangat rendah jika melihat range 1-5 penilaian EPSS. Nilai EPSS ini diharapkan dapat meningkat sebagaimana ditarget 1,52 poin pada tahun 2024.

b. Metadata Statistik

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan statistik harus disertai dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan penyelenggaraan statistik. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk metadata. Dalam pengelolaanya, BPS membagi metadata menjadi metadata kegiatan, metadata variabel, dan metadata indikator. Guna memudahkan pemahaman dan pengisian formulir-formulir tersebut, BPS menyusun pedoman metadata statistik yang membuat mekanisme penghimpunan metadata dan tata cara pengisian Formulir Metadata Statistik.

Tabel 2. 135 Jumlah Metada Statisk yang dibuat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Metada Statistik	0	0	0	0	33

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

BPS Kabupaten Mamuju Tengah baru resmi dibentuk pada akhir tahun 2023 dan mulai aktif pada bulan januari 2024. Selama ini BPS Mamuju Tengah masih berada dibawah naungan BPS Kabupaten Mamuju sehingga koordinasi terkait pengelolaan statistik belum berjalan dengan baik. Baru pada awal 2023 BPS melakukan sosialisasi terkait dengan pengisian metadata statistik dan pengumpulannya baru terealisasi pada

tahun 2024 dimana jumlah metadata statistk yang terkumpulkan dan telah divalidasi oleh BPS sebanyak 33 metadata.

c. Buku Statistik Sektoral yang Diterbitkan

Buku Data Statistik Sektoral merupakan kumpulan dari data-data sektoral Perangkat Daerah dengan periode cutoff datanya per 31 Desember. Buku ini sudah disusun berdasarkan Perangkat Daerah untuk mempermudah bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan data statistik sektoral. Namun pada tahun 2024 buku statistik sektoral tidak diterbitkan.

Tabel 2. 136 Jumlah Buku Statistik Sektoral yang Diterbitkan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Buku Statistik	1	1	1	1	0

Sumber: Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kab.Mamuju Tengah, 2025

19) Perpustakaan

a. Ketersediaan Perpustakaan Daerah

Pengunjung perpustakaan merupakan masyarakat yang datang ke perpustakaan. Peminjam perpustakaan adalah masyarakat yang memanfaatkan fasilitas perpustakaan untuk meminjam buku.

Jumlah perpusatakaan yang ada di Mamuju Tengah tercatatkan sampai pada tahun 2024 sebanyak 204 perpustakaan, yang terdiri dari 1 perpustakaan milik daerah dan sisanya adalah perpusatakaan yang terdapat di sekolah, desa, dan sebagainya.

Tabel 2. 137 Jumlah Perpustakaan Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Perpustakaan Daerah	204	204	204	204	204

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, 2025

b. Kunjungan Perpustakaan

Pengunjung perpustakaan adalah masyarakat yang datang/berkunjung ke perpustakaan. Jenis layanan yang tersedia di perpustakaan yaitu sirkulasi (peminjaman/pengembalian buku), baca di tempat, perpustakaan keliling, gelar buku baca santai, story telling, internet, pembuatan kartu anggota, kunjungan berkelompok,serta layanan kearsipan.

Tabel 2. 138 Jumlah Kunjungan Perpustakaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Daerah	261	580	795	510	824

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data jumlah kunjungan perpusatakaan selama tahun 2020 sampai tahun 2022 cenderung meningkat. namun pada tahun 2023 menurun menjadi hanya 510 kunjungan. Jumlah kunjungan pada tahun 2020 hanya sekitar 261 pengunjung diakibatkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan keterbatasan mobilisasi masyarakat. Pada Tahun 2024 kunjungan perpustakaan kembali meningkat sebesar 61,57 persen yang menunjukkan meningkatnya minat baca masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. Namun hal ini tentu saja masih terbilang sedikit jika dibandingkan dengan jumlah siswa maupun masyarakat pada umumnya di Kabupaten Mamuju Tengah.

c. Buku Perpustakaan

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang dewasa ini berkembang dengan pesat, perpustakaan memiliki posisi strategis dalam menyediakan informasi sebagai media pembelajaran dan sumber pengetahuan dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan bagsa. Perpustakaan dituntut harus mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam bentuk koleksi yang terdiri dari koleksi umum, koleksi rujukan, koleksi serial, koleksi khusus, koleksi multi media, dan koleksi elektronik.

Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang memiliki nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.

Tabel 2. 139 Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Koleksi Buku	1.535	1.535	6.134	7.734	8.426

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2022 jumlah koleksi buku yang ada di perpustakaan meningkat cukup drastis dari tahun sebelumnya yaitu 1.535 unit pada tahun 2021 menjadi 6.134 unit. Kemudian pada tahun 2024 koleksi buku kembali meningkat sebesar 37,36 persen dari Tahun 2022 dengan total yang ada sebesar 8.426 buku. Buku ini dihitung dari jumlah buku yang tersedia di seluruh perpustakaan baik yang ada di daerah,sekolah dan desa.

20) Kearsipan

Pengelolaan Arsip Secara Baku

Berdasarkan data pada tahun 2023 jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku sudah mencapai 100 persen. Hal ini sebagaimana tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kemudian diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis. Serta Peraturan ANRI No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

Aplikasi srikandi merupakan sebuah inovasi yang sangat memudahkan dalam pengelolaan dan peningkatan kualitas kearsipan di suatu instansi. Beberapa manfaat yang diperoleh diantaranya, pengurangan dalam penggunaan kertas dan adanya efesiensi waktu yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan tanda tangan manual. Apalagi jika pimpinan sedang berada di luar kantor hal ini sangat menghambat penyelesaian administrasi persuratan. Hal yang terpenting adalah aplikasi srikandi ini tersedia online sehingga terintegrasi dan terekam sampai pada pusat data nasional.

Pada Tahun 2024 diketahui bahwa jumlah Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku mencapai 100 persen atau seluruh Perangkat Daerah yang berjumlah 33.

Tabel 2. 140 Pengelolaan Arsip Secara Baku di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PD yang mengelola arsip baku	0	0	0	100	100
Jumlah PD	33	33	33	33	33
Persentase	0	0	0	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Mamuju Tengah, 2025

21) Kebudayaan

a. Cagar Budaya yang Dilestarikan

Cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Tabel 2. 141 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan	2	2	2	3	3
Jumlah Cagar Budaya	61	61	61	61	61
Persentase	3,28	3,28	3,28	4,92	4,92

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencatatkan ada 61 jumlah cagar budaya yang terdaftar di Kabupaten Mamuju Tengah. Cagar Budaya yang dilestarikan meningkat sebesar 4,92 persen atau sebanyak 3 unit Cagar Budaya telah dilestarikan dari total Cagar Budaya yang ada.

b. Kelompok Kesenian yang Aktif

Kelompok Seni Budaya merupakan suatu segala sesuatu yang diciptakan manusia tetang cara hidup berkembang secara bersama pada suatu kelompok yang memiliki unsur keindahan. Kelompok Seni Budaya yang aktif adalah Kelompok Seni Budaya yang ikut secara konsisten melestarikan, mengembangkan seni budaya baik mentradisi maupun melalui berbagai macam event dengan jenis/ kebutuhannya yang terdiri dari organisasi kesenian/sanggar kesenian/kelompok pengahyat kepercayaan.

Tabel 2. 142 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Seni yang aktif	6	7	9	15	15
Jumlah Kelompok Seni	14	14	14	26	26
Persentase	42,85	50	64,29	57,69	57,69

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Mamuju Tengah, 2024

Persentase kelompok seni yang aktif menunjukan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019 sampai tahun 2022 tercatatkan ada 14 kelompok seni dengan persentase kelompok seni yang aktif sebesar 64,29 persen. Sementara itu pada tahun 2023 dan 2024 jumlah kelompok seni bertambah menjadi 26 kelompok dengan persentase kelompok seni yang aktif sebesar 57,69 persen.

22) Kepemudaan dan Olahraga

a. Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Definisi organisasi kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Batasan organisasi kepemudaan yang aktif adalah: 1) Ada kepengurusan; 2) Ada program kerja; 3) Ada kegiatan; 4) Ada

pertanggungjawaban. Persentase organisasi pemuda yang aktif didapat dari jumlah organisasi pemuda yang aktif dibagi jumlah organisasi pemuda dikali 100%.

Jika melihat capaian data pada tabel dibawah sejak lima tahun terakhir rata-rata capaian organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 5,23 persen. Pada tahun 2023 persentase capaian kepemudaan yang aktif sebesar 4,5 persen dimana dari 1.800 jumlah organisasi pemuda yang tercatatkan hanya 80 unit organisasi yang aktif.

Tabel 2. 143 Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif di Kabupaten MamujuTengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Organisasi Pemuda Aktif	77	77	77	80	90
Jumlah Organisasi Pemuda	1.440	1.786	1.791	1.800	1.900
Persentase	5,34	4,31	4,29	4,5	4,73

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

b. Persentase Pelatih Olahraga yang Bersertifikat

Definisi pelatih olah raga adalah seseorang yang bertugas untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan, mengatur taktik, strategi, pelatihan fisik dan menyediakan dukungan moral kepada atlet. Pelatih bersertifikat adalah pelatih olahraga yang mempunyai sertifikat keahlian dibidang olahraga yang dikeluarkan baik oleh pengurus Kabupaten, pengurus provinsi maupun pengurus besar (ditambah syarat syarat untuk bersertifikat). Rumus penghitungan persentase pelatih olahraga bersertifikat adalah jumlah pelatih olahraga bersertifikat dibagi jumlah pelatih olahraga dikali 100%.

Tabel 2. 144 Persentase Pelatih Olahraga yang Bersertifikat di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pelatih Bersertifikat	2	2	2	35	40
Jumlah Pelatih Olahraga	16	16	16	50	60
Persentase	12,5	12,5	12,5	30,5	66,67

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Capaian Pelatih olahraga yang bersertifikat mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan bertambahnya jumlah pelatih olahraga.

Pada tahun 2023 pelatih olahraga meningkat sebanyak 34 orang dimana persentase pelatih olahraga yang bersertifikat sebesar 30,5 persen meningkat sebesar 18,5 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

c. Prestasi Cabang Olahraga

Definisi prestasi olah raga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Prestasi olah raga adalah cabang olah raga berprestasi yang minimal mendapat juara 3 di tingkat provinsi. Persentase prestasi olah raga didapat dari jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat provinsi dibagi jumlah cabang olahraga dikali 100%.

Dari data capaian prestasi cabang olahraga dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 persentase capaian prestasi olahraga sebesar 76,19 persen yang artinya sebanyak 16 cabang olahraga dimenangkan dari dari total 21 cabang olahraga yang diikuti.

Tabel 2. 145 Prestasi Cabang Olahraga di Kabupaten Mamuju Tengah, 2019-2023

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Cabor Berprestasi	16	16	16	16	20
Jumlah Cabor	19	19	21	21	21
Persentase	84,21	84,21	76.19	76,19	95,21

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

d. Atlet Berprestasi

Definisi prestasi olah raga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga. Atlet berprestasi adalah atlet yang mempunyai prestasi di tingkat provinsi minimal juara 3 pada setiap nomor kejuaraan minimal di tingkat provinsi. Definisi persentase atlet berprestasi adalah Jumlah atlet yang meraih kejuaraan minimal ditingkat Provinsi. Batasan kejuaraan minimal tingkat provinsi minimal juara III Tingkat Provinsi. Persentase atlet berprestasi didapat dari rumus jumlah atlet yang memperoleh medali minimal juara 3 di tingkat provinsi dibagi jumlah nomor pertandingan dikali 100 persen.

Tabel 2. 146 Prestasi Atlet Berprestasi di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Atlet Berprestasi	0	8	8	15	20
Jumlah Nomor yang Dipertandingkan	0	10	12	15	15
Persentase	0	80	66,7	100	133,33

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Data capaian atlet berprestasi cenderung berfluktuatif setiap tahunnya. Persentase capaian atlet berprestasi tertinggi didapatkan pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 75 persen, yang di mana dari 20 cabang olahraga yang diikutkan terdapat 15 atlet yang berhasil memenangkan pertandingan. Sedangkan tahun 2020 karena merebaknya pandemic Covid-19 sehingga tidak ada kejuaraan olahraga yang dipertandingkan. Diakhir tahun 2023 dari total 15 cabang olahraga yang diikuti, sebanyak 15 atlet berhasil memenangkan pertandingan sehingga pencapaian persentase atlet yang berprestasi sebesar 100 persen

III. LAYANAN URUSAN PILIHAN

1) Pariwisata

a. Kunjungan Wisatawan

Dalam kurun waktu 5 tahun jumlah kunjungan wisatawan pada semua objek wisata di Kabupaten Mamuju Tengah cenderung meningkat setiap tahunnya. Namun demikian, dengan adanya pandemic Covid-19 dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat sehingga berdampak signifikan pada penurunan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2020 turun menjadi 17,608 atau menurun sebesar 60,88 persen. Namun angka ini terus meningkat pada tahun berikutnya. Pada tahun 2023 jumlah kedatangan wisatawan domestik yang tercatatka sebesar 49.853 wisatawan atau meningkat sekitar 5,78 persen dari tahun sebelumnya. Data jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 147 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kunjungan Wisatawan	17.608	44.906	47.125	49.853	57,581

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

b. Objek Wisata Unggulan

Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebuah daerah yang kaya akan keindahan alam dan budaya yang khas. Terletak di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten ini memadukan keanekaragaman alam dengan warisan budaya yang kaya, menciptakan destinasi yang menarik bagi wisatawan serta lingkungan yang inspiratif bagi warganya sendiri. Kabupaten Mamuju Tengah dilalui oleh beberapa daerah aliran sungai yang indah dan hutan hujan tropis yang melimpah. Keindahan alam ini memberikan kesempatan bagi para petualang untuk menjelajahi trekking dan kegiatan alam lainnya.

Tabel 2. 148 Jumlah Objek Wisata Unggulandi Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 -2024

Keterangan	Tahun

	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Objek Wisata Unggulan	4	4	5	5	5

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Sampai tahun 2023 tercatatkan ada lima destinasi wisata unggulan Kabupaten Mamuju Tengah yaitu, Pantai Batu Rede, Pantai & Mangrove Waitumbur, Rea Camp Tabolang, Pulau Kambunong, dan Air Terjun Kalando.

c. Rata-rata Lama Tinggal

Rata-Rata lama tinggal adalah rata-rata lamanya tamu menginap di hotel atau perbandingan antara banyaknya tamu di bagi malam tempat tidur dengan banyaknya malam kamar huni. Untuk memperoleh angka lama tinggal wisatawan dapat dihitung dengan jumlah lama menginap tamu di hotel yang ada di bagi jumlah hotel yang ada.

Tabel 2. 149 Rata-Rata Lama Tinggal di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Hotel/Penginapan	18	18	19	26	
Rata-Rata Lama Tinggal	1	1	1	1	1

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Sebagai salah satu unsur penunjang pariwisata, Hotel/Usaha penyediaan akomodasi merupakan hal yang wajib untuk disediakan. Pada tahun 2023, jumlah Hotel/Penginapan di Mamuju Tengah yang terdaftar pada Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju Tengah ada sebanyak 26 unit meningkat dari tahun 2022 yang hanya berjumlah 19 unit. Sementara itu untuk rata-rata lama tinggal yaitu satu hari.

d. Desa Wisata

Desa Wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri dari para penduduk suatu wilayah terbatas yang bisa saling berinteraksi secara langsung di bawah sebuah pengelolaan dan memiliki kepedulian serta kesadaran untuk berperan bersama sesuai keterampilan dan kemampuan masing-masing memberdayakan potensi yang ada di desa. Seperti pernah diamanatkan oleh Permen Budpar No.PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang pedoman umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata melalui desa wisata.

Di Kabupaten Mamuju Tengah terdapat enam desa wisata yaitu Desa Tobadak, Desa Topoyo, Desa Karossa, Desa Salupakang, Desa Tasokko, Desa Kambunong

Tabel 2. 150 Desa Wisata di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Desa Wisata	6	6	6	6	6
Jumlah Desa	54	54	54	54	54
Persentase	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11

Sumber: DISPAPORA Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pertanian

Produksi pertanian adalah kunci dari keberlanjutan sistem pangan dalam masyarakat. Tanpa produksi pertanian yang cukup, kebutuhan pangan dan bahan baku industri akan sulit terpenuhi. Dalam dunia pertanian, produksi pertanian memiliki peran yang sangat penting. Produksi pertanian merupakan kegiatan yang melibatkan proses pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam untuk menghasilkan produk pertanian. Produk pertanian ini mencakup berbagai macam komoditas, seperti tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, ternak, dan hasil olahan lainnya.

Produksi Komoditas Tanaman Pangan

Tanaman pangan adalah tanaman dengan kandungan karbohidrat tinggi, sehingga bisa dijadikan sebagai makanan pokok. Komoditas tanaman pangan terbagi menjadi empat jenis yaitu: serealia, kacang-kacangan, umbi umbian, dan jenis tanaman lainnya seperti sagu dan sukun.

Tabel 2. 151 Luas Panen, Produksi dan Produktifitas Pertanian di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Padi					
Luas Panen	5.907,00	5.010,00	4.909,00	3.818,0	3.249,00
Produksi	30.849,32	23.753,20	23.726,50	18.710,0	15.823,80
Produktifitas	52,23	47,41	48,30	49,0	48,70
Jagung					
Luas Panen	11.061,00	5.066,00	3.162,00	3.054,9	3.026,00
Produksi	55.926,60	25.057,30	15.933,60	14.655,8	14.399,80
Produktifitas	50,56	49,46	50,39	48,0	47,59
Ubi Kayu					
Luas Panen	56,00	55,00	49,20	22,2	34,00
Produksi	1.428,50	1.411,00	1.274,10	574,1	837,50
Produktifitas	255,09	256,55	258,96	258,6	246,32
Ubi Jalar					
Luas Panen	27,00	26,00	27,80	14,6	19,00
Produksi	383,16	396,90	359,00	147,7	164,16
Produktifitas	141,91	152,65	129,14	101,2	86,40
Kacang Tanah					
Luas Panen	15,00	18,00	21,95	19,5	9,80

Produksi	16,81	20,19	22,39	21,2	7,49
Produktifitas	11,21	11,22	10,20	10,9	7,64

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Komoditas tanaman pangan pokok terdiri dari padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Dalam lima tahun terakhir rata-rata produksi di sejumlah komoditas tanaman pangan mengalami penurunan setiap tahunnya terutama padi dan jagung sebagai bahan pangan utama. Jika melihat data pada tabel diatas, produksi tertinggi jagung dihasilkan pada tahun 2020 yang mampu menghasilkan produksi sebesar 55.926,60 ton dengan produktifitas 50,56 persen, namun sampai pada akhir tahun 2024 produksi padi menurun menjadi 14.399 ton atau sekitar 74,25 persen. Sementara itu untuk produksi padi juga mengalami penurunan yang drastis. Data tahun 2020 menunjukan jumlah produksi padi sebesar 30.849,32 ton dengan produktifitas sebesar 52,23 persen dan pada akhir tahun 2024 jumlah produksi jagung yang dihasilkan sebesar 15.823,80 ton atau menurun sebesar 48,71 persen.

Produksi Komoditas Sayuran

Sayuran merupakan komoditas yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Komoditas ini memiliki keragaman yang luas dan berperan sebagai sumber karbohidrat, protein nabati, vitamin, dan mineral yang bernilai ekonomi tinggi, untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal maka diperlukan pemanfaatan teknologi budidaya dan pemberian unsur hara esensial selain radiasi surya, air dan CO2. Unsur hara esensial adalah nutrisi yang berperan penting sebagai sumber unsur hara tanaman.

Tabel 2. 152 Jumlah Produksi Komoditas Sayuran (Ton) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Daun	27,3	57,8	22,2	26,2	13,4
Petsai/Sawi	62,2	89,1	55,8	59,4	42,3
Kacang Panjang	215,7	270	130	158,4	101,5
Cabe Besar	131,5	207,1	-	-	123,3
Cabe Rawit	204,4	254,7	140,6	171,3	113,2
Tomat	146,8	221,8	101,1	96,1	22,3
Terung	184,5	257,4	123,1	147	125,5
Ketimun	206,6	290,6	143,8	159,1	103,7
Kangkung	134,9	177,3	116,8	127,2	101,7
Bayam	107,7	135,7	69,7	77,3	83
Total Produksi	1.421,6	1.961,5	903,1	1.022	829,9

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Komoditas sayuran dibagi menjadi 10 jenis seperti pada tabel diatas. Jika melihat data yang diperoleh dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menujukan bahwa dalam lima tahun terakhir hasil produksi terbesar sayuran dihasilkan di tahun 2021 dengan total produksi sebesar 1.961,5 ton. Sementara itu di tahun 2022 terjadi penurunan yang drastis pada semua jenis sayuran, dimana total penurunan

produksi dari tahun sebelumnya sebanyak 1.058,4 ton. Diakhir tahun 2024 jumlah produksi sayuran terus menurun dengan total produksi sebesar 829,9 ton. Jika melihat dari jenis sayuran pada Tahun 2024, produksi terbesar dihasilkan oleh terung dengan jumlah produksi sebesar 125,5 ton sedangkan produksi terkecil dihasilkan oleh bawang daun dengan jumlah produksi sebesar 13,4 ton.

Produksi Komoditas Buah-Buahan

Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 13 jenis buah-buahan semusim yaitu Alpukat, Langsat, Durian, Jeruk Siam/keprok, Jeruk Besar, Manggis, Mangga, Nangka, Nenas, Pisang, Pepaya, Rambutan, dan Sawo.

Produksi komoditas buah-buahan rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2024 dengan total produksi sebesar 818.156 Kwintal dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya sebagian besar produksi dari beberapa jenis buah-buahan diantaranya: alpukat, langsat, durian, jeruk siam, manggis, mangga, nangka, nenas, pisang, rambutan, dan sawo. Sementara itu hanya satu jenis buah-buahan yang yaitu jeruk besar dengan produksi sebesar 268 Kwintal yang pada tahun sebelumnya sebelumnya 248 kwintal.

Tabel 2. 153 Jumlah Produksi Komoditas Buah-Buahan (Kwintal) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Alpukat	447	975	909	1.150	563
Langsat	21.390	18.692		17.427	1.585
Durian	45.245	84.683	126.183	183.933	113.974
Jeruk Siam	82.381	96.342	158.804	115.535	57.295
Jeruk Besar	609	547		248	268
Manggis	162	274	74	216	125
Mangga	2.016	11.955	1.274	9.769	4.337
Nangka	21.823	18.790	20.910	13.382	9.859
Nenas*	771	1.261	1.432	904	720
Pisang*	361.897	317.293	964.369	838.276	609.528
Pepaya	1.009	1.345	1.971	1.825	1.067
Rambutan	31.526	28.114	34.635	36.996	18.723
Sawo	562	406	457	164	112
Total Produksi	569.838	580.677	1.311.018	1.219.825	818.156

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Produksi Komoditas Biofarmaka

Tanaman Biofarmaka adalah tanaman yang bermanfaat sebagai obat-obatan dan sebagai bahan pembuatan kosmetik. Bagian yang biasa dimanfaatkan adalah bagian tanaman seprti daun, batang, bunga,buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Melihat dari data statistik dapat diliihat bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 4 jenis produksi tanaman biofarmaka yaitu jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas yang berpotensi untuk dikembangkan.

Tabel 2. 154 Jumlah Produksi Komoditas Biofarmaka (Kg) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jahe	7.255	9.195	12.400	21.108	36.230
Kunyit	4.736	9.184	12.875	22.524	34.369
Lengkuas	1.846	8.616	10.712	18.941	34.454
Kencur	2.017	7.304	7.916	15.857	29.039
Total Produksi	15.854	34.299	43.903	78.430	134.092,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Secara umum produksi biofarmaka dalam kurun waktu lima tahun terkahir mengalami peningkatan di setiap jenis komoditi. Produksi tertinggi dihasilkan pada tahun 2024 dengan total produksi sebesar 134.092 Kg. Angka ini bertambah sebanyak 55.662 Kg atau meningkat sebesar 70,97 persen dari tahun sebelumnya. Hasil produksi terbesar dihasilkan oleh jahe dengan jumlah produksi sebesar 36.230 Kg, kemudian lengkuas dengan jumlah produksi sebesar 34.454 Kg, kunyit dengan jumlah produksi sebesar 34.369 Kg, dan produksi terkecil yaitu Kencur dengan jumlah produksi sebesar 29.039 Kg.

Luas Lahan Sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan. Lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan kecuali untuk kepentingan umum yang meliputi: jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, drainase, sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandara udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, pembangkit dan jaringan listrik, serta kepentingan umum lainnya yang diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2. 155 Luas Lahan Sawah dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha) di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pangale	-	2.293,58	2.293,58	2.038,8	2.038,80
Budong-Budong	-	1.010,97	1.010,97	1.019,1	1.019,10
Tobadak	-	847,45	847,45	712,5	712,5
Karossa	-	209,63	209,63	164,0	164
Topoyo	-	692,98	692,98	486,5	486,5
Total LP2B	-	5.054,61	5.054,61	4.420,9	4.420,90

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Peraturaran terkait LP2B pertama kali di sahkan melalui Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Berkelanjutan, dimana berdasarkan Perbup total luasan lahan LP2B sebesar 5.054,61 ha yang tersebar di seluruh kecamatan dengan luasan terbesar berada di Kecamatan Pangale dengan luas kurang lebih 2.293, 58 ha. Sementara itu pada tahun 2023 berdasarkan pendataan dari Pertanahan Luas LP2B yang ada di Mamuju Tengah sebesar 4.420,9 ha. Jika membandingkan data dari Perbup Nomor 32 Tahun 2021 terdapat selisih luasan lahan yang berkurang sebesar 633,71 ha. Berkurangnya Luas LP2B ini disebabkan karena adanya konversi atau alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan non pertanian.

Alih fungsi lahan pertanian terjadi karena adanya pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk yang terus meningkat sehingga berdampak pada dibutuhkannya lahan untuk menampung kebutuhan masyarakat seperti tempat tinggal atau tempat usaha. Selain itu permasalahan pada kesulitan dalam menyediakan pengairan sawah. Masih ada beberapa ditemukan di mana petani masih mengandalkan tadah air hujan untuk mengaliri sawahnya.

Produksi Komunitas Peternakan

Salah satu sumber pangan lainnya adalah berasal dari sumber pangan hewani. Ternak Ruminansia merupakan ternak yang memiliki sistem pencernaan yang kompleks yang terdiri dari empat perut yaitu r*umen, reticulum, omasum, dan abomasum*. Sedangkan unggas adalah jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan daging, telur dan bulunya. Umumnya merupakan bagian dari ordo *Galliformes* (Seperti ayam dan kalkun) dan *Anseriformes* (Seperti bebek).

Tabel 2. 156 Produksi Ternak Ruminansia Dan Unggas di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ternak Ruminansia					
Produksi Sapi (Ekor)	15.373	15.557	15.773	15.991	8.714,00
Produksi Kambing (Ekor)	9.158	9.245	9.372	9.502	2.375,00
Ternak Unggas					
Produksi Ayam (Ekor)	38.443	1.198.638	1.316.606	1.333.578	109.721,00
Produksi Itik (Ekor)	37.531	40.802	41.367	39.203	4.187,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah , 2025

Berdasarkan data statistik menunjukan bahwa produksi ternak ruminansia yang terdiri dari sapi dan kambing terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 total produksi sapi dan kambing rata-rata meningkat sebesar 1,38 persen dimana total produksi sapi sebesar 15.991 ekor sedangkan produksi kambing sebesar 9.502 ekor. Namun pada Tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yakni produksi sapi menurun sebesar 45,5 persen dan kambing sebesar 75 persen. Hal yang sama terjadi pada produksi ayam yang menurun signifikan sebesar 91,77 persen dan itik sebesar 89,31 persen.

Produksi Komoditas Perkebunan

Tanaman sub sektor perkebunan terdiri atas perkebunan semusim dan perkebunan tahunan. Secara garis besar produksi tanaman perkebunan semusim dan tahun pada tahun 2024 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dengan tahun 2023.

Tanaman perkebunan tahunan (utamanya kelapa sawit) memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Kabupaten Mamuju Tengah. Dari data pada tabel dibawah dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 produktifitas kelapa sawit menurun tipis jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan jumlah produktifitas sebesar 2.474 ha.

Tabel 2. 157 Luas Tanaman Menghasilkan, Produksi dan Produktifitas Perkebunan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kelapa Sawit					
Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	18.588,30	29.001,76	29.126,76	29.126,76	29.126,76
Produksi (Ton)	96.978,00	96.978,00	97.235,00	72.052,88	72.052,88
Produktifitas (Kg/Ha)	5.217	3.344	3.338	2.474	2.473,77
Kakao					
Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	9.530	12.087	11.611	10.330	10.090
Produksi (Ton)	6.703	8.883	8.549	8.392	8.383
Produktifitas (Kg/Ha)	701	704	700	703	830,82
Kelapa Dalam					
Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	884,0	884,0	879,0	879,0	1.153,77
Produksi (Ton)	895,5	897,5	924,0	922,5	1.026,9
Produktifitas (Kg/Ha)	1.013,0	1.015	1.051	1.049	890,04
Kopi Robusta					
Luas Tanaman Menghasilkan (Ha)	23	20,5	20,5	20,5	20,5
Produksi (Ton)	14	13	14	14	14
Produktifitas (Kg/Ha)	622	610	683	683	682,92

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya

Produksi ikan adalah seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/bintang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang di catat tidak hanya produksi yang dijual saja tetapi termaksud juga produksi yang di konsumsi oleh rumah tangga maupun yang diberikan kepada nelayan/pekerja

sebagai upah. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikah hasil tangkapan/budidaya.

Budidaya perikanan adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat organisme air yang di budidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi juga organisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air.

Tabel 2. 158 Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	26.033,53	9.914,97	3.128,68	3.187,98	3.652,94
Nilai Produksi Perikanan Budidaya	149.272. 198.500	141.515. 487.000	130.108. 564.000	126.362. 585.000	160.690. 420.500

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Selama lima tahun terakhir jumlah produksi perikanan budidaya berfluktuatif setiap tahunnya. jumlah produksi perikanan budidaya tertinggi didapatkan pada tahun 2024 sebesar 3.652,94 Ton. Pada tahun 2020 sampai pada tahun 2022 jumlah produksi perikanan budidaya terus cenderung mengalami penurunan hingga pada akhir tahun hanya mampu menghasilkan produksi sebesar 3.128,68 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.130.108.564.000. Penurunan ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya; serangan hama penyakit, alih fungsi lahan dan tidak adanya rumput laut. Selain itu banyaknya empang yang tidak lagi produktif dan terbengkalai sehingga mengurangi angka jumlah produksi perikanan budidaya. Namun pada tahun 2023 sampai 2024 mengalami peningkatan hingga jumlah produksi sebesar 3.652,94 ton dengan nilai produksi Rp.160.690.420.500.

Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap adalah semua hasil penangkapan ikan/bintang air lainnya/tanaman air yang ditangkap dari sumber perikanan alami di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perorangan.

Tabel 2. 159 Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.388,82	1.310,92	1.362,01	1.386,36	1.435,72
Nilai Produksi Perikanan Tangkap	22.789. 042.000	26.561. 470.500	34.268. 192.000	29.054. 317.000	29.097. 366.000

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Pada tahun 2024 Kabupaten Mamuju Tengah memiliki 34 jenis perikanan tangkap dengan jumlah produksi perikanan tangkap yang tercatatkan sampai pada triwulan 4 sebesar 1.435,72 ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 29.097.366.000. hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Konsumsi Ikan

Angka konsumsi ikan merupakan salah satu indikator dari Dinas Perikanan yang digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang di konsumsi masyarakat. Angka konsumsi ikan ini akan dimanfaatkan untuk perencanaan dan penetapan kebijakan dalam pengelolaan ikan.

Dari data Dinas Perikanan Kabupaten Mamuju Tengah jumlah konsumsi ikan masyarakat Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Pada tahun 2022 tercatat jumlah konsumsi ikan sebesar 64,3 kg/kapita/tahun. Angka ini meningkat sebesar 0,98 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu data konsumsi ikan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,38 persen dimana angka konsumsi ikan sebesar 55,05 kg/kapita/tahun. Namun pada tahun 2024 konsumsi ikan kembali meningkat sebesar 13,5 persen yakni 62,48 kg/kapita/tahun.

Tabel 2. 160 Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Konsumsi Ikan	31,04	63,67	64,3	55,05	62,48

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Jumlah Kapal dan Perahu

Produksi perikanan diukung oleh adanya ketersediaan sarana dan prasarana perikanan serta tersedianya SDM yang kapabel untuk memfungsikan sarana dan prasarana tersebut. Data dari Dinas Perikanan menunjukan bahwa ketersediaan sapras perikanan mengalami peningkatan dengan adanya bantuan dari pemerintah daerah pada kelompok nelayan setiap tahunnya. Pada tahun 2023 total sapras yang ada sebanyak 1.241 unit, atau meningkat 4,37 persen dari tahun 2022. Sapras tersebut meliputi perahu tanpa mesin sebanyak 145 unit, tanpa perahu sebanyak 278 unit, mesin tempel sebanyak 802 unit, kapal motor sebanyak 16 unit. Namun pada tahun 2024 jumlah mesin tempel menurun menjadi 750 unit dan tanpa perahu menurun menjadi 170.

Tabel 2. 161 Jumlah Kapal dan Perahuvdi Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanpa Perahu	164	144	215	278	170

Perahu Tanpa Mesin	144	164	150	145	150
Mesin Tempel	785	725	802	802	750
Kapal Motor	12	14	22	16	16
Total	1.105	1.047	1.189	1.241	1.086

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Rumah Tangga Nelayan

Rumah Tangga Nelayan adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan usaha perikanan baik tangkap ataupun budidaya dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya dijual. Pada tahun 2023 Dinas Perikanan melaporkan bahwa jumlah Rumah Tangga Nelayan di Mamuju Tengah tercatatkan sebanyak 1.083 KK. Angka ini mengalami penurunan sebesar 15,32 persen dari tahun sebelumnya.

Pentingnya pembinaan bagi rumah tangga nelayan sangatlah relevan, terutama mengingat kondisi sebagian besar nelayan yang masih hidup dalam kategori miskin. Berikut beberapa aspek penting dalam pembinaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan rumah tangga nelayan seperti: pendidikan dan pelatihan, pengelolaan sumber daya laut, penguatan kelompok usaha nelayan, diversifikasi ekonomi, dan kesejahteraan perempuan nelayan. Peran perempuan nelayan juga harus diperhatikan. Mereka seringkali berkontribusi secara signifikan dalam aktivitas nelayan. Pemberdayaan mereka akan membantu mengentaskan kemiskinan dan memperkuat sektor perikanan.

Tabel 2. 162 Rumah Tangga Nelayan di Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah RT Nelayan	1.161	1.161	1.278	1.279	1.083

Sumber: Dinas Perikanan Kab.Mamuju Tengah, 2025

Perdagangan

Cakupan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya

Alat Ukur, Taka, Timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan kualitas. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai untuk pengukuran kuantitas penakaran. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang, yang menentukan hasil pengukuran atau penimbangan. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur yang menujukkan hasil pengukuran. Yang dimaksud dengan tera adalah hal menandai dengan tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah

atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
Sedangkan tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Rumus penghitungan didapatkan dari Jumlah alat UTTP yang ditandai berkala dengan tera sah atau tera batal yang berlaku dibagi jumlah alat UTTP dikali 100%.

Tabel 2. 163 Cakupan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Alat UTTP yang DitandaI	31.744	33.374	33.383	34,954	
Jumlah Alat UTTP	31.852	33.512	33.586	33,586	
Persentase	99,66	99,58	99,40	96,08	

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik

Pasar secara umum adalah salah satu dari sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur tempat usaha menjual barang jasa dan tenaga kerja untuk orang orang dengan imbalan uang atau alat tukar yang berlaku. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan masyarakat. Pasar daerah dalam kondisi baik adalah pasar daerah yang menyangkut pengelolaan manajemen secara profesional dan berkesinambungan termasuk pasar yang dikelola berdasarkan perjanjian kerja sama (Objek Retribusi/Fasilitas Pasar) khusus disediakan untuk pedagang sehingga menjadi pasar berkondisi baik. Kategori pasar baik adalah tidak hanya fisik bangunan yang bagus dan megah namun pasar baik itu pasar yang bersih, pasar yang sehat, pasar yang tertib aturan, pasar yang menjamin konsumen dan pasar yang dapat mempromosikan dan menjual produk daerah, pasar yang berhasil meningkatkan pendapatan pedagang serta manajemen pasar.

Tabel 2. 164 Persentase Pasar Dalam Kondisi Baik Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Pasar Dalam Kondisi Baik	17	19	19	19	20
Jumlah Pasar	41	41	41	41	41
Persentase	41,46	46,34	46,34	46,34	48,78

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Rata-rata capaian persentase pasar dalam kondisi baik pada tahun 2019 sampai tahun 2022 adalah sebesar 41 persen dengan jumlah pasar sebanyak 41 unit yang tersebar di lima kecamatan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2021 kondisi pasar dalam keadaan baik bertambah menjadi 19 unit hingga persentase ketercapaian pasar dalam kondisi baik meningkat menjadi 46 persen, dan tetap konstan sampai pada akhir tahun 2023.

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

Pendapatan pasar adalah seluruh penerimaan yang berupa uang dari pungutan retribusi atas pelayanan pasar yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati. Realisasi Penerimaan Pendapatan Pasar adalah pendapatan retribusi pasar yang merupakan gabungan dari beberapa retribusi pelayanan pasar (retribusi murni, bongkar muat, Ijin, MCK), tempat khusus parkir, pemakaian kekayaan daerah (PKL) dan retribusi penempatan awal (RPA). Rumus perhitungannya didapat dari realisasi pendapatan dibagi target pendapatan dikali 100%.

Tabel 2. 165 Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Target (jt)	200	350	227	283	
Realisasi (jt)	162,96	156,62	154,85	146,500	
Persentase	81	44	67	52	

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.Mamuju Tengah, 2025

Capaian realisasi retribusi pasar dalam lima tahun terakhir tertinggi diperoleh pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp. 162.960.000 juta rupiah. Namun di tiga tahun berikutnya realisasi penerimaan retribusi pasar cenderung menurun. Hingga pada akhir tahun 2023 jumlah penerimaan retribusi pasar adalah Rp. 146.500.000 juta rupiah.

Perindustrian

Kondisi Industri Mikro Kecil dan Menengah

Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industry/makloon dan pekerjaan perakitan (assembling). Industri kecil adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 5-19 orang. Sedangkan Industri Mikro adalah perusahaan industri yang tenaga kerjanya antara 1-4 orang.

Pada tahun 2023 jumlah industri Mikro Kecil di Kabupaten Mamuju Tengah yang tercatatkan sebanyak 367 industri dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 358orang. Sementara itu dalam dua tahun terakhir untuk nilai produksi mengalami penurunan sebesar 24,39 persen dari tahun sebelumnya atau turun menjadi Rp 3.196.000.000 milyar rupiah.

Tabel 2. 166 Kondisi Industri Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Mamuju Tengah, 2020 - 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah (unit)	314	332	266	367	
Tenaga Kerja	737	781	644	358	
Nilai Produksi (milyar)	7.191	7.421	4.227	-3.196	

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kab.Mamuju Tengah, 2025

B. Gambaran Keuangan Daerah

2.5 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu RPJMD Teknokratik merupakan perspektif evaluasi yang bertujuan untuk menggambarkan kinerja keuangan daerah yang dituangkan dalam APBD dan posisi keseimbangan keuangan daerah berupa neraca daerah hingga tahun terakhir realisasi penyelenggaraan periode pemerintahan sebelumnya. Dalam hal ini selama empat tahun terakhir berjalannya RPJMD periode sebelumnya. Meliputi dua aspek penting, yakni perkembangan kinerja APBD dan kinerja neraca daerah, aspek keuangan daerah sebagai bukti penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berjalan dengan baik yang disertai dengan realisasi keuangannya. Analisis dan pengamatan difokuskan dalam lima tahun terakhir, yakni periode 2019-2023.

2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD mencakupi kinerja tiga komponen utama APBD, yakni kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah, dan kinerja pembiayaan daerah beserta semua komponen-komponennya. Ketiganya menggambarkan kinerja pertumbuhan hingga pada postur semua komponen-komponennya.

1) Kinerja Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah, meliputi pertumbuhan dan postur komponen-komponen pendapatan daerah. Meliputi komponen pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kinerja pertumbuhan pendapatan daerah selama periode 2019-2023 secara umum mengalami penurunan, rata-rata menurun (1,38) persen per tahun. Hal ini terutama dikarenakan munculnya pandemi covid-19 yang mengakibatkan pendapatan daerah pada tahun 2020 turun sampai (9,21) persen. Akan tetapi pada tahun 2023 meningkat dan mulai membaik dengan peningkatan sebesar 9,61 persen. Pada sektor PAD mencatat pertumbuhan rata-rata tertinggi yakni 9,52 persen, sedangkan pendapatan transfer turun sebesar (1,26) persen dan LLPD Yang Sah turun cukup besar yakni (16,77) persen. Selengkapnya rata-rata pertumbuhan komponen pendapatan daerah selama periode 2019-2023 Ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 167 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Rata Rata Pertumbuhan (%)
PENDAPATAN	**649.545.633.277,58**	**633.474.222.353,74**	**611.664.770.086,31**	**670.474.668.815,66**	**679.116.203.889,00**	1,25%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**27.857.047.783,20**	**33.822.263.705,74**	**30.708.238.962,31**	**43.089.865.860,66**	**51.819.614.198,69**	18,20 %
Pendapatan Pajak Daerah	8.173.327.535,00	8.361.506.340,00	9.321.681.084,00	10.986.888.633,00	12.064.921.118,00	10,37 %
Pendapatan Retribusi Daerah	12.074.923.953,00	15.108.513.769,60	18.946.026.668,00	28.164.198.735,00	14.022.486.339,00	12,24 %
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	30.505.459,00	482.055.891,00	729.061.014,00	
Lain-lain PAD Yang Sah	7.608.796.295,20	10.352.243.596,14	2.410.025.751,31	3.456.722.601,66	25.003.145.727,69	156,52%
PENDAPATAN TRANSFER	**600.287.407.494,38**	**580.984.896.648,00**	**575.732.195.870,00**	**620.367.960.197,00**	**610.185.349.767,00**	0,50%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	578.361.538.137,00	559.918.359.802,00	550.275.553.028,00	593.634.511.061,00	583.771.260.129,00	0,33%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	21.925.869.357,38	21.066.536.846,00	21.566.465.083,00	26.733.449.136,00	26.414.089.638	5,30%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**21.401.178.000,00**	**18.667.062.000,00**	**5.224.335.254,00**	**7.016.842.758,00**	7.746.528.903,00	- 10,02 %
Pendapatan Hibah	21.401.178.000,00	0	0	0		
Lain – Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan	0	18.667.062.000,00	5.224.335.254,00	7.016.842.758,00	7.746.528.903,00	

Sumber: Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, Series

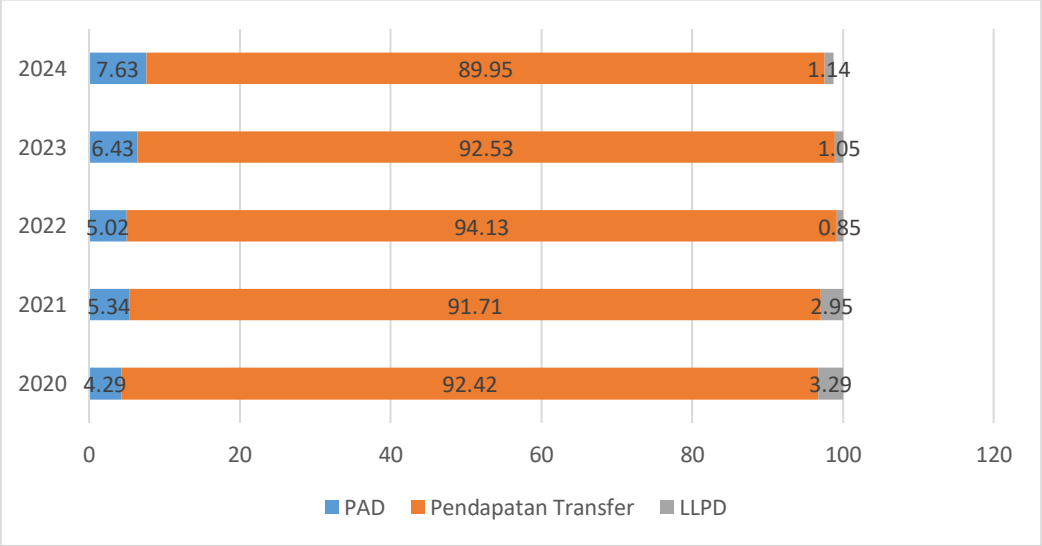
Capaian pertumbuhan PAD pada 5 tahun terakhir cukup mengalami fluktuasi, akan tetapi secara rata rata pertumbuhan mengalami peningkatan cukup signifikan yakni 18,2 persen walaupun sempat turun pada tahun 2022 akan tetapi berhasil naik cukup drastis pada tahun selanjutnya, terutama dikontribusi oleh pertumbuhan retribusi daerah yang mencapai 12,24 persen setiap tahunnya lebih tinggi dari pertumbuhan pajak daerah yang bertumbuh 10,37 persen setiap tahun pada Sedangkan komponen LLPAD Yang Sah menunjukkan peningkatan paling drastis sebesar 156,52 persen. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian pendapatan BLUD yang menjadi komponen lain lain

pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan pada komponen dana transfer, juga ikut bertumbuh dengan rerata pertumbuhan tiap tahunnya sebesar 0,50 persen. Hal ini menunjukkan muai bertumbuhnya APBD pasca covid 19. Pada pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, juga mengalami peningkatan rerata pertumbuhan sebesar 5,3 persen.

Sedangkan sumber pendapatan lainnya, berupa LLPD Yang Sah, menunjukkan penurunan cukup besar yakni (10,22) persen tetapi komponen juga tidak dapat diandalkan karena bersifat insidentil, dan sudah memiliki alokasi yang fixed berdasarkan sumbernya.

Guna mencermati tingkat ketergantungan fiskal daerah, diamati kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah. Struktur pendapatan daerah yang menggambarkan postur pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama tahun 2019-2023, selengkapnya diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 63 Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023 (persen)



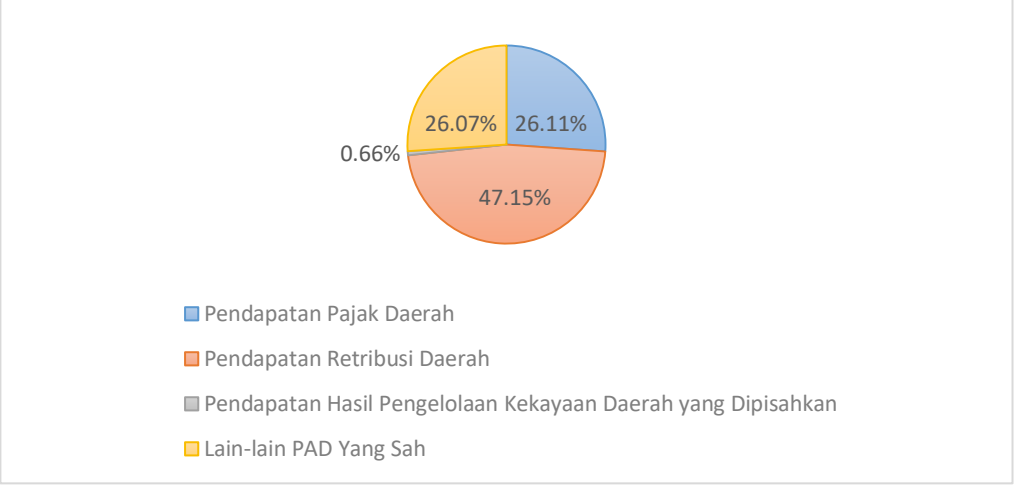
Sumber : Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, Series

Meskipun kemandirian pendapatan daerah masih tergolong rendah, tetapi terus menunjukkan kinerja yang semakin membaik selama periode 2020-2024. Kontribusi PAD meningkat dari hanya 4,29 persen pada tahun 2020 meningkat menjadi 7,63 persen pada tahun 2024. Sejalan dengan itu, kontribusi LLPD Yang Sah menurun dari awalnya 3,29 persen pada tahun 2020 menurun menjadi 1,14 persen pada tahun 2024 dimana salah satu penyebabnya yaitu perpindahan jenis pendapatan hibah dana bos yang pada tahun 2020 – 2021 menjadi bagian dari LLPD namun pada tahun 2022 dan 2024 masuk dalam komponen Pendapatan Transfer (DAK Non Fisik). Sedangkan komponen dana transfer masih menjadi sumber pendapatan terbesar akan tetapi berangsur menurun walaupun tidak terlalu signifikan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah masih

berketergantungan dengan Pendapatan Transfer walaupun pada dasarnya Pendapatan Asli Daerah juga memiliki tren positif untuk menciptakan kemandirian pendapatan daerah. Sebuah kinerja peningkatan kemandirian pendapatan daerah yang cukup baik dari sebuah daerah otonom yang baru lahir. Kinerja tersebut Digambar lebih jauh berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah potensial di Kabupaten Mamuju Tengah. Guna mendukung premis ini, maka penting mencermati postur setiap komponen pendapatan daerah tersebut.

Pertama, postur PAD. Selama periode 2020-2024 ini, sumber penerimaan PAD bertumpu pada pendapatan retribusi daerah. Selama lima tahun komponen ini berkontribusi 54,32 persen terhadap total PAD. Pajak daerah berkontribusi 26,57 persen, LLPAD yang sah berkontribusi 18,80 persen sedangkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya berkontribusi sebesar 0,31%. Selengkapnya pada gambar berikut.

Gambar 2. 64 Postur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024

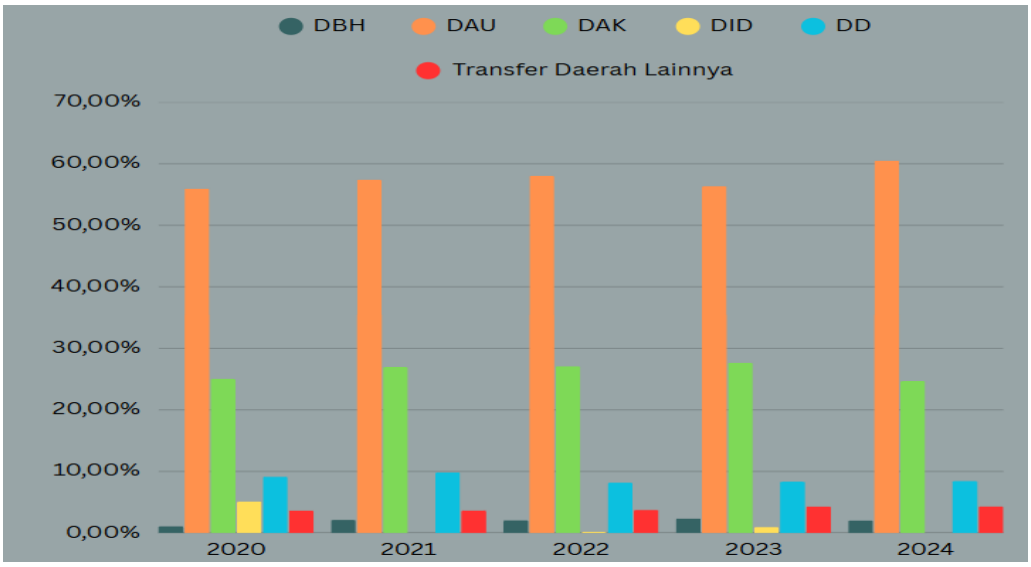


Dari diagram diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten PAD Mamuju Tengah masih didominasi oleh Retribusi Daerah sebesar 47,15 Persen dari total Pendapatan Asli Daerah tahun 2020-2024. Akan tetapi dari pendapatan retribusi tersebut didominasi oleh retribusi pelayanan kesehatan. Kabupaten Mamuju Tengah masih memerlukan Langkah-langkah strategis dan sistematis untuk meningkatkan PAD pada sektor lain terutama Pajak Daerah dan pemanfaatan aset daerah kabupaten mamuju Tengah.

Kedua, postur dana transfer. Dana transfer yang diterima oleh Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2019-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan dampak pandemi covid 2019 yang mengakibatkan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat namun berbanding terbalik dengan pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi yang meningkat, khususnya pendapatan bagi hasil.

Secara garis besar, kontribusi DAU terhadap dana transfer masih mendominasi setiap tahunnya sejak tahun 2020-2024, Selengkapnya postur dana Transfer Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2020-2024 diilustrasikan pada gambar berikut.

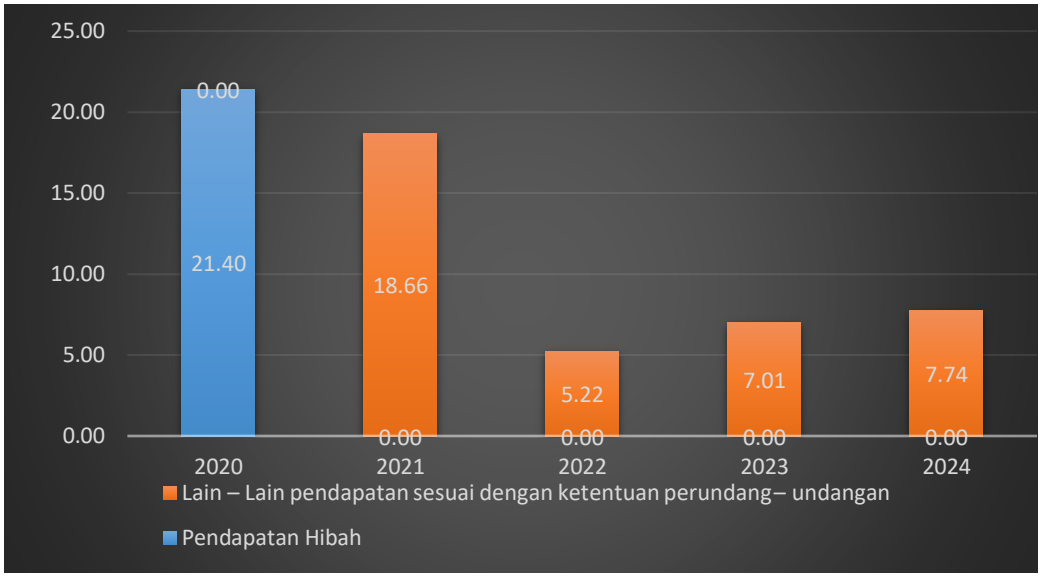
Gambar 2. 65 Perkembangan Postur Dana Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023



Dari grafik diatas, dapat disimpulkan terkait kontribusi antar masing-masing komponen dalam dana transfer cenderung staknan sejak tahun 2020-2024. Dana Transfer Pemerintah Pusat masih menjadi penyumbang terbesar dalam komponen ini. Fakta ini mengindikasikan besarnya ketergantungan fiskal daerah yang bersumber dari pendapatan dari transfer pemerintah pusat.

Ketiga, postur LLPD Yang Sah. Pada lain-lain pendapatan daerah yang sah strukturnya yang lebih bersifat insidental, seperti sumber pendapatan yang berasal dari hibah, dana darurat dan Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gambaran postur LLPD Yang Sah Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2019-2023, selengkapnya diilustrasikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 66 Perkembangan Postur LLPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023 (MILYAR RUPIAH)



Pada komponen LLPD yang sah Kabupaten Mamuju Tengah cenderung menurun, hal ini disebabkan dengan adanya perubahan nomenklatur pendapatan Dimana pada tahun 2020 dan 2021, pendapatan dana BOS tercatat dalam LLPD yang sah objek Pendapatan Hibah, serta Pendapatan JKN masih tercatat di LLPAD yang sah. Sedangkan ditahun 2022-2024, pendapatan dana BOS tercatat kedalam komponen dana transfer, dan pendapatan JKN sudah tercatat dalam komponen pendapan LLPD yang sah. Akan tetapi dalam komponen pendapatan ini bersifat insidentil dan keleluasaan fiskalnya terbatas sehingga tidak dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah secara berkeseinambungan dalam jangka panjang.

Dari gambaran pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah menggambarkan adanya arah pertumbuhan positif yang selalu terjadi setiap tahunnya dan menunjukkan angka yang positif, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,25%. Meskipun angka ini menggambarkan adanya perkembangan yang cukup baik, namun masih ada tantangan besar yang perlu dihadapi dalam mencapai target pembangunan yang lebih ambisius di masa depan. Untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang lebih besar, angka pertumbuhan pendapatan daerah tersebut masih dirasa kurang optimal.

Potensi pendapatan yang dapat digali masih sangat luas, dan perlu diperhatikan dengan serius. Salah satu sektor yang dapat dimanfaatkan adalah optimalisasi sektor pajak daerah, terutama dari pajak perhotelan, restoran, dan sektor usaha lainnya yang berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemanfaat barang milik daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam layanan publik juga dapat menjadi sumber pendapatan yang tidak kalah penting. Inovasi dalam

sistem administrasi dan pengelolaan sektor-sektor pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah melalui platform digital dapat memperluas jangkauan pengumpulan pendapatan serta meminimalkan kebocoran penerimaan. Jika upaya-upaya untuk menggali potensi pendapatan tersebut tidak dilakukan, maka pendapatan daerah hanya akan habis untuk membiayai belanja wajib mengikat saja, seperti gaji pegawai, belanja rutin, dan kewajiban lainnya. Hal ini tentu akan membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan secara masif dan berkelanjutan.

2) *Kinerja Belanja Daerah*

Berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, telah dijelaskan bahwa Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima Kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja Daerah dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tersebut dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Dengan klasifikasi tersebut, maka penganggaran ke depan akan sama klasifikasinya dengan pelaporannya sehingga akan dapat diperbandingkan dan ditingkatkan kualitas informasi yang disajikan.

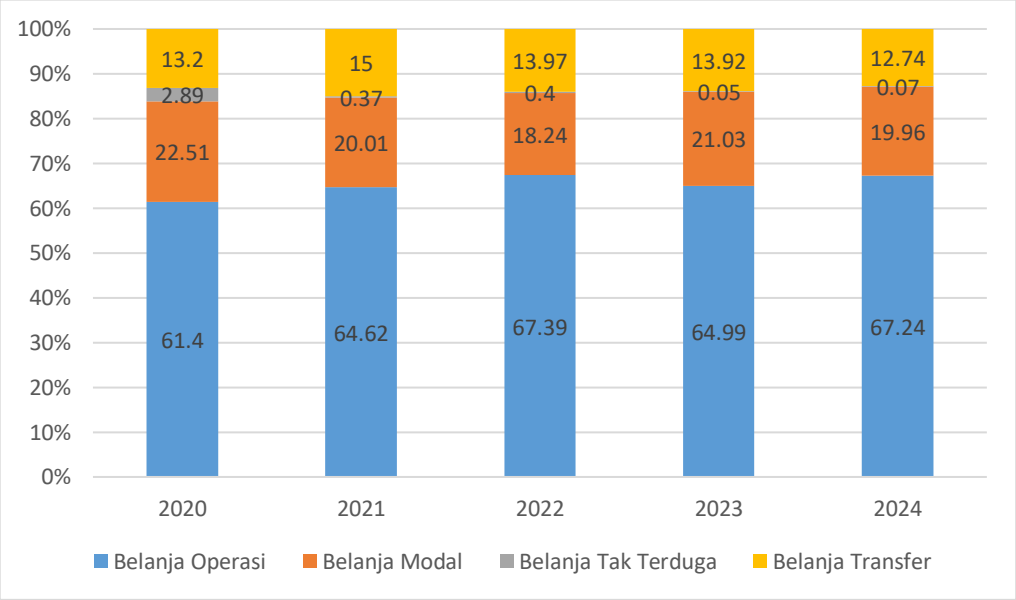
Tabel 2. 168 Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Beserta Komponen-komponennya Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI TAHUN 2020	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2024	RERATA PERTUMBUHAN (%)
BELANJA	**634.494.611.139,50**	**607.650.823.844,00**	**595.806.088.137,00**	**627.582.263.252,00**	**697.199.722.327,00**	2,56%
BELANJA OPERASI	**389.604.461.093,50**	**392.671.540.197,00**	**401.524.797.450,00**	**407.880.179.375,00**	**468.766.363.811,00**	4,89%
Belanja Pegawai	143.075.269.307,00	155.051.511.170,00	158.953.128.063,00	186.514.182.863,00	224.098.755.376,00	12,09%
Belanja Barang dan Jasa	211.346.081.034,50	224.981.111.555,00	218.041.091.580,00	200.826.460.987,00	203.078.457.820,00	-0,85%
Belanja Bunga	2.013.710.752,00	3.468.231.192,00	1.972.540.314,00	-	-	
Belanja Hibah	31.334.400.000,00	8.288.186.280,00	21.891.737.493,00	20.415.535.525,00	41.570.650.615,00	46,87%
Belanja Bantuan Sosial	1.435.000.000,00	882.500.000,00	666.300.000,00	124.000.000,00	18.500.000,00	-57,37%
Belanja Bantuan Keuangan	400.000.000,00				-	
BELANJA MODAL	**142.806.214.379,00**	**121.583.855.006,00**	**108.670.775.934,00**	**131.997.518.417,00**	**139.134.589.716,00**	0,35%
BELANJA TAK TERDUGA	**18.346.942.267,00**	**2.222.468.641,00**	**2.382.146.753,00**	**326.062.160,00**	**475.105.500,00**	-30,33%
Belanja Tak Terduga	18.346.942.267,00	2.222.468.641,00	2.382.146.753,00	326.062.160,00	475.105.500,00	-30,33%
TRANSFER	**83.736.993.400,00**	**91.172.960.000,00**	**83.228.368.000,00**	**87.378.503.300,00**	**88.823.663.300,00**	1,70%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	83.736.993.400,00	91.172.960.000,00	83.228.368.000,00	87.378.503.300,00	88.823.663.300,00	1,70%

Sumber : Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, series

Selama periode ini, alokasi belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan sebesar 2,56 persen setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan Kembali belanja APBD pasca Covid 19. Peningkatan belanja pada periode ini terdapat pada belanja pegawai yang bertumbuh 12,09 persen setiap tahunnya dikarenakan peningkatan gaji pegawai dan adanya perekrutan PPPK. Selain itu, belanja hibah dengan peningkatan terbesar dikarenakan adanya pengalokasian belanja hibah untuk persiapan pilkada serentak. Selengkapnya perkembangan postur alokasi belanja daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2019-2023, ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Gambar 2. 67 Struktur Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020-2024 (Persen)



Sumber : Buku APBD Kabupaten Mamuju Tengah, Series

Kontribusi alokasi belanja operasi masih mendominasi belanja daerah hingga tahun 2024, dan cenderung meningkat tiap tahunnya. Selain itu, pada komponen belanja modal secara kontribusi cenderung mengalami fluktuasi, hal ini dikarenakan belanja modal masih tergantung dengan pendapatan DAK sedangkan pendapatan DAK juga mengalami fluktuasi.

Peningkatan belanja modal yang signifikan tentunya memberikan dampak positif pada sektor-sektor seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar lainnya. Hal ini turut berperan dalam memperkuat konektivitas antar wilayah, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun, perlu dicatat bahwa fluktuasi yang terjadi pada komponen belanja modal, yang bergantung pada pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK), menunjukkan ketergantungan yang cukup besar pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Fluktuasi pendapatan DAK yang tidak stabil menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan, mengingat dana tersebut menjadi salah satu sumber utama dalam membiayai belanja modal daerah. Ketidakpastian ini berisiko menghambat keberlanjutan proyek-proyek pembangunan, terutama yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan pendanaan yang konsisten.

Untuk itu, sangat penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah untuk mencari alternatif sumber pendanaan lain yang lebih stabil dan berkelanjutan, agar belanja modal tidak hanya bergantung pada DAK. Penggalian potensi pendapatan daerah, seperti pajak daerah, retribusi, dan optimalisasi sumber daya alam serta sektor pariwisata, dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap DAK dan menciptakan pendapatan yang lebih mandiri. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan sektor riil dapat terus berjalan dengan lancar dan berkesinambungan tanpa terganggu oleh fluktuasi pendapatan yang bersifat sementara.

3) *Kinerja Pembiayaan Daerah*

Pembiayaan daerah merupakan gambaran keseimbangan keuangan daerah, keseimbangan sisi pendapatan dan sisi belanja daerah yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya. Keseimbangan pendapatan dan belanja daerah ini akan menghasilkan dua kemungkinan pembiayaan, yakni pembiayaan surplus atau pembiayaan defisit. Surplus dicapai pada saat pendapatan daerah lebih besar dari kebutuhan belanja daerah, sebaliknya defisit dialami pada saat kebutuhan belanja daerah lebih besar dari kemampuan pendapatan daerah. Pada saat dicapai surplus, maka komponen pembiayaan daerah yang utama adalah alokasi pengeluaran daerah, sebaliknya jika mengalami defisit, maka pembiayaan daerah berupa penerimaan pembiayaan daerah. Selama periode 2019-2023. Selengkapnya pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2019-2023 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 169 Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2023

URAIAN	REALISAI TAHUN 2020	REALISAI TAHUN 2021	REALISAI TAHUN 2022	REALISAI TAHUN 2023	REALISAI TAHUN 2024	RERETA PERTUMBUHAN (%)
PEMBIAYAAN						
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**18.639.380.591,31**	**11.618.309.281,39**	**14.369.614.343,00**	**6.156.200.188,00**	**41.381.753.452**	**125,26%**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.639.380.591,31	11.618.309.281,39	14.369.614.343,00	6.156.200.188,00	**41.381.753.452**	125,26%
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	0	0		
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**22.072.093.448,00**	**23.072.093.448,00**	**24.072.096.104,00**	**3.000.000.000,00**	**0**	

URAIAN	REALISAI TAHUN 2020	REALISAI TAHUN 2021	REALISAI TAHUN 2022	REALISAI TAHUN 2023	REALISAI TAHUN 2024	RERETA PERTUMBUHAN (%)
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	-	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0	
Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah	22.072.093.448,00	22.072.093.448,00	22.166.665.780,00	0	0	
PEMBIAYAAN NETTO	**-3.432.712.856,69**	**-11.453.784.166,61**	**-9.702.481.760,00**	**3.156.200.188,00**	**41.381.753.452**	**-4,91%**

Sumber : Buku APBD Mamuju Tengah, Series

Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah pada 2020-2024 khususnya pada komponen Penerimaan Pembiayaan terjadi peningkatan sangat drastis, hal ini disebakan besaran SiLPA pada tahun 2024 sangat besar. Penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2024 sangat besar dikarenakan tidak terealisasinya belanja PPPK Tahun Anggaran 2023 serta DBH Sawit tahun Anggaran 2023 yang menyebrang tahun untuk dibelanjakan. Sedangkan pengeluaran pembiayaan menurun disebabkan setelah tahun 2020, tidak ada lagi pembayaran utang SMI dan pengeluaran pembiayaan murni hanya penyertaan modal pada Bank Sulselbar.

2.5.2 Neraca Daerah

Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincikan obyek. Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah selama kurun waktu 2019-2024 seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 170 Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	(%)
ASET	1.276.164.413.723,13	1.308.352.534.366,78	1.329.604.800.520,64	1.387.420.137.414,53	1.378.301.374.472,31	1,96
ASET LANCAR	31.130.299.100,19	35.769.510.974,76	29.462.426.406,66	62.876.916.880,33	36.455.641.658,58	17,17
Kas	11.624.668.081,39	14.419.619.740,13	6.162.558.988,44	41.381.753.452,10	14.083.589.293,43	118,08
Piutang	9.968.688.107,50	10.375.199.074,40	11.069.319.634,78	8.582.295.313,70	10.291.431.805,80	2,05
Persediaan	9.118.371.161,30	10.627.915.910,23	11.473.148.533,44	11.972.254.864,53	10.665.853.614,35	4,29
ASET TETAP	1.239.929.843.763,28	1.267.348.783.900,34	1.291.703.749.308,90	1.313.408.209.063,47	1.322.010.125.591,49	1,62
Tanah	57.000.673.364,00	44.217.030.214,00	63.579.012.220,00	66.833.889.667,00	67.787.756.175,00	6,98
Peralatan dan mesin	215.720.732.373,20	179.424.960.932,06	269.634.564.335,66	279.733.386.440,66	311.380.597.717,34	12,13
Gedung dan bangunan	454.411.807.597,94	324.033.588.589,06	500.888.197.895,54	584.372.010.415,60	610.628.683.427,77	11,76
Jalan, irigasi, dan jaringan	885.313.266.037,04	765.334.314.001,90	1.001.385.513.125,04	1.062.927.244.654,54	1.114.859.229.056,45	7,08
Aset tetap lainnya	8.604.794.857,46	21.351.454.195,07	8.725.889.205,46	9.435.638.671,91	9.616.240.817,91	24,75
Konstruksi dalam pengerjaan	7.246.769.227,00	15.771.695.082,00	10.624.842.704,76	26.550.240.206,76	36.845.057.769,67	68,42
Akumulasi Penyusunan Aset Tetap	-388.368.199.693,36	-263.005.086.532,38	-563.134.270.177,56	-716.444.200.993,00	-829.107.439.372,65	31,20
ASET LAINNYA	5.104.270.859,66	3.339.641.284,41	5.438.624.805,08	5.135.011.470,73	8.387.608.110,24	21,51
Tagihan penjualan angsuran						
Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah						
Kemitraan dengan pihak kedua						
Aset tak berwujud	1.108.656.750,00	925.953.800,00	4.082.037.700,00	5.004.522.700,00	5.501.621.941,00	89,22
Aset Lain-lain	3.995.614.109,66	2.413.687.484,41	10.965.120.591,14	15.166.716.615,79	20.416.109.038,75	96,91

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan
JUMLAH ASET DAERAH						
KEWAJIBAN	50.436.207.550,00	62.410.997.613,00	11.680.180.719,00	17.073.291.219,31	7.439.661.925,71	**-16,95**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.292.017.998,00	50.786.601.013,00	11.680.180.719,00	17.073.291.219,31	7.439.661.925,71	**154,98**
Utang perhitungan pihak ketiga	6.358.800,00	13.200.287,00	6.358.800,00		209.206.419,00	**-14,75**
Uang muka dari kas daerah						
Pendapatan diterima dimuka						
Utang jangka pendek lainnya	6.285.659.198,00	50.773.400.726,00	11.680.180.719,00	17.073.291.219,31	7.230.455.506,71	**154,82**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	44.144.189.552,00	11.624.396.600,00				**-86,83**
Utang Dalam Negeri	44.144.189.552,00	11.624.396.600,00				**-86,83**
Utang Jangka Panjang Lainnya						
EKUITAS DANA	1.225.728.206.173,13	1.048.617.667.282,14	1.317.924.619.801,64	1.370.346.846.195,22	1.370.861.712.546,60	**3,81**
EKUITAS DANA LANCAR						
SILPA						
Cadangan Piutang						
Cadangan persediaan						
EKUITAS DANA INVESTASI	952.510.184.682,00	1.048.617.667.282,14	1.317.924.619.801,64	1.370.346.846.195,22	1.370.861.712.546,60	**9,95**
Diinvestasikan dalam aset tetap	952.510.184.682,00	1.048.617.667.282,14	1.317.924.619.801,64	1.370.346.846.195,22	1.370.861.712.546,60	**9,95**
Diinvestasikan dalam						

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rerata Pertumbuhan
aset lainnya						

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series

Selama periode 2020-2024, perkembangan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengalami perkembangan yang meningkat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,96 persen. Aset tersebut terdiri atas aset lancar (kas, piutang dan persediaan), aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan), Aset lainnya (Aset Tak berwujud dan aset lain-lain), semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan. Kewajiban, baik jangka pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga, atau utang jangka pendek lainnya. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun waktu empat tahun (2020-2024) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -16,95 persen.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas dan rasio utang. Rasio likuiditas terdiri rasio lancar (*current ratio*), rasio kas (*cash ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*). Sedangkan rasio lancar (*current ratio*) adalah rasio standar untuk menilai kesehatan organisasi. Rasio ini menunjukkan apakah pemerintah daerah memiliki aset yang cukup untuk melunasi kewajiban yang jatuh tempo. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rata-rata pertumbuhan rasio keuangan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 171 Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	**2024**	**Rerata Pertumbuhan (%)**
Rasio lancar *(current ratio)*	0,62	0,57	2,52	3,68	4,90	**103,31**
Rasio quick (*quick ratio*)	0,44	0,40	1,54	2,98	3,47	**96,46**
	0,01	0,05	0,01	0,01	0,01	**80**
Rasio total hutang terhadap total asset	0,00	0,04	0,01	0,01	0,01	**-25**
Rata-rata umur piutang	3,49	4,41	4,76	4,33	5,6	**13,65**
Rata-rata umur persediaan	33,71	29,22	28,78	27,81	90,28	**51,61**
Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	0,71	0,65	0,67	0,65	**0,67**	**-1,32**

Sumber: Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (diolah), Series

1) Pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar *(current ratio)* dan rasio quick *(Quick Ratio*). Rasio lancar adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedangkan Quick Ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek.Rasio lancar digunakan untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, maka semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan lima tahun realisasi anggaran pemerintah daerah,Kabupaten Mamuju Tengah menunjukan rasio likuditas yang mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun sempat menurun di tahun 2021. Pada tahun 2022 quick ratio (rasio quick) meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 1,54, quick ratio terus meningkat hingga tahun 2024 nilainya menjadi 3,47. Adapun untuk current ratio (rasio lancar) juga meningkat. Pada tahun 2022 current ratio menjadi 2,52 yang tadinya pada tahun 2021 hanya 0,57, kemudian terus mengalami kenaikan di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2024 current ratio sebesar 4,90. Hal ini menunjukkan likuiditas Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat dalam kemampuan membayar utang. Dengan memperhitungkan utang pihak ketiga dan utang jangka pendek lainnya.

2) Kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi semua kewajibannya. Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap aset (Debt to Asset Ratio) dan rasio kewajiban terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio). Rasio kewajiban terhadap aset adalah kewajiban dibagi dengan aset, sedangkan rasio kewajiban terhadap ekuitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio kewajiban terhadap aset tahun 2020 sebesar 0,01 persen yang artinya setiap Rp.1,00 aset, 0,01 persen nya dibiayai oleh hutang dan, 0,99nya dibiayai oleh modal. Pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,05 persen, yang artinya setiap Rp.1,00 aset, 0,05 persen dibiayai oleh hutang, dan 0,95 persen nya dibiayai oleh modal. kemudian menurun di tahun 2022 sebesar 0,01 hingga tahun 2024. Yang artinya setiap Rp. 1,00 aset, 0,01 dibiayai oleh hutang dan sebesar 0,99 dibiayai oleh modal.Semakin besar nilai rasio ini, maka semakin buruk rasio kewajiban terhadap aset. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manjemen keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah masih dalam kondisi yang solvable.
3) Ketiga, rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengukur tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah, rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam menggunakan aktiva yang dimiliki dan dalam pengalokasian sumber-sumber dananya. Rasio aktivitas terdiri dari dua alat ukur, yaitu rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Rata- rata umur persediaan digunakan untuk mengetahui seberapa besar dana tertanam dalam bentuk persediaan atau menggunakan persediaan untuk melayani publik. Semakin besar periode waktu, semakin besar risiko kemungkinan persediaan berada digudang, demikian sebaliknya. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa risiko kemungkinan persediaan berada digudang cukup rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rata- rata 52 (lima puluh dua) hari dana tertanam dalam bentuk persediaan. Sedangakan rata-rata umur piutang pemerintah daerah adalah 6 (enam) hari.

2.5.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13, adalah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggatan yang bersangkutan. Pendapatan daerah dikelompokkan atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; (2) Dana Transfer, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus; (3)Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan Pinajaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi Wajib Pajak yang taat dan yang tidak taat pajak, sehingga memungkinkan fokus penagihan dan dapat maksimal, dengan membentuk tim Satgas PAD sebagai kolaborasi antar Stakeholder dalam pendampingan dan edukasi kepada wajib pajak yang tidak taat pajak sekaligus Identifikasi perizinan wajib pajak. Jenis pajak yang dimaksud diantaranya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Reklame, dan yang lebih khusus lagi dalam hal ini adalah jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Perbaikan/pemutakhiran data pajak pada jenis Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dimana PBB-P2 ini merupakan penerimaan yang paling menunjang penerimaan PAD Kabupaten Mamuju Tengah Sampai saat ini. Pemutakhiran yang dimaksud adalah usulan penghapusan data ganda dan tidak diketahui yang selama ini membebani jumlah piutang yang membengkak. Selain itu, pelunasan PBB-P2 bagi ASN menjadi salah satu syarat dalam penerimaan Tambahan penghasilan pegawai.
3. Potensi Peningkatan Pajak Penerangan Jalan dengan Instensifikasi koordinasi dengan PLN terkait data umum pelanggang listrik perumahan dalam hal ini khusus PLN Cabang setempat wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Meningkatkan kinerja Agen PAD dalam rangka optimalisasi penerimaan dan kontrol PAD ditingkat kecamatan.
5. Evaluasi dan reformulasi regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui : (i) perbaikan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, (ii) penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah;

7. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan baru;
8. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah

2) Kebijakan Belanja Daerah-Proporsi Belanja Aparatur

Kebijakan belanja daerah masa lalu, fokus pemaparan kinerjanya pada kebijakan alokasi belanja daerah untuk mendanai kebutuhan aparatur. Dalam lima tahun terakhir, proporsi alokasi belanja daerah untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini dikarenakan kebutuhan terhadap belanja gaji pegawai yang tiap tahunnya selalu meningkat serta adanya kebijakan perekrutan PPPK. Data analisis proporsi belanja, pemenuhan kebutuhan aparatur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 172 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun Anggaran 2020-2024

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja+ Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
1	2020	143.075.269.307,00	656.566.704.587,50	21,79
2	2021	155.051.511.170,00	630.722.917.292,00	24,58
3	2022	158.953.128.063,00	619.878.184.241,00	25,64
4	2023	186.514.182.863,00	635.249.115.552,00	29,36
5	2024	224.098.755.376,00	632.249.115.552,00	35,44

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Diolah), Series

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka kebijakan belanja daerah selama tahun anggaran 2020-2024 sebagai berikut:

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus bersifat spesifik, terukur, realistis serta diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pemanfaatan belanja program khusus dan penanganan isu-isu strategis yang difokuskan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar, stimulasi ekonomi, pelayanan publik dan dukungan penyelenggaraan pemerintahan lainya dalam rangka mendukung capaian target kinerja utama;

5. Belanja Daerah dilakukan dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
6. Memenuhi ketentuan belanja terhadap prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
7. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

3) Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah selama tahun anggaran 2016-2019, secara umum dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan umum penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan perkiraan sisa lebih (SiLPA) baik berupa pelampauan pendapatan atas dasar peningkatan kinerja maupun sisa belanja atas asumsi terjadinya efisiensi belanja;
2. Kebijakan umum pengeluaran pembiayaan diarahkan pada optimalisasi penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD;
3. Defisit APBD direncanakan akan di atasi melalui selisih antara proyeksi penerimaan pembiayaan dengan rencana pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Perkembangan defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam kurun tahun 2020-2024 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 173 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun Anggaran 2019-2023

No	Uraian	2020 (Rp)	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)
1	**Realisasi Pendapatan Daerah**	**649.545.633.277,58**	**633.474.222.353,74**	**611.664.770.086,31**	**670.474.668.815,66**	**669.688.946.060**
	Dikurangi realisasi:					

2	**Belanja**	**634.494.611.139,50**	**607.650.823.844,00**	**595.806.088.137,00**	**632.249.115.552,00**	**697.199.722.327,00**
3	**Pengeluaran pembiayaan daerah**	**22.072.093.448,00**	**23.072.093.448,00**	**24.072.096.104,00**	**3.000.000.000,00**	**0,00**
	Defisit Rill	**(7.021.071.309,92)**	**2.751.305.061,74**	**(8.213.414.154,69)**	**35.225.553.263,66**	**(27.510.776.266)**

Pada tahun 2021 dan 2023, Kabupaten Mamuju Tengah mencapai surplus anggaran, hal ini disebabkan karena beberapa belanja yang tidak dapat direalisasikan seperti belanja tak terduga yang realisasinya cukup kecil dan belanja PPPK pada tahun 2023 yang juga tidak direalisasikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Defisit rill terbesar Kabupaten Mamuju Tengah terjadi pada tahun 2020 defisit rill lebih kecil menjadi Rp.7,02 Milyar dan pada tahun 2022 defit rill kabupaten mamuju Tengah sebesar Rp.8,21 Milyar dan pada Tahun 2024 sebesar 27,5 Milyar. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengambil beberapa Upaya untuk menutupi deficit rill yang terjadi, seperti ditujukan dalam komposisi penutup defisit berikut ini :

Tabel 2. 174 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mamuju Tengah, Tahun Anggaran 2020-2024

URAIAN	REALISAI TAHUN 2020	REALISAI TAHUN 2022	REALISAI TAHUN 2024
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**18.639.380.591,31**	**14.369.614.343,00**	**41.381.753.452**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	18.639.380.591,31	14.369.614.343,00	**41.381.753.452**
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	0	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk defisit yang terjadi pada tahun 2020, 2022 dan 2024, komponen penutup defisit rill Kabupaten Mamuju Tengah berasal dari penerimaan pembiayaan khususnya dalam hal ini Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

2.6 Kerangka Pendanaan

Perspektif rencana penganggaran pembangunan daerah dalam RPJMD ini diwujudkan dalam dokumen rencana sebagai kerangka pendanaan. Sebagai perspektif rencana, sejumlah asumsi yang mendasari penyusunan kerangka pendanaan ini. selain terkait dengan asumsi makro ekonomi dan sosial, juga terkait kebijakan keuangan negara dan kebijakan keuangan daerah yang diperkirakan akan mempengaruhi rencana penganggaran pada periode pemerintahan yang akan datang. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja langsung, berupa implementasi program-program pembangunan jangka menengah daerah, baik rumusan program

pembangunan daerah maupun rumusan program perangkat daerah. Dalam perspektif RPJMD Teknokratik ini, kerangka pendanaan akan diproyeksikan kemampuan fiskal daerah yang dialokasikan untuk prioritas pertama, prioritas kedua serta prioritas ketiga untuk periode 2025-2029 yang akan datang.

2.6.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam perspektif rencana, baik pendapatan maupun belanja dan pembiayaan daerah didasarkan atas sejumlah asumsi pokok, antara lain asumsi makro ekonomi daerah yang meliputi antara lain pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan per kapita, inflasi, Tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, serta asumsi sosial lainnya, seperti indeks Pembangunan manusia, dan lain sebagainya. Selain itu, terkait dengan analisis kebijakan keuangan, baik kebijakan keuangan negara maupun kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah yang akan diterapkan pada masa datang. Berikut ini hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk 2025-2029, seperti disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 175 Proyeksi APBD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2025-2029

Uraian	Target 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Proyeksi 2030
PENDAPATAN	**631.466.914.702,48**	**639.759.030.274,60**	**646.615.607.320,52**	**653.106.751.483,04**	**659.723.215.080,37**	**666.397.075.684,59**
Pendapatan Asli Daerah	**62.705.093.186,00**	**68.760.387.168,97**	**74.279.502.525,83**	**78.579.940.333,08**	**83.480.940.965,21**	**88.390.717.547,26**
Pajak daerah	23.965.016.835,00	26.470.138.035,19	29.301.496.486,79	30.814.177.388,79	33.027.421.115,65	35.199.440.792,45
Retribusi daerah	34.362.077.753,00	37.089.402.400,42	39.708.388.700,91	42.427.375.001,41	45.046.361.301,90	47.715.347.602,39
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00	1.980.000.000,00
Lain-lain PAD yang sah	2.397.998.598,00	3.220.846.733,36	3.289.617.338,13	3.358.387.942,89	3.427.158.547,66	3.495.929.152,42
Pendapatan Transfer	**560.422.638.605,48**	**561.980.585.634,55**	**562.651.443.991,39**	**564.175.547.014,44**	**565.224.406.647,43**	**566.321.887.337,38**
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	7.604.575.000,00	8.196.444.260,13	8.221.323.372,08	9.099.447.150,24	9.502.327.538,33	9.953.828.983,38
Dana alokasi umum	361.774.134.000,00	361.774.134.000,00	361.774.134.000,00	361.774.134.000,00	361.774.134.000,00	361.774.134.000,00
DAK	122.972.790.000,00	122.972.790.000,00	122.972.790.000,00	122.972.790.000,00	122.972.790.000,00	122.972.790.000,00
Dana Desa	50.807.179.000,00	50.807.179.000,00	50.807.179.000,00	50.807.179.000,00	50.807.179.000,00	50.807.179.000,00
Transfer Antar Daerah	17.263.960.605,48	18.230.038.374,42	18.876.017.619,31	19.521.996.864,21	20.167.976.109,10	20.813.955.353,99
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	8.339.182.911,00	9.018.057.471,08	9.684.660.803,30	10.351.264.135,52	11.017.867.467,73	11.684.470.799,95
Belanja	**633.466.914.702,48**	**645.759.030.274,60**	**652.615.607.320,52**	**659.106.751.483,04**	**665.723.215.080,37**	**672.397.075.684,59**
Belanja Operasi	**480.349.153.978,72**	**444.678.016.842,50**	**430.439.082.475,88**	**435.914.504.076,28**	**441.431.570.371,48**	**447.063.156.526,25**
Belanja Pegawai	273.530.543.004,93	280.368.806.580,05	195.784.682.196,16	197.732.025.444,91	199.716.964.524,11	201.719.122.705,38
Belanja Barang dan Jasa	192.212.886.445,79	156.022.467.535,61	218.103.977.500,55	221.290.269.864,06	224.573.272.415,60	227.791.801.508,46
Belanja Hibah	14.585.724.528,00	8.186.742.726,83	16.450.422.779,18	16.792.208.767,31	17.041.333.431,77	17.352.232.312,41
Belanja Bantuan Sosial	20.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00
Belanja Modal	**62.008.617.223,76**	**111.276.776.606,10**	**132.369.800.107,43**	**133.297.710.291,74**	**134.356.819.555,05**	**135.353.943.860,00**
Belanja Tidak Terduga	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
Belanja Transfer	**89.109.143.500,00**	**87.804.236.826,01**	**87.806.724.737,21**	**87.894.537.115,02**	**87.934.825.153,83**	**87.979.975.298,34**
SURPLUS/DEFISIT	**(2.000.000.000,00)**	**(6.000.000.000,00)**	**(6.000.000.000,00)**	**(6.000.000.000,00)**	**(6.000.000.000,00)**	**(6.000.000.000,00)**

PEMBIAYAAN	**2.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**
Penerimaan Pembiayaan	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**
Penggunaan SiLPA	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
Pengeluaran Pembiayaan	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pembentukkan Dana Cadangan						
Penyertaan Modal	4.000.000.000,00	**0,00**				
SILPA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**

Sumber : Hasil Proyeksi Tim RPJMD

Pendapatan daerah diproyeksi mencapai Rp. 631.466.914.702,48 pada tahun 2025, meningkat menjadi Rp. 639.759.030.274,60 pada tahun 2026, pada tahun 2027 meningkat menjadi Rp. 646.615.607.320,52 pada tahun 2028 mencapai Rp 653.106.751.483,04 dan ditahun 2029 mengalami peningkatan mencapai 659.723.215.080,37. Komponen terbesar pendapatan daerah masih bersumber dari dana perimbangan, disusul lain-lain pendapatan daerah yang sah. Meskipun tetap diproyeksikan masih menjadi sumber pendapatan daerah terkecil. Belanja daerah diproyeksikan kurang lebih sama dengan proyeksi pendapatan daerah. Pada tahun 2025 sebesar Rp 633.466.914.702,48 meningkat menjadi Rp. 645.759.030.274,60 pada tahun 2026, sebesar Rp. 652.615.607.320,52 pada tahun 2027, sebesar Rp. 659.106.751.483,04 pada tahun 2028, dan di tahun 2029 mengalami peningkatan mencapai Rp. 665.723.215.080,37. Alokasi belanja terbesar diperuntukkan untuk belanja modal dan belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, akan tetapi sejak tahun 2027, diproyeksikan belanja pegawai terjadi penurunan. Hal ini untuk mengakomodir amanat dari Undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Hal ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk mengurangi belanja pegawai secara signifikan dan diperlukan Langkah Langkah strategis untuk dilaksanakan. Hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, selisihnya akan menunjukkan hasil estimasi pembiayaan daerah, baik pembiayaan surplus maupun pembiayaan defisit.

C. Permasalahan dan Isu Strategis

2.7 Permasalahan

1. Masih Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan

   Tingkat kemiskinan di Mamuju Tengah masih relatif tinggi ditandai dengan angka kemiskinan yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional akan tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Sulawesi Barat . Dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan kenaikan harga barang dan rendahnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya garis kemiskinan sehingga daya beli masyarakat utamanya masyarakat rentan miskin menjadi menurun. Tingkat ketimpangan pendapatan di Mamuju Tengah berfluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara relatif, ketimpangan Mamuju Tengah cukup tinggi ditandai dengan kontribusi PDRB Mamuju Tengah terhadap PDRB Sulawesi Barat yang rendah dibandingkan dengan kabupaten lain.

2. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia

   Kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mamuju Tengah masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sulawesi Barat dan

nasional. Faktor penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia ini antara lain karena keterbatasan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terpencil dan pedesaan, masih tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan menengah dan tinggi, ketersediaan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang belum merata dan masih di bawah standar, rendahnya literasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi sehingga banyak keluarga lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Kondisi ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dalam mewujudkan visi pembangunan yang menekankan pada peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah dan inovatif untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM, melalui perbaikan layanan dasar, penguatan kualitas guru dan tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

3. Masih rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat

   Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah adalah rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil (UMK) yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Rendahnya pendapatan masyarakat ditandai oleh PDRB per Kapita di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas perekonomian daerah, karena belum berkembangnya sektor industri manufaktur yang bernilai tambah tinggi. Sektor unggulan daerah seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang menyumbang lebih dari 45% terhadap struktur PDRB, masih didominasi oleh kegiatan tradisional berteknologi rendah, input produksi yang minim, serta keterbatasan akses terhadap pasar, pembiayaan, dan inovasi teknologi. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja di sektor-sektor tersebut masih rendah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar petani dan nelayan masih bergantung pada metode konvensional, dengan nilai produktivitas lahan dan hasil tangkapan yang fluktuatif dan tidak kompetitif. Selain itu, minimnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja juga berkontribusi terhadap rendahnya produktivitas kerja di berbagai sektor. Hal ini semakin diperburuk oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan vokasional, pendampingan usaha, serta permodalan bagi UMKM. Permasalahan rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat tidak hanya menjadi tantangan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap dimensi sosial, seperti meningkatnya kerentanan terhadap kemiskinan, migrasi tenaga kerja usia produktif, serta keterbatasan daya beli dan kesejahteraan keluarga

4. Masih rendahnya Daya Saing Daerah

   Daya saing daerah merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menarik

investasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini, daya saing Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rendah, baik dari aspek infrastruktur, kualitas SDM, efisiensi birokrasi, maupun kapasitas inovasi dan pengelolaan potensi unggulan daerah.

Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, kualitas pelayanan publik yang masih belum optimal, rendahnya kapasitas inovasi dan teknologi, kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja yang masih rendah, belum optimalnya pengelolaan potensi unggulan daerah menjadi indikator-indikator yang mencerminkan masih rendahnya daya saing Mamuju Tengah.

5. Tata Kelola Pemerintahan yang belum optimal

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, hingga saat ini, tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun kultural yang menghambat peningkatan kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi secara menyeluruh.

Permasalahan tata kelola tercermin dalam berbagai aspek diantaranya rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Meskipun telah terdapat beberapa inisiatif digitalisasi, namun implementasinya masih terbatas, belum terintegrasi antar perangkat daerah detra belum sepenuhnya menjangkau masyarakat luas khususnya di wilayah pedesaan dan terpencil. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pelayanan dan rendahnya kepuasan masyarakat. Selain itu kualitas perencanaan dan penganggaran yang belum berbasis kinerja sepenuhnya, masih ditemukan inkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, rendahnya keterpaduan antar-sektor, serta lemahnya mekanisme monitoring dan evaluasi. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Masih terbatasnya kapasitas dan integritas ASN dimana tingkat kompetensi, profesionalisme, serta kedisiplinan ASN belum merata di seluruh unit kerja. Pelatihan dan pengembangan SDM ASN juga belum sepenuhnya berbasis kebutuhan jabatan dan tantangan pelayanan publik yang dinamis. Kurangnya partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik, Mekanisme pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, maupun penilaian layanan publik masih bersifat formalistik dan belum berdampak nyata terhadap pengambilan kebijakan. Selain itu, keterbukaan informasi publik juga masih menghadapi hambatan dalam hal akses dan kualitas data.

Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mamuju Tengah belum mampu mendorong percepatan pembangunan secara efektif dan inklusif. Akibatnya,

kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah berpotensi menurun dan berbagai program strategis daerah berjalan kurang optimal.

6. Kualitas Infrastruktur Dasar Dan Wilayah Yang Belum Optimal

   Infrastruktur dasar memegang peranan penting dalam menunjang aktivitas sosial, ekonomi, serta pelayanan publik. Namun, hingga saat ini, kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta keterhubungan wilayah di Kabupaten Mamuju Tengah masih belum optimal, yang menghambat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   Beberapa aspek infrastruktur yang masih menjadi tantangan utama antara lain keterbatasan konektivitas antarwilayah. Meskipun telah dilakukan pembangunan dan peningkatan jalan, sebagian besar jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Akses antar kecamatan, serta konektivitas ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan layanan publik masih belum memadai, khususnya di wilayah pegunungan dan pelosok. Kedua, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang masih rendah. Cakupan layanan air bersih layak dan sanitasi layak masih terbatas hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama di desa-desa terpencil. Layanan listrik yang belum merata, meskipun rasio elektrifikasi meningkat, masih terdapat dusun yang belum mendapatkan pasokan listrik secara stabil. Kondisi ini menghambat aktivitas ekonomi dan pembelajaran terutama pada malam hari. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang belum memadai Masih terdapat kesenjangan distribusi fasilitas pendidikan dan kesehatan, baik dari segi jumlah, kondisi bangunan, maupun ketersediaan tenaga pendukung. Beberapa sekolah masih berada dalam kondisi fisik tidak layak, serta belum memiliki peralatan dan sarana pendukung yang memadai. Infrastruktur digital yang terbatas, akses terhadap internet dan jaringan telekomunikasi masih belum merata. Blank spot masih ditemukan di beberapa wilayah, membatasi akses masyarakat terhadap informasi, layanan digital, dan peluang ekonomi berbasis teknologi.

7. Degradasi lingkungan dan sumber daya alam

   Kabupaten Mamuju Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk hutan, lahan pertanian, perairan, dan tambang mineral. Namun, pemanfaatan yang belum terkendali dan tidak berkelanjutan telah menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem, yang jika tidak segera ditangani akan berdampak jangka panjang terhadap ketahanan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

   Berbagai indikasi degradasi lingkungan yang terjadi di Mamuju Tengah antara lain alih fungsi lahan dan deforestasi, Aktivitas pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertanian, termasuk ekspansi komoditas kelapa sawit dan pertambangan, telah menyebabkan penurunan tutupan hutan secara signifikan. Hal ini berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, terganggunya siklus hidrologi, dan meningkatnya risiko bencana

ekologis seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah dengan topografi curam. Kerusakan daerah aliran sungai (DAS), Banyak kawasan DAS di Mamuju Tengah mengalami kerusakan akibat sedimentasi, penebangan liar, dan aktivitas pertanian tanpa konservasi tanah dan air. Kerusakan DAS ini berkontribusi terhadap penurunan kualitas air, pendangkalan sungai, serta kerentanan terhadap banjir dan kekeringan musiman. Pencemaran lingkungan, kurangnya sistem pengelolaan limbah rumah tangga, industri, dan pertanian menyebabkan pencemaran air dan tanah, terutama di daerah pemukiman padat dan sekitar kawasan industri kecil. Hal ini berisiko terhadap kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup jangka panjang. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan, aktivitas tambang rakyat dan pertambangan skala kecil masih dilakukan tanpa memperhatikan kaidah konservasi lingkungan, yang mengakibatkan kerusakan lahan, pencemaran air, dan konflik pemanfaatan ruang. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum lingkungan memperburuk situasi ini. Minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, upaya pelestarian lingkungan masih terkendala oleh rendahnya literasi lingkungan masyarakat, keterbatasan insentif ekonomi hijau, serta belum terbangunnya budaya hidup bersih dan ramah lingkungan.

Dampak dari degradasi lingkungan ini sangat luas, mulai dari penurunan produktivitas lahan, meningkatnya risiko bencana alam, hingga penurunan kualitas hidup dan daya dukung lingkungan bagi pembangunan berkelanjutan. Jika tidak dikendalikan, degradasi ini akan mengancam ketahanan pangan, energi, dan air di masa mendatang.

8. Masih rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik

   Pelayanan publik yang berkualitas merupakan wujud nyata dari kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar warga negara serta indikator penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, hasil evaluasi dan aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rendah, baik dari aspek aksesibilitas, kualitas, maupun kecepatan pelayanan.

   Beberapa indikator yang mencerminkan masalah ini terlihat dari kualitas layanan dasar yang belum merata. Pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan jumlah dan kompetensi petugas pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai, waktu layanan yang tidak efisien dan birokratis, kesenjangan kualitas layanan antarwilayah, terutama antara pusat kecamatan dan desa terpencil. Minimnya integrasi dan digitalisasi layanan publik, upaya transformasi pelayanan berbasis digital belum berjalan optimal. Layanan masih banyak yang dilakukan secara manual dan belum terintegrasi dalam satu sistem informasi yang mudah diakses masyarakat. Hal ini menyebabkan antrean panjang, duplikasi data, dan

keterlambatan proses pelayanan. Tingkat transparansi dan akuntabilitas layanan yang masih rendah, masih terbatasnya mekanisme pengaduan, kurangnya informasi publik yang terbuka, serta tidak adanya standar layanan yang konsisten menimbulkan persepsi negatif terhadap layanan pemerintah. Banyak masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk memberikan umpan balik atau menyuarakan keluhan mereka secara efektif. Kurangnya budaya pelayanan prima di kalangan aparatur, sikap aparatur yang belum sepenuhnya melayani dengan profesional, cepat, dan ramah menjadi faktor penyumbang rendahnya kepercayaan masyarakat. Kualitas komunikasi, responsivitas terhadap keluhan, dan etika pelayanan masih menjadi catatan penting. Rendahnya hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Berdasarkan hasil SKM beberapa OPD strategis pada tahun terakhir, sebagian besar hanya memperoleh nilai dalam kategori "cukup". Ini menunjukkan masih adanya gap antara harapan masyarakat dan realisasi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah.

Permasalahan rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta terhambatnya upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

9. Ancaman disharmonisasi dibalik heterogenitas sosial-budaya di Mamuju Tengah

   Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah dengan tingkat heterogenitas sosial-budaya yang tinggi, terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, dan latar belakang kultural yang berbeda. Keberagaman ini merupakan potensi sosial yang besar jika dikelola dengan baik. Namun di sisi lain, keragaman yang tidak diiringi dengan penguatan kohesi sosial dan pemahaman lintas budaya yang inklusif berpotensi menimbulkan disharmonisasi sosial, yang dapat menghambat stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

   Masih rendahnya integrasi sosial di antara kelompok masyarakat. Interaksi antar-etnis, antar-agama, dan antarwilayah masih cenderung bersifat eksklusif. Kehidupan sosial masih banyak dibatasi oleh sekat-sekat kultural dan primordial, sehingga kerja sama lintas komunitas dalam berbagai bidang (ekonomi, pendidikan, organisasi masyarakat) belum optimal terbangun. Potensi konflik horizontal di tingkat lokal. Terdapat sejumlah catatan mengenai ketegangan sosial di tingkat desa dan kecamatan yang dipicu oleh perbedaan pandangan, batas wilayah adat, atau distribusi sumber daya. Konflik ini meskipun berskala kecil, menunjukkan adanya kerentanan terhadap perpecahan dan gangguan harmoni sosial jika tidak ditangani secara dini. Minimnya ruang dan program penguatan toleransi serta dialog antarbudaya. Belum terdapat forum yang secara reguler mendorong komunikasi antar komunitas, baik melalui kegiatan budaya, pendidikan multikultural, maupun media lokal.

Akibatnya, pemahaman terhadap nilai-nilai toleransi dan kerukunan belum menyatu secara kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Persebaran pembangunan yang belum merata antarkelompok dan wilayah. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan publik, dan kesempatan ekonomi dapat menimbulkan rasa ketidakadilan antar kelompok sosial dan etnis, yang pada gilirannya dapat memicu kecemburuan sosial dan memperkuat sekat-sekat identitas.

Jika kondisi ini tidak segera dikelola secara bijak dan berkelanjutan, maka potensi konflik sosial, intoleransi, dan melemahnya solidaritas sosial dapat meningkat, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah

10. Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah

Kapasitas fiskal daerah merupakan indikator penting dalam menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Namun demikian, kapasitas fiskal Kabupaten Mamuju Tengah hingga saat ini masih tergolong rendah, ditandai oleh tingginya ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat dan rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah hanya sekitar 4–6%, menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap pembiayaan pembangunan sangat kecil. Sebagian besar struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pemerintah pusat, sehingga menjadikan keuangan daerah sangat rentan terhadap perubahan kebijakan fiskal nasional.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kapasitas fiskal di Mamuju Tengah antara lain Basis pajak dan retribusi daerah yang sempit. Aktivitas ekonomi masyarakat masih didominasi oleh sektor informal dan pertanian subsisten yang kurang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Potensi pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta retribusi jasa umum dan jasa usaha belum tergarap secara maksimal. Kelemahan sistem perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah. Masih terbatasnya sistem pemetaan potensi pajak, lemahnya penegakan regulasi perpajakan daerah, serta rendahnya efektivitas pemungutan pajak dan retribusi menjadi hambatan dalam optimalisasi penerimaan daerah. Keterbatasan inovasi dalam peningkatan PAD. Pemerintah daerah belum secara optimal mengembangkan strategi kreatif dan kolaboratif dalam menggali potensi ekonomi lokal yang dapat menjadi sumber PAD baru, seperti sektor pariwisata, perizinan usaha, pengelolaan aset daerah, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah. Tingkat kepatuhan dan partisipasi wajib pajak yang masih rendah. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, ditambah dengan lemahnya sistem

informasi pembayaran yang transparan dan mudah diakses, menyebabkan rendahnya realisasi penerimaan.

Akibat dari rendahnya kapasitas fiskal ini, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang sempit untuk inovasi pembangunan, bergantung pada alokasi pusat yang bisa berubah sewaktu-waktu, dan terbatas dalam mendanai program strategis yang memerlukan fleksibilitas anggaran.

2.8 Isu Strategis

2.8.1 Isu Global

a. Perubahan Paradigma Pembangunan Global
Paradigma pembangunan global bergeser dari fokus pertumbuhan ekonomi semata menuju pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kesejahteraan manusia. Tantangan global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, krisis pangan-energi, dan degradasi lingkungan mendorong penerapan prinsip **Sustainable Development Goals (SDGs)** yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Arah baru pembangunan menekankan transisi energi bersih, ekonomi hijau, inklusi sosial, inovasi teknologi, serta ketahanan terhadap risiko global, sehingga keberhasilan pembangunan diukur dari kualitas hidup, pemerataan, dan kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

b. Kebijakan Pro-Lingkungan yang memperhatikan Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung.
Perubahan iklim global menimbulkan ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan daerah melalui peningkatan suhu, cuaca ekstrem, kenaikan muka air laut, dan degradasi ekosistem. Untuk itu, pembangunan harus memperhatikan daya dukung (kemampuan wilayah menyediakan sumber daya secara berkelanjutan) dan daya tampung (kemampuan menyerap limbah dan tekanan aktivitas manusia).
Kebijakan pro-lingkungan diarahkan untuk mengintegrasikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim ke semua sektor pembangunan, melindungi dan merehabilitasi ekosistem penting, mendorong penggunaan energi terbarukan, menata ruang berbasis lingkungan, serta meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana iklim. Langkah ini memastikan pertumbuhan ekonomi daerah tetap selaras dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang.

c. Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Kawasan Lebih Hijau
Pembangunan infrastruktur konektivitas kawasan yang lebih hijau merupakan bagian dari tren global yang menggabungkan kebutuhan peningkatan akses dan konektivitas wilayah dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. Konsep ini menekankan pengembangan jaringan transportasi, energi, dan utilitas yang rendah emisi, hemat energi, serta meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Infrastruktur hijau mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan air berkelanjutan, dan desain yang adaptif terhadap perubahan iklim.

Dalam konteks pembangunan daerah, pendekatan ini mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transportasi publik berbasis listrik, jalur logistik efisien, dan integrasi tata ruang yang mempertahankan kawasan lindung. Pembangunan konektivitas hijau juga mendorong efisiensi ekonomi wilayah, memperkuat integrasi pasar, dan meningkatkan akses masyarakat ke pusat pertumbuhan tanpa mengorbankan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan dan menjadi kunci bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan serta berketahanan iklim.

d. Penggunaan Sistem Keuangan Digital

Penggunaan sistem keuangan digital menjadi salah satu tren dan isu global yang mempengaruhi arah pembangunan, termasuk di tingkat daerah. Transformasi digital dalam sektor keuangan mencakup pemanfaatan teknologi seperti **pembayaran digital, mobile banking, e-wallet, fintech, blockchain, dan sistem transaksi tanpa tunai** untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sistem keuangan digital memperluas inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil, dengan mempermudah akses modal, pembayaran, dan tabungan melalui perangkat digital. Di sisi lain, penerapannya mendorong transparansi pengelolaan keuangan pemerintah, mempercepat transaksi, serta memperkuat integritas fiskal melalui pencatatan real-time.

Bagi pemerintah daerah, integrasi keuangan digital dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), mempercepat penyaluran bantuan sosial, mempermudah pembayaran pajak dan retribusi secara daring, serta meningkatkan akuntabilitas. Namun, implementasinya perlu dibarengi dengan penguatan literasi digital, keamanan siber, dan infrastruktur jaringan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan.

2.8.2 Isu Nasional

a. Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Kerangka Superhub Ekonomi Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan salah satu agenda strategis nasional yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga sebagai **superhub ekonomi** yang mengintegrasikan berbagai sektor unggulan. Konsep superhub ini dirancang untuk menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru yang menghubungkan rantai pasok nasional dan global, mengembangkan industri berteknologi tinggi, memperkuat ekonomi hijau, serta menjadi model kota cerdas (*smart city*) dan berkelanjutan.

Sebagai isu strategis dalam perencanaan pembangunan, IKN memiliki peran penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), memicu investasi di sektor infrastruktur, energi terbarukan, transportasi modern, dan kawasan industri ramah lingkungan. IKN juga dirancang untuk menjadi pusat riset, inovasi, dan ekonomi digital, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional di tingkat global.

Bagi daerah-daerah penyangga, termasuk wilayah Sulawesi dan Kalimantan, keberadaan IKN membuka peluang integrasi ekonomi, peningkatan arus perdagangan, pengembangan logistik, serta penyerapan tenaga kerja. Namun, pengembangannya memerlukan koordinasi lintas wilayah, pengelolaan lingkungan yang ketat, dan penguatan konektivitas agar fungsi superhub ekonomi dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi nasional

b. Bonus Demografi dengan SDM Berkualitas

Bonus demografi merupakan kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif, sehingga secara potensial dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia diproyeksikan menikmati puncak bonus demografi pada periode 2030–2040, yang jika dikelola dengan tepat dapat menjadi "jendela peluang" untuk meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat daya saing, dan mendorong transformasi ekonomi.

Sebagai isu strategis nasional dalam perencanaan pembangunan, bonus demografi hanya akan memberikan manfaat optimal jika didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Hal ini mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan, keterampilan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, kesehatan masyarakat yang prima, serta karakter SDM yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global.

Dalam konteks RPJMN dan RPJMD, pemanfaatan bonus demografi dengan SDM berkualitas memerlukan sinergi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kewirausahaan, termasuk penguatan literasi digital serta penguasaan teknologi. Tanpa dukungan kualitas SDM yang memadai, bonus demografi justru berisiko menjadi beban pembangunan akibat meningkatnya pengangguran, ketimpangan, dan masalah sosial. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM unggul menjadi kunci untuk mengubah momentum bonus demografi menjadi kekuatan pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

c. Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) Lebih Cepat

Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih cepat merupakan salah satu isu strategis nasional yang bertujuan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah di Indonesia. KTI, yang mencakup wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara, memiliki potensi besar di sektor perikanan, pertanian, pertambangan, energi terbarukan, pariwisata, serta keanekaragaman hayati. Namun, potensi ini belum dioptimalkan secara maksimal akibat keterbatasan infrastruktur, rendahnya konektivitas, dan kualitas sumber daya manusia yang belum merata.

Akselerasi pembangunan KTI diarahkan pada penguatan konektivitas antarwilayah, penyediaan infrastruktur dasar dan digital, peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi industri, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pasar nasional dan global. Kebijakan ini juga menekankan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan

pemerataan akses layanan publik. Dalam kerangka perencanaan nasional dan daerah, percepatan pembangunan KTI memiliki peran strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional, mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan baru, serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Implementasi yang efektif memerlukan sinergi lintas sektor, investasi strategis, dan dukungan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat maupun daerah.

d. Hilirisasai Industri yang mengedepankan prinsip Green Economy dan Blue Economy

Hilirisasi industri merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri sebelum dipasarkan. Dalam konteks isu strategis nasional, hilirisasi kini diarahkan agar sejalan dengan prinsip *Green Economy* (ekonomi hijau) dan *Blue Economy* (ekonomi biru), guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip *Green Economy* menekankan pada penggunaan sumber daya alam secara efisien, pemanfaatan energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Sementara itu, *Blue Economy* fokus pada pemanfaatan berkelanjutan sumber daya kelautan dan perairan, seperti perikanan, pariwisata bahari, energi laut, dan industri maritim, tanpa merusak ekosistem laut.

Arah kebijakan ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi dari berbasis ekspor bahan mentah menjadi industri bernilai tambah tinggi, seperti pengolahan mineral, pertanian, perikanan, dan hasil laut, dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan. Penerapan hilirisasi yang berbasis ekonomi hijau dan biru tidak hanya meningkatkan daya saing nasional, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekosistem darat dan laut, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Dalam perencanaan pembangunan, integrasi hilirisasi dengan prinsip Green Economy dan Blue Economy menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan inklusif, daya saing global, dan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.

2.8.3 Isu Regional

a. Sulawesi sebagai Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA

Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan industri berbasis sumber daya alam (SDA) karena sejumlah faktor kunci: (i)Keanekaragaman Sumber Daya Alam: Sulawesi kaya akan sumber daya alam seperti tambang mineral (nikel, emas, tembaga), kehutanan yang melimpah, serta potensi pertanian yang subur. Keanekaragaman ini memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan industri berbasis SDA di pulau tersebut. (ii) Kawasan Logistik dan Transportasi: Sulawesi memiliki posisi geografis yang strategis di antara kepulauan Indonesia. Dengan infrastruktur transportasi yang berkembang, termasuk pelabuhan laut dan bandara internasional, Sulawesi dapat menjadi pusat logistik yang penting untuk

distribusi barang dan jasa di kawasan Nusantara. (iii) Potensi Industri Pengolahan: SDA yang melimpah memberikan peluang besar untuk pengembangan industri pengolahan di Sulawesi. Misalnya, nikel dan tembaga dapat diolah menjadi logam, kayu dapat dijadikan bahan bangunan dan furniture, sementara hasil pertanian seperti kakao dan kelapa dapat diolah menjadi produk olahan bernilai tambah tinggi. (iv) Investasi dan Pengembangan Infrastruktur: Untuk mendukung peran Sulawesi sebagai superhub ekonomi dan pusat industri berbasis SDA, diperlukan investasi besar dalam pengembangan infrastruktur. Ini termasuk pembangunan jaringan jalan dan rel, perluasan pelabuhan dan bandara, serta penyediaan energi dan air bersih yang memadai. (v) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inisiatif Pemerintah: Pemerintah dapat mempercepat pertumbuhan industri berbasis SDA di Sulawesi melalui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK menyediakan insentif pajak, fasilitas infrastruktur, dan kemudahan investasi untuk menarik investor domestik dan asing ke daerah tersebut. (vi) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia: Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan juga penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi Sulawesi. Tenaga kerja yang terampil dan terdidik akan mendukung pertumbuhan industri dan meningkatkan daya saing regional.

Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya, meningkatkan infrastruktur, dan mendorong investasi serta pengembangan industri berbasis SDA, Sulawesi memiliki potensi besar untuk menjadi penunjang superhub ekonomi Nusantara dan berkontribusi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

b. Konektivitas Antar Wilayah (Darat, Laut dan Udara)

Terhubungnya wilayah dalam suatu negara disebut dengan konektivitas antar wilayah. Konektivitas antar wilayah merupakan aspek yang sangat penting dalam perkembangan suatu negara. Misalnya Indonesia meningkatkan konektivitas antar wilayah dengan cara membangun jalan, jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, dan pembangunan angkutan massal seperti MRT. Umumnya pembangunan wilayah mengalami ketimpangan, di mana pembangunan di kota berkembang lebih pesat dibanding pembangunan di daerah. Sehingga dibutuhkan konektivitas antar wilayah untuk memeratakan pembangunan tersebut.

Manfaat konektivitas antar wilayah dapat dilihat sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas wilayah. Manfaat pertama dari konektivitas antar wilayah adalah kemudahan akses dari suatu wilayah lainnya. Membuat suatu wilayah yang awalnya terjamah menjadi lebih mudah didatangi. Dengan peningkatan aksesibilitas suatu wilayah, pengembangan dari wilayah tersebut dapat dilakukan demi kesejahteraan masyarakatnya.
2. Kemudahan akses sumber daya. Konektivitas daerah memudahkan akses sumber daya maupun berbagai produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Barang maupun sumber daya dapat dikirim dari tempat asalnya ke wilayah lain.

3. Peningkatan pelayanan umum. Konektivitas daerah dapat meningkatkan pelayanan umum masyarakat. Misalnya pasokan air bersih, aliran listrik, penanggulangan sampah dan limbah, pendidikan, kantor imigrasi, pembuatan surat izin mengemudi, kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), keamanan, juga penjara. Pemerataan pelayanan umum terutama di bidang pendidikan dapat menciptakan generasi muda bangsa yang terdidik. Pemerataan pelayanan umum di bidang kesehatan, memberikan masyarakat kemudahan untuk berobat saat sakit, mengalami kecelakaan, maupun akan melahirkan.
4. Peningkatan investasi. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, peluang pembukaan bisnis menjadi lebih tinggi. Perkembangan bisnis yang bagus dalam suatu wilayah menarik para investor untuk memberikan modal, hal ini jelas dapat memajukan ekonomi masyarakat. Kerjasama Regional Sulawesi
5. Peningkatan kesempatan kerja. Dengan berkembangnya bisnis dan ketersediaan investor, lapangan kerja baru akan tersedia. Peningkatan kesempatan kerja bisa menekan angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan perkapita.
6. Pengembangan infrastruktur untuk konektivitas antar wilayah juga membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal tersebut jelas menjadi peluang yang besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
7. Peningkatan sarana dan prasarana. Dengan adanya konektivitas antar wilayah, pembangunan sarana dan prasarana akan lebih cepat karena mudahnya transportasi dan juga dana yang tersedia lebih besar. Mudahnya akses ke suatu wilayah, membuat turis dalam negeri walaupun luar negeri bisa berkunjung dengan aman dan nyaman ke berbagai tempat wisata.
8. Penurunan konflik antar wilayah. Konektivitas antar wilayah dapat menurunkan konflik antar wilayah, baik konflik antar warga maupun konflik pembangunan antar pemerintah suatu wilayah. Hal tersebut karena konektivitas antarwilayah membuat wilayah-wilayah saling bekerja sama untuk memajukan daerah bukannya saling berselisih.

c. Kebencanaan dan Lingkungan Hidup

Sulawesi Barat memiliki karakteristik geografis, geologis, dan klimatologis yang membuatnya rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, cuaca ekstrem, dan abrasi pantai**.** Posisi wilayah yang berada di zona sesar aktif Palu-Koro serta kondisi topografi yang berbukit-bukit meningkatkan risiko gempa bumi dan longsor. Selain itu, perubahan iklim global memicu intensitas hujan ekstrem yang memperbesar potensi banjir bandang dan kerusakan infrastruktur, khususnya di daerah rawan.

Dari sisi lingkungan hidup, Sulawesi Barat menghadapi tantangan degradasi hutan, konversi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas tanah, pencemaran perairan, dan berkurangnya keanekaragaman hayati. Tekanan aktivitas manusia seperti pertambangan, perkebunan, dan pembangunan infrastruktur seringkali belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan

daya tampung lingkungan, sehingga berisiko memperparah kerentanan bencana.

Sebagai isu strategis regional, pengelolaan kebencanaan dan lingkungan hidup di Sulawesi Barat memerlukan kebijakan terpadu yang mencakup: penguatan mitigasi dan adaptasi bencana, penataan ruang berbasis risiko, rehabilitasi dan konservasi ekosistem, pengendalian pemanfaatan lahan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan. Langkah ini penting untuk melindungi kehidupan dan aset daerah, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta mendukung pembangunan wilayah yang tangguh dan berkelanjutan.

2.8.4 Isu Strategis Pembangunan Daerah Mamuju Tengah

a. Pemenuhan Infrastruktur Dasar

Pemenuhan infrastruktur dasar merupakan salah satu isu strategis utama di Kabupaten Mamuju Tengah karena keberadaannya menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi daerah. Sebagai daerah yang relatif baru berkembang, sebagian wilayah Mamuju Tengah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, perumahan layak huni, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya konektivitas antarwilayah, terbatasnya akses pelayanan publik, serta kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Tantangan dalam pemenuhan infrastruktur dasar di Mamuju Tengah antara lain keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang mempersulit pembangunan jaringan transportasi dan utilitas, serta belum meratanya distribusi pembangunan antar-kecamatan. Hal ini menuntut strategi perencanaan yang terarah, integratif, dan berkelanjutan.

Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas infrastruktur secara merata, pembangunan jalan penghubung pusat produksi dengan pasar, penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak, perluasan jaringan listrik, serta pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan dan kesehatan. Dengan pemenuhan infrastruktur dasar yang memadai, diharapkan Mamuju Tengah dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

b. Produktivitas Ekonomi Melalui Penerapan Iptekin

Peningkatan produktivitas ekonomi melalui penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN) merupakan isu strategis penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah dalam mendorong daya saing daerah dan penguatan sektor-sektor unggulan. Sebagai daerah dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan, Mamuju Tengah membutuhkan pemanfaatan teknologi tepat guna, inovasi proses produksi, serta pengembangan riset terapan untuk meningkatkan nilai tambah dan efisiensi usaha masyarakat.

Saat ini, sebagian besar pelaku usaha dan petani masih mengandalkan metode konvensional dengan produktivitas yang terbatas. Keterbatasan akses terhadap teknologi modern, rendahnya literasi digital, minimnya fasilitas riset, serta terbatasnya kemitraan dengan sektor industri menjadi tantangan utama. Tanpa penerapan IPTEKIN, potensi sumber daya alam yang besar tidak akan optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

c. Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau dan Transformasi Digital

Pengembangan ekonomi biru, ekonomi hijau, dan transformasi digital menjadi isu strategis penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah karena ketiganya dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, termasuk perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan hasil laut, pariwisata bahari, serta energi terbarukan berbasis laut. Dengan garis pantai yang panjang dan sumber daya laut melimpah, Mamuju Tengah memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor ini, asalkan dikelola dengan memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir.

Ekonomi hijau mengedepankan prinsip pembangunan rendah emisi, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Di Mamuju Tengah, penerapan ekonomi hijau dapat dilakukan melalui pertanian organik, pengelolaan perkebunan berkelanjutan, rehabilitasi lahan kritis, serta pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Pendekatan ini tidak hanya menjaga daya dukung lingkungan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah produk daerah.

Transformasi digital menjadi pengungkit utama untuk mempercepat inovasi dan meningkatkan efisiensi berbagai sektor. Pemanfaatan teknologi digital di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, layanan publik, dan pendidikan dapat memperluas akses pasar, memperbaiki manajemen usaha, serta meningkatkan kualitas layanan pemerintah. Namun, percepatan transformasi digital memerlukan penguatan infrastruktur telekomunikasi, literasi digital masyarakat, dan keamanan siber.

Dengan sinergi ketiga strategi ini, Mamuju Tengah dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ramah lingkungan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan global.

d. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan

Penguatan peran wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan merupakan isu strategis penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mamuju Tengah memiliki wilayah perkotaan yang menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan jasa, sementara wilayah perdesaan menjadi basis produksi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kelautan. Namun, keterkaitan ekonomi antara keduanya masih belum optimal akibat keterbatasan infrastruktur, akses pasar, dan distribusi layanan publik.

Pendekatan pembangunan yang menjadikan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan bertujuan menciptakan keterkaitan fungsional. Perkotaan berperan sebagai pusat layanan, industri pengolahan, pemasaran, dan distribusi, sedangkan perdesaan menyediakan bahan baku, tenaga kerja, serta destinasi wisata berbasis alam dan budaya. Hubungan yang saling menguatkan ini akan mempercepat aliran barang, jasa, informasi, dan investasi.
Arah kebijakan meliputi pengembangan infrastruktur transportasi penghubung antarwilayah, pembangunan pasar dan sentra distribusi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, penguatan sektor UMKM, serta pengembangan layanan publik yang merata. Dengan strategi ini, diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi yang seimbang, penyerapan tenaga kerja yang lebih luas, dan terwujudnya integrasi ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Mamuju Tengah.

e. Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Ketahanan bencana dan perubahan iklim merupakan isu strategis yang sangat relevan bagi Kabupaten Mamuju Tengah mengingat wilayah ini memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, dan abrasi pantai. Secara geologis, Mamuju Tengah berada dekat zona sesar aktif dan memiliki kondisi topografi yang memicu risiko longsor, sementara perubahan iklim meningkatkan frekuensi serta intensitas hujan ekstrem yang memicu banjir dan kerusakan infrastruktur.
Dampak perubahan iklim juga memengaruhi sektor pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat, termasuk penurunan produktivitas lahan, kerusakan ekosistem pesisir, serta meningkatnya ancaman penyakit berbasis lingkungan. Kondisi ini memerlukan langkah adaptasi dan mitigasi yang terintegrasi ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

f. Dukungan Terhadap Superhub Ekonomi IKN
Dukungan terhadap pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai *superhub* ekonomi menjadi isu strategis penting bagi Kabupaten Mamuju Tengah mengingat posisi geografisnya yang relatif dekat dengan Kalimantan dan potensi integrasinya dalam rantai pasok IKN. Konsep *superhub* IKN mencakup pengembangan pusat pertumbuhan baru yang terhubung dengan jaringan logistik, perdagangan, industri, energi, serta pusat riset dan inovasi tingkat nasional.
Bagi Mamuju Tengah, keberadaan IKN membuka peluang besar untuk memperluas pasar produk unggulan daerah seperti hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan olahan makanan, sekaligus menarik investasi pada sektor logistik, jasa, dan infrastruktur pendukung. Selain itu, penguatan konektivitas transportasi laut, darat, dan udara antara Mamuju Tengah dan Kalimantan menjadi kunci untuk memastikan keterlibatan aktif daerah dalam mendukung pasokan barang, tenaga kerja, dan layanan ke IKN

BAB III
VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi

Visi adalah gambaran tentang kondisi masa depan Mamuju Tengah yang hendak diwujudkan pada akhir periode 2025-2029. Berdasarkan analisis isu strategis daerah, penyerapan aspirasi masyarakat, dan keselarasan dengan rancangan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah, maka rumusan visi kami adalah sebagai berikut.

MAMUJU TENGAH DAERAH AGROPOLITAN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN

Pada rumusan visi ini terkandung makna bahwa pada tahun 2029 wilayah Mamuju Tengah dicirikan sebagai daerah agropolitan, dalam arti sebuah daerah pertanian/ perkebunan, yang di dalamnya berkembang Kota Terpadu Mandiri. Kota Terpadu Mandiri tersebut menempatkan Tobadak sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan yang memiliki kecukupan infrastruktur untuk ativitas ekonomi, sosial, dan budaya secara terpadu. Kota Terpadu Mandiri di Tobadak terintegrasi dengan pertumbuhan wilayah Topoyo dan Budong-Budong dan saling mendukung dengan pertumbuhan wilayah Pangale dan Karossa dalam basis ekonomi pertanian dan perikanan

Maju adalah kondisi masyarakat Mamuju Tengah pada tahun 2029 yang sehat dan cerdas sehingga mampu berperan sebagai sumberdaya manusia yang berkualitas dalam mendukung perkembangan daerah agropolitan. Maju juga merupakan gambaran tentang terpenuhinya infrastruktur daerah yang mendukung koneksivitas wilayah, pelayanan dasar, aktivitas perekonomian.

Sejahtera adalah kondisi perekonomian daerah yang mampu menjamin pendapatan masyarakat yang tinggi, merata, dan terlindungi dari kerentanan sosial-ekonomi. Sejahtera juga bermakna terjaminnya ketenteraman dan ketertiban umum dalam suasana interaksi antar ummat beragama yang rukun, kebudayaan yang maju, partisipasi pemuda yang kreatif, dan relasi gender yang setara.

Berkelanjutan adalah kondisi alam dan lingkungan Mamuju Tengah yang lestari dan didalam perkembangannya terjalin keseimbangan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Berkelanjutan juga bermakna terwujudnya tata kelola yang berintegritas serta menjamin kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah..

3.1.2 Misi

Misi dalam RPJMD ini diartikan sebagai serangkaian upaya umum dalam mewujudkan visi. Misi ini bersumber dari misi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta diselaraskan dengan misi RPJPD Kabupate Mamuju Tengah 2025-2045. Sebagaimana ditekankan dalam RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah, periode 2025-2029 adalah tahap perkuatan transformasi. Misi ini juga dikenal dengan istilah **“ASTA KUAAT”** yang secara etimologis “Asta” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti “delapan” dan “KUAAT”yang merupakan akronim nama dari bupati dan wakil

bupati terpilih yakni ARSAL ARAS TAMMAUNI dan ASKARY ANWAR yang juga mengandung filosofi delapan kekuatan yang menjadi inspirasi dalam mencapai Visi Mamuju Tengah lima tahun ke depan. Berdasarkan hal itu maka misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029 adalah sebagai berikut.

(1) Memperkuat transformasi sosial

Misi ini diarahkan pada terwujudnya manusia dan masyarakat Mamuju Tengah yang sehat dan panjang umur, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dari kemiskinan dan kerentanan. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dan merata, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial untuk kelompok rentan.

(2) Memperkuat transformasi ekonomi

Misi ini diarahkan pada terwujudnya perekonomian daerah yang memiliki produktivitas tinggi melalui penerapan iptekin dalam pengelolaan potensi dan sumberdaya perekonomian yang dimiliki oleh Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas ekonomi sektor pertanian, perikanan, peternakan, industri, pariwisata dan ekonomi kreatif; pengembangan ekonomi hijau dan ekonomi biru; transformasi digital dalam mendukung aktivitas perekonomian; integrasi ekonomi daerah dengan ekonomi wilayah yang lebih luas terutama bila IKN di Kalimatan telah berkembang; dan pengembangan perkotaan berbasis agropolitan dan perdesaan berbasis agribisnis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

(3) Memperkuat transformasi tata kelola

Misi ini diarahkan pada terwujudnya tata kelola berintegritas sesuai aspirasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintahan di Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan produk hukum daerah yang harmonis, pelayanan publik yang sesuai standar, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan akuntabilitas kinerja yang baik.

(4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro

Misi ini diarahkan pada terwujudnya kondisi daerah yang aman untuk semua dan tersedianya kebutuhan pokok masyarakat secara terjangkau. Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum, mewujudkan kondisi sosial politik dan demokrasi substansial, dan menjaga stabilitas ekonomi makro daerah terutama pengendalian inflasi dan ketersediaan barang penting dan pokok bagi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

(5) Memelihara ketahanan sosia budaya dan ekologi

Misi ini diarahkan pada terwujudnya harmoni sosial-budaya dalam bingkai kearifan lokal *Lalla Tassisara* serta ketahanan ekologi dalam menghadapi berbagai kerentanan akibat bencana dan perubahan iklim. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat, kebudayaan yang maju dan saling mengapresiasi, kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta lingkungan hidup berkualitas, ketahanan air, ketahanan pangan, serta resiliensi terhadap bencana dan dampak perubahan iklim

(6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata

Misi ini bertujuan pada terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah. Misi ini mencakup upaya umum dalam mendorong perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan yang seimbang antar kecamatan, antara wilayah perkebunan dengan wilayah pesisir, antara pedalaman dengan pusat perkotaan, dan antara sentra agropolitan dengan sentra agribisnis/agrikultur.

(7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas

Misi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur serta sarana prasarana yang berkualitas. Misi ini mencakup upaya umum dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur wilayah terutama jalan/jembatan dan sarana-prasarana pelayanan dasar terutama untuk pendidikan dan kesehatan, serta sarana prasarana pusat pertumbuhan terutama pengembangan agropolitan, agroindustri, agribisnis, dan agrikultur.

(8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah

Misi ini diarahkan pada terwujudnya kesinambungan antar tahun dan antar tahapan pembangunan di Mamuju Tengah. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, kapasitas fiskal, dan daya saing investasi daerah

Rumusan misi diatas selanjutnya dirumuskan keterkaitannya dengan setiap pokok Visi, dengan maksud untuk menunjukkan upaya yang hendak dilakukan untuk mencaoai kondisi yang diharapkan dalam lima tahun ke depan. Keterkaitan ini juga penting untuk menunjukkan dukungan Misi terhadap pencapaian Visi.

Tabel 3. 1 Keterkaitan Misi dengan Pokok Visi Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

No	Misi	Pokok Visi
1	Memperkuat transformasi sosial	Maju
2	Memperkuat transformasi ekonomi	Sejahtera
3	Memperkuat transformasi tata kelola	Maju
4	Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro	Sejahtera
5	Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	Berkelanjutan
6	Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata	Maju
7	Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas	Maju
8	Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah	Berkelanjutan

3.1.3 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045

Keselarasan antara Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan hal yang sangat krusial dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan daerah. RPJPD berfungsi sebagai panduan strategis jangka panjang

yang menetapkan tujuan besar pembangunan selama 20 tahun, sedangkan RPJMD menjadi instrumen operasional lima tahunan yang mengarahkan kebijakan dan program kepala daerah terpilih.

Visi jangka panjang Kabupaten Mamuju Tengah sesuai dengan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 yaitu:

Mamuju Tengah Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan

Berdasarkan Visi RPJPD tersebut, terlihat Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran pembangunan tahap pertama dalam RPJPD 2025-2029 telah selaras. Keselarasan antara Visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Keselarasan Visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 denga Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045	Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029
Mamuju Tengah Maju, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan	Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan

Jika dilihat pada Visi jangka panjang daerah “Berdaya Saing” kondisi Kabupaten Mamuju Tengah yang memiliki daya saing ekonomi, daya saing SDM, daya saing infrastruktur, dan daya saing investasi yang tinggi dimana Daya saing ekonomi bertumpu pada agroindustri sawit dan sektor ekonomi lainnya yang akan mewujudkan ciri ekonomi hijau, berketahanan pangan, memiliki rasio kewirausahaan yang memadai. Daya saing SDM diindikasikan oleh kompetensi SDM yang tinggi dalam mengelola potensi daerah serta kemampuan literasi digital pada beragam etnis yang hidup di Mamuju Tengah. Daya saing infrastruktur diindikasikan oleh kualitas layanan infrastruktur yang tinggi, ketahanan energi dan ketahanan air. Daya saing investasi diindikasikan oleh ketertiban dan ketenteraman yang terpelihara memiliki substansi yang sama dengan “Sejahtera” pada Visi jangka menengah yaitu tetap menekankan pada kondisi perekonomian daerah yang mampu menjamin pendapatan masyarakat yang tinggi, merata, dan terlindungi dari kerentanan sosial-ekonomi dimana Sejahtera juga bermakna terjaminnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan daerah dalam suasana interaksi antar ummat beragama yang rukun serta interaksi antar kebudayaan yang saling mengapresiasi, yang di dalamnya terbuka ruang partisipasi bagi seluruh lapisan umur dan relasi gender.

Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 denga Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 tetap menggunakan kaidah yang sama dengan tetap berjumlah 8 (delapan misi) sesuai arahan transformasi

pembangunan. Adapun keselarasan antara Misi RPJPD dengan Misi RPJMD sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Keselarasan Misi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Misi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045	Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029
(1) Mewujudkan Transformasi Sosial	(1) Memperkuat transformasi sosial
(2) Mewujudkan transformasi ekonomi	(2) Memperkuat transformasi ekonomi
(3) mewujudkan transformasi tata kelola	(3) Memperkuat transformasi tata kelola
(4) mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	(4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro
(5) memelihara ketahanan sosial-budaya dan ekologi	(5) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
(6) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	(6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata
(7) memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	(7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas
(8) meningkatkan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	(8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah

3.1.4 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029

Sebagai bagian dari Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju Tengah perlu memastikan keselarasan pembangunan untuk mendukung capaian pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat serta sebagai amanat proses perencanaan yang terintegrasi dari pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Adapun keselarasan Visi antara RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Keselarasan Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029
Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera	Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan

Keselarasan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 terlihat pada visi “Maju” dan “Sejahtera” dimana kedua visi berorientasi pada pencapaian “posisi relatif” yang lebih baik. Visi Maju pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat danKabupaten Mamuju Tengah menekankan pada kemajuan dalam berbagai aspek, yang mencakup bidang

ekonomi, infrastruktur teknologi, lingkungan dan tata kelola pemerintahan sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.

Keselarasan misi antara RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 5 Keselarasan Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029
(1) Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan	(2) Memperkuat transformasi ekonomi
	(8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah
(2) Mempercepat pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	(1) Memperkuat transformasi sosial
(3) Membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	(1) Memperkuat transformasi sosial
(4) Membangun infrastruktur konektivitas, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup	(6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata
	(7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas
	(5) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
(5) Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta mewujudkan pelayanan dasar yanng berkualitas	(3) Memperkuat transformasi tata kelola
	(4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro

3.1.5 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Sebagai amanat perencanaan nasional yang terintegrasi secara top-down, penting untuk memastikan visi dan misi Kabupaten Mamuju Tengah mendukung tujuan pembangunan nasional. Keselarasan Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dengan Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagi berikut:

Tabel 3. 6 Keselarasan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Visi dan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029

Visi RPJM Nasional Tahun 2025-2029	Visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Mamuju Tengah Daerah Agropolitan Maju, Sejahtera, Dan Berkelanjutan

Keselarasan visi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah dengan RPJM Nasional terlihat pada pokok visi “Maju”. Visi “Maju” pada RPJM Nasional lebih menekankan pada pembangunan bangsa dengan fondasi yang kuat untuk mencapai negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat. Sedangkan Visi Maju pada RPJMD Mamuju Tengah yang menekankan pada kondisi manusia dan

masyarakat Mamuju Tengah yang sehat dan cerdas serta menguasai iptekin sehingga mampu berperan sebagai aktor pembangunan yang unggul, gambaran tentang kondisi terpenuhinya infrastruktur dasar berupa jalan yang semakin berkualitas dan fasilitas penanganan limbah rumah tangga serta sarana-prasarana penanganan sampah sehingga Kota Terpadu Mandiri Agropolitan dan pusat-pusat agribisnis di perdesaan menjelmakan kondisi bersih dan indah.

Keselarasan misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 atau yang dikenal dengan Asta Cita disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 7 Keselarasan Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029
(1) Memperkokoh ideologi Pncasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	(3) Memperkuat transformasi tata kelola
(2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendoronga kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	(2) Memperkuat transformasi ekonomi; (5) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi
(3) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	(2) Memperkuat transformasi ekonomi; (6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata; (7) Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas
(4) memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	(1) Memperkuat transformasi sosial
(5) melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	(2) Memperkuat transformasi ekonomi; (8) Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah
(6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	(2) Memperkuat transformasi ekonomi; (6) Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata
(7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	(4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro

Misi RPJM Nasional Tahun 2025-2029	Misi RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029
(8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dnegan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	(4) Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro; (5) Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi

Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2029 menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Asta Cita, delapan misi pembangunan nasional yang menjadi landasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Misi daerah seperti memperkuat transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola; memelihara ketenteraman dan ketertiban umum; serta mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas, sejalan dengan prioritas nasional yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ketahanan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang merata . Dengan demikian, RPJMD Mamuju Tengah tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap pembangunan daerah, tetapi juga berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam Asta Cita .

3.1.6 Tujuan dan Sasaran

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita dan Panca Daya. Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD disusun dengan : 1) kalimat kondisi; 2) dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 3) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami; 4) bersifat makro dan lintas urusan serta merupakan uktimate outcome; dan 5) meng-cascade/ menurunkan kinerja sampai diperoleh program prioritas.

Tabel 3. 8 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
MAMUJU TENGAH DAERAH AGROPOLITAN MAJU, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN - Memperkuat Transformasi Sosial	Mewujudkan manusia dan masyarakat yang sehat dan panjang umur, cerdas dan terpelajar serta terlindungi dari kemiskinan dan kerentanan		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	69,05	69,77	70,45	71,15	71,79	72,50	
		Meningkatnya kualitas modal manusia	Indeks Pendidikan (Indeks)	62,36	62,97	63,57	64,24	64,83	65,48	
			Indeks Kesehatan (Indeks)	73,0	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	
		Berkurangnya penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan	Angka Kemiskinan (%)	7,37	7,07	6,68	6,24	5,84	5,50	
			Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio) (Nilai)	0,310	0,300	0,290	0,290	0,290	0,290	
- Memperkuat Transformasi Ekonomi	Meningkatkan pendapatan masyarakat		PDRB per Kapita (Rp/Tahun)	30,82	33,25	33,64	35,26	36,44	38,05	
			PDRB Per Kapita ADHK (Juta Rupiah)	17,48	17,59	18,11	18,23	18,72	19,01	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,63	3,73	4,36	4,51	5,12	5,26	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,66	1,63	1,58	1,53	1,51	1,50	
		Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	9,01	9,35	9,66	9,80	10,00	10,02	
		Berkembangnya digitalisasi dan inovasi dalam aktivitas perekonomian daerah	indeks masyarakat digital (Indeks)	42,50	43,00	43,50	44,00	44,50	44,7	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	59,30	59,70	62,5	64,5	65,02	66,01	
- Memperkuat Transformasi Tata Kelola	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	57,50	60,50	63,50	68,50	71,50	72,50	
		Meningkatnya kualitas produk hukum	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	97,00	97,25	97,50	98,00	98,25	98,50	
			Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) (Indeks)	30	50,5	55,5	60,5	65,5	70,00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Nilai)	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
			Nilai SAKIP (Nilai)	B	B	B	B	B	B	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	2,85	3,01	3,20	3,35	3,50	3,65	
			Skor Survey Kepuasan Masyarakat (Angka)	75,00	76,00	76,65	76,80	76,95	77,05	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital	Indeks Pemerintahan Digital (Nilai)	1	1,5	1,8	2,1	2,6	2,7	
- Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Stabilitas Ekonomi Makro	Mewujudkan kondisi daerah yang aman untuk semua dan Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah		Indeks Kriminalitas (Indeks)	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	
		Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum, sosial politik dan demokrasi substansial	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan (%)	30	35	40	45	50	55	
			Persentase Penegakan Perda (%)	0	10	20	30	40	50	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		terwujudnya stabilitas kebutuhan pokok masyarakat secara merata	Tingkat Inflasi ((%))	1,4	1,450	1,449	1,448	1,447	1,446	
		Meningkatnya literasi keuangan pelaku ekonomi	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	2,47	2,55	2,63	2,72	2,80	2,85	
- Memelihara Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan ketahanan sosial-budaya dalam bingkai Lalla Tassisara		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	50,00	65,00	70,00	75,00	80,00	82,00	
		Terwujudnya kesetaraan gender	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,490	0,480	0,47	0,46	0,45	0,44	
		terpeliharanya adat istiadat lokal dan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	66,67	66,67	75,00	75,00	80,00	80,00	
	Meningkatkan ketahanan ekologi dalam meghadapi berbagai kerentanan akibat bencana dan perubahan iklim		Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq) (komulatif)	241.809,87	273.490,27	311.018,66	354.296,07	397.252,81	445.953,86	
			Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) (Ton CO2 eq) (Tahunan)	28.057,97	3.168,40	37.528,38	43.277,42	45.956,74	48.701,05	
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	152,47	150,64	148,36	144,99	141,83	138,00	
		Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	87,01	87,15	87,28	87,41	87,54	87,67	
- Mendorong Pembangunan Kewilayahan yang Merata	mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah		Indeks Desa (Indeks)	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	
		Terwujudnya kawasan agropolitan	Persentase desa yang memiliki lapangan usaha berbasis industri dan jasa layanan pertanian (%)	30	35	40	45	50	50	
			Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (%)	74,50	74,75	7,90	75,01	75,20	75,40	
		Terwujudnya pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru dan berkelanjutan	Nilai SDG's desa (%)	45,00	46,00	47,00	48,00	49,00	49,00	
- Mendorong Pembangunan Infrastruktur Berkualitas	meningkatkan kualitas layanan infrastruktur wilayah dan sarana-prasarana pelayanan dasar		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) (Indeks)	70,00	71,05	72,15	73,05	74,15	75,05	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah (Indeks)	79,7	80,05	81,5	82,5	83,5	84,5	
- Menjaga Kesinambungan Pembangunan dan Daya Saing Daerah	Mewujudkan kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah		Indeks Daya Saing Daerah (Angka)	3,20	3,23	3,25	3,28	3,30	3,32	
		meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)	86,5	87,65	88,5	89,65	90,5	91,65	
		meningkatnya daya saing investasi daerah	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	5,30	5,70	6,00	6,30	6,50	6,70	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Daerah

3.2.1 Strategi

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dirumuskan strategi. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran RPJMD.

Tabel 3. 9 Penahapan Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	**Tahap II(2027)**	**Tahap III (2028)**	**Tahap IV (2029)**	**Tahap V (2030)**
(S1.1) Meningkatnya kualitas modal manusia	Meningkatkan akses pendidikan PAUD, SD, SMP melalui pemberian beasiswa, ,Sekolah Rakyat perlengkapan sekolah, mengembalikan anak putus sekolah kembali bersekolah, rehabilitasi sarpras pendidikan, dan Makan Bergizi Gratis dengan **lokus prioritas pada kecamatan/kawasan pesisir (Kecamatan Karossa, Budong-budong, Topoyo, Tobadak dan Pangale)**	Meningkatkan kualitas pendidikan dalam mencapai literasi dan numerasi melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas pembelajaran dengan metode Kreatif, Inovatif, Produktif (KIP) *learning* dengan lokus pada seluruh kecamatan, diringi dengan peningkatan minat baca masyarakat melalui gerakan gemar membaca dan optimalisasi peran perpustakaan **dengan lokus prioritas pada ibukota kabupaten.**	Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis, pembangunan puskesmas di Desa Tumbu Kecamatan Topoyo dan Desa Bojo Kecamatan Budong-Budong diiringi dengan untuk upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat serta pemenuhan SPM kesehatan dengan **lokus pada seluruh wilayah kabupaten**	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dalam memantapkan pemberian beasiswa KUAT, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta menuntaskan anak tidak sekolah, diiringi dengan pengembangan SDM melalui program kepemudaan, kebudayaan dan olahraga serta pemantapan akses layanan kesehatan untuk semua dengan **lokus pada seluruh kecamatan**	Memantapkan pemanfaatan sumberdaya dalam menjamin keberlanjutan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta meningkatkan daya saing SDM daerah melalui program kepemudaan, kebudayaan, olahraga dan perpustakaan dengan **lokus utama pada Kawasan Terpadu Mandiri secara beriring dengan seluruh kecamatan.**

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(S1.2) Berkurangnya Penduduk Miskin dan Ketimpangan Pendapatan	Kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasi-an data kemiskinan, diiringi dengan upaya dukungan dasar melalui pemberian bantuan sosial bagi petani, nelayan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, serta pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem dengan **lokus prioritas pada kantong kemiskinan di setiap kecamatan.**	Pemberdayaan komunitas lokal untuk memanfaatkan potensi lokalitas dalam mendorong produktivitas orang miskin melalui pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan **dengan lokus prioritas pada kantong kemiskinan di wilayah pesisir dan sebaran orang miskin pada seluruh kecamatan.**	Pemberdayaan komunitas lokal untuk penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, dan pengembangan tabungan keluarga diiringi dengan pelatihan kewirausahaan dalam mengembangkan industri rumah tangga sesuai potensi lokal pada kontong kemiskinan di wilayah pesisir dan pertanian tanaman pangan/hortikultura serta sebaran orang miskin pada seluruh kecamatan.	Pemantapan pemberdayaan komunitas lokal dalam mendorong produktivitas orang miskin untuk penciptaan pendapatan dan pengembang-an aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga melalui pemantapan pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi, manajemen usaha, akses pemasaran dan jejaring dengan koperasi desa, BUMDes, perusahaan sawit, lembaga	Pengembangan inovasi lokal melalui peran riset daerah dalam mengembangkan inkubator bisnis bagi orang miskin yang telah memiliki usaha produktif diiringi dengan penguatan jejaring bisnis terhadap koperasi desa, BUMDes dan entitas lainnya, bersamaan dengan penuntasan dukungan dasar dan keberdayaan orang miskin pada lokus-lokus yang capaian intervensinya lambat.

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				keuangan, BUMD dan entitas lainnya dengan lokus prioritas pada komunitas lokal yang telah memiliki kekuatan produksi yang melibatkan orang miskin.	
(S2.1) Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja perekonomian daerah secara berkelanjutan	Optimalisasi sentra produksi pertanian di **Topoyo, Budong-Budong, dan Tobadak sebagai basis agropolitan** dengan penerapan teknologi pertanian presisi, pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi, dan pemberdayaan petani melalui transfer teknologi untuk peningkatan produktivitas dan daya saing	Akselerasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah melalui perluasan fasilitas pascapanen, penguatan rantai nilai produk pertanian, pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan UMKM, fasilitasi sertifikasi produk untuk perluasan akses pasar dan pengembangan ekonomi kreatif dan	Ekspansi konektivitas wilayah produksi pertanian dengan pusat-pusat ekonomi melalui pengembangan jaringan transportasi komoditas, pembangunan pasar-pasar induk agribisnis di setiap kecamatan, penguatan kemitraan antara petani dengan industri pengolahan, dan pengembangan sistem logistik pertanian terintegrasi untuk efisiensi distribusi dan pemerataan	Integrasi sistem ekonomi digital dalam rantai nilai pertanian melalui pengembangan platform pemasaran produk pertanian, implementasi sistem informasi harga dan pasokan pertanian real-time, penguatan ekonomi sirkular berbasis	Konsolidasi ekosistem agropolitan yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan integrasi vertikal dan horizontal rantai nilai pertanian, penerapan standar keberlanjutan dalam praktik pertanian dan pengolahan,

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	komoditas unggulan daerah.	pariwisata dengan **lokus utama di Tobadak sebagai Kota Terpadu Mandiri Agropolitan, didukung oleh lokus-lokus di kecamatan lainnya**.	pertumbuhan ekonomi dengan **lokus tersebar pada seluruh kecamatan**	pertanian, dan penerapan inovasi teknologi untuk optimalisasi proses produksi dan pemasaran produk pertanian dari hulu hingga hilir dengan **lokus utama pada seluruh kecamatan**.	optimalisasi manajemen sumber daya alam untuk keberlanjutan produktivitas, dan pengembangan pusat-pusat keunggulan agropolitan yang berdaya saing tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim dengan **lokus seluruh kecamatan.**
(S2.2) Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah	Penguatan dasar industri daerah yang fokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung industri dan pemetaan potensi industri unggulan daerah dengan kegiatan utama kajian potensi dan	Pengembangan kawasan industri yang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar industri melalui pembangunan kawasan industri kecil (sentra IKM) dan penyediaan sarana prasaran dasar (jalan akses industri, listrik	Peningkatan daya saing dan skala produksi yang fokus pada pengembangan industri berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas SDM indutri melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku IKM, kemitraan antara	Peningkatan akses keuangan pelaku usaha melalui kegiatan prioritas berupa fasilitasi akses pembiayaan dan pasar, fasilitasi mesin dan peralatan industri, dan pembangunan	Akselerasi dan hilirisasi industri yang fokus pada mendorong hilirisasi dan diversidikasi produk, promosi dan ekspansi ke pasar luar daerah, dan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	klaster industri (perkebunan, perikanan, UMKM olahan) dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)	dan air bersih dengan lokus Kecamatan Budong-Budong	pelaku indutri lokal dengan swasta/BUMDes/kope rasi desa.	kawasan industri terpadu atau zona agro-industri di Kecamatan topoyo, Tobadak dan Budong-Budong.	penerapan teknologi industri 4.0 (skala lokal) melalui penguatan branding dan sertifikasi produk insdustri lokal, penerapan teknologi tepat guna dan digitalisasi proses produksi, promosi investasi industri dan penguatan lembaga inkubator bisnis dan inovasi daerah di kawasan agropolitan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(S2.3) Berkembangnya Digitalisasi dan Inovasi Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah	Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital **di seluruh kecamatan dengan fokus pada Tobadak** sebagai percontohan kota digital, pengembangan akses internet di daerah tertinggal, pelatihan digital bagi UMKM dan petani, serta penyusunan peta jalan transformasi digital daerah sebagai fondasi ekonomi digital yang inklusif.	Akselerasi implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian, UMKM, dan pelayanan publik melalui pengembangan platform e-commerce pertanian, digitalisasi sistem rantai pasok produk pertanian, penerapan sistem pembayaran digital di pasar tradisional, dan pengembangan aplikasi mobile untuk akses layanan publik dan informasi pertanian **lokus kawasan agropolitan kecamatan Topoyo, Tobadak dan Budong-Budong.**	Perluasan ekosistem digital ke **seluruh kecamatan** melalui pengembangan pusat inovasi digital di setiap kecamatan, implementasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan pertanian, penerapan big data untuk analisis produktivitas pertanian, dan perluasan infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil untuk pemerataan akses teknologi.	Integrasi sistem ekonomi digital dengan pengembangan Kota Terpadu Mandiri melalui implementasi sistem smart farming dan smart city, pengembangan marketplace terintegrasi untuk produk pertanian dan UMKM lokal, pengembangan pusat data daerah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data dengan **lokus Kecamatan Tobadak dan Topoyo.**	Konsolidasi ekosistem inovasi digital yang adaptif melalui integrasi platform-platform digital yang riset dan pengembangan teknologi pertanian, transformasi desa menjadi desa digital terintegrasi sistem nasional, pengembangan artificial intelligence untuk optimalisasi produksi pertanian dan pembentukan kawasan teknologi tinggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					berbasis agropolitan digital.
(S3.1) Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Penguatan fondasi dan kapasitas dalam penyusunan peta jalan legislasi daerah, bimbingan teknis SDM penyusun regulasi, inventarisasi dan evaluasi awal produk hukum lama dan penyusunan prolegda berbasis kebutuhan pembangunan dengan **lokus seluruh Perangkat Daerah lingkup Mamuju Tengah.**	Peningkatan kualitas penyusunan produk hukum berbasis kajian akademik, harmonisasi regulasi dengan pemerintah pusat/ provinsi, mendorong partisipasi publik dalam penyusunan perda dan penguatan e-legislation dan JDIH daerah.	Harmonisasi dan implementasi dalam optimalisasi peran Bapemperda dan Bagian Hukum, sosialisasi dan publikasi perda strategis, penguatan koordinasi implementasi regulasi antar perangkat daerah dan penerapan mekanisme monev regulasi	Evaluasi dan penyempurnaan efektifitas perda/perbup, revisi regulasi tidak relevan/ tumpang tindih, penguatan kualitas naskah akademik, dan integrasi penuh JDIH daerah dengan JDIHN	Memantapkan keberlanjutan dan inovasi dalam pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap transformasi digital, penerapan *Regulatory Impact Assesment (RIA)* pada perda strategis, kolaborasi hukum dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, serta integrasi hukum daerah ke sistem

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					hukum nasional
(S3.2) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Menguatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja serta pelatihan teknis, Penyelarasan regulasi dan kebijakan melalui Identifikasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan yang masih tumpang tindih atau belum optimal, penetapan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan untuk setiap perangkat daerah , serta menyusun rencana aksi MCP terpadu.	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pelatihan komprehensif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan (pengguna anggaran, bendahara, PPK/PPTK) mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis elektronik, ,membentuk zona integritas bebasis Risiko, meningkatkan efektivitas pengawasan APIP melalui audit berbasis risiko dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan, menguatkan budaya kinerja melalui pelibatan seluruh ASN dalam penyusunan dan pelaporan kinerja,	Melaksanakan Coaching Clinic SAKIP untuk seluruh OPD dalam penyusunan dokumen kinerja serta Penguatan sistem reward and punishment berbasis kinerja OPD, mengimplementasikan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis digital untuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan pajak, meluaskan praktik perencanaan dan penganggaran partisipatif ke tingkat kecamatan dan desa, meningkatkan partisipasi publik dan transparansi melalui peningkatan respon terhadap laporan/aduan	Melakukan Penilaian mandiri akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat dan penguatan pelibatan pihak eksternal (akademisi/tenaga ahli), Melakukan digitalisasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan dan barang milik daerah, Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan instansi penegak hukum terkait temuan-temuan MCP yang mengindikasikan potensi tindak	memantapkan akuntabilitas kinerja melalui Evaluasi menyeluruh implementasi SAKIP, menjamin keberlanjutan skor MCP dengan menetapkan regulasi daerah yang mendukung implementasi MCP terutama di area yang memiliki potensi risiko korupsi tinggi, Penguatan kelembagaan keuangan daerah melalui pembentukan pusat data dan informasi keuangan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		dan manajemen risiko keuangan pada seluruh Perangkat Daerah	masyarakat berbasis digital, mengoptimalkan digitalisasi melalui Implementasi penuh aplikasi SIPD secara terintegrasi untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, penerapan e-audit oleh inspektorat, Penataan proses pengelolaan melalui Penguatan fungsi verifikasi internal dan pembentukan tim pengendalian mutu laporan keuangan di tiap Perangkat Daerah serta Penyesuaian proses penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)	pidana korupsi, Mendorong akuntabilitas publik dan kontrol sosial terhadap keuangan daerah melalui publikasi dokumen APBD, realisasi anggaran, dan laporan keuangan secara berkala di website resmi daerah, Penguatan peran Inspektorat untuk audit tematik dan audit kinerja berbasis risiko pada program strategis yang diampu oleh setiap Perangkat Daerah.	daerah, Mengembangkan sistem reward & punishment untuk OPD berbasis capaian akuntabilitas keuangan, serta Dokumentasi praktik baik (best practices) dan replikasi ke Perangkat Daerah lainnya

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(S3.3)Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital	penguatan fondasi kelembagaan dalam penyusunan roadmap Pemerintahan Digital, penetapan regulasi internal terkait Pemdi, pembentukan/ optimalisasi Tim Koordinasi Digital dan inventarisasi aplikasi dan data OPD	Penguatan infrastruktur dan transformasi digital melalui pembangunan data center dan integrasi jaringan, penguatan keamanan siber, implementasi tanda tangan elektronik dan arsip digital serta pelatihan lanjutan SDM TIK	Integrasi layanan digital melalui portal layanan publik terpadu (one stop service), digitalisasi perizinan dan layanan dasar, sistem pengaduan dan survei kepuasan berbasis digital serta survei pemanfaatan layanan.	Meningkatkan bagi pakai data (interoperabilitas) dan kapabilitas digital melalui integrasi sistem lintas perangkat daerah (keuangan, kepegawaian, layanan), konektivitas data dengan Satu Data Indonesia, evaluasi kinerja Pemdi per dimendi dan penerapan big data analytics untuk kebijakan	Konsolodasi smart governance dan inovasi melalui pengembangan layanan berbasia AI, kolaborasi GovTech dengan swasta dan akademisi, sertifikasi keamanan digital dan penerapan digital leadership dan budaya kerja adaptif.
(S3.4) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar prioritas dan peningkatan kapsasitas sumber daya manusia melalui pengalokasian APBD	Akselerasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan integrasi layanan lintas sektor dengan mengintegrasikan program prioritas digitalisasi MPP (e-antrian, kios pintar	Evaluasi, replikasi dan ekspansi wilayah untuk pemerataan kualitas layanan publik di seluruh wilayah melalui perluasan MPP di kabupaten, diiringi dengan penambahan	Mendorong penguatan tata kelola dan keberlanjutan melalui penetapan regulasi insentif dan keberlanjutan	Mendorong konsolidasi dan inovasi berkelanjutan yang berfokus pada integrasi pelayanan publik digital, penguatan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	tahap awal untuk pembangunan fisik dan pelatihan sumber daya manusia pelayanan, kemitraan dengan pusat untuk dana DAK Fisik dan Non fisik dengan mengintegrasikan program pembangunan MPP tingkat dasar di kabupaten, rehabilitasi kantor pelayanan kecamatan, pengaktifan PSC 119 minimal pada tingkat kabupaten, pelatihan ASN berbasis merit dan pembuatan peta kompetensi serta renovasi toilet publik pada fasilitas pelayanan prioritas.	integrasi NIK), smart office untuk kantor pelayanan publik, integrasi PSC dengan sistem pemantauan bencana dan kesehatan, digitalisasi merit sistem ASN, QR Code dan aplikasi pemantauan toilet bersih oleh publik.	unit layanan PSC berbasis desa/kelurahan atau komunitas, replikasi merit sistem ke seluruh perangkat daerah, dan pembangunan toilet permanen di tempat ibadah dan wisata.	layanan serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan kualitas layanan dengan integrasi program prioritas evaluasi nasional MPP (IKM dan efekstivitas lintas instansi), layanan PSC diintegrasikan ke sistem command center daerah, ASN dengan potensi tinggi dikembangkan menjadi pemimpin lokal, serta toilet publik dikelola oleh unit layanan tersendiri atau	smart governance. dan pengelolaan SDM aparatur berbasis kompetensi dan talenta, pelayanan adaptif berbasis kebutuhan riil masyarakat (smart public service), sistem penilaian layanan oleh masyarakat secara langsung dan otomatis (community feedback loop), dan pengujian kebijakan inovatif untuk pelayanan publik berbasis digital (regulatory sandbox).

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				mitra swasta/CSR.	
(S4.1) terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum, sosial politik dan demokrasi substansial	Kolaborasi multipihak dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melalui sosialisasi kerangka kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pencegahan dan pengendalian tindak kriminalitas, pemberdayaan masyarakat untuk mengoperasikan sistem keamanan lingkungan, serta pencegahan dan penanganan konflik sosial pada seluruh kecamatan.	Optimalisasi sumberdaya untuk penegakan Perda secara konsisten melalui sosialisasi cakupan Perda pada seluruh kecamatan, penguatan SDM dan sarana-prasarana satuan polisi pamong praja, penyadaran masyarakat untuk kepatuhan terhadap Perda, dan pengembangan sistem informasi penegakan Perda.	Optimalisasi peran Forkopimda dalam memelihara situasi sosial-politik yang kondusif melalui deteksi dini pontensi gangguan sosial-politik dan konflik sosial, kordinasi dan pembinaan organisasi sosial dan paguyuban berdasarkan daerah etnis, penguatan semangat kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat, serta penyelenggaraan dialog antar organisasi sosial kemasyarakatan	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi politik tentang demokrasi substansial melalui pendidikan politik dan demokrasi untuk generasi muda, fasilitasi partai politik dalam memanifestasikan demokrasi susbtansial pada kiprahnya di parlemen dan dalam masyarakat, serta pengembangan ruang dialog publik untuk demokratisasi	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum dengan pertimbangan obyektif dan rasional melalui penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggaraan pemilu, gerakan melawan politik uang pada semua jenis pemilihan umum, dan jaminan ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(S4.2) Terwujudnya stabilitas ekonomi daerah	Pengembangan sistem pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan pokok dan hasil perikanan melalui efektivitas fungsi tim pengendali inflasi daerah (TPID), pengembangan pusat distribusi pangan dan perikanan terpadu di Tobadak, pemantauan stok dan harga secara berkala, pengembangan cadangan pangan daerah untuk antisipasi kelangkaan dan gejolak harga, pembentukan koperasi pemasaran untuk komoditas pangan dan perikanan, serta pengembangan sistem pemantauan harga di daerah	Akselerasi pengembangan infrastruktur stabilisasi harga melalui pembangunan gudang-gudang penyimpanan strategis di setiap kecamatan, pengembangan sistem rantai dingin untuk produk hortikultura dan perikanan, perluasan jaringan distribusi pangan dari sentra produksi ke pusat konsumsi, dan penguatan koordinasi dengan lembaga pangan nasional untuk sinkronisasi kebijakan, dan pembentukan kerjasama antar daerah untuk penyusunan peta ketergantungan komoditas pangan, serta mitigasi	Perluasan cakupan sistem pemantauan dan intervensi pasar melalui implementasi sistem informasi harga pangan terintegrasi, pengembangan jaringan pasar rakyat yang terjangkau di seluruh kecamatan, pengembangan kemitraan antara produsen dengan jaringan ritel modern, dan penguatan kapasitas BUMDes dalam manajemen rantai pasok pangan lokal.	Integrasi sistem stabilisasi ekonomi daerah dengan sistem regional dan nasional melalui pengembangan platform digital pemantauan pasokan dan harga secara real-time, penguatan kerja sama antarwilayah dalam distribusi komoditas pangan, implementasi mekanisme subsidi tepat sasaran untuk kelompok rentan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga pangan. dan	Konsolidasi sistem stabilitas ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan melalui pengembangan mekanisme pasar yang efisien dan berkeadilan, penguatan kemandirian pangan daerah, implementasi teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan untuk stabilisasi harga jangka panjang, pembangunan jaringan penggilingan padi modern terintegrasi dengan pengemasan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	pemasok utama dari luar Kabupaten Mamuju Tengah	dampak inflasi dari daerah pemasok dari luar Kabupaten Mamuju Tengah.		pembentukan mekanisme penyangga (buffer) untuk memitigasi fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan harga di daerah pemasok utama.	yang memenuhi standar pasar modern, dan integrasi manajemen rantai pasok pangan dalam penanganan bencana dan ketahanan ekonomi.
(S4.3) meningkatnya literasi keuangan pelaku ekonomi	Menguatkan landasan kebijakan untuk pengembangan akses keuangan daerah melalui penyusunan regulasi daerah dalam mendukung literasi keuangan, identifikasi dan pemetaan pelaku ekonomi lokal (UMKM, Petani, Koperasi, Nelayan), pelatihan dasar literasi keuangan untuk pengelolaan usaha, perencanaan	Menguatkan pelaku usaha untuk akses keuangan melalui penyelenggaraan program pelatihan lanjutan untuk manajemen usaha, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pencatatan sederhana, kemitraan dengan perbankan/ lembanga keuangan untuk sosialisasi produk keuangan, tabungan, kredit mikro dan asuransi usaha, penguatan kelembagaan	Menguatkan kelembagaan dalam pengembangan model pendampingan usaha kecil dan UMKM berbasis digital melalui fasilitasi pembentukan kelompok belajar keuangan dan diskusi bisnis, pelatihan literasi digital untuk akses keuangan online, dan penguatan kapasitas SDM pendamping di kecamatan/ desa.	Memperluas jangkauan akses keuangan pelaku usaha melalui integrasi dan ekspansi literasi keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, industri kreatif), penguatan akses pelaku ekonomi terhadap KUR, pinjaman modal	Mendorong kemandirian pelaku ekonomi dalam mengelola usaha dan keuangan secara berkelanjutan melalui upaya penilaian akhir capaian sasaran literasi keuangan pelaku ekonomi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	keuangan rumah tangga dan akses layanan keuangan, dan penyusunan roadmap literasi keuangan daerah.	ekonomi lokal untuk koperasi dan BUMDes, dan monitoring awal capaian literasi keuangan pelaku ekonomi		usaha dan asuransi usaha, penilaian tingkat literasi keuangan secara berkala di masing-masing kecamatan, dan penyempurna-an kebijakan dan kerjasama dengan pihak swasta/ perbankan untuk mendukung literasi keuangan.	berkelanjutan program literasi keuangan. dan pengembangan pusat informasi literasi keuangan daerah.
(S5.1) Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Optimalisasi upaya perwujudan kesetaraan gender melalui integrasi isu relasi gender dalam perencanaan pembangunan, integrasi isu relasi gender dalam perencanaan dalam bentuk gender budgeting statement	Optimalisasi upaya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas perempuan, promosi dan pembukaan kesempatan yang setara bagi perempuan pada jabatan strategis di	Optimalisasi upaya perlindungan anak melalui pengembangan unit pengaduan dan pelayanan anak korban kekerasan, pencegahan anak dari jebakan pekerja bawah umur dan pekerja seks, edukasi masyarakat untuk pencegahan	Menguatkan peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, pengarusutama an gender dan anak, serta kualitas	Memastikan keberlanjutan perwujudan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas perempuan dan ketahanan keluraga, perlindungan perempuan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	pada KAK/RKA kegiatan strategis, penguatan focal point pengarusutamaan gender pada setiap OPD, integrasi gender pada penyediaan fasilitas layanan publik, dan penyadaran publik tentang relasi gender yang setara.	sektor publik maupun bisnis, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan, serta perlindungan hak-hak pekerja perempuan, dengan lokus utama pada sektor publik dan swasta pada seluruh kecamatan.	perkawinan dini, pengembangan ruang bermain bagi anak, dan pemenuhan berbagai aspek untuk kriteria sebagai kabupaten layak anak.	keluarga melalui koordinasi dan sinergiatas pemangku kepentingan.	dan anak korban kekerasan, serta kesetaraan dan keadilan gender.
(S5.2) Berkembangnya kebudayaan daerah dan kehidupan bermaslahat	Melestarikan dan memajukan warisan budaya tak benda melalui penanaman dan pengamalan nilai dan norma budaya, pembelajaran bahasa daerah di sekolah, penggunaan bahasa daerah dalam pergaulan sehari-hari, dan pengembangan sanggar kesenian berbagai etnis dengan lokus	Melestarikan cagar budaya melalui inventarisasi dan registrasi beragam cagar budaya, pemeliharaan bentuk fisik dan material berbagai cagar budaya, pengenalan dan publikasi berbagai benda dan tempat bersejarah, dengan lokus pada seluruh kecamatan.	Memantapkan kerukunan antar ummat beragama melalui penguatan Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama, melanjutkan pemberian bantuan rumah ibadah dan insentif imam masjid, guru mengaji dan pemuka agama lainnya, akselerasi kegiatan lintas iman, lintas komunitas, lintas budaya serta peningkatan	Mengembangan pariwisata berbasis pelestarian dan pemajuan warisan budaya melalui penyediaan sarana-prasarana wisata pada tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat lain yang mempunyai daya tarik wisata,	Memantapkan pemajuan kebudayaan beragam etnis sebagai modal ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika perubahan diiringi dengan pemantapan kerukunan antar ummat beragama dan kohesi sosial antar etnis, serta

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	berbasis komunitas beragam etnis.		pemahaman moderasi beragama	penyelenggaraan festival kesenian antar berwakilan etnis, fasilitasi perkembangan kelompok kesenian profesional berorientasi komersial	memberlanjut-kan ekosistem kehidupan beragama dan berbudaya yang harmonis.
(S6.1) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	Konsolidasi dan penguatan dasar kapasitas sistem mitigasi bencana (termasuk gempa) melalui fokus pada pemetaan risiko berbasis Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD), penguatan kelembagaan BPBD dan sinergi antar OPD, revisi dan penetapan regulasi/perda kebencanaan berupa RTRW berbasis risiko dan rencana kontinjensi,	Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur mitigasi dengan fokus infrastruktur fisik dan sistem mitigasi melalui pembangunan sarana prasarana mitigasi (tanggul, sabuk hijau, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara/akhir), integrasi sistem informasi kebencanaan (SIK) berbasis data real-time, sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan	Integrasi mitigasi dalam tata kelola pembangunan dengan fokus pada mainstreaming mitigasi ke semua sektor pembangunan, integrasi mitigasi dalam RTRW dan pembangunan infrastruktur daerah, evaluasi dan uji coba sistem peringatan dini berbasis komunitas, penguatan kemitraan dengan dunia usaha (CSR untuk kebencanaan), program desa tangguh bencana (DESTANA),	Mengembangkan inovasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan komunitas dengan fokus pada adaptasi berbasis komunitas dan teknologi inovatif, pengembangan aplikasi mobile sistem informasi dan pelaporan kebencanaan, simulasi penanggulangan bencana lintas sektor dan	Evaluasi, replikasi dan keberlanjutan fokus pada monitoring dan evaluasi menyeluruh serta pelembagaan, evaluasi efektivitas program mitigasi dan pemutakhiran dokumen risiko, revisi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD),

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial, pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan, serta pengembangan sistem peringatan dini lokal (Early Warning System - EWS)	masyarakat, pelatihan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC), Tagana, dan relawan, serta penanaman vegetasi untuk mitigasi longsor dan banjir.	pendidikan kebencanaan di sekolah dan madrasah, dan pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana terutama pada lokus terjadinya banjir, longsor, dan abrasi.	lintas daerah, penguatan koperasi atau lembaga ekonomi lokal pasca bencana, pembentukan tim siaga bencana di tiap desa/kelurahan , integrasi mitigasi non-alam (pandemi, konflik sosial, industri) dalam kebijakan daerah, penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi untuk inovasi mitigasi	perencanaan lanjutan berbasis pembelajaran (lesson-learned) RPJMD sebelumnya, penguatan sistem pembiayaan keberlanjutan mitigasi (dana cadangan, asuransi risiko bencana), dan pengembangan indeks ketahanan daerah terhadap bencana.

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(S6.2) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Optimalisasi sumberdaya dalam penaganan sampah dan penataan keindahan lingkungan melalui implementasi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPSL), pembangunan/ rehabilitasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPA, dan TPS 3R, pembangunan IPAL komunal/desentralisasi di permukiman padat, perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan, peningkatan akses sanitasi layak di desa/kelurahan dan peningkatan	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai terutama di Tobadak dan Budong-budong, pencegahan dan penanganan pencemaran laut dan pesisir, perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar, pencegahan dan penaganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit, serta penanganan sampah dan abrasi pantai.	Memelihara cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui pencegahan deforestasi akibat ekspansi sawit, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultur, pengembangan pertanian polikultur tanaman pangan dan hortikultura, penataan vegetasi dan kualitas lahan gambut, pengembangan ekonomi sirkuler berbasis pertanian terpadu.	Memelihara kualitas udara secara kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat asap pabrik terutama di Salugatta, Pontanakayyang dan beberapa desa di Karossa, pengendalian bau busuk akibat limbah buah dan tandan sawit, penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah perkebunan sawit.	Memelihara keanekaragaman hayati melalui perlindungan terhadap plasma nutfah yang ada di Mamuju Tengah, mempertahankan dan mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, mengembangkan integrasi peternakan dengan kelapa sawit, serta memelihara keberadaan berbagai jenis ikan dalam sungai dan laut

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	kompetensi teknis petugas pengelola sampah dan limbah, serta pemberdayaan bank sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga berbasis RW pada semua kecamatan.				
(S7.1) Terwujudnya kawasan agropolitan	Menguatkan aransemen kelembagaan dan perencanaan pengembangan agropolitan melalui penyusunan master plan pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan tim/forum kordinasi lintas sektor untuk pengembangan agropolitan (perangkat daerah terkait, perwakilan petani, perwakilan perusahaan perkebunan,	Optimalisasi pemanfaatan sarana-prasarana pendukung produksi pertanian secara beriring dengan sarana-prasarana layanan industri dan jasa pertanian melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, jalan usahatani dan jalan penghubung sentara produksi dengan pasar, sarana pasca panen, dukungan listrik dan ketersedian air	Optimalisasi kapasitas SDM petani dan wirausaha pertanian dalam menopang perkembangan agropolitan melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan teknis, penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi desa, pengembangan kewirausahaan, fasilitasi tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pengolahan hasil pertanian dan jasa pendukung, literasi keuangan dan	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian untuk pengembangan industri pengolahan dan pemasaran melalui investasi industri pengolahan hasil pertanian di kawasan agropolitan, peningkatan nilai tambah produk dengan pengolahan dan packaging,	Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk keberlanjutan kawasan agropolitan melalui penerapan praktik pertanian dan industri yang ramah lingkungan, pengembangan agrowisata dengan memanfaatkan potensi dan kawasan pertanian

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	perwakilan usaha sarana produksi dan layanan pertanian, perwakilan masyarakat), pemberlakuan kebijakan/regulasi daerah terkait insentif investasi, kemudahan perizinan dan sebagainya, dengan lokus prioritas di Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Budong-budong.	bersih, sarana komunikasi dan informasi, serta fasilitasi usaha penyediaan alsintan dengan lokus prioritas di Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Budong-budong	fasilitasi akses sumber pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha, dengan lokus prioritas pada desa/kelurahan di Kecamatan Tobadak, Topoyo, dan Budong-budong serta lokus pendukung di Kecamatan Pangale dan Karossa	pengembangan jaringan pemasaran dengan fasilitasi akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan e-commerce, serta promosi dan branding dengan membangun citra positif dan merek produk agropolitan, dengan lokus prioritas pada desa/kelurahan di Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Budong-budong.	sebagai daya tarik wisata, serta secara manajerial melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap arah perkembangan kawasan agropolitan
(S7.2) terwujudnya pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru dan berkelanjutan	Optimalisasi sosialisasi kerangka kebijakan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan	Peningkatan Penyelenggaraan kebijakan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan	Penguatan kebijakan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan Kabupaten serta	Evaluasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang	Akselerasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detai Tata Ruang

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Masterplan Jalan Kabupaten	Masterplan Jalan Kabupaten serta pembangunan gerbang batas kabupaten.	pembangunan gerbang batas kabupaten.	(RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan	(RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan
(S8.1) terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan	Perencanaan, Pemetaan & Konsolidasi Awal Fokus pada Penyusunan dokumen teknis, pemetaan prioritas, dan penetapan skala urgens ipeningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Fokus pada Integrasi antarwilayah dan peningkatan daya guna infrastruktur peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Ekspansi dan Konektivitas Lintas Wilayah Fokus pada Integrasi antarwilayah dan peningkatan daya guna infrastruktur peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Optimalisasi, Pengendalian, dan Teknologi Tepat Guna Fokuspada Keandalan layanan, efisiensi, dan adaptasi teknologi peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Evaluasi, Keberlanjutan dan Replikasi Fokus pada Pemerataan pembangunan dan penguatan kelembagaan pemeliharaan melalui Evaluasi kondisi dan dampak seluruh infrastruktur yang telah dibangun, Pelembagaan sistem pengelolaan air bersih oleh BUMDes atau UPT daerah, Revitalisasi saluran banjir

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
					dan konservasi daerah tangkapan air,Program padat karya pemeliharaan jalan dan PJU oleh masyarakat
(S9.1) meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	harmonisasi perencanaan melalui peningkatan kapasitas SDM perencana dengan lokus pada semua perangkat daerah	penguatan solvabilitas keuangan untuk menjamin rasio belanja wajib dan belanja pembangunan yang lebih proporsional, kapasitas fiskal daerah lebih stabil dan terukur serta pemerintah daerah yang memiliki fleksibilitas fiskal untuk pembangunan strategis	peningkatan PAD dan kapasitas fiskal daerah yang fokus pada optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah (digitalisasi pajak daerah), reformasi tata kelola penerimaan daerah (sinkronisasi data wajib pajak), inovasi sumber pendapatan baru (cukai daerah, TPPU sektor informal) dan kemitraan publik-swasta dalam pembiayaan pembangunan.	pemanfaatan aset dan penguatan perusda sebagai sumber pendapatan yang fokus pada inventarisasi dan valuasi aset daerah, pemetaan potensi aset untuk disewakan, dijadikan KPBU, datau dikerjasamakan , revitalisasi dan profesionalisasi Perusda, dan pembentukan	kerjasama antar daerah dan pemda dengan non-pemda yang fokus pada pembentukan forum kerjasama antar kabupaten/kota (dalam dan luar provinsi), kemitraan strategis dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik dan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
				holding BUMD atau unit usaha strategis.	pengembangan ekonomi, penerapan skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, dana filantropi, dana inovatif lainnya), dan penguatan jejaring dengan lembaga donor dan mitra internasional.
(S9.2) meningkatya daya saing daerah	menetapkan fondasi dan penguatan sinergi melalui penyusunan peta jalan daya saing daerah, peta potensi unggulan daerah yang bekerja sama dengan universitas/politeknik, serta baseline daya saing berbasis indikator yang bekerja sama dengan lembaga terkait	Mendorong akselerasi ekonomi lokal dan investasi inklusif melalui pengembangan kawasan ekonomi desa berbasis potensi lokal dengan kerja sama sektor swasta dan BUMN/BUMD/BUMDes, Mengoptimalkan peran CSR dalam pembinaan UMKM dan pembiayaan usaha kecil dengan	menguatkan kualitas SDM melalui kerja sama dengan pendidikan dan industri dengan melakukan Inkubasi bisnis pemuda dan UMKM berbasis kampus, mengadakan Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri melalui program link & match dunia pendidikan-kerja	Meningkatkan konektivitas ekonomi daerah dengan pasar nasional dan global melalui promosi investasi dan penguatan jaringan kerja sama, menguatkan branding daerah melalui sektor unggulan seperti	Konsolidasi kelembagaan kerja sama daerah melalui pencapaian indikator daya saing daerah secara maksimal, serta Penetapan model kerja sama daerah yang berhasil sebagai praktik baik dan

Sasaran	Pentahapan Pembangunan RPJMD				
	Tahap I (2026)	Tahap II(2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
		minimal kerja sama aktif dengan 10 pelaku usaha strategis		pariwisata, pertanian, dan industri kreatif	direplikasi pada sektor lain

3.2.2Arah Kebijakan

Setelah merumusukan tujuan, sasaran, strategi dan penahapan pembangunan maka dirumuskanlah arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 3. 10 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Misi	Arah Kebijakan
Memperkuat transformasi sosial	• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan • Peningkatan kualitas kesehatan untuk semua • Peningkatan kemampuan literasi masyarakat • Pengentasan kemiskinan • Pengurangan ketimpangan
Memperkuat transformasi ekonomi	• Peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Perluasan lapangan kerja dan peluang usaha • Pengembangan industri pengolahan • Transformasi digital dalam perekonomian daerah • Pengembangan inovasi daerah
Memperkuat transformasi tata kelola	• Peningkatan kualitas produk hukum daerah • Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan • Integrasi penyelenggaraan pemerintahan digital • Digitalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik
Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas ekonomi makro	• Pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum • Penguatan partai politik dan penyadaran masyarakat dalam memanifestasikan demokrasi substansial • Pengendalian pemenuhan dan harga kebutuhan pokok • Penguatan literasi keuangan pelaku usaha
Memelihara ketahanan sosial budaya dan ekologi	• Pengarusutamaan gender • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak • Pelestarian dan pemajuan kebudayaan • Pemeliharaan kerukunan ummat beragama • Penguatan kesiapsiagaan bencana • Penguatan sistem tanggap darurat dan rehabilitasi pasca bencana • Penanganan pencemaran air dan udara

Misi	Arah Kebijakan
	• Pemeliharaan tutupan lahan dan keanekaragaman hayati • Peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim • Pembangunan rendah karbon
Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata	• Pengembangan kawasan agropolitan • Pengembangan kawasan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan • Pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis pedesaan • Pemantapan tata ruang desa
Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas	• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan • Pemenuhan sarana/prasarana pelayanan dasar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana kawasan agropolitan
Menjaga kesinambungan pembangunan dan daya saing daerah	• Peningkatan kualitas perencanaan • Peningkatan kualitas penganggaran • Peningkatan daya saing investasi daerah

Keselarasan arah kebijkan dari setiap misi dengan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dipetakan seperti pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Keselarasan Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Pencapaian Sasaran Pada Setiap Misi

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	Misi 1: Memperkuat transformasi sosial						
1.	Meningkatnya kualitas modal manusia	• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan • Peningkatan kualitas kesehatan untuk semua • Peningkatan kemampuan literasi masyarakat	Meningkatkan akses pendidikan PAUD, SD, SMP melalui pemberian beasiswa, ,Sekolah Rakyat, perlengkapan sekolah, mengembalikan anak putus sekolah kembali bersekolah, rehabilitasi sarpras pendidikan, Makan Bergizi Gratis dengan lokus prioritas pada kecamatan/kawasan pesisir (Karossa, Budong-Budong, Topoyo, Tobadak dan Pangale)	Meningkatkan kualitas pendidikan dalam mencapai literasi dan numerasi melalui peningkatan kualitas guru, peningkatan kualitas pembelajaran dengan metode Kreatif, Inovatif, Produktif (KIP) *learning* dengan lokus pada seluruh kecamatan, diringi dengan peningkatan minat baca masyarakat melalui gerakan gemar membaca dan optimalisasi peran perpustakaan	Meningkatkan akses pelayanan dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis, pembangunan puskesmas di Desa Tumbu Kecamatan Topoyo dan Desa Bojo Kecamatan Budong-Budong diiringi dengan untuk upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat serta pemenuhan SPM kesehatan dengan lokus pada seluruh wilayah kabupaten	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dalam memantapkan pemberian beasiswa KUAT, peningkatan kualitas tenaga pendidik serta menuntaskan anak tidak sekolah, diiringi dengan pengembangan SDM melalui program kepemudaan, kebudayaan dan olahraga serta	Memantapkan pemanfaatan sumberdaya dalam menjamin keberlanjutan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta meningkatkan daya saing SDM daerah melalui program kepemudaan, kebudayaan, olahraga dan perpustakaan dengan lokus

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
				dengan lokus prioritas pada ibukota kabupaten.		pemantapan akses layanan kesehatan untuk semua dengan lokus pada seluruh kecamatan	utama pada Kawasan Terpadu Mandiri secara beriring dengan seluruh kecamatan.
2.	Berkurangnya penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan	• Pengentasan kemiskinan • Penguranga n ketimpangan	Kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasi-an data kemiskinan, diiringi dengan upaya dukungan dasar melalui pemberian bantuan sosial bagi petani, nelayan, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya, serta pembangunan dan	Pemberdayaan komunitas lokal untuk memanfaatkan potensi lokalitas dalam mendorong produktivitas orang miskin melalui pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan dengan lokus prioritas pada kantong kemiskinan di wilayah pesisir dan sebaran orang	Pemberdayaan komunitas lokal untuk penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, dan pengembangan tabungan keluarga diiringi dengan pelatihan kewirausahaan dalam mengmbangkan	Pemantapan pemberdayaan komunitas lokal dalam mendorong produktivitas orang miskin untuk penciptaan pendapatan dan pengembang-an aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga melalui pemantapan	Pengembanga n inovasi lokal melalui peran riset daerah dalam mengembang kan inkubator bisnis bagi orang miskin yang telah memiliki usaha produktif diiringi dengan penguatan jejaring bisnis terhadap

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem dengan lokus prioritas pada kantong kemiskinan di setiap kecamatan.	miskin pada seluruh kecamatan.	industri rumah tangga sesuai potensi lokal pada kontong kemiskinan di wilayah pesisir dan pertanian tanaman pangan/hortikultura serta sebaran orang miskin pada seluruh kecamatan.	pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi, manajemen usaha, akses pemasaran dan jejaring dengan koperasi desa, BUMDes, perusahaan sawit, lembaga keuangan, BUMD dan entitas lainnya dengan lokus prioritas pada komunitas lokal yang telah memiliki kekuatan produksi yang	koperasi desa, BUMDes dan entitas lainnya, bersamaan dengan penuntasan dukungan dasar dan keberdayaan orang miskin pada lokus-lokus yang capaian intervensinya lambat.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
						melibatkan orang miskin.	
	Misi 2: Memperkuat transformasi ekonomi						
3	Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja perekonomian daerah secara berkelanjutan	• Peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian • Peningkatan kualitas tenaga kerja • Perluasan lapangan kerja dan peluang usaha	Optimalisasi sentra produksi pertanian di Topoyo, Budong-Budong, dan Tobadak sebagai basis agropolitan dengan penerapan teknologi pertanian presisi, pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi, dan pemberdayaan petani melalui transfer teknologi untuk peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas unggulan daerah.	Akselerasi pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah melalui perluasan fasilitas pascapanen, penguatan rantai nilai produk pertanian, pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan UMKM, fasilitasi sertifikasi produk untuk perluasan akses pasar dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata dengan lokus utama di Tobadak	Ekspansi konektivitas wilayah produksi pertanian dengan pusat-pusat ekonomi melalui pengembangan jaringan transportasi komoditas, pembangunan pasar-pasar induk agribisnis di setiap kecamatan, penguatan kemitraan antara petani dengan industri pengolahan, dan pengembangan sistem logistik pertanian terintegrasi untuk efisiensi distribusi dan pemerataan pertumbuhan	Integrasi sistem ekonomi digital dalam rantai nilai pertanian melalui pengembangan platform pemasaran produk pertanian, implementasi sistem informasi harga dan pasokan pertanian real-time, penguatan ekonomi sirkular berbasis pertanian,	Konsolidasi ekosistem agropolitan yang tangguh dan berkelanjutan melalui penguatan integrasi vertikal dan horizontal rantai nilai pertanian, penerapan standar keberlanjutan dalam praktik pertanian dan pengolahan, optimalisasi manajemen sumber daya

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
				sebagai Kota Terpadu Mandiri Agropolitan, didukung oleh lokus-lokus di kecamatan lainnya.	ekonomi dengan lokus tersebar pada seliuruh kecamatan	dan penerapan inovasi teknologi untuk optimalisasi proses produksi dan pemasaran produk pertanian dari hulu hingga hilir dengan lokus utama pada seluruh kecamatan.	alam untuk keberlanjutan produktivitas, dan pengembangan pusat-pusat keunggulan agropolitan yang berdaya saing tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim.
4	Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah	• Pengembangan industri pengolahan	Penguatan dasar industri daerah yang fokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung industri dan pemetaan potensi industri unggulan daerah dengan kegiatan utama	Pengembangan kawasan industri yang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar industri melalui pembangunan kawasan industri kecil (sentra IKM) dan penyediaan sarana prasaran dasar (jalan akses	Peningkatan daya saing dan skala produksi yang fokus pada pengembangan industri berbasis potensi lokal, peningkatan kapasitas SDM indutri melalui pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku	Peningkatan akses keuangan pelaku usaha melalui kegiatan prioritas berupa fasilitasi akses pembiayaan dan pasar, fasilitasi	Akselerasi dan hilirisasi industri yang fokus pada mendorong hilirisasi dan diversidikasi produk, promosi dan ekspansi ke pasar luar daerah, dan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			kajian potensi dan klaster industri (perkebunan, perikanan, UMKM olahan) dan penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RIPIK)	industri, listrik dan air bersih dengan lokus Kecamatan Budong-Budong	IKM, kemitraan antara pelaku indutri lokal dengan swasta/BUMDes/koperasi desa.	mesin dan peralatan industri, dan pembangunan kawasan industri terpadu atau zona agro-industri di Kecamatan topoyo, Tobadak dan Budong-Budong.	penerapan teknologi industri 4.0 (skala lokal) melalui penguatan branding dan sertifikasi produk insdustri lokal, penerapan teknologi tepat guna dan digitalisasi proses produksi, promosi investasi industri dan penguatan lembaga inkubator bisnis dan inovasi daerah.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
5	Berkembangnya Digitalisasi dan Inovasi Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah	• Transformasi digital dalam perekonomian daerah • Pengembangan inovasi daerah	Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital di seluruh kecamatan dengan fokus pada Tobadak sebagai percontohan kota digital, pengembangan akses internet di daerah tertinggal, pelatihan digital bagi UMKM dan petani, serta penyusunan peta jalan transformasi digital daerah sebagai fondasi ekonomi digital yang inklusif.	Akselerasi implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian, UMKM, dan pelayanan publik melalui pengembangan platform e-commerce pertanian, digitalisasi sistem rantai pasok produk pertanian, penerapan sistem pembayaran digital di pasar tradisional, dan pengembangan aplikasi mobile untuk akses layanan publik dan informasi pertanian.	Perluasan ekosistem digital ke seluruh kecamatan melalui pengembangan pusat inovasi digital di setiap kecamatan, implementasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan pertanian, penerapan big data untuk analisis produktivitas pertanian, dan perluasan infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil untuk pemerataan akses teknologi.	Integrasi sistem ekonomi digital dengan pengembangan Kota Terpadu Mandiri melalui implementasi sistem smart farming dan smart city, pengembangan marketplace terintegrasi untuk produk pertanian dan UMKM lokal, pengembangan pusat data daerah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.	Konsolidasi ekosistem inovasi digital yang adaptif melalui integrasi platform-platform digital yang riset dan pengembangan teknologi pertanian, transformasi desa menjadi desa digital terintegrasi sistem nasional, pengembangan artificial intelligence untuk optimalisasi produksi pertanian dan pembentukan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
							kawasan teknologi tinggi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agropolitan digital.
	Misi 3: Memperkuat Transformasi Tata Kelola						
6	Meningkatnya kualitas produk hukum	• Peningkatan kualitas produk hukum daerah	Penguatan fondasi dan kapasitas dalam penyusunan peta jalan legislasi daerah, bimbingan teknis SDM penyusun regulasi, inventarisasi dan evaluasi awal produk hukum lama dan penyusunan prolegda berbasis kebutuhan pembangunan	Peningkatan kualitas penyusunan produk hukum berbasis kajian akademik, harmonisasi regulasi dengan pemerintah pusat/ provinsi, mendorong partisipasi publik dalam penyusunan perda dan penguatan e-legislation dan JDIH daerah.	Harmonisasi dan implementasi dalam optimalisasi peran Bapemperda dan Bagian Hukum, sosialisasi dan publikasi perda strategis, penguatan koordinasi implementasi regulasi antar perangkat daerah dan penerapan mekanisme monev regulasi	Evaluasi dan penyempurnaan efektifitas perda/perbup, revisi regulasi tidak relevan/ tumpang tindih, penguatan kualitas naskah akademik, dan integrasi penuh JDIH daerah dengan JDIHN	Memantapkan keberlanjutan dan inovasi dalam pengembangan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap transformasi digital, penerapan *Regulatory Impact Assesment*

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			dengan **lokus seluruh Perangkat Daerah lingkup Mamuju Tengah.**				*(RIA)* pada perda strategis, kolaborasi hukum dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, serta integrasi hukum daerah ke sistem hukum nasional
7	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	• Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Menguatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja serta pelatihan teknis, Penyelarasan regulasi dan kebijakan melalui Identifikasi dan harmonisasi	Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pelatihan komprehensif bagi aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan (pengguna	Melaksanakan Coaching Clinic SAKIP untuk seluruh OPD dalam penyusunan dokumen kinerja serta Penguatan sistem reward and punishment berbasis kinerja OPD, mengimplementasik	Melakukan Penilaian mandiri akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat dan penguatan pelibatan pihak eksternal (akademisi/te	memantapkan akuntabilitas kinerja melalui Evaluasi menyeluruh implementasi SAKIP, menjamin keberlanjutan skor MCP

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan yang masih tumpang tindih atau belum optimal, penetapan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan untuk setiap perangkat daerah , serta menyusun rencana aksi MCP terpadu.	anggaran, bendahara, PPK/PPTK) mengenai standar akuntansi pemerintah berbasis elektronik, ,membentuk zona integritas bebasis Risiko, meningkatkan efektivitas pengawasan APIP melalui audit berbasis risiko dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan, menguatkan budaya kinerja melalui pelibatan seluruh ASN dalam penyusunan dan pelaporan kinerja, dan manajemen risiko keuangan pada seluruh Perangkat Daerah	an sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dan berbasis digital untuk pendaftaran, pembayaran, pelaporan, dan pengawasan pajak, meluaskan praktik perencanaan dan penganggaran partisipatif ke tingkat kecamatan dan desa, meningkatkan partisipasi publik dan transparansi melalui peningkatan respon terhadap laporan/aduan masyarakat berbasis digital, mengoptimalkan digitalisasi melalui Implementasi penuh aplikasi SIPD secara terintegrasi untuk perencanaan,	naga ahli), Melakukan digitalisasi menyeluruh dalam tata kelola keuangan dan barang milik daerah, Meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dengan instansi penegak hukum terkait temuan-temuan MCP yang mengindikasikan potensi tindak pidana korupsi, Mendorong akuntabilitas publik dan	dengan menetapkan regulasi daerah yang mendukung implementasi MCP terutama di area yang memiliki potensi risiko korupsi tinggi, Penguatan kelembagaan keuangan daerah melalui pembentukan pusat data dan informasi keuangan daerah, Mengembangkan sistem reward & punishment untuk OPD

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
					penganggaran, penatausahaan, pelaporan, penerapan e-audit oleh inspektorat, Penataan proses pengelolaan melalui Penguatan fungsi verifikasi internal dan pembentukan tim pengendalian mutu laporan keuangan di tiap Perangkat Daerah serta Penyesuaian proses penganggaran dengan pendekatan berbasis kinerja (Performance-Based Budgeting)	kontrol sosial terhadap keuangan daerah melalui publikasi dokumen APBD, realisasi anggaran, dan laporan keuangan secara berkala di website resmi daerah, Penguatan peran Inspektorat untuk audit tematik dan audit kinerja berbasis risiko pada program strategis yang diampu oleh setiap Perangkat Daerah.	berbasis capaian akuntabilitas keuangan, serta Dokumentasi praktik baik (best practices) dan replikasi ke Perangkat Daerah lainnya

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
8	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital	• Integrasi penyelenggaraan pemerintahan digital	penguatan fondasi kelembagaan dalam penyusunan roadmap Pemerintahan Digital, penetapan regulasi internal terkait Pemdi, pembentukan/ optimalisasi Tim Koordinasi Digital dan inventarisasi aplikasi dan data OPD	Penguatan infrastruktur dan transformasi digital melalui pembangunan data center dan integrasi jaringan, penguatan keamanan siber, implementasi tanda tangan elektronik dan arsip digital serta pelatihan lanjutan SDM TIK	Integrasi layanan digital melalui portal layanan publik terpadu (one stop service), digitalisasi perizinan dan layanan dasar, sistem pengaduan dan survei kepuasan berbasis digital serta survei pemanfaatan layanan.	Meningkatkan bagi pakai data (interoperabilitas) dan kapabilitas digital melalui integrasi sistem lintas perangkat daerah (keuangan, kepegawaian, layanan), konektivitas data dengan Satu Data Indonesia, evaluasi kinerja Pemdi per dimendi dan penerapan big data analytics untuk kebijakan	Konsolodasi smart governance dan inovasi melalui pengembangan layanan berbasia AI, kolaborasi GovTech dengan swasta dan akademisi, sertifikasi keamanan digital dan penerapan digital leadership dan budaya kerja adaptif.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
9	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	• Digitalisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik	Mendorong pembangunan infrastruktur dasar prioritas dan peningkatan kapsasitas sumber daya manusia melalui pengalokasian APBD tahap awal untuk pembangunan fisik dan pelatihan sumber daya manusia pelayanan, kemitraan dengan pusat untuk dana DAK Fisik dan Non fisik dengan mengintegrasikan program pembangunan MPP tingkat dasar di kabupaten, rehabilitasi kantor pelayanan kecamatan,	Akselerasi pelayanan publik melalui digitalisasi dan integrasi layanan lintas sektor dengan mengintegrasikan program prioritas digitalisasi MPP (e-antrian, kios pintar integrasi NIK), smart office untuk kantor pelayanan publik, integrasi PSC dengan sistem pemantauan bencana dan kesehatan, digitalisasi merit sistem ASN, QR Code dan aplikasi pemantauan toilet bersih oleh publik.	Evaluasi, replikasi dan ekspansi wilayah untuk pemerataan kualitas layanan publik di seluruh wilayah melalui perluasan MPP di kabupaten, diiringi dengan penambahan unit layanan PSC berbasis desa/kelurahan atau komunitas, replikasi merit sistem ke seluruh perangkat daerah, dan pembangunan toilet permanen di tempat ibadah dan wisata.	Mendorong penguatan tata kelola dan keberlanjutan melalui penetapan regulasi insentif dan keberlanjutan layanan serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan kualitas layanan dengan integrasi program prioritas evaluasi nasional MPP (IKM dan efekstivitas lintas instansi),	Mendorong konsolidasi dan inovasi berkelanjutan yang berfokus pada integrasi pelayanan publik digital, penguatan smart governance. dan pengelolaan SDM aparatur berbasis kompetensi dan talenta, pelayanan adaptif berbasis kebutuhan riil masyarakat (smart public service),

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			pengaktifan PSC 119 minimal pada tingkat kabupaten, pelatihan ASN berbasis merit dan pembuatan peta kompetensi serta renovasi toilet publik pada fasilitas pelayanan prioritas.			layanan PSC diintegrasikan ke sistem command center daerah, ASN dengan potensi tinggi dikembangkan menjadi pemimpin lokal, serta toilet publik dikelola oleh unit layanan tersendiri atau mitra swasta/CSR.	sistem penilaian layanan oleh masyarakat secara langsung dan otomatis (community feedback loop), dan pengujian kebijakan inovatif untuk pelayanan publik berbasis digital (regulatory sandbox).
	Misi 4: Memelihara Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Stabilitas Ekonomi Makro						
10	terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum,	•Pemberdayaan masyarakat dan kolaborasi multipihak dalam	Kolaborasi multipihak dalam menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melalui	Optimalisasi sumberdaya untuk penegakan Perda secara konsisten melalui sosialisasi cakupan Perda	Optimalisasi peran Forkopimda dalam memelihara situasi sosial-politik yang kondusif melalui deteksi dini pontensi	Meningkatkan kesadaran masyarakat dan organisasi politik tentang demokrasi	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	sosial politik dan demokrasi substansial	memelihara ketenteraman dan ketertiban umum •Penguatan partai politik dan penyadaran masyarakat dalam memanifestasikan demokrasi substansial	sosialisasi kerangka kebijakan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pencegahan dan pengendalian tindak kriminalitas, pemberdayaan masyarakat untuk mengoperasikan sistem keamanan lingkungan, serta pencegahan dan penanganan konflik sosial pada seluruh kecamatan.	pada seluruh kecamatan, penguatan SDM dan sarana-prasarana satuan polisi pamong praja, penyadaran masyarakat untuk kepatuhan terhadap Perda, dan pengembangan sistem informasi penegakan Perda.	gangguan sosial-politik dan konflik sosial, kordinasi dan pembinaan organisasi sosial dan paguyuban berdasarkan daerah etnis, penguatan semangat kerjasama dan gotong royong dalam masyarakat, serta penyelenggaraan dialog antar organisasi sosial kemasyarakatan	substansial melalui pendidikan politik dan demokrasi untuk generasi muda, fasilitasi partai politik dalam memanifestasikan demokrasi susbtansial pada kiprahnya di parlemen dan dalam masyarakat, serta pengembangan ruang dialog publik untuk demokratisasi	umum dengan pertimbangan obyektif dan rasional melalui penegakan hukum atas pelanggaran penyelenggaraan pemilu, gerakan melawan politik uang pada semua jenis pemilihan umum, dan jaminan ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
11	terwujudnya stabilitas kebutuhan pokok masyarakat secara merata	• Pengendalian pemenuhan dan harga kebutuhan pokok	Pengembangan sistem pengendalian harga dan pasokan komoditas pangan pokok dan hasil perikanan melalui efektivitas fungsi tim pengendali inflasi daerah (TPID), pengembangan pusat distribusi pangan dan perikanan terpadu di Tobadak, pemantauan stok dan harga secara berkala, pengembangan cadangan pangan daerah untuk antisipasi kelangkaan dan gejolak harga, pembentukan koperasi	Akselerasi pengembangan infrastruktur stabilisasi harga melalui pembangunan gudang-gudang penyimpanan strategis di setiap kecamatan, pengembangan sistem rantai dingin untuk produk hortikultura dan perikanan, perluasan jaringan distribusi pangan dari sentra produksi ke pusat konsumsi, dan penguatan koordinasi dengan lembaga pangan nasional untuk sinkronisasi kebijakan, dan pembentukan	Perluasan cakupan sistem pemantauan dan intervensi pasar melalui implementasi sistem informasi harga pangan terintegrasi, pengembangan jaringan pasar rakyat yang terjangkau di seluruh kecamatan, pengembangan kemitraan antara produsen dengan jaringan ritel modern, dan penguatan kapasitas BUMDes dalam manajemen rantai pasok pangan lokal.	Integrasi sistem stabilisasi ekonomi daerah dengan sistem regional dan nasional melalui pengembangan platform digital pemantauan pasokan dan harga secara real-time, penguatan kerja sama antarwilayah dalam distribusi komoditas pangan, implementasi mekanisme subsidi tepat sasaran untuk kelompok	Konsolidasi sistem stabilitas ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan melalui pengembangan mekanisme pasar yang efisien dan berkeadilan, penguatan kemandirian pangan daerah, implementasi teknologi penyimpanan dan pengolahan pangan untuk stabilisasi harga jangka panjang, pembangunan jaringan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			pemasaran untuk komoditas pangan dan perikanan, serta pengembangan sistem pemantauan harga di daerah pemasok utama dari luar Kabupaten Mamuju Tengah	kerjasama antar daerah untuk penyusunan peta ketergantungan komoditas pangan, serta mitigasi dampak inflasi dari daerah pemasok dari luar Kabupaten Mamuju Tengah.		rentan, dan pengembangan sistem peringatan dini terhadap potensi gejolak harga pangan. dan pembentukan mekanisme penyangga (buffer) untuk memitigasi fluktuasi harga yang disebabkan oleh perubahan harga di daerah pemasok utama.	penggilingan padi modern terintegrasi dengan pengemasan yang memenuhi standar pasar modern, dan integrasi manajemen rantai pasok pangan dalam penanganan bencana dan ketahanan ekonomi.
12	meningkatnya literasi keuangan pelaku ekonomi	• Penguatan literasi keuangan pelaku usaha	Menguatkan landasan kebijakan untuk pengembangan akses keuangan daerah melalui	Menguatkan pelaku usaha untuk akses keuangan melalui penyelenggaraan program pelatihan	Menguatkan kelembagaan dalam pengembangan model pendampingan usaha kecil dan	Memperluas jangkauan akses keuangan pelaku usaha melalui	Mendorong kemandirian pelaku ekonomi dalam mengelola

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			penyusunan regulasi daerah dalam mendukung literasi keuangan, identifikasi dan pemetaan pelaku ekonomi lokal (UMKM, Petani, Koperasi, Nelayan), pelatihan dasar literasi keuangan untuk pengelolaan usaha, perencanaan keuangan rumah tangga dan akses layanan keuangan, dan penyusunan roadmap literasi keuangan daerah.	lanjutan untuk manajemen usaha, pemisahan keuangan usaha dan pribadi, pencatatan sederhana, kemitraan dengan perbankan/ lembanga keuangan untuk sosialisasi produk keuangan, tabungan, kredit mikro dan asuransi usaha, penguatan kelembagaan ekonomi lokal untuk koperasi dan BUMDes, dan monitoring awal capaian literasi keuangan pelaku ekonomi	UMKM berbasis digital melalui fasilitasi pembentukan kelompok belajar keuangan dan diskusi bisnis, pelatihan literasi digital untuk akses keuangan online, dan penguatan kapasitas SDM pendamping di kecamatan/ desa.	integrasi dan ekspansi literasi keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, industri kreatif), penguatan akses pelaku ekonomi terhadap KUR, pinjaman modal usaha dan asuransi usaha, penilaian tingkat literasi keuangan secara berkala di masing-masing kecamatan,	usaha dan keuangan secara berkelanjutan melalui upaya penilaian akhir capaian sasaran literasi keuangan pelaku ekonomi, evaluasi dan rekomendasi kebijakan berkelanjutan program literasi keuangan. dan pengembangan pusat informasi literasi keuangan daerah.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
						dan penyempurna-an kebijakan dan kerjasama dengan pihak swasta/ perbankan untuk mendukung literasi keuangan.	
	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial-budaya dalam bingkai Lalla Tassisara						
13	Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	• Pengarusutamaan gender • Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Optimalisasi upaya perwujudan kesetaraan gender melalui integrasi isu relasi gender dalam perencanaan pembangunan, integrasi isu relasi gender dalam perencanaan dalam bentuk gender budgeting statement pada	Optimalisasi upaya pemberdayaan perempuan melalui peningkatan kompetensi dan kapasitas perempuan, promosi dan pembukaan kesempatan yang setara bagi perempuan pada jabatan strategis di sektor publik	Optimalisasi upaya perlindungan anak melalui pengembangan unit pengaduan dan pelayanan anak korban kekerasan, pencegahan anak dari jebakan pekerja bawah umur dan pekerja seks, edukasi masyarakat untuk pencegahan perkawinan dini,	Menguatkan peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak, pengarusutamaan gender dan anak, serta kualitas keluarga	Memastikan keberlanjutan perwujudan pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas perempuan dan ketahanan keluraga, perlindungan perempuan dan anak

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			KAK/RKA kegiatan strategis, penguatan focal point pengarusutamaan gender pada setiap OPD, integrasi gender pada penyediaan fasilitas layanan publik, dan penyadaran publik tentang relasi gender yang setara.	maupun bisnis, perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan, serta perlindungan hak-hak pekerja perempuan, dengan lokus utama pada sektor publik dan swasta pada seluruh kecamatan.	pengembangan ruang bermain bagi anak, dan pemenuhan berbagai aspek untuk kriteria sebagai kabupaten layak anak.	melalui koordinasi dan sinergiatas pemangku kepentingan.	korban kekerasan, serta kesetaraan dan keadilan gender.
14	Terpeliharanya adat istiadat lokal dan cagar budaya	• Pelestarian dan pemajuan kebudayaan • Pemeliharaan kerukunan ummat beragama	Melestarikan dan memajukan warisan budaya tak benda melalui penanaman dan pengamalan nilai dan norma budaya, pembelajaran bahasa daerah di sekolah, penggunaan bahasa daerah	Melestarikan cagar budaya melalui inventarisasi dan registrasi beragam cagar budaya, pemeliharaan bentuk fisik dan material berbagai cagar budaya, pengenalan dan publikasi berbagai benda dan tempat bersejarah, dengan	Memantapkan kerukunan antar ummat beragama melalui penguatan Forum Komunikasi Antar Ummat Beragama, melanjutkan pemberian bantuan rumah ibadah dan insentif imam masjid, guru mengaji dan	Mengembangan pariwisata berbasis pelestarian dan pemajuan warisan budaya melalui penyediaan sarana-prasarana wisata pada tempat-	Memantapkan pemajuan kebudayaan beragam etnis sebagai modal ketahanan daerah dalam menghadapi dinamika perubahan diiringi dengan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			dalam pergaulan sehari-hari, dan pengembangan sanggar kesenian berbagai etnis dengan lokus berbasis komunitas beragam etnis.	lokus pada seluruh kecamatan.	pemuka agama lainnya, akselerasi kegiatan lintas iman, lintas komunitas, lintas budaya serta peningkatan pemahaman moderasi beragama	tempat bersejarah dan tempat-tempat lain yang mempunyai daya tarik wisata, penyelenggaraan festival kesenian antar berwakilan etnis, fasilitasi perkembangan kelompok kesenian profesional berorientasi komersial	pemantapan kerukunan antar ummat beragama dan kohesi sosial antar etnis, serta memberlanjut-kan ekosistem kehidupan beragama dan berbudaya yang harmonis.
15	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana	• Penguatan kesiapsiagaan bencana • Penguatan sistem tanggap darurat dan	Konsolidasi dan penguatan dasar kapasitas sistem mitigasi bencana (termasuk gempa) melalui fokus pada pemetaan risiko berbasis	Meningkatkan kapasitas dan infrastruktur mitigasi dengan fokus infrastruktur fisik dan sistem mitigasi melalui pembangunan	Integrasi mitigasi dalam tata kelola pembangunan dengan fokus pada mainstreaming mitigasi ke semua sektor pembangunan,	Mengembangkan inovasi, adaptasi, dan kesiapsiagaan komunitas dengan fokus pada adaptasi berbasis	Evaluasi, replikasi dan keberlanjutan fokus pada monitoring dan evaluasi menyeluruh serta

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
		rehabilitasi pasca bencana	Kajian Risiko Bencana Daerah (KRBD), penguatan kelembagaan BPBD dan sinergi antar OPD, revisi dan penetapan regulasi/perda kebencanaan berupa RTRW berbasis risiko dan rencana kontinjensi, inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial, pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan, serta pengembangan sistem peringatan dini lokal (Early Warning System - EWS)	sarana prasarana mitigasi (tanggul, sabuk hijau, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara/akhir), integrasi sistem informasi kebencanaan (SIK) berbasis data real-time, sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan masyarakat, pelatihan teknis Tim Reaksi Cepat (TRC), Tagana, dan relawan, serta penanaman vegetasi untuk mitigasi longsor dan banjir.	integrasi mitigasi dalam RTRW dan pembangunan infrastruktur daerah, evaluasi dan uji coba sistem peringatan dini berbasis komunitas, penguatan kemitraan dengan dunia usaha (CSR untuk kebencanaan), program desa tangguh bencana (DESTANA), pendidikan kebencanaan di sekolah dan madrasah, dan pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana terutama pada lokus terjadinya banjir, longsor, dan abrasi.	komunitas dan teknologi inovatif, pengembangan aplikasi mobile sistem informasi dan pelaporan kebencanaan, simulasi penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas daerah, penguatan koperasi atau lembaga ekonomi lokal pasca bencana, pembentukan tim siaga bencana di tiap desa/kelurahan, integrasi mitigasi non-	pelembagaan, evaluasi efektivitas program mitigasi dan pemutakhiran dokumen risiko, revisi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD), perencanaan lanjutan berbasis pembelajaran (lesson-learned) RPJMD sebelumnya, penguatan sistem pembiayaan keberlanjutan mitigasi (dana cadangan,

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
						alam (pandemi, konflik sosial, industri) dalam kebijakan daerah, penelitian kolaboratif dengan perguruan tinggi untuk inovasi mitigasi	asuransi risiko bencana), dan pengembangan indeks ketahanan daerah terhadap bencana.
16	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	• Penanganan pencemaran air dan udara • Pemeliharaan tutupan lahan dan keanekaragaman hayati • Peningkatan ketahanan terhadap dampak	Optimalisasi sumberdaya dalam penaganan sampah dan penataan keindahan lingkungan melalui implementasi Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah dan Limbah (RISPSL),	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai terutama di Tobadak dan Budong-budong, pencegahan dan penanganan pencemaran laut dan pesisir,	Memelihara cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui pencegahan deforestasi akibat ekspansi sawit, konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi	Memelihara kualitas udara secara kolaboratif antara pemerintah dan pelaku industri melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat asap	Memelihara keanekaragaman hayati melalui perlindungan terhadap plasma nutfah yang ada di Mamuju Tengah, mempertahankan dan mengembang

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
		perubahan iklim • Pembangunan rendah karbon	pembangunan/ rehabilitasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPA, dan TPS 3R, pembangunan IPAL komunal/desentralisasi di permukiman padat, perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah, pengadaan armada pengangkut sampah yang ramah lingkungan, peningkatan akses sanitasi layak di desa/kelurahan dan peningkatan kompetensi teknis	perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar, pencegahan dan penaganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit, serta penanganan sampah dan abrasi pantai.	monokultur, pengembangan pertanian polikultur tanaman pangan dan hortikultura, penataan vegetasi dan kualitas lahan gambut, pengembangan ekonomi sirkuler berbasis pertanian terpadu.	pabrik terutama di Salugatta, Pontanakayyang dan beberapa desa di Karossa, pengendalian bau busuk akibat limbah buah dan tandan sawit, penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah perkebunan sawit.	kan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, mengembangkan integrasi peternakan dengan kelapa sawit, serta memelihara keberadaan berbagai jenis ikan dalam sungai dan laut

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			petugas pengelola sampah dan limbah, serta pemberdayaan bank sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga berbasis RW pada semua kecamatan.				
	Misi 6: Mendorong pembangunan kewilayahan yang merata						
17	Terwujudnya kawasan agropolitan	• Pengembangan kawasan agropolitan • Pengembangan kawasan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan	Menguatkan aransemen kelembagaan dan perencanaan pengembangan agropolitan melalui penyusunan master plan pengembangan kawasan agropolitan, pengembangan tim/forum kordinasi lintas sektor untuk	Optimalisasi pemanfaatan sarana-prasarana pendukung produksi pertanian secara beriring dengan sarana-prasarana layanan industri dan jasa pertanian melalui pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, jalan usahatani dan jalan penghubung sentara produksi	Optimalisasi kapasitas SDM petani dan wirausaha pertanian dalam menopang perkembangan agropolitan melalui penyuluhan, pelatihan, pendampingan teknis, penguatan kelembagaan kelompok tani dan koperasi desa, pengembangan kewirausahaan,	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pertanian untuk pengembangan industri pengolahan dan pemasaran melalui investasi industri pengolahan hasil pertanian di	Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk keberlanjutan kawasan agropolitan melalui penerapan praktik pertanian dan industri yang ramah lingkungan, pengembangan agrowisata dengan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
			pengembangan agropolitan (perangkat daerah terkait, perwakilan petani, perwakilan perusahaan perkebunan, perwakilan usaha sarana produksi dan layanan pertanian, perwakilan masyarakat), pemberlakuan kebijakan/regulasi daerah terkait insentif investasi, kemudahan perizinan dan sebagainya, dengan lokus prioritas di Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Budong-budong.	dengan pasar, sarana pasca panen, dukungan listrik dan ketersedian air bersih, sarana komunikasi dan informasi, serta fasilitasi usaha penyediaan alsintan dengan lokus prioritas di Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Budong-budong	fasilitasi tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pengolahan hasil pertanian dan jasa pendukung, literasi keuangan dan fasilitasi akses sumber pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha, dengan lokus prioritas pada desa/kelurahan di Kecamatan Tobadak, Topoyo, dan Budong-budong serta lokus pendukung di Kecamatan Pangale dan Karossa	kawasan agropolitan, peningkatan nilai tambah produk dengan pengolahan dan packaging, pengembangan jaringan pemasaran dengan fasilitasi akses ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan e-commerce, serta promosi dan branding dengan membangun citra positif dan merek produk agropolitan,	memanfaatkan potensi dan kawasan pertanian sebagai daya tarik wisata, serta secara manajerial melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap arah perkembangan kawasan agropolitan

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
						dengan lokus prioritas pada desa/kelurahan di Kecamatan Tobadak, Topoyo dan Budong-budong.	
18	terwujudnya pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru dan berkelanjutan	• Pengembangan tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis pedesaan • Pemantapan tata ruang desa	Optimalisasi sosialisasi kerangka kebijakan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan Kabupaten, pemetaan dan penetapan desa potensial sebagai pusat pertumbuhan baru	Peningkatan Penyelenggaraan kebijakan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan Kabupaten serta pembangunan gerbang batas kabupaten.	Penguatan kebijakan Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan Kabupaten serta pembangunan gerbang batas kabupaten.	Evaluasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan	Akselerasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan
	Misi 7: Mendorong pembangunan infrastruktur berkualitas						

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
19	terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan	• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan • Pemenuhan sarana/prasarana pelayanan dasar • Pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana kawasan agropolitan	Perencanaan, Pemetaan & Konsolidasi Awal Fokus pada Penyusunan dokumen teknis, pemetaan prioritas, dan penetapan skala urgens ipeningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Peningkatan Kapasitas dan Infrastruktur Fokus pada Integrasi antarwilayah dan peningkatan daya guna infrastruktur peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Ekspansi dan Konektivitas Lintas Wilayah Fokus pada Integrasi antarwilayah dan peningkatan daya guna infrastruktur peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Optimalisasi, Pengendalian, dan Teknologi Tepat Guna Fokuspada Keandalan layanan, efisiensi, dan adaptasi teknologi peningkatan jalan, pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, penerangan jalan,	Evaluasi, Keberlanjutan dan Replikasi Fokus pada Pemerataan pembangunan dan penguatan kelembagaan pemeliharaan melalui Evaluasi kondisi dan dampak seluruh infrastruktur yang telah dibangun, Pelembagaan sistem pengelolaan air bersih oleh BUMDes atau UPT daerah, Revitalisasi saluran

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
							banjir dan konservasi daerah tangkapan air,Program padat karya pemeliharaan jalan dan PJU oleh masyarakat
	Misi 8: Menjaga kesenimbungan pembangunan dan daya saing daerah						
	meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	• Peningkatan kualitas perencanaan • Peningkatan kualitas penganggaran	harmonisasi perencanaan melalui peningkatan kapasitas SDM perencana dengan lokus pada semua perangkat daerah	penguatan solvabilitas keuangan untuk menjamin rasio belanja wajib dan belanja pembangunan yang lebih proporsional, kapasitas fiskal daerah lebih stabil dan terukur serta pemerintah daerah yang memiliki fleksibilitas fiskal untuk	peningkatan PAD dan kapasitas fiskal daerah yang fokus pada optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah (digitalisasi pajak daerah), reformasi tata kelola penerimaan daerah (sinkronisasi data wajib pajak), inovasi sumber pendapatan baru (cukai daerah, TPPU sektor informal) dan	pemanfaatan aset dan penguatan perusda sebagai sumber pendapatan yang fokus pada inventarisasi dan valuasi aset daerah, pemetaan potensi aset untuk disewakan,	kerjasama antar daerah dan pemda dengan non-pemda yang fokus pada pembentukan forum kerjasama antar kabupaten/kota (dalam dan luar provinsi), kemitraan strategis

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
				pembangunan strategis	kemitraan publik-swasta dalam pembiayaan pembangunan.	dijadikan KPBU, datau dikerjasamakan, revitalisasi dan profesionalisasi Perusda, dan pembentukan holding BUMD atau unit usaha strategis.	dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik dan pengembangan ekonomi, penerapan skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, dana filantropi, dana inovatif lainnya), dan penguatan jejaring dengan lembaga donor dan mitra internasional.

No.	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi				
			2026	2027	2028	2029	2030
	meningkatnya daya saing daerah	• Peningkatan daya saing investasi daerah	menetapkan fondasi dan penguatan sinergi melalui penyusunan peta jalan daya saing daerah, peta potensi unggulan daerah yang bekerja sama dengan universitas/politeknik, serta baseline daya saing berbasis indikator yang bekerja sama dengan lembaga terkait	Mendorong akselerasi ekonomi lokal dan investasi inklusif melalui pengembangan kawasan ekonomi desa berbasis potensi lokal dengan kerja sama sektor swasta dan BUMN/BUMD/BUMDes, Mengoptimalkan peran CSR dalam pembinaan UMKM dan pembiayaan usaha kecil dengan minimal kerja sama aktif dengan 10 pelaku usaha strategis	menguatkan kualitas SDM melalui kerja sama dengan pendidikan dan industri dengan melakukan Inkubasi bisnis pemuda dan UMKM berbasis kampus, mengadakan Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan industri melalui program link & match dunia pendidikan-kerja	Meningkatkan konektivitas ekonomi daerah dengan pasar nasional dan global melalui promosi investasi dan penguatan jaringan kerja sama, menguatkan branding daerah melalui sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan industri kreatif	Konsolidasi kelembagaan kerja sama daerah melalui pencapaian indikator daya saing daerah secara maksimal, serta Penetapan model kerja sama daerah yang berhasil sebagai praktik baik dan direplikasi pada sektor lain

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program prioritas dihasilkan dari cascading kinerja yang dimulai dari visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator sesuai dengan tingkatannya. Program prioritas pembangunan merupakan program prioritas atau janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2025-2030 yang disesuaikan dengan nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850/2025.

Tabel 3. 12 Program Prioritas RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(S1.1) Meningkatnya kualitas modal manusia	Meningkatkan partisipasi anak usia sekolah	Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama		
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
	Meningkatnya kualitas pemuda	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			SAING KEPEMUDAAN	
	Meningkatnya daya saing kepramukaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi kepramukaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	Meningkatnya pembudayaan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	Meningkatmya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)		
	Meningkatnya masyarakat bidang kesehatan	Persentase masyarakat didang kesehatan uang diberdayakan	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka kelahiran total (TFR)	PENGENDALIAN PENDUDUK	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (ASFR15-19)		
	Meningkatmya pemberdayaan dan	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mcpr)		

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
(S1.2) Berkurangnya Penduduk Miskin dan Ketimpangan Pendapatan	Meningkatnya aksesibilitas hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	-Rata-rata lama sekolah -Harapan lama sekolah -Angka literasi/numerasi	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	-Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi -SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi -Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	-Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		pengemis yang terpenuhi -Indeks Kesejahteraan Sosial		
	Meningkatnya kualitas perorangan masyarakat dan perorangan	-Angka kematian ibu -Prevalensi stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	-Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar -Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi -Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. -Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		kabupaten/kota -Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		hak-hak pekerja dan dialog sosial		
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	Meningkatnya aksesibilitas Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas laut	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
	Meningkatnya pemberdayaan sosial	-Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi -SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi -Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	-Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi -Indeks Kesejahteraan Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	-Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar -Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi -Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan. -Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota -Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
	Optimalnya penanganan warga negara migran yang memperoleh tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(S2.1) Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja perekonomian daerah secara berkelanjutan		-Pertumbuhan ekonomi -TPT		
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal 2. Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Meningkatnya daya saing UMKM		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
	Meningkatnya kanasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi Pariwisata dan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 2. Peningkatan Produksi Hortikultura 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) 2. Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		atau NKV (Nomor Kontrol Veterinerl		
	Meningkatnya produksi perikanan tanzkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
	Meningkatnya produksi perikanan budidava	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masvarakat	Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintezrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasny a	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Neaeri	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
(S2.2) Meningkatnya kontribusi sektor industri dalam struktur perekonomian daerah		Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB		
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Rezional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kernantapan Jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	Meningkatnya kualitas ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan lntelektual	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pang an	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	PROGRAM PEMBERDAYAAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
(S2.3) Berkembangnya Digitalisasi dan Inovasi Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah		Indeks Masyarakat Digital		
		Indeks Inovasi Daerah		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	1. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2.Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	Berkembangnya riset dan inovasi untuk pembangunan ekonomi	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
	Meningkatnya literasi digital masyarakat	Indeks pembangunan literasi masyarakat	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
(S3.1) Meningkatnya kualitas produk hukum dan		Indeks Reformasi Birokrasi		
		Indeks Reformasi Hukum		

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
akuntabilitas pemerintahan daerah		Indeks Kualitas kebijakan (IKK) (LAN)		
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	-Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N -Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	-Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) -Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	-Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) -Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
(S3.2) Meningkatnya akuntabilitas keuangan		Opini BPK		
	Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atapun proses kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	-Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N -Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
	Meningkatnya kualitas produk hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	-Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) -Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN , PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
	Meningkatnya tata kelola anggaran	-Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD -Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	-Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar -Persentase penurunan SILPA		
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase penambahan nilai aset tetap		

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah		
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital		
(S3.3)Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Indeks Pembangunan Statistik	PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi	PENATAAN ORGANISASI	
	Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa	Tingkat kematangan UKPBJ	KEBIJAKAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai formasi	KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		
(S3.4) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	PENDAFTARAN PENDUDUK	
		Persentase Kepemililikan Kartu Identitas Anak		
	Maningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase akta kematian yang diterbitlkan bagi yang melaporkan	PENCATATAN SIPIL	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
		Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
		Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan		
(S4.1) Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum, sosial politik dan demokrasi substansial		Indeks Kriminalitas		
		-Penurunan tingkat gangguan keamanan dan ketertiban -'Persentase penegakan Perda		
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya penanganan gangguan kententraman dan ketertiban umum	Persentase penyelenggaraan tribuntranmas		
	Meningkatnya Perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat		

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya		
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		
	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik Pada Kader Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Persentase konflik sosial yang diselesaikan di wilayah kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
(S4.2) Terwujudnya stabilitas kebutuhan pokok masyarakat secara merata		- Tingkat Inflasi		
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting:	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Pen ting	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
	Meningkatnya infrastruktur perdagangan pangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
	Meningkatnya koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektivitas Kerja Sama Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Terjaminnya ketersediaan ikan segar untuk konsumsi	Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
	Meningkatnya sistem informasi harga pangan real-time	1. Indikator anomali harga pangan, 2. Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus)	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		1 dari target yang ditetapkan	PANGAN MASYARAKAT	
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
(S4.3) Meningkatnya literasi keuangan pelaku ekonomi		- Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)		
	Meningkatnya penggunaan layanan keuangan formal	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
(S5.1) Terwujudnya kesetaraan gender dan perlindungan anak		Indeks Kerukunan Umat Beragama		
		Indeks Ketimpangan Gender		
	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai standar (indeks)	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan akan	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan dan evaluasi dan atau penyusunan kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks pemenuhan hak anak	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan, dan	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus mendapatkan penanganan secara komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	perlakuan salah lainnya terhadap anak			
	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana	Mcpr	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujukdkan keluarga sejahtera	Peresentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
(S5.2) Terpeliharanya adat istiadat lokal dan cagar budaya		Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan		
	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Produk Kebijakan terkait Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang Dikoordinasikan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
	Meningkatnya tata kelolah museum	Persentase kunjungan wisatawan ke museum	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
(S6.1) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanganan bencana		Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (ton CO2 e)		
		Indeks Risiko Bencana		
	Meningkatnya korban terdampak bencana yang tertangani	Persentase Penangan Bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatnya Perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana		
	Meningkatnya bencana pertanian yang tertangani	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
(S6.2) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah		IKLHD		
	Meningkatnya efektifitaskajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas air, Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
	Meningkatnya upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan,	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	konservasi, dan restorasi			
	Meningkatnya Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	Meningkatnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya rumah tangga yang terlayani pengumpulan sampah	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
	Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase peningkatan sampah yang dikelola TPA/TPST regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			PERSAMPAHAN REGIONAL	
(S7.1) Terwujudnya kawasan agropolitan		Indeks Desa		
		Persentase desa yang memiliki lapangan usaha berbasis industri dan jasa layanan pertanian		
	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase fasilitasi kerjasama desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase promosi produk lokal yang di fasilitasi/dilaksanakan	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	
		Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB		
	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan & Perkebunan, 2. Peningkatan Produksi Horltikultura, 3. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertaniab	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan Menjadi LP2B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1. Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS), 2.Persentase Unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikasi pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	1. Persentase SDM Penyuluhan pertanian yang ditingkatkan. 2.Persentase Kelembagaan koperasi Tani yang dibentuk dan beroperasi	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
(S7.2) Terwujudnya pedesaan sebagai pusat pertumbuhan baru dan berkelanjutan		Nilai SDG's desa		
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
	Meningkatnya Badan Usaha Milik Desaa yang Aktif	Persentase BUMDES berstatus aktif	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
	Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam pembangunan Desa	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
(S8.1) terpenuhinya kebutuhan infrastruktur wilayah dan sarana prasarana pelayanan dasar serta sarana prasarana pusat pertumbuhan dan pengembangan agropolitan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur		
		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah		
	Meningkatnya jalan dengan kondisi baik dan kondisi sedang	Rasio kemantapan jalan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	Meningkatnya sarana prasarana kelengkapan jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
	Meningkatnya area atau wilayah yang	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	PROGRAM PENATAAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	bangunan dan lingkungan sekitarnya telah ditata dengan rapi, terstruktur, dan memenuhi standar estetika, fungsional, serta keselamatan		BANGUNAN GEDUNG	
	Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	Meningkatnya Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase cakupan drainase dalam mkondisi baik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	Meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Meningkatnya Kawasan Kumuh yang tertangani	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	Meningkatnya Kualitas infrasruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur permukiman dalam kondisi baik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	
	Meningkatnya jumlah penduduk yang terlayani mobile broadband.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
(S9.1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran dalam menunjang kesinambungan pembangunan	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD		
	Meningkatnya kualitas Perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar		
		Persentase penurunan SILPA		
	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu		
	Meningkatnya upaya ekstendifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan		
	Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah	Efektifitas kerja sama daerah	PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	
		Kinerja penyelenggaraan pemerintah		
	Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang termanfaatkan dalam		

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
	dalam pengembangan potensi unggulan	kebijakan pembangunan daerah		
	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah		
	Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		
(S9.2) meningkatnya daya saing investasi daerah		Persentase kenaikan nilai PMDN dan PMA		
	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis resiko	Persentase pelaku usaha yang memperoleh perizinan sesuai ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	

Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas	Keterangan
		pelaku usaha dalam membuka usaha		
	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	

Berdasarkan hasil kajian Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK di Derah (RIPJPID) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, mencermati kondisi eksisting daerah dan tingkat kemajuan daerah yang dicapai Kabupaten Mamuju Tengah saat ini, RIPJPID 2025-2029 difokuskan pada lima tema prioritas penyelesaian permasalahan utama pembangunan yang dihadapi. Potensi sumberdaya daerah yang potensial sebagai *game changer* dalam mengatasi permasalahan dan mengoptimalkan pencapaian pembangunan daerah dirumuskan dalam lima Produk Unggulan Daerah (PUD) selama periode 2025-2029. Mengacu pada upaya pemajuan riset dan inovasi daerah untuk mengatasi permasalahan utama dan mengoptimalkan pencapaian pembangunan daerah yang didasari pada potensi sumberdaya, maka dirumuskan lima produk unggulan daerah yang akan menjadi fokus pengembangan riset dan inovasi untuk menghasilkan evidence based policy Kabupaten Mamuju Tengah selama periode 2025-2029. Pertama, komoditas Pisang. Komoditas ini merupakan salah satu endowment penting yang menunjukkan kinerja positif dan menjanjikan sebagai salah satu produk unggulan daerah. Kedua, perikanan darat. Lapangan usaha perikanan darat, khususnya subsektor pembenihan ikan, menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Mamuju Tengah. Ketiga, Gula Aren. Komoditas ini memiliki potensi besar sebagai produk unggulan berbasis kearifan lokal, dilakukan secara tradisional oleh masyarakat di daerah perbukitan dan pedalaman, khususnya oleh petani penyadap nira dari pohon enau atau aren yang tumbuh liar. Keempat, pariwisata. Pulau Kambunong merupakan salah satu destinasi wisata bahari potensial, memiliki daya tarik berupa batuan, pasir putih, air laut jernih, serta ekosistem bawah laut yang masih relatif alami. Kelima, lapangan usaha Ekonomi Kreatif. Lapangan usaha ini mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya dalam subsektor kriya yang mengolah sumber daya lokal menjadi produk bernilai tambah tinggi.

Tabel 3. 13 Sasaran Strategis Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Produk Unggulan ke-1: Pengembangan PUD Pisang					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan pisang segar dan keripik sebagai produk unggulan daerah.	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan komoditas pisang	Terlaksananya kebijakan riset dan inovasi melalui integrasi program PUD pisang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi pisang	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi daerah terkait pengembangan pisang segar dan keripik pisang
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya inventarisasi varietas pisang lokal dan pelaku usaha keripik pisang	Terbangunnya sistem database digital terkait data komoditas pisang	Terlaksananya proses entri dan validasi data budidaya, produksi, dan pemasaran pisang	Terintegrasinya database pisang dengan sistem informasi daerah dan nasional	Terlaksananya evaluasi penggunaan database untuk pemetaan potensi ekspor dan kemitraan usaha pisang segar dan keripik
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur riset dan pengolahan pisang	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi pisang	Terbangunnya fasilitas riset, pengolahan, dan pengemasan produk pisang	Termanfaatkannya fasilitas riset dan program pendampingan untuk pelaku usaha pisang	Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung inovasi

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					produk pisang segar dan keripik pisang
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan pisang segar dan keripik berbasis potensi dan tantangan daerah.	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan pengembangan pisang.	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan inovasi teknologi budidaya, pascapanen, dan pengolahan keripik pisang melalui anggaran daerah.	Terlaksananya penguatan skema pendanaan (misalnya kolaborasi APBD, dana CSR, dan program pusat) untuk memperluas kegiatan inovasi produk pisang	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD pisang
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM daerah terkait proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk pisang segar dan keripik.	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya HKI, seperti merek, desain kemasan, dan resep lokal pisang.	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual lokal, termasuk inovasi pengolahan keripik pisang dan teknik budidaya pisang khas daerah.	Terinventarisasinya kekayaan intelektual yang sudah dan belum didaftarkan, serta tersusunnya daftar produk pisang yang berpeluang dilindungi secara hukum	Terlaksananya evaluasi proses perlindungan dan pemanfaatan HKI, serta tersusunnya mekanisme pengelolaan kekayaan intelektual berbasis komunitas untuk pengembangan PUD pisang.

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi riset dan inovasi terkait pengembangan pisang segar dan keripik	Terbentuknya forum koordinasi dan kolaborasi riset pisang antar akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah	Terlaksananya program kolaboratif riset dalam budidaya dan pengolahan pisang	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif dalam bentuk pelatihan, atau pengembangan produk baru pisang	Terlaksananya evaluasi efektivitas kolaborasi riset dan inovasi serta tersusunnya model kelembagaan kolaboratif untuk pengembangan komoditas pisang
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersusunnya kajian kebutuhan dan rencana teknis penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi pisang, disesuaikan dengan kapasitas daerah	Terlaksananya pengadaan atau rehabilitasi sarana sederhana untuk riset dan pelatihan teknologi pengolahan pisang	Teroptimalisasinya penggunaan sarana riset oleh pelaku usaha pisang	Terpeliharanya dan meningkatnya mutu fasilitas pendukung riset dan inovasi produk pisang	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan sarana riset dan pengembangan pisang, serta perencanaan peningkatan kualitas dan daya dukungnya
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Tersusunnya kajian pemetaan kelembagaan dan potensi kolaborasi antara pemerintah	Terlaksananya forum koordinasi untuk menyusun rencana kemitraan riset dan inovasi	Terlaksananya kegiatan kolaboratif antarlembaga (pelatihan, riset, dan dan	Terjalinnya kemitraan aktif antar lembaga yang mendukung inovasi dan peningkatan nilai	Terlaksananya evaluasi kemitraan dan penyusunan rencana penguatan kolaborasi untuk

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas dalam pengembangan PUD pisang	berbasis komoditas pisang.	pendampingan teknis dalam budidaya dan pengolahan pisang)	tambah pisang secara berkelanjutan.	keberlanjutan pengembangan pisang
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model dan strategi transfer teknologi untuk pelaku usaha pisang segar dan keripik berdasarkan kebutuhan lokal.	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan aparatur daerah tentang cara difusi teknologi untuk pengolahan dan budidaya pisang.	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi teknologi inovatif budidaya pisang organik serta proses produksi keripik pisang yang efisien kepada masyarakat dan pelaku UMKM	Terlaksananya kegiatan pengenalan alat pengolahan, teknik pengemasan, serta cara mengolah limbah pisang menjadi produk yang bernilai tambah	Terlaksananya evaluasi terhadap keberhasilan transfer teknologi kepada pelaku usaha pisang segar dan keripik
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersusunnya kajian pemetaan penerapan hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha pisang segar dan keripik sebagai model pembelajaran / model percontohan daerah	Terlaksananya pelatihan dan workshop kepada pelaku usaha pisang segar dan keripik terkait adopsi hasil riset dan praktik baik (budidaya,	Terlaksananya pendampingan teknis kepada pelaku usaha pisang yang telah mengikuti pelatihan, termasuk konsultasi teknologi dan manajemen	Terlaksananya diseminasi metode dan pengalaman sukses pengembangan pisang kepada pelaku baru dan mitra daerah melalui media, kunjungan lapangan, dan materi pembelajaran	Terlaksananya evaluasi efektivitas program pelatihan, pendampingan, dan diseminasi terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha pisang

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pengolahan, dan pemasaran)	usaha berbasis hasil riset.		
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan pisang kepada masyarakat luas	Terlaksananya kampanye inovasi melalui media sosial, radio lokal, dan video pendek yang menampilkan cerita sukses pelaku usaha pisang yang memakai inovasi	Terselenggaranya kegiatan expo inovasi pisang di tingkat daerah yang menampilkan produk inovatif pisang dan teknologi pengolahannya	Terwujudnya penguatan kolaborasi kampanye inovasi pisang bersama pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, sekolah, dan komunitas lokal	Terlaksananya evaluasi dampak kegiatan promosi dan kampanye inovasi terhadap minat dan pemakaian inovasi di kalangan pelaku usaha pisang, baik pisang segar maupun keripik
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya kajian model kegiatan lomba dan pameran inovasi yang sesuai dengan potensi lokal dan praktik baik pengembangan usaha pisang segar dan keripik	Terlaksananya lomba inovasi dan kreativitas pengembangan produk pisang (budidaya, pengolahan, kemasan, dan pemasaran) di kalangan pelajar,	Terselenggaranya pameran inovasi hasil lomba sekaligus seleksi produk unggulan untuk dipromosikan lebih luas di tingkat provinsi	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba inovasi produk pisang untuk mengikuti kompetisi inovasi di tingkat nasional	Terlaksananya evaluasi efektivitas lomba dan pameran inovasi, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan inovasi pelaku usaha pisang yang menerima apresiasi

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		mahasiswa, dan kelompok usaha			
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian model dan strategi inkubasi bisnis yang menarik, sederhana, dan sesuai untuk pengembangan usaha pisang segar dan keripik	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM daerah melalui bimtek dan seminar tentang konsep inkubasi bisnis dan peluang komersialisasi hasil riset pada usaha pisang	Terlaksanya pelatihan teknis dan manajemen bisnis untuk calon pengusaha pemula pisang berbasis riset, mulai dari produksi, pengemasan, hingga pemasaran	Terlaksananya proses pendampingan intensif terhadap peserta inkubasi untuk membentuk perusahaan rintisan berbasis inovasi produk pisang di tingkat desa atau kecamatan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas inkubasi bisnis dan keberlanjutan usaha baru berbasis riset di sektor pisang, serta penyusunan strategi replikasi di wilayah lain
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database terkait teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya pisang segar dan keripik pisang	Tersusunnya kodefikasi dan dokumentasi teknologi masyarakat, termasuk cara tradisional pematangan, pengolahan, dan penyimpanan pisang	Termanfaatkannya teknologi lokal oleh kelompok tani dan pelaku UMKM dalam budidaya dan pengolahan pisang	Terlaksananya pengembangan teknologi dan perluasan penggunaan oleh pelaku usaha pisang untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kualitas produk	Terlaksananya evaluasi dampak penggunaan teknologi terhadap produktivitas dan nilai tambah pisang, baik pisang segar maupun keripik pisang
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Tersusunnya kajian identifikasi topik riset dan inovasi sesuai kebutuhan pengembangan pisang, baik pisang segar maupun produk olahan seperti keripik.	Terlaksananya kegiatan riset dan IPTEK yang berfokus pada peningkatan produktivitas, kualitas, dan daya simpan pisang serta inovasi dalam pengolahan keripik	Terwujudnya penguatan riset terapan untuk menjawab permasalahan pelaku usaha pisang, seperti efisiensi proses produksi, pengemasan, dan pengendalian pascapanen	Terjalinnya kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi dalam mengembangkan solusi berbasis data untuk promosi dan pemasaran produk pisang lokal	Terlaksananya evaluasi hasil riset dan inovasi pengembangan PUD pisang serta tersusunnya rencana pengembangan lanjutan
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersusunnya kajian pengembangan klaster inovasi pisang, termasuk pemetaan pelaku, potensi wilayah, dan rantai nilai dari hulu (budidaya) hingga hilir (olahan dan pasar)	Terbentuknya klaster inovasi pisang di wilayah sentra produksi utama dengan melibatkan petani, UMKM, pelaku industri rumah tangga, dan lembaga riset	Terlaksananya peningkatan kapasitas klaster inovasi pisang melalui pelatihan, teknologi tepat guna, dan dukungan akses pasar	Terlaksananya penguatan jejaring klaster inovasi pisang dengan pihak luar daerah melalui promosi antar klaster dan kolaborasi riset lanjutan	Terlaksananya evaluasi dan perbaikan sistem klaster inovasi berbasis pisang serta replikasi model klaster di wilayah potensial lainnya
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat	Tersusunnya kajian terkait penyelarasan arah kebijakan riset dan inovasi daerah	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset dan	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga	Terlaksananya evaluasi termasuk rekomendasi kebijakan untuk

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dan Pemerintah Daerah	dengan kebijakan nasional terkait pengembangan komoditas pisang.	inovasi daerah agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, serta agenda prioritas nasional di sektor pangan dan hortikultura	untuk menyamakan aturan dalam mendukung kebijakan riset dan inovasi pisang	pusat untuk pengembangan riset terapan dan hilirisasi produk pisang	memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pengembangan PUD pisang
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian tentang tren dan isu global terkait pertanian berkelanjutan, teknologi pangan, dan pengolahan pisang yang relevan dengan konteks lokal	Terlaksananya sosialisasi isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan agrikultur, dan ketahanan pangan kepada pelaku riset dan pelaku usaha pisang di daerah	Terlaksananya seminar atau webinar internasional di tingkat daerah dengan menghadirkan mitra global di bidang pertanian dan inovasi pangan berbasis pisang	Terlaksananya integrasi isu global ke dalam riset dan inovasi pisang, seperti adopsi praktik ramah lingkungan dan standar ekspor pada produk pisang segar dan keripik pisang	Terlaksananya evaluasi dampak integrasi isu internasional terhadap pengembangan ekosistem riset dan inovasi pisang
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerja sama internasional dalam pengembangan riset dan inovasi produk	Terlaksananya komunikasi awal dan pengiriman proposal kerja sama ke mitra	Terlaksananya program kolaborasi riset atau pelatihan teknis bersama mitra luar negeri	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha pisang dan akademisi lokal dalam kegiatan pertukaran pengetahuan	Terlaksananya evaluasi efektivitas kerja sama internasional dan penyusunan roadmap

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pisang, termasuk potensi mitra dari negara-negara penghasil pisang	internasional potensial (universitas, NGO, lembaga riset) untuk membangun kerja sama pengembangan riset pisang	terkait budidaya dan pengolahan pisang	dan jejaring internasional melalui fasilitasi pemerintah daerah.	keberlanjutan kemitraan luar negeri untuk pengembangan riset dan inovasi pisang
Produk Unggulan ke-2: Pengembangan PUD Perikanan (Pembenihan dan Pembesaran Ikan, Rumput Laut)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian analisis kebijakan riset dan inovasi yang mendukung pengembangan sistem pembenihan ikan air tawar secara berkelanjutan	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk sektor perikanan, khususnya penguatan sistem pembenihan ikan air tawar, serta budidaya rumput laut	Terlaksananya uji coba kebijakan riset dan inovasi berbasis data lokal dalam pengembangan teknologi pembenihan dan distribusi benih ikan dan benih rumput laut	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi dalam penguatan sistem pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, serta budidaya rumput laut	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi daerah terkait pengembangan PUD perikanan darat, termasuk penguatan sistem pembenihan dan pembesaran ikan air tawar, serta budidaya rumput laut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya inventarisasi jenis ikan air tawar lokal unggulan, unit usaha pembenihan, pembesaran ikan, serta komoditas rumput laut	Tersusunnya sistem basis data digital untuk mendukung riset dan inovasi pada sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya proses entri dan validasi data teknis terkait pembenihan, pembesaran, produksi, dan distribusi benih ikan serta bibit rumput laut	Terintegrasinya basis data pembenihan, pembesaran ikan, serta rumput laut dengan sistem informasi daerah dan nasional untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data	Terlaksananya evaluasi terkait pemanfaatan basis data pembenihan ikan dalam mendukung perencanaan dan pengembangan inovasi sektor perikanan (pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut)
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur riset dan fasilitas pembenihan, pembesaran ikan air tawar, serta budidaya rumput laut	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut.	Terbangunnya fasilitas riset, laboratorium, dan unit produksi benih, pembesaran ikan, serta laboratorium pendukung kualitas rumput laut.	Termanfaatkannya fasilitas riset dan program pendampingan teknis bagi pelaku usaha dan unit pembenihan, pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut	Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas infrastruktur riset dan pembenihan, pembesaran ikan, serta rumput laut sebagai pusat pengembangan inovasi perikanan

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan sistem pembenihan dan pembesaran ikan, serta rumput laut berbasis potensi dan tantangan daerah	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan pengembangan sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan inovasi teknologi pembenihan, pembesaran ikan, manajemen mutu benih dan bibit rumput laut	Terlaksananya penguatan skema pendanaan untuk memperluas cakupan inovasi sektor benih, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD perikanan darat, termasuk pengembangan sektor benih, pembesaran ikan, dan rumput laut
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM daerah terkait proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual untuk produk perikanan, khususnya teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan inovasi budidaya rumput laut	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya HKI, seperti merek dagang, inovasi teknik pemijahan, teknik pembesaran, dan deain sistem	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual lokal di sektor pembenihan, pembesaran ikan, serta rumput laut	Tercatatnya seluruh kekayaan intelektual di bidang pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut, baik yang sudah maupun yang belum didaftarkan, serta tersusunnya daftar produk dan teknologi yang dapat dilindungi secara hukum	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas perlindungan dan pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memperkuat pengembangan sektor perikanan darat dan rumput laut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		budidaya ikan dan rumput laut lokal			
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi riset dan inovasi dalam pengembangan pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terbentuknya forum koordinasi riset pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah	Terlaksananya program kolaboratif riset teknik pembenihan, pembesaran, manajemen kualitas air, dan rumput laut	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif dalam bentuk pelatihan, pengembangan teknologi, atau pendampingan usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kolaborasi riset dan inovasi, serta tersusunnya model kelembagaan dalam pengembangan sektor pembenihan dan pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersusunnya kajian kebutuhan dan rencana teknis penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi untuk sektor pembenihan, pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut, yang disesuaikan dengan	Terlaksananya pengadaan atau rehabilitasi sarana dasar seperti bak pemijahan, kolam pembesaran, laboratorium mini air, unit pelatihan teknis pembenihan dan pembesaran ikan,	Teroptimalisasinya pemanfaatan sarana riset dan inovasi oleh pelaku usaha pembenihan, pembesaran ikan, serta budidaya rumput laut melalui pelatihan,	Terpeliharanya dan meningkatnya mutu fasilitas pendukung riset dan inovasi untuk benih ikan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas penggunaan sarana riset dan inovasi untuk sektor perikanan darat dan rumput laut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	kapasitas fiskal daerah	serta fasilitas untuk budidaya rumput laut	pendampingan, dan kolaborasi		
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Tersusunnya kajian pemetaan kelembagaan dan potensi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas dalam pengembangan pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya forum koordinasi untuk menyusun rencana kemitraan riset dan inovasi berbasis komoditas unggulan lokal (benih ikan dan rumput laut)	Terlaksananya kegiatan kolaboratif antar lembaga seperti pelatihan, riset, dan pendampingan teknis dalam bidang pembenihan dan distribusi benih ikan serta pengembangan rumput laut	Terjalinnya kemitraan aktif antar lembaga yang mendorong inovasi, peningkatan mutu serta perluasan akses benih ikan dan hasil budidaya rumput laut	Terlaksananya evaluasi kemitraan dan penyusunan rencana penguatan kolaborasi kelembagaan untuk keberlanjutan pengembangan sektor perikanan dan rumput laut
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model dan strategi transfer teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut bagi pelaku usaha dan	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha, dan komunitas tentang metode difusi teknologi, mulai	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi inovasi teknologi perikanan, seperti sistem resirkulasi (RAS), bioflok, pakan alternatif,	Terlaksananya kegiatan pengenalan alat dan teknik sederhana, seperti pengontrol kualitas air, sistem pengemasan, hingga pengolahan limbah budidaya menjadi	Terlaksananya evaluasi efektivitas transfer teknologi kepada pelaku usaha dan komunitas dalam pengembangan PUD perikanan (pembenihan,

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	kelompok masyarakat,yang disesuaikan dengan potensi daerah	dari teknik pemijahan, pemeliharaan, pembesaran benih ikan, hingga budidaya dan pengolahan rumput laut	dan inovasi pengolahan rumput laut kepada pembudidaya kecil dan menengah	produk bernilai tambah untuk sektor ikan dan rumput laut	pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut)
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersusunnya kajian pemetaan penerapan hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha di sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut sebagai model pembelajaran atau percontohan di daerah	Terlaksananya pelatihan dan workshop kepada pelaku usaha, kelompok pembenih, dan UPR tentang adopsi hasil riset, praktik sukses budidaya, dan teknik manajemen kualitas untuk ikan dan rumput laut	Terlaksananya pendampingan teknis bagi pelaku usaha yang telah mengikuti pelatihan, termasuk konsultasi teknologi, penguatan kelembagaan, serta dukungan pemasaran produk	Terlaksananya diseminasi metode dan praktik baik pengembangan benih ikan, pembesaran, serta rumput laut kepada pelaku baru dan daerah mitra, melalui media, kunjungan lapang, serta bahan pembelajaran	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas pelatihan, pendampingan, dan diseminasi riset dan inovasi di sektor perikanan dan rumput laut
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk memperkenalkan hasil riset dan inovasi dalam pengembangan PUD perikanan, meliputi pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut kepada masyarakat, pelaku udaha dan pemangku kepentingan	Terlaksananya kampanye inovasi melalui berbagai media seperti media sosial dan video edukatif yang menampilkan praktik sukses inovasi pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terselenggaranya expo inovasi perikanan di Tingkat kabupaten/kota yang menampilkan teknologi pembenihan, pembesaran ikan, dan sistem budidaya rumput laut	Terjalinnya kolaborasi kampanye inovasi bersama pelaku pariwisata, sekolah perikanan, komunitas pembudidaya, pelaku ekonomi kreatif, dan UMKM	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak kampanye inovasi terhadap peningkatan minat dan adopsi teknologi baru di kalangan pelaku usaha pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya kajian model lomba dan pameran inovasi yang relevan dengan pengembangan pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya lomba inovasi dan kreativitas dalam pembenihan, pembesaran, pengemasan, dan pemasaran produk perikanan dan rumput laut, melibatkan	Terselenggaranya pameran hasil lomba sekaligus promosi produkunggulan perikanan dan rumput laut di tingkat provinsi maupun nasional	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba agar dapat berkompetisi di ajang inovasi tingkat nasional dan internasional	Terlaksananya evaluasi efektivitas lomba dan pameran inovasi terhadap pertumbuhan inovasi di sektor perikanan, baik di bidang pembenihan, pembesaran, maupun

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pelajar, mahasiswa, dan Kelompok pembudidaya			budidaya rumput laut
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian strategi inkubasi bisnis untuk menumbuhkan usaha pemula di bidang pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumpulaut berbasis hasil riset lokal	Terlaksananya pelatihan dan seminar tentang peluang usaha dan komersialisasi teknologi inovasi perikanan dan rumput laut bagi calon pengusaha baru	Terlaksananya pelatihan teknis dan manajerial bagi calon pengusaha baru di bidang pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya pendampingan intensif kepada usaha rintisan pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut, dengan fasilitasi akses kelembagaan dan pasar	Terlaksananya evaluasi dampak program inkubasi bisnis berbasis riset di bidang pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut terhadap pengembangan usaha sektor perikanan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database teknologi lokal masyarakat terkait teknik tradisional pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Tersusunnya kodefikasi dan dokumentasi teknologi masyarakat, termasuk cara fermentasi pakan alami, pemijahan sederhana, teknik pembesaran, serta	Terlaksananya adopsi awal teknologi lokal oleh kelompok pembudidaya, UMKM, dan pelaku usaha perikanan dan rumput laut	Terlaksananya pengembangan dan adaptasi teknologi lokal untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mutu hasil pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya evaluasi dampak penggunaan teknologi masyarakat terhadap produktivitas dan daya saing produk unggulan perikanan dan rumput laut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pemanfaatan limbah organik untuk perikanan dan rumput laut			
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Tersusunnya kajian identifikasi topik riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sektor perikanan, mencakup pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang berfokus pada peningkatan mutu benih ikan, hasil pembesaran ikan, dan rumput laut, agar lebih unggul, tahan penyakit, dan produktif	pada peningkatan mutu benih ikan, hasil pembesaran ikan, dan rumput laut, agar lebih unggul, tahan penyakit, dan produktif pengelolaan air, teknologi pembesaran ikan, serta inovasi budidaya dan pengolahan rumput laut	Terjalinnya kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi dalam mengembangkan solusi berbasis data untuk pemasaran dan distribusi benih ikan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya evaluasi terhadap hasil riset dan inovasi di sektor perikanan, terutama pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk	Tersusunnya kajian pengembangan klaster inovasi perikanan yang meliputi pemetaan	Terbentuknya klaster inovasi pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya peningkatan kapasitas klaster inovasi melalui pelatihan,	Terlaksananya penguatan jejaring klaster dengan daerah lain melalui promosi bersama, pertukaran	Terlaksananya evaluasi terhadap sistem klaster inovasi dalam pengembangan ekosistem inovasi

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
unggulan daerah; dan	pelaku pembenihan, pembesaran ikan, budidaya rumput laut, potensi wilayah, hingga pasar dan industri pengolahan	di sentra produksi utama yang melibatkan pembenih, pembesar ikan, pembudidaya rumput laut, UMKM, dan lembaga riset	penerapan teknologi, serta dukunganakses pasar dan ekspor	praktik inovatif, dan kolaborasi riset pengembangan produk unggulan sektor perikanan	perikanan dan rumput laut
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian arah kebijakan riset dan inovasi daerah dalam bidang pembenihan ikan agar sejalan dengan kebijakan nasional sektor kelautan dan perikanan	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset-inovasi daerah agar selaras dengan RPJMN, Renstra, serta prioritas nasional penguatan perikanan dan rumput laut	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk harmonisasi aturan dan sinergi mendukung kebijakan riset dan inovasi di sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat dalam pengembangan benih unggul, pembesaran ikan, dan hilirisasi inovasi produk perikanan serta rumput laut	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat dalam pengembangan benih unggul, pembesaran ikan, dan hilirisasi inovasi produk perikanan serta rumput laut
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang	Tersusunnya kajian tentang perkembangan dan	Terlaksananya sosialisasi isu global, seperti	Terlaksananya seminar atau webinar dengan	Terintegrasinya isu-isu global ke dalam program riset dan inovasi daerah,	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak penerapan

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	tantangan global di bidang perikanan, terutama terkait pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut, agar dapat disesuaikan dengan kondisi daerah	perubahan iklim, cara budidaya yang ramah lingkungan, dan standar ekspor, kepada pelaku riset dan pelaku usaha di sektor pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	menghadirkan narasumber internasional untuk berbagi pengetahuan di bidang pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	termasuk melalui penggunaan energi ramah lingkungan, dan penerapan standar kualitas ekspor untuk produk perikanan dan rumput laut	isu global dalam pengembangan pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerja sama internasional dalam pengembangan riset dan inovasi pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut, termasuk identifikasi negara mitra di sektor perikanan	Terlaksananya komunikasi awal dan pengiriman proposal kerja sama ke mitra internasional potensial (universitas, NGO, lembaga riset) untuk pengembangan riset dan inovasi pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut	Terlaksananya program kolaboratif seperti riset bersama, pertukaran peneliti, atau pelatihan teknis dengan mitra luar negeri terkait teknologi pembenihan ikan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha dan akademisi lokal dalam kegiatan pelatihan, studi banding, atau jejaring internasional di bidang pembenihan, pembesaran ikan, dan budidaya rumput laut	Terlaksananya evaluasi efektivitas kerja sama internasional untuk pengembangan riset dan inovasi pembenihan, pembesaran ikan, dan rumput laut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Produk Unggulan ke-3: Pengembangan PUD Gula Aren (Gula Semut)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan gula aren, terutama gula semut	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan gula aren	Terlaksananya kebijakan riset dan inovasi melalui integrasi program PUD gula aren dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi gula aren	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi daerah terkait pengembangan gula aren
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya inventarisasi varietas aren lokal, teknik penyadapan tradisional, dan profil pelaku usaha gula semut	Tersusunnya sistem database digital yang memuat data budidaya aren, proses produksi gula semut, serta distribusi usaha lokal	Terlaksananya proses entri dan validasi data terkait bahan baku, kapasitas produksi, teknologi pengolahan, dan rantai pasok gula semut	Terintegrasinya database gula aren/gula semut dengan sistem informasi daerah dan nasional sebagai sumber data perencanaan dan promosi.	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan database untuk pemetaan potensi ekspor, kemitraan usaha, dan pengambilan kebijakan berbasis data di sektor gula aren, termasuk gula semut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur riset dan pengolahan gula aren	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi gula aren	Terbangunnya fasilitas riset, pengolahan, dan pengemasan gula aren	Termanfaatkannya fasilitas riset dan program pendampingan untuk pelaku usaha gula aren	Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung inovasi produk gula aren, termasuk gula semut
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan gula aren (terutama gula semut), berdasarkan potensi lokal dan tantangan pengembangan	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan inovasi produk gula aren	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan inovasi teknologi budidaya pohon aren, penyadapan nira, serta proses produksi gula semut melalui anggaran daerah	Terlaksananya penguatan skema pendanaan riset dan inovasi (kolaborasi APBD, CSR, dana pusat) untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah gula semut	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD gula aren
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM daerah tentang proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk gula	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya HKI, seperti merek dagang, desain	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual lokal, termasuk teknik penyadapan tradisional, resep olahan, dan inovasi	Terinventarisasinya kekayaan intelektual terkait gula aren yang telah dan belum didaftarkan, serta tersusunnya daftar produk dan pengetahuan lokal yang	Terlaksananya evaluasi proses perlindungan dan pemanfaatan HKI, serta penyusunan mekanisme pengelolaan HKI berbasis komunitas

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	aren, termasuk gula semut	kemasan, dan metode produksi khas gula aren	kemasan gula semut	layak dilindungi secara hukum	untuk mendukung PUD gula aren
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi riset dan inovasi terkait pengembangan gula aren	Terbentuknya forum koordinasi dan kolaborasi riset gula aren antar akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah	Terlaksananya program kolaboratif riset dalam budidaya dan pengolahan gula aren, termasuk gula semut	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif dalam bentuk pelatihan, atau pengembangan produk baru gula aren	Terlaksananya evaluasi efektivitas kolaborasi riset dan inovasi serta tersusunnya model kelembagaan kolaboratif untuk pengembangan gula aren/semut
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersusunnya kajian kebutuhan dan rencana teknis penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi untuk pengembangan produk gula aren (terutama gula semut), disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi daerah	Terlaksananya pengadaan atau rehabilitasi sarana sederhana untuk riset dan pelatihan teknologi penyadapan nira, pengolahan gula semut, serta pengemasan	Teroptimalisasinya penggunaan sarana pendukung riset dan inovasi oleh pelaku usaha gula aren dan gula semut	Terpeliharanya serta meningkatnya mutu fasilitas pendukung riset dan inovasi untuk mendukung kualitas, efisiensi produksi, dan daya saing produk gula aren (gula semut)	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan sarana riset dan pengembangan gula aren, termasuk gula semut.

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Tersusunnya kajian pemetaan kelembagaan dan potensi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas dalam pengembangan gula aren	Terlaksananya forum koordinasi untuk menyusun rencana kemitraan riset dan inovasi berbasis pengembangan produk gula aren	Terlaksananya kegiatan kolaboratif antarlembaga, seperti pelatihan, riset terapan, serta pendampingan teknis dalam budidaya aren, penyadapan nira, dan pengolahan gula semut	Terjalinnya kemitraan aktif dan saling mendukung antar lembaga yang terlibat dalam pengembangan riset dan inovasi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk gula aren	Terlaksananya evaluasi kemitraan dan penyusunan rencana penguatan kolaborasi untuk keberlanjutan pengembangan PUD gula aren
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model dan strategi transfer teknologi untuk pelaku usaha gula aren dan gula semut berdasarkan kebutuhan lokal.	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan aparatur daerah tentang cara difusi teknologi untuk pengolahan dan budidaya gula aren	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi mengenai teknologi inovatif budidaya pohon aren organik serta proses produksi gula semut kepada masyarakat dan pelaku UMKM.	Terlaksananya pengenalan dan demonstrasi alat pengolahan nira, teknik pengemasan modern, serta pemanfaatan limbah pengolahan gula aren menjadi produk turunan yang bernilai tambah	Terlaksananya evaluasi efektivitas kegiatan transfer teknologi, termasuk tingkat pemanfaatan teknologi oleh pelaku usaha gula aren dan gula semut
Peningkatan praktik dan	Tersusunnya kajian pemetaan penerapan	Terlaksananya pelatihan dan	Terlaksananya pendampingan	Terlaksananya diseminasi metode dan	Terlaksananya evaluasi efektivitas

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha gula aren dan gula semut sebagai model pembelajaran / model percontohan daerah	workshop kepada pelaku usaha gula aren dan gula semut terkait adopsi hasil riset dan praktik baik (budidaya, pengolahan, dan pemasaran)	teknis kepada pelaku usaha gula aren dan gula semut yang telah mengikuti pelatihan, termasuk konsultasi teknologi dan manajemen usaha berbasis hasil riset.	pengalaman sukses pengembangan gula aren dan gula semut kepada pelaku baru dan mitra daerah melalui media, kunjungan lapangan, dan materi pembelajaran	program pelatihan, pendampingan, dan diseminasi terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha gula aren dan gula semut
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi dalam budidaya dan pengolahan gula aren dan gula semut kepada masyarakat luas	Terlaksananya kampanye inovasi melalui media sosial, radio lokal, dan video pendek yang menampilkan cerita sukses pelaku usaha gula aren dan gula semut yang menggunakan inovasi dalam produknya	Terselenggaranya kegiatan expo inovasi produk gula aren dan gula semut di tingkat daerah	Terwujudnya penguatan kolaborasi kampanye inovasi gula aren dan gula semut bersama pelaku pariwisata, pelaku ekonomi kreatif, sekolah, dan komunitas lokal	Terlaksananya evaluasi dampak kegiatan promosi dan kampanye inovasi terhadap minat dan pemakaian inovasi di kalangan pelaku usaha gula aren dan gula semut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya kajian model kegiatan lomba dan pameran inovasi yang sesuai dengan potensi lokal dan praktik baik pengembangan usaha gula aren dan gula semut	Terlaksananya lomba inovasi dan kreativitas pengembangan produk gula aren dan gula semut (pengolahan, kemasan, dan pemasaran) di kalangan pelajar, mahasiswa, dan kelompok usaha	Terselenggaranya pameran inovasi hasil lomba sekaligus seleksi produk unggulan gula aren dan gula semut untuk dipromosikan lebih luas di tingkat provinsi	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba inovasi produk aren untuk mengikuti kompetisi inovasi di tingkat nasional	Terlaksananya evaluasi efektivitas lomba dan pameran inovasi, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan inovasi pelaku usaha gula aren dan gula semut yang menerima apresiasi
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian model dan strategi inkubasi bisnis yang menarik, sederhana, dan sesuai untuk pengembangan usaha gula aren dan gula semut	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM daerah melalui bimtek dan seminar tentang konsep inkubasi bisnis dan peluang komersialisasi hasil riset pada usaha gula aren dan gula semut	Terlaksanya pelatihan teknis dan manajemen bisnis untuk calon pengusaha pemula gula aren dan gula semut berbasis riset, mulai dari produksi, pengemasan, hingga pemasaran	Terlaksananya proses pendampingan intensif terhadap peserta inkubasi untuk membentuk perusahaan rintisan berbasis inovasi produk gula aren dan gula semut di tingkat desa atau kecamatan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas inkubasi bisnis dan keberlanjutan usaha baru berbasis riset gula aren dan gula semut, serta penyusunan strategi replikasi di wilayah lain
Inventarisasi, pengembangan,	Tersusunnya database terkait	Tersusunnya kodefikasi dan	Termanfaatkannya teknologi lokal oleh	Terlaksananya pengembangan teknologi	Terlaksananya evaluasi dampak

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan gula aren dan gula semut	dokumentasi teknologi masyarakat, termasuk metode pengolahan manual, serta teknik penyimpanan gula aren dan gula semut	kelompok tani dan pelaku UMKM dalam budidaya pohon aren serta pengolahan nira menjadi gula semut	dan perluasan penggunaan oleh pelaku usaha gula aren untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan ketahanan penyimpanan	penggunaan teknologi terhadap produktivitas dan nilai tambah produk gula aren, termasuk potensi diversifikasi produk
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	Tersusunnya kajian identifikasi topik riset dan inovasi sesuai kebutuhan pengembangan gula aren dan gula semut	Terlaksananya kegiatan riset dan IPTEK yang berfokus pada peningkatan produktivitas pohon aren, kualitas nira, daya simpan gula semut, serta inovasi dalam teknik pengolahan dan pengemasan	Terwujudnya penguatan riset terapan untuk menjawab tantangan pelaku usaha gula aren, seperti efisiensi proses penyadapan, pengolahan nira, pengemasan higienis, dan kontrol mutu produk	Terjalinnya kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi dalam mengembangkan solusi berbasis data untuk pengembangan usaha, promosi, dan perluasan pasar gula semut lokal	Terlaksananya evaluasi terhadap hasil riset dan inovasi serta tersusunnya rencana pengembangan lanjutan untuk mendukung keberlanjutan PUD gula aren

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Tersusunnya kajian pengembangan klaster inovasi gula aren, mencakup pemetaan pelaku usaha, potensi wilayah, dan rantai nilai dari penyadapan hingga pengemasan dan pemasaran gula semut	Terbentuknya klaster inovasi gula aren di wilayah sentra produksi utama dengan melibatkan penderes, kelompok tani, UMKM, dan lembaga riset lokal.	Terlaksananya peningkatan kapasitas klaster inovasi gula aren melalui pelatihan, teknologi tepat guna, dan dukungan akses pasar	Terlaksananya penguatan jejaring klaster inovasi gula aren dengan pihak luar daerah melalui promosi antar klaster dan kolaborasi riset lanjutan	Terlaksananya evaluasi dan perbaikan sistem klaster inovasi gula aren serta replikasi model klaster di wilayah potensial lainnya
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian terkait penyelarasan arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan nasional terkait pengembangan gula aren dan gula semut	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset dan inovasi gula aren dan gula semut agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, serta agenda prioritas nasional di sektor perkebunan	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan aturan dalam mendukung kebijakan riset dan inovasi gula aren dan gula semut	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat untuk pengembangan riset terapan dan hilirisasi produk gula aren	Terlaksananya evaluasi termasuk rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pengembangan PUD gula aren, termasuk gula semut
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian tentang tren dan isu global terkait pertanian berkelanjutan, teknologi pangan, dan pengolahan gula aren yang relevan dengan konteks lokal	Terlaksananya sosialisasi isu global seperti perubahan iklim, keberlanjutan agrikultur, dan ketahanan pangan kepada pelaku riset dan pelaku usaha gula aren dan gula semut	Terlaksananya seminar atau webinar internasional di tingkat daerah dengan menghadirkan mitra global di bidang perkebunan dan inovasi pangan berbasis gula aren	Terlaksananya integrasi isu global ke dalam riset dan inovasi pisang, seperti adopsi praktik ramah lingkungan dan standar ekspor pada produk gula aren dan gula semut	Terlaksananya evaluasi dampak integrasi isu internasional terhadap pengembangan ekosistem riset dan inovasi gula aren dan gula semut
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerja sama internasional dalam pengembangan riset dan inovasi produk gula aren dan gula semut, termasuk potensi mitra dari negara-negara penghasil aren	Terlaksananya komunikasi awal dan pengiriman proposal kerja sama ke mitra internasional potensial (universitas, NGO, lembaga riset) untuk membangun kerja sama pengembangan riset gula aren dan gula semut	Terlaksananya program kolaborasi riset atau pelatihan teknis bersama mitra luar negeri terkait budidaya dan pengolahan gula aren dan gula semut	Meningkatnya partisipasi pelaku usaha gula aren dan gula semut dalam kegiatan pertukaran pengetahuan dan jejaring internasional melalui fasilitasi pemerintah daerah	Terlaksananya evaluasi efektivitas kerja sama internasional dan penyusunan roadmap keberlanjutan kemitraan luar negeri untuk pengembangan riset dan inovasi gula aren dan gula semut

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Produk Unggulan ke-4: Pengembangan PUD Durian					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi Daerah					
Reformasi kebijaka Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan durian (budidaya, pascapanen, dan diversifikasi olahan)	Terbitnya regulasi daerah (Perda/Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan PUD durian	Terintegrasinya program pengembangan PUD durian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terselenggaranya koordinasi lintas perangkat daerah, perguruan tinggi, komunitas petani, dan pelaku usaha untuk pengembangan riset durian	Terlaksananya monitoring & evaluasi pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi daerah terkait PUD durian
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya inventarisasi varietas lokal durian, produktivitas, dan profil petani durian	Tersusunnya sistem database digital terkait budidaya durian, data lahan, produksi pohon durian, dan rantai pasok	Terlaksananya proses entri dan validasi data terkait bahan baku, kapasitas produksi, teknologi pengolahan, dan distribusi durian	Terintegrasinya database durian dengan sistem informasi daerah dan nasional untuk promosi dan perencanaan	Terlaksananya evaluasi pemanfaatan database durian untuk memetakan potensi ekspor, hilirisasi, dan pengambilan kebijakan berbasis data
Pengembangan infrastruktur	Teridentifikasinya kebutuhan fasilitas riset, rumah pembibitan, pusat	Terlaksananya Perencanaan pembangunan fasilitas riset dan	Terbangunnya pusat riset, pengolahan, dan pengemasan	Termanfaatkannya fasilitas riset dan program pendampingan	Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas infrastruktur

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dasar Riset dan Inovasi	pascapanen, dan pengolahan durian	sentra pengolahan durian	produk durian olahan (durian frozen, dodol durian, kue durian, es krim durian, dll)	untuk petani & UMKM durian	inovasi komoditas durian
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajiankebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan PUD durian, berdasarkan potensi lokal daerah	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan inovasi komoditas durian	Terlaksananya pendanaan riset terapan terkait perbanyakan bibit unggul, teknik pemangkasan, pengendalian hama, dan pascapanen durian	Terlaksananya penguatan skema pendanaan riset dan inovasi (kolaborasi APBD, CSR, dana pusat) untuk mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah komoditas durian	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD durian
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM daerah tentang proses pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk produk	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual, termasuk varietas unggul durian khas Mamuju Tengah, resep	Pendaftaran varietas unggul durian dan produk olahannya sebagai kekayaan intelektual.	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan intelektual produk

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	durian beserta olahannya	pentingnya HKI, seperti sosialisasi cara pendaftaran varietas unggul durian, perlindungan merek dagang produk turunan durian, serta pendaftaran desain kemasan	olahan produk turunan durian, serta inovasi dalam pengemasan dan penyimpanan durian segar dan olahan		durian dan olahannya
Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi riset dan inovasi terkait pengembangan PUD durian	Terbentuknya forum koordinasi dan kolaborasi riset durian antar akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah aerah	Terlaksananya program riset kolaboratif dalam budidaya, pascapanen, dan pengolahan produk durian	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif melalui pelatihan budidaya durian, manajemen panen, dan pengembangan produk turunan durian	Terlaksananya monitoring dan evaluasi efektivitas kolaborasi riset serta tersusunnya model kelembagaan kolaboratif untuk PUD durian
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang	Tersusunnya kajian kebutuhan dan rencana teknis sarana riset dan inovasi durian,	Terlaksananya pengadaan atau perbaikan fasilitas untuk riset budidaya	Teroptimalisasinya penggunaan sarana pendukung riset dan inovasi oleh	Terpeliharanya serta meningkatnya mutu sarana pendukung riset untuk mendukung kualitas, efisiensi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan sarana

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
disesuaikan dengan kemampuan daerah	disesuaikan dengan kapasitas daerah	durian, pascapanen, dan pengolahan produk durian segar dan olahan durian	petani dan pelaku usaha durian	produksi, dan daya saing durian	riset dan inovasi durian
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Tersusunnya kajian pemetaan kelembagaan dan potensi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha dalam pengembangan komoditas durian	Terlaksananya forum koordinasi untuk menyusun rencana kemitraan riset dan inovasi berbasis budidaya, pasca panen, dan pengolahan durian	Terlaksananya kegiatan kolaboratif antarlembaga, seperti pelatihan, riset terapan, dan pendampingan teknis dalam budidaya durian dan pengolahan produk turunannya	Terlaksananya kemitraan aktif antar lembaga yang terlibat dalam pengembangan riset dan inovasi guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kemitraan untuk keberlanjutan pengembangan PUD Durian
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya rancangan penyebaran teknologi durian yang sesuai dengan kebutuhan petani	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan aparatur daerah	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi mengenai teknologi inovatif budidaya durian,	Terlaksananya pengenalan dan demonstrasi alat pengolahan durian, teknik pengemasan modern, serta	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi durian

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	dan pelaku usaha setempat	tentang cara difusi teknologi budidaya, pascapanen, dan pengolahan durian	pengendalian hama, serta proses produksi produk olahan	pemanfaatan limbah durian menjadi produk turunan bernilai tambah	oleh petani dan pelaku usaha
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya kajian pemetaan penerapan hasil riset dan inovasi oleh petani dan pelaku usaha durian sebagai model pembelajaran daerah	Terlaksananya pelatihan dan workshop bagi petani dan pelaku usaha terkait adopsi hasil riset dan praktik budidaya, pasca panen, penolahan dan pemasaran durian	Terlaksananya pendampingan teknis bagi peserta pelatihan untuk mengaplikasikan teknologi dan mengelola usaha durian	Terlaksananya diseminasi metode dan pengalaman sukses pengembangan durian dan produk turunannya kepada petanidurian dan mitra daerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi efektivitas program pelatihan, pendampingan, dan diseminasi terhadap peningkatan kapasitas petani dan pelaku usaha durian
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi hasil riset dan teknologi dalam	Terlaksananya kampanye inovasi melalui media sosial, TV, radio, video, yang	Terlaksananya kegiatan expo inovasi produk durian dan	Terwujudnya kolaborasi kampanye inovasi durian bersama pelaku pariwisata, ekonomi kreatif,	Terlaksananya evaluasi dampak promosi dan kampanye terhadap minat dan

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	budidaya durian , pascapanen, dan pengolahan produk turunan kepada masyarakat	menampilkan cerita sukse petani dan pelaku usaha durian yang menerapkan inovasi	turunannya di tingkat daerah	sekolah, dan masyarakat	pemakaian inovasi di kalangan petani dan pelaku usaha durian
Apresiasi prestasi inovasi	Tersusunnya kajian model kegiatan lomba dan pameran inovasi yang lokal dan praktik baik pengembangan durian dan produk turunannya sesuai dengan potensi	Terlaksananya lomba inovasi dan kreativitas pengembangan produk durian (budidaya, olahan, kemasan, pemasaran) di kalangan pelajar, mahasiswa, dan UMKM	Terlaksananya pameran hasil lomba sekaligus seleksi produk unggulan durian untuk ipromosikan lebih luas di tingkat provinsi Sulbar	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba inovasproduk durian untuk mengikuti kompetisi tingkatnasional	Terlaksananya evaluasi efektivitas lomba dan pameran inovasi, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan inovasi pelaku usaha durian yang menerima apresiasi
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian model dan strategi inkubasi bisnis yang sederhana dan sesuai untuk pengembangan	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM melalui bimtek dan seminar tentang konsep inkubasi bisnis	Terlaksananya pelatihan teknis dan manajemen bisnis untuk calon pengusaha pemula durian, mulai dari	Terlaksananya pendampingan intensif untuk membentuk perusahaan rintisan berbasis inovasi produk	Terlaksananya monitoring dan evaluasi perkembangan usaha durian berbasis riset

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	usaha durian dan produk turunannya	dan peluang pemasaran hasil riset durian	produksi, pengolahan, hingga pemasaran	durian di tingkat desa atau kecamatan	
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database terkait teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan durian dan produk turunannya	Tersusunnya dokumentasi teknologi lokal durian, mulai dari budidaya hingga pengolahan dan penyimpanan	Termanfaatkannya teknologi lokal oleh kelompok tani dan pelaku UMKM dalam budidaya durian dan pengolahan produk turunannya	Terlaksananya pengembangan teknologi dan perluasan penggunaannya oleh pelaku usaha durian untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan masa simpan produk segar maupun olahan	Terlaksananya evaluasi dampak penggunaan teknologi terhadap produktivitas dan nilai tambah durian
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau	Tersusunnya kajian topik riset dan inovasi sesuai kebutuhan pengembangan durian dan produk turunannya	Terlaksananya kegiatan riset untuk meningkatkan produktivitas pohon durian, kualitas buah, serta inovasi pengolahan dan	Terwujudnya riset terapan untuk menjawab tantangan petani dan pelaku usaha durian, seperti efisiensi budidaya, panen, pengolahan, dan	Terjalinnya kolaborasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi dalam pengembangan usaha, promosi, dan perluasan jangkauan pasar durian	Terlaksananya monitoring dan evaluasi hasil riset untuk mendukung pengembangan durian

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
mengatasi permasalahan daerah		kemasan produk turunan	kontrol mutu produk		
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Tersusunnya kajian model pengembangan klaster durian	Terbentuknya klaster inovasi durian di sentra produksi utama	Terlaksananya peningkatan kapasitas klaster durian melalui pelatihan, teknologi, dan dukungan akses pasar	Terlaksananya penguatan jejaring klaster inovasi durian dengan pihak luar daerah melalui promosi antar klaster dan kolaborasi riset	Terlaksananya monitoring dan evaluasi sistem klaster durian di Mamuju Tengah
Kesesuaian kebijakanantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian penyelarasan kebijakan riset dan inovasi durian daerah dengan kebijakan nasional	Terlaksananya penyesuaian programdan kegiatan riset durian agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, dan agenda prioritas nasionaldi sektor pertanian dan perkebunan	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan aturan dandukungan riset durian	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat untuk riset terapan dan hilirisasi produk durian	Terlaksananya evaluasi kebijakan untuk memperkuat sinergi pusat daerah dalam pengembangan PUD durian
Elemen 6: Penyelarasan dengan perkembangan global					

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian tentang tren dan isu globaterkait pertanian berkelanjutan, teknologi pangan, dan pengolahan durian yang relevan dengan konteks daerah	Terlaksananya sosialisasi isu global seperti perubahan iklim, pertanian berkelanjutan, dan ketahanan pangan kepada peneliti, petani, dan pelaku usaha durian	Terlaksananya seminar atau webinar internasional di tingkat daerah dengan menghadirkan mitra global di bidang perkebunan dan inovasi pangan durian	Terintegrasinya isu global ke dalam riset dan inovasi durian, seperti adopsi praktik ramah lingkungan dan standar ekspor pada produk durian dan turunannya	Terlaksananya monitoring dan evaluasi dampak integrasi isu internasional terhadap pengembangan riset dan inovasi durian
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerja sama internasional untukpengembangan riset dan inovasi durian, termasuk potensi mitra dari negara penghasil durian	Terlaksananya komunikasi awal dan pengiriman proposal kerja sama ke mitra internasional potensial (universitas, NGO, lembaga riset)	Terlaksananya program kolaborasi riset atau pelatihan teknis bersama mitra luar negeri terkait budidaya dan pengolahan durian	Meningkatnya partisipasi petani dan pelaku usaha durian dalam kegiatan pertukaran pengetahuan dan jejaring internasional melalui fasilitasi pemerintahdaerah	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kerja sama internasional dalam pengembangan riset dan inovasi durian
Produk Unggulan ke-5: Pengembangan PUD Pariwisata Pulau Kambunong					

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung pengembangan pariwisata Pulau Kambunong sebagai produk unggulan daerah	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan riset dan inovasi daerah untuk pengembangan kawasan pariwisata Pulau Kambunong	Terintegrasinya program pengembangan PUD pariwisata Pulau Kambunong dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi pariwisata	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan riset dan inovasi terkait pengembangan Kawasan pariwisata Pulau Kambunong
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Tersusunnya data spasial, demografi, dan sosial ekonomi Pulau Kambunong	Terbangunnya sistem basis data digital pariwisata Pulau Kambunong, termasuk terkait destinasi, pelaku, dan potensi	Terlaksananya proses entri dan validasi data potensi wisata alam, budaya, dan ekonomi lokal Pulau Kambunong	Terintegrasinya basis data pariwisata Pulau Kambunong dengan sistem informasi pembangunan daerah	Terlaksananya evaluasi basis data sebagai dasar promosi, pengembangan produk, dan kemitraan pariwisata Pulau Kambunong
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur dasar (akses, fasilitas riset, pelatihan) untuk Pulau Kambunong	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi pariwisata Pulau Kambunong	Terbangunnya fasilitas dan pusat riset pariwisata di Pulau Kambunong	Termanfaatkannya fasilitas riset untuk pelatihan masyarakat dan promosi wisata	Terpeliharanya serta meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung pengembangan

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					wisata Pulau Kambunong
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian pembiayaan riset dan inovasi pariwisata berbasis potensi dan tantangan lokal	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja) untuk PUD pariwisata, utamanya Pulau Kambunong	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset tematik dan inovasi pengembangan destinasi pariwisata Pulau Kambunong	Terlaksananya penguatan skema pendanaan riset dan inovasi (kolaborasi APBD, CSR, dana pusat) untuk mendorong pengembangan pariwisata Pulau Kambunong	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan PUD pariwisata, utamanya Pulau Kambunong
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM daerah tentang perlindungan HKI untuk produk wisata (merek, logo, paket budaya)	Terlaksananya edukasi tentang pentingnya HKI bagi pelaku wisata dan UMKM lokal	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual lokal Pulau Kambunong	Terinventarisasinya HKI pariwisata Pulau Kambunong yang potensial untuk didaftarkan	Terlaksananya evaluasi proses perlindungan dan pemanfaatan HKI, serta penyusunan mekanisme pengelolaan HKI di sektor pariwisata
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan kebutuhan kolaborasi	Terbentuknya forum kolaborasi pariwisata berbasis riset dan inovasi antar	Terlaksananya riset kolaboratif dalam pengembangan destinasi dan	Terimplementasikannya hasil riset dalam program pelatihan,	Terlaksananya evaluasi efektivitas kolaborasi riset dan inovasi serta tersusunnya model

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pemangku Kepentingan	riset dan inovasi pariwisata	akademisi, masyarakat, pemerintah, dan pelaku wisata	atraksi wisata Pulau Kambunong	penguatan SDM dan inovasi destinasi	kelembagaan kolaboratif untuk pengembangan pariwisata Pulau Kambunong
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersusunnya kajian kebutuhan dan rencana teknis penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi untuk pengembangan pariwisata Pulau Kambunong yang disesuaikan dengan kapasitas dan kondisi daerah	Terlaksananya pengadaan atau rehabilitasi sarana riset sederhana di Kawasan pariwisata Pulau Kambunong	Teroptimalisasinya penggunaan sarana pendukung riset dan inovasi oleh pelaku wisata dan komunitas lokal	Terpeliharanya serta meningkatnya mutu fasilitas pendukung riset dan inovasi pariwisata Pulau Kambunong	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan sarana riset pariwisata di Pulau Kambunong
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Tersusunnya kajian pemetaan kelembagaan dan potensi kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha,	Terlaksananya forum koordinasi untuk menyusun rencana kemitraan riset dan inovasi berbasis potensi	Terlaksananya kegiatan kolaboratif antarlembaga, meliputi pelatihan, riset, dan pendampingan teknis dalam	Terjalinnya kemitraan aktif antar lembaga yang mendukung inovasi dan daya saing pariwisata Pulau Kambunong	Terlaksananya evaluasi kemitraan dan penyusunan rencana penguatan kolaborasi untuk keberlanjutan pengembangan PUD

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	dan komunitas dalam pengembangan PUD pariwisata Pulau Kambunong	pariwisata Pulau Kambunong	pengembangan wisata bahari, budaya, dan ekowisata.		pariwisata Pulau Kambunong
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model dan strategi transfer teknologi untuk pelaku pariwisata dan UMKM di Pulau Kambunong	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dan aparatur daerah tentang cara difusi inovasi layanan pariwisata, digitalisasi, dan promosi berbasis daring	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi teknologi inovatif untuk peningkatan layanan wisata, pengelolaan homestay, dan pembuatan produk kreatif lokal	Terlaksananya kegiatan pengenalan sarana pendukung pariwisata (peralatan wisata air, informasi digital, sistem pemesanan) kepada pelaku usaha	Terlaksananya evaluasi keberhasilan transfer inovasi kepada pelaku wisata dan UMKM di Pulau Kambunong
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersusunnya kajian pemetaan penerapan hasil riset dan inovasi oleh pelaku wisata sebagai model percontohan pengembangan PUD Pulau Kambunong	Terlaksananya pelatihan dan workshop kepada pelaku wisata terkait adopsi praktik baik dalam pengelolaan atraksi, paket wisata, dan	Terlaksananya pendampingan teknis kepada pelaku wisata yang telah mengikuti pelatihan, termasuk penguatan branding, pemasaran digital,	Terlaksananya diseminasi metode dan praktik sukses pengelolaan wisata kepada pelaku baru dan mitra daerah melalui media, kunjungan lapangan, dan modul pembelajaran	Terlaksananya evaluasi efektivitas program pelatihan, pendampingan, dan diseminasi dalam meningkatkan kapasitas pelaku wisata di Pulau Kambunong

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		layanan wisata berkelanjutan	dan pelayanan wisata		
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi pengembangan wisata Pulau Kambunong	Terlaksananya kampanye inovasi pariwisata melalui media sosial, radio lokal, dan video pendek yang menampilkan cerita sukses pelaku wisata Pulau Kambunong	Terselenggaranya kegiatan expo inovasi pariwisata yang menampilkan produk kreatif, inovasi layanan, dan teknologi wisata Pulau Kambunong	Terwujudnya kolaborasi kampanye inovasi bersama pelaku ekonomi kreatif, sekolah, dan komunitas lokal	Terlaksananya evaluasi dampak kampanye inovasi terhadap peningkatan minat kunjungan wisata dan penggunaan inovasi di Pulau Kambunong
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya kajian model kegiatan lomba dan pameran inovasi pariwisata berbasis potensi lokal Pulau Kambunong	Terlaksananya lomba inovasi wisata di kalangan pelajar, mahasiswa, dan komunitas, terkait desain paket wisata, promosi, dan pengelolaan atraksi	Terselenggaranya pameran inovasi hasil lomba dan seleksi program unggulan untuk promosi lebih luas di tingkat provinsi	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba inovasi untuk mengikuti ajang promosi atau kompetisi di tingkat nasional	Terlaksananya evaluasi dampak lomba dan pameran terhadap peningkatan kreativitas dan pertumbuhan usaha wisata di Pulau Kambunong
Pengembangan perusahaan	Tersusunnya kajian strategi inkubasi	Terlaksananya peningkatan	Terlaksananya pelatihan teknis	Terlaksananya pendampingan intensif	Terlaksananya evaluasi terhadap

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pemula berbasis riset	bisnis wisata berbasis riset dan inovasi di Pulau Kambunong	kapasitas SDM melalui pelatihan dan seminar tentang inkubasi usaha wisata dan peluang bisnis kreatif	dan manajemen wisata bagi calon pengusaha pemula di sektor pariwisata	terhadap pelaku wisata yang merintis usaha baru berbasis inovasi di Pulau Kambunong	efektivitas inkubasi bisnis pariwisata
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database teknologi lokal dan kearifan masyarakat dalam pengelolaan wisata, budaya, dan lingkungan di Pulau Kambunong	Tersusunnya dokumentasi praktik tradisional, cerita rakyat, tata cara lokal dalam konservasi dan atraksi budaya	Termanfaatkannya kearifan lokal dalam paket wisata dan pelatihan kepada pemandu lokal	Terlaksananya pengembangan dan promosi teknologi masyarakat sebagai daya tarik wisata dan identitas lokal	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak pemanfaatan teknologi lokal terhadap penguatan identitas dan daya saing wisata Pulau Kambunong
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau	Tersusunnya kajian identifikasi topik riset dan inovasi sesuai kebutuhan pengembangan PUD pariwisata Pulau Kambunong	Terlaksananya kegiatan riset dan IPTEK yang berfokus pada strategi promosi, manajemen destinasi, dan pengembangan	Terwujudnya penguatan riset terapan untuk mengatasi tantangan pariwisata dalam hal aksesibilitas, daya saing produk,	Terjalinnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset dalam menciptakan solusi promosi dan pengelolaan wisata berbasis data	Terlaksananya evaluasi hasil riset dan inovasi serta tersusunnya strategi pengembangan lanjutan PUD Pulau Kambunong

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
mengatasi permasalahan daerah;		wisata bahari dan budaya	dan kualitas layanan		
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Tersusunnya kajian pengembangan klaster inovasi pariwisata Pulau Kambunong yang mencakup pemetaan pelaku usaha, potensi wilayah, dan rantai nilai pariwisata	Terbentuknya klaster inovasi pariwisata dengan melibatkan pelaku wisata, UMKM, dan komunitas lokal	Terlaksananya pelatihan dan penguatan kapasitas anggota klaster melalui dukungan teknologi dan promosi	Terlaksananya penguatan jejaring klaster dengan wilayah pariwisata lainnya di Provinsi Sulawesi Barat	Terlaksananya evaluasi sistem klaster serta replikasi model di destinasi wisata lainnya
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian terkait penyelarasan arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan nasional terkait pengembangan pariwisata	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset dan inovasi pariwisata Pulau Kambunong agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, serta agenda prioritas nasional di sektor pariwisata	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyamakan aturan dalam mendukung kebijakan riset dan inovasi pariwisata	Terlaksananya program kolaboratif antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga pusat untuk pengembangan riset pariwisata, terutama di Pulau Kambunong	Terlaksananya evaluasi termasuk rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi pusat-daerah dalam pengembangan pariwisata di Pulau Kambunong
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian tentang tren dan isu global terkait pariwisata berkelanjutan, perubahan iklim, dan pelestarian budaya	Terlaksananya sosialisasi isu global kepada pelaku wisata dan pemangku kepentingan lokal	Terlaksananya seminar atau webinar internasional di tingkat daerah dengan menghadirkan mitra global di bidang pariwisata	Terlaksananya integrasi isu global ke dalam perencanaan riset dan inovasi wisata Pulau Kambunong	Terlaksananya evaluasi dampak integrasi isu internasional terhadap pengembangan ekosistem riset dan inovasi pariwisata daerah
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerja sama internasional dalam pengembangan riset dan inovasi pariwisata Pulau Kambunong	Terlaksananya komunikasi awal dan pengiriman proposal kerja sama ke mitra internasional potensial (universitas, NGO, atau lembaga wisata global)	Terlaksananya program kolaborasi riset atau pelatihan teknis bersama mitra luar negeri di bidang pariwisata dan ekowisata	Meningkatnya partisipasi pelaku wisata dan akademisi dalam pertukaran pengetahuan dan jaringan global	Terlaksananya evaluasi efektivitas kerja sama luar negeri dan penyusunan roadmap keberlanjutan kemitraan global untuk pariwisata Pulau Kambunong
Produk Unggulan ke-6: Pengembangan Ekonomi Kreatif (Cendramata dari Tempurung, Anyaman Kriya, dan Tenun)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset	Tersusunnya kajian riset dan inovasi daerah yang mendukung	Terbitnya regulasi daerah (Perda atau Perkada) tentang penguatan	Terintegrasinya program pengembangan PUD ekonomi	Terlaksananya penguatan koordinasi lintas perangkat daerah dan pemangku	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan riset dan

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dan Inovasi di daerah	pengembangan ekonomi kreatif, utamanya cendramata dari tempurung, kriya anyaman, dan tenun sebagai produk unggulan daerah	riset dan inovasi daerah untuk pengembangan komoditas ekonomi kreatif berbasis budaya lokal	kreatif dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah	kepentingan dalam implementasi kebijakan riset dan inovasi ekonomi kreatif	inovasi terkait pengembangan cendramata tempurung, kriya anyaman, dan tenun sebagai komoditas unggulan ekonomi kreatif
Penataan basis data Riset dan Inovasi	Tersusunnya inventarisasi jenis produk ekonomi kreatif lokal berbasis tempurung, anyaman, dan tenun.	Terbangunnya sistem database digital terkait potensi, pelaku, dan produk ekonomi kreatif daerah	Terlaksananya proses entri dan validasi data produksi, desain, dan pemasaran produk ekonomi kreatif.	Terintegrasinya basis data produk ekonomi kreatif dengan sistem informasi pembangunan daerah dan nasional	Terlaksananya evaluasi pemanfaatan database dalam mendukung pengembangan produk dan kemitraan usaha ekonomi kreatif
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Teridentifikasinya kebutuhan infrastruktur riset dan pengembangan produk ekonomi kreatif berbasis tempurung, anyaman, dan tenun	Terlaksananya perencanaan pembangunan fasilitas riset dan inovasi untuk mendukung pengembangan produk ekonomi kreatif	Terbangunnya fasilitas produksi, pengolahan, dan pameran hasil inovasi ekonomi kreatif	Termanfaatkannya fasilitas riset dan program pendampingan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif	Terpeliharanya dan meningkatnya kualitas infrastruktur pendukung inovasi produk ekonomi kreatif

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya kajian kebutuhan pembiayaan riset dan inovasi untuk pengembangan produk cenderamata, kriya, dan tenun sebagai komoditas unggulan sektor ekonomi kreatif	Teralokasikannya anggaran awal dalam dokumen perencanaan (RKPD/Renja) untuk mendukung program riset dan pengembangan komoditas unggulan ekonomi kreatif	Terlaksananya pendanaan kegiatan riset terapan dan inovasi pengembangan komoditas unggulan ekonomi kreatif (cenderamata, kriya, dan tenun)	Terlaksananya penguatan skema pendanaan riset dan inovasi (kolaborasi APBD, CSR, dana pusat) untuk mendorong kegiatan inovasi produk ekonomi kreatif	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan anggaran riset dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan ekonomi kreatif (cenderamata, kriya, dan tenun)
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya pelatihan SDM daerah tentang perlindungan HKI untuk produk ekonomi kreatif (cendramata tempurung, kriya, dan tenun)	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang pentingnya HKI (merek, motif, teknik produksi khas)	Teridentifikasinya potensi kekayaan intelektual lokal, termasuk desain dan teknik produksi cendramata tempurung, kriya dan tenun khas daerah	Terinventarisasinya HKI produk ekonomi kreatif yang potensial untuk didaftarkan	Terlaksananya evaluasi proses perlindungan dan pemanfaatan HKI, serta penyusunan mekanisme pengelolaan HKI di sektor ekonomi kreatif
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di	Tersusunnya kajian pemetaan pemangku kepentingan dan	Terbentuknya forum koordinasi dan kolaborasi	Terlaksananya program kolaboratif riset dan pelatihan	Terimplementasikannya hasil riset kolaboratif dalam bentuk pelatihan,	Terlaksananya evaluasi efektivitas kolaborasi riset dan

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
daerah dengan Pemangku Kepentingan	kebutuhan kolaborasi riset dan inovasi dalam pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	riset ekonomi kreatif antar akademisi, pelaku UMKM, komunitas seni, dan pemerintah daerah	dalam desain, produksi, dan pemasaran produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan lokal	pengembangan produk baru, atau adopsi teknologi sederhana	inovasi serta tersusunnya model kelembagaan kolaboratif untuk pengembangan produk unggulan di sektor ekonomi kreatif (cendramata tempurung, kriya anyaman, dan tenun)
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.	Tersusunnya kajian kebutuhan dan rencana teknis penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Terlaksananya pengadaan atau rehabilitasi sarana sederhana untuk riset desain, pelatihan kriya, dan laboratorium bahan alami pewarna	Teroptimalisasinya penggunaan sarana riset dan pelatihan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif	Terpeliharanya dan meningkatnya mutu fasilitas pendukung riset dan inovasi produk unggulan di sektor ekonomi kreatif (cendramata tempurung, kriya anyaman, dan tenun)	Terlaksananya evaluasi efektivitas penggunaan sarana untuk pengembangan cendramata tempurung, kriya dan tenun lokal
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Tersusunnya kajian pemetaan kelembagaan dan potensi kolaborasi antara pemerintah	Terlaksananya forum koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk menyusun	Terlaksananya kegiatan kolaboratif antarlembaga berupa pelatihan teknik kerajinan,	Terjalinnya kemitraan aktif antar lembaga yang mendukung inovasi dan peningkatan nilai tambah produk ekonomi	Terlaksananya evaluasi kemitraan dan penyusunan rencana penguatan kolaborasi untuk

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha kreatif, dan komunitas dalam pengembangan cenderamata berbasis tempurung, anyaman, dan tenun	rencana kemitraan riset dan inovasi cendrama tempurung, kriya, dan tenun lokal	pengembangan desain, serta pendampingan teknis	kreatif secara berkelanjutan	keberlanjutan pengembangan cenderamata, kriya, dan tenun khas daerah
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya kajian model dan strategi transfer teknologi dan teknik kriya yang sesuai untuk pengembangan cenderamata tempurung, anyaman, dan tenun	Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis tentang desain inovatif, teknik pewarnaan alami, dan pengolahan limbah menjadi produk ekonomi kreatif bernilai tambah	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi teknologi inovatif untuk peningkatan efisiensi dan mutu produk	Terlaksananya kegiatan pengenalan alat sederhana produksi, teknik kemasan kreatif, dan strategi pemasaran digital	Terlaksananya evaluasi terhadap keberhasilan transfer teknologi kepada pelaku usaha ekonomi kreatif lokal
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Tersusunnya kajian pemetaan penerapan hasil riset dan inovasi oleh pelaku usaha ekonomi kreatif	Terlaksananya pelatihan dan workshop kepada pelaku ekonomi kreatif terkait adopsi hasil riset dan praktik baik	Terlaksananya pendampingan teknis kepada pelaku usaha ekonomi kreatif yang telah mengikuti	Terlaksananya diseminasi metode dan praktik sukses pengembangan produk ekonomi kreatif melalui media, kunjungan	Terlaksananya evaluasi efektivitas program pelatihan, pendampingan, dan diseminasi terhadap peningkatan kapasitas pelaku

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	sebagai model pembelajaran daerah	dalam desain, produksi, dan distribusi	pelatihan, termasuk manajemen usaha dan penguatan daya saing	lapangan, dan materi pembelajaran	ekonomi kreatif daerah
Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya rencana promosi dan kampanye inovasi untuk mengenalkan hasil-hasil riset dan inovasi terkait pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun kepada masyarakat luas	Terlaksananya kampanye inovasi ekonomi kreatif melalui media sosial, radio lokal, dan video pendek yang menampilkan cerita sukses pelaku ekonomi kreatif	Terselenggaranya kegiatan expo inovasi ekonomi kreatif yang menampilkan produk, inovasi layanan, dan teknologi pembuatan produk ekonomi kreatif	Terwujudnya kolaborasi kampanye inovasi bersama pelaku ekonomi kreatif, sekolah, dan komunitas seni budaya lokal	Terlaksananya evaluasi dampak kampanye inovasi terhadap peningkatan minat kunjungan wisata dan penggunaan inovasi dalam pembuatan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya kajian model kegiatan lomba dan pameran inovasi yang sesuai dengan potensi lokal dalam pengembangan cenderamata	Terlaksananya lomba inovasi dan kreativitas pengembangan desain, teknik produksi, dan pemasaran cenderamata	Terselenggaranya pameran hasil lomba serta seleksi produk unggulan untuk promosi ke pasar regional (provinsi)	Terlaksananya pendampingan bagi pemenang lomba untuk mengikuti kompetisi inovasi tingkat nasional	Terlaksananya evaluasi dampak lomba dan pameran terhadap peningkatan kreativitas dan pertumbuhan inovasi

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	tempurung, kriya, dan tenun	berbasis warisan budaya			di sektor ekonomi kreatif
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian strategi inkubasi bisnis ekonomi kreatif berbasis riset dan inovasi	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM daerah melalui bimtek dan seminar tentang inkubasi bisnis cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenu	Terlaksananya pelatihan teknis dan manajemen usaha bagi pengrajin pemula, mulai dari desain, produksi, hingga strategi pemasaran	Terlaksananya pendampingan intensif untuk membentuk usaha rintisan (startup) berbasis inovasi produk unggulan ekonomi kreatif (cendramata, kriya anyaman, dan tenun)	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas inkubasi bisnis ekonomi kreatif
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya database teknologi tradisional dan pengetahuan lokal yang digunakan dalam pembuatan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	Tersusunnya kodefikasi teknik tradisional, seperti pola anyaman, teknik ukir tempurung, dan motif tenun khas daerah	Termanfaatkannya teknologi lokal oleh pelaku UMKM dalam proses produksi dan pengolahan	Terlaksananya pengembangan dan modernisasi teknik tradisional untuk meningkatkan kualitas produk	Terlaksananya evaluasi dampak pemanfaatan teknologi tradisional terhadap efisiensi, kualitas, dan daya saing produk ekonomi kreatif
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan	Tersusunnya kajian identifikasi topik riset	Terlaksananya kegiatan riset dan	Terwujudnya penguatan riset	Terjalinnya kolaborasi dengan perguruan tinggi	Terlaksananya evaluasi hasil riset

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;	dan inovasi sesuai kebutuhan pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun sebagai komoditas unggulan di sektor ekonomi kreatif	IPTEK yang berfokus pada peningkatan strategi promosi, penguatan identitas budaya, serta pengembangan desain dan nilai tambah cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun	terapan untuk menjawab tantangan pelaku ekonomi kreatif, terutama terkait aksesibilitas, inovasi desain produk, efisiensi produksi, dan peningkatan daya saing	dan lembaga riset dalam merancang solusi promosi, digitalisasi pemasaran, dan pengembangan kelembagaan pelaku ekonomi kreatif berbasis komunitas	dan inovasi, serta tersusunnya strategi pengembangan lanjutan PUD ekonomi kreatif untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan keberlanjutan usaha cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun
Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan	Tersusunnya kajian pengembangan klaster inovasi ekonomi kreatif, yang mencakup pemetaan pelaku usaha, potensi lokal, dan rantai nilai dari produksi hingga pemasaran cenderamata	Terbentuknya klaster inovasi ekonomi kreatif di sentra kerajinan lokal yang melibatkan perajin, komunitas seni budaya, UMKM, dan lembaga pendukung	Terlaksananya pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota klaster, melalui dukungan teknologi produksi, desain, digitalisasi pemasaran, dan promosi	Terlaksananya penguatan jejaring klaster dengan komunitas ekonomi kreatif lintas daerah di Sulawesi Barat dan kawasan lainnya melalui kerja sama promosi dan kolaborasi produk	Terlaksananya evaluasi sistem klaster inovasi ekonomi kreatif untuk menilai efektivitas kelembagaan, keterlibatan pelaku, dan dampaknya terhadap pengembangan cenderamata

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	tempurung, kriya anyaman, dan tenun				tempurung, kriya anyaman, dan tenun
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian penyelarasan arah kebijakan riset dan inovasi daerah dengan kebijakan nasional di sektor ekonomi kreatif, khususnya untuk pengembangan cenderamata tempurung, kriya anyaman, dan tenun.	Terlaksananya penyesuaian program dan kegiatan riset dan inovasi ekonomi kreatif agar selaras dengan RPJMN, Renstra K/L, serta agenda prioritas nasional dalam penguatan industri ekonomi kreatif	Terlaksananya forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat dukungan kelembagaan dan regulasi bagi pengembangan ekonomi kreatif di Mamuju Tengah	Terlaksananya program kolaboratif lintas level pemerintahan, yang mendukung hilirisasi produk, promosi digital, dan pembentukan ekosistem ekonomi kreatif	Terlaksananya evaluasi peran dan koordinasi kebijakan nasional dan daerah terhadap pertumbuhan ekosistem ekonomi kreatif di Mamuju Tengah
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Tersusunnya kajian mengenai tren dan isu global yang relevan dengan pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan, seperti circular economy, green design, dan	Terlaksananya sosialisasi isu global kepada pelaku ekonomi kreatif dan pemangku kepentingan lokal	Terlaksananya seminar atau webinar internasional di tingkat daerah dengan menghadirkan mitra global di bidang industri	Terlaksananya integrasi isu global ke dalam perencanaan riset dan inovasi produk ekonomi kreatif, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan, desain, dan standar ekspor	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak integrasi isu global dalam pengembangan ekosistem riset dan inovasi produk cenderamata

Elemen/Sub Elemen	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pelestarian budaya lokal		ekonomi kreatif, khususnya kerajinan tangan, kriya, dan tenun		tempurung, kriya anyaman, dan tenun
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya kajian peluang kerja sama internasional dalam mendukung riset, promosi, dan pengembangan produk unggulan ekonomi kreatif, khususnya cenderamata tempurung, anyaman, dan tenun	Terlaksananya komunikasi awal dan pengiriman proposal kerja sama ke mitra internasional potensial (universitas, NGO, penyelenggara festival budaya atau lembaga ekonomi kreatif global)	Terlaksananya program kolaborasi riset atau pelatihan teknis bersama mitra luar negeri di bidang ekonomi kreatif	Meningkatnya partisipasi pelaku ekonomi kreatif, khususnya pengrajin kriya dan tenun dalam pertukaran pengetahuan dan pameran produk budaya di tingkat internasional	Terlaksananya evaluasi efektivitas kerja sama luar negeri dan penyusunan roadmap keberlanjutan kemitraan global untuk pengembangan industry ekonomi kreatif di Mamuju Tengah

Sumber: Dokumen RIPJPID Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

Salah satu tema prioritas pembangunan daerah yang dirumuskan adalah pengembangan Kawasan Agropolitan. Komitmen pengembangan agropolitan sejak terbentuknya daerah, belum menunjukkan hasil signifikan yang ditandai dengan infrastruktur pendukung seperti jalan produksi, jaringan listrik desa, dan sentra pengolahan hasil pertanian masih terbatas. Hilirisasi produk juga belum optimal akibat keterbatasan fasilitas pasca panen, teknologi dan kapasitas SDM lokal. Tema terkait dengan seluruh potensi unggulan daerah yang telah dijelaskan pada tabel di atas.

Tabel 3. 14 Sasaran Strategis Tema Prioritas Daerah

Tema Prioritas 3: Pengembangan Kawasan agropolitan (termasuk infrastruktur dan hilirisasi)					
Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah					
Reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Tersusunnya kebijakan riset dan inovasi daerah yang fokus pada penguatan kawasan agropolitan, termasuk pemetaan komoditas unggulan, rantai pasok, serta kebutuhan infrastruktur pendukung	Terbitnya peraturan daerah yang mendorong kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan infrastruktur dan hilirisasi produk pertanian di kawasan agropolitan	Terimplementasinya kebijakan yang mendorong riset terapan dan inovasi teknologi untuk pengolahan hasil pertanian serta peningkatan nilai tambah produk	Terintegrasinya kebijakan riset dan inovasi daerah dengan perencanaan pembangunan kawasan agropolitan melalui sinkronisasi dengan RPJMD, Renstra perangkat daerah, dan dukungan kebijakan lintas OPD	Terlaksananya evaluasi kebijakan riset dan inovasi dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

Penataan basis data Riset dan Inovasi	Tersusunnya pemetaan awal data terkait potensi komoditas unggulan, pelaku usaha, sarana prasarana yang telah tersedia, dan kebutuhan infrastruktur di kawasan agropolitan	Terbangunnya sistem database digital Kawasan agropolitan yang terintegrasi dengan data sektoral	Terlaksananya pemutakhiran dan pengelolaan data secara rutin oleh perangkat daerah untuk mendukung perencanaan riset dan inovasi berbasis data di sektor agropolitan	Terintegrasinya basis data riset dan inovasi kawasan agropolitan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah dan data sektoral lainnya yang relevan	Terlaksananya evaluasi pemanfaatan dan efektivitas basis data dalam mendukung pengambilan kebijakan serta pelaksanaan program riset dan inovasi di kawasan agropolitan
Pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Terlaksananya pemetaan kebutuhan infrastruktur dasar riset dan inovasi yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan	Terbangunnya sarana prasarana dasar riset dan inovasi sesuai hasil pemetaan kebutuhan di kawasan agropolitan	Terfungsikannya infrastruktur riset dan inovasi untuk mendukung kegiatan uji coba teknologi, hilirisasi produk, dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan	Terjalinnya kemitraan pemanfaatan infrastruktur riset dengan perguruan tinggi, pelaku usaha, dan lembaga riset untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi efektivitas infrastruktur riset dalam mendorong inovasi dan penguatan komoditas di kawasan agropolitan
Penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Tersusunnya rencana penganggaran riset dan inovasi	Teralokasinnya anggaran daerah untuk kegiatan riset dan inovasi	Tersalurkannya dukungan pembiayaan bagi lembaga riset, UMKM, dan pelaku	Terbangunnya kolaborasi pendanaan riset dengan mitra eksternal	Terlaksananya evaluasi efektivitas anggaran riset

	berbasis prioritas pengembangan kawasan agropolitan, termasuk kebutuhan riset teknologi pertanian, hilirisasi, dan pasar	strategis di sektor pertanian, pengolahan hasil, dan infrastruktur kawasan agropolitan	inovasi lokal yang berkontribusi pada pengembangan kawasan agropolitan	(kementerian, lembaga donor, sektor swasta) untuk memperluas cakupan program inovasi di Kawasan agropolitan	dan inovasi terhadap pembangunan Kawasan agropolitan di Mamuju Tengah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya identifikasi kekayaan intelektual daerah di kawasan agropolitan, termasuk inovasi teknologi pertanian dan merek lokal produk unggulan	Terfasilitasinya proses pendaftaran kekayaan intelektual oleh pelaku usaha, UMKM, dan kelompok tani melalui pendampingan teknis dan kerja sama dengan lembaga terkait	Terimplementasikannya pemanfaatan kekayaan intelektual dalam skema promosi, pengembangan merek dagang, dan perlindungan hak bagi pelaku inovasi di kawasan agropolitan	Terjalinnya kemitraan dengan sektor swasta, inkubator bisnis, dan lembaga riset untuk memperkuat hilirisasi dan komersialisasi produk inovatif berbasis kekayaan intelektual	Terlaksananya evaluasi efektivitas perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kawasan agropolitan
Elemen 2: Kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di	Teridentifikasinya pemangku kepentingan	Terbentuknya forum koordinasi dan kemitraan	Terlaksananya program kolaboratif riset dan inovasi antara	Terintegrasinya hasil riset kolaboratif ke dalam program	Terlaksananya evaluasi efektivitas

daerah dengan Pemangku Kepentingan	utama (akademisi, pelaku usaha, OPD, dan komunitas) yang relevan dengan pengembangan kawasan agropolitan	riset untuk mendukung riset berbasis kebutuhan kawasan agropolitan	pemerintah daerah, universitas, dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan kawasan agropolitan	pembangunan kawasan agropolitan, termasuk infrastruktur penunjang dan hilirisasi produk pertanian	kolaborasi dan penyusunan strategi penguatan kemitraan untuk pengembangan kawasan agropolitan
Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Tersusunnya pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana riset yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan dan hilirisasi produk unggulan	Terbangunnya sarana riset dasar sesuai hasil pemetaan kebutuhan pengembangan kawasan agropolitan	Terfasilitasinya pemanfaatan sarana riset oleh pelaku inovasi, UMKM, dan lembaga pendidikan untuk pengembangan produk dan teknologi di bidang agropolitan	Terintegrasinya penggunaan sarana riset dengan program pelatihan, hilirisasi teknologi, dan pemberdayaan masyarakat kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas sarana prasarana riset dan inovasi terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Mamuju Tengah
Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi Daerah					
Penguatan kemitraan antarkelembagaan	Teridentifikasinya potensi kemitraan antar pemerintah, perguruan tinggi, swasta, BUMDes, yang relevan dalam	Terlaksananya pembentukan forum koordinasi antarlembaga untuk mendukung perencanaan dan	Terlaksananya implementasi program kemitraan bersama untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan	Terlaksananya penguatan sinergi kelembagaan melalui penyusunan MoU, rencana aksi bersama,	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kemitraan dalam mendukung pengembangan

	pengembangan kawasan agropolitan	pelaksanaan riset inovasi agropolitan	hilirisasi produk unggulan Kawasan agropolitan	dan kolaborasi pendanaan	kawasan agropolitan
Peningkatan difusi Inovasi	Tersusunnya pemetaan inovasi pertanian dan hilirisasi lokal yang layak disebarluaskan ke wilayah agropolitan	Terlaksananya pilot project difusi inovasi ke desa-desa berbasis pertanian yang mendukung pengembangan Kawasan agropolitan	Terlaksananya pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani, UMKM, dan pelaku usaha terkait adopsi inovasi agropolitan	Terintegrasinya program difusi inovasi dengan program lintas sektor di wilayah agropolitan untuk meningkatkan adopsi inovasi secara luas	Terlaksananya evaluasi dampak program difusi inovasi terhadap produktivitas dan nilai tambah di kawasan agropolitan
Peningkatan praktik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi	Tersusunnya kajian pemetaan potensi kawasan agropolitan serta kebutuhan riset dan inovasi pelaku usaha lokal dalam mendukung hilirisasi produk unggulan	Terlaksananya pelatihan dan workshop berbasis hasil riset untuk peningkatan keterampilan pelaku usaha di bidang produksi, pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan kawasan agropolitan.	Terwujudnya penerapan hasil riset oleh pelaku inovasi lokal di sektor hilirisasi produk unggulan kawasan agropolitan	Terlaksananya penguatan jejaring antar pelaku inovasi dan lembaga riset untuk mendorong pertukaran pengetahuan dan teknologi	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas diseminasi hasil riset dan dampaknya terhadap peningkatan produktivitas dan nilai tambah kawasan agropolitan

Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi Daerah					
Promosi dan kampanye Inovasi	Tersusunnya strategi promosi inovasi daerah yang relevan dengan pengembangan kawasan agropolitan	Terlaksananya kampanye inovasi melalui media lokal dan sosial, dengan fokus pada hilirisasi produk pertanian dan perdesaan	Terlaksananya pameran dan expo inovasi agropolitan untuk memperkenalkan hasil riset dan produk unggulan daerah di sektor agropolitan	Terlaksananya kerja sama dengan media lokal dan komunitas usaha untuk mempromosikan inovasi yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi efektivitas program promosi dan kampanye inovasi dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan
Apresiasi prestasi Inovasi	Tersusunnya mekanisme dan kriteria apresiasi bagi pelaku inovasi di sektor pertanian, pengolahan, dan distribusi	Terlaksananya ajang penghargaan tahunan bagi inovator yang berkontribusi terhadap penguatan kawasan agropolitan	Terlaksananya program pendampingan lanjutan bagi penerima apresiasi inovasi daerah agar hasil inovasinya dapat dimanfaatkan secara luas di kawasan agropolitan.	Terlibatnya penerima penghargaan dalam kegiatan bersama seperti forum petani-inovator, temu bisnis, dan kemitraan usaha di sektor agropolitan	Terlaksananya evaluasi dampak program apresiasi inovasi terhadap peningkatan nilai tambah produk Kawasan agropolitan
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya peta kebutuhan dan peluang pengembangan startup berbasis	Terfasilitasinya inkubasi awal bagi calon wirausaha berbasis riset, khususnya di	Terlaksananya pemberian dukungan teknologi, pelatihan bisnis, dan akses pasar bagi startup berbasis inovasi lokal	Terlaksananya kemitraan antara startup daerah dengan pelaku industri, UMKM, dan lembaga pembiayaan	Terlaksananya evaluasi startup berbasis riset terhadap peningkatan nilai tambah

	riset di kawasan agropolitan	sektor agroindustri lokal			produk Kawasan agropolitan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Tersusunnya kajian awal tentang praktik lokal, alat tradisional, dan pengetahuan masyarakat yang masih digunakan dalam kegiatan agropolitan	Terlaksananya klasifikasi dan pendataan pengetahuan lokal yang potensial untuk dikembangkan dan diterapkan secara lebih luas di kawasan agropolitan	Terlaksananya pengujian dan penyempurnaan teknologi masyarakat yang relevan dengan kebutuhan produksi dan pengolahan produk unggulan lokal	Terlaksananya perlindungan hukum melalui pencatatan atau pendaftaran kekayaan intelektual atas pengetahuan/teknologi lokal yang dikembangkan	Terlaksananya evaluasi penggunaan teknologi masyarakat dalam peningkatan produktivitas Kawasan agropolitan
Elemen 5: Keterpaduan atau koherensi Riset dan Inovasi Daerah					
Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terlaksananya kajian kebutuhan riset dan inovasi yang relevan dengan tantangan pengembangan kawasan agropolitan, termasuk infrastruktur dan hilirisasinya	Teridentifikasinya peluang riset terapan untuk mendukung peningkatan nilai tambah produk unggulan kawasan agropolitan	Terlibatnya akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengembangan model riset pengambangan Kawasan agropolitan sesuai kebutuhan daerah	Terlaksananya penerapan hasil riset secara terbatas pada sektor hilirisasi atau distribusi hasil di sektor agropolitan	Terlaksananya evaluasi terhadap dampak prakarsa riset dalam mendukung pengembangan kawasan agropolitan

Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah	Tersusunnya kajian awal potensi pengembangan klaster inovasi di kawasan agropolitan, termasuk pemetaan produk unggulan, pelaku usaha, dan dukungan kelembagaan	Terbentuknya klaster inovasi daerah yang fokus pada pengolahan hasil produk di Kawasan agropolitan	Terlaksananya penguatan kapasitas anggota klaster melalui pelatihan, pendampingan teknologi, dan manajemen usaha berbasis hasil riset	Terintegrasinya klaster dengan jaringan distribusi, serta peningkatan akses pasar melalui promosi bersama dan kolaborasi dengan sektor swasta	Terlaksananya evaluasi terhadap kinerja klaster inovasi terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Mamuju Tengah
Kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Tersusunnya kajian terkait identifikasi kebijakan pusat dan daerah yang berkaitan langsung dengan pengembangan kawasan agropolitan di Mamuju Tengah	Terlaksananya forum koordinasi antara perangkat daerah dan instansi pusat untuk penyelarasan program/kegiatan prioritas di kawasan agropolitan	Terintegrasinya arah kebijakan daerah ke dalam dokumen perencanaan sektoral yang relevan (RPJMD, Renstra OPD), sesuai arahan kebijakan nasional	Terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan program pusat dan daerah dalam bentuk kolaborasi pendanaan dan pelaksanaan kegiatan berbasis kawasan agropolitan	Terlaksananya evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan pusat-daerah terhadap pengembangan kawasan agropolitan di Mamuju Tengah
Elemen 6: penyelarasan dengan perkembangan global					
Peningkatan kepedulian isu internasional yang	Terlaksananya kajian awal terkait isu global	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan	Terintegrasinya isu-isu global strategis ke dalam rencana riset	Terlaksananya kolaborasi tematik dengan lembaga	Terlaksananya evaluasi atas efektivitas

mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	(ketahanan pangan, perubahan iklim, perdagangan internasional) yang relevan dengan pengembangan kawasan agropolitan	diskusi tematik lintas sektor terkait implikasi isu internasional terhadap ketahanan pangan dan agroindustri	dan inovasi daerah, khususnya untuk pembangunan sektor pertanian dan pengolahan	nasional atau internasional dalam advokasi dan penerapan praktik inovasi berkelanjutan berbasis isu global	integrasi isu global dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi kawasan agropolitan
Penguatan kerjasama internasional	Tersusunnya daftar peluang kerjasama internasional yang relevan dengan pengembangan pertanian, hilirisasi, dan agroteknologi	Terlaksananya inisiasi komunikasi dan penjajakan kemitraan dengan universitas, NGO, atau lembaga riset internasional di sektor agropolitan	Terlaksananya program kolaborasi seperti riset bersama, pelatihan teknis, atau studi banding internasional di bidang pertanian dan agroindustri	Terintegrasinya hasil kolaborasi internasional ke dalam program inovasi lokal untuk mendukung penguatan nilai tambah produk unggulan	Terlaksananya evaluasi terhadap efektivitas kerjasama internasional dalam memperkuat sistem riset dan inovasi kawasan agropolitan di Mamuju Tengah

Sumber: Dokumen RIPJPID Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

Tabel 3. 15 Program Indikatif Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi yang Terkait Tema Prioritas Daerah

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
Tema Prioritas 3: Pengembangan Kawasan Agropolitan	Elemen 1: Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah	Penyusunan regulasi pengembangan kawasan agropolitan berbasis riset	Jumlah regulasi terkait agropolitan yang disusun berbasis riset	Tersedianya kebijakan pengembangan kawasan agropolitan yang berbasis evidence	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Elemen 2: Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi di Daerah	Peningkatan kapasitas SDM penyuluh pertanian dan kelembagaan desa	Jumlah SDM penyuluh dan kelembagaan yang dilatih	Peningkatan kapasitas aktor lokal dalam mendukung pertanian modern	Bapperida; BKPSDM; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas PMD
	Elemen 3: Kemitraan Riset dan Inovasi di Daerah	Kemitraan riset dan pengembangan dengan petani, koperasi, dan perguruan tinggi	Jumlah kemitraan riset dengan aktor lokal di sektor pertanian	Terwujudnya sinergi aktor lokal dalam inovasi pertanian	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Dinas Koperasi UMKM
	Elemen 4: Budaya Riset dan Inovasi di Daerah	Sosialisasi dan pelatihan inovasi pertanian berbasis teknologi tepat guna	Jumlah pelatihan inovasi pertanian dilakukan	Meningkatnya pengetahuan petani terhadap inovasi dan teknologi pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; Bapperida; Dinas Kominfo
	Elemen 5: Keterpaduan atau Koherensi Riset	Integrasi hasil riset pertanian dalam	Persentase program kawasan	Perencanaan agropolitan lebih	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Tema Prioritas / Produk Unggulan Daerah	Elemen	Program	Indikator	Sasaran Akhir	Perangkat Daerah
	dan Inovasi di Daerah	perencanaan wilayah agropolitan	agropolitan berbasis hasil riset	terarah dan berbasis riset	
	Elemen 6: Penyelarasan dengan Perkembangan Global	Adopsi teknologi pertanian modern yang selaras dengan praktik global	Jumlah teknologi pertanian modern yang diadopsi	Pertanian lokal berdaya saing dan berwawasan global	Bapperida; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Sumber: Dokumen RIPJPID Kabupaten Mamuju Tengah, 2025

3.2.4 Lokus Pembangunan Daerah

Penyajian lokus pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah disajikan berdasarkan kecamatan untuk memberikan gamvaran mengenai prioritas pembangunan berdasarkan lokus. Penetapan prioritas pembangunan daerah berdasarkan lokus kecamatan sepenuhnya didasarkan pada potensi daerah dan prospek ke depan masing-masing kecamatan.

Tabel 3. 16 Lokus Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030

Lokus Pembangunan Daerah	**Prioritas Pembangunan Daerah**
Kecamatan Tobadak	Pemberian beasiswa untuk peningkatan akses Pendidikan PAUD, SD, SMP
	Pemberian perlengkapan sekolah
	Penuntasan anak tidak bersekolah
	Peningkatan kualitas tenaga pendidik
	Peningkatan kualitas pembelajaran dengan metode Kreatif, Inovatif, Produktif (KIP) learning
	Peningkatan minat baca masyarakat melalui gerakan gemar membaca dan optimalisasi peran perpustakaan
	Optimalisasi Pemenuhan SPM Kesehatan
	Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis
	Pengembangan dan Peningkatan daya saing SDM melalui program kepemudaan, kebudayaan dan olahraga
	Peningkatan kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasi-an data kemiskinan
	Pemberian bantuan sosial bagi petani, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
	Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem
	Pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan untuk mendorong produktivitas orang miskin
	Penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, dan pengembangan tabungan
	Pelatihan kewirausahaan dalam mengmbangkan industri rumah tangga sesuai potensi lokal serta pertanian tanaman pangan/hortikultura
	Pemantapan pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi dan manajemen usaha
	Peningkatan akses pemasaran dan jejaring dengan koperasi desa, BUMDes, perusahaan sawit, lembaga keuangan, BUMD dan entitas lainnya
	Pengembangan inovasi lokal
	Optimalisasi sentra produksi pertanian
	Pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi
	Pemberdayaan petani melalui transfer teknologi
	Perluasan fasilitas pascapanen
	Penguatan rantai nilai produk pertanian
	Pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan UMKM
	Fasilitasi sertifikasi produk untuk perluasan akses pasar dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata
	Pengembangan jaringan transportasi komoditas
	Pembangunan pasar-pasar induk agribisnis
	Penguatan kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
	Pengembangan sistem logistik pertanian terintegrasi untuk efisiensi distribusi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
	Pengembangan platform pemasaran produk pertanian
	Implementasi sistem informasi harga dan pasokan pertanian real-time
	Penguatan ekonomi sirkular berbasis pertanian
	Penerapan standar keberlanjutan dalam praktik pertanian dan pengolahan

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Optimalisasi manajemen sumber daya alam untuk keberlanjutan produktivitas
	Pengembangan pusat-pusat keunggulan agropolitan yang berdaya saing tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim
	Pengembangan industri berbasis potensi lokal
	Peningkatan kapasitas SDM industri
	Fasilitasi akses pembiayaan dan pasar
	fasilitasi mesin dan peralatan industri
	Pembangunan kawasan industri terpadu atau zona agro-industri
	Hilirisasi dan diversidikasi produk
	Promosi dan ekspansi ke pasar luar daerah
	Penerapan teknologi industri 4.0 (skala lokal)
	Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital
	Pengembangan akses internet di daerah tertinggal
	Pelatihan digital bagi UMKM dan petani
	Akselerasi implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian, UMKM, dan pelayanan publik
	Pengembangan pusat inovasi digital
	Implementasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan pertanian
	Penerapan big data untuk analisis produktivitas pertanian
	Perluasan infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil untuk pemerataan akses teknologi
	Implementasi sistem smart farming dan smart city
	Pengembangan marketplace terintegrasi untuk produk pertanian dan UMKM lokal
	Transformasi desa menjadi desa digital terintegrasi sistem nasional

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pengembangan artificial intelligence untuk optimalisasi produksi pertanian dan pembentukan kawasan teknologi tinggi
	Penguatan kapasitas SDM pendamping di kecamatan/ desa
	Integrasi dan ekspansi literasi keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, industri kreatif)
	Penguatan akses pelaku ekonomi terhadap KUR, pinjaman modal usaha dan asuransi usaha
	Penilaian tingkat literasi keuangan secara berkala
	Peningkatan kompetensi dan kapasitas perempuan
	Promosi dan pembukaan kesempatan yang setara bagi perempuan pada jabatan strategis
	Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan
	Perlindungan hak-hak pekerja perempuan
	Pelestarian cagar budaya
	Penyediaan sarana-prasarana wisata
	Inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial,
	Pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan
	Pengembangan sistem peringatan dini lokal (Early Warning System - EWS)
	Sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan masyarakat
	Pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana
	Pembentukan tim siaga bencana di tiap desa
	Pembangunan IPAL komunal/desentralisasi di permukiman padat
	Perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah
	Peningkatan akses sanitasi layak di desa/kelurahan

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pemberdayaan bank sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga berbasis RW
	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai
	Perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar
	Pencegahan dan penaganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit
	Pemeliharaan cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui pencegahan deforestasi
	Pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultu
	Pengembangan pertanian polikultur tanaman pangan dan hortikultura
	Penataan vegetasi dan kualitas lahan gambut
	Pengembangan ekonomi sirkuler berbasis pertanian terpadu
	Pengembangan integrasi peternakan dengan kelapa sawit
	Pengendalian bau busuk akibat limbah buah dan tandan sawit
	Penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah perkebunan sawit
	Pemeliharaan berbagai jenis ikan dalam sungai
	Peningkatan infrastruktur pertanian
	Peningkatan Infrastruktur Transportasi
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan agropolitan
	Peningkatan Kapasitas Petani
	Pengembangan Kelembagaan Petani
	Fasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pengolahan hasil pertanian dan jasa pendukung
	Pengembangan Agrowisata
	Pembangunan gerbang batas kabupaten

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Akselerasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan
	Pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, serta penerangan jalan
	Pelembagaan sistem pengelolaan air bersih oleh BUMDes atau UPT daerah
	Revitalisasi saluran banjir dan konservasi daerah tangkapan air
	Optimalisasi Program padat karya pemeliharaan jalan dan PJU oleh masyarakat
Kecamatan Topoyo	Pemberian beasiswa untuk peningkatan akses Pendidikan PAUD, SD, SMP
	Pemberian perlengkapan sekolah
	Penuntasan anak tidak bersekolah
	Peningkatan kualitas tenaga pendidik
	Peningkatan kualitas pembelajaran dengan metode Kreatif, Inovatif, Produktif (KIP) learning
	Pembangunan puskesmas di Desa Tumbu
	Optimalisasi Pemenuhan SPM Kesehatan
	Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis
	Pengembangan dan Peningkatan daya saing SDM melalui program kepemudaan, kebudayaan dan olahraga
	Peningkatan kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasi-an data kemiskinan
	Pemberian bantuan sosial bagi petani, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
	Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan untuk mendorong produktivitas orang miskin dengan prioritas pada wilayah pesisir
	Penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, dan pengembangan tabungan
	Pelatihan kewirausahaan dalam mengmbangkan industri rumah tangga sesuai potensi lokal serta pertanian tanaman pangan/hortikultura
	Pemantapan pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi dan manajemen usaha
	Peningkatan akses pemasaran dan jejaring dengan koperasi desa, BUMDes, perusahaan sawit, lembaga keuangan, BUMD dan entitas lainnya
	Pengembangan inovasi lokal
	Optimalisasi sentra produksi pertanian
	Pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi
	Pemberdayaan petani melalui transfer teknologi
	Perluasan fasilitas pascapanen
	Penguatan rantai nilai produk pertanian
	Pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan UMKM
	Fasilitasi sertifikasi produk untuk perluasan akses pasar dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata
	Pengembangan jaringan transportasi komoditas
	Pembangunan pasar-pasar induk agribisnis
	Penguatan kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
	Pengembangan sistem logistik pertanian terintegrasi untuk efisiensi distribusi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
	Pengembangan platform pemasaran produk pertanian

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Implementasi sistem informasi harga dan pasokan pertanian real-time
	Penguatan ekonomi sirkular berbasis pertanian
	Penerapan standar keberlanjutan dalam praktik pertanian dan pengolahan
	Optimalisasi manajemen sumber daya alam untuk keberlanjutan produktivitas
	Pengembangan pusat-pusat keunggulan agropolitan yang berdaya saing tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim
	Pengembangan industri berbasis potensi lokal
	Peningkatan kapasitas SDM industri
	Fasilitasi akses pembiayaan dan pasar
	fasilitasi mesin dan peralatan industri
	Pembangunan kawasan industri terpadu atau zona agro-industri
	Hilirisasi dan diversidikasi produk
	Promosi dan ekspansi ke pasar luar daerah
	Penerapan teknologi industri 4.0 (skala lokal)
	Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital
	Pengembangan akses internet di daerah tertinggal
	Pelatihan digital bagi UMKM dan petani
	Akselerasi implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian, UMKM, dan pelayanan publik
	Pengembangan pusat inovasi digital
	Implementasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan pertanian
	Penerapan big data untuk analisis produktivitas pertanian
	Perluasan infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil untuk pemerataan akses teknologi

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Implementasi sistem smart farming dan smart city
	Pengembangan marketplace terintegrasi untuk produk pertanian dan UMKM lokal
	Transformasi desa menjadi desa digital terintegrasi sistem nasional
	Pengembangan artificial intelligence untuk optimalisasi produksi pertanian dan pembentukan kawasan teknologi tinggi
	Penguatan kapasitas SDM pendamping di kecamatan/ desa
	Integrasi dan ekspansi literasi keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, industri kreatif)
	Penguatan akses pelaku ekonomi terhadap KUR, pinjaman modal usaha dan asuransi usaha
	Penilaian tingkat literasi keuangan secara berkala
	Peningkatan kompetensi dan kapasitas perempuan
	Promosi dan pembukaan kesempatan yang setara bagi perempuan pada jabatan strategis
	Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan
	Perlindungan hak-hak pekerja perempuan
	Pelestarian cagar budaya
	Penyediaan sarana-prasarana wisata
	Inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial,
	Pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan
	Pengembangan sistem peringatan dini lokal (Early Warning System - EWS)
	Sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan masyarakat
	Pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pembentukan tim siaga bencana di tiap desa
	pembangunan/ rehabilitasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), TPA, dan TPS 3R
	Pembangunan IPAL komunal/desentralisasi di permukiman padat
	Perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah
	Peningkatan akses sanitasi layak di desa/kelurahan
	Pemberdayaan bank sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga berbasis RW
	Penanganan abrasi pantai
	Penanganan pencemaran laut dan pesisir
	Perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar
	Pencegahan dan penaganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit
	Pemeliharaan cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui pencegahan deforestasi
	Pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultu
	Pengembangan pertanian polikultur tanaman pangan dan hortikultura
	Penataan vegetasi dan kualitas lahan gambut
	Pengembangan ekonomi sirkuler berbasis pertanian terpadu
	Pengendalian bau busuk akibat limbah buah dan tandan sawit
	Penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah perkebunan sawit
	Pengembangan integrasi peternakan dengan kelapa sawit
	Pemeliharaan keberadaan berbagai jenis ikan dalam sungai dan laut
	Peningkatan infrastruktur pertanian
	Peningkatan Infrastruktur Transportasi

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan agropolitan
	Peningkatan Kapasitas Petani
	Pengembangan Kelembagaan Petani
	Fasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pengolahan hasil pertanian dan jasa pendukung
	Pengembangan Agrowisata
	Akselerasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan
	Pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, serta penerangan jalan
	Pelembagaan sistem pengelolaan air bersih oleh BUMDes atau UPT daerah
	Revitalisasi saluran banjir dan konservasi daerah tangkapan air
	Optimalisasi Program padat karya pemeliharaan jalan dan PJU oleh masyarakat
Kecamatan Budong-Budong	Pemberian beasiswa untuk peningkatan akses Pendidikan PAUD, SD, SMP
	Pemberian perlengkapan sekolah
	Penuntasan anak tidak bersekolah
	Peningkatan kualitas tenaga pendidik
	Peningkatan kualitas pembelajaran dengan metode Kreatif, Inovatif, Produktif (KIP) learning
	Pembangunan puskesmas di Desa Bojo
	Optimalisasi Pemenuhan SPM Kesehatan
	Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis
	Pengembangan dan Peningkatan daya saing SDM melalui program kepemudaan, kebudayaan dan olahraga

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Peningkatan kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasi-an data kemiskinan
	Pemberian bantuan sosial bagi petani, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
	Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem
	Pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan untuk mendorong produktivitas orang miskin dengan prioritas pada wilayah pesisir
	Penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, dan pengembangan tabungan
	Pelatihan kewirausahaan dalam mengmbangkan industri rumah tangga sesuai potensi lokal serta pertanian tanaman pangan/hortikultura
	Pemantapan pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi dan manajemen usaha
	Peningkatan akses pemasaran dan jejaring dengan koperasi desa, BUMDes, perusahaan sawit, lembaga keuangan, BUMD dan entitas lainnya
	Pengembangan inovasi lokal
	Optimalisasi sentra produksi pertanian
	Pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi
	Pemberdayaan petani melalui transfer teknologi
	Perluasan fasilitas pascapanen
	Penguatan rantai nilai produk pertanian
	Pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan UMKM
	Fasilitasi sertifikasi produk untuk perluasan akses pasar dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata
	Pengembangan jaringan transportasi komoditas
	Pembangunan pasar-pasar induk agribisnis

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Penguatan kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
	Pengembangan sistem logistik pertanian terintegrasi untuk efisiensi distribusi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
	Pengembangan platform pemasaran produk pertanian
	Implementasi sistem informasi harga dan pasokan pertanian real-time
	Penguatan ekonomi sirkular berbasis pertanian
	Penerapan standar keberlanjutan dalam praktik pertanian dan pengolahan
	Optimalisasi manajemen sumber daya alam untuk keberlanjutan produktivitas
	Pengembangan pusat-pusat keunggulan agropolitan yang berdaya saing tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim
	Pengembangan kawasan industri yang fokus pada pembangunan infrastruktur dasar industri melalui pembangunan kawasan industri kecil (sentra IKM) dan penyediaan sarana prasaran dasar (jalan akses industri, listrik dan air bersih
	Pengembangan industri berbasis potensi lokal
	Peningkatan kapasitas SDM industri
	Fasilitasi akses pembiayaan dan pasar
	fasilitasi mesin dan peralatan industri
	Pembangunan kawasan industri terpadu atau zona agro-industri
	Hilirisasi dan diversidikasi produk
	Promosi dan ekspansi ke pasar luar daerah
	Penerapan teknologi industri 4.0 (skala lokal)
	Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital
	Pengembangan akses internet di daerah tertinggal

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pelatihan digital bagi UMKM dan petani
	Akselerasi implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian, UMKM, dan pelayanan publik
	Pengembangan pusat inovasi digital
	Implementasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan pertanian
	Penerapan big data untuk analisis produktivitas pertanian
	Perluasan infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil untuk pemerataan akses teknologi
	Implementasi sistem smart farming dan smart city
	Pengembangan marketplace terintegrasi untuk produk pertanian dan UMKM lokal
	Transformasi desa menjadi desa digital terintegrasi sistem nasional
	Pengembangan artificial intelligence untuk optimalisasi produksi pertanian dan pembentukan kawasan teknologi tinggi
	Penguatan kapasitas SDM pendamping di kecamatan/ desa
	Integrasi dan ekspansi literasi keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, industri kreatif)
	Penguatan akses pelaku ekonomi terhadap KUR, pinjaman modal usaha dan asuransi usaha
	Penilaian tingkat literasi keuangan secara berkala
	Peningkatan kompetensi dan kapasitas perempuan
	Promosi dan pembukaan kesempatan yang setara bagi perempuan pada jabatan strategis
	Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan
	Perlindungan hak-hak pekerja perempuan
	Pelestarian cagar budaya

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Penyediaan sarana-prasarana wisata
	Inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial,
	Pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan
	Pengembangan sistem peringatan dini lokal (Early Warning System - EWS)
	Sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan masyarakat
	Pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana
	Pembentukan tim siaga bencana di tiap desa
	Pembangunan IPAL komunal/desentralisasi di permukiman padat
	Perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah
	Peningkatan akses sanitasi layak di desa/kelurahan
	Pemberdayaan bank sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga berbasis RW
	Penanganan abrasi pantai
	Penanganan pencemaran laut dan pesisir
	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai
	Perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar
	Pencegahan dan penaganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit
	Pemeliharaan cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui pencegahan deforestasi
	Pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultu
	Pengembangan pertanian polikultur tanaman pangan dan hortikultura
	Penataan vegetasi dan kualitas lahan gambut
	Pengembangan ekonomi sirkuler berbasis pertanian terpadu

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat asap pabrik
	Pengendalian bau busuk akibat limbah buah dan tandan sawit
	Penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah perkebunan sawit
	Pengembangan integrasi peternakan dengan kelapa sawit
	Pemeliharaan keberadaan berbagai jenis ikan dalam sungai dan laut
	Peningkatan infrastruktur pertanian
	Peningkatan Infrastruktur Transportasi
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan agropolitan
	Peningkatan Kapasitas Petani
	Pengembangan Kelembagaan Petani
	Fasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pengolahan hasil pertanian dan jasa pendukung
	Pengembangan Agrowisata
	Akselerasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan
	Pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, serta penerangan jalan
	Pelembagaan sistem pengelolaan air bersih oleh BUMDes atau UPT daerah
	Revitalisasi saluran banjir dan konservasi daerah tangkapan air
	Optimalisasi Program padat karya pemeliharaan jalan dan PJU oleh masyarakat
Kecamatan Karossa	Pemberian beasiswa untuk peningkatan akses Pendidikan PAUD, SD, SMP
	Pemberian perlengkapan sekolah

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Penuntasan anak tidak bersekolah
	Peningkatan kualitas tenaga pendidik
	Peningkatan kualitas pembelajaran dengan metode Kreatif, Inovatif, Produktif (KIP) learning
	Optimalisasi Pemenuhan SPM Kesehatan
	Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis
	Pengembangan dan Peningkatan daya saing SDM melalui program kepemudaan, kebudayaan dan olahraga
	Peningkatan kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasi-an data kemiskinan
	Pemberian bantuan sosial bagi petani, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
	Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem
	Pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan untuk mendorong produktivitas orang miskin dengan prioritas pada wilayah pesisir
	Penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, dan pengembangan tabungan
	Pelatihan kewirausahaan dalam mengmbangkan industri rumah tangga sesuai potensi lokal serta pertanian tanaman pangan/hortikultura
	Pemantapan pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi dan manajemen usaha
	Peningkatan akses pemasaran dan jejaring dengan koperasi desa, BUMDes, perusahaan sawit, lembaga keuangan, BUMD dan entitas lainnya
	Pengembangan inovasi lokal
	Pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi
	Pemberdayaan petani melalui transfer teknologi

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Perluasan fasilitas pascapanen
	Penguatan rantai nilai produk pertanian
	Pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan UMKM
	Fasilitasi sertifikasi produk untuk perluasan akses pasar dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata
	Pengembangan jaringan transportasi komoditas
	Pembangunan pasar-pasar induk agribisnis
	Penguatan kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
	Pengembangan sistem logistik pertanian terintegrasi untuk efisiensi distribusi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
	Pengembangan platform pemasaran produk pertanian
	Implementasi sistem informasi harga dan pasokan pertanian real-time
	Penguatan ekonomi sirkular berbasis pertanian
	Penerapan standar keberlanjutan dalam praktik pertanian dan pengolahan
	Optimalisasi manajemen sumber daya alam untuk keberlanjutan produktivitas
	Pengembangan pusat-pusat keunggulan agropolitan yang berdaya saing tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim
	Pengembangan industri berbasis potensi lokal
	Peningkatan kapasitas SDM industri
	Fasilitasi akses pembiayaan dan pasar
	fasilitasi mesin dan peralatan industri
	Hilirisasi dan diversidikasi produk
	Promosi dan ekspansi ke pasar luar daerah
	Penerapan teknologi industri 4.0 (skala lokal)
	Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pengembangan akses internet di daerah tertinggal
	Pelatihan digital bagi UMKM dan petani
	Akselerasi implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian, UMKM, dan pelayanan publik
	Pengembangan pusat inovasi digital
	Implementasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan pertanian
	Penerapan big data untuk analisis produktivitas pertanian
	Perluasan infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil untuk pemerataan akses teknologi
	Implementasi sistem smart farming dan smart city
	Pengembangan marketplace terintegrasi untuk produk pertanian dan UMKM lokal
	Transformasi desa menjadi desa digital terintegrasi sistem nasional
	Pengembangan artificial intelligence untuk optimalisasi produksi pertanian dan pembentukan kawasan teknologi tinggi
	Penguatan kapasitas SDM pendamping di kecamatan/ desa
	Integrasi dan ekspansi literasi keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, industri kreatif)
	Penguatan akses pelaku ekonomi terhadap KUR, pinjaman modal usaha dan asuransi usaha
	Penilaian tingkat literasi keuangan secara berkala
	Peningkatan kompetensi dan kapasitas perempuan
	Promosi dan pembukaan kesempatan yang setara bagi perempuan pada jabatan strategis
	Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan
	Perlindungan hak-hak pekerja perempuan

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pelestarian cagar budaya
	Penyediaan sarana-prasarana wisata
	Inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial,
	Pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan
	Pengembangan sistem peringatan dini lokal (Early Warning System - EWS)
	Sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan masyarakat
	Pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana
	Pembentukan tim siaga bencana di tiap desa
	Pembangunan IPAL komunal/desentralisasi di permukiman padat
	Perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah
	Peningkatan akses sanitasi layak di desa/kelurahan
	Pemberdayaan bank sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga berbasis RW
	Penanganan abrasi pantai
	Penanganan Pencemaran Laut dan pesisir
	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai
	Perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar
	Pencegahan dan penaganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit
	Pemeliharaan cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui pencegahan deforestasi
	Pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultu
	Pengembangan pertanian polikultur tanaman pangan dan hortikultura
	Penataan vegetasi dan kualitas lahan gambut

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pengembangan ekonomi sirkuler berbasis pertanian terpadu
	Pencegahan dan pengendalian pencemaran akibat asap pabrik
	Pengendalian bau busuk akibat limbah buah dan tandan sawit
	Penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah perkebunan sawit
	Pengembangan integrasi peternakan dengan kelapa sawit
	Pemeliharaan keberadaan berbagai jenis ikan dalam sungai dan laut
	Peningkatan infrastruktur pertanian
	Peningkatan Infrastruktur Transportasi
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan agropolitan
	Peningkatan Kapasitas Petani
	Pengembangan Kelembagaan Petani
	Fasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pengolahan hasil pertanian dan jasa pendukung
	Pengembangan Agrowisata
	Pembangunan gerbang batas kabupaten
	Akselerasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan
	Pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, serta penerangan jalan
	Pelembagaan sistem pengelolaan air bersih oleh BUMDes atau UPT daerah
	Revitalisasi saluran banjir dan konservasi daerah tangkapan air
	Optimalisasi Program padat karya pemeliharaan jalan dan PJU oleh masyarakat

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
Kecamatan Pangale	Pemberian beasiswa untuk peningkatan akses Pendidikan PAUD, SD, SMP
	Pemberian perlengkapan sekolah
	Penuntasan anak tidak bersekolah
	Peningkatan kualitas tenaga pendidik
	Peningkatan kualitas pembelajaran dengan metode Kreatif, Inovatif, Produktif (KIP) learning
	Optimalisasi Pemenuhan SPM Kesehatan
	Peningkatan akses pelayanan dan kualitas kesehatan Masyarakat melalui pemberian jaminan kesehatan gratis
	Pengembangan dan Peningkatan daya saing SDM melalui program kepemudaan, kebudayaan dan olahraga
	Peningkatan kemitraan multipihak dalam pemutakhiran dan pengintegrasi-an data kemiskinan
	Pemberian bantuan sosial bagi petani, penyandang disabilitas, masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya
	Pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin ekstrem
	Pelatihan keterampilan, fasilitas usaha, serta pendampingan untuk mendorong produktivitas orang miskin dengan prioritas pada wilayah pesisir
	Penciptaan pendapatan dan pengembangan aset dalam mencapai ketahanan ekonomi keluarga miskin melalui penciptaan pendapatan baru, penguatan aset produktif, dan pengembangan tabungan
	Pelatihan kewirausahaan dalam mengmbangkan industri rumah tangga sesuai potensi lokal serta pertanian tanaman pangan/hortikultura
	Pemantapan pendampingan untuk adopsi teknologi dalam proses produksi dan manajemen usaha
	Peningkatan akses pemasaran dan jejaring dengan koperasi desa, BUMDes, perusahaan sawit, lembaga keuangan, BUMD dan entitas lainnya

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pengembangan inovasi lokal
	Optimalisasi sentra produksi pertanian
	Pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi
	Pemberdayaan petani melalui transfer teknologi
	Perluasan fasilitas pascapanen
	Penguatan rantai nilai produk pertanian
	Pengembangan agroindustri skala rumah tangga dan UMKM
	Fasilitasi sertifikasi produk untuk perluasan akses pasar dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata
	Pengembangan jaringan transportasi komoditas
	Pembangunan pasar-pasar induk agribisnis
	Penguatan kemitraan antara petani dengan industri pengolahan
	Pengembangan sistem logistik pertanian terintegrasi untuk efisiensi distribusi dan pemerataan pertumbuhan ekonomi
	Pengembangan platform pemasaran produk pertanian
	Implementasi sistem informasi harga dan pasokan pertanian real-time
	Penguatan ekonomi sirkular berbasis pertanian
	Penerapan standar keberlanjutan dalam praktik pertanian dan pengolahan
	Optimalisasi manajemen sumber daya alam untuk keberlanjutan produktivitas
	Pengembangan pusat-pusat keunggulan agropolitan yang berdaya saing tinggi dan adaptif terhadap perubahan iklim
	Pengembangan industri berbasis potensi lokal
	Peningkatan kapasitas SDM industri
	Fasilitasi akses pembiayaan dan pasar
	fasilitasi mesin dan peralatan industri

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Hilirisasi dan diversidikasi produk
	Promosi dan ekspansi ke pasar luar daerah
	Penerapan teknologi industri 4.0 (skala lokal)
	Pembangunan infrastruktur digital dasar dan peningkatan literasi digital
	Pengembangan akses internet di daerah tertinggal
	Pelatihan digital bagi UMKM dan petani
	Akselerasi implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian, UMKM, dan pelayanan publik
	Pengembangan pusat inovasi digital
	Implementasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan pertanian
	Penerapan big data untuk analisis produktivitas pertanian
	Perluasan infrastruktur digital ke daerah-daerah terpencil untuk pemerataan akses teknologi
	Implementasi sistem smart farming dan smart city
	Pengembangan marketplace terintegrasi untuk produk pertanian dan UMKM lokal
	Transformasi desa menjadi desa digital terintegrasi sistem nasional
	Pengembangan artificial intelligence untuk optimalisasi produksi pertanian dan pembentukan kawasan teknologi tinggi
	Penguatan kapasitas SDM pendamping di kecamatan/ desa
	Integrasi dan ekspansi literasi keuangan dalam program pemberdayaan ekonomi lokal (pertanian, perikanan, industri kreatif)
	Penguatan akses pelaku ekonomi terhadap KUR, pinjaman modal usaha dan asuransi usaha
	Penilaian tingkat literasi keuangan secara berkala
	Peningkatan kompetensi dan kapasitas perempuan

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Promosi dan pembukaan kesempatan yang setara bagi perempuan pada jabatan strategis
	Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan pelecehan
	Perlindungan hak-hak pekerja perempuan
	Pelestarian cagar budaya
	Penyediaan sarana-prasarana wisata
	Inventarisasi dan pemetaan daerah rawan bencana berbasis geospasial,
	Pelatihan dasar mitigasi bencana bagi aparat desa dan relawan
	Pengembangan sistem peringatan dini lokal (Early Warning System - EWS)
	Sosialisasi dan simulasi bencana di sekolah dan masyarakat
	Pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana
	Pembentukan tim siaga bencana di tiap desa
	Pembangunan IPAL komunal/desentralisasi di permukiman padat
	Perluasan layanan pengangkutan sampah berbasis wilayah
	Peningkatan akses sanitasi layak di desa/kelurahan
	Pemberdayaan bank sampah dan pengelolaan limbah rumah tangga berbasis RW
	Penanganan abrasi pantai
	Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya air melalui penecegahan dan penanganan pencemaran sungai
	Perlindungan sumur dan air tanah dari zat pencemar
	Pencegahan dan penaganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit
	Pemeliharaan cakupan dan kualitas tutupan lahan melalui pencegahan deforestasi

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultu
	Pengembangan pertanian polikultur tanaman pangan dan hortikultura
	Penataan vegetasi dan kualitas lahan gambut
	Pengembangan ekonomi sirkuler berbasis pertanian terpadu
	Pengendalian bau busuk akibat limbah buah dan tandan sawit
	Penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah perkebunan sawit
	Pengembangan integrasi peternakan dengan kelapa sawit
	Pemeliharaan keberadaan berbagai jenis ikan dalam sungai dan laut
	Peningkatan infrastruktur pertanian
	Peningkatan Infrastruktur Transportasi
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kawasan agropolitan
	Peningkatan Kapasitas Petani
	Pengembangan Kelembagaan Petani
	Fasilitasi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pengolahan hasil pertanian dan jasa pendukung
	Pengembangan Agrowisata
	Pembangunan gerbang batas kabupaten
	Akselerasi kesesuain pembangunan dengan dokumen Rencana Detai Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) dan Masterplan Jalan
	Pembangunan jembatan, irigasi, air bersih dan penahan banjir, serta penerangan jalan
	Pelembagaan sistem pengelolaan air bersih oleh BUMDes atau UPT daerah

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Revitalisasi saluran banjir dan konservasi daerah tangkapan air
	Optimalisasi Program padat karya pemeliharaan jalan dan PJU oleh masyarakat
Kawasan Pertanian	Optimalisasi sentra produksi pertanian
	Pengembangan infrastruktur pertanian terintegrasi
	Penguatan rantai nilai produk pertanian
	Pengembangan sistem logistik pertanian
	Pengembangan platform pemasaran produk pertanian
	Akselerasi implementasi teknologi digital dalam sektor pertanian
	Implementasi Internet of Things (IoT) dalam pengelolaan pertanian
	Penerapan big data untuk analisis produktivitas pertanian
	Pengembangan artificial intelligence untuk optimalisasi produksi pertanian
	Pengendalian konversi lahan pertanian polikultur menjadi monokultu
	Pengembangan pertanian polikultur tanaman pangan dan hortikultura
	Peningkatan infrastruktur pertanian
	Pembentukan koperasi pemasaran untuk komoditas pangan
	Pengembangan sistem rantai dingin untuk produk hortikultura dan perikanan
Kawasan Perkebunan	Pencegahan dan penaganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit
	Penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang sampah dan limbah perkebunan sawit
	Penguatan dasar industri daerah yang fokus pada penyusunan kebijakan dan regulasi pendukung industri dan pemetaan potensi industri unggulan daerah dengan kegiatan utama kajian potensi dan klaster industri perkebunan

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Penerapan teknologi dan inovasi untuk daur ulang limbah perkebunan sawit
	Pencegahan dan penanganan pencemaran air di lokasi perkebunan sawit
	Penguatan dan hilirisasi pengolahan kakao dan kopi
	Peningkatan produktivitas dan kualitas budidaya melalui program peremajaan tanaman kakao dan kopi dengan bibit unggul tahan penyakit
	Peningkatan infrastruktur pendukung kawasan komoditas unggulan melalui Pembangunan jalan produksi, irigasi pasca panen, gudang dan cold storage
	Sinkronisasi dengan kawasan transmigrasi Tobadak sebagai simpul produksi logistik
	Penguatan kelembagaan ekonomi petani dan inklusi pembiayaan
Kawasan Perikanan	Penguatan dasar industri daerah melalui kajian potensi dan klaster industri perikanan
	Pengembangan pusat distribusi perikanan terpadu
	Pembentukan koperasi pemasaran untuk komoditas perikanan
	Pengembangan sistem rantai dingin untuk perikanan
Kawasan Pariwisata	fasilitasi sertifikasi produk untuk perluasan akses pasar dan pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata
	Penyediaan sarana-prasarana wisata pada tempat-tempat bersejarah dan tempat-tempat lain yang mempunyai daya tarik wisata
	Penyelenggaraan festival kesenian antar berwakilan etnis
	Penguatan branding daerah melalui sektor unggulan seperti pariwisata
Kawasan Pesisir	Pemberdayaan Komunitas Lokal
	Pengembangan industri rumah tangga sesuai potensi lokal
	Penanganan Pencemaran Laut dan Pesisir

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Penanganan Abrasi Pantai
Kawasan Rawan Bencana	Optimalisasi integrasi manajemen rantai pasok pangan
	Pemetaan risiko berbasis Kajian Risiko Bencana Daerah
	Pengembangan model kota/kecamatan tangguh bencana
	Evaluasi dan uji coba sistem peringatan dini berbasis komunitas, penguatan kemitraan dengan dunia usaha (CSR untuk kebencanaan)
	Pengembangan aplikasi mobile sistem informasi dan pelaporan kebencanaan
	Pembentukan tim siaga bencana di tiap desa/kelurahan
	Pengembangan Teknologi inovatif untuk mitigasi bencana
	Penanganan abrasi pantai
	Integrasi sistem informasi kebencanaan (SIK) berbasis data real-time
	Pembangunan sarana prasarana mitigasi (tanggul, sabuk hijau, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara/akhir)
Kawasan Transmigrasi	Membangun dan meningkatkan aksesibilitas jalan penghubung, jembatan, irigasi, air bersih dan sanitasi, listrik dan komunikasi
	Infrastruktur pemasaran dan logistik: akses ke pasar, cold-chain, fasilitas pengolahan hasil.
	Memastikan infrastruktur mendukung produktivitas ekonomi kawasan dan terintegrasi ke jaringan regional
	Identifikasi komoditas unggulan (pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri) yang sesuai dengan kondisi kawasan transmigrasi Tobadak
	Dorong hilirisasi hasil, pengembangan UMKM, koperasi, pelaku usaha lokal
	Integrasi kawasan transmigrasi sebagai “penyangga” sentra produksi pangan nasional atau sebagai pusat ekonomi baru
	Tarik investasi/kemitraan, baik swasta maupun BUMDes, agar kawasan tidak hanya bergantung pada subsidi.

Lokus Pembangunan Daerah	Prioritas Pembangunan Daerah
	Program peningkatan kapasitas transmigran & masyarakat lokal: pelatihan teknis, kewirausahaan, digitalisasi, literasi keuangan.
	Peningkatan kualitas layanan pendidikan, kesehatan di kawasan
	Memperkuat kelembagaan (koperasi, BUMDes, mitra swasta) dan sistem tata kelola lokal yang partisipatif.
	Penataan ruang kawasan transmigrasi agar memenuhi syarat ekologis, produktif, dan bening tata kelola lahan (legalitas tanah, kepastian hak).
	Pemanfaatan lahan secara efisien dan lestari – memperhatikan potensi kerusakan lingkungan.
	Memastikan legalitas tanah transmigrasi sebagai dasar investasi dan pengembangan kawasan.
	Kawasan transmigrasi bukan hanya sebagai pemindahan penduduk, tetapi menjadi pusat pertumbuhan baru yang produktif
	Kawasan Tobadak harus dihubungkan dengan jaringan regional — baik akses ke pasar, ke kota terdekat, maupun ke pusat produksi regional.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Program Perangkat Daerah adalah rencana kegiatan yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Program perangkat daerah terdiri atas Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah. Adapun uraian program perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target dan penganggung jawab masing-masing perangkat daerah sesuai dengan bidang urusannya tersaji pada Program Perangkat Daerah disertai Pagu Indikatif Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030.

Tabel 4. 1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					193.381.589.318,000		197.267.726.637,000		200.059.545.119,000		202.795.852.770,000		205.485.330.671,000	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					153.000.000.000,000		155.000.000.000,000		156.000.000.000,000		157.000.000.000,000		158.000.000.000,000	
Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	99,90	100	100	153.000.000.000,000	100	155.000.000.000,000	100	156.000.000.000,000	100	157.000.000.000,000	100	158.000.000.000,000	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					39.596.589.318,000		41.922.726.637,000		43.464.545.119,000		45.340.852.770,000		47.110.330.671,000	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (%)	98,54	99,14	99,69	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	100	0,000	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	42,7	50,91	57,40		63,89		70,38		71,14		71,91		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	53,02	55,52	58,02		60,52		63,02		65,52		68,02		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	48,17	51,07	53,97		56,87		59,77		62,67		65,57		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	91,08	93,63	96,18	39.596.589.318,000	98,73	41.922.726.637,000	100,00	43.464.545.119,000	100,00	45.340.852.770,000	100,00	47.110.330.671,000	1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) (Persentase)	98,54	99,14	99,69		100,00		100,00		100,00		100,00		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	42,7	50,91	57,40		63,89		70,38		71,14		71,91		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	53,02	55,52	58,02		60,52		63,02		65,52		68,02		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	66,96	68,06	69,16		70,26		71,36		72,46		73,56		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	48,17	51,07	53,97		56,87		59,77		62,67		65,57		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	59,45	60,95	62,45		63,95		65,45		66,95		68,45		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV (%)	37,22	39,04	40,04		41,04		42,04		43,04		44,04		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B (%)	23,62	43,66	74,26		100,00		100,00		100,00		100,00		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Inklusivitas SD (Nilai)	57,78	60,28	62,78		65,28		67,78		70,28		72,78		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Inklusivitas SMP (Nilai)	56,68	59,08	61,48		63,88		66,28		68,68		71,08		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SD (Nilai)	73,82	74,72	75,62		76,52		77,42		78,32		79,22		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Keamanan SMP (Nilai)	70,22	71,72	73,22		74,72		76,22		77,72		79,22		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Iklim Kebinekaan SMP (Nilai)	71,68	72,68	73,68		74,68		75,68		76,68		77,68		1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					470.000.000,000		50.000.000,000		330.000.000,000		210.000.000,000		0,000	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	0	470.000.000,000	0	50.000.000,000	0	330.000.000,000	0	210.000.000,000	0	0,000	1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					150.000.000,000		200.000.000,000		150.000.000,000		150.000.000,000		200.000.000,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Pemerataan Guru (Rasio)	0,38	0,93	1,04	150.000.000,000	1,12	200.000.000,000	1,37	150.000.000,000	1,54	150.000.000,000	1,81	200.000.000,000	1.01.2.22.0.00.02 .0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	62,08	69,51	78,00		78,90		79,00		80,77		81,35		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					70.000.000,000		0,000		20.000.000,000		0,000		80.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	0	0	0	70.000.000,000	0	0,000	0	20.000.000,000	0	0,000	0	80.000.000,000	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					95.000.000,000		95.000.000,000		95.000.000,000		95.000.000,000		95.000.000,000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	0	0	0	95.000.000,000	0	95.000.000,000	0	95.000.000,000	0	95.000.000,000	0	95.000.000,000	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					141.830.676.566,000		143.337.676.195,000		144.764.357.728,000		146.218.583.082,000		147.685.423.663,000	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					68.140.676.566,000		73.907.676.195,000		74.554.357.728,000		76.308.583.082,000		75.512.423.663,000	
Indikator Kinerja Terintegrasi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	85	100	100	27.189.976.987,000	100	29.155.559.666,000	100	29.548.993.163,000	100	31.150.022.371,000	100	30.154.530.459,000	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	85	100	100	40.950.699.579,000	100	44.752.116.529,000	100	45.005.364.565,000	100	45.158.560.711,000	100	45.357.893.204,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA					71.180.000.000,000		66.400.000.000,000		67.140.000.000,000		66.680.000.000,000		68.803.000.000,000	

KESEHATAN MASYARAKAT													
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	5	3	3	71.180.000.000,000	3	66.400.000.000,000	2	67.140.000.000,000	2	66.680.000.000,000	2	68.803.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	222,2	122	113		104		95		85		80		1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	31,5	26,5	25,5		24,5		23,5		22,5		21,5		1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.600.000.000,000		1.750.000.000,000		1.750.000.000,000		1.800.000.000,000		1.850.000.000,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	85	100	100	1.600.000.000,000	100	1.750.000.000,000	100	1.750.000.000,000	100	1.800.000.000,000	100	1.850.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					430.000.000,000		550.000.000,000		590.000.000,000		650.000.000,000		690.000.000,000	
meningkatnya kualitas dan distribusi sedianya farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	85	100	100	430.000.000,000	100	550.000.000,000	100	590.000.000,000	100	650.000.000,000	100	690.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					480.000.000,000		730.000.000,000		730.000.000,000		780.000.000,000		830.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	85	100	100	480.000.000,000	100	730.000.000,000	100	730.000.000,000	100	780.000.000,000	100	830.000.000,000	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					26.553.436.125,900		26.835.376.713,790		27.102.290.800,660		27.374.357.988,690		27.648.785.326,070	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.710.632.390,970		4.770.632.390,970		4.820.632.390,970		4.885.132.390,970		4.920.632.390,970	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	4.710.632.390,970	100	4.770.632.390,970	100	4.820.632.390,970	100	4.885.132.390,970	100	4.920.632.390,970	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					1.500.000.000,000		2.325.000.000,000		3.070.000.000,000		3.025.000.000,000		3.475.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	4,24	2,13	2,13	1.500.000.000,000	4,24	2.325.000.000,000	6,35	3.070.000.000,000	8,46	3.025.000.000,000	10,57	3.475.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	0	10	15		20		25		30		35		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					8.600.000.000,000		9.000.000.000,000		9.065.000.000,000		9.350.000.000,000		9.150.000.000,000	

Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	84	100	100	8.600.000.000,000	100	9.000.000.000,000	100	9.065.000.000,000	100	9.350.000.000,000	100	9.150.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL					0,000		0,000		50.000.000,000		150.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya layanan persampahan regional	Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST Regional (Persentase)	0	0	0	0,000	0	0,000	0	50.000.000,000	20	150.000.000,000	30	100.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.350.000.000,000		1.550.000.000,000		1.550.000.000,000		1.550.000.000,000		1.550.000.000,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengolahan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (Persentase)	77,22	100	100	1.350.000.000,000	100	1.550.000.000,000	100	1.550.000.000,000	100	1.550.000.000,000	100	1.550.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.300.000.000,000		1.600.000.000,000		1.600.000.000,000		1.600.000.000,000		1.600.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1,46	0	1,6	2.300.000.000,000	1,7	1.600.000.000,000	1,8	1.600.000.000,000	1,9	1.600.000.000,000	2,0	1.600.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					700.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		50.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	100	100	700.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	50.000.000,000	100	150.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					330.000.000,000		330.000.000,000		330.000.000,000		380.000.000,000		380.000.000,000	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	0	5	10	330.000.000,000	15	330.000.000,000	20	330.000.000,000	25	380.000.000,000	30	380.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	0	100	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					5.612.803.734,930		5.709.744.322,820		5.911.658.409,690		5.859.225.597,720		5.728.152.935,100	
meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	24,55	25,20	26,20	5.612.803.734,930	27,20	5.709.744.322,820	28,20	5.911.658.409,690	29,20	5.859.225.597,720	30,20	5.728.152.935,100	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					300.000.000,000		305.000.000,000		205.000.000,000		215.000.000,000		250.000.000,000	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi (Orang)	0	0	75	300.000.000,000	75	305.000.000,000	75	205.000.000,000	75	215.000.000,000	75	250.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					1.050.000.000,000		1.045.000.000,000		300.000.000,000		210.000.000,000		245.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR Kabupaten) (%)	100	100	100	1.050.000.000,000	100	1.045.000.000,000	100	300.000.000,000	100	210.000.000,000	100	245.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					6.197.700.000,000		6.295.331.313,000		6.387.759.199,000		6.481.971.518,000		6.577.001.117,000	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.093.400.000,000		3.191.031.313,000		3.283.459.199,000		3.377.671.518,000		3.472.701.117,000	
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	3.093.400.000,000	100	3.191.031.313,000	100	3.283.459.199,000	100	3.377.671.518,000	100	3.472.701.117,000	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					410.800.000,000		410.800.000,000		410.800.000,000		410.800.000,000		410.800.000,000	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Terpenuhinya rumah tidak layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akbibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100	100	100	410.800.000,000	100	410.800.000,000	100	410.800.000,000	100	410.800.000,000	100	410.800.000,000	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					982.500.000,000		982.500.000,000		982.500.000,000		982.500.000,000		982.500.000,000	

Meningkatnya kualiats kawasan pemukiman					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (Persentase)	87,04	90,05	91,00	982.500.000,000	91,95	982.500.000,000	92,90	982.500.000,000	93,85	982.500.000,000	94,80	982.500.000,000	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					1.215.000.000,000		1.215.000.000,000		1.215.000.000,000		1.215.000.000,000		1.215.000.000,000	
meningkatnya aksesibilitas Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani (%)	79	80	81	1.215.000.000,000	82	1.215.000.000,000	83	1.215.000.000,000	84	1.215.000.000,000	85	1.215.000.000,000	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					446.000.000,000		446.000.000,000		446.000.000,000		446.000.000,000		446.000.000,000	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Penyediaan PSU Kawasan Permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	100	100	100	446.000.000,000	100	446.000.000,000	100	446.000.000,000	100	446.000.000,000	100	446.000.000,000	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU (Persentase)	100	100	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.188.356.951,000		11.307.153.326,000		11.419.618.246,000		11.534.254.439,000		11.649.885.086,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.162.089.829,000		5.279.673.533,000		5.420.513.655,000		5.508.108.802,000		5.676.277.992,000	
Meningkatnya Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	2.468.036.642,000	100	2.554.468.920,000	100	2.668.426.511,000	100	2.728.232.757,000	100	2.868.427.691,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Terpenuhinya tata Kelola Kinerja dan Keuangan Pada Dinas Satpol-PP dan Damkar	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	100	100	100	2.694.053.187,000	100	2.725.204.613,000	100	2.752.087.144,000	100	2.779.876.045,000	100	2.807.850.301,000	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					2.665.067.122,000		2.691.717.793,000		2.718.634.971,000		2.745.821.321,000		2.773.279.535,000	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan Perkada	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	100	100	100	169.136.912,000	100	193.637.583,000	100	218.383.261,000	100	243.376.396,000	100	268.619.465,000	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Meningkatnya penanganan gangguan kententraman dan ketertiban umum	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	100	100	100	2.495.930.210,000	100	2.498.080.210,000	100	2.500.251.710,000	100	2.502.444.925,000	100	2.504.660.070,000	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					1.905.000.000,000		1.865.000.000,000		1.795.000.000,000		1.780.000.000,000		1.685.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	100	100	100	755.000.000,000	100	755.000.000,000	100	390.000.000,000	100	680.000.000,000	100	545.000.000,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya Penanganan Bencana Pada Saat Pasca Bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	100	100	100	185.000.000,000	100	145.000.000,000	100	140.000.000,000	100	135.000.000,000	100	175.000.000,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap Bencana darurat	Persentase penanganan tanggap bencana darurat (%)	100	100	100	965.000.000,000	100	965.000.000,000	100	1.265.000.000,000	100	965.000.000,000	100	965.000.000,000	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.456.200.000,000		1.470.762.000,000		1.485.469.620,000		1.500.324.316,000		1.515.327.559,000	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	100	100	100	185.000.000,000	100	186.850.000,000	100	193.718.500,000	100	199.605.685,000	100	205.630.919,000	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
meningkatnya pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	100	100	100	1.271.200.000,000	100	1.283.912.000,000	100	1.291.751.120,000	100	1.300.718.631,000	100	1.309.696.640,000	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.964.000.000,000		3.145.000.000,000		3.376.000.000,000		3.607.000.000,000		3.848.000.000,000	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.650.000.000,000		1.700.000.000,000		1.800.000.000,000		1.900.000.000,000		2.000.000.000,000	

Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Persentase Keterpenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	90	90	90	1.650.000.000,000	92	1.700.000.000,000	93	1.800.000.000,000	94	1.900.000.000,000	95	2.000.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					270.000.000,000		280.000.000,000		290.000.000,000		300.000.000,000		310.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan sosial					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	0,2	0,2	0,2	270.000.000,000	0,2	280.000.000,000	0,2	290.000.000,000	0,2	300.000.000,000	0,2	310.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					4.000.000,000		5.000.000,000		6.000.000,000		7.000.000,000		8.000.000,000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindik kekrasan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	0	0	4.000.000,000	0	5.000.000,000	0	6.000.000,000	0	7.000.000,000	0	8.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					200.000.000,000		250.000.000,000		300.000.000,000		350.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya Rehabilitas Sosial					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosia (%)	100	100	100	200.000.000,000	100	250.000.000,000	100	300.000.000,000	100	350.000.000,000	100	400.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

	dasarnya diluar panti (%)													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					200.000.000,000		250.000.000,000		300.000.000,000		350.000.000,000		400.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (Persentase)	100	60	70	200.000.000,000	80	250.000.000,000	90	300.000.000,000	100	350.000.000,000	100	400.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					540.000.000,000		550.000.000,000		560.000.000,000		570.000.000,000		580.000.000,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	540.000.000,000	100	550.000.000,000	100	560.000.000,000	100	570.000.000,000	100	580.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					100.000.000,000		110.000.000,000		120.000.000,000		130.000.000,000		150.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya tata kelola taman makam pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola (%)	15	15	15	100.000.000,000	15	110.000.000,000	15	120.000.000,000	15	130.000.000,000	15	150.000.000,000	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					2.765.588.736,000		2.047.216.716,000		2.055.263.942,000		2.075.129.746,000		2.291.400.406,000	

2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					80.000.000,000		35.000.000,000		50.000.000,000		104.000.000,000		54.000.000,000	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	80.000.000,000	100	35.000.000,000	100	50.000.000,000	100	104.000.000,000	100	54.000.000,000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					300.000.000,000		380.000.000,000		370.000.000,000		340.000.000,000		395.200.000,000	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja					150.000.000,000		190.000.000,000		185.000.000,000		170.000.000,000		197.600.000,000	
Meningkatnya Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	1,12	73	75	150.000.000,000	77	190.000.000,000	78	185.000.000,000	80	170.000.000,000	82	197.600.000,000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					77.000.000,000		92.000.000,000		101.000.000,000		107.000.000,000		114.000.000,000	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. (%)	36,27	40	42	77.000.000,000	44	92.000.000,000	46	101.000.000,000	48	107.000.000,000	50	114.000.000,000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					2.308.588.736,000		1.540.216.716,000		1.534.263.942,000		1.524.129.746,000		1.728.200.406,000	
Meningkatanya pekerja					1.154.294.368,000		770.108.358,000		767.131.971,000		762.064.873,000		864.100.203,000	
Meningkatnya Pekerja Mamuju Tengah yang Terlidungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	30	40	50	1.154.294.368,000	60	770.108.358,000	70	767.131.971,000	80	762.064.873,000	90	864.100.203,000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					3.892.920.654,000		3.899.566.546,000		3.932.793.675,000		3.959.693.215,000		3.992.129.725,000	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.019.696.216,000		3.017.567.836,000		3.035.794.965,000		3.047.694.505,000		3.065.131.015,000	
Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	3.019.696.216,000	100	3.017.567.836,000	100	3.035.794.965,000	100	3.047.694.505,000	100	3.065.131.015,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					100.000.000,000		100.000.000,000		110.000.000,000		120.000.000,000		130.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	1,99	2	2,5	100.000.000,000	2,7	100.000.000,000	2,9	110.000.000,000	3	120.000.000,000	3,2	130.000.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					235.285.291,000		240.285.291,000		245.285.291,000		250.285.291,000		255.285.291,000	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	235.285.291,000	100	240.285.291,000	100	245.285.291,000	100	250.285.291,000	100	255.285.291,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000		60.000.000,000	
Meningkatnya kualiatas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan permpuan dan anak	Cakupan Penyelesaiaan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan anak dari Tindak Kekerasan (%)	100	100	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	100	60.000.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					74.360.000,000		74.360.000,000		74.360.000,000		74.360.000,000		74.360.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan (Persentase)	0	0	100	74.360.000,000	100	74.360.000,000	100	74.360.000,000	100	74.360.000,000	100	74.360.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					91.600.000,000		91.600.000,000		91.600.000,000		91.600.000,000		91.600.000,000	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase Desa Ramah Anak (%)	22,22	35,19	35,19	91.600.000,000	40,74	91.600.000,000	46,30	91.600.000,000	57,31	91.600.000,000	70,37	91.600.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					311.979.147,000		315.753.419,000		315.753.419,000		315.753.419,000		315.753.419,000	

Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	0	0	100	311.979.147,000	100	315.753.419,000	100	315.753.419,000	100	315.753.419,000	100	315.753.419,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					222.100.000,000		230.100.000,000		237.100.000,000		244.400.000,000		253.100.000,000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	15	15	32	0,000	49	0,000	66	0,000	83	0,000	100	0,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					161.400.000,000		167.400.000,000		173.400.000,000		178.400.000,000		183.400.000,000	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	86,2	84	84,5	161.400.000,000	85	167.400.000,000	85,5	173.400.000,000	86	178.400.000,000	86,5	183.400.000,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					53.700.000,000		53.700.000,000		53.700.000,000		53.700.000,000		53.700.000,000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	10,71	8,93	7,14	53.700.000,000	5,63	53.700.000,000	3,57	53.700.000,000	1,79	53.700.000,000	1,79	53.700.000,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					7.000.000,000		9.000.000,000		10.000.000,000		12.300.000,000		16.000.000,000	

Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	33,33	40	42,85	7.000.000,000	44	9.000.000,000	46	10.000.000,000	48	12.300.000,000	50	16.000.000,000	2.09.3.27.0.00.01 .0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.758.111.016,000		1.758.111.016,000		1.758.111.016,000		1.758.111.016,000		1.758.111.016,000	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					83.111.016,000		83.111.016,000		83.111.016,000		83.111.016,000		83.111.016,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi (%)	100	100	100	83.111.016,000	100	83.111.016,000	100	83.111.016,000	100	83.111.016,000	100	83.111.016,000	1.04.2.10.0.00.02 .0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.575.000.000,000		1.575.000.000,000		1.575.000.000,000		1.575.000.000,000		1.575.000.000,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	100	100	1.575.000.000,000	100	1.575.000.000,000	100	1.575.000.000,000	100	1.575.000.000,000	100	1.575.000.000,000	1.04.2.10.0.00.02 .0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	

Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diretribusikan yang Berasal Dari Tanah Maksimum dan tanah Absente (Angka)	100	100	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	100	100.000.000,000	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					4.910.221.348,000		4.962.357.376,000		5.011.714.727,000		5.062.024.981,000		5.112.771.670,000	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.530.221.348,000		1.582.357.376,000		1.631.714.727,000		1.682.024.981,000		1.732.771.670,000	
Meningkatnya Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	85	88	90	1.530.221.348,000	92	1.582.357.376,000	94	1.631.714.727,000	96	1.682.024.981,000	98	1.732.771.670,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN					550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000		550.000.000,000	

LINGKUNGAN HIDUP														
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Tersusunnya Dokumen RPPLH Kabupaten	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersedia (%)	0	0	1	550.000.000,000	1	550.000.000,000	1	550.000.000,000	1	550.000.000,000	1	550.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan wilayah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (%)	50	52	54	300.000.000,000	56	300.000.000,000	58	300.000.000,000	60	300.000.000,000	62	300.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Terkelolanya Keanekaragaman Hayati dengan Baik	persentase keanekaragan hayati yang dikelola (%)	20	20	20	300.000.000,000	20	300.000.000,000	20	300.000.000,000	20	300.000.000,000	20	300.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					55.000.000,000		55.000.000,000		55.000.000,000		55.000.000,000		55.000.000,000	

Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah baha berbahaya dab beracun (limbah B3)					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Terkelolanya Limbah B3 dengan Baik	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	10	12	14	55.000.000,000	16	55.000.000,000	18	55.000.000,000	20	55.000.000,000	22	55.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000		100.000.000,000	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbtkan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Terawasinya Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota , lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang tertangani (%)	85	87	90	100.000.000,000	93	100.000.000,000	96	100.000.000,000	99	100.000.000,000	100	100.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya DIKLAT dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup (Orang)	0	0	25	25.000.000,000	25	25.000.000,000	25	25.000.000,000	25	25.000.000,000	25	25.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Tersedianya Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat (Jenis)	2	0	4	25.000.000,000	4	25.000.000,000	4	25.000.000,000	4	25.000.000,000	4	25.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01 .0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000		25.000.000,000	
Meningkatnya Penyelesaian sengkata/ kasus tindakan pidana lingkungan hidup					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

Tertanganinya Aduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	0	0	2	25.000.000,000	2	25.000.000,000	2	25.000.000,000	2	25.000.000,000	2	25.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000		2.000.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola persampahan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Terkelolanya Sampah dengan Baik	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	0	0	25	2.000.000.000,000	27	2.000.000.000,000	29	2.000.000.000,000	31	2.000.000.000,000	33	2.000.000.000,000	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					2.855.950.271,000		2.886.274.343,000		2.914.982.242,000		2.944.244.382,000		2.973.760.367,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.959.350.271,000		1.944.674.343,000		1.943.382.242,000		1.972.644.382,000		2.002.160.367,000	
Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang mendukung Kesinambungan Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pengangaran yang Mendukung Kesinambungan Pembangunan (%)	100	100	100	1.959.350.271,000	100	1.944.674.343,000	100	1.943.382.242,000	100	1.972.644.382,000	100	2.002.160.367,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					305.600.000,000		320.600.000,000		335.600.000,000		340.600.000,000		340.600.000,000	
Meningkatnya kualiats layanan pendaftaran penduduk					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftara Penduduk yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100	305.600.000,000	100	320.600.000,000	100	335.600.000,000	100	340.600.000,000	100	340.600.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					292.400.000,000		317.400.000,000		332.400.000,000		327.400.000,000		327.400.000,000	

Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100	292.400.000,000	100	317.400.000,000	100	332.400.000,000	100	327.400.000,000	100	327.400.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					235.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000		240.000.000,000	
Meningkatnya pemenfaatan informasi kepndudukan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Jumlah OPDyang Memanfaatkan Data Kependudukan (Angka)	28	32	33	235.000.000,000	34	240.000.000,000	34	240.000.000,000	34	240.000.000,000	34	240.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					63.600.000,000		63.600.000,000		63.600.000,000		63.600.000,000		63.600.000,000	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Tersedianya Profil Kependudukan	Jumlah Profil Kependudukan yang Disusun (Angka)	2	2	2	63.600.000,000	2	63.600.000,000	2	63.600.000,000	2	63.600.000,000	2	63.600.000,000	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.897.072.169,737		4.936.519.042,449		4.997.108.692,077		5.031.785.247,024		5.080.003.508,194	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.281.912.035,737		3.316.758.908,449		3.349.748.558,077		3.383.375.113,024		3.417.293.374,194	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Yang sesuai dengan penganggaran (%)	100	100	100	3.281.912.035,737	100	3.316.758.908,449	100	3.349.748.558,077	100	3.383.375.113,024	100	3.417.293.374,194	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					9.000.000,000		9.000.000,000		9.000.000,000		10.000.000,000		8.000.000,000	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	9.000.000,000	100	9.000.000,000	100	9.000.000,000	100	10.000.000,000	100	8.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					5.000.000,000		5.000.000,000		6.000.000,000		9.500.000,000		9.000.000,000	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	0	14,81	18,52	5.000.000,000	22,22	5.000.000,000	25,93	6.000.000,000	29,63	9.500.000,000	33,33	9.000.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.413.160.134,000		1.414.010.134,000		1.436.360.134,000		1.423.410.134,000		1.429.210.134,000	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	1.413.160.134,000	100	1.414.010.134,000	100	1.436.360.134,000	100	1.423.410.134,000	100	1.429.210.134,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					188.000.000,000		191.750.000,000		196.000.000,000		205.500.000,000		216.500.000,000	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan lembaga adat dan hukum adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	188.000.000,000	100	191.750.000,000	100	196.000.000,000	100	205.500.000,000	100	216.500.000,000	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					2.484.000.000,000		2.541.500.000,000		2.569.000.000,000		2.604.000.000,000		2.634.000.000,000	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					214.800.000,000		214.800.000,000		214.800.000,000		214.800.000,000		214.800.000,000	

Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,9	1,9	1,9	214.800.000,000	1,8	214.800.000,000	1,8	214.800.000,000	1,8	214.800.000,000	1,8	214.800.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	39.1-39.1	39-39.1	38.9-39		38.9-38.9		38.8-38.9		38.5-38.8		38.5-38.5		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	61,9	61,91	66,4		72,9		79,4		80		82		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					1.661.200.000,000		1.718.700.000,000		1.746.200.000,000		1.781.200.000,000		1.811.200.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	19	20	20	1.661.200.000,000	21	1.718.700.000,000	21	1.746.200.000,000	22	1.781.200.000,000	22	1.811.200.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	65,16	75,20	75,30		75,40		75,50		75,75		75,75		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	8,5	8,3	8,3		8,3		8,1		8,1		8		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri (Persentase)	-	94,4	95,2		95,5		95,7		95,8		95,9		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					608.000.000,000		608.000.000,000		608.000.000,000		608.000.000,000		608.000.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera (KS)	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	78,10	90	90	608.000.000,000	90	608.000.000,000	90	608.000.000,000	90	608.000.000,000	90	608.000.000,000	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	-	88	88,1		88,2		88,3		88,4		88,5		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	-	68	68,1		68,2		68,3		68,4		68,5		2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					2.878.674.634,000		3.221.909.984,000		4.058.991.581,000		4.536.144.581,000		3.664.895.511,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.957.687.678,000		2.150.923.028,000		2.988.004.625,000		2.965.157.625,000		2.743.908.555,000	
Meningkatnya Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.957.687.678,000	100	2.150.923.028,000	100	2.988.004.625,000	100	2.965.157.625,000	100	2.743.908.555,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					920.986.956,000		920.986.956,000		920.986.956,000		920.986.956,000		920.986.956,000	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Konektivitas Angkutan darat serta kualitas infrastruktur dan sarana prasarana penunjang jalan	Persentase Sarana Prasarana Jalan yang Terpenuhi (%)	13	14	14	920.986.956,000	15	920.986.956,000	15	920.986.956,000	16	920.986.956,000	17	920.986.956,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					0,000		150.000.000,000		150.000.000,000		650.000.000,000		0,000	
Meningkatnya kualitas layanan teransportasi laut					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Konektivitas Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Rasio Konektivitas Angkutan Sungai dan Penyebrangan Kabupaten Kabupaten/Kota (Rasio)	20,1	0	0	0,000	22	150.000.000,000	23	150.000.000,000	25	650.000.000,000	0	0,000	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

2.15.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pengendalian kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP)					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pengelolaan perlintasan kereta api					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					3.163.402.854,350		3.197.683.520,630		3.230.103.871,550		3.263.038.764,280		3.267.098.764,280	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.648.402.854,350		1.650.183.520,630		1.669.993.871,550		1.690.201.764,280		1.690.201.764,280	
Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Akuntabilitas Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.648.402.854,350	100	1.650.183.520,630	100	1.669.993.871,550	100	1.690.201.764,280	100	1.690.201.764,280	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					335.000.000,000		356.800.000,000		358.610.000,000		360.430.000,000		362.280.000,000	
Meniingkatnya jangkauan dan kualiats komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	60	68	70	335.000.000,000	73	356.800.000,000	76	358.610.000,000	80	360.430.000,000	85	362.280.000,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.180.000.000,000		1.190.700.000,000		1.201.500.000,000		1.212.407.000,000		1.214.617.000,000	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*

Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Nilai)	2,28	2,28	1,5	1.180.000.000,000	1,81	1.190.700.000,000	2,10	1.201.500.000,000	2,60	1.212.407.000,000	2,70	1.214.617.000,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					2.729.746.420,000		2.751.791.420,000		2.763.790.512,000		2.774.746.420,000		2.794.746.420,000	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.534.746.420,000		2.539.791.420,000		2.539.790.512,000		2.539.746.420,000		2.539.746.420,000	
Meningkatnya Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	2.534.746.420,000	100	2.539.791.420,000	100	2.539.790.512,000	100	2.539.746.420,000	100	2.539.746.420,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					25.000.000,000		25.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000		40.000.000,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	66,95	67	68	25.000.000,000	69	25.000.000,000	70	35.000.000,000	71	35.000.000,000	72	40.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					20.000.000,000		27.000.000,000		29.000.000,000		35.000.000,000		35.000.000,000	

Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan (%)	79	133	133	20.000.000,000	133	27.000.000,000	134	29.000.000,000	135	35.000.000,000	136	35.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten (%)	79	133	133	50.000.000,000	133	50.000.000,000	134	50.000.000,000	135	50.000.000,000	136	50.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					75.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		85.000.000,000		90.000.000,000	
Meningkatnya Kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro (%)	9	9	10	75.000.000,000	10,5	80.000.000,000	11	80.000.000,000	11,5	85.000.000,000	12	90.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					25.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		30.000.000,000		40.000.000,000	
Meningkatnya daya saing UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM (Persentase)	2,15	2,15	2,16	25.000.000,000	2,17	30.000.000,000	2,18	30.000.000,000	2,19	30.000.000,000	3,00	40.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					1.877.281.277,000		1.897.213.981,000		1.916.084.338,000		1.935.319.010,000		1.954.720.540,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.719.797.247,000		1.737.329.951,000		1.753.400.308,000		1.758.934.980,000		1.781.636.510,000	
Terpenuhinya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan pada Dinas PM-PTSP	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.719.797.247,000	100	1.737.329.951,000	100	1.753.400.308,000	100	1.758.934.980,000	100	1.781.636.510,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					4.000.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000		4.000.000,000	
Meningkatnya Kemudahan berinvestasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	5	6	6,5	4.000.000,000	6,7	4.000.000,000	6,8	4.000.000,000	6,9	4.000.000,000	7	4.000.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					3.500.000,000		4.500.000,000		5.500.000,000		6.500.000,000		7.500.000,000	
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	persentase pelaksanaan promosi penanaman modal (%)	100	100	100	3.500.000,000	100	4.500.000,000	100	5.500.000,000	100	6.500.000,000	100	7.500.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					99.800.000,000		100.900.000,000		102.000.000,000		114.100.000,000		115.200.000,000	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan (Hari)	5	5	6	99.800.000,000	7	100.900.000,000	7	102.000.000,000	7	114.100.000,000	7	115.200.000,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					50.184.030,000		50.484.030,000		51.184.030,000		51.784.030,000		46.384.030,000	

Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal (%)	100	100	100	50.184.030,000	100	50.484.030,000	100	51.184.030,000	100	51.784.030,000	100	46.384.030,000	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	5,00	5,30	5,70		6,00		6,30		6,50		6,70		2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					3.700.000.000,000		3.700.000.000,000		3.995.000.000,000		3.700.000.000,000		4.300.000.000,000	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					820.000.000,000		820.000.000,000		1.195.000.000,000		820.000.000,000		820.000.000,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	0,44	0,46	0,50	820.000.000,000	0,53	820.000.000,000	0,57	1.195.000.000,000	0,58	820.000.000,000	0,69	820.000.000,000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.750.000.000,000		2.750.000.000,000		2.650.000.000,000		2.750.000.000,000		3.340.000.000,000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	0	15,00	16,67	2.750.000.000,000	20,00	2.750.000.000,000	28,00	2.650.000.000,000	28,33	2.750.000.000,000	28,57	3.340.000.000,000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					130.000.000,000		130.000.000,000		150.000.000,000		130.000.000,000		140.000.000,000	

Meningkatnya kualiats kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	79,87	84,50	89,30	130.000.000,000	95,49	130.000.000,000	98,80	150.000.000,000	98,80	130.000.000,000	98,80	140.000.000,000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					100.000.000,000		100.650.000,000		101.300.000,000		101.950.000,000		102.620.000,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					100.000.000,000		100.650.000,000		101.300.000,000		101.950.000,000		102.620.000,000	
Tercapainya kolaborasi, intergrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan siatem statistik nasisonal (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Nilai)	50	55	60	100.000.000,000	65	100.650.000,000	70	101.300.000,000	75	101.950.000,000	80	102.620.000,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					130.084.898,000		131.100.797,000		132.823.992,000		133.547.199,000		134.864.500,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					130.084.898,000		131.100.797,000		132.823.992,000		133.547.199,000		134.864.500,000	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesipan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	60	62	68	130.084.898,000	70	131.100.797,000	73	132.823.992,000	75	133.547.199,000	80	134.864.500,000	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					500.000.000,000		450.000.000,000		400.000.000,000		450.000.000,000		550.000.000,000	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					250.000.000,000		200.000.000,000		150.000.000,000		200.000.000,000		300.000.000,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan (%)	1,75	1,77	1,79	250.000.000,000	1,80	200.000.000,000	1,85	150.000.000,000	1,90	200.000.000,000	1,95	300.000.000,000	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir (%)	3,33	3,50	3,65		3,80		3,85		3,95		4,15		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni (%)	26,42	27,23	27,50	250.000.000,000	27,61	250.000.000,000	27,70	250.000.000,000	27,75	250.000.000,000	27,80	250.000.000,000	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	0	0	0		0		0		0		0		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni (%)	1,66	1,76	1,80		1,84		1,90		1,95		1,98		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan (%)	3,87	4,60	4,70		4,99		5,10		5,25		5,30		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni (%)	0,30	0,32	0,35		0,40		0,43		0,47		0,50		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	0	0	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	66,67	66,67	66,67		75,00		75,00		80,00		80,00		1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya tata kelola museum					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					1.829.920.666,260		1.846.287.822,410		1.861.782.659,320		1.877.576.637,520		1.893.507.643,650	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.347.630.495,800		1.355.814.074,630		1.363.561.495,880		1.371.458.482,540		1.379.423.982,090	
Meningkatnya dukungan dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.347.630.495,800	100	1.355.814.074,630	100	1.363.561.495,880	100	1.371.458.482,540	100	1.379.423.982,090	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					395.832.142,050		392.379.003,150		398.576.936,200		404.894.529,150		411.266.931,300	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (%)	100	100	100	395.832.142,050	100	392.379.003,150	100	398.576.936,200	100	404.894.529,150	100	411.266.931,300	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					86.458.028,410		98.094.744,630		99.644.227,240		101.223.625,830		102.816.730,260	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	100	100	100	86.458.028,410	100	98.094.744,630	100	99.644.227,240	100	101.223.625,830	100	102.816.730,260	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					482.290.189,000		490.473.764,000		498.221.182,000		506.118.170,000		514.083.668,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					248.923.968,000		253.147.749,000		257.146.416,000		261.222.280,000		265.333.506,000	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan (%)	100	100	100	248.923.968,000	100	253.147.749,000	100	257.146.416,000	100	261.222.280,000	100	265.333.506,000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					202.250.724,000		205.682.546,000		208.931.463,000		212.243.104,000		215.583.473,000	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK (%)	100	100	100	202.250.724,000	100	205.682.546,000	100	208.931.463,000	100	212.243.104,000	100	215.583.473,000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					31.115.497,000		31.643.469,000		32.143.303,000		32.652.786,000		33.166.689,000	
Meningkatkan akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK (%)	100	100	100	31.115.497,000	100	31.643.469,000	100	32.143.303,000	100	32.652.786,000	100	33.166.689,000	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.861.991.126,830		2.892.379.339,380		2.921.147.960,680		2.950.471.995,220		2.980.050.412,150	

3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.337.991.126,830		2.339.379.339,380		2.344.647.960,680		2.349.971.995,220		2.350.050.412,150	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	2.337.991.126,830	100	2.339.379.339,380	100	2.344.647.960,680	100	2.349.971.995,220	100	2.350.050.412,150	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					152.000.000,000		162.000.000,000		167.500.000,000		177.500.000,000		182.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangakp	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	1.435,72	1.450,42	1.468,12	152.000.000,000	1.487,12	162.000.000,000	1.508,38	167.500.000,000	1.530,56	177.500.000,000	1.554,62	182.000.000,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					282.000.000,000		301.000.000,000		309.000.000,000		318.000.000,000		318.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.652,94	3.784,45	3.939,61	282.000.000,000	4.116,89	301.000.000,000	4.322,74	309.000.000,000	4.564,81	318.000.000,000	4.838,70	318.000.000,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					90.000.000,000		90.000.000,000		100.000.000,000		105.000.000,000		130.000.000,000	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	62,48	63,10	63,42	90.000.000,000	63,80	90.000.000,000	64,25	100.000.000,000	64,76	105.000.000,000	65,08	130.000.000,000	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARWISATA					12.073.354.452,000		12.240.833.674,000		12.104.386.808,000		12.561.001.002,000		12.124.017.180,000	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					6.373.354.452,000		6.350.833.674,000		6.349.386.808,000		6.351.001.002,000		6.352.017.180,000	

KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya Tata Kelola Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	20	40	6.373.354.452,000	60	6.350.833.674,000	80	6.349.386.808,000	100	6.351.001.002,000	100	6.352.017.180,000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					2.950.000.000,000		3.050.000.000,000		2.950.000.000,000		3.250.000.000,000		2.950.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi periwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	15,50	19,63	3,35	2.950.000.000,000	11,07	3.050.000.000,000	9,94	2.950.000.000,000	7,44	3.250.000.000,000	6,35	2.950.000.000,000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					750.000.000,000		800.000.000,000		750.000.000,000		850.000.000,000		750.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran parawisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	40,00	53,33	60,00	750.000.000,000	66,67	800.000.000,000	80,00	750.000.000,000	86,67	850.000.000,000	100	750.000.000,000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					1.400.000.000,000		1.400.000.000,000		1.415.000.000,000		1.510.000.000,000		1.412.000.000,000	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	4,62	7,75	10,60	1.400.000.000,000	12,99	1.400.000.000,000	14,66	1.415.000.000,000	15,96	1.510.000.000,000	17,03	1.412.000.000,000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARWISATA DAN EKONOMI KREATIF					600.000.000,000		640.000.000,000		640.000.000,000		600.000.000,000		660.000.000,000	

Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	42,44	50,39	53,00	600.000.000,000	61,69	640.000.000,000	73,31	640.000.000,000	79,79	600.000.000,000	85,16	660.000.000,000	2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					6.662.415.260,000		6.724.979.837,000		6.786.950.313,000		6.850.056.210,000		6.912.073.737,000	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.590.000.000,000		5.610.000.000,000		5.630.000.000,000		5.651.000.000,000		5.675.500.000,000	
Meningkatnya Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase Keterpenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	5.590.000.000,000	100	5.610.000.000,000	100	5.630.000.000,000	100	5.651.000.000,000	100	5.675.500.000,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					404.015.260,000		432.979.837,000		466.350.313,000		504.656.210,000		534.173.737,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Sarana Pertanian yang Terpenuhi (%)	30	33	36	404.015.260,000	39	432.979.837,000	42	466.350.313,000	45	504.656.210,000	48	534.173.737,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					84.000.000,000		85.000.000,000		91.000.000,000		92.000.000,000		97.000.000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)	4.420,92	4.420,92	4.420,92	84.000.000,000	4.420,92	85.000.000,000	4.420,92	91.000.000,000	4.420,92	92.000.000,000	4.420,92	97.000.000,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					190.600.000,000		190.600.000,000		190.600.000,000		190.600.000,000		190.600.000,000	

Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)	0	1	1	190.600.000,000	1	190.600.000,000	1	190.600.000,000	1	190.600.000,000	1	190.600.000,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Pengendalian Penyakit Hewan Non Infeksius (%)	98,70	98,73	98,76		98,79		98,82		98,85		98,88		2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					71.000.000,000		73.600.000,000		76.200.000,000		79.000.000,000		82.000.000,000	
meningkatnya pengandalian dan penenggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	80	100	100	71.000.000,000	100	73.600.000,000	100	76.200.000,000	100	79.000.000,000	100	82.000.000,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	33	35	40		45		50		55		60		2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahann perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (Persentase)	0	0	80	20.000.000,000	85	20.000.000,000	90	20.000.000,000	95	20.000.000,000	100	20.000.000,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					302.800.000,000		312.800.000,000		312.800.000,000		312.800.000,000		312.800.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	80	85	90	302.800.000,000	95	312.800.000,000	97	312.800.000,000	98	312.800.000,000	100	312.800.000,000	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase)	1,85	3,70	5,56		7,41		9,26		11,11		12,96		2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					151.000.000,000		155.000.000,000		172.343.000,000		191.387.000,000		201.662.000,000	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					22.000.000,000		26.000.000,000		26.000.000,000		28.000.000,000		35.275.000,000	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase perusahaan yang memiliki rekomendasi perizinan (%)	6	6	6	22.000.000,000	6	26.000.000,000	6	26.000.000,000	7	28.000.000,000	7	35.275.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					59.000.000,000		59.000.000,000		59.000.000,000		61.000.000,000		62.000.000,000	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan ditribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia (Unit)	529	529	529	59.000.000,000	529	59.000.000,000	529	59.000.000,000	529	61.000.000,000	529	62.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN					20.000.000,000		20.000.000,000		20.000.000,000		25.000.000,000		27.000.000,000	

BARANG PENTING													
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	6,46	6,46	6,46	20.000.000,000	6,46	20.000.000,000	6,46	20.000.000,000	6,46	25.000.000,000	6,46	27.000.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					50.000.000,000		50.000.000,000		67.343.000,000		77.387.000,000		77.387.000,000	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	95	95	95	50.000.000,000	95	50.000.000,000	95	67.343.000,000	95	77.387.000,000	95	77.387.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					48.622.000,000		53.680.642,000		53.785.000,000		53.799.000,000		53.799.000,000	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

meningkatnya realisasi pembangunan industri					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					48.622.000,000		53.680.642,000		53.785.000,000		53.799.000,000		53.799.000,000	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional (%)	6	6	6	48.622.000,000	6	53.680.642,000	6	53.785.000,000	6	53.799.000,000	6	53.799.000,000	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					2.250.107.479,000		2.663.700.623,000		2.684.983.874,000		2.683.078.091,000		2.634.799.760,000	
3.32.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.673.107.479,000		1.892.700.623,000		1.985.983.874,000		1.984.953.091,000		2.061.799.760,000	
Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.673.107.479,000	100	1.892.700.623,000	100	1.985.983.874,000	100	1.984.953.091,000	100	2.061.799.760,000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					115.000.000,000		142.000.000,000		168.000.000,000		60.000.000,000		65.000.000,000	
Menigkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	100	66,99	100	115.000.000,000	100	142.000.000,000	100	168.000.000,000	100	60.000.000,000	100	65.000.000,000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					312.000.000,000		457.000.000,000		339.000.000,000		463.125.000,000		266.000.000,000	
Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Persentase pembangunan kawasan transmigrasi (%)	52	56	70	312.000.000,000	75	457.000.000,000	78	339.000.000,000	82	463.125.000,000	84	266.000.000,000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					150.000.000,000		172.000.000,000		192.000.000,000		175.000.000,000		242.000.000,000	
Meningkatnya pemebrdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)	72	100	100	150.000.000,000	100	172.000.000,000	100	192.000.000,000	100	175.000.000,000	100	242.000.000,000	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					28.955.707.588,110		29.263.155.152,270		29.554.216.776,790		29.850.897.700,120		30.150.152.294,060	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.024.787.788,110		24.279.879.549,680		24.521.375.764,130		24.767.534.356,810		25.015.828.343,430	
Persentase Penunjang urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Persentase Keterpenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	442.302.680,000	100	446.998.987,000	100	451.444.996,000	100	455.976.841,000	100	460.547.998,000	4.01.0.00.0.00.01.0009 - BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	22.898.316.709,110	100	23.141.447.761,680	100	23.371.620.733,130	100	23.606.237.473,810	100	23.842.889.485,820	4.01.0.00.0.00.01.0007 - BAGIAN UMUM
Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Standar					684.168.399,000		691.432.801,000		698.310.035,000		705.320.042,000		712.390.859,610	4.01.0.00.0.00.01.0008 - BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					3.487.400.048,310		3.524.428.764,210		3.559.483.971,600		3.595.215.961,990		3.631.257.922,640	
Meningkkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	475.937.840,000	100	480.991.280,000	100	485.775.389,000	100	490.651.860,000	100	495.570.634,000	4.01.0.00.0.00.01.0001 - BAGIAN PEMERINTAHAN
Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	2.692.152.116,000	100	2.720.737.003,000	100	2.747.798.409,000	100	2.775.382.269,000	100	2.803.205.415,000	4.01.0.00.0.00.01.0003 - BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Persentase Capaian Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase capaian program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (%)	100	100	100	319.310.092,310	100	322.700.481,210	100	325.910.173,600	100	329.181.832,990	100	332.481.873,640	4.01.0.00.0.00.01.0002 - BAGIAN HUKUM DAN HAM
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					1.443.519.751,690		1.458.846.838,380		1.473.357.041,060		1.488.147.381,320		1.503.066.027,990	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Persentase Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase capaian program Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	352.268.242,420	100	356.008.576,240	100	359.549.562,650	100	363.158.912,100	100	366.799.572,210	4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,45	0,47	0,49		0,51		0,53		0,55		0,57		4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PEROKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase capaian program Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	831.238.320,000	100	840.064.290,000	100	848.419.864,000	100	856.936.753,000	100	865.527.527,000	4.01.0.00.0.00.01.0006 - BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Tersusunnya dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah yang Lengkap dan Tepat Waktu	Persentase capaian program Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	260.013.189,270	100	262.773.972,140	100	265.387.614,410	100	268.051.716,220	100	270.738.928,780	4.01.0.00.0.00.01.0005 - BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					18.679.885.736,000		18.709.885.736,000		18.734.885.736,000		18.759.885.736,000		18.784.885.736,000	

4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.563.885.736,000		13.563.885.736,000		13.563.885.736,000		13.563.885.736,000		13.563.885.736,000	
Terpenuhinya Dukungan Kinerja Dalam Pelaksanaa Fungsi Legilasi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	80	80	80	13.563.885.736,000	80	13.563.885.736,000	80	13.563.885.736,000	80	13.563.885.736,000	80	13.563.885.736,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					5.116.000.000,000		5.146.000.000,000		5.171.000.000,000		5.196.000.000,000		5.221.000.000,000	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (%)	80	81	83	5.116.000.000,000	85	5.146.000.000,000	90	5.171.000.000,000	95	5.196.000.000,000	100	5.221.000.000,000	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD (Indeks)	80	81	83		85		90		95		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
5.01 - PERENCANAAN					3.416.787.556,000		3.388.033.551,000		3.397.081.271,000		3.406.882.855,000		3.427.029.712,000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.661.851.924,000		2.623.097.919,000		2.617.145.639,000		2.626.947.223,000		2.637.094.080,000	
Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	2.661.851.924,000	100	2.623.097.919,000	100	2.617.145.639,000	100	2.626.947.223,000	100	2.637.094.080,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					476.629.521,000		476.629.521,000		481.629.521,000		481.629.521,000		491.629.521,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	

pembangunan daerah													
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	476.629.521,000	100	476.629.521,000	100	481.629.521,000	100	481.629.521,000	100	491.629.521,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					278.306.111,000		288.306.111,000		298.306.111,000		298.306.111,000		298.306.111,000	
Meningkatnya kualiatas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembanguan manusia					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	65.845.032,000	100	66.845.032,000	100	68.845.032,000	100	66.845.032,000	100	66.845.032,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan	100	100	100	158.158.705,000	100	163.158.705,000	100	168.158.705,000	100	168.158.705,000	100	168.158.705,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

	Manusia (Persentase)													
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	54.302.374,000	100	58.302.374,000	100	61.302.374,000	100	63.302.374,000	100	63.302.374,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02 - KEUANGAN					125.742.647.927,000		127.091.282.726,000		128.269.945.793,000		129.571.947.949,000		130.886.096.427,000	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					21.925.647.927,000		23.003.282.726,000		24.008.945.793,000		25.038.947.949,000		26.081.096.427,000	
Meningkatnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	21.925.647.927,000	100	23.003.282.726,000	100	24.008.945.793,000	100	25.038.947.949,000	100	26.081.096.427,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					101.535.000.000,000		101.750.000.000,000		101.865.000.000,000		102.080.000.000,000		102.294.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan (%)	31:33	29:31	28:30	100.686.000.000,000	27:29	100.858.000.000,000	26:28	100.930.000.000,000	25:27	101.102.000.000,000	24:26	101.274.000.000,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	61	60	58		56		54		52		50		5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Peningkatan Efisiensi Transaksi Pengelolaan Keuangan Daerah (%)	100	100	100	427.000.000,000	100	449.000.000,000	100	471.000.000,000	100	493.000.000,000	100	514.000.000,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	6,0	5,8	5,6		5,4		5,2		5,0		5,0		5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban APBD (%)	100	100	100	422.000.000,000	100	443.000.000,000	100	464.000.000,000	100	485.000.000,000	100	506.000.000,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	5,0	4,8	4,5		4,3		4,0		3,8		3,5		5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Opini Laporan Keuangan (%)	9	10	11		12		13		14		15		5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					805.000.000,000		832.000.000,000		859.000.000,000		886.000.000,000		913.000.000,000	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase nilai pemanfaatan aset daerah terhadap PAD (%)	0,55	0,75	1,0	805.000.000,000	1,2	832.000.000,000	1,5	859.000.000,000	1,7	886.000.000,000	2,0	913.000.000,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	0,10	0,15	0,16		0,17		0,18		0,19		0,2		5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Manajemen Aset (Kategori)	4	4	4		4		4		4		4		5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					1.477.000.000,000		1.506.000.000,000		1.537.000.000,000		1.567.000.000,000		1.598.000.000,000	

Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	5,0	4,8	4,5	1.210.000.000,000	4,3	1.230.000.000,000	4,0	1.251.000.000,000	3,8	1.271.000.000,000	3,5	1.292.000.000,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	Rasio PAD (%)	6:8	7:9	8:10		9:11		10:12		11:13		12:14		5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)	100	100	100	175.000.000,000	100	180.000.000,000	100	186.000.000,000	100	192.000.000,000	100	198.000.000,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital					46.000.000,000		48.000.000,000		50.000.000,000		52.000.000,000		54.000.000,000	
Meningkatnya penerapan system informasi pengelolaan PAD berbasis digital	Rasio Integrasi Sistem Pengelolaan PAD (%)	90	95	98	46.000.000,000	100	48.000.000,000	100	50.000.000,000	100	52.000.000,000	100	54.000.000,000	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					3.288.412.194,000		3.323.328.084,000		3.356.383.073,000		3.390.076.229,000		3.424.061.669,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.974.538.594,000		1.985.142.573,000		1.985.142.573,000		1.985.142.573,000		1.985.142.573,000	
Meningkatnya penunjang urusan daerah kabupaten	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	1.974.538.594,000	100	1.985.142.573,000	100	1.985.142.573,000	100	1.985.142.573,000	100	1.985.142.573,000	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.313.873.600,000		1.338.185.511,000		1.371.240.500,000		1.404.933.656,000		1.438.919.096,000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	51	62,32	100	84.279.675,000	100	232.512.761,000	100	232.512.761,000	100	232.512.761,000	100	232.512.761,000	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	203.828.249,000	100	203.828.249,000	100	203.828.249,000	100	203.828.249,000	100	203.828.249,000	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	963.746.540,000	100	837.429.344,000	100	870.484.333,000	100	904.177.489,000	100	938.162.929,000	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100	100	62.019.136,000	100	64.415.157,000	100	64.415.157,000	100	64.415.157,000	100	64.415.157,000	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajeral dan fungsional					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajeral dan fungsional					0,000		0,000		0,000		0,000		0,000	
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					467.800.000,000		537.800.000,000		567.800.000,000		597.800.000,000		617.800.000,000	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					467.800.000,000		537.800.000,000		567.800.000,000		597.800.000,000		617.800.000,000	

Meningkatnya Kajian yang Termanfaatkan sebagai Kebijakan Pembangunan Daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100	100	100	336.800.000,000	100	347.300.000,000	100	367.800.000,000	100	392.800.000,000	100	397.800.000,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	100	100	100	131.000.000,000	100	190.500.000,000	100	200.000.000,000	100	205.000.000,000	100	220.000.000,000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.169.476.509,000		9.266.836.700,000		9.359.007.914,000		9.452.958.606,000		9.547.724.308,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.318.004.509,000		6.379.327.900,000		6.411.333.827,000		6.443.842.667,000		6.388.192.717,000	
Meningkatnya penyelenggaraan urusan penunjang perangkat daerah berjalan sesuai standar	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	7.318.004.509,000	100	6.379.327.900,000	100	6.411.333.827,000	100	6.443.842.667,000	100	6.388.192.717,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.601.472.000,000		2.320.633.800,000		2.378.877.212,000		2.438.349.142,000		2.586.745.624,000	

menurunya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran atau proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	70	75	78	1.601.472.000,000	80	2.320.633.800,000	83	2.378.877.212,000	85	2.438.349.142,000	88	2.586.745.624,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					250.000.000,000		566.875.000,000		568.796.875,000		570.766.797,000		572.785.967,000	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	250.000.000,000	Terintegrasi (Integrated)	566.875.000,000	Terintegrasi (Integrated)	568.796.875,000	Terintegrasi (Integrated)	570.766.797,000	Terintegrasi (Integrated)	572.785.967,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		Terdefinisi		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					13.226.663.070,160		13.811.899.125,590		14.318.034.364,170		14.671.218.581,650		15.098.854.233,660	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.512.604.953,070		9.916.604.945,070		10.190.104.943,070		10.428.604.943,070		10.708.304.943,070	
Meningkatnya Capaian Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	100	100	2.600.000.000,000	100	2.700.000.000,000	100	2.800.000.000,000	100	2.900.000.000,000	100	3.000.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN KAROSSA
Meningkatnya capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	95	100	100	2.500.000.000,000	100	2.700.000.000,000	100	2.800.000.000,000	100	2.900.000.000,000	100	3.000.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PANGALE
Presepsi Masyarakata terhadap pelayanan Kantor Kecamatan					1.473.739.104,070		1.473.739.104,070		1.473.739.104,070		1.473.739.104,070		1.473.739.104,070	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TOBADAK
tercapainya kinerja yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	95	95	100	1.150.845.839,000	100	1.155.845.839,000	100	1.157.845.839,000	100	1.160.845.839,000	100	1.161.845.839,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BUDONG-BUDONG

pemerintahan daerah														
tercapainya kinerja yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	95,21	100	100	1.788.020.010,000	100	1.887.020.002,000	100	1.958.520.000,000	100	1.994.020.000,000	100	2.072.720.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOPOYO
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					423.177.983,960		440.461.980,620		508.537.984,180		529.856.782,790		577.786.782,900	
meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	90,00	100	100	100.000.000,000	100	105.000.000,000	100	110.000.000,000	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PANGALE
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%)	0	100	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	280.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN KAROSSA
meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerntahan dan pelayanan publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (%)	92	92	100	40.253.760,960	100	45.537.757,620	100	49.113.761,180	100	55.932.559,790	100	60.862.559,900	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BUDONG-BUDONG
meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan pemerntahan dan pelayanan publik					77.000.000,000		84.000.000,000		93.500.000,000		103.000.000,000		111.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOPOYO
Peningkatan kualitas hidup masyarakat ,peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah ,peningkatan pasrtisipasi masyarakat,serta peningkatan					5.924.223,000		5.924.223,000		5.924.223,000		5.924.223,000		5.924.223,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TOBADAK

kesejahteraan sosial														
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					1.963.923.889,130		2.001.675.955,900		2.059.535.192,920		2.076.700.611,790		2.104.006.263,690	
meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan (%)	96	96	100	15.000.000,000	100	16.000.000,000	100	18.000.000,000	100	19.000.000,000	100	20.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BUDONG-BUDONG
meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	1.577.725.784,130	100	1.594.477.850,900	100	1.610.337.087,920	100	1.626.502.506,790	100	1.642.808.158,690	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOPOYO
meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan (%)	96,00	100	100	100.000.000,000	100	120.000.000,000	100	140.000.000,000	100	140.000.000,000	100	150.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PANGALE
Meningkatnya capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	250.000.000,000	100	250.000.000,000	100	270.000.000,000	100	270.000.000,000	100	270.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN KAROSSA
Peningkatan kesejahteraan ekonomi ,partisipasi aktif dalam pembangunan ,dan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan					21.198.105,000		21.198.105,000		21.198.105,000		21.198.105,000		21.198.105,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TOBADAK
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					348.000.000,000		405.500.000,000		464.000.000,000		501.500.000,000		529.000.000,000	

meningkatnya capaian kinerja capaiaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan (%)	95	95	100	15.000.000,000	100	16.000.000,000	100	17.000.000,000	100	18.000.000,000	100	19.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BUDONG-BUDONG
meningkatnya capaian kinerja capaiaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan (%)	95	100	100	68.000.000,000	100	69.500.000,000	100	72.000.000,000	100	73.500.000,000	100	75.000.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOPOYO
meningkatnya capaian kinerja capaiaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan (%)	95	100	100	115.000.000,000	100	120.000.000,000	100	125.000.000,000	100	130.000.000,000	100	135.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PANGALE
Meningkatnya Capaian Kinerja Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan (%)	100	100	100	150.000.000,000	100	200.000.000,000	100	250.000.000,000	100	280.000.000,000	100	300.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN KAROSSA
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					470.356.244,000		510.856.244,000		543.356.244,000		574.356.244,000		607.356.244,000	
Meningkatnya Capaian kinerja Penyelenggaraan urusan pemeintahan umum	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) (Rasio)	96	96	100	20.000.000,000	100	20.500.000,000	100	23.000.000,000	100	24.000.000,000	100	27.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BUDONG-BUDONG
Meningkatnya Capaian kinerja Penyelenggaraan urusan pemeintahan umum					32.400.000,000		32.400.000,000		32.400.000,000		32.400.000,000		32.400.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOPOYO
Meningkatnya Capaian kinerja Penyelenggaraan urusan pemeintahan umum	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	95	100	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	240.000.000,000	100	260.000.000,000	100	280.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PANGALE
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures) (%)	0	100	100	210.000.000,000	100	230.000.000,000	100	240.000.000,000	100	250.000.000,000	100	260.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN KAROSSA

Peningkatan kesejahteraan ,partisipasi aktif dalam pembangunan dan peningkatan kepercayaan terhadap pemerintah					7.956.244,000		7.956.244,000		7.956.244,000		7.956.244,000		7.956.244,000	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TOBADAK
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					508.600.000,000		536.800.000,000		552.500.000,000		560.200.000,000		572.400.000,000	
Meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan (%)	100	100	100	180.000.000,000	100	180.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	100	200.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN KAROSSA
meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	96	96	100	10.000.000,000	100	10.500.000,000	100	12.000.000,000	100	12.000.000,000	100	14.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BUDONG-BUDONG
meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan (%)	97	100	100	118.600.000,000	100	126.300.000,000	100	131.500.000,000	100	136.200.000,000	100	143.400.000,000	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOPOYO
meningkatnya capaian kinerja pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan (%)	97,00	100	100	200.000.000,000	100	220.000.000,000	100	209.000.000,000	100	212.000.000,000	100	215.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN PANGALE
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.184.525.054,720		2.207.720.029,380		2.229.678.788,600		2.252.061.488,370		2.274.638.355,310	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					1.152.355.054,720		1.168.247.943,380		1.180.212.701,600		1.191.374.088,370		1.198.435.355,310	

Meningkatnya Nilai reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	55,35	57,50	60,50	1.152.355.054,720	63,50	1.168.247.943,380	68,50	1.180.212.701,600	71,50	1.191.374.088,370	72,50	1.198.435.355,310	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					777.450.000,000		781.072.000,000		787.627.000,000		793.190.000,000		800.753.000,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	90,74	93	95	777.450.000,000	100	781.072.000,000	100	787.627.000,000	100	793.190.000,000	100	800.753.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					73.658.000,000		73.750.000,000		74.300.000,000		74.860.000,000		75.950.000,000	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik (%)	93	94	95	73.658.000,000	96	73.750.000,000	97	74.300.000,000	198	74.860.000,000	99	75.950.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					54.000.000,000		55.000.000,000		55.000.000,000		56.000.000,000		58.000.000,000	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi (%)	100	100	100	54.000.000,000	100	55.000.000,000	100	55.000.000,000	100	56.000.000,000	100	58.000.000,000	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					36.612.000,000		37.775.000,000		39.305.000,000		40.877.400,000		42.910.000,000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	36.612.000,000	100	37.775.000,000	100	39.305.000,000	100	40.877.400,000	100	42.910.000,000	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					90.450.000,000		91.875.086,000		93.234.087,000		95.760.000,000		98.590.000,000	
Meningkatnya Penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase peningkatan kewaspadaan nasiaonal dan capaian penanganan konflik (%)	100	100	100	90.450.000,000	100	91.875.086,000	100	93.234.087,000	100	95.760.000,000	100	98.590.000,000	8.01.0.00.0.00.01 .0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					652.472.520.047,067		661.567.535.732,899		670.054.374.194,847		678.213.371.609,874		685.283.884.426,374	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijkan dan program pembangunan. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 diukur melalui dua kategori indikator yang saling melengkapi dan memberikan gambaran komprehensif tentang pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Kedua indikator ini akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja secara berkala, pengambilan keputusan strategism serta penyusunan program dan kegiatan pembangunan yang resposif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan daerah. IKU dan IKD berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutntya.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, IKU mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mencapai target-target strategis yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah.

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1.	Indeks Pendidikan	Indeks	62,97	63,57	64,24	64,83	65,48	
2.	Indeks Kesehatan	Indeks	75,0	76,0	77,0	78,0	79,0	
3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	
4.	Angka Kemiskinan	%	7,07	6,68	6,24	5,84	5,50	
5.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,300	0,290	0,290	0,290	0,290	
6.	Pertumbuhan Ekonomi	%	3,73	4,36	4,51	5,12	5,26	
7.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,63	1,58	1,53	1,51	1,50	
8.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	9,35	9,66	9,80	10,00	10,02	
9.	indeks masyarakat digital	Indeks	43,00	43,50	44,00	44,50	44,7	
10.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	59,70	62,5	64,5	65,02	66,01	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
11.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,25	97,50	98,00	98,25	98,50	
12.	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	50,5	55,5	60,5	65,5	70,00	
13.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	
14.	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B	B	
15.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,01	3,20	3,35	3,50	3,65	
16.	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	76,00	76,65	76,80	76,95	77,05	
17.	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	1,5	1,8	2,1	2,6	2,7	
18.	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	%	35	40	45	50	55	
19.	Persentase Penegakan Perda	%	10	20	30	40	50	
20.	Tingkat Inflasi	(%)	1,450	1,449	1,448	1,447	1,446	
21.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,55	2,63	2,72	2,80	2,85	
22.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,480	0,47	0,46	0,45	0,44	
23.	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	66,67	75,00	75,00	80,00	80,00	
24.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	150,64	148,36	144,99	141,83	138,00	
25.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	87,15	87,28	87,41	87,54	87,67	
26.	Persentase desa yang memiliki lapangan usaha berbasis industri dan jasa layanan pertanian	%	35	40	45	50	50	
27.	Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	%	74,75	7,90	75,01	75,20	75,40	
28.	Nilai SDG's desa	%	46,00	47,00	48,00	49,00	49,00	
29.	Indeks Daya Saing	Indeks	80,05	81,5	82,5	83,5	84,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
	Infrastruktur Daerah							
30.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	87,65	88,5	89,65	90,5	91,65	
31.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	5,70	6,00	6,30	6,50	6,70	

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan perkembangan berbagai aspek pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah. IKD mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Tabel 4. 3 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	0	241.809,87	273.490,27	311.018,66	354.296,07	397.252,81	445.953,86	
2	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	0	28.057,97	3.168,40	37.528,38	43.277,42	45.956,74	48.701,05	
3	Indeks Desa	Indeks	16,67	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	24,07	
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	154,11	152,47	150,64	148,36	144,99	141,83	138,00	
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	73,32	87,01	87,15	87,28	87,41	87,54	87,67	
6	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82,26	82,30	82,35	82,40	82,45	82,50	82,55	
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	73,32	87,02	87,15	87,28	87,41	87,54	87,67	
8	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	
9	persentase keanekaragan hayati yang dikelola	%	20	20	20	20	20	20	20	
10	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Orang	0	0	25	25	25	25	25	
11	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jenis	2	0	4	4	4	4	4	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,53	69,05	69,77	70,45	71,15	71,79	72,50	
2	PDRB per Kapita	Rp/Tahun	30,81	30,82	33,25	33,64	35,26	36,44	38,05	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	0	50,00	65,00	70,00	75,00	80,00	82,00	
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	31,5	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	
5	Angka Kemiskinan	%	7,72	7,37	7,07	6,68	6,24	5,84	5,50	
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Nilai	0,330	0,310	0,300	0,290	0,290	0,290	0,290	
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	2,98	3,63	3,73	4,36	4,51	5,12	5,26	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,70	1,66	1,63	1,58	1,53	1,51	1,50	
9	Tingkat Inflasi	(%)	1,4	1,4	1,450	1,449	1,448	1,447	1,446	
10	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,491	0,490	0,480	0,47	0,46	0,45	0,44	
11	Mewujudkan Layanan Perpustakaan yang Unggul, Mudah Diakses, dan Berbasis Teknologi Informasi	%	10,44	10,45	10,47	10,50	10,55	10,60	10,65	
12	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	69,68	74,43	74,67	74,92	75,16	75,40	75,70	
13	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	71,43	72,29	73,16	74,11	75,07	76,12	77,19	
14	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,74	87	87,25	87,50	87,75	88	88,25	
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	12,82	12,82	12,91	12,93	13,03	13,04	
17	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	7,94	8,02	8,21	8,32	8,50	8,59	8,78	
18	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Kabupaten	%	40	54,17	65,98	70,68	75,38	80,31	85,71	
19	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00	
20	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	37,00	37,04	40,00	42,95	45,90	48,85	51,80	
21	Pertumbuhan investasi daerah	%	5	5	6	6	6	6	6	
22	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B	
23	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	79	80	81	82	83	84	85	
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,06	71,63	72,23	74,28	72,23	72,45	72,23	
25	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0	100	100	100	100	100	100	
26	Nilai Realisasi Investasi Kabupaten	Milyar Rupiah	623.326.891.467	650.000.000.000	669.500.000.000	689.585.000.000	710.272.550.000	731.580.726.500	753.528.148.295	
27	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000	5	3	3	3	2	2	2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		kelahiran hidup)								
28	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	42,70	50,91	57,40	63,89	70,38	71,14	71,91	
29	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	31,5	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	
30	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	90	90	90	90	90	90	90	
31	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
32	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
33	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
34	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
35	Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan	Hari	5	5	6	7	7	7	7	
36	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,08	93,63	96,18	98,73	100,00	100,00	100,00	
37	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	5	6	6,5	6,7	6,8	6,9	7	
38	Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	79	80	81	82	83	84	85	
39	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
41	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%	87,04	90,05	91,00	91,95	92,90	93,85	94,80	
42	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diretribusikan yang Berasal Dari Tanah Maksimum dan tanah Absente	Angka	100	100	100	100	100	100	100	
43	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap		80	81	83	85	90	95	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelayanan Sekretariat DPRD									
44	persentase pelaksanaan promosi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
45	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,54	99,14	99,69	100,00	100,00	100,00	100,00	
46	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	623.336.891.467	700.000.000.000	750.000.000.000	755.000.000.000	765.000.000.000	775.000.000.000	785.000.000.000	
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	0	70,00	71,05	72,15	73,05	74,15	75,05	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,18	3,20	3,23	3,25	3,28	3,30	3,32	
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	8,71	9,01	9,35	9,66	9,80	10,00	10,02	
4	indeks masyarakat digital	Indeks	41,84	42,50	43,00	43,50	44,00	44,50	44,7	
5	Indeks Inovasi Daerah	Angka	58,95	59,30	59,70	62,5	64,5	65,02	66,01	
6	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	0	1	1,5	1,8	2,1	2,6	2,7	
7	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	2,30	2,47	2,55	2,63	2,72	2,80	2,85	
8	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	66,67	66,67	66,67	75,00	75,00	80,00	80,00	
9	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks	69,08	79,7	80,05	81,5	82,5	83,5	84,5	
10	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	5,00	5,30	5,70	6,00	6,30	6,50	6,70	
11	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	
12	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	85	85	87	90	95	98	100	
13	Persentase Kegiatan Strategis yang Telah Diamankan	%	60	62	68	70	73	75	80	
14	Persentase Infrastruktur dan Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	54	55	56	57	58	59	60	
15	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	55,35	58,82	59,85	60,89	61,92	62,96	63,99	
16	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B	
17	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,614	0,62	0,625	0,632	0,64	0,65	0,66	
18	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	4,62	7,75	10,60	12,99	14,66	15,96	17,03	
19	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	0,44	0,46	0,50	0,53	0,57	0,58	0,69	
20	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	40,00	53,33	60,00	66,67	80,00	86,67	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
21	Tingkat Kesipan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	60	62	68	70	73	75	80	
22	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	15,50	19,63	3,35	11,07	9,94	7,44	6,35	
23	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	0	15,00	16,67	20,00	28,00	28,33	28,57	
24	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	42,44	50,39	53,00	61,69	73,31	79,79	85,16	
25	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	79,87	84,50	89,30	95,49	98,80	98,80	98,80	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,35	57,50	60,50	63,50	68,50	71,50	72,50	
2	Indeks Kriminalitas	Indeks	0	0,16	0,15	0,14	0,13	0,12	0,12	
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,38	97,00	97,25	97,50	98,00	98,25	98,50	
4	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Indeks	10	30	50,5	55,5	60,5	65,5	70,00	
5	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	2,73	2,85	3,01	3,20	3,35	3,50	3,65	
6	Persentase Penurunan Gangguan Ketertiban dan Keamanan	%	0	30	35	40	45	50	55	
7	Persentase Penegakan Perda	%	0	0	10	20	30	40	50	
8	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	85,65	86,5	87,65	88,5	89,65	90,5	91,65	
9	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,699	0,719	0,740	0,761	0,782	0,804	0,825	
10	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	BB	BB	AA	AA	
11	Jumlah Insiden Terkait Suku, Ras, dan Agama	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
12	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	40	42	44	46	48	49	50	
13	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada DLH	%	0	0	0	0	0	0	0	
14	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	95	95	100	100	100	100	100	
15	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	0	14,81	18,52	22,22	25,93	29,63	33,33	
16	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	93	94	95	96	97	198	99	
17	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	100	20	40	60	80	100	100	
18	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	85	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
19	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	92	92	100	100	100	100	100	
20	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	%	96	96	100	100	100	100	100	
21	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	95	95	100	100	100	100	100	
22	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Rasio	96	96	100	100	100	100	100	
23	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	10	12	14	16	18	20	22	
24	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	%	96	96	100	100	100	100	100	
25	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	0	0	2	2	2	2	2	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	91,08	93,63	96,18	98,73	100,00	100,00	100,00	
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,54	99,14	99,69	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	37,22	39,04	40,04	41,04	42,04	43,04	44,04	
4	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	0,38	0,93	1,04	1,12	1,37	1,54	1,81	
5	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	62,08	69,51	78,00	78,90	79,00	80,77	81,35	
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	42,7	50,91	57,40	63,89	70,38	71,14	71,91	
7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	53,02	55,52	58,02	60,52	63,02	65,52	68,02	
8	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,96	68,06	69,16	70,26	71,36	72,46	73,56	
9	Rata-rata kemampuan Numerasi SD	Nilai	48,17	51,07	53,97	56,87	59,77	62,67	65,57	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	berdasarkan asesmen nasional									
10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,45	60,95	62,45	63,95	65,45	66,95	68,45	
11	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	23,62	43,66	74,26	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57,78	60,28	62,78	65,28	67,78	70,28	72,78	
13	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	56,68	59,08	61,48	63,88	66,28	68,68	71,08	
14	Iklim Keamanan SD	Nilai	73,82	74,72	75,62	76,52	77,42	78,32	79,22	
15	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,22	71,72	73,22	74,72	76,22	77,72	79,22	
16	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	71,68	72,68	73,68	74,68	75,68	76,68	77,68	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,21	0,25	0,29	0,35	0,42	0,48	0,53	
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	28	25	22	17	14	11	7	
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	Persentase	81,6	80	80	80	80	80	80	
4	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
7	a) Angka Kematian Ibu	%	222,2	122	113	104	95	85	80	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	0	0	20	40	60	80	100	
2	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0	0	40	42,5	45	47,5	50	
4	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	0	100	100	100	100	100	
5	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,28	15	15	15	15	15	15	
6	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	24,55	25,20	26,20	27,20	28,20	29,20	30,20	
7	Persentase Cakupan Drainase	Persentase	1,46	0	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dalam Kondisi Baik									
8	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	4,24	2,13	2,13	4,24	6,35	8,46	10,57	
9	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	0	10	15	20	25	30	35	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Kelompok Usaha Bersama	Kelompok	0	2	4	5	6	7	8	
2	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	
3	Persentase PMKS yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosia	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	100	60	70	80	90	100	100	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	72	75	80	84	88	90	95	
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	mengacu ke rencana tenaga kerja									
3	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	30	40	50	60	70	80	90	
4	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1,12	73	75	77	78	80	82	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	36,27	40	42	44	46	48	50	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	30.14:30.14	25:30.14	23:25	20:23	17:20	15:17	10:15	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	1,99	2	2,5	2,7	2,9	3	3,2	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	10,71	8,93	7,14	5,63	3,57	1,79	1,79	
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	15	15	32	49	66	83	100	
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	33,33	40	42,85	44	46	48	50	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86,2	84	84,5	85	85,5	86	86,5	
AJ	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,02	92,12	92,22	92,32	92,42	92,52	92,62	
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,00	50,20	50,40	50,60	50,80	60,00	60,20	
3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88,61	88,68	88,75	88,82	88,89	88,96	89,03	
4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,50	0,54	0,76	0,98	1,20	1,42	1,64	
5	Cakupan wilayah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	%	50	52	54	56	58	60	62	
6	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah	%	85	87	90	93	96	99	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kabupaten/kota yang tertangani									
7	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	0	0	25	27	29	31	33	
AK	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	Persentase	87	90	95	100	100	100	100	
2	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Profil Kependudukan yang Disusun	Angka	2	2	2	2	2	2	2	
4	Jumlah OPDyang Memanfaatkan Data Kependudukan	Angka	28	32	33	34	34	34	34	
5	Persentase Dokumen Pendaftara Penduduk yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AL	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa	6	7	9	10	12	13	14	
2	Persentase Dokumen Perencanaan Yang sesuai dengan penganggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AM	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,59	2,45	2,40	2,37	2,35	2,25	2,20	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	63	65	70	75	80	80	80	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9	9	8	7	6	5	5	
AN	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65	70	80	85	97	89	90	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	65	70	75	80	85	90	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	70	72	73	75	78	80	85	
4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	88	90	92	94	95	97	98	
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	94	95	96	97	98	99	100	
AO	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	0,12	0,12	0,49	1,38	2,63	3,10	4,08	
2	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	9	9	10	10,5	11	11,5	12	
3	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	2,15	2,15	2,16	2,17	2,18	2,19	3,00	
4	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	79	133	133	133	134	135	136	
5	Persentase KSP/USP yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	79	133	133	133	134	135	136	
6	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	66,95	67	68	69	70	71	72	
AP	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Nilai	2,54	2,60	2,70	2,80	2,90	3,0	3,1	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AQ	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	60	65	70	72	75	77	80	
AR	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	1,75	1,77	1,79	1,80	1,85	1,90	1,95	
2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	26,42	27,23	27,50	27,61	27,70	27,75	27,80	
3	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,66	1,76	1,80	1,84	1,90	1,95	1,98	
4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	3,33	3,50	3,65	3,80	3,85	3,95	4,15	
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	3,87	4,60	4,70	4,99	5,10	5,25	5,30	
6	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,30	0,32	0,35	0,40	0,43	0,47	0,50	
AS	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	10,44	10,45	10,47	10,50	10,55	10,60	10,65	
2	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	%	51,82	51,85	51,88	51,91	51,95	51,99	60,00	
3	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AT	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Sebagai Memori Kolektif Daerah	Indeks	20,6	47,55	47,60	47,65	47,70	47,75	47,80	
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	47	47,55	47,60	47,65	47,70	47,75	47,80	
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	61	62,2	62,5	63	63,5	64	64,5	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	%	100	100	100	100	100	100	100	
AU	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	62,48	63,10	63,42	63,80	64,25	64,76	65,08	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.652,94	3.784,45	3.939,61	4.116,89	4.322,74	4.564,81	4.838,70	
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.435,72	1.450,42	1.468,12	1.487,12	1.508,38	1.530,56	1.554,62	
AV	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	0	0	80	85	90	95	100	
2	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	
3	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	80	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	80	85	90	95	97	98	100	
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	
6	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	Persentase	1,85	3,70	5,56	7,41	9,26	11,11	12,96	
7	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	33	35	40	45	50	55	60	
AW	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase perusahaan yang memiliki rekomendasi perizinan	%	6	6	6	6	6	7	7	
2	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	
3	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia	Unit	529	529	529	529	529	529	529	
4	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	95	95	95	95	95	95	95	
AX	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional	%	6	6	6	6	6	6	6	
AY	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Persentase capaian program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AZ	**5.02 – KEUANGAN**									
1	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio PAD	%	6:8	7:9	8:10	9:11	10:12	11:13	12:14	
3	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	5,0	
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	
5	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	
6	Opini Laporan Keuangan	%	9	10	11	12	13	14	15	
7	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
8	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	61	60	58	56	54	52	50	
BA	**5.03 – KEPEGAWAIAN**									
1	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	51	62,32	100	100	100	100	100	
BB	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	70	75	78	80	83	85	88	
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
BC	**7.01 – KECAMATAN**									
1	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	95,21	100	100	100	100	100	100	
BD	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila	Persentase	90,74	93	95	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan Karakter Kebangsaan									
2	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,68	12,82	12,82	12,91	12,93	13,03	13,04	
2	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	7,94	8,02	8,21	8,32	8,50	8,59	8,78	
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	66,67	66,67	66,67	75,00	75,00	80,00	80,00	
4	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	42,70	50,91	57,40	63,89	70,38	71,14	71,91	
5	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,08	93,63	96,18	98,73	100,00	100,00	100,00	
6	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	98,54	99,14	99,69	100,00	100,00	100,00	100,00	
III	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	91,08	93,63	96,18	98,73	100,00	100,00	100,00	
2	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,54	99,14	99,69	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	37,22	39,04	40,04	41,04	42,04	43,04	44,04	
4	Indeks Pemerataan Guru	Rasio	0,38	0,93	1,04	1,12	1,37	1,54	1,81	
5	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Persentase	62,08	69,51	78,00	78,90	79,00	80,77	81,35	
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi	%	42,7	50,91	57,40	63,89	70,38	71,14	71,91	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dalam pendidikan kesetaraan									
7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	53,02	55,52	58,02	60,52	63,02	65,52	68,02	
8	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,96	68,06	69,16	70,26	71,36	72,46	73,56	
9	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	48,17	51,07	53,97	56,87	59,77	62,67	65,57	
10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59,45	60,95	62,45	63,95	65,45	66,95	68,45	
11	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	23,62	43,66	74,26	100,00	100,00	100,00	100,00	
12	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57,78	60,28	62,78	65,28	67,78	70,28	72,78	
13	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	56,68	59,08	61,48	63,88	66,28	68,68	71,08	
14	Iklim Keamanan SD	Nilai	73,82	74,72	75,62	76,52	77,42	78,32	79,22	
15	Iklim Keamanan SMP	Nilai	70,22	71,72	73,22	74,72	76,22	77,72	79,22	
16	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	71,68	72,68	73,68	74,68	75,68	76,68	77,68	
AB	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	26,42	27,23	27,50	27,61	27,70	27,75	27,80	
2	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	1,75	1,77	1,79	1,80	1,85	1,90	1,95	
3	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	3,33	3,50	3,65	3,80	3,85	3,95	4,15	
4	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,66	1,76	1,80	1,84	1,90	1,95	1,98	
5	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	3,87	4,60	4,70	4,99	5,10	5,25	5,30	
6	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0,30	0,32	0,35	0,40	0,43	0,47	0,50	
1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
V	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	69,68	74,43	74,67	74,92	75,16	75,40	75,70	
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	5	3	3	3	2	2	2	
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	31,5	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	
4	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	90	90	90	90	90	90	90	
VI	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	85	100	100	100	100	100	100	
VII	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,21	0,25	0,29	0,35	0,42	0,48	0,53	
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	28	25	22	17	14	11	7	
3	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	Persentase	81,6	80	80	80	80	80	80	
4	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH										
IX	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	27,9	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	
2	a) Angka Kematian Ibu	%	222,2	122	113	104	95	85	80	
1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
XI	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	0	100	100	100	100	100	100	
XII	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks	69,08	79,7	80,05	81,5	82,5	83,5	84,5	
2	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	55,35	58,82	59,85	60,89	61,92	62,96	63,99	
XIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AA	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Persentase	0	0	20	40	60	80	100	
3	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0	0	40	42,5	45	47,5	50	
4	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	0	0	100	100	100	100	100	
5	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,28	15	15	15	15	15	15	
6	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	24,55	25,20	26,20	27,20	28,20	29,20	30,20	
7	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Persentase	1,46	0	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	
8	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Persentase	4,24	2,13	2,13	4,24	6,35	8,46	10,57	
9	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Persentase	0	10	15	20	25	30	35	
1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN										
XV	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	37,00	37,04	40,00	42,95	45,90	48,85	51,80	
2	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	(%)	79	80	81	82	83	84	85	
3	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	%	87,04	90,05	91,00	91,95	92,90	93,85	94,80	
6	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diretribusikan yang Berasal Dari Tanah Maksimum	Angka	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	dan tanah Absente									
7	Presentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	79	80	81	82	83	84	85	
8	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
XVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN										
XVIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
XX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	154,11	152,47	150,64	148,36	144,99	141,83	138,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL										
XXII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	71,43	72,29	73,16	74,11	75,07	76,12	77,19	
XXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Persentase	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	
2	Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Kelompok Usaha Bersama	Kelompok	0	2	4	5	6	7	8	
3	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data	Persentase	100	60	70	80	90	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	terpadu penanggulangan kemiskinan									
4	Persentase PMKS yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosia	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA										
XXV	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	69,06	71,63	72,23	74,28	72,23	72,45	72,23	
XXVI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	72	75	80	84	88	90	95	
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	1,12	73	75	77	78	80	82	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	30	40	50	60	70	80	90	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	%	36,27	40	42	44	46	48	50	
2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
XXVII	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	
XXIX	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,74	87	87,25	87,50	87,75	88	88,25	
XXX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AA	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	30.14:30.14	25:30.14	23:25	20:23	17:20	15:17	10:15	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	1,99	2	2,5	2,7	2,9	3	3,2	
AB	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,59	2,45	2,40	2,37	2,35	2,25	2,20	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	63	65	70	75	80	80	80	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	9	9	8	7	6	5	5	
2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										
XXXII	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	82,26	82,30	82,35	82,40	82,45	82,50	82,55	
XXXIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	86,2	84	84,5	85	85,5	86	86,5	
2	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	15	15	32	49	66	83	100	
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	10,71	8,93	7,14	5,63	3,57	1,79	1,79	
4	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persentase	33,33	40	42,85	44	46	48	50	
AB	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Persentase	80	85	90	95	97	98	100	
2	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	Persentase	0	0	80	85	90	95	100	
3	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	80	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	Ha	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	
5	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	
6	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	Persentase	33	35	40	45	50	55	60	
7	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani	Persentase	1,85	3,70	5,56	7,41	9,26	11,11	12,96	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	yang Dibentuk dan Beroperasi									
2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
XXXV	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	73,32	87,02	87,15	87,28	87,41	87,54	87,67	
2	persentase keanekaragan hayati yang dikelola	%	20	20	20	20	20	20	20	
3	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Orang	0	0	25	25	25	25	25	
4	Jumlah jenis pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Jenis	2	0	4	4	4	4	4	
XXXVI	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	BB	BB	AA	AA	
2	Persentase Temuan Material Pemeriksaan Keuangan pada DLH	%	0	0	0	0	0	0	0	
3	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persentase	10	12	14	16	18	20	22	
4	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	Persentase	0	0	2	2	2	2	2	
XXXVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,02	92,12	92,22	92,32	92,42	92,52	92,62	
2	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	88,61	88,68	88,75	88,82	88,89	88,96	89,03	
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	50,00	50,20	50,40	50,60	50,80	60,00	60,20	
4	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0,50	0,54	0,76	0,98	1,20	1,42	1,64	
5	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2 eq	0	241.809,87	273.490,27	311.018,66	354.296,07	397.252,81	445.953,86	
6	Cakupan wilayah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	%	50	52	54	56	58	60	62	
7	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang tertangani	%	85	87	90	93	96	99	100	
8	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	0	0	25	27	29	31	33	
2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
XXXIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	87	90	95	100	100	100	100	
2	Persentase Dokumen Pendaftara Penduduk yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Jumlah Profil Kependudukan yang Disusun	Angka	2	2	2	2	2	2	2	
4	Jumlah OPDyang Memanfaatkan Data Kependudukan	Angka	28	32	33	34	34	34	34	
5	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
XLI	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,699	0,719	0,740	0,761	0,782	0,804	0,825	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	0	14,81	18,52	22,22	25,93	29,63	33,33	
XLII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Jumlah Desa Mandiri	Desa	6	7	9	10	12	13	14	
2	Persentase Dokumen Perencanaan Yang sesuai dengan penganggaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN										
XLIV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Indeks	69,08	79,7	80,05	81,5	82,5	83,5	84,5	
2	Persentase Infrastruktur dan Sarana dan Prasarana Penunjang Jalan dalam Kondisi Baik	%	54	55	56	57	58	59	60	
3	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	0,614	0,62	0,625	0,632	0,64	0,65	0,66	
2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN										
XLVI	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Indeks Pemerintahan Digital	Nilai	0	1	1,5	1,8	2,1	2,6	2,7	
2	Persentase Kegiatan Strategis yang Telah Diamankan	%	60	62	68	70	73	75	80	
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	85	85	87	90	95	98	100	
4	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B	
5	Tingkat Kesipan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	60	62	68	70	73	75	80	
XLVII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	65	70	80	85	97	89	90	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60	65	70	75	80	85	90	
3	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	88	90	92	94	95	97	98	
5	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	94	95	96	97	98	99	100	
6	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	%	70	72	73	75	78	80	85	
AB	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	Nilai	2,54	2,60	2,70	2,80	2,90	3,0	3,1	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AC	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	60	65	70	72	75	77	80	
2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
XLIX	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	8,71	9,01	9,35	9,66	9,80	10,00	10,02	
L	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	0,12	0,12	0,49	1,38	2,63	3,10	4,08	
2	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	79	133	133	133	134	135	136	
3	Update dan pengumpulan Data UMKM	Persentase	2,15	2,15	2,16	2,17	2,18	2,19	3,00	
4	Persentase KSP/USP yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan	%	79	133	133	133	134	135	136	
5	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	%	9	9	10	10,5	11	11,5	12	
6	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase	66,95	67	68	69	70	71	72	
AB	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase perusahaan yang memiliki rekomendasi perizinan	%	6	6	6	6	6	7	7	
2	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	95	95	95	95	95	95	95	
3	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia	Unit	529	529	529	529	529	529	529	
4	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	
AC	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional	%	6	6	6	6	6	6	6	
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU										
LII	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	0	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
2	Skor Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50	85,00	86,00	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
3	Pertumbuhan investasi daerah	%	5	5	6	6	6	6	6	
4	Nilai SAKIP	Nilai	CC	B	B	B	B	B	B	
5	Nilai Realisasi Investasi Kabupaten	Milyar Rupiah	623.326.891.467	650.000.000.000	669.500.000.000	689.585.000.000	710.272.550.000	731.580.726.500	753.528.148.295	
6	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	5	6	6,5	6,7	6,8	6,9	7	
7	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	5,00	5,30	5,70	6,00	6,30	6,50	6,70	
9	persentase pelaksanaan promosi penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Rata-rata lama waktu penyelesaian layanan perizinan dan non perizinan	Hari	5	5	6	7	7	7	7	
11	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	623.336.891.467	700.000.000.000	750.000.000.000	755.000.000.000	765.000.000.000	775.000.000.000	785.000.000.000	
2.19.3.26.0.00.02.0000 - DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA										
LIV	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	40,00	53,33	60,00	66,67	80,00	86,67	100	
2	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persentase	4,62	7,75	10,60	12,99	14,66	15,96	17,03	
3	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	15,50	19,63	3,35	11,07	9,94	7,44	6,35	
4	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	0,44	0,46	0,50	0,53	0,57	0,58	0,69	
5	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	42,44	50,39	53,00	61,69	73,31	79,79	85,16	
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	79,87	84,50	89,30	95,49	98,80	98,80	98,80	
7	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	0	15,00	16,67	20,00	28,00	28,33	28,57	
LV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	100	20	40	60	80	100	100	
2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
LVII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Mewujudkan Layanan Perpustakaan yang Unggul, Mudah Diakses, dan Berbasis Teknologi Informasi	%	10,44	10,45	10,47	10,50	10,55	10,60	10,65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
LVIII	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	10,44	10,45	10,47	10,50	10,55	10,60	10,65	
2	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	%	51,82	51,85	51,88	51,91	51,95	51,99	60,00	
3	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AB	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Sebagai Memori Kolektif Daerah	Indeks	20,6	47,55	47,60	47,65	47,70	47,75	47,80	
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	47	47,55	47,60	47,65	47,70	47,75	47,80	
3	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	61	62,2	62,5	63	63,5	64	64,5	
4	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN										
LX	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.435,72	1.450,42	1.468,12	1.487,12	1.508,38	1.530,56	1.554,62	
2	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	62,48	63,10	63,42	63,80	64,25	64,76	65,08	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	3.652,94	3.784,45	3.939,61	4.116,89	4.322,74	4.564,81	4.838,70	
4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM										
LXII	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,57	
LXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Persentase capaian program Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD										
LXV	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		80	81	83	85	90	95	100	
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH										
LXVII	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	58,95	59,30	59,70	62,5	64,5	65,02	66,01	
5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH										
LXIX	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**5.02 – KEUANGAN**									
1	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio PAD	%	6:8	7:9	8:10	9:11	10:12	11:13	12:14	
3	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	
4	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	
5	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	5,0	
6	Opini Laporan Keuangan	%	9	10	11	12	13	14	15	
7	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
8	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	%	61	60	58	56	54	52	50	
5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
LXXI	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**5.03 – KEPEGAWAIAN**									
1	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	51	62,32	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6.01.0.00.0.00.01.0000 – INSPEKTORAT										
LXXII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
2	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	70	75	78	80	83	85	88	
3	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOPOYO										
LXXV	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**7.01 – KECAMATAN**									
1	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	95,21	100	100	100	100	100	100	
7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TOBADAK										
LXXVII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Jumlah Insiden Terkait Suku, Ras, dan Agama	Angka	0	0	0	0	0	0	0	
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BUDONG-BUDONG										
LXXIX	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	%	95	95	100	100	100	100	100	
2	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	92	92	100	100	100	100	100	
3	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dikoordinasikan	%	96	96	100	100	100	100	100	
4	Persentase kasus ketentraman dan ketertiban yang berhasil diselesaikan	%	95	95	100	100	100	100	100	
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	Rasio	96	96	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	%	96	96	100	100	100	100	100	
8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
LXXXI	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	0	50,00	65,00	70,00	75,00	80,00	82,00	
LXXXII	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	40	42	44	46	48	49	50	
2	Persentase peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	%	93	94	95	96	97	198	99	
LXXXIII	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase	90,74	93	95	100	100	100	100	

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN										
2.	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
3.	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	positif	Persentase	91,08	93,63	96,18	98,73	100,00	100,00	100,00	
4.	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	%	98,54	99,14	99,69	100,00	100,00	100,00	100,00	
5.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	positif	%	37,22	39,04	40,04	41,04	42,04	43,04	44,04	
6.	Indeks Pemerataan Guru	positif	Rasio	0,38	0,93	1,04	1,12	1,37	1,54	1,81	
7.	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	positif	Persentase	62,08	69,51	78,00	78,90	79,00	80,77	81,35	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
8.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	positif	%	42,7	50,91	57,40	63,89	70,38	71,14	71,91	
9.	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	53,02	55,52	58,02	60,52	63,02	65,52	68,02	
10.	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	66,96	68,06	69,16	70,26	71,36	72,46	73,56	
11.	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	positif	Nilai	48,17	51,07	53,97	56,87	59,77	62,67	65,57	
12.	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	59,45	60,95	62,45	63,95	65,45	66,95	68,45	
13.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	positif	%	23,62	43,66	74,26	100,00	100,00	100,00	100,00	
14.	Iklim Inklusivitas SD	positif	Nilai	57,78	60,28	62,78	65,28	67,78	70,28	72,78	
15.	Iklim Inklusivitas SMP	positif	Nilai	56,68	59,08	61,48	63,88	66,28	68,68	71,08	
16.	Iklim Keamanan SD	positif	Nilai	73,82	74,72	75,62	76,52	77,42	78,32	79,22	
17.	Iklim Keamanan SMP		Nilai	70,22	71,72	73,22	74,72	76,22	77,72	79,22	
18.	Iklim Kebinekaan SMP	positif	Nilai	71,68	72,68	73,68	74,68	75,68	76,68	77,68	
19.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
20.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	positif	%	26,42	27,23	27,50	27,61	27,70	27,75	27,80	
21.	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	positif	%	1,75	1,77	1,79	1,80	1,85	1,90	1,95	
22.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	positif	%	3,87	4,60	4,70	4,99	5,10	5,25	5,30	
23.	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	positif	%	1,66	1,76	1,80	1,84	1,90	1,95	1,98	
24.	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	positif	%	3,33	3,50	3,65	3,80	3,85	3,95	4,15	
25.	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	positif	%	0,30	0,32	0,35	0,40	0,43	0,47	0,50	
26.	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN										
27.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
28.	Indeks Keluarga Sehat	komulatif	Angka	0,21	0,25	0,29	0,35	0,42	0,48	0,53	
29.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	negatif	Orang	28	25	22	17	14	11	7	
30.	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Imunization (UCI)	komulatif	Persentase	81,6	80	80	80	80	80	80	
31.	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	komulatif	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
32.	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman	komulatif	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
33.	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	komulatif	Persentase	85	100	100	100	100	100	100	
34.	1.02.0.00.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH										
35.	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
36.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	negatif	%	27,9	26,5	25,5	24,5	23,5	22,5	21,5	
37.	a) Angka Kematian Ibu		%	222,2	122	113	104	95	85	80	
38.	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
39.	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
40.	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
41.	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	komulatif	Persentase	0	0	20	40	60	80	100	
42.	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	komulatif	%	0	0	40	42,5	45	47,5	50	
43.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	positif	%	0	0	100	100	100	100	100	
44.	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	positif	%	0,28	15	15	15	15	15	15	
45.	Tingkat Kemantapan Jalan	komulatif	Persentase	24,55	25,20	26,20	27,20	28,20	29,20	30,20	
46.	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	komulatif	Persentase	1,46	0	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	
47.	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	komulatif	Persentase	4,24	2,13	2,13	4,24	6,35	8,46	10,57	
48.	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	komulatif	Persentase	0	10	15	20	25	30	35	
49.	1.04.2.10.0.00.02.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	SERTA PERTANAHAN										
50.	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
51.	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
52.	1.05.0.00.0.00.03.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN										
53.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
54.	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
55.	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
56.	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
57.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan		%	100	100	100	100	100	100	100	
58.	1.05.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH										
59.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
60.	Indeks Risiko Bencana	negatif	Indeks	154,11	152,47	150,64	148,36	144,99	141,83	138,00	
61.	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL										
62.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
63.	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	positif	Persentase	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,1	1,2	
64.	Cakupan Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan Kelompok Usaha Bersama	positif	Kelompok	0	2	4	5	6	7	8	
65.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	negatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
66.	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu	positif	Persentase	100	60	70	80	90	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	penanggulangan kemiskinan										
67.	Persentase PMKS yang menerima Layanan Rehabilitasi Sosia	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
68.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
69.	2.07.3.32.0.00.01.0000 - DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA										
70.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
71.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	%	72	75	80	84	88	90	95	
72.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
73.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	30	40	50	60	70	80	90	
74.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	1,12	73	75	77	78	80	82	
75.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	positif	%	36,27	40	42	44	46	48	50	
76.	2.08.2.14.0.00.02.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
77.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
78.	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	negatif	%	30.14:30.14	25:30.14	23:25	20:23	17:20	15:17	10:15	
79.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	positif	Persentase	1,99	2	2,5	2,7	2,9	3	3,2	
80.	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	KELUARGA BERENCANA										
81.	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	negatif	Rata-rata Anak per Wanita	2,59	2,45	2,40	2,37	2,35	2,25	2,20	
82.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	positif	%	63	65	70	75	80	80	80	
83.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	negatif	%	9	9	8	7	6	5	5	
84.	2.09.3.27.0.00.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN										
85.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
86.	Skor Pola Pangan Harapan	positif	Nilai	86,2	84	84,5	85	85,5	86	86,5	
87.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	negatif	%	10,71	8,93	7,14	5,63	3,57	1,79	1,79	
88.	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	komulatif	Persentase	15	15	32	49	66	83	100	
89.	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	positif	Persentase	33,33	40	42,85	44	46	48	50	
90.	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
91.	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	positif	Persentase	0	0	80	85	90	95	100	
92.	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	positif	Persentase	80	100	100	100	100	100	100	
93.	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	komulatif	Ha	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	4.420,92	
94.	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	komulatif	Persentase	80	85	90	95	97	98	100	
95.	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	komulatif	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	
96.	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian		Persentase	33	35	40	45	50	55	60	
97.	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	komulatif	Persentase	1,85	3,70	5,56	7,41	9,26	11,11	12,96	
98.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP										
99.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
100.	Indeks Kualitas Udara		Indeks	92,02	92,12	92,22	92,32	92,42	92,52	92,62	
101.	Indeks Kualitas Air	positif	Indeks	50,00	50,20	50,40	50,60	50,80	60,00	60,20	
102.	Indeks Kualitas Lahan		Indeks	88,61	88,68	88,75	88,82	88,89	88,96	89,03	
103.	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Poin	0,50	0,54	0,76	0,98	1,20	1,42	1,64	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
104.	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	positif	Ton CO2 eq	0	241.809,87	273.490,27	311.018,66	354.296,07	397.252,81	445.953,86	
105.	Cakupan wilayah pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	positif	%	50	52	54	56	58	60	62	
106.	Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang tertangani	positif	%	85	87	90	93	96	99	100	
107.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	positif	poin	0	0	25	27	29	31	33	
108.	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
109.	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
110.	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	positif	Persentase	87	90	95	100	100	100	100	
111.	Persentase Dokumen Pendaftara Penduduk yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
112.	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
113.	Jumlah Profil Kependudukan yang Disusun	positif	Angka	2	2	2	2	2	2	2	
114.	Jumlah OPDyang Memanfaatkan Data Kependudukan	positif	Angka	28	32	33	34	34	34	34	
115.	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
116.	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
117.	Jumlah Desa Mandiri	komulatif	Desa	6	7	9	10	12	13	14	
118.	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
119.	Persentase Dokumen Perencanaan Yang sesuai dengan penganggaran	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
120.	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
121.	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	komulatif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
122.	2.16.2.20.2.21.04.0000 - DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN										
123.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
124.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	positif	Nilai	65	70	80	85	97	89	90	
125.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	positif	%	60	65	70	75	80	85	90	
126.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	positif	%	70	72	73	75	78	80	85	
127.	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	positif	%	88	90	92	94	95	97	98	
128.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	positif	%	94	95	96	97	98	99	100	
129.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
130.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
131.	Indeks Pembangunan Statistik Sektoral	positif	Nilai	2,54	2,60	2,70	2,80	2,90	3,0	3,1	
132.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
133.	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
134.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
135.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	positif	%	60	65	70	72	75	77	80	
136.	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN										
137.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
138.	Persentase Koperasi Aktif	positif	Persentase	0,12	0,12	0,49	1,38	2,63	3,10	4,08	
139.	Persentase pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	komulatif	%	9	9	10	10,5	11	11,5	12	
140.	Persentase KSP/USP yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan		%	79	133	133	133	134	135	136	
141.	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	komulatif	%	79	133	133	133	134	135	136	
142.	Update dan pengumpulan Data UMKM		Persentase	2,15	2,15	2,16	2,17	2,18	2,19	3,00	
143.	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	positif	Persentase	66,95	67	68	69	70	71	72	
144.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
145.	Jumlah Sarana dan Prasarana perdagangan yang tersedia	komulatif	Unit	529	529	529	529	529	529	529	
146.	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		%	95	95	95	95	95	95	95	
147.	Persentase perusahaan yang memiliki rekomendasi perizinan	komulatif	%	6	6	6	6	6	7	7	
148.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok		%	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	6,46	
149.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
150.	Persentase peningkatan pengelolaan sistem informasi industri nasional	komulatif	%	6	6	6	6	6	6	6	
151.	2.23.2.24.0.00.02.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN										
152.	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
153.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	positif	Indeks	10,44	10,45	10,47	10,50	10,55	10,60	10,65	
154.	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	positif	%	51,82	51,85	51,88	51,91	51,95	51,99	60,00	
155.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
156.	Persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
157.	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	BIDANG KEARSIPAN										
158.	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Sebagai Memori Kolektif Daerah	positif	Indeks	20,6	47,55	47,60	47,65	47,70	47,75	47,80	
159.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	positif	%	47	47,55	47,60	47,65	47,70	47,75	47,80	
160.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	positif	%	61	62,2	62,5	63	63,5	64	64,5	
161.	Persentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah kabupaten yang sesuai NSPK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
162.	Persentase Arsip Dinamis dan Statis yang diarsipkan di Kearsipan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
163.	Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
164.	3.25.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERIKANAN										
165.	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
166.	Angka Konsumsi Ikan	positif	Kg/KAP/TH	62,48	63,10	63,42	63,80	64,25	64,76	65,08	
167.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	positif	Ton	3.652,94	3.784,45	3.939,61	4.116,89	4.322,74	4.564,81	4.838,70	
168.	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	positif	Ton	1.435,72	1.450,42	1.468,12	1.487,12	1.508,38	1.530,56	1.554,62	
169.	4.01.0.00.0.00.01.0004 - BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM										
170.	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH										
171.	Persentase capaian program Perekonomian dan Pembangunan	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
172.	5.02.0.00.0.00.04.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH										
173.	5.02 - KEUANGAN										
174.	Cakupan pembinaan dan pengawasan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	pengelolaan pendapatan										
175.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	negatif	%	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	
176.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	negatif	%	5,0	4,8	4,5	4,3	4,0	3,8	3,5	
177.	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	negatif	%	6,0	5,8	5,6	5,4	5,2	5,0	5,0	
178.	Rasio PAD	positif	%	6:8	7:9	8:10	9:11	10:12	11:13	12:14	
179.	Manajemen Aset	positif	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
180.	Opini Laporan Keuangan	komulatif	%	9	10	11	12	13	14	15	
181.	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)	negatif	%	61	60	58	56	54	52	50	
182.	5.03.5.04.0.00.02.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
183.	5.03 - KEPEGAWAIAN										
184.	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	positif	Persentase	51	62,32	100	100	100	100	100	
185.	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
186.	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
187.	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
188.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT										
189.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
190.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	positif	Persentase	70	75	78	80	83	85	88	
191.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	positif	Level	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	Terintegrasi (Integrated)	
192.	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	positif	Level	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi	
193.	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TOPOYO										
194.	7.01 - KECAMATAN										
195.	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	positif	%	95,21	100	100	100	100	100	100	
196.	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN KAROSSA										
197.	7.01 - KECAMATAN										

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
198.	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
199.	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
200.	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
201.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase	90,74	93	95	100	100	100	100	
202.	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi		%	100	100	100	100	100	100	100	

4.2.3. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) mecakup enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum, urusan perumahan rakyat, urusan ketenteraman, ketertiban dan pelayanan masyarakat, dan urusan sosial. Seluruh indikator SPM sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Tabel 4. 6 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	satuan	Kondisi awal 2024	Target Kinerja Tahun-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	**Urusan Pendidikan**									
1.1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	persen	91,61	100	100	100	100	100	100
1.2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTS)	persen	47,95	100	100	100	100	100	100
1.3	Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	persen	80,70	100	100	100	100	100	100

2	**Urusan Kesehatan**									
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	58,39	100	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	67,23	100	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	70,77	100	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	69,49	100	100	100	100	100	100
5.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	97,03	100	100	100	100	100	100
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara Usia Produktif yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	88,97	100	100	100	100	100	100
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Warga Negara Usia Lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	93,83	100	100	100	100	100	100
8.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	85,33	100	100	100	100	100	100
9.	Pelayanan Kesehatan pada Penderita Diabates Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes miletus yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	85,92	100	100	100	100	100	100
10.	Pelayanan Kesehatan OGDJ Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	persen	100	100	100	100	100	100	100
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terinveksi HIV	Jumlah Warga Negara resiko terinfeksi virus HIV yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	persen	100	100	100	100	100	100	100

	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	persen	92,61	100	100	100	100	100	100
2.	Penyedian pengelolaan limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengelohan air limba domestik	persen	84,44	100	100	100	100	100	100
	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan									
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten	Tersedianya rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Tersedianya rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemda kabupaten/kota	persen	100	100	100	100	100	100	100
	Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hokum perda dan perkada	persen	90,00	100	100	100	100	100	100
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100
3.	Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen	95,00	100	100	100	100	100	100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	persen	100	100	100	100	100	100	100
5.	Pelayanan penyelematan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	persen	96,67	100	100	100	100	100	100
	Urusan Sosial									
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	95,38	100	100	100	100	100	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	98,33	100	100	100	100	100	100

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	persen	96,92	100	100	100	100	100	100
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khusunya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	persen	93,33	100	100	100	100	100	100
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tangkap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	persen	100	100	100	100	100	100	100

4.2.4. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1029 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangkan Menengah Daerah. Penetapan indikator TPB yang menjadi prioritas sepenuhnya mengacu pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

Tabel 4. 7 Indikator TPB Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2030

TPB	Nomor indikator	Target Nasional PERPRES 59/2017)	Isu Strategis terkait TPB	Capaian Aktual					Proyeksi							OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
TPB 2 Tanpa Kelaparan																
TPB 2	2.1.1.(a)	Menurun menjadi 17%	Belum terjaminnya akses bagi semua orang terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun	1,50	1,90	23,20	20,00	31,59	28,50	29,75	30,83	31,78	32,63	33,40	34,11	**Dinas kesehatan**
	2.2.2*	Menurun		26,30	27,80	26,30	28,10	28,10	28,12	28,27	28,40	28,51	28,61	28,70	28,78	**Instalasi Gizi RSUD**
TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera																
TPB 3	3.1.1*	Menurun menjadi 306	Masih adanya kematian bayi baru lahir dan balita	4,00	9,00	6,00	3,00	1,00	2,83	2,50	2,22	1,97	1,75	1,55	1,36	**Dinas kesehatan**
	3.1.2*	Meningkat menjadi 95%		85,20	84,30	97,90	97,90	88,20	91,98	92,71	93,33	93,88	94,38	94,82	95,23	**Dinas kesehatan**
	3.1.2.(a)	Meningkat menjadi 85 %		49,00	54,50	37,30	43,00	37,15	37,27	35,99	34,88	33,90	33,03	32,24	31,52	**Dinas kesehatan**
	3.2.1*	Menurun		-	5,00	-	-	7,00	4,07	4,38	4,65	4,89	5,10	5,29	5,47	**Dinas kesehatan**
	3.2.2*	Menurun		6,00	31,00	30,00	31,00	4,00	23,60	24,19	24,70	25,15	25,56	25,92	26,26	**Dinas kesehatan**
	3.c.1*	Meningkat		481,00	379,00	482,00	926,00	926,50	901,42	949,93	991,95	1.029,01	1.062,17	1.092,16	1.119,54	**Dinas kesehatan**
	3.2.2.(a)	Menurun menjadi 24		7,00	36,00	35,00	10,00	34,00	32,24	33,68	34,94	36,04	37,03	37,93	38,75	**Dinas kesehatan**

TPB	Nomor indikator	Target Nasional PERPRES 59/2017)	Isu Strategis terkait TPB	Capaian Aktual					Proyeksi							OPD
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	3.2.2.(b)	Meningkat menjadi 95%		82,70	72,50	87,20	87,20	92,10	90,22	91,31	92,25	93,08	93,82	94,49	95,11	**Dinas kesehatan**
	3.3.2.(a)	Menurun menjadi 245	Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis, hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	191,75	199,90	163,30	211,00	269,00	234,07	239,08	243,41	247,24	250,66	253,75	256,58	**Dinas kesehatan**
	3.3.1.(a)	Menurun menjadi <0,5%		2,00	3,00	8,00	7,00	12,00	11,17	12,06	12,82	13,50	14,10	14,64	15,14	**Dinas kesehatan**
	3.7.1.(a)	Meningkat menjadi 65%		70,70	77,00	78,00	79,00	82,65	83,00	84,03	84,91	85,69	86,39	87,02	87,60	**DPPKB**
	3.7.1.(b)	Meningkat menjadi 23,5%		16,26	24,69	24,67	26,30	30,50	30,97	32,16	33,20	34,12	34,93	35,68	36,35	**DPPKB**
TPB 4 Pendidikan Berkualitas																
TPB 4	4.1.1.(d)	Meningkat menjadi 114,09%	Belum terjaminnya penyelesaiaan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas	48,00	50,00	114,00	91,26	78,13	100,54	105,02	108,90	112,33	115,39	118,16	120,69	**Dinas Pendidikan**
	4.1.1.(e)	Meningkat menjadi 106,94%		83,65	85,12	84,21	91,25	78,13	84,14	84,07	84,02	83,97	83,93	83,89	83,86	**Dinas Pendidikan**
	4.1.1.(g)	Meningkat menjadi 8,8 tahun		7,24	7,46	7,51	7,61	7,73	7,75	7,79	7,83	7,86	7,89	7,92	7,94	**Dinas Pendidikan**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan Substansial

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya, Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 memperhatikan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045, Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kaupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Barat dan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Mamuju Tengah masa bakti 2025-2030. RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Perangkat Daerah yang disertai dengan Kerangka Pendanaan bersifat indikatif untuk jangka 5 (lima) tahun ke depan.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah periode 2025-2039 merupakan penanggung jawab pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Mamuju Tengah wajib mengkoordinasikan penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Mamuju Tengah menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
4. Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah wajib melaksanakan program pembangunan daerah sebagaimana trertuang dalam RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.
5. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

Selanjutnya, Renstra PD Tahun 2025-2029 dijabarkan menjadi Rencana Kerja Peraangkat Daerah (Renja PD).

6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah periode 2025-2029 dilakukan pada akhir periode RPJMD oleh Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah untuk keseluruhan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah
7. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pelaksanaannya akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi

Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah meliputi pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah yang dalam pelaksanaan teknisnya dilakukan oleh Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah.

RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

1. Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 mencakup indikator Konerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatam, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra PD.
2. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.
3. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:
   (a) Indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan , sub kegiatan, dana indikatif Renja PD Kabupaten Mamuju Tengah;
   (b) Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah telah dijabarkan dalam tujuanb dans asaran Renja Perangkat Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Pengendalian pelaksanaan RPJMD dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029. Pemantauan dan supervisi harus dapat menjamin:

1. Program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029;
2. Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan prioritas tahunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD Kabupaten Mamuju Tengah.

Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bapperida melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Kepala Bapperida Kabupaten Mamuju Tengah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Bupati/ Wakil Bupati Mamuju Tengah.

Manajemen risiko dalam pembangunan daerah dilaksanakan **secara berkesinambungan dan terintegrasi pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan**, guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini dilakukan melalui identifikasi potensi risiko sejak tahap perumusan kebijakan, analisis dampak terhadap sasaran pembangunan, serta penyiapan langkah mitigasi yang adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen pengambilan keputusan yang proaktif, memastikan agar setiap program dan kegiatan pembangunan tetap berjalan sesuai arah kebijakan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta tangguh terhadap berbagai ketidakpastian sosial, ekonomi, dan lingkungan.